LAPORAN

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS, SUMATERA UTARA

(P3RIRRWANS)

TAHUN ANGGARAN 2005-2006



KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / PPN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS
2006

KATA PENGANTAR

Dua tahun lebih program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana NAD dan Kepulauan Nias telah dilaksanakan. Maksud pelaksanaan program tersebut adalah dalam rangka upaya pemulihan di wilayah yang mengalami kerusakan dan kerugian yang sangat besar, yang berdampak pada wilayah dan kehidupan masyarakat secara luas, baik aspek infrastruktur, perumahan, sosial, ekonomi, budaya, pemerintahan dan berbagai sektor lainnya. Pelaku utama dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 adalah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) selain juga pelaku lainnya dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Donor, NGO, koorporasi dan masyarakat.

Di dalam proses pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di atas, telah dilakukan pemantauan dan pengendalian yang dimaksudkan untuk menjaga dan mengawal proses pelaksanaan dan program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, sesuai Perpres Nomor 30 tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, Bappenas ditugaskan untuk melakukan bidang pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk dalam bidang-bidang pemulihan infrastruktur, tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup; sosial budaya; perekonomian; kelembagaan; dan reintegrasi mantan anggota GAM.

Di dalam rangka menjaga dan mengawal proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, serta mendorong percepatan pemulihan yang telah ditargetkan dalam Rencana Induk, Bappenas telah menyusun perangkat pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk, yang bertujuan: *pertama*, memperoleh umpan balik dalam rangka memberikan dukungan bagi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; *kedua*, memastikan bahwa pokok-pokok kebijakan strategis telah dilaksanakan secara konsisten; dan *ketiga*, untuk memudahkan BRR dalam menilai dan mengkoreksi dampak program rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pemulihan kehidupan masyarakat NAD dan Nias Sumatera Utara secara bertahap.

Untuk menjalankan seluruh aktivitas pemantauan dan pengendalian sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perpres tersebut, Bappenas telah membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara (P3RIRRWANS). Fokus pemantauan dan pengendalian meliputi 4 (empat) aspek utama, yaitu : (1) konsistensi, dengan memperbandingkan antar dokumen perencanaan pembangunan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi; (2) koordinasi, dalam upaya membangun komunikasi dan hubungan antar berbagai lembaga pelaksana pembangunan; (3) konsultasi, sebagai ukuran dilaksanakannya

proses partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, dan (4) kapasitas, dalam menilai kemampuan kelembagaan maupun SDM dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kegiatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan P3RIRRWANS pada tahun 2005-2006 tersebut dituangkan dalam bentuk laporan ini dan telah didisseminasikan dan dikonsultasikan kepada seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini dilakukan dalam rangka memperoleh umpan balik *(feed back)* terhadap apa saja yang telah diraih dan diperoleh dari hasil kegiatan pemantauan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Tim P3RIRRWANS tersebut.

Seluruh hasil pemantauan dan pengendalian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan dan arahan kepada berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan proses pemulihan yang ditetapkan dalam Rencana Induk, guna dapat mewujudkan wilayah dan kehidupan masyarakat di wilayah bencana yang lebih baik lagi bila dibandingkan sebelum terjadinya bencana.

Kami menyadari bahwa dalam laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, namun dengan harapan bahwa laporan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi percepatan pemulihan di wilayah bencana di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatera Utara.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak, terutama kepada Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, donor, NGO, korporasi, dan masyarakat luas, yang telah membantu dan bekerjasama dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian program rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Jakarta, 15 Januari 2007

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah,
selaku Ketua Tim Pengarah Tim Koordinasi
Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk
Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara
(P3RIRRWANS)

Dr. Luky Eko Wuryanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR BAGAN xi
DAFTAR DIAGRAM xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 DASAR HUKUM 4
1.3 TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI 11
1.4 SASARAN 11
1.5 RUANG LINGKUP 12
1.6 TAHAPAN PELAKSANAAN 12
1.7 SISTEMATIKA LAPORAN 15

BAB II METODOLOGI DAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN 1
2.1 KERANGKA DASAR EVALUASI KINERJA 1
2.2 KELOMPOK SASARAN DAN SAMPEL 2
2.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 2
2.4 KERANGKA KERJA LOGIS (LOGICAL FRAMEWORK) PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RIRRWANS 4
2.5 KETERKAITAN 4K DAN INDIKATOR INPUT-OUTPUT 6
2.6 KERANGKA EVALUASI DAN INDIKATOR 9

BAB III PERENCANAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TA 2005 DAN TA 2006 1
3.1 RENCANA INDUK 1
3.2 BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (B R R) 27
3.2.1 Dewan Pengarah 27
3.2.2 Dewan Pengawas 29
3.2.3 Badan Pelaksana 31
3.3 PERENCANAAN ANGGARAN 44

BAB IV PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TA 2005 DAN TA 2006 1
4.1 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) 1
4.1.1 Dewan Pengarah BRR 1
4.1.2 Dewan Pengawas BRR 4
4.1.3 Badan Pelaksana BRR 12
4.2 Kementerian Lembaga (K/L) 45
4.3 Pemerintah Daerah 53
4.4 Donor/NGO 58

BAB V HASIL EVALUASI REHABILITASI dan REKONSTRUKSI
TA 2005 dan TA 2006 1
5.1 ASPEK KONSISTENSI 1
5.1.1 Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan 1
5.1.2 Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan dengan Pelaksanaan 17
5.1.3 Konsistensi Antar Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 36
5.2 ASPEK KOORDINASI 41
5.3 ASPEK KONSULTASI 55
5.4 ASPEK KAPASITAS 61

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1
6.1 KESIMPULAN 1
6.1.1 Konsistensi 2
6.1.2 Koordinasi 4
6.1.3 Konsultasi 5
6.1.4 Kapasitas 6
6.2 REKOMENDASI 8
6.2.1 Penyusunan Kebijakan dan Program pada tahun anggaran 2007 khusus terkait RKA K/L 8
6.2.2 Sistem dan Mekanisme pada Proses dan Prosedur Perencanaan dan Pelaksanaan khusus untuk percepatan pelaksanaan RIRRWANS 10
6.2.3 Peran dan Kewenangan Pemerintah Pusat, BRR, Pemda, Donor/NGO, dan kalangan masyarakat luas, untuk percepatan pelaksanaan RIRRWANS 12
6.2.4 Keberlanjutan Program-Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke dalam program-program pembangunan Pemerintah Daerah 14
6.2.5 Penyempurnaan terhadap Rencana Induk, Rencana Strategis, dan Rencana Aksi, untuk mengakomodasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias 15

LAMPIRAN
I. Sandingan Rencana Induk dan Rencana Strategis BRR serta Sandingan rencana Induk dan Pelaksanaan BRR
II. Instrumen Monev P3RIRRWANS perbidang pemulihan
III. Realisasi anggaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Bapel BRR tahun 2005/2006 per 24 November 2006
IV. laporan Prosiding Lokakarya Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias : Membangun Sinergi Menuju Pemulihan Berkelanjutan)

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Ringkasan Skala Kerusakan di NAD dan Nias I-1
Tabel I.2 Frekuensi Gempa Bumi yang Tercatat di Stasiun Geofisika Banda Aceh I-2
Tabel I.3 Korban Tsunami I-2
Tabel I.4 Tabel Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam Di NAD dan Kepulauan Nias I-3
Tabel I.5 Kronologis Penanganan Tsunami I-4
Tabel I.6 Peran dan Tanggung Jawab Kementerian Negara PPN/Bappenas ..... dalam Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias I-7
Tabel I.7 Tahapan Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian I-14
Tabel II.1 Keterkaitan Antara Indikator 4-K dengan Input-Proses-Output II-8
Tabel II.2 Kerangka Evaluasi dan Indikator II-9
Tabel III.1 Program dan Kegiatan Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Rencana Induk .. III-14
Tabel III.2 Program dan Kegiatan Bidang Pemulihan Sosial Budaya Berdasarkan Rencana Induk III-16
Tabel III.3 Program dan Kegiatan Bidang Pemulihan Perekonomian Berdasarkan Rencana Induk III-20
Tabel III.4 Program dan Kegiatan Bidang Pemulihan Kelembagaan Berdasarkan Rencana Induk III-23
Tabel III.5 Program dan Kegiatan Bidang pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) serta Reintegrasi Mantan GAM Berdasarkan Rencana Induk III-25
Tabel III.6 Agenda Program dan Kegiatan Dewan Pengarah III-28
Tabel III.7 Program dan Kegiatan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Bapel BRR III-35
Tabel III.8 Program dan Kegiatan Sosial Budaya Bapel BRR III-38
Tabel III.9 Program dan Kegiatan Bidang Pemulihan Perekonomian Bapel BRR III-39
Tabel III.10 Program dan Kegiatan Kelembagaan Bapel BRR III-40
Tabel III.11 Program dan Kegiatan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat Bapel BRR III-41
Tabel III.12 Kriteria Korban Konflik III-42
Tabel III.13 Tabel Perencanaan BRA III-43
Tabel III.14 Sasaran Pelayanan Untuk Program Reintegrasi BRA III-44
Tabel III.15 Anggaran Biaya dalam Rencana Induk Bidang Pemulihan Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup III-45
Tabel III.16 Anggaran Biaya dalam Rencana Induk Bidang Pemulihan Sosial Budaya III-45
Tabel III.17 Anggaran Biaya dalam Rencana Induk Bidang Pemulihan Perekonomian III-46
Tabel III.18 Anggaran Biaya dalam Rencana Induk Bidang Pemulihan Kelembagaan III-47
Tabel III.19 Anggaran Biaya dalam Rencana Induk Bidang Pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat serta Reintegrasi Mantan GAM III-48

Tabel III.20 Anggaran Biaya Bapel BRR Per Bidang Pemulihan III-49
Tabel III.21 15 Pemain Besar Donor/NGO Dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi III-52
Tabel III.22 Tiga donor terbesar dalam bidang pemulihan Infrastruktur, tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup III-53
Tabel III.23 Donor-donor lainnya commited dengan dana masing-masing III-53
Tabel III.24 Alokasi dana dari donor/NGO utama untuk bidang pemulihan sosial budaya III-54
Tabel III.25 10 Donor/NGO Terbesar di Bidang Pemulihan Perekonomian III-54
Tabel III.26 Donor/NGO Terbesar di Bidang Pemulihan Kelembagaan III-56
Tabel III.27 Komitmen IOM dalam kegiatan proyek di bidang K3M III-57
Tabel III.28 Matrix of Donors Supporting Aceh Reintegration Programs III-58
Tabel III.29 Perencanaan BRA Tahun 2005 ..... III-60
Tabel III.30 Perencanaan BRA Tahun 2006 ..... III-61
Tabel IV.1 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi oleh Dewan Pengarah BRR IV-2
Tabel IV.2 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi oleh Dewan Pengawas BRR IV-5
Tabel IV.3 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel BRR IV-12
Tabel IV.4 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIas oleh Bapel Dalam Bidang Pemulihan Sosial Budaya IV-19
Tabel IV.5 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Oleh BRR Dalam Bidang Pemulihan Perekonomian IV-23
Tabel IV.6 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh BRR Bidang Pemulihan Kelembagaan IV-32
Tabel IV.7 Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD -Nias oleh Bapel BRR Dalam Bidang Ketertiban, Kemanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) IV-38
Tabel IV.8 Realisasi Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel BRR TA 2005/2006 ..... IV-42
Tabel IV.9 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Kementerian Lembaga Bidang Pemulihan Sosial Budaya IV-45
Tabel IV.10 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Kementerian/Lembaga Bidang Pemulihan Perekonomian IV-48
Tabel IV.11 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Sosial Budaya ... IV-53
Tabel IV.12 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Perekonomian ... IV-55
Tabel IV.13 Pembangunan dan rehabilitasi Pasar Tradisional, Induk,Grosir, penunjang di Provinsi NAD Tahun 2005 dan 2006 ..... IV-56
Tabel IV.14 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Kelembagaan IV-58
Tabel IV.15 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Ketertiban, Keamanan dan ketahanan Masyarakat dan Mantan Reintegrasi GAM IV-58
Table IV.16 Distribusi Lokasi Proyek yang Didanai Donor dan NGO Hingga April 2006 ..... IV-59
Tabel IV.17 Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Lembaga Donor/NGO Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup IV-60
Tabel IV.18 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Lembaga Donor/NGO IV-61
Tabel IV.19 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Lembaga Donor/NGO Bidang Pemulihan Perekonomian IV-64

Tabel IV.19x Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kelembagaan oleh Donor IV-67
Tabel IV.20 Hasil Penilaian Kantor Camat Oleh UNORC IV-69
Tabel IV.21 Perencanaan dan Pelaksanaan Beberapa Donor/NGO Bidang Pemulihan Kelembagaan IV-70
Tabel IV.22 Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Bidang Pemulihan Kelembagaan oleh 10 Lembaga Donor/NGO Terbesar Berdasarkan RAN Database IV-70
Tabel IV.23 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Lembaga Donor/NGO Bidang Pemulihan K3M IV-73
Tabel IV.24 Lembaga Donor yang Ikut Berpartisipasi Dalam Program Reintegrasi Mantan GAM IV-74
Tabel IV.25 Pelaksanaan Program Reintegrasi Tahun 2005 dari alokasi anggaran Rp 200,000,000,000 (status 1 Oktober 2006) IV-78
Tabel IV.26 Realisasi Anggaran Tahun 2006 untuk Pelaksanaan Program Reintegrasi oleh BRA (Status 12 Oktober 2006) IV-79
Tabel IV.27 Analisa Perbandingan Program/ Kegiatan BRA Tahun 2005 dan Tahun 2006 ..... IV-80
Tabel V.1 Persandingan antara Rencana Induk dengan Renja K/L dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2006..... V-8
Tabel V.2 Persandingan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintahan Antara Rencana Induk Dengan BRR V-12
Tabel V.3 Persandingan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Hukum Antara Rencana Induk Dengan BRR V-14
Tabel V.4 Persandingan Beberapa Contoh Kegiatan Rencana Induk dan Realisasi dari Bapel RR yang telah menunjukkan tingkat Konsistensi yang baik V-35
Tabel V.5 Konsistensi Antar BRR, Donor/NGO, K/L Subbidang Perdagangan V-38
Tabel V.6 Lembaga Donor World Bank yang Ikut Berpartisipasi Dalam Program Reintegrasi Mantan GAM V-40
Tabel V.7 Rekapitulasi Permasalahan yang Perlu Ditindaklanjuti V-65
Tabel V.8 Pemetaan Posisi Personalia Bapel BRR V-67

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Kedudukan Tim Koordinasi dan Sekretaris Dewan Pengarah	I-6
Gambar I.2	Alur Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian	I-13
Gambar II.1	Kerangka Kerja Logis (Logical Framework) Pemantauan dan Pengendalian RIRRWANS	II-5
Gambar III.1	Sketsa Model Escape Hill	III-5
Gambar III.2	Sketsa Model Escape Road	III-6
Gambar III.3	Penekanan Intensitas Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2005-2009	III-32
Gambar III.4	Skema Penyelesaian Masalah Perumahan	III-37
Gambar IV.1	Pembangunan Perumahan di daerah Kepulauan Nias	IV-18
Gambar IV.2	Pembangunan Dermaga di Nias Selatan	IV-18
Gambar IV.3	Pembangunan gedung sekolah SMU Lhoknga oleh Mercy Malaysia	IV-22
Gambar IV.4	Rehabilitasi Puskesmas di Lhoknga	IV-22
Gambar IV.5	Pembangunan MAN I Meulaboh oleh CARDI-NRC	IV-23
Gambar IV.6	Usaha Konveksi dengan Mesin Jahit Bantuan Sosial dari Dana APBN di Desa Lamdingin, Banda Aceh	IV-29
Gambar IV.7	Industri Batu Bata di Pulau Simeuleu	IV-29
Gambar IV.8	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perintis Kecamatan Meuraksa Bantuan dari FAO kerjasama dengan Dinas Kelautan & Perikanan NAD dan BRR	IV-30
Gambar IV.9	Pasar Ikan Penayung di Banda Aceh Bantuan dari CHF kerjasama dengan Walikota Banda Aceh, Dinas Tata Kota Banda Aceh, Dinas Pasar Kota Banda Aceh dan BRR	IV-30
Gambar IV.10	Pasar Grosir Lambaro, Banda Aceh Bantuan dari JICS	IV-31
Gambar IV.11	Gedung Tempat Pendaratan Ikan Pantai Lampulo Bantuan dari GTZ	IV-31
Gambar IV.12	Bantuan Kapal nelayan/armada tangkap dari Kuwait Red Crescent Society	IV-32
Gambar IV.13	Rehabilitasi Kantor Gubernur Provinsi NAD	IV-34
Gambar IV.14	Pembangunan Rumah Dinas Hakim Provinsi NAD	IV-35
Gambar IV.15	Lokasi Pembangunan Kantor Mahkamah Syariah Provinsi NAD	IV-35
Gambar IV.16	Bale Musyawarah di Provinsi NAD Dengan Sumber Dana dari Departemen PU	IV-36
Gambar IV.17	Pembangunan Mako Brimobda di Lingke, Banda Aceh	IV-41
Gambar IV.18	Pembangunan Asrama Polisi di Lamjamee, Banda Aceh	IV-41
Gambar IV.19	Pembangunan Asrama TNI di Benteng, Pidie	IV-42
Gambar V.1	Peta Regionalisasi BRR	V-50
Gambar V.2	Skema Sinergi Pemda-BRR	V-66
Gambar V.3	Struktur Organisasi Badan Pelaksana BRR	V-68

DAFTAR BAGAN

Bagan IV.1	Persentase realisasi DIPA 2005 oleh BRR	IV-43
Bagan IV.2	Persentase pelaksanaan DIPA L-2006 oleh BRR	IV-43
Bagan IV.3	Persentase pelaksanaan DIPA 2006 oleh BRR	IV-44
Bagan IV.4	Perencanaan dan Pelaksanaan Beberapa Donor/NGO Bidang Pemulihan Sosial Budaya	IV-63
Bagan IV.5	Persentase Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi beberapa Donor/NGO Terbesar Bidang Pemulihan Sosial Budaya	IV-63
Bagan IV.6	Perencanaan dan Pelaksanaan Beberapa Donor/NGO Bidang Pemulihan Perekonomian	IV-66
Bagan IV.7	Persentase Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi beberapa Donor/NGO Terbesar Bidang Pemulihan Perekonomian	IV-67
Bagan IV.8	Perencanaan dan Pelaksanaan Beberapa Donor/NGO Bidang Pemulihan Kelembagaan	IV-72
Bagan IV.9	Persentase Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Beberapa Donor/NGO Terbesar Bidang Pemulihan Kelembagaan	IV-72

DAFTAR DIAGRAM

Diagram III.1 Alokasi Anggaran Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi DIPA 2005 ..... III-49
Diagram III.2 Alokasi Anggaran Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi DIPA 2006-L III-50
Diagram III.3 Alokasi Anggaran Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi DIPA 2006 ..... III-50
Diagram III.4 BRR and top 10-players manage 75% of total portfolio III-51
Diagram III.5 Rencana Anggaran Sesuai Komitmen Donor/NGO Bidang Pemulihan Infrastruktur, tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup III-52
Diagram III.6 Rencana Anggaran Sesuai Komitmen Donor/NGO Bidang Pemulihan Sosial Budaya III-53
Diagram III.7 Rencana Anggaran Sesuai Komitmen Donor/NGO Bidang Pemulihan Perekonomian III-55
Diagram III.8 Persentase Komitmen Donor/NGO Bidang Pemulihan Kelembagaan III-56
Diagram III.9 Rencana Anggaran Sesuai Komitmen Donor/NGO Bidang Pemulihan Ketertiban, Keamanan, dan Ketahanan Masyarakat (K3M) III-57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias sudah berlangsung selama lebih dari dua tahun. Dalam masa jangka waktu tersebut banyak hal yang sudah dilakukan dalam rangka mencapai perbaikan kondisi dan keadaan di wilayah bencana tersebut. Tapi masih banyak juga hal yang masih belum terlaksana di lapangan dalam rangka pemulihan di wilayah bencana. Ini tidak terlepas akibat dari besarnya dampak bencana baik kerusakan maupun kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa tsunami dan gempa di wilayah NAD pada akhir tahun 2004. Akibat bencana tersebut telah menyebabkan lumpuhnya kehidupan masyarakat secara kuas dan meluluhlantakkan berbagai sarana dan prasarana publik. Dengan kondisi tersebut kehidupan masyarakat menjadi terganggu dan kondisi wilayah menjadi hancur dan mengalami kondisi yang sangat parah. Dengan demikian perlu dilakukan berbagai upaya perencanaan yang sistematis dan terencana.

Secara umum kerusakan dan kerugian akibat bencana digambarkan sebagai berikut :

Tabel I.1
Ringkasan Skala Kerusakan di NAD dan Nias

#	Sektor	NAD	NIAS
1.	Perumahan	Sebanyak 105.000 rumah rusak, termasuk prasarana/sarana air bersih dan sanitasi lingkungan	15.000 unit rumah rusak
2.	Infrastruktur	2260 jembatan sepanjang 2.450 meter, dan jalan sepanjang 5.403 km : terdiri dari jalan nasional, provinsi, kabupaten dan desa) rusak.	12 pelabuhan rakyat, 800 km jalan kab dan desa, 266 km jalan provinsi, dan 403 jembatan rusak.
3.	Kelembagaan	Dalam hal aspek kelembagaan terjadi penurunan fisik dan non fisik	Penurunan kapasitas kelembagaan. 1.052 gedung pemerintah rusak
4.	Pendidikan	sebanyak 150.000 siswa kehilangan sekolah 1.832 guru menjadi korban 17.228 siswa menjadi korban dan 2.112 sekolah rusak	sebanyak 755 sekolah rusak.
5.	Kesehatan	terdapat 690 puskesmas rusak dan mengalami kekurangan tenaga kesehatan	2 rumah sakit rusak 173 puskesmas rusak
6.	Ekonomi	Akan mengalami penurunan GDP sebesar 14%. 23.000 hektar sawah rusak 100.000 pengusaha kecil kehilangan mata pencaharian.	Para petani dan nelayan kehilangan pekerjaan dan 219 pasar unit mengalami kerusakan

(*Sumber : Laporan Kegiatan Enam Bulan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias; "Meletakkan fondasi membangun harapan", Oktober 2005, hal. 18.).*

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi dan Geofisika Banda Aceh, wilayah Aceh merupakan wilayah rawan gempa. Hal ini disebabkan letak geografis Aceh yang terletak di antara dua sesar aktif yang setiap saat dapat menimbulkan atau melahirkan gempa apapun tingkat tinggi yang mendorong berbagai tsu-nami.

Tabel I.2
Frekuensi Gempa Bumi yang Tercatat
di Stasiun Geofisika Banda Aceh

Tahun	Jumlah Gempa Bumi Tercatat		
	Pusat di Propinsi NAD	Pusat di Luar NAD	Jumlah Total
1998	1.783	246	2.029
1999	1.206	108	1.314
2000	143	970	1.113
2001	1.006	105	1.111
2002	1.191	87	1.278
2003	1.467	139	1606

Sumber: Stasiun Meteorologi dan Geofisika Banda Aceh, 2005

Berdasarkan data di atas, struktur geografis Aceh yang rawan gempa, membuat Aceh sering ditimpa gejala alam berupa gempa. Namun, gempa 26 Desember 2004 lalu sangat dahsyat sehingga menimbulkan korban gempa, tidak hanya di wilayah Aceh yang menjadi wilayah pusat gempa, tetapi juga sampai ke negara-negara tetangga. Data berikut ini menunjukkan jumlah korban jiwa akibat bencana tersebut.

Tabel I.3
Korban Tsunami

Negara	Korban	
	Tewas	Hilang
Indonesia	128.000	37.000
Sri Lanka	31.000	4.000
Pesisir Tenggara dan India	8.850	-
Thailand	5.300	2.800
India dan Nikobar	1.900	5.500
Somalia	150 – 200	-
Maladewa	81	-
Malaysia	68	-
Myanmar	61	-
Tanzania	10	-
Banglades	2	-
Kenya	1	-
Seycheless	1	-

Sumber: bbcnews.com (2005)

Atas dasar petunjuk Presiden Republik Indinesia, maka Bappenas dan World Bank ditunjuk untuk melakukan penilaian terhadap kerusakan dan kerugian akibat bencana alam. Hasil penilaian kerusakan dan kerugian dikeluarkan pada 18 Januari 2005. Dalam laporan penilaian ini diketahui bahwa kerugian dan kerusakan akibat bencana ini secara materi mencapai 41,401 trilyun rupiah.

Tabel I.4
Tabel Kerusakan dan Kerugian Bencana Alam
Di NAD dan Kepulauan Nias

SEKTOR	KERUSAKAN	KERUGIAN	TOTAL
Sektor sosial, termasuk perumahan, pendidikan, kesehatan, agama dan budaya	13,657	532	16,186
Sektor infrastruktur, termasuk: transport, komunikasi, energi, air dan sanitasi, bendungan	5,915	2,239	8,154
Sektor produksi, termasuk: agribisnis, perikanan, industri dan perdagangan	3,273	7,721	8,154
Lintas sektor, termasuk: lingkungan, pemerintahan, bank dan keuangan	2,346	3,718	6,064
TOTAL (Rp. Triliun)	27,191	14,21	41,401

Sumber: Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias Sumatera Utara, 2005

Melihat kenyataan di atas, pemerintah dan masyarakat Indonesia, serta dunia internasional bersimpati terhadap bencana yang menimpa wilayah NAD dan Kepulauan Nias. Tahap perama dilakukan upaya tanggap darurat yaitu menolong korban yang masih hidup, mengevakuasi jenazah, dan memberi pertolongan segera untuk menyelamatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tertimpa musibah. Setelah berakhirnya masa tanggap darurat, maka dilanjutkan dengan langkah-langkah rehabilitasi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat Aceh. Kemudian dilanjutkan lagi dengan tindakan rekonstruksi dan pembangunan kembali wilayah NAD dan Kepulauan Nias supaya dapat kembali normal seperti sebelumnya, bahkan diharapkan dapat lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Upaya menanggulangi dampak bencana yang luas di NAD dan Kepulauan Nias tersebut maka dilakukan upaya dan tindakan secara sistematis, terencana, dan terintegrasi. Untuk itu maka Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi yaitu perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana, konsisten dan berkelanjutan untuk memperbaiki dan memulihkan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk memungkinkan terjadinya normalisasi atau terjadinya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana.

Sedangkan yang dimaksud dengan rekonstruksi yaitu perumusan kebijakan, dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali semua prasarana, sarana, kelembagaan baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca

bencana. Rencana induk ini berlaku selama empat tahun sesuai dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009.

Berikut ini dapat digambarkan tahapan-tahapan dalam pross penanggulangan bencana gempa dan tsunami di wilayah NAD dan Kepulauan Nias.

Tabel I.5
Kronologis Penanganan Tsunami

Tanggal	Peristiwa
26-Des-04	Gempa 9,3 skala Richter dan tsunami menghancurkan Aceh dan Nias. Korban tewas lebih dari 200 ribu orang, kerugian material Rp 46 triliun. Presiden menunjuk Menko Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Sosial sebagai koordinator penanggulangan tsunami Aceh dan Nias.
06-Jan-05	Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pasca-tsunami
11-Jan-05	Paris Club setujui penundaan pembayaran utang Indonesia sebesar USS 3 miliar
15-Apr-05	Presiden tanda tangani Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Nias
29-Apr-05	Presiden mengangkat Kuntoro mangkusubroto sebagai kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias
25-Jun-05	Penandatanganan 172 proyek rekonstruksi Aceh senilai USS 585 juta

Sumber: Surat Kabar Harian Kompas, 2005

Penanganan terhadap korban bencana oleh pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang besar untuk segera membangun kembali Propinsi Naggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan penyusunan program pembangunan pada tahapan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Usaha ini didukung oleh dunia internasional dengan wujud memberikan bantuan berupa hibah maupun pinjaman untuk pembiayaan program pembangunan di NAD.

1.2 DASAR HUKUM

Sebagaimana diatur dalam Perpres No. 30 Tahun 2005 pasal 5, disebutkan bahwa Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Induk yang sudah dituangkan ke dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk kepentingan tersebut, melalui Kepmen Negara PPN/Kepala Bappenas No. 338/M.PPN/12/2005 maka dibentuklah Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara (P3RIRRWANS). Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara terdiri atas Ketua/Wakil Ketua Tim Pengarah, Ketua/Wakil Ketua Tim Pelaksana serta Kelompok Kerja-Kelompok Kerja :

1. Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
2. Bidang Pemulihan Sosial Budaya
3. Bidang Pemulihan Perekonomian
4. Bidang Pemulihan Kelembagaan
5. Bidang Reintegrasi Mantan Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Adapun tugas-tugas kelompok kerja ini secara umum adalah :

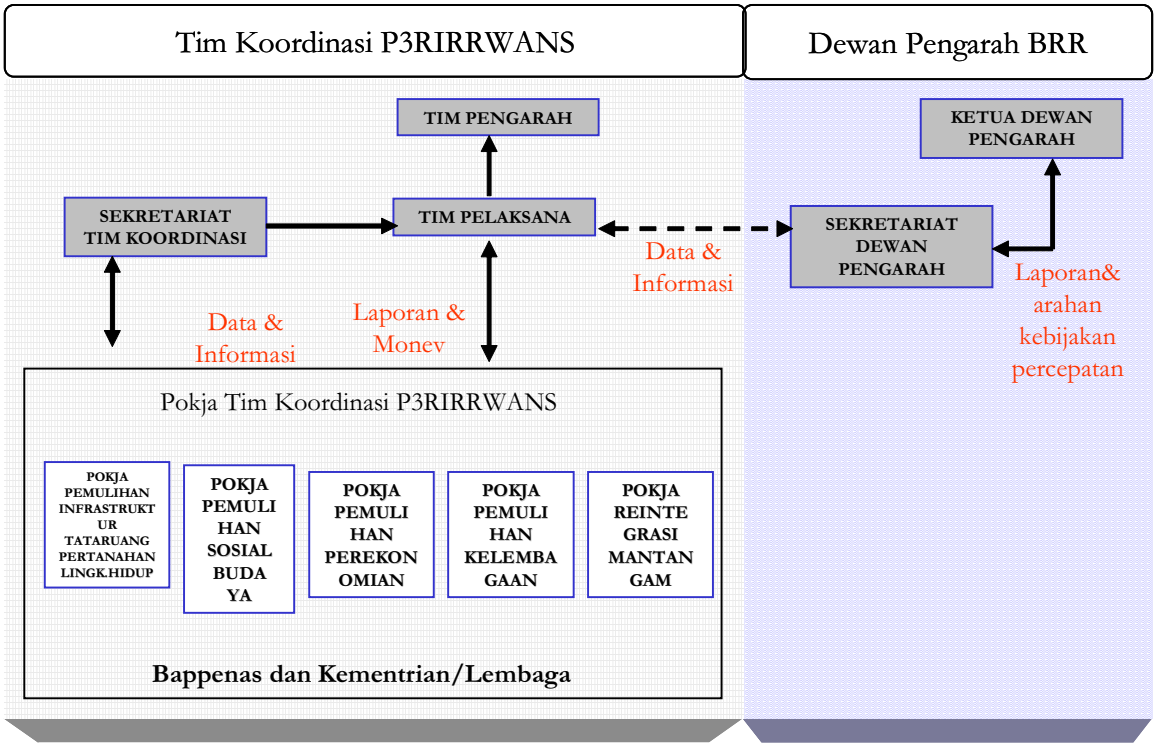
a. Mempersiapkan dan menyusun bahan arahan kebijakan dan strategi pemantauan dan pengendalian, serta menyusun sistem dan prosedur pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pemulihan masing-masing.
b. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi dari bidang pemulihan masing-masing, melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, serta Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias.
c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk sesuai bidang pemulihan masing-masing, dengan Sekretariat Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias.
d. Menyiapkan rekomendasi arahan dan kebijakan yang diperlukan Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias.
e. Melaporkan kepada Tim Pengarah mengenai hasil-hasil pelaksanaan koordinasi kegiatan pemantauan dan pengendalian, serta rekomendasi arahan dan kebijakan yang telah dirumuskan.
f. Selain itu, setelah terbentuknya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Wilayah Aceh dan Nias sesuai dengan Perppu No. 2 Tahun 2005 tanggal 16 April tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang kemudian menjadi UU No. 10 Tahun 2005, dibentuk Badan Pelaksana, Dewan Pengarah dan Dewa Pelaksana sesuai Keppres No.63 tanggal 29 April 2005 tentang pengangkatan keanggotaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, Menteri Negara Perencanaan Nasional/ Kepala Bappenas adalah selaku Sekretaris Dewan Pengarah BRR.

Sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa pimpinan kementerian/lembaga/ kepala satuan kerja perangkat daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah pada tahun sebelumnya. Selanjutnya Menteri Negara Perencanaan Pembangunan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan untuk periode berikutnya. Pemantaun dan evaluasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan proses perencanaan.

Dalam membantu Presiden, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional diberikan tugas untuk membantu tugas presiden dalam bertugas untuk merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional. Di dalam melaksanakan tugasnya, kementerian ini mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut; 1. Pemantauan, evaluasi, analisis di bidang perencanaan pembangunan nasional. 2. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Berdasarkan kedudukan, tugas, dan fungsi tersebut maka Bappenas melakukan proses pemantauan dan pengendalian terhadap proses-proses pembangunan nasional secara menyeluruh.

Adapun kedudukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Sekretaris Dewan Pengarah adalah sebagai berikut:

Gambar I.1
Kedudukan Tim Koordinasi dan Sekretaris Dewan Pengarah



Sesuai dengan peran dan tanggung jawab Kementerian Negara Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas yang terkait dengan proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias tersebut, maka kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2005 dan semester I tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Tabel I.6
Peran dan Tanggung Jawab Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias

#	Peran dan Tanggung Jawab	Dasar Hukum	Hasil Yang telah dicapai	Hal-hal yang telah dilaksanakan TA 2005	Rencana Tindak Lanjut TA 2006
1	Selaku Penanggung Jawab Penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut	Inpres No 1 Tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005, tentang tanggung jawab BAPPENAS dalam penyusunan Rencana Induk	Terbitnya Perpres No. 30 Tahun 2005 tanggal 15 April 2005, tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut	Melakukan Sosialisasi dan konsultasi publik dalam rangka penjabaran rencana induk kedalam rencana aksi	
2	Selaku penanggung jawab pemantauan dan pengendalian rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut	Perpres No. 30 Tahun 2005 tanggal 15 April 2005, khususnya pasal 5 yang menugaskan BAPPENAS dalam melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk	1. Terbitnya Perppu No. 2 Tahun 2005 tanggal 16 April tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No 10 Tahun 2005 pada tanggal 25 Oktober 2005; 2. Terbitnya Perpres No. 34 Tahun 2005, tanggal 29 April 2005 tentang susunan dan tata kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias;	1. Melakukan koordinasi bersama-sama Bappeda Provinsi NAD dan Provinsi Sumut dalam fasilitasi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias; 2. Melakukan pemantauan dan pengendalian rencana induk yang diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi.	1. Menyusun perangkat pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk dengan terbitnya Kepmen PPN/ Ka. BAPPENAS Nomor: KEP. 338/M. PPN/12/2005, tanggal 22 Desember 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Koordinasi pemantauan dan pengendalian Rencanan Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias; 2. Ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah No. KEP.004/D.7/12/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang

#	Peran dan Tanggung Jawab	Dasar Hukum	Hasil Yang telah dicapai	Hal-hal yang telah dilaksanakan TA 2005	Rencana Tindak Lanjut TA 2006
			3. Terbitnya Keppres No. 63M, tanggal 29 April 2005 tentang pengangkatan keanggotaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias.		Pembentukan Sekretariat Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias. 3. Penyusunan laporan Monev Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Semester I.
3	Selaku Sekretaris Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut	1. Perppu No. 2 Tahun 2005 tanggal 16 April tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut, yang kemudian menjadi UU No. 10 Tahun 2005; 2. Perpres No. 34 Tahun 2005, tanggal 29 April 2005 tentang susunan dan tata kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias;	1. Konsolidasi Internal Dewan Pengarah 2. Membentuk kelembagaan dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengarah dengan terbitnya Keputusan Menteri Polhukam Nomor: KEP.34/MENKO/ POLHUKAM/ 06/ 2005, tanggal 9 Juni 2005 tentang pembentukan Sekretariat Dewan Pengarah	1. Pelaksanaan 4 (empat) kali rapat bulanan anggota dewan pengarah, 1 (satu) kali kunjungan lapangan, 9 (sembilan) kali rapat anggota sekretariat dan 1 (satu) kali Sidang Kabinet Terbatas sejak bulan Mei sampai Oktober 2005, yang dilaksanakan di Aceh dan Jakarta. 2. Dibangunnya jaringan koordinasi antara 3 (tiga) komponen BRR Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.	Telah disusunnya Agenda Kerja Dewan Pengarah BRR NAD – Nias TA 2006

#	Peran dan Tanggung Jawab	Dasar Hukum	Hasil Yang telah dicapai	Hal-hal yang telah dilaksanakan TA 2005	Rencana Tindak Lanjut TA 2006
		3. Keppres No. 63, tanggal 29 April 2005 tentang pengangkatan keanggotaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias.	3. Menyusun rencana dan agenda kerja, dikaitkan dengan rencana kerja yang disusun oleh Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, 4. Melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait di tingkat Pusat dan Daerah serta dengan komunitas Donor, dalam rangka memperoleh, masukan dalam penyusunan dan pemantapan agenda serta rencana kerja; 5. Mempersiapkan konsep awal laporan kegiatan Dewan Pengarah BRR kepada Presiden untuk memperoleh arahan lebih lanjut.	3. Pemberian masukan kepada Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dalam menjalankan amanat Perpres 30/2005. 4. Pelaksanaan Analisis Terhadap Usulan Rencana Aksi dan Alokasi Pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Tahun Anggaran 2005 yang bekerja sama dengan Sekretariat Tim R3WANS di Bappenas pada bulan September 2005. 5. Seluruh komponen Dewan Pengarah telah melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kaitannya dengan melihat perkembangan pembangunan di provinsi tersebut	
4.	Selaku penanggung jawab dalam koordinasi penyusunan rencana reintegrasi mantan GAM dalam masyarakat Aceh, sebagai pelaksanaan Nota Kesepakatan antara Pemerintah RI dan GAM	Inpres No. 15 Tahun 2005 tentan Pelaksanaan Nota Kesepakatan antara Pemerintah RI dan GAM	1. Konsepsi rencana reintegrasi mantan GAM dalam masyarakat Aceh, yang dijadikan rujukan oleh seluruh kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah NAD 2. Komitmen awal dari komunitas donor internasional untuk membantu proses reintegrasi mantan GAM dalam masyarakat Aceh	1. Koordinasi interdep dengan kementerian/ lembaga terkait dalam penyusunan konsep awal rencana reintegrasi mantan GAM dalam masyarakat Aceh 2. Koordinasi dengan komunitas donor internasional dalam menjaring komitmen/ pledges bantuan untuk proses reintegrasi	1. Menindaklanjuti rencana reintegrasi secara menyeluruh dalam jangka menengah dan panjang, untuk menjadi acuan bagi seluruh kementerian/ lembaga dan donor 2. Mengkoordinasikan rencana kegiatan reintegrasi yang akan didanai melalui alokasi APBN TA 2006 dan dukungan pendanaan donor

#	Peran dan Tanggung Jawab	Dasar Hukum	Hasil Yang telah dicapai	Hal-hal yang telah dilaksanakan TA 2005	Rencana Tindak Lanjut TA 2006
			3. Alokasi anggaran tambahan TA 2005 sebesar Rp200 miliar untuk mendukung proses awal reintegrasi jangka pendek	3. Memfasilitasi Pemda Provinsi NAD untuk melaksanakan lokakarya DDR (demobilisasi, disarmament dan reintegrasi) , melalui bantuan UNDP dan USAID	3. Mengawal, memantau dan mengendalikan pelaksanaan rencana reintegrasi yang akan dikoordinasikan bersama Kemenko Polhukam
			4. Alokasi anggaran TA 2006 sebesar Rp600 miliar untuk mendukung lanjutan proses reintegrasi dalam jangka menengah dan jangka panjang	4. Melakukan koordinasi dengan Menko Polhukam, Menko Kesra, Departemen Keuangan bersama DPR-RI di dalam pengalokasian rencana anggaran tambahan TA 2005 dan anggaran TA 2006 untuk proses reintegrasi	4. Memberikan fasilitasi kepada forum bersama (Forbes) di Pemda Provinsi NAD di dalam pengelolaan kegiatan reintegrasi di tingkat daerah

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2006

1.3 TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

1. Untuk memperoleh masukan dalam menilai sejauhmana Rencana Induk merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Aksi atau Rencana Kerja yang dilaksanakan oleh pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Sumut, serta masukan dalam rangka penyempurnaan terhadap rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Rencana Induk melalui pelaksanaan Rencana Aksi atau Rencana Kerja pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah NAD dan Nias dalam lingkup bidang: *a)Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup; b)Pemulihan Sosial Budaya; c)Pemulihan Perekonomian; d) Pemulihan Kelembagaan; e)Reintegrasi Mantan GAM,* dan menilai kesesuaian kegiatan terhadap keluaran yang dihasilkan, proses yang dilalui dalam rangka pelaksanaannya, serta dampak atau pemanfaatan hasil keluaran oleh masyarakat penerima manfaat.
3. Untuk mendapatkan masukan bagi perumusan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi dan penyesuaian program, dalam siklus perencanaan tahun berikutnya, termasuk dalam rangka mendorong dan mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Prov NAD dan Nias Sumut.

1.4 SASARAN

1. Teridentifikasikannya konsistensi penjabaran Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias sesuai Perpres 30/2005 kedalam Rencana Aksi dan Rencana Kerja Bapel BRR, Pemerintah Daerah di NAD dan di Sumut, serta penjabaran dan sinkronisasi antara Rencana Aksi, Renja Bapel BRR, Renja K/L, Renja SKPD, dan program donor/LSM/Swasta.
2. Teridentifikasikannya kesesuaian antara Rencana Aksi dan Renja Bapel BRR dan Renja K/L dan Renja Pemda Prov/ Kab. dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilapangan.
3. Terlaksananya dan meningkatnya koordinasi antar sektor dan antar stakeholder pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat Pusat dan Daerah.
4. Dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta dimanfaatkannya hasil-hasil pembangunan oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran pembangunan.
5. Teridentifikasilannya dan terberdayakannya kapasitas pelaku pembangunan, termasuk Pemerintah Daerah dalam menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana masing-masing SKPD sesuai UU 25/2004, serta mengkoordinasikan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang mempunyai keterkaitan

dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Prov NAD dan Sumut sebagai masukan bagi penyusunan Renja dan Renstra.

6. Adanya mekanisme untuk keberlanjutan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

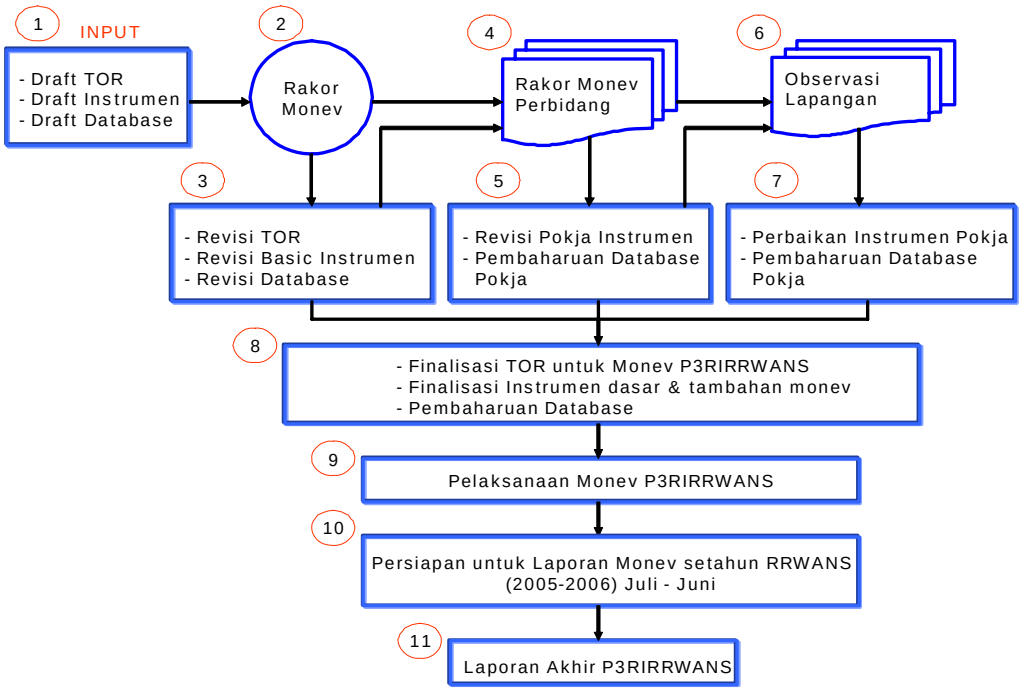
1.5 RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup pemantauan dan pengendalian meliputi seluruh bidang program rehabilitasi dan rekonstruksi yang tercantum dalam Rencana Induk yaitu: tata ruang dan pertanahan (Buku Rinci Lampiran II), lingkungan hidup dan sumber daya alam (Buku Rinci Lampiran III), infrastruktur dan perumahan (Buku Rinci Lampiran IV), ekonomi dan ketenagakerjaan (Buku Rinci Lampiran V), sistem kelembagaan daerah (Buku Rinci Lampiran VI), pendidikan dan kesehatan (Buku Rinci Lampiran VII), agama, sosial budaya, dan sumber daya manusia (Buku Rinci Lampiran VIII), hukum (Buku Rinci Lampiran IX), ketertiban, keamanan, dan ketahanan masyarakat (Buku Rinci Lampiran X), penerapan tata kelola yang baik dan pengawasan pelaksanaan (Buku Rinci Lampiran XI), serta pendanaan (Buku Rinci Lampiran XII).
2. Sesuai Perpres No. 30 Tahun 2005 pasal 5, pemantauan dan pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi Prov NAD dan Nias Sumut meliputi : 1. lokasi, 2. nama program yang mengacu pada fungsi, subfungsi, dan program APBN/APBD, 3. nama kegiatan, 4.sasaran kuantitatif, 5.kelompok sasaran, 6.cakupan kegiatan, 7.indikator keberhasilan, 8.waktu pelaksanaan, 9.keterkaitan dengan program/ kegiatan lainnya, 10. instansi pelaksana dan penanggung jawab, 11.perkiraan dan sumber pembiayaan.

1.6 TAHAPAN PELAKSANAAN

Secara lebih terinci, bagan alur kegiatan dalam proses pemantauan dan pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi digambarkan sebagai berikut. Perancangan kerangka kerja pemantauan dan pengendalian, instrumen pemantauan, dan basis data tentang rehabilitasi dan rekonstruksi disusun dan kemudian dibahas dan didiskusikan dalam rapat koordinasi antar kelompok kerja 5 bidang RIRRWANS, diteruskan dengan berbagai stakeholders di lapangan, untuk mendapatkan feed back bagi penyempurnaan kerangka kerja monev. Feed back juga dilakukan melalui pengujian observasi langsung di lapangan. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian dilakukan oleh masing-masing kelompok kerja 5 bidang RIRRWANS selanjutnya didasarkan pada TOR Pemantauan dan Pengendalian, instrumen pemantauan, dan basis data yang telah disempurnakan tersebut.

Gambar I.2
Alur Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian



Adapun jadwal dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah sbb :

Tabel I.7
Tahapan Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian

No	Kegiatan	Kegiatan yang telah							Rencana Tindak Lanjut																			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust				Sept				Okt				Nov				Des			
1.	Penyusunan Renja dan RKA-K/L BRR NAD-Nias TA 2007																											
2.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kab/Kota/Prov. NAD dan Sumut																											
3.	Rapat Koordinasi 5 Bidang Pokja dengan K/L																											
4.	Pengumpulan Data Sekunder:																											
	- Laporan Pemda																											
	- Laporan K/L																											
	- Laporan BRR																											
	- Laporan Satker																											
5.	Pendampingan Monev dan Pengumpulan Data Primer :																											
	- Bappeda NAD																											
	- Bapel BRR																											
	- Tim Sekretariat Dewan Pengarah BRR																											
6.	Penyusunan dan Penyempurnaan Kerangka Kerja Monev																											
7.	Diskusi Kerangka Kerja Monev Tim Koordinasi Bappenas-Bapel BRR																											
8.	Rapat Koordinasi antar 5 Bidang Pokja:																											
	- Laporan hasil pemetaan data																											
	- Kerangka monev																											
9.	Penyusunan LAPORAN 1 TAHUN RIRRWANS																											
10.	Sosialisasi dan Koordinasi Kerangka Kerja Monev dengan:																											
	- Bapel BRR																											
	- BRA																											
	- Pemda Prov dan Kab/Kota																											
	- Donors/NGO																											
11.	Pelaksanaan Monev dan FGD oleh Pokja:																											
	- FGD: koordinasi dg Bapel BRR dan Pemda																											
	- Survey, observasi, wawancara lapangan																											
12.	Rapat Koordinasi Antar Pokja 5 Bidang :																											
	Evaluasi Pelaksanaan Monev																											
13.	Penelaahan dan pengolahan data dan informasi Hasil Monev																											
14.	Workshop Hasil Monev																											
15.	PENYUSUNAN LAPORAN FINAL MONEV TA 2006																											

1.7 SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang keadaan dan kondisi daerah NAD dan Kepulauan Nias yang menjadi daerah dampak bencana. Gambaran kondisi objektif ini penting untuk mendapatkan penjelasan empirik di daerah bencana. Bab pendahuluan meliputi, antara lain:

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Tujuan Monitoring dan Evaluasi
4. Sasaran
5. Ruang Lingkup
6. Tahapan Pelaksanaan
7. Sistematika Laporan

BAB II : METODOLOGI DAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Untuk mengoperasionalisasikan kegiatan pemantauan dan pemantauan ini maka perlu dirumuskan suatu kerangka kerja secara metodologis. Dengan kerangka kerja ini maka bisa diberikan standar penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Bebarapa hal penting yang perlu dijabarkan pada bagian ini yaitu:

1. Kerangka Dasar Evaluasi Kinerja
2. Kelompok Sasaran dan Sampel
3. Teknik Pengumpulan Data
4. Kerangka Kerja Logis
5. Keterkaitan 4K dan Indikator Input-Output
6. Kerangka Evaluasi dan Indikator

BAB III : PERENCANAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pada bagian ini dipaparkan perencanaan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan patokan utama Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Nias, dan *dipersandingkan* dengan perencanaan yang dilaksanakan oleh berbagai pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi baik oleh BRR, Pemda, K/L maupun Donor. Bab ini meliputi:

1. Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2. Perencanaan Badan Pelaksana BRR)

3. Perencanaan Kementerian /Lembaga
4. Perencanaan Pemerintah Daerah
5. Perencanaan Donor/LSM

BAB IV : PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TA 2005 DAN TA 2006

Pada penyajian hasil pemantauan dan pengendalian ini akan diurai oleh masing-masing Kelompok Kerja bidang pemulihan yang berada di P3RIRRWANS, meliputi:

1. Pelaksanaan Kegiatan oleh Badan Pelaksana BRR
2. Pelaksanaan Kegiatan oleh Kementerian/Lembaga
3. Pelaksanaan Kegiatan oleh Pemerintah Daerah
4. Pelaksanaan Kegiatan oleh Donor/LSM

BAB V : HASIL EVALUASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TA 2005 DAN TA 2006

Hasil pemantauan dan pengendalian ini akan disajikan oleh masing-masing Kelompok Kerja bidang pemulihan yang berada di P3RIRRWANS, masing-masing meliputi:

1. Aspek Konsistensi
2. Aspek Koordinasi
3. Aspek Konsultasi
4. Aspek Kapasitas

BAB II
METODOLOGI DAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

2.1 KERANGKA DASAR EVALUASI KINERJA

Sebagaimana termuat dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 Ayat (4), bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah bertujuan untuk : (a) mendukung *koordinasi* antar pelaku pembangunan; (b) menjamin terciptanya integrasi, *sinkronisasi*, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah; (c) menjamin keterkaitan dan *konsistensi* antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d) mengoptimalkan *partisipasi* masyarakat, dan (e) menjamin tercapainya *penggunaan sumber daya* secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kerangka dasar pemantauan dan pengendalian rehabilitasi dan rekonstruksi Prov NAD dan Nias Sumut difokuskan pada :

1. Konsistensi yaitu proses penelaahan kesesuaian : (a) antara perencanaan yang tercantum dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias dengan Rencana Aksi dan Rencana Kerja yang disusun oleh para pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; (b) antara Rencana Aksi dan Rencana Kerja yang disusun oleh pelaksana dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan; serta (c) antar kegiatan pelaksanaan dari semua pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi, terkait dengan pelaksanaan RIRRWANS.
2. Koordinasi yaitu suatu interaksi dan komunikasi antar berbagai *stakeholders* dalam mendorong tercapainya kesepahaman, kebersamaan, kesepakatan, dan komitmen dalam perencanan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Konsultasi yaitu keikutsertaan atau partisipasi publik pada berbagai forum dalam rangka menyerap aspirasi dan pandangan, baik dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Kapasitas yaitu kemampuan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sumber pendanaan, yang didayagunakan dalam melaksanakan berbagai upaya perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

2.2 KELOMPOK SASARAN DAN SAMPEL

Yang menjadi kelompok sasaran dalam pemantauan dan pengendalian ini, yaitu:

1. BRR
2. Pemerintah Daerah
3. Kementerian/Lembaga
4. Donor
5. LSM
6. Tokoh Masyarakat / Agama

Sampel yang dipergunakan dalam pemantauan dan pengendalian ini didasarkan kepada pembagian daerah perwakilan atau regional, yang terdapat di 6 daerah atau regional yaitu;

1. Regional I (Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar dan kepulauan sekitar, dan Aceh Jaya)
2. Regional II (Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Lhok Seumawe, Aceh Timur, dan Langsa)
3. Regional III (Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tamiang)
4. Regional IV (Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Simeulue)
5. Regional V (Aceh Selatan, Aceh Singkil dan kepulauan sekitarnya, serta Aceh Tenggara)
6. Regional VI (Kepulauan Nias)

Pembagian wilayah kerja ke dalam beberapa regional tersebut merupakan kebijakan organisasi Bapel BRR, dengan tujuan untuk mendekatkan BRR dengan kegiatan yang ditangani, sehingga pada masa yang akan datang, kantor regional ini akan mempunyai kewenangan yang lebih besar sebagai koordinator dan pelaksana program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah dan sebagai pengatur dan fasilitator stakeholders di lapangan.

2.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Beberapa teknik pengumpulan data dalam pemantauan dan pengendalian ini yaitu:

1. Survei

yaitu kegiatan yang dilakukan melalui proses *penyebaran kuesioner* kepada para kelompok responden dalam pemantauan ini. Implementasi pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dengan beberapa ketentuan sebagai berikut;:

- Unit analisis yang digunakan dalam survei adalah institusi

- Teknik sampling adalah teknik purposive dengan karakteristik tertentu
- Sumber pengambilan sampelnya pada pihak-pihak pengambilan keputusan
- Sifat pertanyaan pada kuesioner bersifat tertutup (closed question).

2. Wawancara

yaitu *proses dialog* dengan berbagai stakeholder yang menjadi pelaksana proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias. Beberapa forum dialog yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pemulihan.

3. Observasi Lapangan

yaitu proses *pengamatan langsung* di lapangan terhadap berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dipandu oleh suatu pedoman observasi khusus. Kegiatan pemantauan lapangan dilakukan dalam beberapa tahapan, baik dalam rangka pematangan kerangka dan instrumen pemantauan da pengendalian P3RIRRWANS, maupuan dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pengendalian sendiri, yaitu:

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Naional untuk TA 2007 pada bulan April 2006.
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara bersama-sama dengan pihak Bappeda Prov. NAD pada bulan April 2006, melalui koordinasi dan observasi lapangan di 9 kab/kota; Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur.
3. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara bersama-sama dengan pihak Bappeda Prov. NAD pada bulan Juni 2006, melalui koordinasi dan observasi lapangan di 8 kab/kota; Pidie, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Lhok Seumawe.
4. Kegiatan kunjungan kerja bersama-sama dengan Sekretariat Dewan Pengarah BRR pada bulan Juli 2006, melalui koordinasi dan observasi lapangan di Kepulauan Nias, dan koordinasi dengan 6 pemerintah kabupaten/kota di Kabupaten Serdang Bedagai.

4. Studi Dokumen

yaitu upaya untuk mengumpulkan berbagai *dokumen, termasuk laporan, journal, dan dokumen perencanaan lainnya* dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari berbagai stakeholder yang terkait. Pengumpulan data melalui dokumen ini merupakan hal-hal yang telah dikumpulkan dan diterima, akan merupakan sumber data utama yang dimanfaatkan dengan memperhatikan terhadap hasil pemetaan pendataan mutakhir pada berbagai

instansi, seperti, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Donor/NGO.

5. Focus Group Discussion (FGD)

yaitu upaya pengumpulan data dan informasi melalui proses dialog dan wawancara secara bersama-sama di dalam suatu forum. Forum ini menggali berbagai isu secara terfokus dalam rangka untuk mengeksplorasi berbagai dinamika permasalahan yang berkembang dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

2.4 KERANGKA KERJA LOGIS *(LOGICAL FRAMEWORK)* PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RIRRWANS

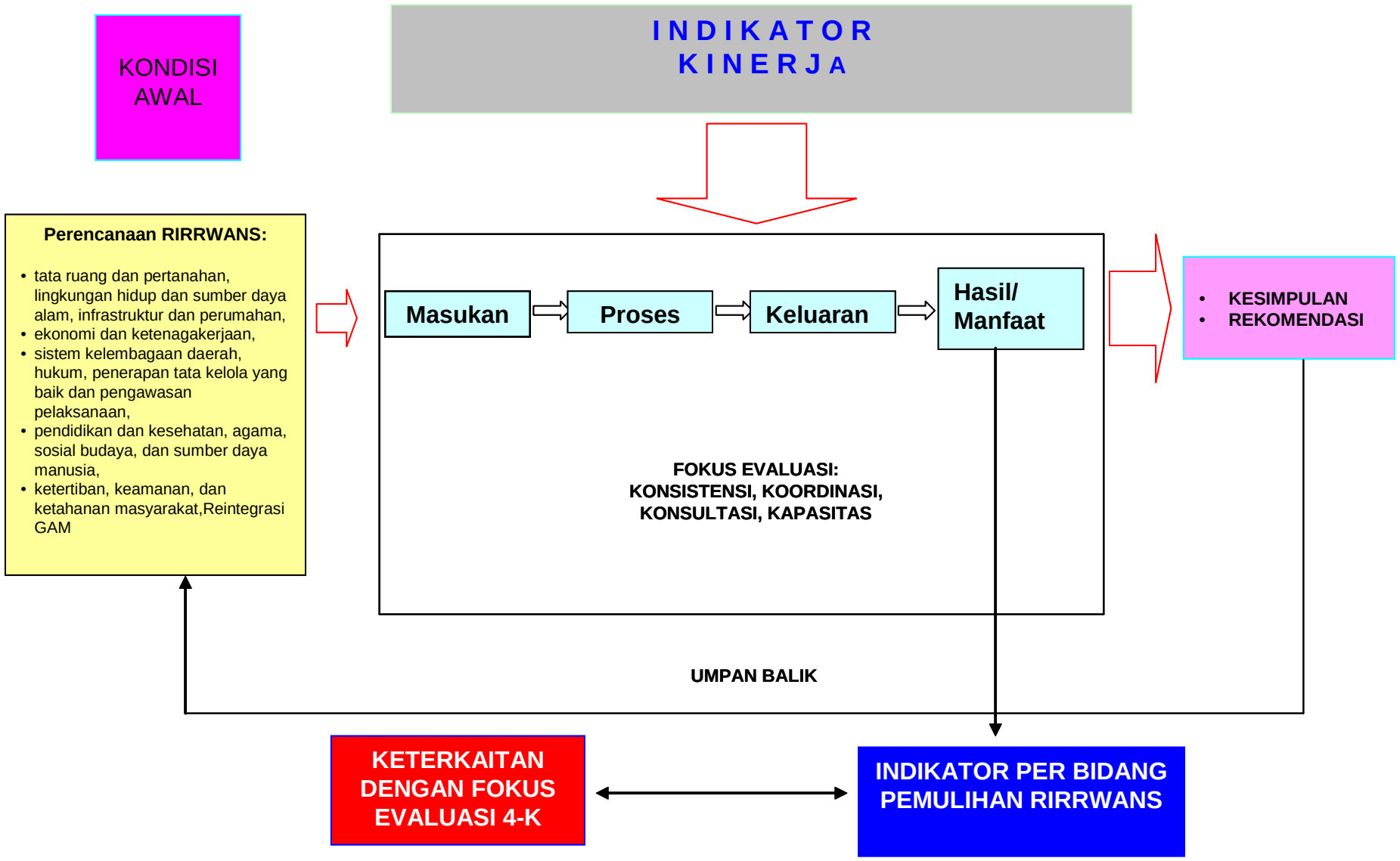
Prinsip dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian adalah bahwa:

1. Pengukuran kinerja dilihat dari 4 tahapan proses yang lengkap dan komprehensif yaitu meliputi:
    a. input yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan, baik *program dan kegiatan, sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun yang berupa teknologi dan informasi*, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
    b. proses yaitu upaya yang dilakukan di dalam mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator ini umumnya dikaitkan dengan *keterlibatan stakeholders* termasuk penerima manfaat, serta dikaitkan dengan *mekanisme pelaksanaannya*, termasuk *koordinasi dan hubungan kerja* antar unit organisasi.
    c. output yaitu *pencapaian sasaran* dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
    d. outcome yaitu menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan *fungsi atau manfaat keluaran kegiatan*.

2. Menggunakan pendekatan sistem atau keterkaitan, di mana dalam setiap tahapan akan menekankan pada 4 fokus evaluasi (konsistensi, koordinasi, konsultasi, dan kapasitas) yang tidak terpisah satu dengan lainnya.

Alur pendekatan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian P3RIRRWANS digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.1
Kerangka Kerja Logis (Logical Framework) Pemantauan dan Pengendalian RIRRWANS



2.5 KETERKAITAN 4K DAN INDIKATOR INPUT-OUTPUT

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa fokus evaluasi dalam kegiatan ini ada empat aspek yaitu konsistensi, koordinasi, konsultasi dan kapasiatas. Dari empat aspek evaluasi tersebut akan ditinjau berdasarkan indikator kinerja yang menjadi parameter keberhasilan dalam kegiatan pemantauan dan pengendalian yaitu indikator input, indikator proses, indikator output dan indikator outcome. Dengan membuat korelasi atau keterkaitan antara aspek 4-K dengan indikator kinerja di atas tadi maka dapat dilihat sejauhmana tingkat efektifitas dan efIsiensi keberhasilan pemantauan dan pengendalian.

Pertama: Aspek Konsistensi.

Ditinjau dari indikator input, analisa dan evaluasi meliputi program dan kegiatan serta sumber daya manusia dan dana yang disusun dalam bentuk Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Rencana Aksi, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran BRR, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dari indikator proses, analisa dan evaluasi meliputi terjadinya koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan antar dokumen perencanaan, implementasi perencanaan kepada pelaksana dan antar pelaksanaan. Pada sisi output, dilihat dari laporan realisasi program/kegiatan, anggaran waktu pelaksanaan, target kelompok sasaran pada tahap: penyusunan perencanaan, perencanaan dengan pelaksanaan dan antar pelaksanaan. Sedangkan pada aspek outcome, dengan melihat kesesuaian antar dokumen perencanaan, kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan dengan kebutuhan masyarakat, sinergi atau saling mengisi antar kegiatan di lapangan (tidak tumpang tindih). Pada indikator yang terakhir, merupakan tinjauan terhadap aspek koordinasi, konsultasi dan kapasitas.

Kedua: Aspek Koordinasi

Ditinjau dari indikator input dengan mengamati program dan kegiatan serta sumber daya/dana untuk koordinasi di tingkat perencanaan dan tingkat pelaksanaan. Dari indikator proses yaitu dengan melihat kejadian proses koordinasi perencanaan koordinasi antar stakeholders di pusat, pusat dengan daerah, koordinasi internal Bapel-Satker-Pengawas. Kemudian, indikator out put yaitu laporan realisasi koordinasi di tingkat perencanaan dan di tingkat pelaksanaan.

Ketiga, Aspek Konsultasi

Dari indikator input yaitu dilihat dari program dan kegiatan, ketersediaan SDM dan sumber daya lain untuk konsultasi perencanaan dan pelaksanaan. Terus, pada sisi proses yaitu dengan mengamati bagaimana pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan forum-forum konsultasi. Kemudian, pada indikator output dengan menilai laporan realisasi forum dan pelibatan masyarakat.

Keempat: Aspek Kapasitas

Pada indikator input yaitu dengan mengamati SDM dan lembaga perencanaan, SDM dan lembaga pelaksana program, SDM dan lembaga pelaksana pembangunan. Dari sisi proses yaitu dengan melihat peristiwa dan proses sosialisasi, komunikasi, penginformasian, proses pelatihan serta proses pengawasan. Selanjutnya pada indikator output yaitu dengan menilai laporan realisasi SDM dan lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan.

Tabel II.1
Keterkaitan Antara Indikator 4-K dengan Input-Proses-Output

	INPUT (Perencanaan Program/kegiatan, sumber daya/dana)	PROSES (Koordinasi, konsultasi)	OUPUT (Realisasi fisik dan non fisik)	OUTCOME (Manfaat/hasil)
KONSISTENSI	Program/kegiatan, sumber daya / dana yang disusun dalam : - Rencana Induk - Rencana Aksi, Renstra - RKA BRR, K/L, SKPD	Terjadinya koordinasi dan Konsultasi dalam : - Penyusunan antar dokumen - Perencanaan - Implementasi perencanaan ke pelaksanaan - Antar pelaksanaan	Laporan realisasi program/kegiatan, anggaran waktu pelaksanaan, target kelompok sasaran pada tahap: - Penyusunan Perencanaan - Perencanaan dan Pelaksanaan - Antar pelaksanaan	- Kesesuaian antar dokumen perencanaan - Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan - Kesesuaian perencanaandan pelaksanaan dengan kebutuhan masyarakat - Sinergi atau saling mengisi antar kegiatan di lapangan (tidak tumpang tindih)
KOORDINASI	Program/kegiatan dan sumber daya /dana untuk koordinasi di tingkat perencanaan dan tingkat pelaksanaan	Terjadinya: - Proses koordinasi perencanaan - Koordinasi antar stakeholders di pusat, pusat/daerah, dan di daerah - Koordinasi internal Bapel-Satker-Pengawas	Laporan realisasi Koordinasi di tingkat perencanaan dan di tingkat pelaksanaan	
KONSULTASI	Program/kegiatan SDM dan sumberdaya lain untuk konsultasi perencanaan dan pelaksanaan	Berlakunya: - Pelibatan masyarakat di - perencanaan dan - pelaksanaan - Forum-forum konsultasi	Laporan realisasi forum dan pelibatan masyarakat	
KAPASITAS	- SDM dan lembaga perencanaan - SDM dan lembaga pelaksana - program - SDM dan lembaga pelaksana pembangunan	Terjadinya: - Proses sosialisasi, - komunikasi, penginformasian - Proses pelatihan - Proses pengawasan	Laporan realisasi SDM dan lembaga: dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan	

Sumber: Data diolah (2006)

2.6 KERANGKA EVALUASI DAN INDIKATOR

Kerangka evaluasi yang dipergunakan dalam pemantauan dan pengendalian ini mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Untuk melihat sejauhmana tingkat keberhasilan kerangka evaluasi tersebut maka dirumuskan indikator-indikator sebagai berikut;

Pertama, kerangka evaluasi konsistensi memiliki indikator-indikator sebagai berikut; 1. Konsistensi *antar dokumen perencanaan*, yaitu antara Rencana Induk per bidang-bidang RIRRWANS dengan Rencana Aksi dan/atau Rencana Kerja. 2. Konsistensi *antara perencanaan dengan pelaksanaan,* yaitu antara Rencana Aksi dan/atau Rencana Kerja yang dilakukan pada masing-masing bidang RIRRWANS. 3. Konsistensi *antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi*, yaitu antara hasil pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada masing-masing bidang RIRRWANS, antara BRR, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Donor/NGO/LSM.

Kedua, kerangka evaluasi koordinasi mempunyai indikator-indikator yaitu; 1. Mekanisme koordinasi dalam penyusunan perencanaan: 2. Mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan.

Ketiga, kerangka evaluasi konsultasi terdapat beberapa indikator yaitu; 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dalam koordinasi Bapel BRR, K/L, Pemda/SKPD, Donor/NGO/ Swasta. 2. Media partisipasi masyarakat secara langsung :3. Ketersediaan dan kemudahan akses informasi bagi publik, melalui:

Keempat, kerangka evaluasi kapasitas memiliki indikator-indikator sebagai berikut; 1. Kelembagaan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias: 2. Sumber Daya Manusia*:*

Tabel II.2
Kerangka Evaluasi dan Indikator

NO.	KERANGKA EVALUASI	INDIKATOR
1.	KONSISTENSI	1. Konsistensi *antar dokumen perencanaan* , yaitu antara Rencana Induk per bidang-bidang RIRRWANS dengan Rencana Aksi dan/atau Rencana Kerja dari : - RENSTRA BRR - Renja dan RKA K/L - Rencana Aksi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah - Rencana kegiatan Donor/NGO/LSM 2. Konsistensi *antara perencanaan dengan pelaksanaan,* yaitu antara Rencana Aksi dan/atau Rencana Kerja yang dilakukan pada masing-masing bidang RIRRWANS oleh: - BRR, melalui Satker - Kementerian/Lembaga, melalui Satker atau SKPD - Pemerintah Daerah, melalui Dinas atau SKPD - Donor/NGO/LSM

NO.	KERANGKA EVALUASI	INDIKATOR
		3. Konsistensi *antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi*, yaitu antara hasil pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada masing-masing bidang RIRRWANS, antara BRR, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Donor/NGO/LSM. - Antara Bappenas, K/L, Bapel BRR, Pemda NAD dan Sumut - Antara Bapel BRR dengan Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas (internal BRR) - Antara Bapel BRR, Pemda NAD dan Sumut, SKPD, Donor/NGO - 2.Mekanisme *koordinasi dalam pelaksanaan* : - Antara Bapel BRR, Satuan Kerja (Satker), Pemda NAD dan Sumut, SKPD, Donor/NGO - Antar Satuan Kerja dalam koordinasi Bapel BRR
2.	KOORDINASI	1. Mekanisme *koordinasi dalam penyusunan perencanaan* : - Antara Bappenas, K/L, Bapel BRR, Pemda NAD dan Sumut - Antara Bapel BRR dengan Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas (internal BRR) - Antara Bapel BRR, Pemda NAD dan Sumut, SKPD, Donor/NGO 2. Mekanisme *koordinasi dalam pelaksanaan* : - Antara Bapel BRR, Satuan Kerja (Satker), Pemda NAD dan Sumut, SKPD, Donor/NGO - Antar Satuan Kerja dalam koordinasi Bapel BRR
3.	KONSULTASI (PARTISIPASI)	1. *Tingkat partisipasi masyarakat* dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dalam koordinasi Bapel BRR, K/L, Pemda/SKPD, Donor/NGO/ Swasta, yang diwujudkan dalam : - Identifikasi penilaian kebutuhan - Sosialisasi rencana kerja pembangunan - Pelibatan kelompok sasaran pembangunan - Legitimasi komitmen perencanaan - Pelibatan dalam pelaksanaan kegiatan - Pelibatan dalam pengawasan dan evaluasi 2. *Media partisipasi masyarakat* secara langsung : - Sistem atau mekanisme yang dibangun untuk memfasilitasi konsultasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan - Forum pertemuan yang diadakan untuk mengakomodasi permasalahan, revisi perencanaan dan pelaksanaannya, serta pengawasan pelaksanaan - Pola fasilitasi pendampingan yang dilakukan oleh Pemda, lembaga perguruan tinggi, LSM/NGO, dan lembaga profesional lainnya 3. *Ketersediaan dan kemudahan akses informasi* bagi publik, melalui: - Media cetak dan elektronik lokal - Webbsite dan internet - Kotak pos pengaduan - Telpon bebas pulsa
4.	KAPASITAS (SDM dan Kelembagaan)	1. *Kelembagaan* perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias: * Aturan dan mekanisme Bapel BRR dalam : - pelaporan perkembangan realisasi pelaksanaan pembangunan DIPA K/L, BRR , dan Pemda - pelaporan realisasi pencapaian sasaran dan target keluaran K/L, BRR, dan Pemda , berdasarkan indikator yang telah ditetapkan - pelaporan kendala yang dihadapi beserta solusi yang dilakukan. - Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan * Tindak lanjut dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian permasalahan * Mekanisme pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan * Struktur Organisasi Bapel BRR

NO.	KERANGKA EVALUASI	INDIKATOR
		* Mekanisme dan Tata Kerja Bapel BRR * Standar yang digunakan dalam setiap bidang pembangunan RIRRWANS * Kesiapan peralihan *asset* dari BRR kepada Pemda * Kesiapan *Exit Strategy* bagi kelembagaan pemerintah daerah * Mekanisme pelaporan dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan oleh BRR 2. *Sumber Daya Manusia:* - Regulasi BRR tentang kebijakan SDM. - Pola rekruitmen staf, tenaga ahli, Satker, dan lainnya - Pelatihan/capacity building bagi para pelaksana kegiatan

BAB III
PERENCANAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TA 2005 DAN TA 2006

Untuk mencapai kondisi pemulihan wilayah pasca bencana di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara, maka perlu dilakukan berbagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang sistematis dan terencana secara baik. Langkah-langkah sistematis tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perencanaan yang komprehensif dan menyeluruh, mengingat keterkaitan seluruh aspek kehidupan yang meliputi infrastruktur, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai sektor lainnya. Harapannya bahwa pasca implementasi berbagai kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi tadi dapat menciptakan kondisi dan keadaan wilayah dan kehidupan masyarakat di NAD dan Kepulauan Nias lebih baik lagi bila dibandingkan pada saat sebelum terjadi peristiwa gempa dan tsunami.

Berbagai perencanaan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dapat menjadi acuan dalam melakukan upaya konkret pemulihan. Sebagai suatu lembaga perencanaan nasional, Bappenas telah menyusun suatu perencanaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk wilayah NAD dan Kepulauan Nias. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Prov. NAD dan Kepulauan Nias Prov. Sumatera Utara. Rencana Induk tersebut seyogyanya dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Aksi yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 30 Tahun 2005 pada pasal 4 yang menyebutkan bahwa BRR bersama-sama dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan program dalam Rencana Induk, yang dituangkan ke dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pada bagian ini akan diuraikan gambaran perencanaan yang tertuang dalam Rencana Induk, kemudian melihat lebih lanjut perencanaan yang disusun oleh Badan Pelaksanaan BRR, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah serta komitmen Donor/NGO.

3.1 RENCANA INDUK

Di dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi NAD dan Nias Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005, telah ditetapkan kebijakan umum rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara, yang diarahkan untuk membangun kembali masyarakat Aceh

dan Nias baik kehidupan individu maupun sosialnya; membangun kembali infrastruktur fisik dan infrastruktur kelembagaan; membangun kembali perekonomian sehingga dapat pulih sebagaimana kondisi sebelumnya; dan membangun kembali pemerintahan sebagai sarana pelayanan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar rehabilitasi dan rekonstruksi seyogyanya memperhatikan :

1. Berorientasi kepada masyarakat, bersifat partisipatif dan menempatkan masyarakat sebagai subyek yang turut mengambil keputusan.
2. Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik
3. Berkoordinasi dengan berbagai pihak *(stakeholder)* seperti kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota, kalangan perguruan tinggi, pemuka masyarakat, agama, adat; lembaga donor dan LSM internasional, nasional dan lokal.
4. Memprioritaskan daerah-daerah yang terkena bencana dan memperhatikan daerah-daerah yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
5. Menekankan pada percepatan pemenuhan kebutuhan kritis masyarakat, terutama kelompok rentan.
6. Mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan berdasarkan strategi yang komprehensif.
7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
8. Menggunakan standar profesionalisme yang tinggi.
9. Transparansi yang maksimal dan tidak ada toleransi terhadap korupsi.

Penjabaran arahan dan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tercantum dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (PerPres 30/2005) itu diturunkan kedalam Rencana Aksi yang terdiri dari 10 bidang yaitu:

- Tata Ruang dan Pertanahan
- Manajemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
- Ekonomi dan Tenaga Kerja
- Kelembagaan
- Pendidikan dan Kesehatan
- Agama, Sosial dan Kebudayaan serta Sumber Daya Manusia
- Hukum
- Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat
- Akuntabilitas
- Pendanaan

Secara rinci, perencanaan yang terdapat dalam Rencana Induk tersebut dapat dielaborasi sesuai dengan pembagian Kelompok Kerja Bidang Pemulihan Tim Koordinasi P3RIRRWANS-Bappenas, yaitu sebagai berikut:

A. Kebijakan dan Strategi

1. Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Kebijakan dan strategi utama bidang infrastruktur dan perumahan adalah memprioritaskan penyediaan prasarana dan sarana untuk memperlancar logistik, membangun kembali sistem transportasi dan komunikasi untuk mendukung kelancaran hubungan antar wilayah dalam dan antar Provinsi, serta luar negeri, merehabilitasi fasilitas distribusi energi dan kelistrikan sebagai upaya mendukung kembalinya aktivitas sosial dan perekonomian, mendukung ketersedian pangan, peningkatan penyiapan fasilitas infrastruktur untuk mendukung upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana.

(a) Sub Bidang Transportasi

Strategi Sub-Bidang Transportasi adalah mengembalikan dan memfungsikan jaringan transportasi darat, pelabuhan dan bandar udara yang rusak, mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan jalan arteri nasional dan provinsi, membuka dan memfungsikan kembali pelabuhan Lhokseumawe, Meulaboh untuk wilayah barat dan Kruing (Malahayati), mengembangkan kapasitas Bandar Udara Sultan Iskandar Muda (SIM) dan Bandara Udara Cut Nyak Dhien di Meulaboh, mengembangkan sistem jaringan transportasi darat untuk evakuasi masyarakat apabila terjadi bencana, meningkatkan kapasitas beberapa pelabuhan laut, merelokasi Pelabuhan Meulaboh dan Ulee Lheue.

(b) Sub Bidang Energi dan Listrik

Strategi rehabilitasi dan rekonstruksi Sub-Bidang Energi dan Listrik akan dilakukan melalui: pemulihan penyediaan energi dan ketenagalistrikan secara memadai, mengupayakan sistem jaringan penyaluran energi dan ketenagalistrikan, mengupayakan diversifikasi sumber energi listrik dari PLTD ke PLTA dan PLTG termasuk mengoperasikan kembali PLTG Arun (60 MW)..

(c) Sub Bidang Pos dan Telematika

Strateginya adalah: jaringan telekomunikasi untuk pembangunan baru akan menggunakan teknologi *wireless line,* rehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada, pemanfaatan teknologi nir-kabel untuk fasilitas komunikasi baru, memberikan kemudahan akses telekomunikasi, menjadikan Stasiun RRI dan TVRI Stasiun Banda Aceh sebagai media sosialisasi dalam melakukan proses peringatan dini bencana alam *(early warning system)*., mempercepat pengadaan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana pos.

(d) Sub Bidang Perumahan

Kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang perumahan adalah: Pembangunan perumahan yang didasarkan pada kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat lokal, memberdayakan masyarakat setempat, seoptimal mungkin

pemanfaatan material lokal dan memenuhi persyaratan *building code* setempat; berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta penetapan tipe rumah inti (*core houses*) merupakan tipe T-36 dengan luas bangunan 36 m^2.

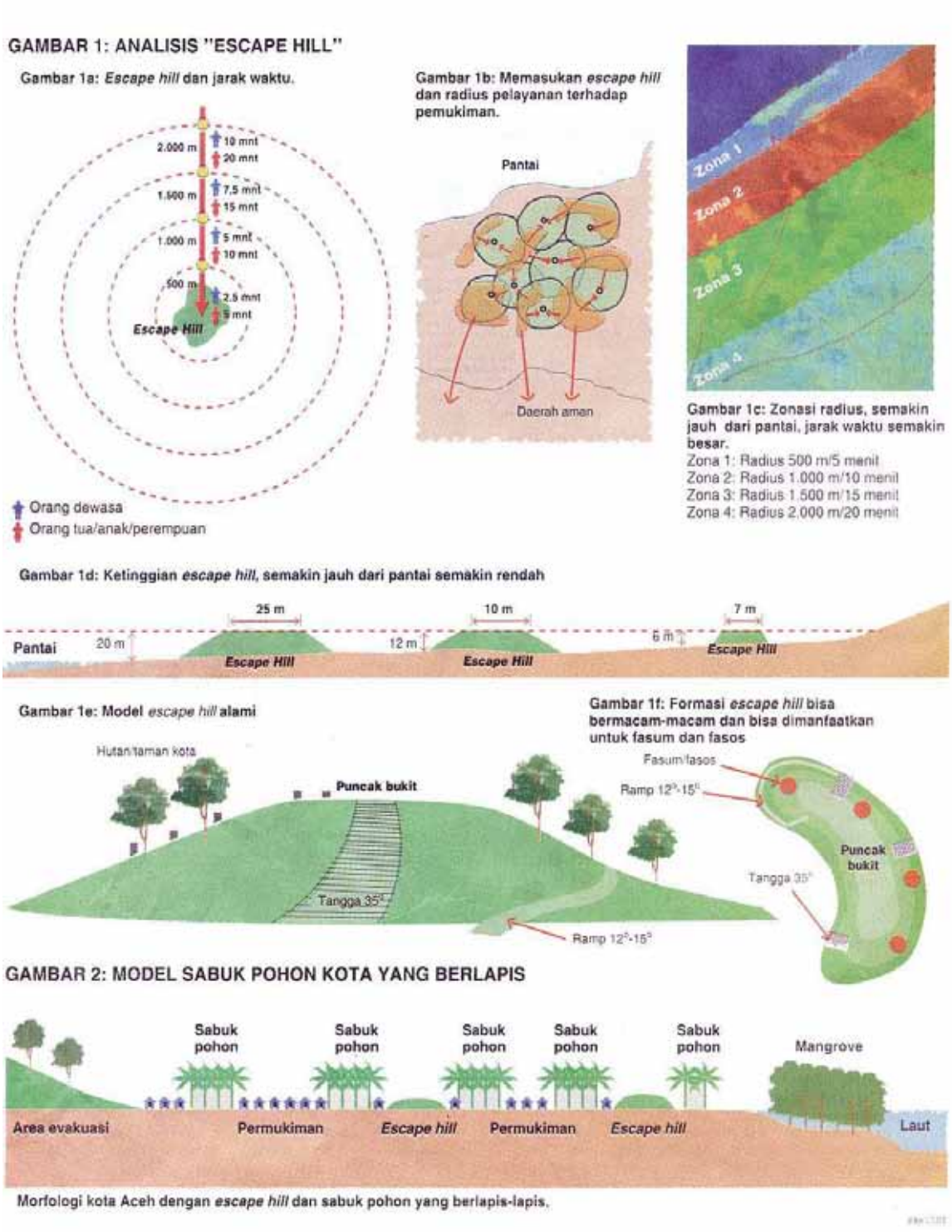
Strategi rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perumahan adalah dengan melaksanakan pemberdayaan dengan proses pengambilan keputusan partisipatif dan berkeadilan; tidak memarjinalkan kelompok rentan dan kaum cacat; memfasilitasi perencanaan prasarana dan sarana dasar pada kawasan yang terkena bencana; pengumpulan informasi, identifikasi dan penyusunan kembali rencana tata ruang kawasan permukiman melalui partisipasi masyarakat, menetapkan status kepemilikan lahan dan peruntukannya, penataan Ruang Kawasan Permukiman dalam Rehabilitasi/Rekonstruksi ruang kawasan permukiman; membantu korban bencana dalam perbaikan dan pembangunan rumah; meningkatkan integrasi multi sektoral dalam perbaikan dan pembangunan dan perbaikan rumah, meningkatkan kapasitas, penyederhanaan dan desentralisasi pengelolaan program.

Model pengembangan tata ruang kawasan permukiman untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi NAD dan Nias Sumut ditujukan untuk mengurangi dampak bencana pada kawasan, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman secara lebih efisien, dan pada gilirannya membentuk kota masa depan yang nyaman dan aman untuk ditinggali. Upaya tersebut dilakukan melalui :

1. Memasukan bukit penyelamatan (*escape hill*) di sekitar kawasan permukiman yang bisa dicapai dalam waktu 5,10,20 menit;
2. Mendisain akses untuk evakuasi (*evacuation/escape routes*) dengan penataan kembali dan pembangunan jaringan jalan lingkungan dan jalan lokal;
3. Melakukan kampanye dan penyadaran publik yang berkelanjutan mengenai jalur-jalur evakuasi dan bukit penyelamatan;
4. Mendisain dan merekonstruksi bangunan tahan gempa/tsunami;
5. Menciptakan sabuk hijau (*green belt/forested town*) sejajar garis pantai dari pohon kelapa, cemara, dan pohon lainnya yang sesuai tingkatannya sehingga membentuk *city belt, district belt, neighbourhood belt*.

Sketsa model pengembangan tata ruang permukiman dengan memasukkan unsur-unsur pencegahan bencana yang diuraikan di atas dapat dilihat pada Gambar III.1 berikut:

Gambar III.1 Sketsa Model *Escape Hill*



Gambar III.2 Sketsa Model *Escape Road*



(e) Sub Bidang Air Minum

Strategi pelayanan air minum di daerah perkotaan, tahap awal diprioritaskan pada rehabilitasi dan fungsionalitas instalasi pengolahan air dan jaringan distribusi utama, terpenuhinya kebutuhan air minum minimal untuk lokasi-lokasi pengungsian, didasarkan pada kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan perbaikan ataupun pembangunan lebih diutamakan untuk dilakukan secara kontraktual mengingat skala pekerjaan yang relatif besar. Sedangkan di daerah perdesaan yang skala pekerjaannya lebih kecil dan terpisah (*scattered*), didorong untuk menggunakan teknologi sederhana berdasarkan pendekatan masyarakat.

(f) Sub Bidang Air Limbah

Strategi rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana air limbah meliputi penanganan air limbah untuk daerah-daerah permukiman kembali (dengan atau tanpa relokasi) dilakukan dengan pendekatan *best practice*, memperhatikan sistem pelayanan air limbah sebagai prasarana dan sarana pendukung perumahan, dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Di daerah perkotaan, kegiatan perbaikan atau pembangunan sarana air limbah dengan sistem perpipaan diutamakan untuk dilakukan secara kontraktual.

(g) Sub Bidang Persampahan

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada perencanaan perumahan, termasuk tata ruang dan perencanaan denah tapak lokasi permukiman kembali; penanganannya dengan pendekatan partisipasi masyarakat; kegiatan pemilahan, pengolahan, pemanfaatan kembali, dan pengumpulan sampah diprioritaskan untuk dapat dilakukan langsung oleh masyarakat. Sementara itu: diperlukan kebijakan khusus terkait dengan pengadaan, penyaluran, konstruksi, dan pemanfaatan sebagian besar material dan peralatan (alat berat, *geotextile*, *insinerator*, dan sebagainya) yang mungkin perlu didatangkan dari luar negeri.

(h) Sub Bidang Drainase Kota

Strategi yang akan ditempuh adalah memfungsikan saluran primer maupun saluran sekunder, dan menjaga keterpaduan antara pembangunan prasarana drainasi kota dengan prasarana pengendali banjir lainnya.

(i) Sub Bidang Sumber Daya Air

Strategi yang akan ditempuh melalui : Prioritas penanganan prasarana pengendalian banjir yang diarahkan pada wilayah-wilayah pusat kegiatan ekonomi dan permukiman serta menjaga keterpaduan fungsi dengan sistem drainase kota; mengarahkan irigasi untuk mendukung pulihnya kegiatan usaha tani dalam arti luas, serta memprioritaskan daerah irigasi yang bersifat *quick yielding.;* serta melindungi wilayah pantai strategis dari ancaman abrasi, menyeleraskan pendekatan konstruksi dengan pendekatan vegetatif, serta memprioritaskan dukungan penyelesaian masalah kontaminasi dan buruknya drainase pada lahan-lahan pertanian pada wilayah pantai barat.

2. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

(a) Sub Bidang Pendidikan

Kebijakan di bidang pendidikan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias yaitu menyelenggarakan pendidikan darurat bagi peserta didik yang terkena bencana, dengan menyediakan fasilitas pendidikan di hunian sementara, dan memperluas keterjangkauan pelayanan pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah.

Strategi yang ditempuh adalah: penyediaan fasilitas pendidikan di hunian sementara, rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan aksesibilitas peserta didik khususnya untuk penyandang cacat; perekrutan tenaga pendidik untuk mengganti tenaga didik yang meninggal akibat bencana; penampungan peserta didik yang tidak mempunyai orang tua lagi di panti asuhan; serta memobilisasi sumberdaya dan pemberdayaan semua potensi pemerintah, masyarakat dan swasta

(b) Sub Bidang Kesehatan

Kebijakan bidang kesehatan adalah penyelamatan korban bencana yang masih hidup, pemulihan sistem kesehatan, pencegahan terjadinya wabah penyaki, serta pencegahan kekurangan gizi.

Sedangkan strateginya adalah mengadakan pelayanan kesehatan darurat, pelayanan kesehatan bagi korban yang mengalami trauma, mobilisasi tenaga kesehatan dari daerah lain dan menempatkan serta mengangkat tenaga kesehatan baru, melatih tenaga kesehatan, merehabilitasi dan membangun parasarana dan sarana pelayanan kesehatan yang rusak, memulihkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan, melakukan imunisasi, *vectrol contol*, disinfeksi, dan penyediaan air minum, memperkuat survailans epidemiologi, memberikan bantuan makanan bagi bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan siswa SD/MI terutama pada masa darurat, serta memperbaiki paket penyuluhan gizi.

(c) Sub Bidang Agama

Kebijakan yang ditempuh yaitu pemulihan ketenteraman rohani, merekrut tenaga pelayanan keagamaan menggantikan yang meninggal, dan rehabilitasi simbol-simbol agama.

Strateginya adalah memberikan bimbingan dan konseling keagamaan; pengasuhan anak yatim piatu; menggiatkan pengajian majlis taklim; mendidik dan melatih tenaga pengganti untuk imam masjid, khatib, da'i dan guru pengajian.

(d) Bidang Sosial Budaya

Kebijakannya adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan peningkatan kualitas kehidupan adat, tradisi dan kegiatan seni budaya serta pelestarian budaya masyarakat.

Strateginya adalah melakukan pendataan penduduk khusus perempuan dan anak; mengembangkan dan memfungsikan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan Perempuan (P2TP2); menfasilitasi *Women Crisis Center* ; memfasilitasi reunifikasi keluarga, bantuan hukum dan dukungan untuk pengasuhan anak; memberdayakan kepala keluarga perempuan dalam kegiatan ekonomi; melakukan pendataan kerusakan warisan budaya; memperkuat dan melestarikan warisan seni dan budaya masyarakat; membangun/merehabilitasi sarana dan prasarana budaya dan warisan budaya yang rusak.

3. Bidang Pemulihan Perekonomian

Secara umum, kebijakan bidang pemulihan perekonomian adalah (1) memulihkan pendapatan masyarakat, yang dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dan pelatihan bagi berbagai pekerjaan yang hilang; (2) memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat guna memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah, melalui mobilisasi berbagai sumber daya yang tersedia seperti APBN dan bantuan terutama kepada sarana pelayanan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat termasuk nelayan dan pertanian seperti pemulihan pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, sarana irigasi serta pusat-pusat penjualan lainnya; (3) memulihkan kegiatan perbankan melalui pemulihan berbagai sarana perbankan serta mengembalikan fungsi intermediasi melalui identifikasi nasabah serta penetapan

ahli warisnya; memulihkan aset perbankan melalui restrukturisasi; memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan sarana produksinya yang diberikan melalui bantuan langsung melalui pendekatan berbasis masyarakat (*Community based approach*); serta (4) memberikan dukungan kepada masyarakat terutama usaha kecil dan menengah untuk dapat memperoleh akses kepada sumber daya produktif melalui penyediaan sistem insentif pembiayaan disertai pemberian bantuan teknis.

Strategi yang perlu dilaksanakan yaitu (1) pemulihan aset produktif yang hilang; (2) pemulihan segera pendapatan (income-generating) masyarakat; (3) pengembalian kepercayaan diri para pelaku usaha dan (4) pemulihan layanan teknis dan infrastruktur ekonomi kunci.

(a) Sub Bidang Pertanian

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang pertanian jangka pendek bertujuan untuk merehabilitasi kapasitas pertanian; merehabilitasi layanan pertanian yang penting milik pemerintah maupun swasta; merehabilitasi kondisi teknis, perencanaan dan dukungan manajemen terhadap program kerja, dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat korban bencana.

Upaya rekonstruksi dan rehabilitasi bidang pertanian jangka panjang dimaksudkan untuk memulihkan ekonomi masyarakat pedesaan melalui produksi tanaman pangan, peternakan, dan peningkatan pendapatan masyarakat; mengembangkan sistem pengelolaan wilayah pantai yang sesuai secara partisipatif serta praktek-prakteknya, termasuk penggunaan dan manajemen lahan terintegrasi; meningkatkan layanan pertanian baik oleh pemerintah maupun swasta, meliputi infrastruktur, pembiayaan masyarakat desa, pengembangan teknologi dan penyuluhan, pengolahan hasil pertanian, pemasaran; dan meningkatkan kemampuan SDM dan mengembangkan kapsitas perencanaan masyarakat setempat, monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi.

Strategi yang perlu dilaksanakan dikelompokkan kedalam lima hal yaitu : (1) kebutuhan dan langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi pengungsi korban tsunami; (2) langkah-langkah untuk menjamin fungsi pemerintahan; (3) langkah-langkah untuk memulihkan kegiatan ekonomi pertanian, yang mencakup komoditi tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura; (4) pencegahan dan penanggulangan masalah pangan; dan (5) pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan pedesaan.

(b) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Kebijakan yang dilakukan adalah (1) melakukan percepatan dan penataan kembali usaha budidaya tambak dan air tawar; dan (2) Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan.

Strategi yang perlu dilaksanakan adalah (1) penataan kembali kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar serta pengembangan pemanfaatan sumber daya perairan umum; (2) pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan pendukung lainnya; (3) pengembangan mutu dan nilai

tambah produk perikanan; (4) rehabilitasi dan penataan kembali usaha budidaya tambak; dan (5) Rehabilitasi pelabuhan perikanan, pengembangan standarisasi dan fasilitas pelabuhan perikanan.

(c) Sub Bidang Pariwisata

Kebijakan yang dilakukan adalah (1) Perencanaan pengembangan kepariwisataan NAD dan Pulau Nias; dan (2) Rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana.

Strategi yang perlu dilaksanakan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana.

(d) Sub Bidang Koperasi dan UKM

Kebijakan yang dilakukan adalah menggerakkan sel-sel ekonomi dalam skala yang tidak terlalu besar antara lain melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal, terutama UMKM yang dibarengi dengan pembangunan jaringan/ keterkaitan usaha *(business linkages/networking)* dengan usaha besar.

Strategi pembangunan NAD dan Sumatera Utara (pulau Nias) diupayakan menyeluruh *(holistic)* serta memperhatikan dimensi spatial dan kemanusiaan dengan menyediakan insentif/fasilitas permodalan kepada anggota koperasi; membantu pendirian pasar; serta akan memfungsikan koperasi dalam pendistribusian bahan pokok di NAD dengan dana yang tersedia membangun basis kelembagaan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* setempat.

(e) Sub Bidang Tenaga Kerja

Kebijakannya adalah (1) melakukan penyempurnaan berbagai perluasan kesempatan kerja; (2) koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja; dan (3) penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbsis kompetensi.

Strategi yang dilakukan adalah (1) Penyediaan investasi padat karya untuk pembangunan infrastruktur; (2) Pembangunan lembaga pelayanan ketenagakerjaan pasca bencana; dan (3) pelatihan teknis keterampilan berbasis kompetensi masyarakat.

Untuk mengurangi pengangguran pasca bencana upaya pemulihan ekonomi di lokasi bencana harus dapat melibatkan masyarakat/penduduk setempat yang kehilangan pekerjaan. Program pengembangan ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi diantaranya sektor pertanian/perikanan, industri, perdagangan, perhubungan dan jasa. Penyusunan program dimaksudkan untuk menajamkan peran instansi di dalam mengoptimalkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam membangun kembali perekonomian di wilayah yang terkena bencana, dalam rangka menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja.

(f) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Kebijakannya adalah (1) mengembangkan persaingan yang sehat, adil; (2) menghilangkan hambatan yang mengganggu ekonomi pasar; (3) mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi melalui pembangunan keunggulan kompetitif; dan (4) mengembangkan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha saling menunjang dan menguntungkan antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

Strategi yang dilakukan adalah (1) memulihkan kembali sarana perdagangan; (2) membangkitkan aktivitas perdagangan; dan (3) melancarkan distribusi kebutuhan pokok terutama di daerah bencana. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara pengusaha pasar modern dengan pedagang kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat; memberdayakan pedagang kecil, menengah agar tangguh, maju dan mandiri serta meningkatnya kesejahteraan; mewujudkan kemitraan usaha antara pengusaha besar dan pengusaha kecil didalam tatanan perdagangan yang efektif dan efisien.

Untuk Nias, Sasarannya yaitu (1) peningkatan daya saing perekonomian wilayah; (2) peningkatan produksi hasil pertanian dan perikanan; (3) peningkatan kapasitas organisasi petani dan nelayan; (4) peningkatan teknologi pertanian dan perikanan; (5) perbaikan iklim investasi dan sistem perbankan yang sehat; dan (6) pengembangan ekonomi regional dan pasar yang sehat dan fair dengan fokus pada perikanan, coklat dan karet.

4. Bidang Pemulihan Kelembagaan

(a) Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan

Kebijakan dan strategi di bidang kelembagaan pemerintahan yaitu melalui kebijakan pemulihan pemerintahan daerah, dalam jangka pendek diperlukan pelayanan umum darurat. Strategi yang ditempuh adalah: a) Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan umum melalui pemberian bantuan sementara aparat pusat kepada pemerintah daerah; b) Melakukan evaluasi ketersediaan jumlah aparat dibandingkan dengan penduduk eksisting; c) Melakukan prioritas rekruitmen, pelatihan, dan pendidikan secara khusus dan cepat untuk mengisi kekosongan aparatur yang meninggal; d) Melakukan penanganan masalah administrasi kepegawaian (gaji, tunjangan, asuransi, dsb); e) Melakukan pembersihan, perbaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pemerintahan yang masih dapat dipergunakan, f) Mendukung ketersediaan kantor–kantor darurat tingkat kecamatan/mukim /kelurahan/desa, g) Melakukan penyelamatan dokumen administrasi pemerintahan, h) Melakukan penggalangan bantuan kerjasama antar daerah dalam pemberian bantuan keuangan, bantuan medis, dan peralatan lainnya, i) Memulihkan batas-batas administrasi wilayah (kecamatan/kelurahan/desa); j) Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang Otonomi Khusus Provinsi NAD, mahkamah NAD, serta kebijakan darurat sipil NAD.

Setelah strategi diatas dilaksanakan, dalam jangka menengah dilakukan kebijakan meningkatkan kapasitas pemerintahan di daerah, dengan strategi yang akan dilakukan sebagai berikut a) Melakukan penataan dan penyediaan aparatur pemerintah daerah, legislatif, pimpinan daerah dan aparatur pusat; b) Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda dan anggota legislatif dalam proses penyusunan rencana daerah, dan pengelolaan keuangan daerah; c) Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda dalam menghadapi ancaman bencana alam dan buatan, melalui pelatihan-pelatihan teknis manajerial dan pengembangan sistem deteksi dini, d) Memperbaiki sistem administrasi pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang tidak diduga (bencana alam dan bencana buatan), e) Memperbaiki dan menata struktur kelembagaan yang proporsional dan prosedur kerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, untuk memenuhi SPM; f) Menciptakan dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama antar tingkat pemerintahan.

Untuk mempercepat pelayanan umum, maka kebijakan mempercepat penyediaan sarana dan prasarana lembaga pemerintahan yang permanen perlu dilakukan, melalui strategi: a) Merehabilitasi prasarana pemerintah daerah yang permanen berdasarkan masterplan dan rencana teknis (DED); b) Menyediakan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik.; dan c) Memfasilitasi dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana trauma centre, sistem kehumasan Pemda, dan forum komunikasi.

(b) Sub Bidang Kelembagaan Agama, Adat, dan Sosial lainnya

Di dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan peranserta lembaga agama, adat, dan sosial lainnya tingkat mukim dan gampong, strategi yang akan dilakukan adalah a) Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga agama, adat, dan sosial lainnya dalam menghadapi ancaman bencana dan berpartisipasi dalam proses kebijakan publik melalui pelatihan-pelatihan teknis managerial, pengembangan sistem deteksi dini, serta pengembangan ruang dan mekanisme partisipasi; b) Melibatkan perangkat mukim dan gampong dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, c) Meningkatkan peran dewan penasihat mukim dan gampong, serta dewan ulama mukim dan gampong dalam pengawasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selain itu dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan diatas, diperlukan sarana dan prasarana yang mempermudah stakeholder berinteraksi, untuk itu strateginya adalah menyediakan sarana dan prasarana sosial lembaga agama, adat, dan sosial lainnya tingkat mukim dan gampong seperti pembangunan meunasah dan bale sebagai tempat bermusyawarah.

(c) Sub Bidang Hukum

Kebijakan di bidang hukum adalah 1) Mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan, penegakan hukum dan HAM, melalui strategi pemulihan dan pemberian hak-hak keperdataan serta penerbitan kembali alat bukti haknya, pemulihan hak-hak yang berkaitan dengan hukum publik, pemberian kembali dokumen identitas, pemberian status hukum Baital Maal sebagai subjek hukum

khusus bagi Provinsi NAD; 2) Mengembalikan fungsi dan tugas pelayanan hukum, adalah melalui strategi mobilisasi tenaga hakim dan tenaga peradilan lainnya serta jaksa dari daerah lain, merehabilitasi dan membangun kembali sarana dan prasarana pengadilan dan kejaksaan serta sarana pendukung lainnya. Dan 3) Kebijakan terakhir adalah menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperhatikan pengarusutamaan kesetaraan gender, melalui strategi menyusun substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang: Pertanahan dan tata ruang; Ekonomi dan Ketenagakerjaan; dan Hukum

5. Bidang Pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)

Bidang pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan masyarakat (K3M) merupakan bidang yang tercantum pada saat penyusunan Rencana Induk. Sedangkan dalam perkembangannya, dengan adanya implementasi dari perjanjian perdamaian antara pihak GAM dan pemerintah Indonesia di Helinski pada tanggal 15 Agustus 2005 (MoU Helinski), maka substansi K3M berkembang dengan meliputi reintegrasi mantan GAM.

Kebijakan membangun masyarakat Aceh melalui penciptaan kematangan dan kedewasaan sosial politik adalah dengan fasilitasi peran masyarakat sipil dalam membantu peningkatan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan; restrukturisasi dan reorientasi lembaga masyarakat, lembaga ekonomi, dan pemerintahan; pengelolaan dampak bencana berupa kegiatan kemanusiaan, peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, refungsionalisasi pemerintahan, dukungan rehabilitasi dan dukungan rekonstruksi dengan pendekatan sosio-kultural; membangun karakter dan kebangsaan yang mandiri dan berkualitas; melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang pembangunan di Aceh; memantapkan otonomi khusus Propinsi Nanggroe Aceh; dan mengembangkan *insentive framework* yang menyeluruh.

Kebijakan membangun masyarakat Aceh melalui penciptakan rasa aman dan tertib melalui strategi pelaksanaan refungsionalisasi lembaga–lembaga keamanan dan ketertiban; melaksanakan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah pengungsian; memantapkan keamanan dengan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah yang kondisi keamanan dan ketertibannya relatif kondusif; mengamankan proses rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana serta aktivitas sosial ekonomi; dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah-daerah yang rawan.

B. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dijelaskan disini meliputi lima bidang pemulihan berdasarkan Rencana Induk:

1. Bidang Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Tabel III.1
Program dan Kegiatan Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Rencana Induk

No.	Program	Kegiatan
1	Bidang Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Sub bidang Transportasi Darat	1. Rehabilitasi jalan nasional dan provinsi lintas timur (4 paket) dan Rekonstruksi lintas timur (4 paket)) 2. Rehabilitasi Jalan nasional dan Provinsi lintas barat (6 paket) dan Rekonstruksi lintas barat (8 paket)) 3. Rehabilitasi Jalan nasional dan Provinsi lintas tengah (8 paket) dan Rekonstruksi lintas tengah (8 paket) 4. Rehabilitasi Jalan nasional dan Provinsi lintas lainnya (20 paket) dan Rekonstruksi lintas lainnya (48 paket) 5. Rehabilitasi Jalan kabupaten (23 paket) dn Rekonstruksi : 23 paket.
2	Transportasi Laut dan ASDP	1. Kegiatan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi laut 2. Kegiatan rehabilitasi prasarana dan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) 3. Kegiatan rekonstruksi prasarana dan sarana ASDP
3	Transportasi Udara	1. Kegiatan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi udara 2. Kegiatan rekonstruksi prasarana dan sarana transportasi udara
4	SAR dan BMG	Rekonstruksi prasarana dan sarana SAR
5	Energi dan Listrik	1. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana energi 2. Kegiatan rehabilitasi prasarana dan sarana ketenagalistrikan 3. Kegiatan rekonstruksi prasarana dan sarana ketenagalistrikan
6	Pos dan Telematika	1. Rehabilitasi bidang pos dan telematika 2. Rekonstruksi bidang pos dan telematika
7	Perumahan	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan di NAD dan Kepulauan Nias
8	Air Minum dan Sanitasi	1. Rehabilitasi dan rekonstruksi pelayanan 2. Sanitasi 3. Persampahan 4. Drainase
9	Sumber Daya Air	Rehabilitasi jaringan irigasi dan Rekonstruksi jaringan irigasi
10	Prasarana Pengendali Banjir dan Pengamanan Pantai	1. Rehabilitasi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai : Sungai dan Pengendalian Banjir 2. Rekonstruksi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
11	Sub Bidang Prasarana Lainnya	1. Rehabilitasi prasarana dan sarana 2. Rekonstruksi prasarana dan sarana
12	Tata Ruang dan Pertanahan	1. Penyediaan Peta Dasar Tata Ruang 2. Pengelolaan Pertanahan 3. Pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan pengelolaan dan pelayanan pertanahan 4. Pembangunan fisik kadastral 5. Penyusunan rencana tata guna tanah 6. Pengadaan peralatan komputerisasi, training, pembangunan database digital 7. Pembuatan sertifikat pengganti 8. Konsolidasi tanah 9. Penanganan sengketa pertanahan 10. Penyusunan naskah perundang-undangan dan penyuluhan 11. Penyusunan Revisi RTRW Provinsi 12. Bantuan Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota (13 Kabupaten / Kota). 13. Rencana Teknis Ruang Kawasan / Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 14. Penelitian geologi

No.	Program	Kegiatan
		15. Penyusunan rencana tindak manajemen bencana dan sosialisasi Pencegahan Bencana 16. Penyusunan naskah peraturan perundangan bidang pertanahan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kep. Nias
13	Sumber Daya Alam	1. Mengamankan fungsi kawasan lindung yang ada 2. Meningkatkan sistem pengawasan kawasan lindung dan TNGL dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengawas 3. Membina kader konservasi dan generasi muda dalam kegiatan pengamanan kawasan lindung dan koservasi lainnya 4. Meningkatkan pembinaan, pengendalian pengusahaan pemanfaatan hutan produksi 5. Membangun zona penyangga, kawasan tambak serta hutan kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan karakter pantai : 6. Rehabilitasi tanaman mangrove di daerah lokasi asal tanaman mangrove 7. Rehabilitasi kawasan tambak dan ekosistem habitat kritis 8. Penghijauan dan Pembangunan Hutan Kota 9. Merehabilitasi terumbu karang 10. Penilaian dan pendataan kembali jenis dan kondisi terumbu karang 11. Pembangunan unit-unit artificial fishing ground (rumpon dan atrificial reef) 12. Menyusun mekanisme kelembagaan untuk pengelolaan terumbu karang 13. Pemulihan Kembali Kegiatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Sumber Daya Alam 14. Memulihkan Kegiatan Pertanian 15. Memulihkan Kegiatan Kelautan dan Perikanan 16. Menjamin ketersediaan dasar SDA sebagai material dasar pembangunan..
14	Lingkungan Hidup	1. Survey Berkala Parameter Pencemar : 2. Pengambilan sampel dan uji laboratorium kualitas air permukaan, air tanah, serta udara di seluruh wilayah yang terkena dampak tsunami. 3. Pendataan kembali kemungkinan pencemaran Bahan Berbahaya Beracun (B3) di seluruh wilayah yang terkena dampak 4. Pembersihan kota yang mencakup kegiatan : 5. Pembersihan lumpur sisa tsunami 6. Pembersihan puing dan sampah tsunami 7. Penetapan lokasi tempat pembuangan lumpur, puing, sampah tsunami 8. Penataan sistem pengumpulan sampah domestik termasuk perencanaan rehabilitasi TPA lama dan perencanaan lokasi TPA baru. 9. Mengamankan dan menginformasikan wilayah yang terkena pencemaran dan bahaya kegempaan: 10. Pengukuran gerakan tanah dan pemetaan kegempaan secara periodik di wilayah NAD, Nias dan sekitarnya 11. Pengembangan Sistem Basis Data Informasi Lingkungan, Kerentanan Bahaya Geologi 12. Penetapan status daerah rawan bencana alam 13. Sosialisasi kualitas lingkungan dan bahaya kegempaan 14. Merehabilitasi tanah untuk pertanian 15. Melakukan survai dan evaluasi tanah yang terkena dampak tsunami. 16. Mengelompokkan klasifikasi tanah dan penyebaran pencemaran dalam peta tanah;

No.	Program	Kegiatan
		17. Melakukan evaluasi dan rekomendasi kemampuan dan kesesuaian tanah. 18. Melakukan rehabilitasi atau perbaikan kualitas tanah agar dapat ditanami kembali. 19. Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai. 20. Pengelolaan lahan melalui usaha tata guna lahan 21. Melindungi dan mengembangkan sumber-sumber air 22. Pengelolaan vegetasi melalui pengelolaan hutan yang memiliki fungsi perlindungan terhadap tanah dan tata air.

2. Bidang Sosial Budaya

Program dan kegiatan bidang pemulihan sosial budaya berdasarkan rencana induk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2
Program dan Kegiatan Bidang Pemulihan Sosial Budaya
Berdasarkan Rencana Induk

No.	Program	Kegiatan
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Taman kanak-Kanak, Raudatul Athfal, Taman PAUD, dan taman Pendidikan Alquran, yang meliputi : 1. Penyediaan pelayanan pendidikan tanggap darurat 2. Trauma Conselling 3. Penyediaan materi belajar mengajar termasuk buku dan peralatan PAUD 4. Pemberian beasiswa bagi siswa yang terkena bencana 5. Rehabilitasi, rekonstruksi, dan perluasan sarana dan prasarana pendidikan 6. penyediaan bantuan biaya operasional pendidikan 7. Penilaian monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan
2	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, mencakup SD/MI/paket A setara SD dan SMP/MTs/paket B setara SMP: 1. Pelayanan pendidikan tanggap darurat dan pembelajaran remedial 2 Trauma Conselling bagi anak-anak usia sekolah di daerah bencana 3. Penyediaan materi belajar mengajar termasuk buku dan peralatan pendidikan, serta fasilitas teknologi komunikasi dan informasi 4. Pemberian beasiswa bagi siswa yang terkena bencana dan anak-anak yang tidak memiliki keluarga lagi 5. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak. 6. Perluasan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dasar yang bermutu untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan termasuk asrama siswa 7. Penyediaan biaya operasional pendidikan 8. Penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
3	Pendidikan Menengah	Penyelenggaraan pendidikan yang mencakup SMA/SMK/MA: 1. Pelayanan pendidikan tanggap darurat dan pembelajaran remedial, pengiriman siswa SMK ke sekolah yang tidak terkena bencana, ke pusat Pengembangan Penataran guru di Medan, Malang, Yogyakarta, Cianjur, Bandung, Bogor. 2. Trauma Conselling bagi anak-anak usia sekolah di daerah bencana

No.	Program	Kegiatan
		3. Penyediaan materi belajar mengajar termasuk buku dan peralatan pendidikan, serta fasilitas teknologi komunikasi dan informasi 4. Pemberian beasiswa bagi siswa yang terkena bencana dan anak-anak yang tidak memiliki keluarga lagi. 5. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana pendidikan yang rusak. 6. Perluasan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dasar secara merata 7. Penyediaan biaya operasional pendidikan 8. Penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
4	Pendidikan Tinggi	1. Penyediaan pelayanan pendidikan tanggap darurat 2. Trauma Conselling bagi mahasiswa di daerah bencana 3. Penyediaan materi perkuliahan termasuk buku perpustakaan dan peralatan perkuliahan. 4. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa terkena bencana dana mahasiswa dari keluarga miskin termasuk biaya hidup bagi mahasiswa yang tidak memiliki keluarga lagi. 5. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan tinggi termasuk laboratorium dan perpustakaan 6. Penyediaan biaya operasional pendidikan.
5	Pendidikan Non Formal	1. Penyediaan pelayanan pendidikan tanggap darurat 2. Trauma Conselling bagi peserta didik di daerah bencana, penyediaan materi belajar mengajar termasuk buku dan peralatan pendidikan 3. Pemberian beasiswa bagi warga belajar 4. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan non formal 5. Pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional 6. Pelaksanaan pendidikan kterampilan terutama utnuk menyediakan tenaga terampil. 7. Penyediaan biaya operasional pendidikan non formal. 8. Penilaian monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan
6	Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengangkatan guru baru/kontrak, guru bantu sementara, serta penempatan dan pelatihan pendidikan dan kependidikan.
7	Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Konsolidasi manajemen pelayanan pendidikan pusat, provinsi, kabupaten/ kota. 2. Peningkatan kemampuan pengelola pendidikan di provinsi dan Kab/Kota 3. Palayaan Majelis Pendidikan Daerah tingkat provinsi kabupaten/kota untuk provinsi NAD dan Dewan pendidikan di Kabupaten Nias dan Nias Selatan di Sumatera Utara 4. Penyediaan biaya operasional posko pendidikan di pusat, prov, kabupaten/kota.
8	Pembinaan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan	Pembangunan dan rehabilitasi Pondok Pesantren, bantuan operasional dan biaya hidup santri yatim piatu, bantuan pendidik Pondok Pesantren, sarana belajar dan peralatan administrasi.
9	Lingkungan Sehat	Peningkatan lingkungan sehat melalui kemampuan kewaspadaan dini, investigasi dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan perbaikan sarana sanitasi lingkungan.

No.	Program	Kegiatan
10	Upaya Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Perorangan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar melalui peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan, rehabilitasi dan pembangunan kembali puskesmas dan jaringan termasukpolindes, posyandu, rumah dokter dan paramedis, pos kesehatan pengungsi, pengadaan peralatan puskesmas dan pengadan puskesmas keliling. Pelayanan kesehatan rujukan, melalui rehabilitasi rumah sakit rusak, pembangunan rumah sakit rusak total, pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit yang meliputi peralatan medis dan non medis dan prasarana lainnya, pengadaan tenaga kontrak kese hatan di rumah sakit, penyediaan biaya operasional rumah sakit, dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit.
11	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	1. Surveilens epidemiologi 2. Imunisasi, vector controldisinfeksi dan puri fikasi air minum 3. Perbaikan sarana sanitasi lingkungan 4. Pembangunan 2 unit Gedung KKP 5. Pengadaan obat/vaksin perlengkapan dan peralatan kesehatan.
12	Perbaikan Gizi Masyarakat	Memperbaiki status gizi masyarakat, dengan: 1. Pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI), tablet besi, vitamin A, , syrup besi, biskuit, susu & makanan lain 2. Surveilens gizi 3. Pelatihan petugas gizi 4. Menyelenggarakan pelayanan dasar untuk perbaikan gizi masyarakat
13	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pembangunan gedung obat, penyediaan buffer stock obat dan perbekalan kesehatan, dan penyediaan peralatan dan operasional.
14	Sumber Daya Kesehatan	1. Mobilisasi tenaga kesehatan relawan dalam dalam negeri dan luar negeri 2. Penugasan khusus tenaga kesehatan dan Bridge Siaga Bencana (BSB) 3. Pendataan pegawai kesehatan yang meninggal dan/atau hilang 4. Penempatan CPNS. 5. Sewa gedung untuk proses pembelajaran 6. Pengadaan peralatan pendidikan 7. Pembangunan gedung Poltekkes terpadu di NAD serta pengadaan sarana dan prasarana pendukungnya.
15	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Rehabilitasi dan pembangunan kantor Dinas Kesehatan NAD dan Dinkes Kab Aceh Jaya dan Kota Banda Aceh, Kab Nias dan Kab Nias Selatan.
16	Agama : Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Pembangunan kembali tempat ibadah, KUA dan asrama haji di prov NAD yang tersebar di kab/kota yang terkena bencana, pengadaan buku nikah, buku tata cara pelaksanaan syariah bagi aparat gampong, buku metode iqra', dan pembangunan Gedung Observasi Hilal.
17	Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Pembinaan imam masjid,Khatib, dai, guru pengajian, pengelola zakat dan baitul mall, pentasyid mayit.
18	Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Aparatur Negara	1. Pembangunan Kanwil Depag NAD 2. Pembangunan dan rehabilitasi Kandep Kota Banda Aceh, Aceh Pidie, Kab Aceh Jaya, Kab Aceh Barat, Kab Simeuleu, Kab Nias dan Kab Nias Selatan 3. Pembangunan/rehabilitasi gedung kantor Dinas Syariat Provinsi dan 3 Kab/Kota 4. Pembangunan gedung MPU provinsi dan 3 gedung MPU kab/Kota.

No.	Program	Kegiatan
19	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	1. Revitalisasi kelembagaan PP Propinsi NAD dan Nias Sumut 2. Pengarusutamaan gender(gender mainstreaming) 3. Pembuatan *assesment* data dan kebutuhan khusus perempuan dan anak.
20	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1. Fasilitasi *Crsis Center* 2. Pengembangan Pusat terpadu Pemberdayaan Perempuan 3. Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan 4. Dukungan hukum untuk perempuan
21	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	Fasilitasi *children center* meliputi dukungan untuk mendapatkan akte kelahiran gratis, bantuan hukum, pengembangan pola asuh anak.
23	Sosial Bantuan Jaminan Sosial	1. Bantuan tanggap darurat berupa beras, lauk pauk, dan peralatan dapur keluarga 2. Jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan sektor formal 3. Pembangunan *Trauma Center* 4. Bantuan bahan bangunan rumah bagi korban bencana yang hancur/rusak
24	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1. Pembangunan 5 Panti Sosial Anak(PSA) di Banda Aceh, PSA di Lhokseumawe, PSA Meulaboh Panti Sosial,Penyandang Cacat PSPC) di Banda Aceh, dan Panti Sosial Lanjut Usia (PSLU) di Meulaboh. 2. Peningkatan kapasitas PS Meuligoh Jhroh Nagu na Banda Aceh dan Rumah Singgah Sejahtera Daarus Sa'adah.
25	Pemberdayaan Keluarga Fakir miskin	1. Bantuan dan pengembangan usaha ekonomi produktif bagi fakir miskin korban bencana gempa bumi dan Tsunami 2. Rehabilitasi social daerah kumuh bagi keluarga fakir miskin 3. Pendampingan sosial dan monev 4. Peningkatan kesejahteraan keluarga sosial korban bencana. 5. Pemberdayaan 265 KK KAT
26	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Rehabilitasi panti sosial masyarakat 2. Rehabilitasi TMP,MPN dan rumah perintis kemerdekaan
27	Kebudayaan Pengembangan Nilai Budaya	Pemulihan kembali jati diri dan aset budaya masyarakat
27	Pengelolaan Keragaman Budaya	Rehabilitasi sarana, prasarana tinggalan purbakala, sejarah dan potensi budaya.
28	Pengelolaan kekayaan Budaya	Pembangunan Kembali Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.
29	Pengembangan Statistik	Pendataan lengkap penduduk NAD:,\ *Workshop* instruktur nasional, pelatihan instruktur daerah dan petugas pewawancara, pendataan penduduk, pengolahan data.
30	Pelayanan Keluarga Berencana	1. Penguatan institusi pelayanan KB kesehatan reproduksi melalui penyediaan ruang penginapan bagi petugas posko/relawan/pegawai/anak/pengungsi BKKBN provinsi, pembangunan prasarana operasional pelayanan KB/kesehatan, ruang operasional pelayanan konseling, pembangunan ruang penyimpanan alkon. 2. Membangun pusat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, meliputi rehabilitasi ruang kantor pengelola program KB di Kab/kota, pelayanan program KB/KR, pembinaan keluarga balita dan remaja serta usaha pembinaan usaha ekonomi produktif, pelayanan KIE dan pendataan keluarga. 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB/kesehatan reproduksi di klinik KB
31	Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	1. Penumbuhan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), penumbuhan Kelompok Pemuda Sebaya (KPS), dan pertukatan Pemuda Antar Propinsi(PPAP)

No.	Program	Kegiatan
		2. Monitoring dan evaluasi manajemen *life skills* 3. Pembinaan kewirausahaan pemuda 4. Bantuan untuk lembaga Kepemudaan 5. Penempatan SP3
32	Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga	Pemulihan kembali aktivitas olahraga disemua lapisan masyarakat, melalui peningkatan mutu SDM, pendataan olahraga, pembinaan akademik atlet pelajar (PPLP), pembinaan klub olahraga pelajar,
33	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rehabilitasi GOR KONI NAD, asrama PPLP, GSG Tanjung Harapan, gedung PERBASI, lapangan bola kaki,lapangan bola voli,lapangan tenis, atletik, kolam renang termasuk perlengka pan olahraga

sumber : lampiran 7-9 Perpres Nomor 30 Tahun 2005

3. Bidang Pemulihan Perekonomian

Tabel berikut dibawah ini merupakan program dan kegiatan bidang pemulihan perekonomian berdasarkan rencana induk (didalamnya mencakup 7 subbidang yaitu subbidang kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, pariwisata, tenaga kerja dan koperasi & UKM).

Tabel III.3
Program dan Kegiatan Bidang Pemulihan Perekonomian
Berdasarkan Rencana Induk

No.	Program	Kegiatan
1	Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana dan Bantuan Privat	1. Bantuan pengolahan ikan skala kecil & KUB di 21 Kabupaten/Kota 2. Bantuan alat tangkap (pancing/jaring) di 21 Kabupaten/Kota 3. Bantuan armada tangkap di 21 Kabupaten/Kota 4. Rehabilitasi tambak, bantuan pompa air dan modal usaha di Aceh Selatan, Simelue, Kota langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Sabang, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Besar, Bireuen, Pidie, Banda Aceh, Lhokseumawe dan Nias
2	Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Publik	1. Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Lampulo di Banda Aceh dan Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Lambada di Aceh Besar 2. Pelabuhan perikanan Kuala Tapu di Nagan Raya, Sigli, Peudada di Bireun, Lhoknga di Aceh Besar, Ule-uleu di Banda Aceh, Meuredeu di Pidie, Melaboh di Aceh Barat, Lhokseumawe, Calang di Aceh Jaya, Pasiran, dan PPI Krueng Raya di Sabang, Seuriget di Langsa dan Pulau Nias 3. Masterplan & DD pertambakan di seluruh NAD 4. DD rehab saluran tambak dan pembinaan budidaya di Aceh Selatan, Kota langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Sabang, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Aceh Besar, Bireuen dan Pidie 5. Pembinaan dan pembangunan BBIP di Simelue 6. BB Ule Lhee dan Loka Ujung Batee di Banda Aceh 7. BPIP di Nias 8. Pembangunan lab. uji mutu dan pengolahan ikan Lampulo di Banda Aceh 9. Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong dan pengadaan kapal latih/riset di Banda Aceh 10. Pos karantina ikan Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh 11. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan NAD & Sumut

No.	Program	Kegiatan
3	Perbaikan & pembangunan kembali prasarana umum di 13 Kabupaten (Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Simeuleu, dan Nias).	1. Rehabilitasi/pembangunan saluran air & irigasi tersier & kuarter (menurut skim & tipe) dan rehabilitasi struktur lahan 2. Rehabilitasi jalan usaha tani/ produksi 3. Pembangunan unit pembibitan /pembenihan 4. Pembangunan fasilitas pemasaran hasil pertanian 5. Pembangunan pos kesehatan hewan (Poskeswan) 6. Penelitian & pengembangan teknologi tepat guna 7. Rehabilitasi/pembangunan prasarana & sarana kerja pertani-an (kantor dinas, karantina, balai penyuluhan, balai diklat pertanian dan laboratorium)
4	Pemulihan usaha ekonomi masyarakat dan partisipasi swasta di 13 Kabupaten (Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Simeuleu, dan Nias).	1. Bantuan sarana pertanian produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. 2. Ameliorasi tanah 3. Pengembangan pertanian terpadu 4. Penyediaan modal kerja untuk usaha pertanian (hulu-onfarm-hilir) 5. Bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 6. Bantuan kios sarana produksi pertanian 7. Bantuan bimbingan, pelatihan, pendampingan dan pembinaan
5	Rekonstruksi Sarana Laboratoruim dan Sarana Baristan di Banda Aceh	1. Pembangunan gedung kantor, pelatihan dan laboratorium 2. Pengadaan dan perbaikan alat laboratorium 3. Pengadaan perlengkapan kantor 4. Kegiatan Operasional Pendukung
6	Rekonstruksi Sarana Laboratorium dan Sarana SMTI di Banda Aceh	1. Pembersihan Alat laboratorium 2. Pengadaan peralatan 3. Pengadaan bahan kimia
7	Rehabilitasi & Rekonstruksi : Tenda Pasar Darurat dan Pasar Tradisional Permanen	1. Pemasangan Tenda Pasar Darurat sebanyak 4800 tenda pasar di 22 Kabupaten/Kota (Banda Aceh 700 buah, Pidie 300 buah, Aceh besar 300 buah, Bireuen 300 buah, Aceh Utara 250 buah, Lhokseumawe 150 buah, Aceh Timur 100 buah, Aceh Jaya 300 buah, Aceh Barat 300 buah, Nagan Raya 200 buah, Sinabang 100 buah, Aceh Barat Daya 100 buah, Aceh Selatan 100 buah, Aceh Singkil 100 buah, Aceh Tenggara 100 buah, Gayo Luwes 100 buah, Aceh Tamiang 100 buah, Langsa 100 buah, Aceh Tengah 100 buah, Bener Meuriah 100 buah, Sabang 100 buah dan Sumut/Nias 800 buah) 2. Pembangunan kembali pasar tradisional permanen 193 pasar tradisional di Propinsi NAD dan Nias (Banda Aceh 1 unit, Aceh Besar 5 unit (Kec. Lhoknga, Leupung, Lhong, Krung Raya, Pulo Aceh), Pidie 3 unit (Kec. Simpang Tiga, Kembang Tanjung, Panteraja), Bireuen 3 unit (Kec. Samalanga, Krueng Mane, Kuta Blang), Aceh Utara 2 unit, (Kec. Samtalira Bayu, Seuneudon), Aceh Selatan 2 unit (Kec. Labuhan Haji, Trumon Timur), Aceh Timur 2 unit (Kec. Idi Cut, Idi Rayek), Aceh Selatan 2 unit(Kec. Labuhan Haji, Trumon Timur), Aceh Jaya 4 unit (kec. Calang, Teunom, Sampoiniet, Panga), Aceh Barat 2 unit (Kec. Kuala, Arongan Balek), Abdya 2 unit (Kec. Susoh, Manggang), Simeuleu 1 unit (Kec. Simeulue Timur), Aceh Tamiang 1 unit (Kec. Seurewey), Sabang 1 unit (Kec. Sukakarya), Nias 3 unit (Kec. Sirombu, Manrehe, Liduho)
8	Pasar Grosir/Induk	Pembangunan pasar grosir/induk sebanyak 18 buah di 18 Kabupaten/Kota di Provinsi NAD dan SUMUT

No.	Program	Kegiatan
9	Pergudangan	Pembangunan fasilitas pergudangan sebanyak 19 gudang di Provinsi NAD dan SUMUT
10	Kemetrologian	Pengadaan alat laboratorium dan peralatan kantor di Provinsi NAD dan SUMUT
11	Koordinasi Posko	Posko koordinasi sektor perdagangan di Pusat
12	Rehabilitasi/Rekonstruksi Sarana dan prasarana di Kawasan pariwisata serta Objek serta daya Tarik Wisata	Rehabilitasi & rekonstruksi sarana dan prasaarana pariwisata yang rusak terkena bencana dan pengadaan sarana angkutan wisata darat di Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Tenggara, Singkil, Sinabang, Aceh Barat Daya, Gunung Sitoli, Nias Selatan dan Banda Aceh
13	Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Publik	1. Pembangunan balai latihan kerja bidang konstruksi di Lhoksumawe (1 unit) dan Banda Aceh (1 unit) 2. Pembangunan kantor latihan kerja usaha kecil & menengah bidang wirausaha di Meulaboh (1 unit) dan Langsa (1 unit) 3. Pembangunan balai latihan kerja bidang nelayan di Sabang (1 unit)
14	Perluasan & Pengembangan Kesempatan Kerja	1. Padat karya produktif 2. Pengerahan TKS 3. Mengatasi pengangguran 4. Informasi bursa kerja dan pemetaan tenaga kerja.
15	Peningkatan Kualitas & Produktivitas	1. Pelatihan masyarakat untuk kejuruan 2. Latihan ketrampilan untuk tenaga kerja
16	Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	1. Penyusunan peta permasalahan HI 2. Bimbingan pegawai perantara & staf HI & pelaku HI 3. Pengawasan & pemantauan dalam rangka mencegah eksploitasi anak 4. Pemetaan objek pengawasan 5. Penyelesaian status hubungan kerja dan hak normatif tenaga kerja 6. Penanganan tenaga kerja perempuan 7. Pelatihan calon pengawas ketenagakerjaan
17	Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	1. Pengembangan sarana & prasarana HI di 9 kab 2. Pemeriksaan kesahatan fisik dan mental kerja 3. Memfasilitasi pembentukan employee & employer assistance sebagai sarana konseling bagi pekerja & pengusaha 4. Pelatihan occupational therapy bagi dokter & paramedis 5. Pembuatan pedoman penanganan pelanggaran norma kerja perempuan dan anak 6. Pembelian alat uji keselamatan & kesehatan kerja
18	Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana Publik	1. Perbaikan fasilitasi kios UKM di Banda Aceh 2. Perbaikan gerobak dorong UKM di Banda Aceh 3. Pendataan profil koperasi di Banda Aceh 4. Pendataan profil UKM di Banda Aceh 5. Renovasi 8 pasar tradisional di Aceh Besar 6. Pembangunan kembali pasar bina usaha (pasar grosir) di Aceh Barat 7. Pembangunan kembali pasar larang sawi (pasar eceran) di Aceh Barat 8. Pembangunan kembali pasar 2 ikan di Aceh Barat 9. Pembangunan kembali TPI di Aceh Barat 10. Perbaikan sarana & prasarana pasar di Aceh Jaya, Pidie, Bireun, Aceh Timur, Tamiang 11. Pembangunan sarana & prasarana yang hancur/hanyut di Simeulue, Aceh Utara 12. Rehabilitasi dan pembangunan pasar tradisional di Sabang, Bener Meriah dan Nagan Raya 13. Pembuatan pasar tradisional (300 Unit Kios & 550 Unit Tenda) di Langsa 14. Pembangunan sarana usaha pasar darurat di Aceh Selatan

No.	Program	Kegiatan
		15. Perbaikan/renovasi sarana & prasarana pasar ikan yang dikelola koperasi di Aceh Barat Daya 16. Pembangunan 3 pasar di Aceh Singkil 17. Rehabilitasi/renovasi pasar di Nias

Sumber : Buku Rinci Bidang Ekonomi dan ketenagakerjaan, Lampiran V Perpres No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD-Nias

4. Bidang Pemulihan Kelembagaan

Tabel III.4
Program dan Kegiatan Bidang Pemulihan Kelembagaan
Berdasarkan Rencana Induk

No.	Program	Kegiatan
A	**Sub Bidang Kelembagaan**	
1	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah daerah	1. Pemberdayaan dan fasilitasi aparat untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum serta mempersiapkan kapasitas untuk operasionalisasi dan implementasi rencana 2. Penyiapan rencana perbaikan sistim dan prosedur pasca bencana alam dan bencana buatan bagi PNS dan keluarganya dalam rangka mengatasi trauma bagi PNS. 3. Penanganan masalah administrasi kepegawaian (gaji, tunjangan, asuransi, dsb) dan dukungan trauma bagi PNS dan keluarganya 4. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana. 5. (a) Penyediaan tenaga-tenaga kontrak/suplemen, (b) Penyelesaian rekrutmen CPNS yang telah dilaksanakan, (c) Penataan dan penyediaan aparatur pemerintah daerah sesuai dengan perubahan jumlah penduduk yang dilayani dan rencana pengelolaannya
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.	1. Penataan kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan perubahan jumlah penduduk dan pembangunan daerah. 2. Bantuan operasionalisasi penyelenggaraan dan peningkatan pemerintah tingkat kecamatan/mukim/ gampong 3. Penyusunan rencana perbaikan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah daerah dan sosialisasinya serta pelaksanaaan sistem dan prosedur 4. (a) Pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintah daerah yang permanen berdasarkan masterplan dan rencana teknis, serta menyediakan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana (b) Penyediaan sarana dan kantor sistem informasi pelayanan masyarakat (Media Center)
3	Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.	1. Peningkatan kapasitas legislatif daerah dalam penyusunan rencana dan monitoring pengelolaan keuangan daerah 2. Penataan keuangan daerah dan pengelolaannya
4	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	1. Optimalisasi jaringan kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota dan antar provinsi 2. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah
5	Penataan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desentralisasi Otonomi Daerah	Harmonisasi peraturan perundang-undangan yg terdapat di Aceh
6	Penataan Administrasi Penduduk	Pendataan penduduk

No.	Program	Kegiatan
7	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dukungan terhadap trauma center yang ada
8	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana (pelatihan evacuation, SAR, P3K, dll) 2. Penguatan dan faslitasi lembaga agama,adat dan sosial lainnya pada tingkat mukim /gampong yang ada 3. Penyediaan sarana dan prasaran berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat/lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l Tuha Peut, dll)
9	Pengelolaan Pertanahan	Penataan batas-batas administrasi wilayah Aceh yang telah berubah akibat bencana
10	Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Dukungan terhadap penataan/penyiapan pimpinan daerah dan legislatif daerah (termasuk tata cara penyusunan pengelolaan keuangan daerah).
11	Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur	Fasilitasi penyediaan aparat pemerintah pusat utk instansi vertikal di Aceh dan proses mutasinya
B	Sub Bidang Hukum	
1	Mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dan HAM	1. Pemulihkan dan pemberikan hak-hak keperdataan serta penerbitan kembali alat bukti haknya a. Menetapkan mengenai status hukum ahli waris dan objek b. Menetapkan status harta benda yang tidak ada lagi pemiliknya c. Menetapkan status kepemilikan hak atas tanah baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar d. Menetapkan hak perwalian dan pengasuhan anak e. Menetapakan HAKI 2. Pemulihkan hak-hak yang berkaitan dengan hukum publik 3. Pemberian kembali dokumen identitas a. Menetapkan kepastian hilang/meniggalnya seseorang b. Menetapkan status kelahiran c. Menetapkan status perkawinan/perceraian 4. 4. Pemberian status hukum Baital Maal sebagai subjek hukum khusus bagi Provinsi NAD 5. Memberdayakan lembaga adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan
2	Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana hukum	1. Pembentukan Posko penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum terpadu 2. Rehabilitasi dan pembangunan kembali sarana dan prasarana hukum
3	Penambahan dan peningkatan kualitas SDM aparatur hukum	1. Penataan dan penyediaan (melalui rekruitmen dan mutasi) aparatur hukum 2. Peningkatan kualitas SDM aparatur hukum
4	Menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Menyusun substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang hukum

Sumber : Lampiran 6 Bidang Kelembagaan dan Lampiran 9 Bidang Hukum RIRRWANS, 2006

5 Bidang Bidang Pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat serta Reintegrasi Mantan GAM

Tabel III.5
Program dan Kegiatan Bidang pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) serta Reintegrasi Mantan GAM Berdasarkan Rencana Induk

No.	Program	Kegiatan	
1	Refungsionalisasi Kelembagaan TNI	1.	Pengadaan Material Bekum, Alpal Mabes TNI Lokasi : NAD Simeulue, Nias.
		2.	Rehabilitasi kantor Dilmil/ Ormil-101/ Babinkum Banda Aceh
		3.	Rehabilitasi Gedung Denkomlekstrada Lokasi: Banda aceh
		4.	Rehabilitasi Gedung Subdenkomlekstrada Meulaboh, Lhokseumawe
		5.	Rehabilitasi Mako Satgas Muara Yon 2, Yon 3, Lhokseumawe
		6.	Rehabilitasi Mako Satgas 12 Lokasi : Meulaboh
		7.	Rehabilitasi Mako Yonif 100/ Raider Lokasi : Meulaboh
		8.	Rehabilitasi Mako Yonzipur 9 Kostrad Lokasi : Meulaboh
		9.	Rehabilitasi Mako Yonif 521, Yonif 623, Lokasi : Meulaboh
		10.	Rehabilitasi Gudang Satgas Banmin Lokasi : Meulaboh
		11.	Rehabilitasi Kout -3 Satgaspur Lokasi : Pidie
		12.	Rehabilitasi RS.TK IV Meulaboh Lokasi : Meulaboh
		13.	Rehabilitasi RS.TK III Banda Aceh Lokasi : Banda Aceh
		14.	Rehabilitasi Polban Sigli Lokasi : Sigli
		15.	Rehabilitasi RS.TK IV Lhokseumawe
		16.	Rehabilitasi Satgas Komlek Opslihkam Lokasi : NAD
		17.	Pengadaan Alpal TNI AD Lokasi : NAD
		18.	Pembelian Tanah untuk Asrama di KODIM 0101 Aceh Besar
		19.	Pembelian Tanah untuk Asrama di KODIM 0105 Aceh Barat
		20.	Pembelian Tanah untuk Asrama Benteng Lokasi : Pidie
		21.	Rehabilitasi Bangfas Milik Mabes TNI Lokasi : NAD
		22.	Rehabilitasi Prasarana Milik Mabes TNI Lokasi : NAD, Simeulue, Nias
		23.	Rehabilitasi Alkoms Milik Mabes TNI NAD, Simeulue, Nias
		24.	Pengadaan Material Bekum Lanal Sabang Lokasi : Sabang
		25.	Pengadaan Material Bekum Fasharkan Sabang
		26.	Pengadaan Material Alpal TNI AL Lokasi : NAD
		27.	Rehabilitasi Lanal Sabang Lokasi : Sabang
		28.	Rehabilitasi Fasharkan Sabang Lokasi : Sabang
		29.	Rehabilitasi Lanal Lhokseumawe Lokasi : Lhokseumawe
		30.	Rehabilitasi Material Bidang Alkom TNI AL NAD
2	Refungsionalisasi Kelembagaan	1.	Pengadaan Material Bidang Alpal TNI AU Lokasi : NAD
		2.	Rehabilitasi Lanud Maimun Saleh Lokasi : Sabang
		3.	Rehabilitasi Satrad 209 Sabang Lokasi : Sabang
		4.	Rehabilitasi Lanud Iskandar Muda Lokasi : Banda Aceh
		5.	Rehabilitasi Satrad 204 Lhokseumawe
		6.	Rehabilitasi Taxiway Light & Apron Light Banda Aceh
		7.	Rehabilitasi Lanud Cut Nyak Dien Lokasi : Meulaboh
		8.	Rehabilitasi Bangmat Alsatri TNI AU Lokasi : NAD
3	Dukungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1.	Pengadaan Rumah Sakit Lapangan Lokasi : NAD, Simeulue, Nias
		2.	Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Simeulu
		3.	Operasi Bhakti TNI Lokasi : NAD, Simeulue Nias
		4.	Dukungan Pelayanan Kesehatan Lokasi : NAD
4	Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Daerah	1.	Mobilisasi Pasukan TNI Lokasi : NAD, Simeulue, Nias
		2.	Mobilisasi Pasukan POLRI Lokasi : NAD

No.	Program	Kegiatan	
5	Refungsionalisasi Kelembagaan POLRI	1.	Relokasi Personel Polda NAD Lokasi : NAD
		2.	Pembuatan Renskep/ Skep Pergantian Personel
		3.	Penyiapan/ Pergantian Personel Lokasi : NAD
		4.	Pembangunan Penampungan Sementara Lokasi : NAD
		5.	Rehabilitasi Mapolda Lokasi : Banda Aceh
		6.	Rehabilitasi Markas Brimobda, Markas Dit.POLAIR
		7.	Pembangunan Kembali Asrama Ditpol Air
		8.	Rehabilitasi Polres Aceh Besar, Polres Aceh Barat, Polres Pidie, Polres Simeulue
		9.	Pembangunan Kembali Rumah Jabatan Polda
		10.	Pembangunan Kembali Asrama Polisi, Asrama Brimob Lingke, Asrama Polisi Ulhe Lheu, Asrama Polresta Banda Aceh di Ulhe Lheu
		11.	Rehabilitasi Polresta Banda Aceh Lokasi : Banda Aceh
		12.	Pembangunan Kembali Asrama Polisi Lamjame, Asrama Polisi Punge, Asrama Polresta Banda Aceh di Kebun Kelapa, Asrama Polisi Kebun Kelapa.
		13.	Pembangunan Kembali Aspolsek Kuta Alam, Aspolsek Darussalam, Aspolsek Krueng Raya, Aspolsek Peukan Bada, Aspolres Pidie
		14.	Pembangunan Kembali Aspolres Aceh Barat, Aspolsek Sama Tiga, Aspolsek Johan, Aspolsek Setia Bakti.
		15.	Pembangunan Kembali Aspolsek Sampoinet, Aspolsek Teunom, Aspolsek Krueng Sabe, Aspolsek Lhoknga, Aspolsek Leupung, Aspolsek Simeulue, Aspolsek Nias.
		16.	Pengadaan Material Dasar POLRI Lokasi : Nias
		17.	Pengadaan Peralatan Humas Polda NAD Lokasi : NAD
		18.	Operasionalisasi Alat Transportasi Lokasi : NAD
		19.	Pengadaan Alat/Alsus Serse Polda NAD Lokasi : NAD
6..	Refungsionalisasi Kelembagaan LSN	Pengadaan Kamar Sandi Dan Peralatan Sandi Lokasi : NAD	
7	Refungsionalisasi Kelembagaan POLHUKAM	Rehabilitasi Prasarana Bangunan Kantor Polhukam Lokasi : NAD	
8	Pengembangan Ketahanan Masyarakat	1.	Perumusan Kebijakan “Insentive Framework” NAD
		2.	Desk Aceh Lokasi : NAD
		3.	Pengembangan EWS Lokasi : NAD
		4.	Peningkatan Kualitas Informasi Publik NAD dan Nias
		5.	Bimbingan Teknis dan Replikasi Cinta Tanah Air dan Bhakti Pertiwi Lokasi : NAD dan Nias
		6.	Konsolidasi dan Penguatan Kelembagaan NAD dan Nias
		7.	Sosialisasi Bidang Polkam Lokasi : NAD dan Nias
		8.	Pemantauan Situasi Perkembangan Politik Masyarakat Lokasi : NAD dan Nias
		9.	Fasilitasi Pelembagaan Forum Kemasyarakatan Lokasi : NAD dan Nias
		10.	Pendataan Ulang Kependudukan/ Single Identity Number Lokasi : NAD
		11.	Pengkajian Kondisi Masyarakat Aceh Lokasi : NAD
9	Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Daerah	1.	Pengembangan Potensi Keamanan Lokasi : NAD
		2.	Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Lokasi : NAD
10	Refungsionalisasi Kelembagaan KOMINFO		Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Lokasi : NAD

3.2 BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (B R R)

Dalam rangka percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah provinsi Nanggroe Aceh darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pasca bencana, pemerintah telah membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi NA dan kepulauan Nias Provinsi Sumut (BRR) melalui penerbitan Perpu No. 2 tahun 2005 pada tanggal 16 April 2005. BRR terdiri dari tiga unsur kelembagaan yatu Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksanan (Bapel). Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 19 Perpu Nomor 2 Tahun 2005, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Perpres Nomor 34 Tahun 2005 tentyang susunan Organisasi dan Tata Kerja serta hak keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan kehidupan Masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi sumut. Guna efektifitas dan pemantapan operasionalisasi BRR telah diterbitkan pula Keppres Nomor 63M/2005 tentang penunjukan keanggotaan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan kehidupan Masyarakat di provinsi NAD dan kepulauan Nias Provinsi Sumut. BRR diberikan mandat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama tahun sejak 2005-2009. Pada masing-masing tahun tersebut ada target dan sasaran yang akan diraih.

3.2.1 Dewan Pengarah

Dewan Pengarah, dengan Ketua Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Negara PPN/kepala Bappenas sebagai sekretaris Dewan Pengarah BRR, sesuai Perpu 2/2005 (pasal 10), bertugas memberikan arahan dalam perumusan, perencanaan, dan pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias Sumut, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada presiden. Dalam melaksananakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 10, maka Dewan pengarah BRR berwenang :

1. Meminta penjelasan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
2. Meminta masukan dan/atau bantuan instansi Pemerintah maupun pihak lain yang dipandang perlu
3. Melakukan kerjasama dengan para ahli atau konsultan sesuai kebutuhan

Dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias Sumut, Dewan Pengarah telah menyusun agenda kegiatannya sebagai berikut:

Tabel III.6
Agenda Program dan Kegiatan Dewan Pengarah

Tahun	Bidang	Isu Permasalahan / Agenda Kerja
2005	Umum	- Pendanaan - Perencanaan Program - Koordinasi internal BRR NAD-Nias - Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Anggaran BRR 2005
	Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	- Peralihan status Tertib Sipil di Provinsi NAD - Keikutsertaan Mantan GAM pada BRR NAD-Nias - Penyelenggaraan pemerintah Aceh - Penyelesaian masalah hukum, keamanan dan ketertiban
	Bidang Perekonomian	- Penataan ruang - Pertanahan - Perumahan - Pemberdayaan ekonomi masyarakat - Keuangan dan perbankan - Keterbatasan dukungan Database bidang ekonomi - Pendayagunaan pelabuhan bebas Sabang
	Bidang Kesejahteraan Rakyat	- Agama, sosial dan budaya - Pengungsi - Kependudukan - Bantuan Kemanusiaan - Kesehatan dan Pendidikan
2006	Penyelesaian Lanjutan permasalahan 2005	- Mekanisme koordinasi dan komunikasi antara kementerian lembaga dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias - Penyusunan rencana kerja dan anggaran kebutuhan-kebutuhan dari pemerintah Kabupaten/Kota yang memungkinkan munculnya masalah dalam pelaksanaan pembangunannya. - Pengalokasian DIPA 2006 dalam rangka mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi skala prioritas.
	Pemantapan Kerja Sektretariat Dewan pengarah BRR NAD-Nias tahun 2006	- Penyiapan revisi SK Keppres 63M/2005 tentang keanggotaan Dewan pengarah dan SK Menko Polhukam selaku Ketua Dewan Pengarah tentang keanggotaan sekretariat Dewan Pengarah sehubungan perubahan personil Dewan pengarah hasil reshuffle terbatas anggota Kabinet Indonesia Bersatu. - Pemantapan mekanisme koordinasi internal sekretariat Dewan Pengarah antara Sekretariat Dewan Pengarah Jakarta Perwakilan Sekretariat Dewan Pengarah di Medan dan di Banda Aceh. - Penyiapan rancangan kebijakan dan arahan serta dukungan terhadap pelaksanaan rapat Dewan pengarah. - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekosntruksi. - Rapat koordinasi forum penyelesaian masalah bersama internal Sekretarat Dewan pengarah, sekretariat Dewan pengawas, dan para Deputi Bapel, sebagai agenda bersama hasil kesepakatan dari rapat-rapat internal BRR NAD-Nias.

Tahun	Bidang	Isu Permasalahan / Agenda Kerja
		- Penyiapan laporan Dewan pengarah kepada Presiden yang akan disampaikan pada bulan Juni dan desember 2006, sekaligus laporan 2 tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan disiapkan pada akhir tahun 2006, pelaksanaan Workshop/lokakarya yang ditujukan untuk menggali informasi dari publik dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. - Rapat koordinasi internal antara pejabat penghubung dan anggota Sekretariat Dewan pengarah yang berkedudukan di Aceh secara mingguan dengan fasilitasi sekretariat Dewan Pengarah Perwakilan Aceh di Banda Aceh.

3.2.2 Dewan Pengawas

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2005 pasal 13 dijelaskan Dewan Pengawas mempunyai tugas :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Sedangkan wewenang Dewan Pengawas adalah :

1. Menunjuk dan menggunakan jasa profesional auditor independen atau tenaga ahli.
2. Meminta penjelasan Badan Pelaksana dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Memberikan rekomendasi hasil pengawasan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada presiden.

Sesuai dengan perannya, maka agenda kerja Dewan Pengawas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Strategi Pengawasan (Paradigma Buku Kerja Dewan Pengawas)
   a. Pengawasan terdiri dari :
      - Pengawasan keuangan dan kinerja
      - Pengawasan benefit dan dampak
   b. Pengawasan Keuangan dan Kinerja
      - Oleh anggota dewan Pengawas dengan SPI (Satuan Pengawas Internal) dan SAK (Satuan Anti Korupsi) serta kedeputian Bapel terkait

- Dilaksanakan tim kecil Dewan Pengawas bersama auditor independen
- Pembahasan dilakukan setiap 2 minggu

c. Pengawasan Benefit dan Dampak

- Oleh anggota dan tenaga ahli Dwan Pengawas
- Dikoordinir oleh Ketua Dewan Pengawas, dilaksanakan oleh tenaga ahli Dewan Pengawas bersama tim monitoring (tenaga outsourcing)
- Hasil pengawasan akan dikoordinasikan setiap minggu dengan Satuan Pengawas Internal/ Sedangkan perbandingan antara perencanaan dan pelaksanaan diperjelas lagi paa diagram beriktuuti Pengawasan dan pengendalian BRR

2. Skop Kerja Dewan Pengawas

- Pembahasan tentang prosedur dan kontrol yangmelingkupi penyususunan laporan keuangan
- Pembahasan tentang standar akuntansi pemeriksaan
- Pembahasan perencanaan audit satuan pengawasan internal
- Pembahasan dan review twerhadap laporan keuangan
- Pembahasan tentang prosedur penerimaan dan pengeluaran dana
- Pembahasan mengenai rencana kerja Bapel (jangka panjang dan tahunan)
- Pembahasan struktur organisasi Bapel
- Pembahasan kinerja Bapel sevcara berkala
- Pembahasan perencanaan audit SPI
- Pembahasan temuan Audit oleh SPI
- Pembahasan rencana pengawasan dan dampak kinerja Bapel
- Pembahasan temuan Dampak
- Pembahasan kegiatan SAK
- Pembahasan kode etik dan prosedur pemantauannya
- Pembahasan mekanisme pemantauan terhadap kepatuhan terhadap peraturan, kode etik dan efektivitas pencegahan korupsi
- Pembahasan perencanaan audit SPI
- Mengusulkan external auditor
- Membahas metode dan cakupan audit
- Membahas laporan keuangan auditan sebelum difinalkan
- Membahas metode dan cakupan audit
- Membahas temuan BPK
- Pembahasan tentang mekanisme tindak lanjut temuan-temuan SPI, BPK dan Auditor external

- Penyusunan dan pembahasan laporan Dewan Pengawas kepada otoritas

3.2.3 Badan Pelaksana

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 30 tahun 2005 pasal 4 dijelaskan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah melaksanakan program dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang dituangkan kedalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Badan Pelaksana BRR NAD dan Nias diberikan mandat untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan anggaran yang telah disetujui, serta menyusun dan mengkordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dan pemangku kepentingan. Bapel BRR berperan khususnya dalam penggunaan dana *on budget,* untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan yang berhubungan dengan dana *off budget*, Bapel RR merupakan lembaga yang melakukan tugas untuk memberdayakan, memfasilitasi dan membangun kemitraan.

Rencana Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jangka Menengah Tahun 2005-2009 yang menjadi dasar bagi Bapel BRR dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias Sumut, disusun pada pertengahan tahun 2006. Renstra disusun berdasarkan tujuh kegiatan utama, sebagai berikut:

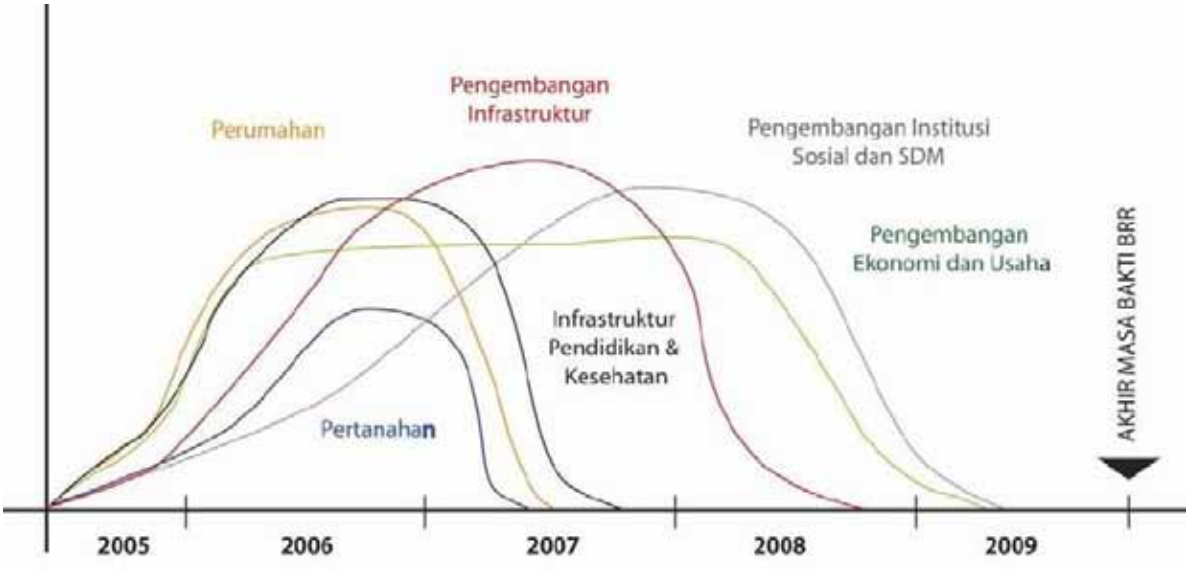
1. melakukan identifikasi, pemetaan dan sertifikasi tanah, serta menyusun perencanaan tata ruang pada tingkat lingkungan, tingkat kota/ kabupaten, dan tingkat regional atau Provinsi;
1. memberikan bantuan dan membangun perumahan bagi masyarakat yang terkena bencana;
2. membangun prasarana dan sarana (infrastruktur fisik) lingkungan, perkotaan dan wilayah atau regional;
3. membangun kembali perekonomian dan usaha masyarakat;
4. membangun kembali dan meningkatkan prasarana/sarana serta pelayanan pendidikan dan kesehatan;
5. melakukan revitalisasi kegiatan agama, sosial dan kebudayaan masyarakat; dan
6. mengembangkan kapasitas kelembagaan *(capacity building)* setempat, baik kelembagaan pemerintah maupun non-pemerintah.

Di dalam mengimplementasikan tujuh kegiatan utama tersebut, telah ditetapkan pentahapan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dari tahun 2005 hingga tahun 2009, yang dilaksanakan dengan perbedaan fokus penanganan setiap tahunnya. Untuk dua tahun pertama pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, fokus penanganannya adalah pada upaya pemulihan kondisi darurat. Pada tahap

pertama di tahun 2005, yang merupakan periode pemulihan kondisi darurat (*rescue recovery program*) dan penyembuhan kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat, program utamanya adalah mempersiapkan infrastruktur yang mendukung akses logistik dan pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi, pembangunan tenda, hunian sementara (*temporary shelter*) dan rumah bagi pengungsi, serta pemberian pekerjaan sementara *work for cash program* (padat karya). Pada tahun ini pula dibentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias yang berfungsi melaksanakan dan mengoordinasi seluruh upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan NAD dan Nias.

Kemudian, pada tahun 2006 yang merupakan periode pemulihan (*recovery program*), prioritasnya adalah pembangunan perumahan dengan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung kelancaran logistik dan penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi. Program lainnya adalah pembangunan *temporary shelter*, sistem transportasi dan komunikasi, distribusi energi dan kelistrikan, serta infrastruktur sosial dan fisik yang mendukung pengembangan ekonomi dalam jangka panjang, serta terwujudnya penguatan kapasitas kelembagaan BRR serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan Nias sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap ini, ditargetkan koordinasi berjalan secara efektif di antara pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya BRR, dengan pemerintah daerah. Pada paruh kedua tahun 2006 juga diharapkan dapat dimulai upaya-upaya pengembangan kapasitas *(capacity building*), baik pada kelembagaan pemerintah maupun non-pemerintah untuk menjamin keberlanjutan *(sustainability)* pengoperasian dan pemeliharaan berbagai prasarana dan sarana serta.sistem yang telah dibangun. Langkah ini diambil sebagai langkah awal penyiapan pengalihan tugas dan tanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah (*Laporan BRR NAD-Nias, April 2006).*

Gambar III.3
Penekanan Intensitas Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2005-2009



A. Strategi Sektoral Rencana Strategi BRR

1. Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup

Bidang perumahan

Tujuan: Mengganti/rehabilitasi seluruh rumah yang hancur akibat tsunami dengan rumah pengganti yang memenuhi strandar minimum baik dari segi ukuran (36m2), desain, konstruksi maupun fasilitas penunjang lainnya. Menjamin dalam jangka panjang terbangunnya perumahan permanen.

Strategi: Merancang program pembangunan rumah yang tepat untuk seluruh masyarakat yang terkena dampak tsunami Memaksimalkan proses pembangunan rumah untuk memastikan bahwa jumlah rumah yang terbangun dapat memenuhi kebutuhan dan pada akhir 2006 tidak ada lagi individu yang tinggal dalam tenda Mengembangkan program pendanaan perumahan yang terjangkau untuk mendukung pengembangan

Bidang infrastruktur

Tujuan: Menjamin tersedianya infrastruktur modern yang menunjang pembangunan kehidupan agama, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat

Strategi: Merestorasi dan membangun jaringan jalan umum dan jalan bebas hambatan di NAD dan Nias. Membangun dermaga, bandara, fasilitas kereta api yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Menjamin tersedianya sumber energi yang terjangkau dan mamadai. Mengembangkan jaringan komunikasi sehingga NAD dan Nias menjadi bagian dari jaringan komunikasi nasional dan global. Menjamin seluruh warga dapat memiliki akses air bersih dan sehat. Membangun sistem drainase dan pengontrol banjir. Mengkaji ulang rencana pembangunan infrastruktur

2. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Pendidikan

Tujuan: Menyediakan pendidikan berkualitas yang berkesinambungan bagi seluruh rakyat NAD-Nias

Strategi : Mengembangkan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Mendorong dan mengkoordiansikan program rehabilitasi dnan rekonstruksi serta pengadaan kembali perangkat-perangkat pendidikan untuk semua tingkat pendidikan. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan guru dan dosen. meningkatkan kualitas guru pada semua tingkat an melalui penegmbangan kurikulum dan peningkatan merodologi mengajar serta memperbarui fasilitas manajemen pendidikan di semua tingkat pendidikan. Meningkatkan kemampuan bahasa bagi para guru, Matematika, Ilmu Pasti, dan pengetahuan keagamaan pada tingkat yang relevan di semua sistem

pendidikan. Mendukung penyediaan program beasiswa untuk pelahjar berprestasi, khususnya pada tingkat perguruan tinggi. Mengembangkan dan memberdayakan aktvitas riset pada perguruan tinggi

Kesehatan

Tujuan: Menciptakan fasilitasi pelayanan kesehatan yang berkualitas yang lebih produktif dan semakin mendekati masyarakat

Target: Mengembangkan fasilitas kesehatan yang berkualitas, efektif,efisien, dan berkelanjutan. Mengkoordinasikan program rehabilitasi dan rekosntruksi serta pengadaan kembali perangkat-perangkat kesehatan pada fasilitas kesehatan. Mendorong *best practuce* dengan mengadopsi muatan lokal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatnan. Membangun kerjasama dengan semua pemangku kepentingan. Memperkuat sistem manajemen untuk mrmghasilkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

Agama, Sosial dan Budaya

Tujuan: Membangun tumbuhnya kebijakan-kebijakan program- program, dan aktivitas untuk meningkatkan koalitas kehidupan beragama, social, dan budaya.

Target : Mengkoordinasi, mengembangkan, dan mendorong aktivitas lintas sektoral yang flrksibel untuk penguatan dan pendayagunaan kehidupan spritual dan sosial; Menfasilitasi proses identifikasi aspek kehidupan keagamaan, sosial budaya masyarakat; Mendorong pengembangan dasar hukum kebijakan-kebijakan pendukung relevan dengan kehidupan. Mendorong lahirnya kerangka berpikir untuk membangun dalam konteks global.

3. Bidang Pemulihan Perekonomian

Tujuan: (1) Membangun fondasi yang kuat bagi industri, bisnis dan tenaga kerja untuk mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan global; (2) Merestorasi dan membangun industri pertanian, perikanan dan budi daya perairan yang unggul dan berkelanjutan.

Target: (1) Memfasilitasi terbentuknya struktur dan institusi baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Menggali potensi kunci bagi pertumbuhan ekonomi, (3) Menginvestasikan secara srategis pada infrastruktur yang diperlukan, (4) Merestorasi produksi padi dan produk agrikultur lainnya; (5) Mendukung pembangunan infrastruktur penunjang; (6) Mendorong pengembangan proses pasca panen dari produk agrikultur; dan (7) Mengkoordinasikan pembangunan dan penguatan kembali industri perikanan dan budi daya perairan.

4. Bidang Pemulihan Kelembagaan

Tujuan : Menjamin pengembangan PNS yang terlatih, memiliki motivasi, memiliki integritas dan kapabilitas. Memastikan bahwa proses pengambilan keputusan

pada pengelolaan sumber daya publik telah memperhatikan proses yang demokratis dan melibatkan partisipasi publik. Penegakan supremasi hukum.

Target : Mengkaji ulang SDM dan sistem yang ada dan mengembangkan program penguatan kapasitas; Menyajikan masalah-masalah publik secara transparan; Membangun budaya kerja yang bersih dan standar etika yang tinggi di seluruh jajaran pemerintahan

5. Bidang Pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat serta Reintegrasi Mantan GAM

Berdasarkan hasil telaah dalam Rencana Strategis BRR, tidak diperoleh data dan informasi tentang tujuan dan terget untuk bidang pemulihan ketertiban, keamanan dan ketahanan masyarakat.

B. Program dan Kegiatan Renstra BRR

1. Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup

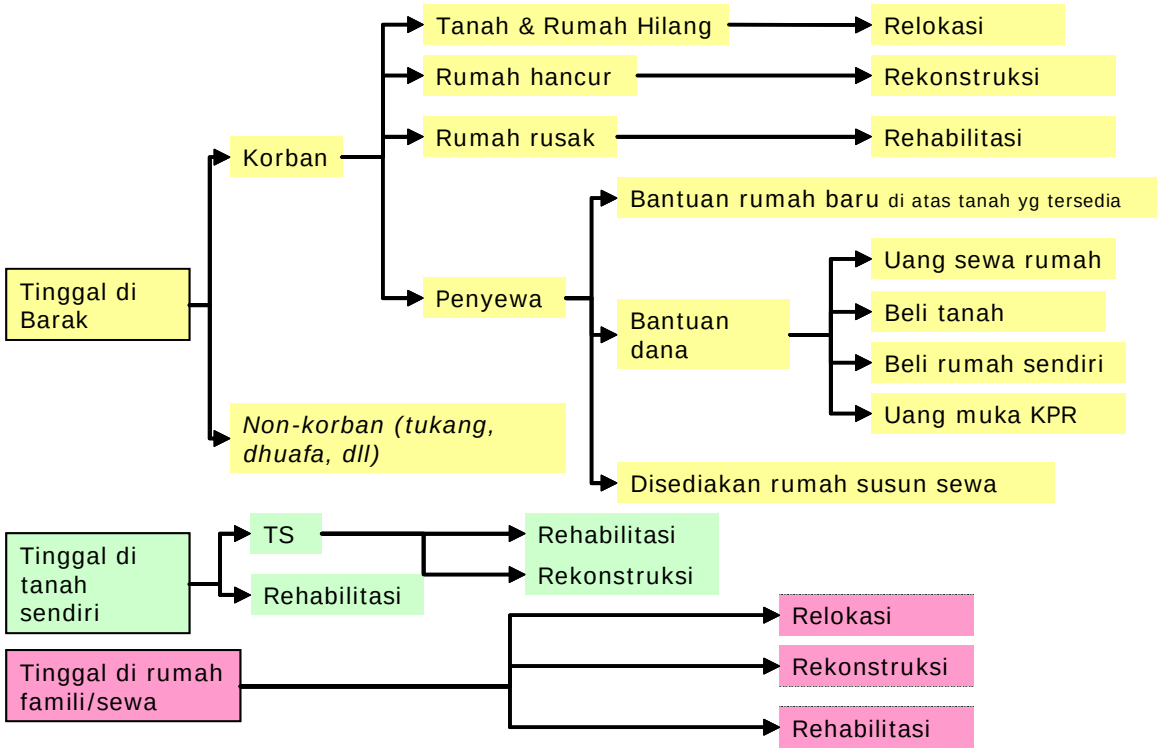
Tabel III.7
Program dan Kegiatan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Bapel BRR

No.	Program	Kegiatan
1	Penyediaan prasarana dan sarana kebutuhan dasar	1. Menetapkan prioritas utama pada pembangunan kembali perumahan, air minum, sanitasi, dan drainase 2. Memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi prasarana akses masuk, antara lain pelabuhan laut dan bandara udara strategis beserta jaringan jalan pendukungnya.
2	Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan beserta prasarana dan sarana dasar pendukungnya.	1. Membantu korban yang ingin kembali ke tempat tinggal semula dalam bentuk cash in atau in kind setara Rp. 28 juta untuk rumah dengan tingkat kerusakan berat atau hancur dan Rp. 10 juta untuk rumah dengan tingkat kerusakan ringan 2. Membantu penyediaan perumahan dan prasarana dan sarana dasar pendukungnya bagi korban bencana yang berkeinginanpindah ke tempat baru (resettlement) 3. Menyelesaikan bantuan dan penyediaan perumahan bagi korban bencana dalam jangka waktu kurang dari 2,5 tahun.
3	Pembangunan kembali sistem transportasi dan komunikasi	1. Membuka entry point dan jalur jalan utama (nasional), dilanjutkan dengan pembukaan jalur transportasi yang terintegrasi untuk memperlancar distribusi logistik yang efisien dan pengembangan wilayah 2. Merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan merekonstruksi fasilitas komunikasi baru melalui teknologi nir-kabel untuk memberikan kemudahan akses telekomunikasi baik secara lokal, SLJJ, maupun SLI.
4	Rehabilitasi fasilitas distribusi energi dan kelistrikan	1. Memperbaiki jaringan distribusi kelistrikan 2. Mengarahkan upaya rekonstruksi untuk mendukung diversivikasi sumber energi listrik.
5	Peningkatan ketahanan pangan	1. Memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi pada wilayah dimana petani penggarapnya telah siap dan diutamakan pada wilayah-wilayah pusat kegiatan ekonomi dan permukiman 2. Membantu upaya perbaikan jaringan tambak rakyat, khususnya pada jaringan primer dan sekunder.

Khusus program perumahan, BRR menetapkan strategi bantuan perumahan berdasarkan kategori korban seperti berikut:

Program	Kategori Korban	Bentuk bantuan
BPPK - Resettlements	Rumah dan tanah hilang	Rumah baru T36 di lokasi baru
BPRB - Rekonstruksi	Rumah hancur, tanah masih ada	Rumah baru T36 di lokasi asal
BPR - Rehabilitasi	Rumah rusak dan masih layak huni	Dana perbaikan rumah
BPR - Upgrading	Rumah bantuan T36 substandard	Perbaikan/ penyempurnaan rumah
BSBT – Bantuan Sosial Bertempat Tinggal	Tidak punya rumah Tidak punya tanah (penyewa)	- Tanah BRR, rumah pihak lain - Rumah BRR, tanah pihak lain - Bantuan uang sewa - Uang muka KPR

Kondisi orang-orang yang harus dirumahkan oleh pelaksana adalah sbb:



Untuk pembangunan perumahan tersebut ditunjang dengan beberapa perangkat penunjang, seperti kebijakan, standar, dan kelembagaan pendamping, sebagai berikut:

* Kebijakan Ka-Bapel yang telah dikeluarkan:

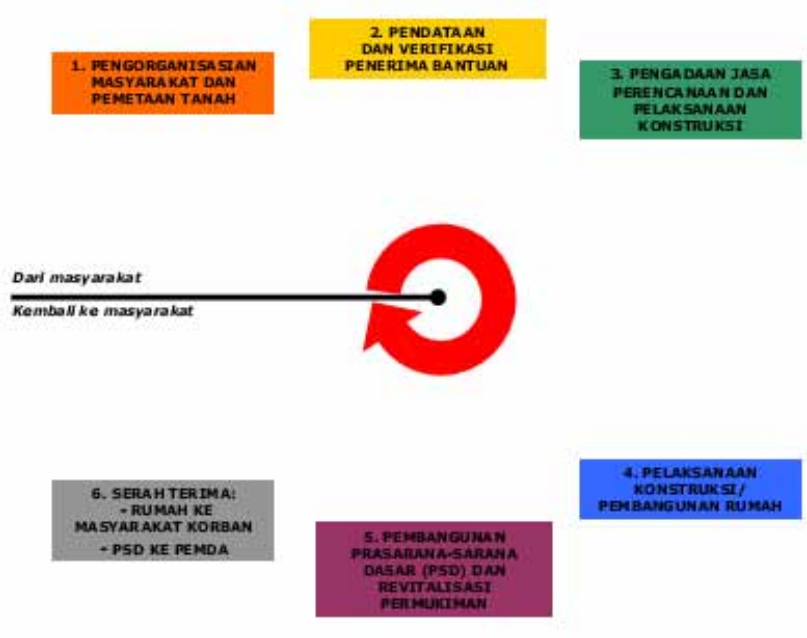
- Kebijakan tentang Rekonstruksi (BPRB)
- Kebijakan tentang Rehabilitasi (BPR)
- Kebijakan tentang Relokasi (BPPK)
- Kebijakan tentang Bantuan bagi Mereka yang tidak memiliki tanah dan rumah (BSBT)
- Standar Kelayakan Bangunan

- Harga Satuan Rumah Baru per wilayah

* Kelembagaan:
  - 19 Asperkim di tingkat kabupaten/kota
  - 190 fasilitator kecamatan
  - 450 KP4D di tingkat desa
  - 16 unit PPK tersebar di setiap kabupaten/kota dan direkrut atas usulan Bupati/Walikota

Langkah-langkah berikut dibawah dilakukan oleh BRR dalam penyelesaian masalah perumahan

Gambar III.4: Skema Penyelesaian Masalah Perumahan



2. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Program dan kegiatan bidang pemulihan sosial budaya yang terdapat dalam rencana strategis BRR dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel III.8
Program dan Kegiatan Sosial Budaya Bapel BRR

No.	Program	Kegiatan
1	keterjangkauan pelayanan pendidikan	1. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk Anggota masyarakat 2. Rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana pendidikan termasuk lembaga syariah 3. Bimbingan dan konse ling bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan 4. Penyediaan beasiswa bagi peserta didik dan bantuan biaya hidup bagi korban
2	Peningkatan kualitas dan Relevansi pendidikan	1. Meningkatkan mutu pendidikan dan relevansinya termasuk pengembangan pendidikan taraf internasional 2. Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal 3. Meningkatkan jumlah, kualitas, profesionalisme pendidik 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik
3	Meningkatkan Manajemen Pelayanan pendidikan	1. Mengembangkan sistem pendidikan keluarga dan masyarakat 2. Meningkatkan partisipsi masyarakat dan dunia usaha 3. Merevitalisasi dinas pendidikan dan kantor wilayah agama provinsi dan kabupaten/kota 4. Menyediakan anggaran pendidikan memadai dan keberlanjutan 5. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan sebagai hak asasi dan aset 6. Menata dan meningkat kan kinerja penyelenggaraan pendidikan termasuk penelitian dan pengembangan serta sistem informasi pendidikan.
4	Pemulihan Sistem Kesehatan	1. Mobilisasi tenaga kesehatan dari daerah lain 2. Menempatkan tenaga kesehatan dengan system kontrak 3. Melatih tenaga kesehatan 4. Merehabiltasi dan membangun prasarana sarana Pelayanan kesehatan yang rusak 5. Memulihkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan
5	Pencegahan Kekurangan Gizi	1. Memberikan bantuan makanan bagi bayi,balita, ibu hamil 2. Memberikan paket pertolongan gizi vitamin dan tablet 3. Memberikan penyuluhan gizi 4. Memperkuat survailans gizi
6	Pemulihan ketentraman Rohani	1. Memberikan bimbingan dan konseling 2. Memberikan pengasuhan anak yatim piatu 3. Menggiatkan pengajian majlis taklim
7	Peningkatan tenaga pelayanan keagamaan	1. Memberikan pendidikan dan pelatihan imam masjid, khatib, dai, dan guru pengajian 2. Merekrut tenaga pegawai dari tingkat gampong sampai provinsi (kantor wilayah)
8	Rehabilitasi simbol-simbol agama	1. Merehabilitasi dan membangun sarana prasarana Peribadatan, seperti mesjid dan meunasah 2. Merehabilitasi dan membangun sarana prasarana keagamaan seperti kandep Agama Kab/Kota kantor Dinas Syariah, Baitul Maal dan kantor MPU
9	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	1. Melakukan pendataan kebutuhan perempuan dan anak 2. Mengembangkan dan memfungsikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), dan memfasilitasi women crisis centre 3. Memfasilitasi children center dan reunifikasi keluarga, Bantuan hukum, dan dukungan untuk pengasuhan anak 4. Memberdayakan perempuan khususnya kepala keluarga Perempuan dalam kegiatan ekonomi.

No.	Program	Kegiatan
10	Peningkatan Kualitas Kehidupan Adat Tradisi dan Kegiatan Seni Budaya serta Warisan Budaya Masyarakat	1. Melakukan pendataan dan investasi kerusakan budaya 2. Memperkuat nilai-nilai budaya dan melestarikan warisan seni dan budaya masyarakat. 3. Membangun/merehabilitasi sarana prasarana budaya, serta memugar yang rusak
11	Pemberian Bantuan dan Jaminan Bagi Masyarakat Rentan	1. Memberikan bantuan dan jaminan social bagi masyarakat korban bencana 2. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi social bagi anak,lanjut usia, dan penyandang cacat korban bencana 3. Membangun dan menfungsikan trauma centre 4. Memberdayakan keluarga,fakir miskin, dan komunitas adat terpencil.

Sumber : Renstra BRR, 2006

3. Bidang Pemulihan Perekonomian

Dibawah ini program dan kegiatan BRR bidang pemulihan perekonomian yang terdapat dalam Renstra BRR, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel III.9
Program dan Kegiatan Pemulihan Perekonomian Bapel BRR

No.	Program	Kegiatan
1.	Pemulihan pendapatan masyarakat	1. Menyediakan lapangan kerja yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi 2. Memberikan pelatihan bagi berbagai pekerjaan yang hilang melalui mobilisasi berbagai sumber daya yang tersedia seperti APBN dan bantuan.
2.	Pemulihan Fasilitas Pelayanan Masyarakat	1. Memulihkan fasilitas sarana pelayanan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat seperti perikanan dan pertanian seperti pemulihan fasilitas pendukung pertanian dan budidaya perairan, pemulihan pangkalan pendaratan ikan, pemulihan tempat pelelangan ikan, memulihkan sarana irigasi serta pemulihan pusat penjualan hasil produksi dan pusat-pusat penjualan lainnya
3.	Pemberian Bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan sarana produksinya	1. Memberikan hibah langsung kepada perorangan yang besarnya maksimum Rp. 2 juta 2. Memberikan bantuan yang berkaitan dengan tanah yg tidak dapat digunakan sebagai tempat permukiman & bantuan perumahan. 3. Memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah untuk dapat memperoleh akses kepada sumber daya produktif melalui penyediaan sistem insentif pembiayaan disertai pemberian bantuan teknis. 4. Memberikan bantuan untuk hibah kelompok sebesar Rp. 5 - 15 juta sebagai pemulihan sarana atau menggunakan dukungan dana tersebut untuk melakukan kegiatan usaha sebagai dana pendamping (matching fund)

Sumber : Renstra BRR, 2006

4. Bidang Pemulihan Kelembagaan

Tabel III.10
Program dan Kegiatan Pemulihan Kelembagaan Bapel BRR

Bidang	Program	Kegiatan
Kelembagaan	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah	1. Melakukan penataan dan penyediaan aparatur pemerintah daerah, legislatif, pimpinan daerah dan aparatur pusat 2. Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda dan anggota legislatif dalam proses penyusunan rencana daerah dan pengelolaan keuangan daerah 3. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menghadapi bencana alam dan buatan, melalui pelatihan-pelatihan teknis manajerial dan pengembangan sistem deteksi dini 4. Memperbaiki sistem administrasi pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang tidak terduga (bencana alam dan bencana buatan) 5. Memperbaiki dan menata struktur kelembagaan yang proporsional dan prosedur kerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, untuk memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) 6. Menciptakan dan meningkatkan koordinasi serta kerja sama antar tingkat pemerintahan
	Penyediaan sarana dan prasarana lembaga pemerintahan secara permanen	1. Merehabilitasi prasarana pemerintah daerah yang permanen berdasarkan masterplan dan rencana teknis *(Detail Engineering Design)* 2. Menyediakan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan public 3. Memfasilitasi dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana trauma centre, sistem kehumasan Pemda, dan forum komunikasi
Hukum	Jaminan kepastian, perlindungan, penegakan hukum dan HAM	1. Memulihkan dan memberikan hak-hak keperdataan serta penerbitan kembali alat bukti haknya Memulihkan hak-hak yang berkaitan dengan hukum publik 2. Memberikan kembali dokumen identitas 3. Memberikan status hukum Baital Maal sebagai subjek hukum Provinsi NAD 4. Memberdayakan lembaga adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan
	Revitalisasi fungsi dan tugas pelayanan hukum	1. Merehabilitasi dan membangun kembali sarana dan prasarana pengadilan dan kejaksaan serta sarana pendukung lainnya 2. Mobilisasi tenaga hakim dan tenaga peradilan lainnya serta jaksa dari daerah lain

Sumber : Renstra BRR, 2006

5. Bidang Pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat serta Reintegrasi Mantan GAM

Tabel III.11
Program dan Kegiatan
Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat Bapel BRR

Bidang	Program	Kegiatan
K3M	Penciptaan kematangan dan kedewasaan sosial politik masyarakat Aceh	1. Menfasilitasi peran masyarakat sipil dalam membantu peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaiakan persoalan sosial kemasyarakatan; 2. Melakukan restrukturisasi dan reorientasi lembaga masyarakat, lembaga ekonomi, dan pemerintahan, serta memantapkan sistem komunikasi massa dan informasi; 3. Melakukan Pengelolaan Dampak Bencana berupa kegiatan kemanusiaan, peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, refungsionalisasi pemerintahan, termasuk lembaga keamanan, dukungan rehabilitasi dan dukungan rekonstruksi dengan pendekatan sosio-kultural; 4. Membangun karakter dan kebangsaan (*nation and character building*) yang mandiri dan berkualitas agar masyarakat memiliki kesadaran dan saling percaya dalam membangun kembali Aceh, membela negara bangsa; 5. Melaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang pembangunan di Aceh; 6. memantapkan otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sehingga masyarakat Aceh mampu melakukan pembangunan yang berkelanjutan, melanjutkan pemantapan rasa cinta tanah air; dan 7. mengembangkan *insentive framework* yang menyeluruh untuk para dalam rangka mencapai perdamaian yang abadi dan tuntas.
	Penciptaan Rasa Aman dan Tertib Masyarakat Aceh	1. Melaksanakan refungsionalisasi lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban; 2. Melaksanakan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah pengungsian; 3. Memantapkan keamanan dengan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah yang kondisi keamanan dan ketertibannya relatif kondusif; 4. Melaksanakan pengamanan proses pembangunan terutama rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana serta aktivitas sosial ekonomi; dan 5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah-daerah yang rawan

Sumber : Renstra BRR, 2006

Bidang Reintegrasi GAM

Pasca penandatanganan MoU Helsinki, pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui alokasi anggaran yang diajukan pemda prov.NAD sejumlah 200 miliar rupiah melalui APBN untuk pelaksanaan program reintegrasi tahun anggaran 2005. Pelaksanaan program berupa penyerahan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi ini ditujukan kepada kelompok sasaran yang didalamnya

termasuk mantan anggota TNA, mantan anggota GAM non TNA, dan masyarakat korban konflik.

Adapun yang menjadi kriteria korban konflik yang akan diberikan bantuan sosial yang dikategorikan oleh BRA adalah :

Tabel III.12
Kriteria Korban Konflik

Kriteria Korban	Berdasarkan Kategori
Orang yang meninggal dunia karena konflik	Orang yang meninggal dunia sebagai akibat tindakan salah satu pihak yang bertikai atau oleh orang yang tidak dikenal selama konflik berlangsung
Orang yang hilang karena konflik	Orang yang diduga kuat telah hilang selama konflik berlangsung dan tidak ada informasi tentang keberadaan orang tersebut sampai dengan saat ini
Ahli waris dari yang meninggal dunia/hilang karena konflik	Salah seorang yang secara hukum merupakan ahli waris yang terdekat dari orang yang meninggal dunia atau hilang karena konflik berlangsung
Pemilik rumah yang dibakar/hancur karena konflik	Orang yang rumah/tempat tinggalnya dibakar/hancur sebagai akibat tindakan salah satu pihak yang bertikai atau oleh orang yang tidak dikenal selama konflik berlangsung sehingga rumah/tempat tinggalnya tidak dapat ditempati lagi pada saat itu dan belum pernah mendapat paket bantuan rumah atau bantuan perbaikan rumah secara resmi
Pemilik harta lainnya (selain rumah) yg rusak/dibakar/hancur/ hilang	Akan ditentukan kemudian oleh suatu Komisi Bersama Penyelesaian Klaim
Keluarga yang mengungsi karena konflik	Orang-orang yang selama konflik berlangsung satu keluarganya (bukan sebagian anggota keluarga) pernah harus mengosongkan tempat tinggalnya dan pindah ke tempat lain secara permanen minimal selama 1 bulan. Dalam hal terjadi penambahan jumlah kepala keluarga selama dalam pengungsian, yang diakui adalah jumlah kepala keluarga pada saat awal mengungsi
Orang yang cacat atau kehilangan anggota tubuh karena konflik	Orang yang akibat konflik menjadi cacat atau kehilangan sebagian anggota tubuhnya sehingga anggota tubuh tersebut tidak berfungsi normal secara permanen
Orang yang sakit mental karena konflik	Orang yang sampai saat ini masih menderita sakit/cacat mental yang diakibatkan oleh konflik.
Orang yang sakit fisik karena konflik	Orang yang akibat konflik menjadi sakit sehingga anggota tubuh tersebut tidak berfungsi normal (masih sakit) sampai dengan saat ini.
	Untuk orang yang telah mengeluarkan biaya pengobatan sendiri dan telah sembuh, akan diselesaikan melalui Komisi Bersama Penyelesaian Klaim.
Orang yang hilang mata pencaharian pokok karena konflik	Orang yang akibat konflik tidak dapat meneruskan mata pencaharian pokoknya seperti semula dan sampai saat ini tidak dapat membiayai hidupnya secara normal.

Penyaluran bantuan untuk program reintegrasi ini turut didukung oleh Dinas Sosial Pov.NAD (sebagai bendahara anggaran), Kantor POS (sebagai penyalur langsung ke masyarakat) dan BRA yang di bentuk berdasarkan SK awal dari Gub. Prov. NAD pada bulan Februari 2006 berperan sebagai lembaga administratif. Namun setelah perampingan/penyempurnaan terhadap Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA) melalui SK yang baru dari Gubernur Prov. NAD tertanggal 2 Mei 2006, BRA telah mengambil banyak peran dalam pelaksanaan

program reintegrasi termasuk pada perencanaan anggaran sebagai lanjutan dari program reintegrasi untuk tahun anggaran 2006 sejumlah 600 miliar rupiah .

Berikut ini kami tampilkan program kerja dalam bentuk tabel yang disusun oleh BRA untuk tahun anggaran 2005 - 2009.

Program Kerja dari Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) dalam melaksanakan program reintegrasi masyarakat Aceh, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.13
Tabel Perencanaan BRA

Program Kerja		
Jangka Pendek 11 Feb 2006-5 Mei 2006	Jangka Menengah 6 Mei – 31 Des 2006	Jangka Panjang 1 Jan 2007 – 31 Des 2009
1. Menyusun & sosialisasi program serta anggaran BRA tahun 2005-2006	1. Melakukan pendataan dan needs assesment	1. Mengkoordinir pelaksanaan program
2. Menyusun Buku Pedoman dan kriteria korban konflik	2. Mengevaluasi program dan strategi BRA 2006-2009	2. Memantau dan mengevaluasi pelaksa-naan program agar sesuai dgn MoU
3. Mengirim pendamping ke Kab/ Kota	3. Mendistribusi bansos dan pemberdayaan ekonomi TA 2006 melalui BRA Kab/Kota	3. Membuat laporan berkala
4. Koordinasi dgn donor, NGO, dan institusi terkait.	4. Mendorong kegiatan Bidang Polhukam & HAM	
5. Menyusun Renstra BRA	5. Melakukan koordinasi dgn donor dan NGO untuk program yang off budget	
6. Mempersiapkan proses pendataan & needs assesment korban konflik	6. Melakukan koordinasi dgn BRA Kab/Kota untuk sinkronisasi dan integrasi program kerja	
7. Mendorong terbentuknya BRA di Kab/Kota	7. Membuat laporan berkala	
8. Mendistribusi bansos dan pemberdayaan ekonomii TA 2005		
9. Membuat laporan berkala		

Dari program kerja diatas, yang menjadi sasaran pelayanan dari program reintegrasi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.14
Sasaran Pelayanan Untuk Program Reintegrasi BRA

No.	Kelompok Sasaran	TOTAL		Alokasi dana		
				2005	2006	2007
Pemberdayaan Ekonomi						
1.	Mantan TNA	3.000	Orang	1.000	2.000	0
2.	Mantan Tapol/Napol	1.500	Orang	0	1.500	0
3.	Masyarakat Korban Konflik	63.000	Orang	1.000	21.622	40.378
4.	Kelompok Lainnya					
	a. GAM non TNA	6.200	Orang	1.200	5.000	-
	b. GAM Menyerah pra MoU	3.204	Orang	500	2.704	0
	c. PETA	6.500	Orang	1.000	3.000	2.500
Bidang Sosbud						
	a. Diyat	19.597	Orang	758*	19.597	19.597
	b.Rumah dibakar/dirusak	9.149	Unit	3.254	1.736	4.159
	c. Korban Cacat	2.000	Orang	0	2.000	-
	d. Pelayanan Medis	1	Paket	280**	5.000**	5.000**

*** Geuchik, Mukim dan PNS.*

3.3 PERENCANAAN ANGGARAN

A. Perencanaan Anggaran dalam Rencana Induk

Rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dilaksanakan dengan berbagai sumber pendanan : APBN, APBD Provinsi dan dan kabupaten, lembaga-lembaga donor (*multilateral* dan *bilateral*), NGO/LSM (internasional dan lokal), serta dunia usaha (*private sector*). Secara umum, sumber pendanaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni *on budget* dan *off budget*. Dana on budget yang termasuk dalam APBN adalah dana moratorium, pinjaman luar negeri, dan hibah. Dana ini dikelola BRR dan departemen teknis. Secara terpisah, dana APBD baik provinsi maupun kabupaten dikelola langsung oleh Pemerintah daerah berkoordinasi dengan BRR. Sedangkan dana *off budget* dikelola langsung oleh NGO, lembaga donor maupun dunia usaha atau sektor swasta. Berikut ini anggaran biaya rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan Rencana Induk sesuai bidang pemulihan

Secara lebih jelas, porsi perkiraan penganggaran dari masing-masing bidang pemulihan tersebut di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Tabel III.15
Anggaran Biaya dalam Rencana Induk Bidang Pemulihan Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Bidang	TA 2005			TA 2006		
	Total Anggaran	Jml. Program	Sumber	Total Anggaran	Jml. Program	Sumber
Infrastruktur & Perumahan	4,551,022,002,000	160		7,909,041,285,000	160	
Tata Ruang & Pertanahan	-	21	-	-	16	-
LH & SDA	-	27	-	-	27	-

Catatan: Program Tata Ruang & Pertanahan dan LH & SDA dalam Rencana Induk tidak mencantumkan rencana anggaran dan jadwal pelaksanaan

2. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Tabel III.16
Anggaran Biaya dalam Rencana Induk
Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Bidang/Sub Bidang	TA 2005			TA 2006		
	Total Anggaran	Jum Prog	Sumber	Total Anggaran	Jum Prog	Sumber
Pendidikan	8,815,200,800,000 (Total 2005 – 2009)	10	APBN, APBD Povinsi, Kab/Kota, Swasta/masyarakat dan lembaga Donor Internasional.	8,815,200,800,000 (Total 2005 – 2009	10	dana APBN, APBD Povinsi, Kab/Kota, Swasta/masyarakat dan lembaga Donor Internasional.
Kesehatan	2,104,723,000,000 (Total 2005 – 2009)	11	APBN, APBD Povinsi, Kab/Kota, Swasta/masyarakat dan lembaga Donor Internasional	2,104,723,000,000 (Total 2005 – 2009)	11	dana APBN, APBD Povinsi, Kab/Kota, Swasta/masyarakat dan lembaga Donor Internasional
Agama	237.993.000.000	4	APBN, APBD Povinsi, Kab/Kota, Swasta/masyarakat dan lembaga Donor Internasional	547.386.000.000	4	dana APBN, APBD Povinsi, Kab/Kota, Swasta/masyarakat dan lembaga Donor Internasional
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	27.270.000.000	3	APBN, APBD Povinsi, Kab/Kota, Swasta/masyarakat dan lembaga Donor Internasional	28.350.000.000	3	dana APBN, APBD Povinsi, Kab/Kota, Swasta/masyarakat dan lembaga Donor Internasional
Sosial	871.818.000.000	5	APBN, APBD Povinsi, Kab/Kota, Swasta/masyarakat dan lembaga Donor Internasional	284.546.000.000	5	APBN, APBD Povinsi, Kab/Kota, Swasta/masyarakat dan lembaga Donor Internasional

Bidang/Sub Bidang	TA 2005			TA 2006		
	Total Anggaran	Jum Prog	Sumber	Total Anggaran	Jum Prog	Sumber
Kependudukan dan Keluarga Berencana	12.700.000.000	1	APBN, APBD Povinsi, Kab/Kota, Swasta/masyarakat dan lembaga Donor Internasional	-	-	-
	37.461.000.000	1	APBN, APBD Povinsi, Kab/Kota, Swasta/masyarakat dan lembaga Donor Internasional	12.477.000.000	1	APBN, APBD Povinsi, Kab/Kota, Swasta/masyarakat dan lembaga Donor Internasional
Pemudan dan Olahraga	6.304.000.000	3	APBN, APBD Povinsi, Kab/Kota, Swasta/masyarakat dan lembaga Donor Internasional	6.709.000.000	3	APBN, APBD Povinsi, Kab/Kota, Swasta/masyarakat dan lembaga Donor Internasional

Sumber : Lampiran 7-9 Perpres No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD-Nias

3. Bidang Pemulihan Perekonomian

Berikut ini anggaran biaya rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan Rencana Induk bidang ekonomi dan tenaga kerja. Secara lebih jelas, porsi perkiraan penganggaran dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.17
Anggaran Biaya dalam Rencana Induk Bidang Pemulihan Perekonomian

Bidang/Sub Bidang	TA 2005			TA 2006		
	Total Anggaran	Jum Prog	Sumber	Total Anggaran	Jum Prog	Sumber
Kelautan dan Perikanan	751.105.000.000	2	APBN, APBD propinsi/kab/kota, swasta/masyarakat, dan Lembaga Donor Internasional	610.810.000.000	2	APBN, APBD propinsi/kab/kota, swasta/masyarakat, dan Lembaga Donor Internasional
Pertanian	351.888.000.000	2	APBN, APBD propinsi/kab/kota, swasta/masyarakat, dan Lembaga Donor Internasional	Tidak ada usulan anggaran thn 2006 (usulan anggaran thn 2006-2009 : Rp. 2.058.656.000.000)	2	APBN, APBD propinsi/kab/kota, swasta/masyarakat, dan Lembaga Donor Internasional
BULOG	175.915.000.000	1	APBN, APBD propinsi/kab/kota, swasta/masyarakat, dan Lembaga Donor Internasional	Tidak ada usulan anggaran thn 2006 (usulan anggaran thn 2006-2009 : Rp. 645.030.000.000)	1	APBN, APBD propinsi/kab/kota, swasta/masyarakat, dan Lembaga Donor Internasional

Bidang/Sub Bidang	TA 2005			TA 2006		
	Total Anggaran	Jum Prog	Sumber	Total Anggaran	Jum Prog	Sumber
Koperasi & UKM	16.178.000.000	1	APBN, APBD propinsi/kab/kota, swasta/masyarakat, dan Lembaga Donor Internasional	13.468.750.000	1	APBN, APBD propinsi/kab/kota, swasta/masyarakat, dan Lembaga Donor Internasional
Pariwisata	4.750.000.000	1	APBN, APBD propinsi/kab/kota, swasta/masyarakat, dan Lembaga Donor Internasional	Tidak ada data		Tidak ada data
Perindustrian	Tidak ada usulan anggaran thn 2005 (usulan anggaran thn 2005-2006 : Rp. 20.624.761.250)	2	APBN, APBD propinsi/kab/kota, swasta/masyarakat, dan Lembaga Donor Internasional	Tidak ada usulan anggaran thn 2006 (usulan anggaran thn 2005-2006 : Rp. 20.624.761.250)	2	APBN, APBD propinsi/kab/kota, swasta/masyarakat, dan Lembaga Donor Internasional
Perdagangan	20.499.200.000	6	APBN, APBD propinsi/kab/kota, swasta/masyarakat, dan Lembaga Donor Internasional	Tidak ada usulan anggaran thn 2006 (usulan anggaran thn 2006-2009 : Rp.	6	APBN, APBD propinsi/kab/kota, swasta/masyarakat, dan Lembaga Donor Internasional
Tenaga Kerja	58.650.000.000	3	APBN, APBD propinsi/kab/kota, swasta/masyarakat, dan Lembaga Donor Internasional	19.350.000.000	1	APBN, APBD propinsi/kab/kota, swasta/masyarakat, dan Lembaga Donor Internasional

Sumber : Buku Rinci Bidang Ekonomi dan ketenagakerjaan, Lampiran V Perpres No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD-Nias

4. Bidang Pemulihan Kelembagaan

Tabel III.18
Anggaran Biaya dalam Rencana Induk
Bidang Pemulihan Kelembagaan

Bidang/Sub Bidang	TA 2005			TA 2006		
	Total Anggaran	Jum Prog	Sumber	Total Anggaran	Jum Prog	Sumber
Kelembagaan	173.500.000.000	11	APBN, APBD, Donor	154.450.000.000	11	APBN, APBD, Donor
Hukum	288.000.000.000*	4	APBN, APBD, Donor	-	4	APBN, APBD, Donor

Sumber : R3RIRRWANS, 2006

Keterangan : *) Pada Rencana Induk bidang hukum hanya tercantum total anggaran 2005-2009, tidak dirinci anggaran untuk setiap tahunnya

Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk sub bidang kelembagaan mengalami penurunan anggaran sebesar 10,9 % pada tahun 2006 dibandingkan dengan anggaran TA 2005, sedangkan dari segi program, jumlahnya tetap sama. Untuk sub bidang hukum tidak tercantum rincian anggaran untuk setiap tahunnya, yang tercantum pada rencana induk adalah total anggaran dari tahun 2005 hingga tahun 2009.

5. Bidang Pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat serta Reintegrasi Mantan GAM

Tabel III.19
Anggaran Biaya dalam Rencana Induk
Bidang Pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat serta Reintegrasi Mantan GAM

Bidang Pemulihan	TA 2005			TA 2006		
	Total Anggaran	Jum Prog	Sumber	Total Anggaran	Jum Prog	Sumber
K3M	1.152.104.276.000	9 Prog	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN	581.317.961.000	9 Prog 116 Keg	APBN Murni APBD Dana Masyarakat Hibah LN Pinjaman LN
Berdasarkan Alokasi Anggaran dari BRA :						
Reintegrasi mantan GAM	200.000.000.000	6 Prog 16 Keg	APBN Murni	600.000.000.000	7 Prog 8 Keg	APBN murni

B. Perencanaan Anggaran oleh BRR

Untuk tahun 2005 total dana aliran dana program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias sebesar Rp. 8.3 triliun terbagi dalam dua mekanisme yaitu :

1. On-Budget

Mekanisme ini disahkan dalam dokumen Anggaran (DIPA) yang diungkapkan dalam APBN dan direalisasikan melalui antor pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dalam APBN tersebut disalurkan melalui :

a. BRR NAD-Nias sebesar Rp 3.9 triliun berasal dari Moratorium
b. 20 Kementerian Lembaga sebesar 4.4 Triliun dari danah PHLN (Hibah)

2. Off-Budget

Mekanisme ini dana rehabilitasi dan rekonstryksi yang tidak disahkan dalam dokumen anggaran dan tidak diungkapkan dalam APBN dan tidak direalisasikan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Mekanisme ini pada umumnya merupakan partisipasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Internasional yang langsung disalurkan kepada Masyarakat. BRR tidak mengelola dana ini namun BRR tetap bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan program dari lembaga-lembaga tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih

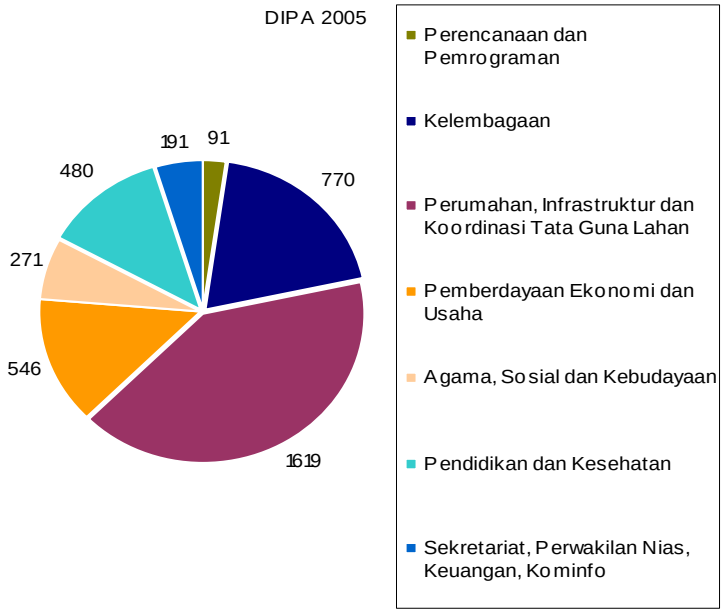
Sedangkan untuk tahun 2006 anggaran biaya rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 9.6 triliun yang berasal dari APBN murni.

Tabel III.20
Anggaran Biaya Bapel BRR Per Bidang Pemulihan

No	Bidang Pemulihan	Total DIPA 2005	Total DIPA-L 2006	Total DIPA 2006
1	Perencanaan dan Pemrograman	90.500.000.000	90.468.758.000	1.657.479.600.000
2	Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup	1.619.258.000.000	1.458.847.350.000	5.606.268.133.000
3	Bidang Sosial Budaya	270.809.000.000	263.274.605.000	327.578.230.000
	Pendidikan dan Kesehatan	480.000.000.000	335.479.658.000	1. 151.283.282.000
4	Ekonomi	546.104.000.000	521.473.132.000	842.757.954.000
5	Kelembagaan dan Reintegrasi GAM	769.753.000.000	741.677.999.000	1.027.536.594.000
6	Sekretariat, Perwakilan Nias, Keuangan, dan Kominfo	190.528.500.000	141.068.222.000	263.383.390.000

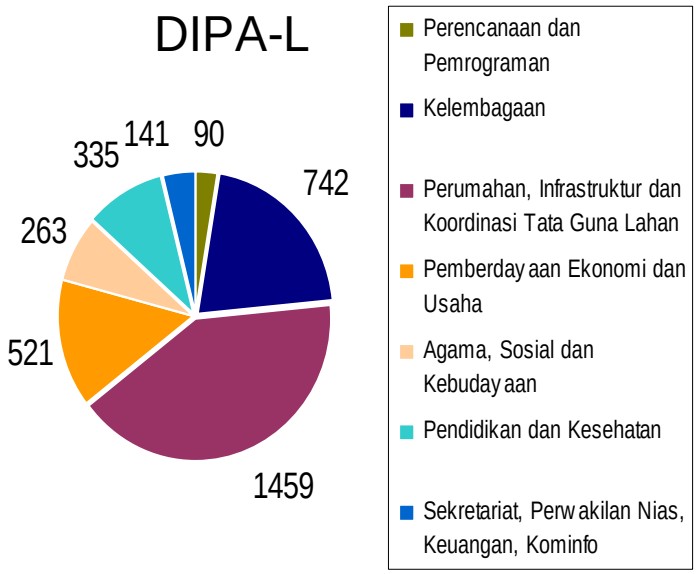
Berdasarkan tabel diatas, dapat diperjelas dengan diagram berikut :

Diagram III.1
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi DIPA 2005



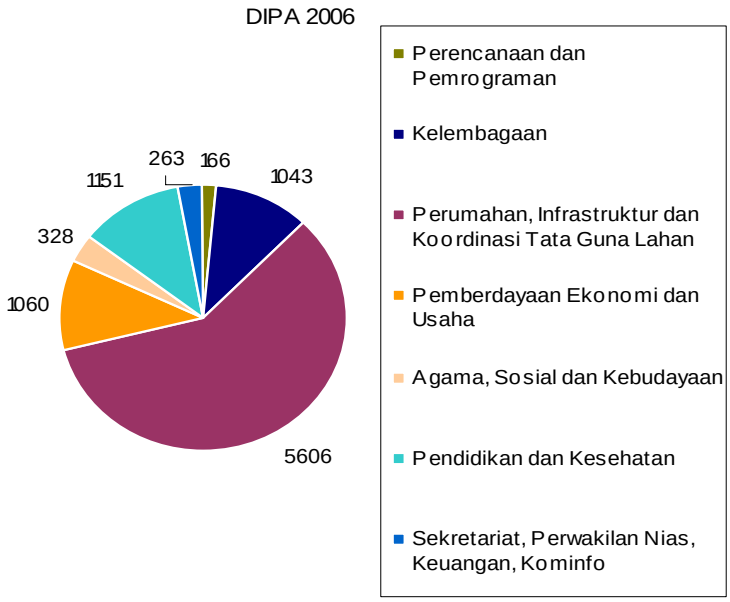
Berdasarkan diagram diatas, terlihat bahwa dana rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2005 pendistribusiannya diperioritaskan pada bidang Infrastruktur, tata ruang, pertanahan dan lingkungan Hidup dan bidang kelembagaan.

Diagram III.2
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi DIPA 2006-L



Dari diagram diatas, terlihat bahwa aliran dana DIPA-L 2006 untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias masih sama di tahun 2005 yaitu diprioritaskan pada bidang infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan lingkungan hidup serta bidang Kelembagaan.

Diagram III.3
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi DIPA 2006



Berdasarkan diagram diatas, terlihat bahwa, untuk tahun 2006, angaran dana rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias masih dipwrioritaskan kepada bidang infrastruktur, Tata Ruang, pertanahan dan Lingkungan Hidup, dan bidang Pendidikan dan Kesehatan.

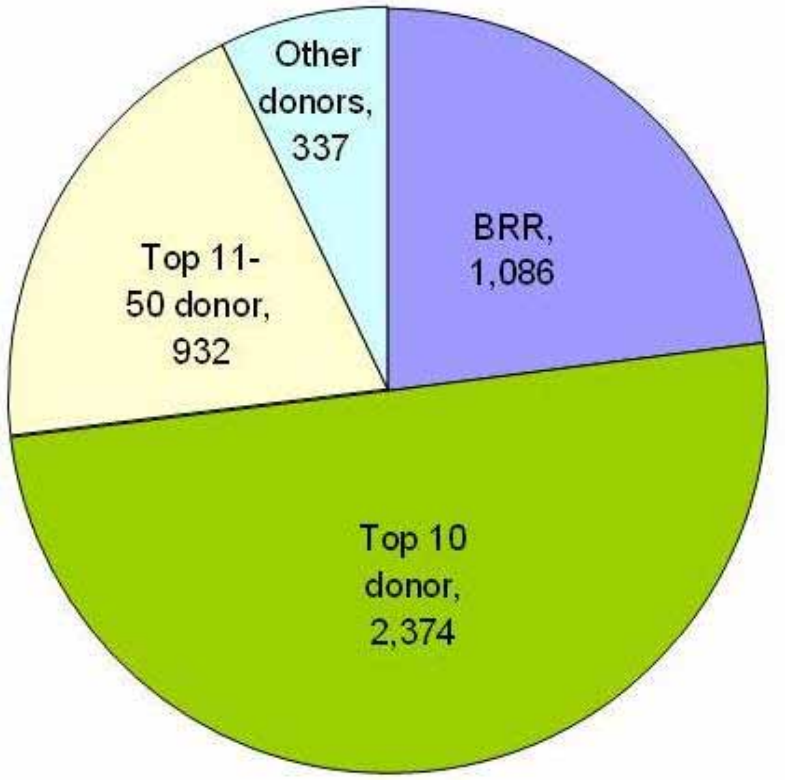
3. Perencanaan Anggaran Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah

Peratruran Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 2 tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kehisupan Masyarakat provinsi Nanggroe Aceh darussalam dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dalam pasal 16 butir g dijelaskan bahwa Badan Pelaksana bertugas mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait. Selanjutnya pasal 1 butir 7 juga diperjelas bahwa Badan Pelaksana rehabiltasi dan rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, adalah pengelola dan penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan demikian, setidaknya ada 4 institusi yang sebagai pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi NAD yaitu Badan Pelaksana (Bapel BRR), Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah, dan pihak lain (Lembaga Donor/NGO, swasta dan lainnya). Namun karena keterbatasan data dan sumber informasi, sumber penganggaran dari Kementerian dan Lembaga serta dari Pemerintah Daerah yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, tidak dapat ditampilkan, berdasarkan pengumpulan data sekunder yang diambil dari berbagai laporan.

4. Rencana Anggaran sesuai Komitmen Donor/NGO

Sumber anggaran off-budget yang dikelola oleh Donor dan NGO termasuk sulit untuk dapat diperoleh informasinya. Berdasarkan sumber dari World Bank jumlah komitmen donor/NGO dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias Sumut dapat digambarkan sebagai berikut:

Diagram III.4
BRR and top 10-players manage 75% of total portfolio



Tabel III.21
15 Pemain Besar Donor/NGO
Dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No	Top 15 players (exec. Basis)*	Amount (US$ mio)
1	BRR	1,086
2	RCRC	497
3	UN	410
4	ADB	357
5	MDF & World Bank	318
6	United States	270
7	Catholic Relief Services	149
8	Save the Children	132
9	Japan	112
10	Australia	91
11	Oxfam International	89
12	Germany	74
13	World Vision International	60
14	Caritas Switzerland	51
15	CARE International	43

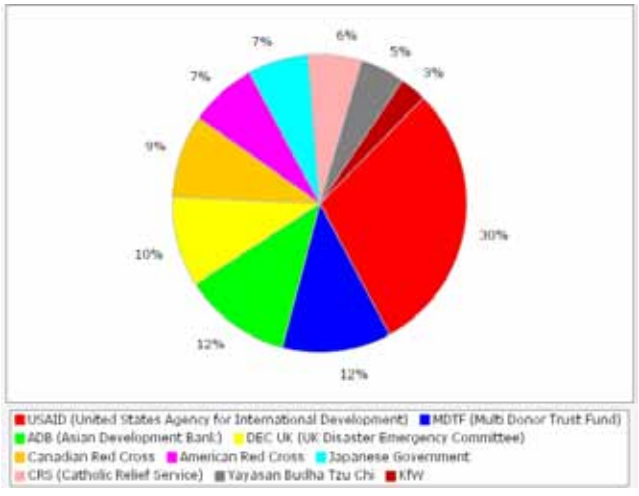
*Keterangan : * Based on existing portfolio based on executing agency (not financing source). Not for public disclosure.*

Berdasarkan sumber yang terbatas, baik dari Bapel BRR dan RanData Base, diperoleh gambaran komitmen penganggaran per bidang pemulihan sebagai berikut:

1. Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan RAN Database BRR diketahui 10 donor terbesar dibidang pemulihan infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Rincian pelaksanaannya dapat dilihat pada diagram dan tabel berikut :

Diagram III.5
Rencana Anggaran Sesuai Komitmen Donor/NGO Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup



Tabel III.22
Tiga donor terbesar dalam bidang pemulihan Infrastruktur, tata Ruang, perumahan dan Lingkungan Hidup

DONOR	COMMITED (USD)
USAID	233,622,049
MDF	90,706,401
ADB	89,464,137

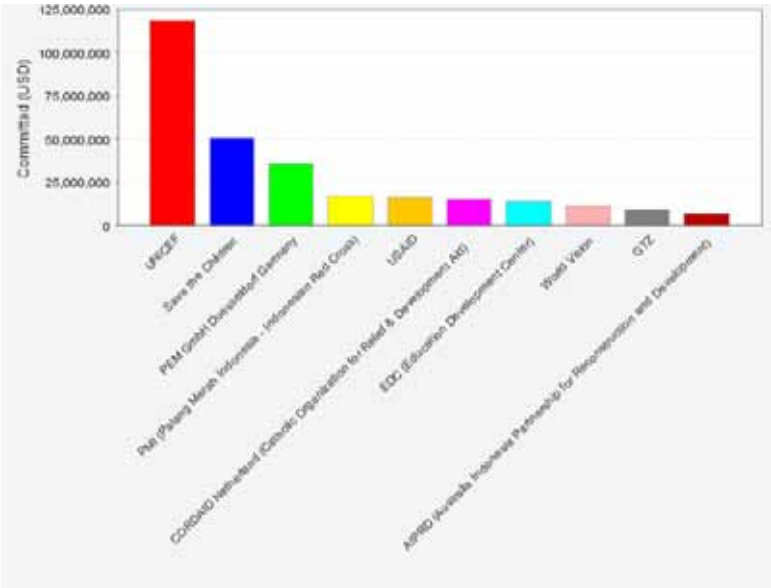
Tabel III.23
Donor-donor lainnya *commited* dengan dana masing-masing

DONOR	COMMITED (USD)
DEC UK	74,748,404
Canadian Red Cross	67,915,361
American Red Cross	55,387,758
Japanese Government	50,421,075
CRS	45,189,612
Yayasan Budha Tzu Chi	36,999,998
KfW	22,103,586

2. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Berdasarkan RAN Database BRR diketahui 10 donor terbesar dibidang sosial budaya . Rincian pelaksanaannya dapat dilihat pada diagram dan tabel berikut :

Diagram III.6
Rencana Anggaran Sesuai Komitmen Donor/NGO
Bidang Pemulihan Sosial Budaya



Sumber : RAND Database BRR (10 besar NGO/Donor bidang pendidikan)

Tabel III.24
Alokasi dana dari donor/NGO utama
untuk bidang pemulihan sosial budaya

No	Donor/NGO	Komitmen (USD)
1	Unicef	119.206.448
2	Save the Children	51.107.618
3	PEM GmbH Duesseldorf Germany	37.927.486
4	PMI (Palang Merah Indonesia-Indonesia Red Cross	17.095.810
5	USAID	16.500.000
6	CORDAID Netherland (Chatolic Organization for Relief & Development Aid	15.500.000
7	EDC (Education Development Center)	13.918.203
8	World Vision	11.306.897
9	GTZ	9.530.863
10	AIPRD (Australia Indonesia Partnership for Reconstrustion and Development)	7.316.793

Sumber : RAND Database BRR (10 besar NGO/Donor bidang pendidikan)

3. Bidang Pemulihan Perekonomian

Berdasarkan RAN Database diketahui 10 donor terbesar di bidang perekonomian. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel dan Diagram berikut ini :

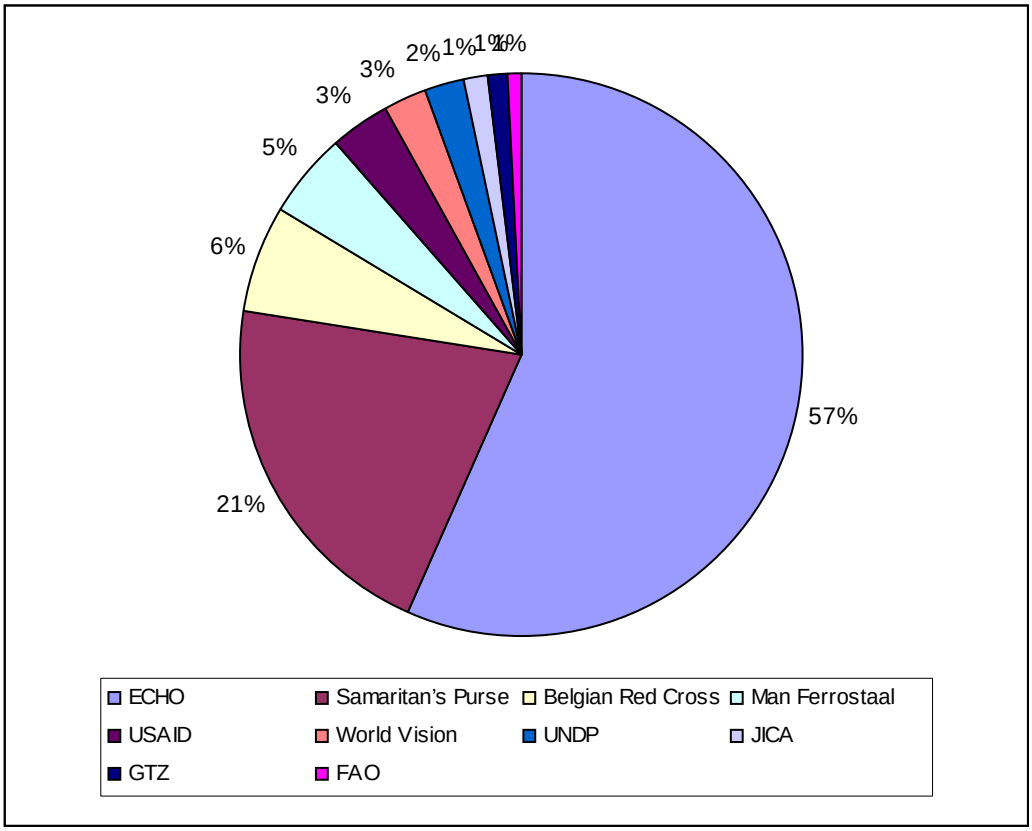
Tabel III.25
10 Donor/NGO Terbesar di Bidang Pemulihan Perekonomian

No	Nama Donor	Subsektor	Komitmen (USD)
1	ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office)	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan	7.118.710
2	Samaritan's Purse	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Pembangunan Ekonomi, Konservasi Sumber Daya Alam, Industri dan Konstruksi	2.617.509
3	Belgian Red Cross	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan	777.722
4	Man Ferrostaal	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan	617.284
5	USAID	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Konservasi Sumber Daya Alam	438.016
6	World Vision	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan	322.500
7	UNDP	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan	266.014
8	JICA	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Industri dan Konstruksi	167.133
9	German Development Cooperation through GTZ (German Technical Cooperation)	Industri dan Konstruksi	130.607
10	FAO	Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan	120.507
	TOTAL		12.576.002

Sumber : RAND Database BRR (10 besar NGO/Donor bidang perekonomian)

Dari Tabel III.24 di atas diketahui bahwa total *committed* 10 donor terbesar sebanyak 12,576,002 USD. Donor terbesar adalah ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office) yang memberikan dana sebesar 7,118,710 USD (57 %), kemudian Samaritan's Purse sebesar 2,617,509 USD (21 %). Donor lainnya rata-rata berkontribusi sebesar 1 - 6 % yaitu Belgian Red Cross, Man Ferrostaal, USAID (*United States Agency for International Development*), World Vision, UNDP (United Nations Development Programme), JICA (Japan International Cooperation Agency), *German Development Cooperation through* GTZ (*German Technical Cooperation*) dan FAO (Food and Agricultural Organization)

Diagram III.7
Rencana Anggaran Sesuai Komitmen Donor/NGO
Bidang Pemulihan Perekonomian



Sumber : RAND Database BRR, 2006 (10 besar NGO/Donor bidang perekonomian)

4. Bidang Pemulihan Kelembagaan

Berdasarkan RAN Database diketahui 9 donor terbesar di bidang pengembangan kelembagaan (*institutional development)*. Rinciannya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

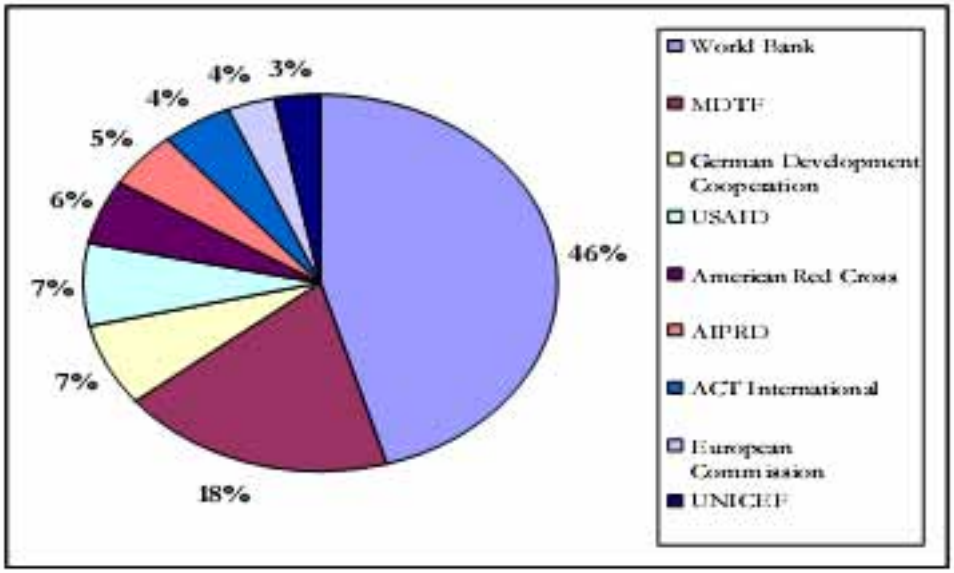
Tabel III.26
Donor/NGO Terbesar di Bidang Pemulihan Kelembagaan

No	Donor	Committed (USD)
1	WB (World Bank)	48,900,000
2	MDTF (Multi Donor Trust Fund)	19,803,800
3	German Development Cooperation through GTZ (German Technical Cooperation)	7,777,554
4	USAID (United States Agency for International Development)	7,473,107
5	American Red Cross	6,120,000
6	AIPRD (Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development)	5,396,662
7	ACT International (Action by Churches Together Alliances)	4,813,260
8	EC (European Commission)	3,810,277
9	UNICEF (United Nations Children's Fund)	3,178,750
	Total	107,273,410

Sumber : RAN Database, 2006

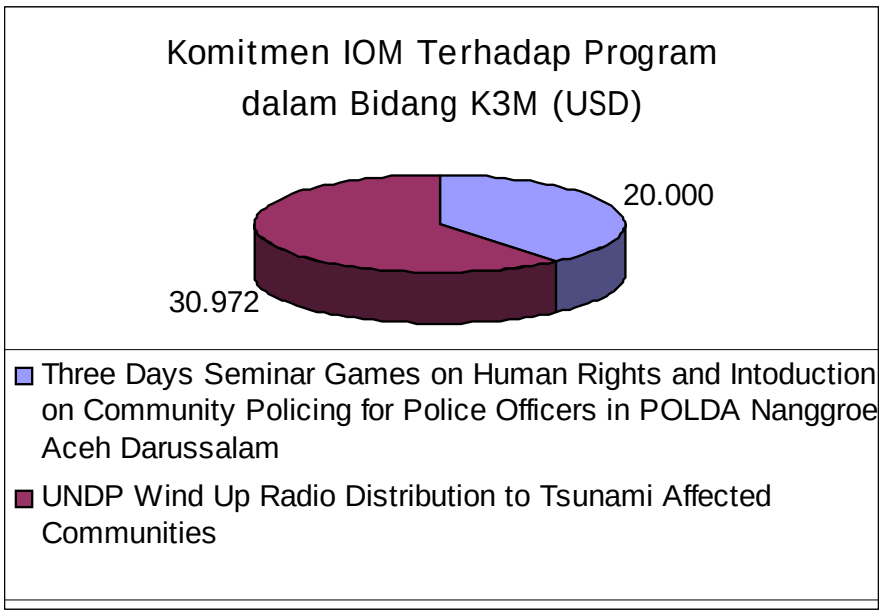
Dari Tabel di atas diketahui bahwa total *committed* 9 donor terbesar sebanyak 107,273,410 USD. Donor terbesar adalah WB (*World Bank*) yang memberikan dana sebesar 48.900.000 USD (46 %), kemudian MDTF (*Multi Donor Trust Fund*) sebesar 19,803,800 USD (18 %). Donor lainnya rata-rata berkontribusi sebesar 3 -7% yaitu *German Development Cooperation through* GTZ (*German Technical Cooperation*), USAID (*United States Agency for International Development*), American Red Cross, AIPRD (*Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development*), ACT International (*Action by Churches Together Alliances*), EC (*European Commission*), dan UNICEF (*United Nations Children's Fund*).

Diagram III.8
Persentase Komitmen Donor/NGO Bidang Pemulihan Kelembagaan



5. Bidang Pemulihan Ketertiban, Keamanan, dan Ketahanan Masyarakat (K3M) dan Reintegrasi GAM

Diagram III.9
Rencana Anggaran Sesuai Komitmen Donor/NGO
Bidang Pemulihan Ketertiban, Keamanan, dan Ketahanan Masyarakat (K3M)



Pasca penandatanganan MoU Helsinki, pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui alokasi anggaran yang diajukan pemda prov.NAD sejumlah Rp200M melalui APBN untuk pelaksanaan program reintegrasi TA 2005. Pelaksanaan program berupa penyerahan bantuan untuk pemberdayaan ekonomi ini ditujukan kepada kelompok sasaran yang didalamnya termasuk mantan anggota TNA, mantan anggota GAM non TNA, dan masyarakat korban konflik. Penyaluran bantuan untuk program reintegrasi ini turut didukung oleh Dinas Sosial Pov.NAD (sebagai bendahara anggaran), Kantor POS (sebagai penyalur langsung ke masyarakat) dan BRA yang di bentuk berdasarkan SK awal dari Gub. Prov. NAD pada bulan Februari 2006 berperan sebagai lembaga administratif. Setelah penyempurnaan, Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA) melalui SK yang baru dari Gubernur Prov. NAD tertanggal 2 Mei 2006, BRA telah berperan banyak dalam program reintegrasi termasuk perencanaan anggaran sebagai lanjutan dari program reintegrasi untuk TA 2006 sejumlah Rp600 M.

Tabel III.27
Komitmen IOM dalam kegiatan proyek di bidang K3M

Kode Proyek	Nama Proyek	Komitmen (USD)	Lokasi
INST 21 IG	Three Days Seminar Games on Human Rights and Intoduction on Community Policing for Police Officers in POLDA Nanggroe Aceh Darussalam	20.000	Lembah Seulawah, Saree, Aceh Besar
INST 57 UN	UNDP Wind Up Radio Distribution to Tsunami Affected Communities	30.972	Aceh Besar

Sedangkan dalam pelaksanaan program reintegrasi bagi mantan TNA dan korban konflik. Lembaga donor yang ikut berpartisipatif dalam program ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.28
Matrix of Donors Supporting Aceh Reintegration Programs

Donor	Program Name (Category)	Implementing Agency	Amount of Money (US$)
GoJ / EoJ	Programme for Peace Building and Reintegration Assistance to Amnestied GAM Prisoners Recipients, Demobilized GAM Combatants and Conflict Affected Communities throughout Aceh	IOM	8.550.000
EoJ	The Project for Supporting Rehabilitation of Irrigation Facility in Conflict-affected villages in Pidie District	Yayasan Keumang	76.329
	The Project for Supporting Voter Education of Regional Election in NAD	KIP	80.518
	Cocoa Plantation Rehabilitation and Treatment for Conflict Affected Farmer Group in Pidie District, Aceh Province	Yayasan Tunas Bangsa	90.002
	Support for Development of Conflict Affected Area Through Improvement of Irrigation Facilities and Agricultural Training for Conflict Victims in Kec. Tangse, Pidie District, Aceh Province	Embun Pagi Foundation	90.080
	The Project for Support for Conflict Victims Through Weir and Channel Rehabilitation in Kec. Bandar Baru, Pidie District, Aceh Province	Perak Foundation	90.081
	The Project for Community Empowerment Through Usage of Rattan for Producing Furniture in Kec. Geumpang and Kec. Manee, Pidie District, Aceh Province	Al Afghani Foundation	87.331
GoJ / JICS	Rehabilitation of Vocational Training Facilities in Banda Aceh	JICS / Ministry of Labour	2.480.000
JICA	Entrepreneurship Skills Development Training for Small and Medium Enterprises	JICA / Ministry of Trade	40.000
	Community Recovery Projects (CEP) for Irrigation Rehabilitation	Yayasan Citra Desa Indonesia for Indrajaya and Glumpang. Yayasan Malem Dagang for Ulim	280.000
	Capacity Building Training for Sub-district Heads	Ministry of Home Affairs	140.000
	Capacity Building for Judicial Institutions through Alternative Dispute Resolution Training	JICA	50.000
	Capacity Building Training for Indpendent Election Committee (KIP)	KIP / JICA	60.000
Canada	Health	IOM, UNICEF	225.300
EC	Reintegration Cash Assistance	IOM	4.800.000
	Community grants	IOM (EC, UNDP, USAID); USAID direct DAI; JICA, UNSYAIH, LNGOs (EoJ/JICA)	1.750.000
	Others/Still to be identified	tbd	3.600.000

Donor	Program Name (Category)	Implementing Agency	Amount of Money (US$)
UNDP	Community grants	IOM (EC, UNDP, USAID); USAID direct DAI; JICA, UNSYAIH, LNGOs (EoJ/JICA)	1.000.000
	Technical Expertise to GoI (DDR, conflict transformation)	UNDP-DSF; Yayasan MiDa (JICA), DinSos (UNICEF)	235.000
UNDP / GoI	Strenghtening Sustainable Peace and Development in Aceh (SSPA)	IOM	900.000
	Strenghtening Sustainable Peace and Development in Aceh (SSPA)	Bappenas / UNDP	1.550.000
	Strenghtening Sustainable Peace and Development in Aceh (SSPA)	Bappenas / UNDP	330.000
	Strenghtening Sustainable Peace and Development in Aceh (SSPA)	Bappenas / UNDP	194.000
	Strenghtening Sustainable Peace and Development in Aceh (SSPA)	Bappenas / UNDP	100.000
	Strenghtening Sustainable Peace and Development in Aceh (SSPA)	Bappenas / UNDP	1.000.000
	Joint Survey with IOM and LSI	LSI	141.000
UNICEF	Livelihoods / Vocational Training / Capacity Building	IOM, Ministry of Labour/JICS, Ministry of Trade/JICA	120.000
	Health	IOM, UNICEF	80.000
	Technical Expertise to GoI (DDR, conflict transformation)	UNDP-DSF; Yayasan MiDa (JICA), DinSos (UNICEF)	60.000
	Peace building / Peace education an training / MoU awareness	Yayasan MiDA (JICA); LNGO (UNICEF)	260.000
USAID (and DOS)	Community grants	IOM (EC, UNDP, USAID); USAID direct DAI; JICA, UNSYAIH, LNGOs (EoJ/JICA)	6.750.000
	Others/Still to be identified	tbd	700.000
EoJ / JICA	Livelihoods / Vocational Training / Capacity Building	IOM, Ministry of Labour/JICS, Ministry of Trade/JICA	11.070.000
	Community grants	IOM (EC, UNDP, USAID); USAID direct DAI; JICA, UNSYAIH, LNGOs (EoJ/JICA)	640.000
WB	Livelihoods / Vocational Training / Capacity Building	IOM, Ministry of Labour/JICS, Ministry of Trade/JICA	50.000
	Health	IOM, UNICEF	590.237
	Studies	WB	320.000

Sumber : World Bank, Status November 2006

Namun, disamping program-program kegiatan yang ditawarkan oleh Lembaga Donor untuk mensupport program BRA, BRA juga mempunyai program tersendiri dalam pelaksanaan program reintegrasi untuk tahun 2005 dan tahun 2006 yang merupakan sosialisasi dari butir-butir yang terdapat pada MoU Helsinki. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan melalui tabel di bawah ini:

Tabel III.29
Perencanaan BRA Tahun 2005

No.	Program/ Kegiatan Pokok	Alokasi Anggaran (Rupiah)
1.	Sekretariat: - Menyusun dan Sosialisasi Program Serta Anggaran BRA tahun 2005-2006 - Menyusun Buku Pedoman dan kriteria korban konflik - Mengirim pendamping ke Kabupaten/ Kota - Koordinasi dengan Donor, NGO dan Instuitusi terkait - Menyusun Renstra BRA	1.345.687.200
2.	Bidang Ekonomi - Memberi kemudahan ekonomi - Memberi kesempatan kerja - Alokasi lahan pertanian - Mendistribusikan bansos dan pemberdayaan ekonomi tahun anggaran 2005 - Membuat laporan berkala	62.957.160.000
3.	Polhukam dan HAM - Melanjutkan sosialisasi MoU - Mendorong Penyusunan RUU PA - Mendorong Pilkada 2006 tepat waktu - Mendorong pendirian partai lokal - Mendorong pembentukan KKR - Mendorong pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim (KBPK) - Memberi dukungan kepada AMM - Mendorong rehabilitasi PNS yang terlibat GAM - Mendorong mantan GAM menjadi TNI/POLR - Mendorong Pemulihan Kewarganegaraan - Mendorong Pembentukan Pengadilan HAM di NAD - Mendorong Kegiatan Tradisional ke arah ishlah	18.531.292.800
4.	Bidang Sosial & Kesra - Memberi Jaminan Sosial yang layak - Merehab harta publik/ personal yang rusak - Memberi bantuan Pendidikan - Memberi bantuan kesehatan - Melanjutkan bantuan Jadup - Melanjutkan bantuan Diyat	116.443.000.000
5.	Bidang Data & Monev - Mengumpul dan mengolah data - Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program reintegrasi	722.860.000
	Total	200.000.000.000

Sumber : Presentasi BRA pada Rapat Interdep Anggaran BRA 2006, Bappenas, 19 Mei 2006.

Tabel III.30
Perencanaan BRA Tahun 2006

No.	Program/ Kegiatan Pokok	Alokasi Anggaran (Rupiah)
1.	Sekretariat: • Mengelola sumber daya manusia agar motivasi dan produktivitas tinggi • Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran tugas Pelaksana Harian dan semua Korbid • Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran tugas BRA Kabupaten/Kota • Membuat Prosedur/ Sistem manajemen untuk tertib administrasi • Membuat laporan berkala kepada yang terkait • Menyimpan dan mengamankan semua dokumen	17.887.797.000
2.	Bidang Ekonomi • Menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi kepada : a. Mantan TNA (2.000 orang) b. Mantan Tapol/ Napol (1.985 orang) c. Masyarakat Korban Konflik (18.624 orang) d. GAM non TNA (5.000 orang) e. GAM yang menyerah pra MoU (2.704 orang) f. Relawan PETA (3.000 orang) g. Pengungsi yang berada di Luar dan Dalam Prov. NAD • Membuat Buku Juknis Pemberdayaan ekonomi • Membuat Pelatihan kepada para Pendamping • Mengevaluasi dan memonitor proses penyaluran bantuan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Kesbang Linmas • Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk optimalisasi bantuan pemberdayaan ekonomi • Membuat laporan berkala kepada Pelaksana Harian	399.160.089.000
3.	Polhukam dan HAM • Mengevaluasi dan Memonitor kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah RI di AMM • Menyusun dan mendistribusikan Buku UU PA • Mendorong/ memfasilitasi proses : a. Pembuatan Qanun b. Pembentukan dan operasional KKR c. Sosialisasi perdamaian • Mengevaluasi dan memonitor pengamanan Pilkada 2006 • Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk optimalisasi implementasi MoU • Membuat laporan berkala kepada Pelaksana Harian	35.047.330.000
4.	Bidang Sosial & Kesra • Menyalurkan bantuan sosial untuk : a. Diyat (19.597 orang) b. Cacat Korban Konflik (2.000 orang) c. Kesehatan korban konflik d. Beasiswa kepada 21 Kab/ Kota (@ Rp. 100 Juta) e. Rumah Rusak akibat konflik (1.725 unit) • MeNGevaluasi dan memonitor proses penyaluran bantuan rumah yang dilakukan oleh BRA Kabupaten/ Kota • Membuat Buku Juknis Bantuan Sosial • Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk optimalisasi bantuan sosial • Membuat laporan berkala kepada Pelaksana Harian	145.084.100.000

No.	Program / Kegiatan Pokok	Alokasi Anggaran (Rupiah)
5.	Bidang Data & Monev • Mengumpul, menyimpan dan memelihara semua data yang terkait dengan kegiatan reintegrasi • Melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan reintegrasi • Melakukan kerjasama dengan World Bank untuk pendataan dan needs assessment korban konflik • Merekrut dan memberikan pelatihan kepada Petugas pendataan dan needs assessment • Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk optimalisasi proses pendataan, monitoring dan evaluasi • Membuat Buku Juknis Pendataan dan Needs Assesment • Membuat laporan berkala kepada Pelaksana Harian	2.820.683.000
	Total	599.999.999.000

Sumber : Presentasi BRA pada Rapat Interdep Anggaran BRA 2006, Bappenas, 19 Mei 2006.

BAB IV
PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TA 2005 DAN TA 2006

Pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD dan Nias Sumut terdiri dari Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Bapel RR), Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Donor/NGO dan kalangan lainnya. Penjelasan berikut menggambarkan berbagai kemajuan, permasalahan dan kendala dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Batasan waktu yang ditinjau dalam melihat pelaksanaan ini pada masa Tahun Anggaran (TA) 2005 dan TA 2006. Atau dengan kata lain, masa tinjauan pelaksanaan selama satu tahun penerapan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Nias sejak Juni 2005 hingga Juli 2006.

4.1 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR)

4.1.1 Dewan Pengarah BRR

Dalam melaksanakan tugasnya dalam kerangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, Dewan Pengarah telah melaksanakan:

1. Rapat Koordinasi Dewan Pengarah BRR

   a. *Pelaksanaan Rapat Dewan Pengarah BRR*

      Agenda rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengarah, merupakan agenda yang disepakati bersama oleh Dewan Pengarah. Agenda tersebut merupakan kumpulan isu, masalah dan rekomendasi dari masing-masing anggota, sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Isu, permasalahan dan rekomendasi kemudian dikelompokkan dalam bentuk tabulasi dan matriks, yang kemudian diinformasikan kepada para anggota dewan pengarah. Isu, permasalahan dan rekomendasi ini kemudian disetujui sebagai agenda rapat.

   b. *Rapat Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan*

      Sebagaimana tugas dan wewenang Dewan Pengarah dalam meminta masukan dan atau bantuan instansi pemerintah maupun pihak lain yang dipandang perlu dalam pemantapan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, maka Dewan Pengarah melalui Sekretariat Dewan Pengarah telah melakukan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam hal ini Bappeda Prov/Kabupaten/Kota NAD dan Sumut

c. Rapat Anggota Dewan Pengarah

Realisasi kegiatan yang telah dilakukan mulai bulan Mei – September 2005 adalah pelaksanaan rapat rutin bulanan anggota Dewan Pengarah BRR. Pelaksanaan rapat anggota Dewan Pengarah tersebut ditentukan dengan mengambil lokasi di Jakarta dan di Banda Aceh. Penentuan lokasi rapat di Banda Aceh dimaksudkan agar seluruh Dewan Pengarah dapat meninjau langsung daerah yang sedang dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

d. Rapat Tripartite Internal BRR

Untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, dan juntuk mengupayakan koordinasi dalam mencari solusi untuk pemecahan permasalahan pelaksanaan rehabilitasi dfan rekosntruksi, BRR yang difasilitasi oleh Dewan Pengarah, Dewan pengawas dan badan Pelaksana

Selain pada tingkatan anggota BRR, rapat tripatite juga dilakukan pada tingkatan sekretariat yang selanjutnya disebut sebagai forum teknis penyelesaian masalah bersama yang diikuti oleh masing-masing sekretariat Dewan pengarah, tenag ahli Dewan pengawas dan para deputi badan pelaksana. Pada rapat ini pembahasan lebih bersifat teknis dalam rangka penyelesaian permasalahan bersifat hal-al teknis dalam rangka penyelesaian permasalahan bersama pelaksanaan rehabilitasi dan rekosntruksi.

Berdasarkan berbagai forum rapat tersebut, telah diidentifikasikan beberapa masalah dan dihasilkan beberapa rekomendasi dalam upaya tindak lanjut seperti berikut :

Tabel IV.1
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi oleh Dewan Pengarah BRR

No	Bidang / Isu Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Umum Kelambatan proses pendanaan	Dalam upaya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, pemerintah telah menerbitkan Perpres No 70/2005 tentang pengadaan barang dan jasa guna mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias yang merupakan revisi dari Kepres 80/2003.
	Tumpang tindih dan tidak adanya koordinasi Perencanaan program	Perlu dilakukan pembahasan antara Bapel dengan Kementerian Lembaga sehingga dapat diperoleh penegasan mengenai lingkup tugas BRR sesuai Blue print, terutama menyangkut batasan wilayah dan obyek yang ditangani agar tidak tumpang tindih dengan program departemen/instansi.
		Dalam kaitannya dengan peningkatan dayaguna pelaksanaan tahun 2005 dan perencanaan kegiatan tahun 2006, Bapel diminta untuk dapat berkoordinasi dan mengkomunikasikan rencana kerja secara rinci kepada Dewan Pengarah, termasuk didalam penyusunan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2006 sesuai dengan rancangan pagu alokasi sebesar Rp 16 triliun.
		Dari data rencana alokasi TA 2006, masih terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota di provinsi Sumut yang sebenarnya ”eligible” dalam blue Print namun *belum memperoleh alokasi yang sama sekali oleh BRR pada tahun 2006.*

No	Bidang / Isu Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
	Kurangnya Koordinasi Internal BRR	Untuk koordinasi lintas komponen BRR NAD-Nias, beberapa kesepakatan bersama yang ditetapkan yaitu : a. BRR NAD- Nias harus merupakan satu kesatuan yang terdiri dari tiga entitas Wanrah, Wanwas, dan Bapel yang harus bekerjasama dalam kesetaraan dan saling terkait satu sama lainnya b. *Koordinasi intenal BRR perlu ditingkatkan* , diperjelas dan ditindaklanjuti. c. *Koordinasi secara eksternal antara BRR khususnya pemerintah daerah juga sangat perlu ditingkatkan dan diintensifkan* .
	Ketidakjelasan Kewewenangan Pelaksanaan Anggaran	Dewan Pengarah telah meminta Bapel untuk segera menyiapkan payung hukum yang mengatur pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran kepada departemen/instansi/lembaga berikut mekanisme dan tata cara pertanggung jawabannya, namun *sampai saat ini belum ada laporan BRR mengenai penerbitan payung hukum* , namun beberapa proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan melalui penunjukan kuasa pengguna anggaran dan kepala satker tetap berjalan.
2	Bidang politik, Hukum dan Keamanan	Peralihan Status Tertib Sipil di Provinsi NAD Keikutsertaan mantan GAM pada BRR Penyelenggaraan Pemerintah Aceh Penyelesaian masalah hukum Keamanan dan Ketertiban
3	Perekonomian	Kepala Bapel menfasilitasi percepatan perubahan RT/RW dan revisi Qanun RT/RW terutama RT/RW Kabupaten /Kota yang terkena bencana.
	a. Penataan Ruang	Meminta Bapel BRR untuk bersama Pemerintah Daerah Kab/Kota memprioritaskan penyiapan rencana detail tata ruang dengan melibatkan masyarakat secara intensif.
		Menyarankan Bapel BRR dalam menyusun village plan dapat terus dilanjutkan, namun dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan draft RTRW dan disusun secara partisipatif.
	b. Pertanahan	Meminta Bapel BRR untuk berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga terkait guna mempercepat penerbitan perundangan tentang penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah perorangan.
		Meminta Bapel BRR untuk segera mencairkan dan memanfaatkan seoptimal mungkin dana bantuan MDF untuk mempercepat penyelesaian proyek penataan hak atas tanah dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan instansi terkait.
	c. Perumahan	Meminta Bapel BRR untuk segera menyiapkan draft petunjuk teknis pelaksanaan peraturan presiden No 70 tahun 2005 tentang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kondisi permasalahan dan kelancaran prosedur pengadaan yang diperlukan bagi masyarakat korban bencana alam NAD dan Nias.
	d. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	Menegaskan kepada Bapel pentingnya penjabaran blue print kedalam action plan dan meminta Bapel BRR untuk memprioritaskan dan mempercepat pelaksanaan rencana aksi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
		Meminta kepada Bapel untuk menyebarluaskan dan mensosialisasikan program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat luas dapat mengetahui program yang dimaksud.
		Bapel diminta untuk lebih mempercepat pembangunan sarana dan prasarana ekonomi terutama prasarana yang mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.
	Keuangan dan Perbankan	Meminta Bapel untuk sedapat mungkin menfasilitasi penyelesaian rekening nasabah bank masyarakat yang menjadi korbana bencana, namun berhubung sistem perbankan sangat menuntut kehati-hatian keuangan maka *proses penyelesaian rekening nasabah belum bisa berjalan dengan baik* .

No	Bidang / Isu Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut
	Keterbatasan Dukungan Database Bidang Ekonomi	Meminta Bapel BRR untuk mempercepat pengadaan database bidang ekonomi dan untuk bisa menjajaki kemungkinan mendapatkan dana dari luar negeri untuk berbagai kegaitan yang diarahkan untuk pembenahan database ekonomi dan sosial, namun *sejauh ini belum ada laporan mengenai perkembangan upaya yang dilakukan Bapel BRR dalam rangka pembenahan database bidang ekonomi*.
	Pendayagunaan Pelabuhan Sabang	Untuk mendukung kelancaran distribusi dan penampungan logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, maka Bapel disarankan untuk memanfaatkan pelabuhan bebas Sabang sebagai distribution port bahan baku/logistik bagi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD-Nias. Namun *sejauh ini belum ada laporan dan informasi Bapel BRR mengenai perkembangan tindak lanjut saran dan rekomendasi Dewan Pengarah kepada Bapel berkaitan dengan pemanfaatan pelabuhan Sabang guna mendukung kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias*.
4	Bidang Kesejahteraan Rakyat a. Agama, Sosial, dan Budaya	a. Perlunya melakukan penguatan institusi keagamaan, sosial dan budaya serta jaminan atas perlindungan perempuan dan anak b. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkasn bagi mereka yang telah terbukti melakukan penyebarluasan agama dilarang beroperasi di Banda Aceh sesuai dengan peraturan pemerintah tentang penyebarluasan agama
	b. Pengungsi	Bapel bersama Pemerintah Daerah segera berkoordinasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di hutan dan mereka yang telah kembali kedesa masing-masing.
	c. Kependudukan	a. Bapel bersama-sama Pemda NAD supaya mempercepat penataan administrasi kependudukan bagi masyarakat. b. Pemda NAD bersama instansi tekait lainnya diharapkan melakukan percepatan penataan kembali integrasi masyarakat korban konflik (transmigran, pejuang tanah air, penduduk yang megungsi keluar Aceh dll) berbaur dengan damai dalam komunitas masyarakat Aceh yang islami sesuai agama dan adat istiadat masyarakat Aceh.
	d. Bantuan Kemanusiaaan	a. Bapel bersama Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengkoordinasikan tidak terhentinya bantuan kemanusiaan oleh UNHCR dan WFP yang masih dibutuhkan oleh masyarakat terutama kepada masyarakat di Kabupaten Nias dan Nias Selatan. b. Bapel bersama-sama Pemda NAD dalam menyalurkan bantuan asing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman RI-GAM perlu memberdayakan masyarakat.
	e. Kesehatan	a. Bapel, Pemda dan Depkes diharapkan mensinergiskan pembangunan di bidang kesehatan dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ada. b. Pemda diharapkan dapat meningkatkan peleyanan dalam kebersihan.

Sumber: Sekretariat Sekretaris Dewan Pengarah BRR, 2005-2006

4.1.2 Dewan Pengawas BRR

Sesuai dengan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, serta menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, kemudian meminta penjelasan Badan Pelaksana dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta memberikan rekomendasi hasil pengawasan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada presiden, beberapa hal yang menjadi masalah dan perhatian serta menjadi rekomendasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi oleh Dewan Pengawas BRR

No	Bidang	Permasalahan	Rekomendasi
1	Infrastruktur	Tanggul pencegah banjir di Desa Kumbang Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara jebol sekitar 30 m di Km. 7 Jalan Provinsi Lhoksukon – Cot Girek akibat meluapnya Krueng Prutoe Sudah dimuat di harian Serambi tanggal 22 Agustus 2006 dengan judul “Tanggul BRR Jebol, Baru Dua Bulan Dibangun” serta laporan masyarakat setempat (Desa Hagu Barat Laut Kota Lhokseumawe) akan kurangnya elevasi tanggul serta abrasi yang semakin parah. Sebagian masyarakat sudah konstruksi ini tidak kuat dan sudah meramalkan peristiwa ini. Masyarakat mewanti-wanti pada kontraktor, tetapi kontraktor hanya mengatakan bahwa mereka mengerjakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan	- Harus sesegera mungkin melaksanakan pemasangan tanggul di daerah kritis, karena dikhawatirkan akan berdampak lebih besar lagi; - Tanggul yang sudah dibangun oleh BRR harus ditinggikan lagi hingga mencapai elevasi yang aman sehingga tidak terjadinya over topping terlebih-lebih pada pasang purnama
2	Perumahan	- Untuk mensuplai air bersih di Kota Banda Aceh dan Wilayah Aceh Besar yang berdekatan dengan Kota Banda Aceh, seperti Kecamatan Baitussalam, Darussalam dan Mesjid Raya memerlukan jaringan pipa. - Sampai dengan sekarang, kebutuhan air bersih untuk penduduk yang tinggal di rumah/barak di Kecamatan Baitussalam dan Mesjid Raya dipasok dengan menggunakan mobil tangki yang kemudian dipindahkan ke tangki penampung. Setiap ingin memperoleh air bersih, masyarakat di dua kecamatan ini terpaksa harus antri dengan jerigen dan ember. - Ada 177 km jaringan pipa air bersih milik PDAM Tirtadaroy yang rusak total diterjang gelombang tsunami. Sampai sekarang DED untuk jaringan pipa air bersih di Kota Banda Aceh dan sekitarnya belum ada.	- Bapel perlu memberikan perhatian yang tinggi untuk penyusunan tata ruang, sehingga penyusunan tata ruang dapat diselesaikan dengan cepat. Bapel BRR hendaknya melibatkan Bappeda dan instansi lain yang terkait dari masing-masing kab/kota yang tata ruangnya sedang disusun. - (a) Bapel BRR agar mengevaluasi rumah yang terbengkalai pembangunan oleh NGO dan dapat diprogram penyelesaian tahun 2007, bila ada NGO yang mundur. (b) Perlu upaya perbaikan rumah kualitas rendah dan kelengkapan pendukung (listrik dan watsan) agar rumah yang telah selesai bermanfaat bagi korban bencana. (c) Perlu dilakukan uji kelayakan penerima rumah bantuan bagi korban bencana, sehingga rumah bantuan tidak diberikan kepada warga yang tidak memerlukan.

No	Bidang	Permasalahan	Rekomendasi
3.	Pemberdayaan Ekonomi	- Di Kabupaten Aceh Tengah ada 4 koperasi/LKM yang telah terpilih oleh Bapel BRR sebagai penerima bantuan modal usaha modal bergulir dan investasi, yaitu KUD Sumber Rejeki, Koptan Pantan Pertik, Koppas Putri Pekes dan Kopwan Khairunnisa. - Pada koperasi tersebut telah ditugaskan tenaga pendamping. Tetapi modal usaha bergulirnya belum disalurkan - Pelaksanaan bantuan UPI sangat penting untuk memberikan kesempatan kerja kepada perempuan. Program ini telah mulai berjalan di seluruh kabupaten/kota, dan ada yang sudah mencapai 75% realisasi fisik dan keuangannya. Selain UPI bantuan BRR, beberapa NGO/LSM juga telah melaksanakan bantuan serupa sehingga bentuk bantuan ini jenuh. - Keadaan ini terjadi di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie. Di kecamatan ini terdapat hasil pengolahan ikan yang sangat spesifik, yaitu ikan teri kualitas tinggi, yang akan mensuplai kebutuhan untuk Kota Banda Aceh dan Medan. Pada saat panen raya, hasil pengolahan mereka harus dijual murah karena tidak ada gudang khusus yang suhu ruang harus dapat diatur sesuai ikan olahan. - Keadaan pematang tambak rusak terjadi di Kabupaten Aceh Besar, yaitu di UPP Selat Malaka Kecamatan Mesjid Raya. UPP Montutop dan UPP Lueng Raya di Kecamatan Baitussalam. Sampai dengan bulan Agustus 2006 tambak masyarakat di Kabupaten Aceh Besar sudah dibersihkan dan direhabilitasi. Namun karena tanah berpasir, pematang tambak yang telah dibuat tidak tahan terhadap terjangan gelombang pasang purnama, akibatnya menjadi rusak.	- Pihak Bapel perlu memeriksa mengapa dana bantuan bergulir tersebut belum disalurkan - Bapel BRR perlu mempertimbangkan untuk membangun gudang yang sesuai untuk ikan olahan di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie. - Di masa mendatang, rehabilitasi tambak harus ada pengaman di kiri-kanan pematang sehingga pematangnya dapat bertahan lebih lama, dan pemilik tambak diberikan penyuluhan untuk dapat merawat/memelihara pematang tambaknya.

No	Bidang	Permasalahan	Rekomendasi
4.	Pendidikan	- Program tenaga kerja dan *lifeskill* terfokus pada kegiatan pelatihan hardskill. - Sampai dengan tahun 2006 program kegiatan pelatihan tenaga kerja belum menyentuh keadaan di mana kegiatan pembangunan perumahan dan gedung akan berakhir tahun 2008 atau 2009. Program kegiatan pelatihan di seluruh kabupaten/kota yang ada sekarang baru ada 3 jenis, yaitu pelatihan tukang kayu, tukang batu dan tukang las. Sungguhpun tiga jenis ketrampilan ini sangat penting hingga tahun 2009, pelatihan di luar yang tiga ini menjadi menjadi sangat penting sebagai *exit (successive) strategy* BRR untuk menghindari pengangguran dan *outmigration* dari Aceh yang besar-besaran pasca tahun 2009. - Program bidang pendidikan masih dominasi kepada pembangunan fisik fasilitas pendidikan, padahal diharapkan sisi “soft” pendidikan seperti visi pendidikan Aceh dan kurikulum serta penyesuaian dengan Aceh baru berdasarkan UU No 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. - Program capacity building yang dilaksanakan kurang menyentuh masyarakat korban bencana, disebabkan tidak efektifnya dalam merekrut peserta dalam pelatihan. Motivasi peserta perlu diidentikasi agar dapat diketahui tendensi dalam mengikuti pelatihan. - Pemberian beasiswa perlu dipikirkan monitoring dan evaluasi keefektifan target yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, khususnya rentang waktu keberadaan BRR sampai dengan 2009	- Program pelatihan tenaga kerja harus menyebar ke bidang di luar konstruksi, misalnya industri makanan dan minuman, jasa grafika, perbengkelan, dan industri kimia dasar. - Program pelatihan juga harus terpadu dengan membangun kemitraan dengan perusahaan yang telah berkembang baik di Indonesia - Bapel BRR sebaik melaksakan secara proporsional antara unsur “soft” pendidikan disamping pembangunan fisik fasilitas pendidikan

No	Bidang	Permasalahan	Rekomendasi
5.	Kesehatan Gizi	- Meningkatnya insiden penyakit infeksi terutama penyakit yang diperantarai oleh nyamuk antara lain malaria, DHF (demam berdarah dengue) dan filariasis (termasuk ke dalam "*tropical deseases*"). Sementara alokasi dana untuk pemberantasan penyakit menular dan wabah dalam DIPA 2006 hanya Rp.6.423.446.000,-. Penyerapan anggaran untuk program tersebut per 31 Agustus 2006 baru 10,8%. Kurangnya fokus perhatian dari BRR dalam menurunkan insiden penyakit-penyakit tersebut.	- Perlu alokasi dana yang lebih besar untuk menangani meluasnya penyakit tropis yang diperantarai oleh nyamuk. Langkah-langkah yang perlu diambil antara lain adalah (1) melakukan surveilance dengan mengidentifikasi parasit dalam darah manusia dan dalam tubuh nyamuk, mengidentifikasi nyamuk penyebab, melakukan pemetaan spesies nyamuk dan parasit, (2) memberi terapi yang tepat,(3) melakukan pencegahan dengan mengendalikan vektor penyebab,penanganan kebersihan lingkungan dan penyuluhan kesehatan pada masyarakat.
		- Beasiswa pendidikan lanjutan tenaga kesehatan hingga saat ini belum cair. Sementara MoU belum ditanda tangani. Di lain pihak, mahasiswa yang sudah lulus seleksi yang sudah berangkat adalah 32 orang mahasiswa S2 dan 16 orang mahasiswa S1. Sedangkan mahasiswa Program Dokter Spesialis akan berangkat pada bulan Februari 2007 dan Juli 2007.	- Mempercepat pencairan dana dan segera mendistribusikan kepada mahasiswa S2 dan S1 keperawatan yang sudah berangkat
		- Alokasi dana untuk beasiswa pendidikan tenaga kesehatan dalam DIPA 2006 adalah Rp.54.929.472.000,- yang dirinci ke dalam: (1) Program S2 sebanyak Rp.9.348.090.000,- (2) Program S1 Keperawatan Rp.178.778.810,- (3) Program Dokter Spesialis sebanyak Rp.35.960.000.000,- dan (4) Management Fee untuk Komite Rp. 2.112.672.000,- .	

No	Bidang	Permasalahan	Rekomendasi
6.	Agama, Budaya, dan peradatan	- Sebagian korban tsunami tidak lagi tinggal di barak. Banyak barak yang sudah kosong dibiarkan dan bahkan ada yang sudah dirusak/ dibongkar oleh warga barak. Penghuni baru barak bermunculan, terutama mereka yang datang ke kota Banda Aceh untuk mencari pekerjaan. - Muncul pemasalahan baru, seperti demo yang diprakarsai oleh FORAK yang baru saja terjadi. - Ada penolakan peresmian perumahan yang dengan latar belakang keagamaan. - Perbaikan sarana-prasarana agama masih ada yang luput dari pendataan, ada masjid, pasantren yg layak utk dibantu belum mendapat bantuan. - Aktivitas peningkatan SDM khusus bidang pemahaman agama belum dapat diukur keberhasilannya	- Perlu segera pendataan ulang warga korban tsunami yang masih tinggal di barakbarak pengungsian, barak yang sudah kosong segera bongkar dan materialnya dihibahkan untuk kepentingan umum yang menunjang proses rehab-rekon, serta awasi adanya penghuni baru di barak-barak karena akan mengganggu kemaslahatan korban asli tsunami. - Mendata kembali sarana-prasarana ibadah, pendidik agama, dan membuat skala prioritas rehab-rekon. - Melakukan uji hasil terhadap kegiatan peningkatan SDM adakah bermanfaat atau hanya sekedar menghabiskan uang
7.	Kelembagaan dan Hukum	- Pembinaan Perempuan dan Anak-anak para korban tsunami masih sangat lemah, belum ada konsep baku yang dapat diterapkan secara berkala sehingga menunjukkan hasil, dan banyak kegiatan yang diselenggarakan kearah pemberdayaan perempuan dan anak tidak melibatkan korban. - Kelambatan rekonstruksi infrastruktur mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan - Ketidakpastian payung hukum mengakibatkan sengketa atau konflik dalam bidang pertanahan semakin banyak muncul	- Melakukan koordinasi lintas sektoral antara BRR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Keluarga Sejahtera, serta masyarakat dengan menawarkan paket “Perlindungan Kaum Perempuan & Anak” dengan - Deputi/Direktur terkait perlu mendorong lahirnya sebuah kesepakatan bersama antara Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia NAD, Kapolda NAD, Kejati dan Pengadilan Tinggi agar ada keseragaman dalam hal penanganan tahanan dan narapidana, misalnya mempersiapkan rumah tahanan sementara yang memenuhi syarat - Diperlukan kebijakan termasuk payung hukum yang memungkinkan seluruh kantor yang menjalankan fungsi dan pelayanan hukum di Aceh Barat, Aceh Jaya dan Banda Aceh, dibangun dan difungsikan dalam waktu singkat

No	Bidang	Permasalahan	Rekomendasi
		- Proses pembangunan baru gedung Lembaga Pemasyarakatan di Aceh Barat tidak menunjukkan kemajuan, masih ada masalah mengenai lokasi pembangunan, dan karena itu diperkirakan baru akan selesai pertengahan tahun 2008. - Kapasitas ruang tahanan Kepolisian Resort (Polres) Meulaboh tidak memenuhi persyaratan untuk memberikan perlindungan terhadap para tahanan yang dititipkan oleh kejaksaan dan pengadilan, Kapolres Aceh Barat mengembalikan seluruh tahanan titipan kejaksaan dan pengadilan. Keadaan yang memprihatinkan dalam penanganan tahanan dan napi juga terlihat di Calang (administrasi LAPAS tidak jalan) dan Kota Banda Aceh yang harus menggunakan LAPAS Aceh Besar - Kantor-kantor polsek di Aceh Jaya masih dalam bentuk kantor kayu darurat dengan ukuran yang kecil, jumlah petugas hanya tiga orang, dan memberi perhatian kepada keamanan diri mereka dengan sarana kantor yang tidak memenuhi syarat - Tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Meulaboh masih dikendalikan dari rumah dinas Kejari dengan ukuran yang sangat sempit, pengadilan Negeri Meulaboh masih berkantor di Dinas Perhubungan Aceh Barat, Kantor Kejari Calang masih berbentuk barak, kantor Mahkamah Syar'iyah Aceh Jaya masih dalam bentuk barak - Masalah-masalah dalam pertanahan - Lambatnya pembebasan dan pembayaran ganti rugi tanah milik masyarakat, sedangkan rekonstruksi fisik di atas tanah tersebut sudah selesai dilaksanakan;	- BRR harus mendorong Pemerintah segera mengesahkan Rancangan Perpu Penyelesaian Masalah Hukum yang Diakibatkan oleh Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi NAD dan Nias, atau lembaga sektoral untuk mengeluarkan aturan-aturan yang bersifat solutif dalam bdg pertanahan, perbankan, asuransi, dan pewalian/pewarisan.

No	Bidang	Permasalahan	Rekomendasi
		- Masalah pertanahan yang meliputi: (a)Penolakan warga atas proyek rumah yang sudah selesai dibangun karena saat pembangunan rumah dilaksanakan, status tanah tidak jelas; (b) Pemakaian tanah untuk kepentingan umum tanpa kompensasi kepada pemilik tanah; (c) Korban yang tidak memiliki tanah yang memadai untuk pembangunan rumah yang akan dibantu oleh donor; (d) Beberapa kasus di mana warga bermasalah dengan bank karena tanah agunan kepada bank musnah/tidak dapat dipergunakan lagi.	
8.	Komunikasi dan Partisipasi Publik	- Komunikasi masih belum efektif menyentuh masyarakat korban bencana. Masyarakat belum merasakan menilai positif keberadaan BRR, bahkan yang terakhir citra BRR semakin terpuruk dengan pemberitaan dalam media massa. - Mekanisme komunikasi BRR belum efektif untuk menghindari opini yang tidak berdasarkan fakta. Hindari publikasi yang bernuansa "make believe" tanpa didukung kinerja di lapangan, karena hal ini tidak sesuai diterapkan dalam kultur di Aceh khususnya. Khusus di Nias perlu menyerap masukan dari masyarakat Nias.	- Perlu menguji efektifness pendekatan komunikasi yang telah dilakukan, mencari pendekatan yang sesuai dengan masyarakat setempat, hindari generalisasi. - Perlu mekanisme umpan balik (feedback) strategi komunikasi BRR untuk menilai opini masyarakat. Masyarakat perlu tahu apa yang menjadi kewenangan BRR dan apa yang bukan kewenangan BRR.
9.	Energi dan Listrik	- Kebutuhan energi di NAD dan Nias belum sesuai dengan yang diharapkan. Satker energi punya 26 proyek dengan nilai 40M, s/d Agustus 2006 masih sebagian kecil dilaksanakan. Komunikasi satker dengan bidang energi BRR kurang baik, sehingga satker ragu-ragu dalam - Demikian juga halnya dengan Satker listrik punya 49 proyek (119 M) baru sebagian kecil dilaksanakan, masih menunggu revisi anggaran.	- Satker perlu keberanian dalam pelelangan dan penentuan pemenang pelelangan. - Perlu kerjasama yang efektif antara bidang energi BRR dengan Satker dan memacu akselerasi kerja

Sumber : Laporan Dewan Pengawas BRR 2005-2006

4.1.3 Badan Pelaksana BRR

Dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawab untuk melakukan percepatan dalam rangka pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana NAD dan Nias, BRR telah melakukan beragam program dan kegiatan yang terkait dengan sektor-sektor kehidupan dan wilayah bencana berikut, pada berbagai sektor sejak 2005 hingga 2006, baik disajikan dalam bentuk naratif maupun dalam format tabel.

Di dalam penyajian bab ini akan dikelompokkan berdasarkan bidang pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat NAD dan Nias.

1. Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Secara umum, menurut data terakhir (Laporan Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Realisasi Fisik dan Keuangan APBN TA 2006 BRR NAD-Nias, 28 November 2006) pencapaain fisik bidang infrastruktur, lingkungan dan pemeliharaan adalah 36,95% dan realisasi keuangan sebesar 28,90%. Ada deviasi sebesar 44,55% dari rencana 81,50%. Pada bidang perumahan dan permukiman realisasi fisik sebesar 23,13% dan realisasi keuangan sebesar 25,65%. Deviasi yang terjadi adalah 59,31% dari rencana 82,94%.

Tabel IV.3
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel BRR

No	Bidang	Kemajuan
1.	Transportasi darat	· Rehabilitasi 15 km (panjang efektif) jalan provinsi · Rekonstruksi 20 jembatan di Nias · Rehabilitasi dan rekonstruksi: 23 paket (23 Kab/Kota) · Rekonstruksi 41km (14 ruas) jalan Kab. Nias (±50%) dan 4 ruas jalan Kab. Nias Selatan (±20%)
2.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan	· Rehabilitasi dan rekonstruksi jalan di 14 Kab/Kota Provinsi NAD · Rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)
3.	Transportasi Laut dan ASDP	· Rekonstruksi 9 Dermaga dan Faspel · Pelabuhan Meulaboh yang ditangani Direktorat Perhubungan & Telekomunikasi diresmikan 3 April 2006 sudah dapat beroperasi tapi belum selesai 100%. · Pembangunan 9 pelabuhan penyeberangan di provinsi NAD · Pelabuhan Malahayati : Berdasarkan kunjungan lapangan tanggal 5 desember, pelabuhan malahayati sudah beroperasi dengan beberapa fasilitas yang diamanatkan oleh rencana induk seperti. Rehabilitasi: - Kantor - Jalan lingkungan pelabuhan - Peralatan B/M forklift dan mobile crane - Dolphin - Gudang Rekonstruksi: - Dermaga finger - Pembangunan. Trestle - Gedung kantor

No	Bidang	Kemajuan
		- Pembangunan fasilitas parkir Ada beberapa fasilitas yang tercantum dalam Rencana Induk belum direalisasikan seperti container yard dan rumah dinas
4.	Transportasi Udara	· Pembangunan bandar udara pada 4 kabupaten (Sabang, Aceh Barat, Takengon, Sinabang) belum ada yang selesai pada 2005 karena hambatan proses pelelangan dan pengadaan material. (Laporan 1 th BRR) · pelelangan yang kedua, karena pada tahap 1 tim Satuan Anti-Korupsi (SAK) BRR menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang pada proses pelelangannya. (Laporan 1 th BRR) · Nias : Realisasi fisik pada TA. 2005 mencapai 31.5% dari nilai kontrak (Laporan Satker Nias) · Paket kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR tidak identik dengan Paket kegiatan dalam Rencana Induk. Persandingan kegiatan dapat dilihat pada lampiran. · Nias : Rehabilitasi Terminal & Runway Bandara Binaka
5.	SAR DAN BMG	a. *SAR* · Pencarian dan Penyelamatan NAD dengan persentase realisasi DIPA 2005&L : 24,02%, · Pengadaan lahan untuk kantor SAR 5147m2 · Pembangunan gedung SAR · Pengadaan 10 unit kendaraan roda 2 trail · Pengadaan rescue truck / emergency rescue · Pengadaan peralatan SAR NAD · Pengadaan kapal SAR 28 M dan 36 M · Pengadaan 5 set Power Engine Rescue · Pengadaan 30 set rescue culter set · Pengadaan 3 unit sea rider · Pengadaan 5 unit ambulance · Pengadaan 6 unit Rapid Deployment Land SAR · Pengadaan 1 set Self Supporting Toweer dan peralatan lengkap b. *BMG* · Fasilitas Pos, Telekomunikasi, Meteorologi dan Geofisika dengan persentase realisasi DIPA 2005&L : 52,22%,
6.	Energi & Ketenagalistrikan	· Pembangunan kantor pos pada rencana tahun anggaran 2005 belum ada yang selesai 100 persen karena mengalami hambatan pada pengadaan material dan curah hujan yang tinggi · Pembangunan kantor pos sebanyak 8 unit di NAD akan diselesaikan (PHO = *provisional hand-over*) pada akhir Mei 2006 · Telkom telah memasang kembali fasilitas CDMA dan *IDR Satellite systems*, yang secara parsial telah memperbaiki kebutuhan dasar fasilitas telekomunikasi
7.	Perumahan	· Jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda menurun sejak Juni 2005, dari 4.032 KK tersisa 298 KK · 298 KK tsb adalah yang tidak memiliki lahan dan sedang dalam proses pemindahan ke temporary shelter · Rumah terbangun 2.137 unit · BRR : 1.403 unit · 14 NGO : 914 unit · Rehabilitasi rumah oleh BRR : 1.359 unit · 149 rumah tangga menerima dana penggantian rumah dari BRR · Perbaikan HUTM&HUTR 29Km & fasilitas 2.000SR, penggantian AAAC 150 mm2 7kms Binaka-Baruzo; genset 1Mw di Teluk Dalam; HUTM&HUTR 17Km; fasilitas 1.425 SR di Nias Selatan *(Kegiatan terbaru BRR dijabarkan setelah tabel ini)*

No	Bidang	Kemajuan
8.	Pembangunan Infrastruktur Perumahan di Prov NAD	· Pengadaan pipa dan aksesori peningkatan sistem penyediaan air minum dan limbah di hunian sementara dan rumah baru untuk pengungsi · Peningkatan sistem penyediaan air minum dan limbah di hunian sementara pengungsi dan rumah baru untuk pengungsi. · Pengadaan mobil tangki · Pengadaan SR dan *water meter* lengkap · Pengadaan hidran umum · Pengadaan peralatan laboratorium · Pembangunan *reservoir* · Pengadaan peralatan laboratorium · Pembangunan *reservoir* · Pemasangan IPA dan Intake · Pembangunan rumah pompa, rumah genset dan rumah jaga · Pengadaan dan pemasangan pompa motor *control center* , motor listrik, terminal *connector* , pergantian aksesori, *wiring* diagram kabel, dan interkoneksi pipa (outlet pompa) · Nias : Pembangunan sistem jaringan perpipaan air minum&HU, MCK (Lahewa, Sirombu, Tuhemberua, Hiliduho, Gunungsitoli Olora, Sirombu
9.	Tata Ruang dan Pertanahan	a. Tata Ruang · Penyediaan peta dasar tata ruang · Penyusunan revisi RTRW Provinsi · Penyusunan RTRW 13 kab/kota · Penyusunan RDTR 11 kota/kawasan · Penyusunan RUTRK 5 kota/kawasan · Penyusunan Rencana Tindak Kecamatan Prioritas 86 kecamatan · Penyusunan RDTRK 47 kecamatan · Penyusunan RTBL 4 kawasan (BRR + 1 oleh USAID) · Penyusunan Pendoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang NAD – Nias · Penyusunan pedoman perencanaan · Pencapaian 110 DED dari kebutuhan 962, 404 Village Planning dari 962 dan 589 Village Mapping dari 962 per November 2006 · Kebutuhan 14 RTRW (1 Provinsi dan 13 Kab/Kota), 5 RUTRK, 18 RTDR dan 5 RTRK/RTBL dengan total 42 rencana tata ruang telah diselesaikan 11 rencana tata ruang dan 31 sisanya dalam proses pengerjaan. · Laporan Realisasi Anggaran BRR NAD-Nias sampai dengan 30 Juni 2006 : Untuk Satker BRR-Pembinaan Teknis Perumahan Infrastruktur dan Penatagunaan Lahan NAD-Nias, persentase Realisasi DIPA 2005 & L: 57,44%. Tidak ada data detail kegiatan dan pencapaian fisik/non fisik · Laporan Dewan Pengawas dalam Rapat Tripartite BRR : “Tata Ruang Kota/Kabupaten sampai ke village planning tidak mengalami kemajuan, padahal tata ruang merupakan referensi utama dan vital bagi pembangunan.” b. Pertanahan · *Rekonstruksi hak/ pensertifikatan hak atas tanah* · Pengukuran 48.910 bidang · Penerbitan Sertifikat · Telah diserahkan pada masyarakat 1.282 bidang · Renovasi dan pembangunan kantor · Pengadaan tanah kantor-kantor yang terkena tsunami · Pengadaan peralatan teknis pertanahan lainnya · Mobilisasi SDM dari seluruh provinsi di Indonesia ke Prov. NAD sebanyak 200 orang pada th 2005

No	Bidang	Kemajuan
		· Penanganan dokumen pertanahan sebanyak 632 box (±18 ton) yang berhasil diselamatkan disimpan di coldstorage, 188 box (30%) dikeringkan dengan dry chamber di Arsip Nasional RI. Proses pengeringan dan restorasi seluruh dokumen (632 box). Perkiraan selesai : November 2007 · Laporan Realisasi Anggaran Bapel-BRR NAD-Nias sampai dengan 30 Juni 2006 : untuk Satker Bapel BRR-Pengelolaan Pertanahan NAD-Nias, persentase Realisasi DIPA 2005 & L: 88,53%. Tidak ada data detail kegiatan dan pencapaian fisik/non fisik · Perkembangan Rehabilitasi & Rekonstruksi Aceh Nias, Paparan Kepala Bapel BRR NAD Nias, 6 Juli 2006 :Luas tanah yang sudah dibebaskan untuk perumahan :706,5956 Ha, APBN-P : 394,9661 Ha, APBD : 311,6295 Ha. · Evaluasi RALAS 2005: Pengumpulan data fisik dan yuridis : 52.094 bdg Terbit sertifikat : 11.758 bdg Sertifikat yang diserahkan : 1.801 bdg Sertifikat yang belum terbit : 40.153 bdg Berkas tidak lengkap : 21.603 bdg Pemilik tidak dikenal : 2.331 bdg HT : 1.201 bdg Belum sidang : 215 bdg Sanggahan : 1.796 bdg Verifikasi lanjut (?) : 6.565 bdg Dll : 6.442 bdg
10.	Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	· Sampai dengan Juli 2006 tidak didapat banyak data tentang kegiatan LH & SDA. · Dinas Kelautan dan Perikanan NAD memiliki rencana kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di dua kab/kota yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Besar dengan sumber dana berasal dari APBN, namun tidak diketahui perkembangan kegiatannya. · Kegiatan pembersihan sampah sisa bencana sampai akhir Mei 2006 didapat data dari Laporan MDF. Puing dan sampah Tsunami sudah dibersihkan sebanyak 371.536 m3 sampai dengan Mei 2006 di total 3 daerah: Kota Banda Aceh, Aceh Barat dan Nagan Raya serta Pidie. · Pemetaan dan identifikasi daerah tercemar juga sudah mulai dilakukan oleh BRR. Kegiatan ini mewakili butir kegiatan mengelompokkan tanah dalam sistem klasifikasi tanah tertentu dan menggambarkan penyebaran pencemaran dalam suatu peta tanah yang tercantum dalam Rencana Induk. · Daftar kegiatan dan *stakeholders* 1. Routine survey for pollluted parameter (KLH, Walhi, Bapedalda/BRR) 2. Statue adjusment for environment safety of a region (Bapedalda) 3. Environment quality and earth quarke dangerous threatens socialization (GTZ) 4. Tsunami solid waste disposal (UNDP/BRR) 5. City solid waste system reconstruction (GTZ, UNEP-Osaka, BRR) 6. Urban drainage system reconstruction (SAB-SAS, OXFAM) 7. To build liquid waste treatment system (ESP-USAid, CARE, IRD, World Vision Ind) 8. Soil quality research (FAO) 9. Experiment for adequately plants with soil condition (GTZ) 10. Reinventarization of coral reef (KLH, UNESCO) 11. Replantation of coral reef (Wetland 12. Mangrove rehabilitation (KLH, OXFAM, YLI, Pugar, Dishut/BRR, Wetland, Islamic Relief, FFI) 13. Rehabilition of coastal area primary vegetation (KOICA)

No	Bidang	Kemajuan
		14. Rehabilitation of fish pond area (Redcross) 15. City forest development (ADB) 16. National Leuser Park conservation from R3WANS development (YLI, FYI, FFI) 17. Conservation of the other protection area function either in Aceh or in the other Aceh province surrounding (BTN, BKSDA, YLI, Dinas Kehutanan, BRR) 18. Land management by forest and land rehabilitation (BPDAS, Dishut/BRR, Wetland) 19. To protect and develop the water sources (Dinas SDA/BRR) 20. Vegetation management for land and water system protection (USAid) 21. Awareness reconstruction and human resources capabilty (USAid) 22. Rehabilitation/watershed, tersier and quatier irrigation (according to scheme and type) – Dinas SDA/BRR 23. Road and farming/production rehabilitation (Dinas Praswil/BRR) 24. Nursery unit development (ADB) 25. Marketing facility of agriculture production development (JICS, CHF, IOM, ADB, World Relief, PCI) 26. Vetterinary medical post development (Dinas Peternakan, ADB, Dinas Pertanian) 27. Research and applied technology development (BPTP/BRR) 28. Agriculture tool grant for food plants production, holticulture, plantation and animal husbandry (ACF, OXFAM, Save the Children) 29. Integrated agriculture development, provision of working modal for agriculture activity (ADB) 30. Grant for process and agriculture production marketing, production tools as well as improvement of public economy activity, mainly in the conservation region buffer area (tourism park, nature preserve and wildlife reserve) – ADB, ACF, Save the Children 31. Activity recovery of catching fishery (Dinas SDKP) 32. Society fishpond land and others cultivation fishery rehabilitation as well as economic activity fasility for coastal society (Wetland, Atlas-Logistic, Planete Urgence Ind) 33. Wood provision and others construction building materials (FAO, WWF) 34. Development of alternative building material from coconut tree (UNEP, CI) 35. Forest enterpreuner construction and control (Dishut, FFI, UNDP) 36. Construction and control of producted forest in NAD dan Sumut (YLI, Walhi) 37. To write Standard Operation Prosedure (SOP) for disaster emergency response – UNORC, NIPPON-KUI, DHV, BPPT-DESM 38. To improve human resources capacity building and governance institution (UNEP, Osaka, GTZ-SLSGR) 39. To build infrastructure and tool for early warning system (BPPT-DESM) 40. Use of local wise value as a part of early warning system equipment (UNDP, GTZ) 41. Community Based Disaster Risk Management (SEA Defence, UNORC) 42. To develop disaster education (SEA Defence) 43. Using social and culture institution in the planning and implementation (CIDA, GTZ) 44. To build monitoring mechanism based on social, culture and local community aspiration (Bappenas, ADB) 45. To review responsiv institution on the development vision in the future (BRR/Bapedalda) 46. To recruit new official and improve its capacity in the field of natural resources and environment (Related Dinas)

No	Bidang	Kemajuan
		47. To develop and rehabilitate office and tools of its operation activity in the field of region natural resources and environment (BRR/Bapedalda) Pedoman BRR: a. Green Reconstruction for Aceh - Environment Screening for 2005 BRR Project - Procedures for AMDAL Implementation b. Pocket Books on Environment Management (Environment, Mitigation, Screening, Environment Spesification, etc.) c. Village Planning Guidelines d. Sectoral Screening Guidelines

Dari pemaparan kemajuan program dan kegiatan bidang pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup di atas, secara umum arah pembangunan lebih dominan pada pembangunan fisik yang merupakan dukungan terhadap pelayanan publik. Beberapa kemajuan pembangunan fisik tersebut yaitu jembatan, jalan, pelabuhanm, bandara, energi dan kelistrikan, pembangunan dan permukiman. Secara umum, sektor infrastruktur ini merupakan sektor yang paling besar menderita kerugian secara fisik. Untuk itu, upaya awal dalam rangka pemulihan ini melalui rehabilitasi dan rekonstruksi secara fisik terlebih dahulu.

Sesuai dengan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2005 dan 2006, ditetapkan bahwa aspek infrastruktur menjadi hal yang sangat utama dan penting dalam rangka membangun kemabli wilayah dan kehidupan masyarakat di wilayah bencana.

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya perumahan mendapatkan dukungan dan sejumlah permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya *regional offices* dan *join secretariate* (JS) sebagai salah satu upaya dalam menggalang koordinasi dengan berbagai stakeholders. Pimpinan JS ini dimungkinkan dipegang oleh kepala regional BRR atau kepala daerah setempat. Kegiatan dalam JS adalah screening proposal, yang berasal dari berbagai stakeholders, berdasarkan evaluasi prioritas, aspek teknis dan lingkungan sehingga muncul ‘kegiatan terpilih’
2. Dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan BRR juga telah berupaya untuk mengacu kepada Norma, Standar, Prosedur, Manual (NSPM) yang disusun K/L terkait.
3. Pembangunan infrastruktur terutama terkendala oleh pembebasan tanah yang berlarut larut. Walaupun BRR dapat membiayai pembebasan tanah, masyarakat cenderung mematok harga tanah yang sangat tinggi begitu mereka tahu bahwa BRR akan melakukan pembebasan tanah.
4. Tiap kabupaten juga disediakan akses data yang lebih baik agar dapat terjalin proses konsultasi seperti yang diharapkan.
5. Upaya penguatan kapasitas Pemda saat ini dan ke depan terutama diarahkan untuk operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun agar dapat berfungsi optimal sesuai dengan periode perencanaannya.

Sampai dengan November 2006 telah dicapai

1021 desa rusak akibat tsunami, memerlukan perbaikan prasarana-sarana dasar permukiman: - 625 desa rusak berat, - 252 desa rusak sedang, - 144 desa rusak ringan	332 Village Plan telah selesai disusun dan 72 VP dalam proses penyelesaian 120 DED Infrastruktur kawasan di tingkat desa selesai, 200 sedang dalam penyelesaian 212 desa sedang dalam proses pembangunan PSD
120.000 rumah hancur	57.194 rumah terbangun
85.000 rumah rusak	25.000 rumah direhabilitasi
15.000 KK harus direlokasi	2000 KK telah direlokasi, dan sekitar 6000 dalam persiapan
8.000 KK penyewa harus dicarikan solusi untuk bertempat tinggal.	11.000 KK yang tinggal di 246 barak sebagian besar adalah penyewa, telah dimasukkan kedalam program decommissioning barak

Di bawah ini gambaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan, berikut;

Gambar IV.1
Pembangunan Perumahan di daerah Kepulauan Nias



Gambar IV.2
Pembangunan Dermaga di Nias Selatan



2. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias dalam bidang pemulihan sosial budaya pada tahun 2005/2006 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.4
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIas oleh Bapel Dalam Bidang Pemulihan Sosial Budaya

No	Bidang	Kemajuan
1.	Pendidikan	* 690 unit sekolah telah dibangun dari PAUD – Perguruan tinggi yang terdiri dari : - PAUD – SMP sebanyak 117 unit - Madrasah sebanyak 359 unit - Sekolah menengah sebanyak 208 unit - Perguruan tinggi sebanyak 3 unit - Informal sebanyak 3 unit * Pelatihan guru sebanyak 1.100 orang * 1.7 juta unit buah buku teks telah didistribusikan * Pelatihan guru sebanyak 3530 orang * Pemberian bantuan buku sebanyak 141.431 unit * Pemberian beasiswa kepada 10.704 siswa * Pemberian beasiswa kepada 9.417 mahasiswa pada 20 perguruan tinggi * Pelatihan guru sementara kepada 1.277 orang tenaga pendidik * Memberikan kelas tambahan dalam rangka persiapan Ujian akahir Nasioanl kepada 491 SMA untuk 53.711 orang siswa * Pelatihan trauma conselling kepada guru, yang untuk selanjutnya dapat memberikan bantuan konselling kepada siswa-siswinya yang mengalami gangguan psikis akibat bencana * Manajerial kepala sekolah ditingkatkan melalui 44 kepala sekolah ke SMA terbaik di Indonesia * Pengembangan manajemen berbasis sekolah setelah mereka kembali ke asal masing-masing * Pelatihan komputer dan bahasa Inggris bagi guru dan pegawai dinas pendidikan * Pembangunan 70 unit rumah dosen di UNSYIAH * Pembangunan 2 unit asrama mahasiswa UNSYIAH * Pembangunan laboratorium, perpustakaan serta rehabilitasi beberapa gedung kuliah di beberapa Fakultas UNSYIAH * Baesiswa master dan doktor di luar negeri kepada 7 orang dosen UNSYIAH * Baesiswa master dan doktor di luar negeri kepada 7 orang dosen UNSYIAH * Rehabilitasi sarana dan prasarana perkuliahan di IAIN Ar-Raniry
2.	Kesehatan	* Pembanguna kantor dinas kesehatan 3 unit (Provinsi NAD, Banda Aceh, dan Aceh Tengah) * Pembangunan 6 gudang farmasi (Kab Langsa, Aceh Pidie, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat daya, dan Bener Meriah) * Pembangunan Puskesmas sebanyak 128 unit * Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) 228 unit * Pembangunan polindes sebanyak 391 unit * Pembangunan BBPOM 1 unit * Pembangunan kantor kesehatan 3 unit * Pembangunan institusi pendidikan 1 unit

No	Bidang	Kemajuan
		* Pada tanggap darurat, pelayanan kesehatan telah mampu menciptakan stabilitas kondisi kesehatan masyarakat yang berpengaruh kepada banyak hal di Aceh dan Nias * Kegiatan penanggulangan wabah/epidemi pasca bencana di Aceh dan Nias * Mensetabilkan kondisi kesehatan masyarakat secara luas dan kontiniu di Aceh dan Nias * Pembangunan pos kesehatan satelit (Poskelit) sebanyak 48 unit
3.	Agama	* Melaksanakan kegiatan rehabilitasi mental spritual pengungsi langsung ke barak-barak pengungsi * Pelibatan ulama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan Musyawarah Ulama se-Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 14 – 16 Maret 2006 yang diikuti oleh 350 ulama dari berbagai organisais keislaman, seperti Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU), Himpunan Ulama Dayah (Huda), dan intelektual Islam kampus. * 43 kali pelaksanaan ceramah agama di barak-barak di NAD * Pemberian bantuan untuk pembangunan kembali fasilitas ibadah sebesar Rp 40 juta untuk masjid dan meunasah
4.	Sosial Budaya	*Sub Bidang Sosial* - Di Aceh, 300.000 orang telah dapat kembali kerumah mereka - Sekitar 75.000 orang mengungsi ke rumah saudara dan tetangga - 622 KK atau sebesar Rp 8.7 juta bantuan Usaha Ekonomi kepada masyarakat yang rentan - Penampungan anak yatim piatu - Pengadaan peralatan sekolah - Penyaluran bantuan sosial kepada 200 orang kepada lanjut usia (lansia) - Melaksanakan penelitian identifikasi kearifan lokal dalam membangun masyarakat kreatif, inovatif dan produktif - Bantuan makanan anak di 16 panti asuhan - Bantuan perlengkapan untuk 2 panti asuhan 50 unit rehabilitasi - Pelatihan pendidikan damai dan penelitian tentang kearifan masyarakat Aceh dan resolusi konflik *Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan* - Penguatan kelembagaan Pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) untuk pengurus di 21 Kab/kota - Pelatihan peningkatan kapasitas bagi penerima bantuan sekaligus memperkuat LSM lokal pendamping dalam melakukan upaya-upaya pendampingan. Kegiatan dilaksankan oleh BRR bersama LSM internasional yaitu Oxfam dan Unifam. - Pemenuhan kebutuhan dasar seperti sarana perlengkapan kesehatan *(hygiene kit)* , susu balita, dan alat rumah tangga - Pembentukan gugus anti trafiking - Penyaluran bantuan ekonomi untuk perempuan berupa modal langsung maupun alat produksi berupa mesin jahit bagi 810 perempuan dan 60 unit mesin jahit - Pemelitian tentang perempuan dan anak - Trauma center dan WCC - Pembinaan ulama perempuan - Bantuan hukum - Pembuatan akte kelahiran gratis

No	Bidang	Kemajuan
		Sub Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana - Sosialisasi dan orientasi peran pembinaan kemandirian IMP - Pelatihan pelaksanaan peralatan KB - Peningkatan kapasitas tenaga pendamping/PLKB - Updating data keluarga - Workshop bagi pengelola KB mulai kecamatan sampai provinsi - Pengawasan operasional terpadu, monitoring dan pemutakhiran dana dan penelaahan sistem pengawasan - Monitoring dan evaluasi progam *Sub Bidang Pemuda dan Olahraga* - Rehabilitasi kolam renang - Rehabilitasi stadion Harapan Bangsa - Pembangunan lapangan tenis - Pembangunan lapangan bola volly - Pembangunan lapangan bola kaki - Pembangunan lapangan basket - Pembibitan atlet SMU Plus, PPLP dan Usia Dini - Bantuan sport kids - Bantuan peralatan olahraga *Sub Bidang Budaya* - Pembangunan kantor MAA - Pembangunan pagar kantor BKSNT - Pembangunan kantor PDIA - Rehabilitasi taman dan lingkungan BKSNT - Rehabilitasi gedung utama BKSNT - Rehabilitasi Site Museum BP3 - Penataan lingkungan dan rehabilitasi benteng Indrapura - Penataan lingkungan komplek Makam Peuteu Meurohom Daya - Rehabilitasi rumah Tjut Nyak Dhien - Renovasi Cungkop Makam Tgk.Dianjong - Rehabilitasi makam Malikul Saleh - Rehabilitasi makam Ratu Nahrisyiah - Rehabilitasi makam Tgk.Sidi Abdullah - Penataan lingkungan rumah Cut Nyak Dhien - Penataan situs makam Syiah Kuala - 24 set bantuan peralatan kesenian - Pelaksanaan kongres kebudayaan Aceh pada tanggal 8-10 April 2006 yang diikiti oleh 321 peserta yang terdiri dari unsur LSM, birokrasi,akademisi,politisi, serta seniman dan budayawan Aceh.

Sumber : Aceh dan Nias Setahun Setelah Tsunami, Upaya Pemulihan dan Langkah Kedepan : Laporan bersama BRR dan rekan-rekanan internasional, Desember 2005 hal 16 dan Membangun Tanah Harapan: Laporan Kegiatan Satu Tahun Badan Pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalamdan Nias per April 2006 hsl 97 – 103, 166 – 170 dan hasil FGD Pokja Sosial Budaya tanggal 27 November 2006 di Banda Aceh.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pemulihan aspek keagamaan, sosial budaya dan ketahanan masyarakat yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan kelembagaan agama serta adat masih dominan pemulihan pada aspek fisik dan penempatan sumber daya manusia yang baru akibat menjadi korban bencana gempa dan tsunami. Sektor ini termasuk yang terbesar dalam menderita kerusakan dan kerugian. Maka itu, dalam tahap pemulihan ditempuh

melalui kebijakan pembangunan secara fisik. Disamping itu, pelaksanaan dalam bidang sosial pada sub bidang kependudukan dan keluarga berencana, BRR tidak lagi melaksanakan programnya karena program pendataan penduduk sudah dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias dalam bidang pemulihan sosial budaya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar IV.3
Pembangunan gedung sekolah SMU Lhoknga oleh Mercy Malaysia



sumber : Kunjungan lapangan 3 september 2006

Gambar IV.4
Rehabilitasi Puskesmas di Lhoknga



sumber : Kunjungan lapangan 3 september 2006

Gambar IV.5
Pembangunan MAN I Meulaboh oleh CARDI-NRC



sumber : Kunjungan lapangan 24 November 2006

3. Bidang Pemulihan Perekonomian

Pemulihan bidang ekonomi berupaya membangun kembali ekonomi dengan (1) penciptaan lapangan kerja; (2) pemberian bantuan keuangan dan kredit untuk pengembangan usaha kecil dan menengah; (3) membangun kembali sektor produktif (perikanan, pertanian, industri, perdagangan, dan jasa) disertai sarana ekonomi (contohnya pasar, tempat pelelangan ikan, dan gudang).

Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang ekonomi dan tenaga kerja di NAD ada beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu (1) pendistribusian perahu; (2) renovasi tempat pelelangan ikan; (3) rehabilitasi tambak udang, sawah; (4) pinjaman micro-finance telah disalurkan; dan (5) pembangunan kembali pasar/ toko/kios.

Berdasarkan Laporan Kegiatan Pelaksanaan dari BRR diketahui beberapa kemajuan di bidang perekonomian di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Rincian kemajuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.5
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Oleh BRR
Dalam Bidang Pemulihan Perekonomian

No	Bidang	**Kemajuan**
1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	* Telah didistribusikan 4.397 perahu di NAD * Renovasi 129 tempat pelelangan ikan di NAD * Rehabilitasi 19.299 hektar tambak udang di NAD * 300 unit perahu, 600 unit peralatan tangkap & 8 paket peralatan, bantuan modal usaha pengolahan ikan 100 kepala keluarga * FAO dan Howu-howu membagikan perahu dan peralatan tangkap * Pembangunan PPI, bantuan peralatan alat tangkap 10 unit & kapal nelayan 18 unit, pelatihan pengolahan ikan

No	Bidang	Kemajuan
		* Intensifikasi padi untuk 500 Ha sawah, intensifikasi karet 250 Ha dan ekstensifikasi 74 Ha, jagung 250 Ha da cabe 60 Ha * 300 unit perahu nelayan dibatalkan dan digantikan dengan pengadaan peralatan pendukung nelayan * Pelabuhan Perikanan (ada tambahan lahan berupa pembebasan tanah seluas 52 Ha . Sumber dana BRR dari APBN), Pembangunan Gedung Pengepakan oleh ADB dan Pembangunan Perumahan Nelayan oleh GTZ di Banda Aceh * Perbaikan Budidaya di seluruh Aceh total seluas 1510 Ha. 1 Ha dapat bantuan sebesar Rp.20 juta, untuk Agroinput (bibit, pupuk, operasional) sebesar Rp. 12 juta * Pagar keliling pelabuhan sepanjang 300 M, Jalan kawasan pelabuhan (lanjutan) sepanjang 447 M dan Galangan kapal di Lampulo sebanyak 2 Unit * Administrasi, Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan/PPK ADB, Pengadaan Kendaraan Roda-2 * Pengembangan Mutu Perikanan Usaha Kecil di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simelue, Aceh Singkil, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa * Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (Sarana Penangkapan berupa alat tangkap dan armada tangkap, Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Prov. NAD, Kendaraan Roda 2) di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simelue, Aceh Singkil, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa * Pengembangan Sarana Perikanan Budidaya (Rehab Tambak dan Agro input) di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Lhokseumawe dan Aceh Selatan. * Pengembangan Prasarana Perikanan (Pembangunan/rehabilitasi PPI, DED PPI, pembebasan lahan) di Banda Aceh, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Singkil, Sabang, Lhokseumawe * Penyusunan Rencana Teknis (belanja jasa konsultan/tenaga ahli).
2.	Sub Bidang Pertanian	* Rehabilitasi 30.926 hektar sawah di NAD * Pembangunan Sistem Jaringan Irigasi Teknis (17 DI 3.138 Ha di Nias dan 10 DI 2.015 Ha di Nias Selatan * 60 unit mesin penggilingan padi, peralatan pertanian kecil 960 unit, 8 hand tractor, pompa air 4 unit * Pembangunan Sistem Jaringan Irigasi 7 Daerah Irigasi * Bantuan 50 unit mesin penggilingan padi, 20 hand tractor, sarana produksi palawija/hortikultura 100 unit, penyuluhan/pelatihan & pemberdayaan 22 kelompok tani * Penyuluhan & Intensifikasi tanaman karet 450 Ha, kakao 400 Ha * Pemberdayaan peternak ayam, babi dan pembangunan rumah potong hewan di Nias *Produksi Tanaman Pangan* Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk tanaman Pangan dengan pagu DIPA di NAD * Pelatihan Penyuluh Pendamping (37 orang x 3 Ha) dan Petugas Hama Penyakit juga Magang Petugas BBI Padi dan hortikultura ke sumber tehnologi * Pemulihan sawah dampak tsunami : 5000 Ha * Pengadaan Peralatan Laboratorium Lapangan untuk 10 Kabupaten

No	Bidang	Kemajuan
		* Pengawasan dan Pembangunan Fisik seperti Gudang RMU, Ruumah Pompa, Balai Pertemuan Petani di Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh barat, Simeulue, Bireun, Aceh barat daya, Aceh Jaya, Nagan Raya * Bantuan Modal sarana produksi dan alsintan pola BLM, material jaringan air, material jalan usaha tani dan upah kerja pola padat karya di 13 Kabupaten/Kota total seluas 5.000 Ha * Optimalisasi lahan tegalan untuk palawija dan hortikultura seluas 1.200 Ha * Bantuan modal sarana produksi dan alsintan pola BLM, material jaringan air, material pagar keliling, material jalan usaha tani dan upah kerja pola padat karya di 13 Kabupaten/Kota total seluas 1.200 Ha * Penghijauan tanaman buah-buahan untuk pekarangan dampak tsunami kepada 26.000 kepala keluarga di 13 Kabupaten/Kota * Pembangunan Kantor Dinas Pertanian Simeulue seluas 350 M^2 * Pembangunan Kantor Karantina Tumbuhan seluas 400 M^2 * Rehabilitasi Gedung Lab.Hama Penyakit TPH Pulo IE Nagan Raya seluas 250^2 * Pembangunan Gedung Alsintan NAD seluas 400 M^2, pagar keliling 1.000 M^2, Saluran drainase 300 M. * Lining Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani di 10 Kabupaten * Penanggulangan Hama/Penyakit Tanaman, Pengadaan Mebeulair, Pengadaan Alat Pertanian di 10 Kabupaten * Pengadaan Perlengkapan sarana gedung berupa peralatan dan mesin, mebeulair, filing cabinet di 10 Kab/Kota * Pengadaan Alat Pengolah Data di 13 Kabupaten, Pengadaan Kendaraan, Pencetakan Sawah, Perbanyakan Bibit/Benih * Pengembangan Sarana Usaha Pertanian pada Balai Benih Induk (BBI Padi Keumala, BBI Hortikultura Saree, UPT Balai Pembenihan, BPTP (Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian) baik Pembangunan Gedung/Rehab, Kelengkapan dan Mobiler Kantor * Rehabilitasi sawah seluas 1.000 Ha * Pengadaan sarana produksi pertanian baik benih, pupuk KCl, pupuk SP 36, Pupuk Urea, Pestisida : kacang, kedelai (Pidie), jagung (Aceh Utara, Aceh Timur), cabe (Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie), bawang merah (Pidie, Aceh Barat daya) * Manajemen Teknis : Belanja Uang Honor Tidak tetap
3.	Sub Bidang Pariwisata	* Pengembangan ekowisata pantai Genasi dan Toyolawa dan Danau Megoto di Nias * Transplantasi terumbu karang di Nias * Pelatihan bagi pemandu wisata sebanyak 1 paket di Banda Aceh * Pelatihan Pemandu Wisata Selam sebanyak 1 paket di Banda Aceh * Pelatihan Aparatur wisata sebanyak 1 paket di Banda Aceh * Promosi wisata daerah: Pertunjukan dan eksibisi seni budaya dalam negeri di Jakarta, ASEAN Diving Festival di Sabang, Pembentukan Family Tourism di Sabang * Pembukaan jalur wisata alam Sabang-Puket-Langkawi, Perbaikan Site Plan, Pembukaan jalur wisata sungai di Banda Aceh * Promosi wisata berbasis advertisement: jurnalis dan travel writers di Sabang dan Aceh Besar

No	Bidang	Kemajuan
		* Pemugaran Kawasa Wisata Pulau Banyak: Pengadaan peralatan selam, pengadaan compressor selam, pondok wisata, restorasi wisata, musholla, MCK di Aceh Singkil * Pemugaran Kawasan Wisata Ujung Batee: Restorasi dan Taman Wisata, musholla, MCK, pengadaan air bersih di Aceh Besar. * Pemugaran Kawasan wisata Alami Lampuuk: Restorasi dan Taman Wisata, musholla, MCK, pengadaan air bersih di Aceh Besar * Peningkatan sarana/prasarana objek wisata Kota Sabang: Jalan setapak, pembangunan terminal wisata, survey dan identifikasi potensi wisata taman laut Sabang, Pembuatan film CD pariwisata Kota Sabang, pengadaan air bersih di kawasan wisata Iboih/Gapang, Pembuatan dermaga kayu tempat wisata mancing * Pembuatan dan Pelaksanaan Outlet Wisata Bahari di Aceh Besar
4.	Sub Bidang Koperasi & UKM	* 3.640 berkas pinjaman micro-finance telah disalurkan di NAD * Pelatihan dan Bantuan LKM pada 6 koperasi di Nias * Bantuan Langsung Masyarakat 500 KK di Nias * Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat (baik pelatihan pengurus kelembagaan masyarakat BKM dan pengelola LKM; pelatihan penyiapan kewirausahaan untuk KSM/masyarakat; Rekrutmen, Pelatihan dan Jasa Pengelola AMF di Banda Aceh dan 21 kabupaten * Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil (Bantuan sarana kerja LKM, BLM untuk Pemilihan Aset Produktif) di 11 kabupaten * Pengadaan Kendaraan Bermotor * Realisasi Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Dana LKM Tahun 2005 pada 11 Kab/Kota (Banda Aceh, Aceh besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Simeulue, Singkil). Pada rencana jumlah LKM sebesar 73 LKM dengan jumlah penerima 27.366 orang dengan anggaran sebesar Rp. 77.370.000.000,-. Sedangkan realisasi dengan 73 LKM (realisasi 100 %), jumlah penerima sebanyak 29.813 orang (realisasi 108,94 %) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 77.348.394.000,- atau 99,97 %. * Realisasi Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Dana LKM Tahun 2006 pada 21 Kab/Kota (Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Simeulue, Singkil). Pada rencana jumlah LKM sebesar 63 LKM dengan jumlah penerima 5.166 orang dengan anggaran sebesar Rp. 25.830.000.000,-. Sedangkan realisasi dengan 62 LKM (realisasi 98,41 %), jumlah penerima sebanyak 2.040 orang (realisasi 39,49 %) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.378.830.000,- atau 28,57 %. (Laporan satker BRR Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi NAD pada pelaksanaan monev dan FGD pokja pemulihan perekonomian di Banda Aceh).
5.	Sub Bidang Perdagangan	* 7 pasar dari 219 pasar/toko/kios yang rusak telah dibangun kembali di NAD * Pembangunan 8 pasar tradisional di Nias * Pembangunan 88 Kios pasar oleh BRR di Nias * Pembangunan pasar tradisional 12 unit * Sedang dilaksanakan perancangan pasar Yaahowu dan pembangunan kembali 12 pasar tradisional & penunjang, pengadaan alat & mesin untuk industri rumah tangga dan industri kecil di Nias.

No	Bidang	Kemajuan
		* Telah diberikan bantuan langsung masyarakat untuk 500 kepala keluarga sebesar Rp. 1 milyar; modal usaha untuk 480 UKM sebesar Rp. 2,4 milyar; bantuan modal LKM senilai Rp.6 milyar di Nias * Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri dan Investasi di Lhokseumawe, Banda Aceh * Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan di Banda Aceh; Bantuan Usaha Ekonomi Produktif berupa bantuan modal bergulir bagi usaha kecil/pedagang pasar di 21 Kab/Kota * Pembangunan 1 unit Pasar Grosir di Bireun * Pembangunan Pasar Tradisional di Aceh Besar, Pidie,Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Tengah,Aceh Tenggara, Simeulue, Aceh Singkil, Bireun, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe * Bantuan Ekonomi Produktif berupa bantuan modal bergulir dan investasi pedagang pasar di 21 Kab/Kota; Pengadaan kendaraan Roda 4 untuk operasional kemetrologian di 21 Kab/Kota * Peningkatan dan pengembangan kemetrologian berupa belanja barang operasional lainnya dan penyempurnaan pelayanan operasional kemetrologian di 21 Kab/Kota * Pelatihan Keterampilan Teknis penanaman modal (pelatihan kewirausahaan), Pendidikan dan training of trainer penanaman modal sebanyak 1 paket di Lhokseumawe * Training Pemanfaatan Teknologi Investasi sebanyak 1 paket di Bireuen * Pelayanan Perizinan Penanaman modal dan Pengembangan Iklim Promosi & Investasi sebanyak 1 paket di Banda Aceh
6.	Sub Bidang Perindustrian	* Pemberian bantuan oleh BRR kepada 6 industri pembuat batu bata dan tukang las di Nias * Bantuan usaha industri kecil 100 unit, bantuan modal LKM 6 unit & bantuan modal kerja/industri ke 200 rumah tangga * Pelatihan dan Kejuruan Keterampilan Konstruksi dan Industri serta *Life Skill* untuk 147 angkatan * Pemberian bantuan berupa pondok kerja, modal kerja dan peralatan kerja pada industri batu bata kepada 39 kelompok kerja untuk 8 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Simeulue dan Aceh Jaya; pada industri garam kepada 100 kelompok kerja untuk 3 daerah, yaitu Aceh Besar, Pidie, dan Bireuen; pada industri kusen kepada 27 kelompok kerja untuk 10 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Simeulue, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Aceh Singkil; pada industri bengkel las kepada 26 kelompok kerja untuk 10 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Simeulue, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Aceh Singkil; pada industri bordir kepada 60 kelompok kerja untuk 11 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, dan Simeulue; pada industri konfeksi kepada 48 kelompok kerja untuk 10 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh * Belanja Modal Gedung dan Bangunan di 13 Kab/Kota * Pembangunan Gedung Pusat Batik Aceh * Belanja Lembaga Sosial lainnya : 5 LKM di Banda Aceh, 1 LKM Sabang, 2 LKM di Aceh Besar, 2 LKM di Pidie, 3 LKM di Bireun, 2 LKM di Aceh Utara, 2 LKM di Aceh Timur, 1 LKM di Lhokseumawe, 3 LKM di Aceh Barat, 3 LKM di Nagan Raya, 2 LKM di Aceh Singkil, 3 LKM di Aceh Jaya, 2 LKM di Simeulue * Pemberian bantuan untuk penambangan batu gunung di Aceh Besar

No	Bidang	Kemajuan
		* Pemberian bantuan untuk penambangan pasir di Aceh Besar * Bantuan untuk Pilot Project Pembinaan Penambangan Skala Kecil di Aceh Selatan, Aceh Barat dan Nagan Raya * bantuan untuk penambangan emas placer * Biaya operasional tenaga tim pelaksana lapangan di 4 Kab
7.	Sub Bidang Tenaga Kerja	* Pelatihan Tenaga Kerja 11 angkatan, bantuan peralatan bengkel las 10 unit, pembuatan batu bata 24 unit, pembuatan kapal nelayan 2 unit, pembuatan tahu tempe 6 unit di Nias * Penyelenggaraan & Pelatihan Produktivitas ketenagakerjaan 5 angkatan, bantuan peralatan & modal kerja penambang rakyat 21 kelompok & pelatihan tenaga kerja, peralatan * Pemberian bantuan modal bergulir * Pembangunan 1 unit BLK di Lhokseumawe dan 1 unit di Banda Aceh * Rehabilitasi kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi NAD

Sumber: Laporan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi satker BRR provinsi NAD-Nias; Perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias, Juli 2006; Mengenal proses rehabilitasi dan rekonstruksi Nias lebih dekat (Pertemuan dengan masyarakat Nias di Medan dan Sekitarnya, 25 November 2006.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pemulihan perekonomian yang meliputi subbidang kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan masih dominan pemulihan pada aspek fisik sedangkan subbidang perindustrian, koperasi & UKM dan tenaga kerja lebih menekankan pemulihan pada aspek non fisik. Dalam tahap pemulihan ditempuh melalui kebijakan pembangunan secara fisik maupun non fisik, kemudian diikuti melalui penggantian sumber daya manusia yang baru akibat akibat menjadi korban gempa dan tsunami. Secara prioritas, untuk bidang pemulihan perekonomian ini adalah pada subbidang kelautan dan perikanan yang mengalami kerusakan paling parah pasca tsunami.

Berdasarkan hasil kunjungan Tim Koordinasi P3RIRRWANS Bidang Pemulihan Perekonomian ke Banda Aceh pada Bulan November 2006, didapat dokumentasi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan perekonomian yaitu:

1. Pemberian bantuan mesin jahit sebagai peralatan kerja untuk usaha konveksi di Banda Aceh. Di Provinsi NAD, untuk usaha konveksi diberikan bantuan kepada 48 kelompok kerja untuk 10 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, dan Simeulue. Jenis bantuan yang diberikan terdiri atas bantuan modal kerja dan bantuan peralatan kerja

Gambar IV.6
Usaha Konveksi dengan Mesin Jahit Bantuan Sosial dari Dana APBN
di Desa Lamdingin, Banda Aceh



Sumber: Laporan 1 Tahun BRR

2. Pemberian bantuan kepada industri batu bata di Simeulue. Di Provinsi NAD, untuk industri batu bata diberikan bantuan diberikan kepada 39 kelompok kerja untuk 8 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Simeulue dan Aceh Jaya. Jenis bantuan yang diberikan untuk industri batu bata terdiri atas bantuan pondok kerja, modal kerja, dan peralatan kerja.

Gambar IV.7
Industri Batu Bata di Pulau Simeuleu



Sumber: Laporan 1 Tahun BRR

3. Tempat pelelangan ikan Meuraksa yang telah difungsikan untuk melakukan aktivitas perekonomian

Gambar IV. 8
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perintis Kecamatan Meuraksa
Bantuan dari FAO kerjasama dengan Dinas Kelautan & Perikanan NAD dan BRR



Sumber: Kunjungan Lapangan, 5 November 2006

4. Pasar Ikan Penayung yang juga sudah dipergunakan untuk melakukan kegiatan perekonomian.

Gambar IV. 9
Pasar Ikan Penayung di Banda Aceh
Bantuan dari CHF kerjasama dengan Walikota Banda Aceh, Dinas Tata Kota Banda Aceh, Dinas Pasar Kota Banda Aceh dan BRR



Sumber: Kunjungan Lapangan, 6 November 2006

5. Konsentrasi pasar pasca tsunami dialihkan ke pasar Lambaro. Sekarang masih dalam tahap pembangunan 1 unit pasar induk Lambaro yang merupakan bantuan dari JICs. Dan juga sedang dilakukan penambahan lahan untuk sarana prasarana pasar Lambaro ini.

Gambar IV. 10
Pasar Grosir Lambaro, Banda Aceh
Bantuan dari JICS



Sumber: Kunjungan Lapangan, 8 November 2006

6. Gedung Tempat Pendaratan Ikan Pantai Lampulo seluas 480 M^2 yang telah selesai dibangun dan difungsikan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan perekonomiannya. Dalam hal ini pelaksanaannya sudah mengacu pada rencana induk.

Gambar IV. 11
Gedung Tempat Pendaratan Ikan Pantai Lampulo
Bantuan dari GTZ



Sumber: Kunjungan Lapangan, 8 November 2006

7. Pemberian bantuan kapal nelayan dari donor/NGO yaitu Kuwait Red Crescent Society kepada para nelayan di pantai Ulee Lheu.

Gambar IV. 12
Bantuan Kapal nelayan/armada tangkap dari Kuwait Red Crescent Society



Sumber: Kunjungan Lapangan, 5 November 2006

4. Bidang Kelembagaan

Berdasarkan Laporan Kegiatan 1 Tahun Bapel BRR (April 2006) diketahui beberapa kemajuan di bidang kelembagaan dan hukum di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Rincian kemajuan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.6
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh BRR
Bidang Pemulihan Kelembagaan

No	Bidang	**Kemajuan**
1.	Pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintahan	* Perencanaan dan desain kantor desa/kelurahan (991 unit), balai musyawarah (489 unit), dan camat (65 unit) * Perencanaan dan desain gedung kantor yang lebih besar di tingkat kota/kabupaten dan provinsi (166 unit) * Pembangunan Kantor Desa 217 unit di 10 Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan 1 unit di Kepulauan Nias * Pembangunan Kantor Camat 18 unit di 6 Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan 3 unit di Kepulauan Nias * Pembangunan Kantor Bupati 2 unit di Kepulauan Nias * Pembangunan Kantor Dinas 3 unit untuk Provinsi NAD, 4 unit di 3 Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan 7 unit di Kepulauan Nias * Pembangunan Meuligo 2 unit di Kota Banda Aceh Provinsi NAD * Pembangunan Kantor Mukim/Bale 73 unit di 12 Kabupaten/Kota Provinsi NAD * Pembangunan Rumah Dinas 17 unit untuk Provinsi NAD, 239 unit di 12 Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan 45 unit di Kepulauan Nias, namun tidak dirinci menurut instansi terkait (Rumah Dinas TNI/Polri/PNS/Hakim)

No	Bidang	Kemajuan
2.	Penyediaan SDM aparatur:	* Rekrutmen PNS. Berdasarkan data BKN rekrutmen di Provinsi NAD mencapai 9.191 orang dari total kebutuhan di Provinsi NAD sebanyak 17.307 orang * Percepatan pemrosesan kepegawaian (pengurusan administrasi, pemberian NIP, dan lain sebagainya). Tidak semua calon PNS yang diterima dapat diproses karena persyaratan administrasi yang diperlukan tidak dapat dilengkapi * Pelatihan Prajabatan calon PNS 1434 orang, serta mempercepat proses PNS yang belum mengikuti prajabatan. * Program pengiriman PNS untuk gelar S2 sebanyak 52 orang * Diklat Penjenjangan Karir untuk 130 orang
3.	Peningkatan kapasitas aparatur melalui:	* Pelatihan administrasi kepemerintahan kepada camat, mukim, dan keuchik di kabupaten/kota, secara bertahap mencakup 6 kabaputen/kota. * Pelatihan fasilitasi forum komunikasi kecamatan di kabupaten/kota. * Pendidikan/pelatihan Aparatur Pemda sebanyak 1.222 orang * Pelatihan ESQ untuk 2.500 orang. ESQ diperuntukkan bagi aparatur di Provinsi NAD yaitu di Banda Aceh dan Lhokseumawe, Aceh Utara *trauma healing* yang diadakan di Nias telah membantu aparatur dan masyarakat sebanyak 680 orang * Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa 800 orang * Penerbitan Buku/Arsip/Modul Panduan sebanyak 81 Dokumen
4.	Penataan batas-batas administrasi wilayah yang telah berubah akibat bencana	* Penentuan pilar batas daerah 303 unit
5.	Penataan administrasi kependudukan	* Dukungan pengadaan KTP sebanyak 1.360.000 B
6.	Pelatihan hakim dan aparat pengadilan untuk 380 orang, termasuk pelatihan Hakim Syari'ah sebanyak 40 orang	* Pelatihan Manajemen Peradilan Bagi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Se-Provinsi NAD; * Pelatihan Penyusunan Renstra dan LAKIP bagi pejabat Kesekretariatan Mahkamah Syariah se-Provinsi NAD; * Workshop Sengketa Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Pembentukan *Good Governance;* * Sosialisasi Draf Perpu tentang Penanganan Permasalahan Hukum Pasca-Tsunami bagi Hakim Mahkamah Syariah di Wilayah Provinsi NAD; * Seminar Peranan dan Fungsi Mahkamah Syariah Pasca-Pelaksanaan MOU Helsinki bagi Hakim Mahkamah Syariah se-Provinsi NAD; * Seminar Peranan dan Fungsi Mahkamah Syariah Pasca-Pelaksanaan MOU Helsinki bagi Hakim Mahkamah Syariah se-Provinsi NAD; * Pelatihan terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana Islam bagi Para Hakim Mahkamah Syariyah se-Provinsi NAD; * Workshop Kritisasi Rancangan Qanun tentang Hukum Acara Jinayat; * Pelatihan 14 Hakim Mahkamah Syariah di Mahkamah Syariah Pulo Penang dan Kelantan, Kuala Lumpur (Malaysia); * Pelatihan Pembinaan Adat bagi Tokoh Adat Gampong dan Mukim dalam Wilayah Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar ; * Seminar Dalam Rangka Pemberdayaan Baitul Mal di Provinsi NAD; * Pelatihan Pengelolaan Keuangan Negara (Kaur Umum dan Kaur Keuangan Mahkamah Syar'iyah se- Prov. NAD) Tahun 2005;

No	Bidang	Kemajuan
		* Pelatihan Administrasi Umum dan Peradilan Bagi Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Se - Prov. NAD; * *Comperatif Study* Pelaksanaan Syariat Islam di Paskitan (Hakim Mahkamah Syar'iyah se- Prov. NAD). * *Need assessment* manajemen informasi teknologi dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Syariah Provinsi serta Mahkamah Syariah Banda Aceh dan Aceh Besar (*pilot project*)
7.	Pembangunan sarana dan prasarana hukum	* Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan & Rumah Tahanan sebanyak 8 unit di 6 Kabupaten/Kota Provinsi NAD * Kantor Imigrasi sebanyak 2 unit di 2 Kabupaten/Kota Provinsi NAD * Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah syari'ah, Mahkamah Militer, PTUN sebanyak 3 unit untuk Provinsi NAD, 14 unit di 11 Kabupaten/Kota Provinsi NAD

Sumber :
Laporan Kegiatan 1 Tahun Bapel BRR (April 2006), Monitoring dan Evaluasi Pokja Kelembagaan (September 2006), Paparan Bapel BRR pada Lokakarya Perkembangan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi NAD-Nias : Membangun Sinergi Menuju Pemulihan Berkelanjutan (Desember 2006), dan Data Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM (Desember 2006)

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan dan hukum diperioritaskan kepada upaya berfungsinya kembali sistem pelayanan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota baik pada aspek sumber daya manusia maupun sarana lainnya.

Berdasarkan hasil kunjungan Tim Koordinasi P3RIRRWANS Bidang Pemulihan Kelembagaan ke Banda Aceh pada Bulan September 2006, didapatkan foto2 terkait degan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan kelembagaan yaitu:

1. Bangunan Kantor Gubernur Provinsi NAD ketika bencana tsunami mencapai kerusakan hingga 70 % sekarang sudah berfungsi dengan normal.

Gambar IV.13
Rehabilitasi Kantor Gubernur Provinsi NAD



Sumber : Kunjungan Lapangan ke Banda Aceh, 27 September 2006

2. Pembangunan rumah dinas hakim Provinsi NAD.

Gambar IV.14
Pembangunan Rumah Dinas Hakim Provinsi NAD



Sumber : Kunjungan Lapangan ke Banda Aceh, 5 September 2006

3. Lokasi Tanah Kantor Mahkamah Syari'yah Provinsi seluas 5271 M^2 yang berlokasi di kompleks kantor pemerintahan Prov NAD, Jl. T. Nyak Arief Banda Aceh. Rencana pembangunana gedung tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2007.

Gambar IV.15
Lokasi Pembangunan Kantor Mahkamah Syariah Provinsi NAD



Sumber : Kunjungan Lapangan di Banda Aceh, 5 September 2006

4. Contoh bangunan bale (tempat musyawarah) dengan sumber dana pembangunannya dari Departemen PU. Bale musywarah yang akan dibangun oleh BRR direncanakan pada TA 2006 sebanyak 70 unit untuk semua kabupaten/kota di Provinsi NAD, dan diketahui telah terbangun 73 unit bale musyawarah (status Oktober 2006)

Gambar IV.16
Bale Musyawarah di Provinsi NAD
Dengan Sumber Dana dari Departemen PU



Sumber : Dokumentasi Satker Peningkatan Sarana dan PrasaranaKantor Pemerintahan NAD, 2006

5. Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) dan Reintegrasi GAM

Tabel IV.7
Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD -Nias oleh Bapel BRR
Dalam Bidang Ketertiban, Kemanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)

No	Bidang	Kemajuan
1.	Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)	Dalam satuan kerja Sdelog Polri NAD-Nias : * Pembangunan Mapolda NAD * Mako Satbrimobda NAD * Makopolair dan dermaga * Mapolsek dan Rumdin Polsek Ulhe Lee * Mapolsek Peukanbada B Aceh * Mapolsek Kuta Alam B Aceh * Mapolsek dan Rumdin Krueng Raya * Mapolsek Johan Pahlawan dan Samatiga * Rumdin dan Barak Siaga Lamjame * Rumdin Aspol Punge B Aceh * Rumdin Polsek Darussalam Aceh Besar * Rumdin Polsek Peukan Bada * Rehab dan Rekons Paket I Nias * Rehab dan Rekons Paket II Nias * Pengadaan Bekal Kapor Polri * Perencanaan mapolda , Flat Siaga * Perancanaan Mako Polair dan Dermaga * Perencanaan Mako satbrimobda

No	Bidang	Kemajuan
		* Pengawasan Mako Polair dan Dermaga * Pengawasan Mapolsek dan Rolog Polda * Pengawasan Rumdin Punge dan Lamjame * Renovasi Mako Rolog polda NAD * Pengadaan Meubelair Dalam Satuan Kerja Bidang Sdeops Polri NAD-Nias : * Duk Opslog Polda NAD * SERPAS Polda NAD * Dukungan Satgas Polda NAD * Dukungan BBM Polda NAD * KODAL KACPSDA Polda NAD * Monops Kaposda NAD * Duk Ops Log Polda Sumut * Serpas Polda Sumut * Dukungan Satgas Polda Sumut * Dukungan BBM Polda Sumut * KODAL KACPSDA Polda Sumut * Minops Kaposda Sumut * Duk Ops Log SDEOPS * Duk Kodal SDEOPS * Duk Minops SDEOPS * Duk Rendalops SDEOPS * DUK Supervisi ke NAD Dalam Satuan Kerja Bidang Sdesdm Polri NAD-Nias : * Pemeliharaan Personel Polri * Werving untuk Polda NAD * Werving untuk SDE SDM * Honor untuk Pusdik Brimob * Honor untuk Sepolwan * Honor Biro Pers Polda NAD * Bahan Makan untuk Pusdik Brimob * ULP Pendidikan * Ex. Fooding Siswa * Bahan Makan untuk Sepolwan * Bahan Makan untuk di Polda NAD * Operasional Pusdik Brimob * Operasional Sepolwan * Operasional Biro Pers Polda NAD * Operasional SDE SDM Polri * Operasional Lemdiklat Polri Dalam Satuan Kerja Bidang Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional NAD-Nias : * Administrasi Umum * Pemberdayaan Sosial * Penyelenggaraan Hubungan Dipl. Ekonomi & Kerjasama Luar Negeri * Penyelenggaraan Hubungan Dipl. Sosbud & Penerangan Luar Negeri * Penyelenggaraan Koordinasi Kerjasama ASEAN * Pembinaan Kerjasama Internasional * Monitoring, Evaluasi & Pelaporan * Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi & Informasi * Administrasi Seminar/Workshop dan Penelitian * Operisai Intelijen dan Intelijen Strategis * Pembinaan Persandian

No	Bidang	Kemajuan
		Dalam Satuan Kerja Bidang Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias : * Administrasi Umum * Pembuatan Buku Juknis/Juklak * Penerbitan Majalah/Jurnal * Pembuatan Leaflet/Poster/ * Kampanya Damai dan Sosial * Penyuluhan dan Penyebaran Informasi * Penyelenggaraan Caramah/Diskusi/Seminar/Sarasehan * Meubilair Kantor Dinas Infokom * Pengadaan Peralatan : Pkt Peralatan Stasiun RRI Banda Aceh Pkt Peralatan TVRI Meulaboh Pkt Peralatan TVRI Meureudu Pkt Peralatan TVRI Geumpang * Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara : Pkt Rehabilitasi Gedung Kantor Infokom Pkt Rehabilitasi RRI Stasiun B Aceh Pkt Rehabilitasi RRI ex Pemancar Lamteumen Pkt Rehabilitasi RRI ex pemancar Indrapuri Pkt Rehabilitasi Stasiun Transmisi TVRI Meulaboh Pkt Rehabilitasi Stasiun Transmisi TVRI Meureudu Pkt Rehabilitasi Stasiun Transmisi TVRI Geumpang Monitoring dan Evaluasi Dalam Satuan Kerja Bidang Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias : * Pengadaan Alat Studio & Komunikasi * Pengadaan Kendaraan Khusus * Pengadaan Alat Angkutan Air * Pengadaan Alat Utama Militer * Pengadaan Alat Berat Zeni * Pengadaan Alpasus Zeni * Pengadaan Genset & Alat Bengkel * Pengadaan Alsatri & Alsintor * Konsultan Perencana * Konsultan Pengawas * Konstruksi di Banda Aceh : Pkt Pembangunan & renovasi Gd. Kantor Pkt Asrama Lamprit Pkt Asrama Blang Padang & Kantor Pkt Asrama Jln. Imam Bonjol Pkt Pembangunan Sekolah * Konstruksi di Meulaboh : Pkt Pembangunan Gedung Kantor Pkt Pembangunan Rumah Negara * Konstruksi di Aceh Besar * Konstruksi di Pidie * Konstruksi di Singkil * Konstruksi di Blangpidie * Konstruksi di Lhokseumawe * Konstruksi di Simeulue Pkt Pembangunan Rumdis Kodim Pkt Pembangunan Rumdis Koramil Pkt Pembangunan Kodim Simeulue * Administrasi Umum

No	Bidang	Kemajuan
		Dalam Satuan Kerja Bidang Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias : * Pengembangan Materil * Rendalwas * Lanud SIM * Lanud Maimunsaleh * Satrad 233 Sabang * Satrad 231 Lhokseumawe Paket I * Satrad 231 Lhokseumawe Paket II * Datasemen Meulaboh Paket I * Datasemen Meulaboh Paket II * Datasemen Meulaboh Paket III Dalam Satuan Kerja Bidang Pengembangan Pertahanan Matra Laut NAD-Nias : * Pengadaan BMP & Bekum * Perawatan Alpal Laut * Pembangunan Sarana & Pras * Gedung Kantor Lanan sabang * Renovasi Darmaga * Peralatan Bengkel & Mesin * Pengadaan Alpasus * Pengadaan Material Alpal Laut * Pengadaan Matl Alpal Darat * Pengadaan Senjata dan Amunisi Dalam Satuan Kerja Bidang Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias : * Pkt Alat Penanggulangan Bencana * Pkt Helm & Rompi anti peluru * Pkt Swim fest * Pkt Kaporlap TNI * Pkt Alat Angkut Air * Pkt Alat Utama Militer * Pkt Alat Berat/Alat Bantu * Administrasi Umum * Pkt kantor & rumdis Dilmil1-01 * Pkt ktr Denkomlekstrada B Aceh * Pkt Kantor Pekas TNI B Aceh * Rendalwas * Pkt Alat Bantu P Bencana & Kerusuhan * Pkt Jembatan Bailley
2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana dibidang K3M (Sampai dengan Oktober 2006)	Refungsionalisasi di Bidang TNI / Polri: * Terbangunnya 2 Unit Makodam/ Mapolda di Banda Aceh * Terbangunnya Makorem/Mapolres 2 Unit di Aceh Barat dan 2 Unit di Nias * Terbangunnya Makodim 1 Unit di Aceh Barat * Terbangunnya Koramil/ Mapolsek 6 Unit di Simeulue, 3 Unit di Aceh Barat, 1 Unit di Aceh Jaya, 4 Unit di Banda Aceh, 6 Unit di Nias dan 2 Unit di Nias Selatan * Terbangunnya Kompi/ Mako 1 Unit di Prov.NAD, 1 Unit di Aceh Jaya dan 1 Unit di Sabang * Terbangunnya Pos AD/AL/AU dan Pos Polisi 1 Unit di Aceh Timur, 1 Unit di Aceh Barat, 1 Unit di Pidie, 1 Unit di Bireun, 2 Unit di Banda Aceh, 2 Unit di Sabang, 1 Unit di Langsa, 2 Unit di Lhokseumawe dan 3 Unit di Nias

No	Bidang	Kemajuan
		* Terbangunnya Detasemen 1 Unit di Aceh Barat * Terbangunnya Asrama/ Barak 1 Unit di Aceh Besar dan 5 Unit di Banda Aceh * Terbangunnya Mess 1 Unit di Aceh Barat, 2 Unit di Banda Aceh, 2 Unit di Sabang dan 2 Unit di Lhokseumawe * Terbangunnya Rumad Dinas, 17 Unit di Prov.NAD, 14 Unit di Simeuleu, 5 Unit di Aceh Selatan, 30 Unit di Aceh Barat, 8 Unit di Aceh Besar, 40 Unit di Pidie, 10 Unit di Bireun, 4 Unit di Aceh Utara, 3 Unit di Nagan Raya, 32 Unit di Aceh Jaya, 48 Unit di Banda Aceh, 41 Unit di Sabang, 4 Unit di Lhokseumawe, 41 Unit di Nias dan 4 Unit di Nias Selatan * Terbangunnya Gedung Support 2 Unit di Prov.NAD, 2 Unit di Aceh Barat, 3 Unit di Pidie, 4 Unit di Banda Aceh, 2 Unit di Sabang, 2 Unit di Lhokseumawe dan 1 Unit di Nias * Terbangunnya PN/ PT MS/ Mahmil/ PTUN 3 Unit di Prov NAD, 1 Unit di Simeulue, 1 Unit di Aceh Selatan, 2 Unit di Aceh Barat, 1 Unit di Aceh Besar, 1 Unit di Pidie, 1 Unit di Bireuen, 1 Unit di Aceh Utara, 2 Unit di Aceh Jaya, 1 Unit di Banda Aceh, 1 Unit di Sabang dan 2 Unit di Lhokseumawe Refungsionalisasi di Bidang Infokom : * Terbangunnya Kantor Infokom/ PWI 1 Unit di Prov.NAD dan 1 Unit di Banda Aceh * Terbangunnya Gedung/ Kantor RRI 1 Unit di Prov..NAD, 2 Unit di Aceh Barat dan 3 Unit di Banda Aceh * Terbangunnya Gedung/ Kantor TVRI 5 Unit di Prov NAD, 1 Unit di Aceh Barat dan dan 3 Unit di Pidie
3.	Reintegrasi Mantan GAM	Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan dalam Bentuk: * Bantuan Santunan Sosial (Diyat) kepada geuchik/mukim kepada 332 orang dan * Bantuan Santunan Sosial (Diyat) kepada PNS sebanyak 426 orang Bantuan pemberdayaan Ekonomi : * Bantuan pemberdayaan kepada 1000 orang exs GAM (TNA) * Bantuan pemberdayaan kepada 1200 orang exs GAM (Non TNA) * Bantuan pemberdayaan kepada 500 orang exs GAM yang sudah dibina (Pra MOU) * Bantuan pemberdayaan kepada 1000 orang masyarakat korban konflikBantuan Santunan Sosial (Diyat)kepada geuchik/mukim kepada 332 orang dan kepada PNS sebanyak 426 orang * Bantuan pemberdayaan kepada 1000 orang exs GAM (TNA) * Bantuan pemberdayaan kepada 1200 orang exs GAM (Non TNA) * Bantuan pemberdayaan kepada 500 orang exs GAM yang sudah dibina (Pra MOU) * Bantuan pemberdayaan kepada 1000 orang masyarakat korban konflik * Bantuan pemberdayaan kepada 1000 relawan pembela tanah air * Bantuan pengganti rumah rusak sebanyak 3254 unit * Bantuan pelayanan kesehatan kepada 3720 orang * Bantuan pemberdayaan kepada 1000 relawan pembela tanah air * Bantuan pengganti rumah rusak sebanyak 3254 unit * Bantuan pelayanan kesehatan kepada 3720 orang

Sumber : Laporan Kegiatan 1 Tahun Bapel BRR (April 2006), Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan FGD Pokja Reintegrasi Mantan GAM pada tanggal (20-28 September 2006), dan Data Tentang Pembangunan Gedung Kelembagaan TA 2005-2006 daei Deputi Kelembagaan dan Pengembangan SDM (Status: Oktober 2006).

Bidang pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) diupayakan untuk menciptakan kembali ketertiban, keamanan dan ketahanan di dalam masyarakat. Sedangkan program Reintegrasi Mantan GAM bertujuan untuk menciptakan kembali tatanan kehidupan yang lebih baik bagi para mantan TNA baik dalam kehidupan perekonomian maupun sosial budaya di dalam masyarakat.

Beberapa kebijakan dalam sub bidang pemulihan di bidang K3M diterapkan melalui koordinasi di bawah satuan kerja; Sdeops, Sdelogs, dan Sdesdms Polri NAD-Nias, Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan informasi, Peningkatan Komitmen Persatuan Nasional, Pengembangan Pertahanan Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara NAD-Nias, dan Pengembangan Pertahanan Integratif.

Sedangkan kebijakan yang dilaksanakan melalui program reintegrasi terhadap para mantan GAM untuk tahun 2005-2006 ditekankan pada penyelenggaraan penyaluran: bantuan santunan sosial (diyat), bantuan pemberdayaan masyarakat, bantuan pengganti rumah rusak, bantuan pelayanan kesehatan.

Gambar IV. 17
Pembangunan Mako Brimobda di Lingke, Banda Aceh



Sumber : Observasi Lapangan, 23 September 2006

Gambar IV. 18
Pembangunan Asrama Polisi di Lamjamee, Banda Aceh



Sumber : Observasi Lapangan, 23 September 2006

Gambar IV.19
Pembangunan Asrama TNI di Benteng, Pidie



Sumber : Observasi Lapangan, 25 September 2006

C. Realisasi Anggaran

1. Bapel BRR

Realisasi pelaksanaan anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias oleh Bapel BRR TA 2005/2006 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.8
Realisasi Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
oleh Bapel BRR TA 2005/2006

No	Bidang	DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	Presentase Realisasi		
					DIPA 2005	DIPA L-2006	DIPA 2006
1	Perencanaan dan Pemrograman	90.500.000.000	90.468.758.000	106.347.960.000	0.03%	73.09%	47.89%
2	Perumahan, Infrastruktur dan Koordinasi Tata Guna Lahan	1.619.258.000.000	1.458.847.350.000	6.736.283.481.000	9.91%	63.98%	24.58%
3	Bidang Agama, Sosial dan Budaya	7.534.395.183	140.007.919.112	54.432.347.707	2.78%	53.18%	49.59%
	Pendidikan dan Kesehatan	144.520.343.000	126.036.564.227	756.035.155.999	30.11%	37.57%	22.51%
3	Ekonomi	24.630.863.899	373.285.010.221	320.163.157.288	4.51%	71.58%	37.99%
4	Kelembagaan dan Reintegrasi GAM	28.074.999.615	329.908.266.170	78.006.986.972	3.65%	44.48%	29.05%
5	Sekretariat, Perwakilan Nias, Keuangan dan Kominfo	49.460.276.049	108.955.355.411	68.911.169.167	25.96%	77.24%	47.89%

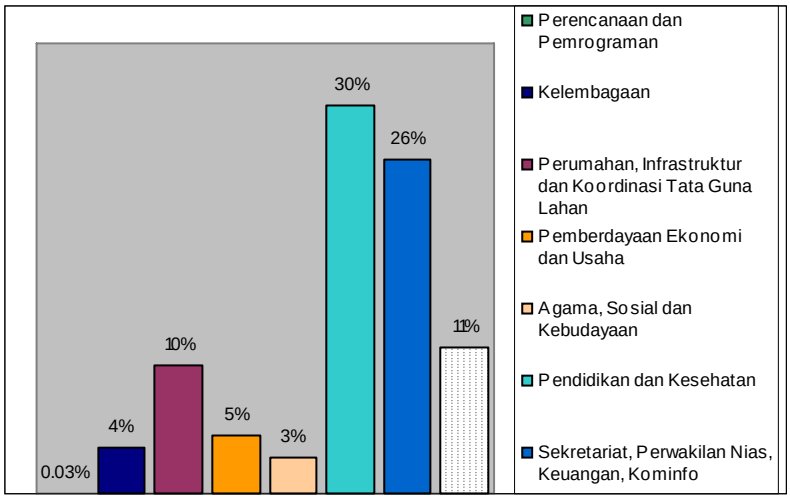
Sumber: Direktorat Akuntansi BRR NAD-Nias, per 24 November 2006

Dari tabel realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi di atas menunjukkan tingkat penyerapan dana yang sangat beragam. Pada DIPA 2005, tingkat penyarapan yang paling rendah yaitu pada bidang perencanaan dan pemograman sebesar 0,03 persen, sedangkan yang tertinggi pada bidang pendidikan dan kesehatan sebesar 30,11 persen. Pada DIPA-L 2006, tingkat penyerapan paling rendah yaitu pada bidang pendidikan dan kesehatan sebesar

37,57 persen sedangkan tingkat penyerapan paling tinggi yaitu pada bidang sekretariat, perwakilan Nias, keuangan dan kominfo sebesar 77,24 persen. Pada DIPA 2006, tingkat penyerapan paling rendah yaitu pada bidang pendidikan dan kesehatan sebesar 22.51 persen, sedangkan penyerapan paling tinggi yaitu pada agama, sosial dan budaya sebesar 49.59 %

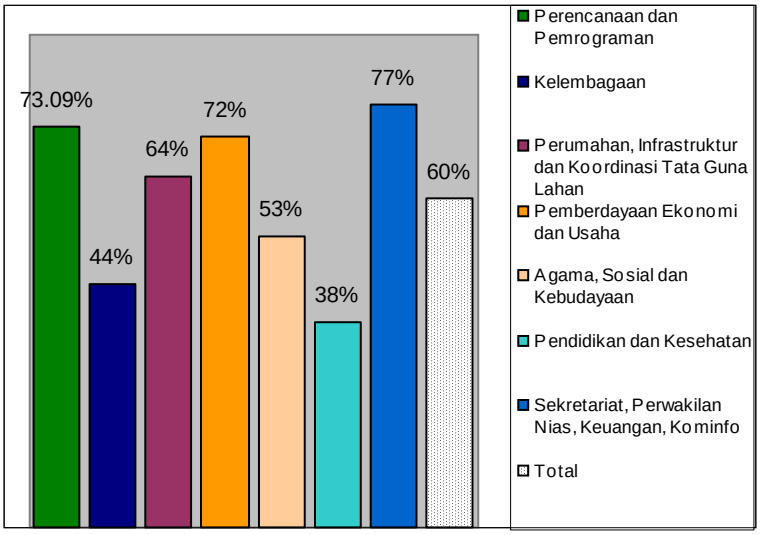
Persentase realisasi DIPA 2005 BRR dapat dilihat berdasarkan diagram berikut :

Bagan IV.1
Persentase realisasi DIPA 2005 oleh BRR



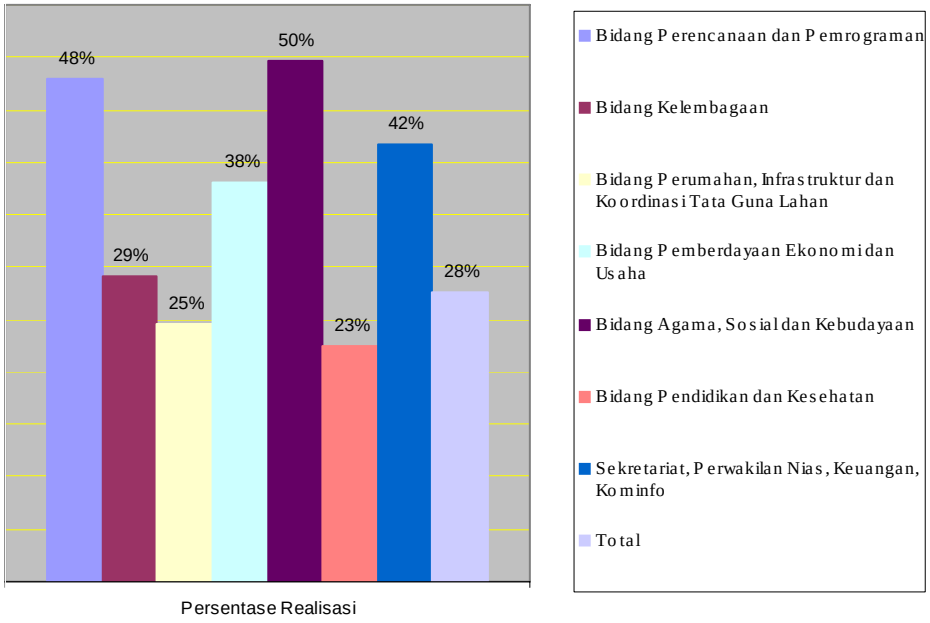
Berdasarkan diagram diatas terlihat bahwa realisasi terbesar dari anggaran DIPA 2005 dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan. Sedangkan bidang infrastrukstur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang menjadi prioritas anggaran tahun 2005, realisasi pelaksanaannya sebesar 30 %. Sedangkan total persentase realisasi secara keseluruhan sebesar 11%.

Bagan IV.2
Persentase pelaksanaan DIPA L-2006 oleh BRR



Berdasarkan diagram diatas, terlihat bahwa anggaran DIPA L-2006 realisasi anggaran terdistribusikan untuk Sekretariat, Perwakilan Nias, Keuangan Kominfo yaitu sebesar 77 %. Sedangkan bidang infrastruktur yang menjadi prioritas anggaran, realisasinya sebesar 64%. Total realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias secara keseluruhan sebesar 60%.

Bagan IV.3
Persentase pelaksanaan DIPA 2006 oleh BRR



Dari diagram diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran DIPA tahun 2005 terbesar realisasinya masih untuk Sekretariat, Perwakilan Nias, keuangan, Kominfo yaitu sebsar Rp 26%. Sedangkan bidang infrastruktur yang menjadi prioritas anggaran tereaalisasi sebesar 23%.

Pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias yang dikelola oleh BRR pada tahun 2005 dilaksanakan melalui sumber dana APBN (DIPA 2005), dan dana kegiatan yang belum dapat diselesaikan sampai akhir tahun 2005, kemudian dilanjutkan sampai awal bulan April tahun 2006 dengan sumber dana APBN-DIPA 2005 yang diluncurkan (DIPA-Luncuran 2006). Total dana yang diserap adalah sebesar Rp 2.492.371.292.055 atau sejumlah 62,83% dari total keseluruhan APBN 2005 yang berjumlah Rp.3.966.952.500.000. Sedangkan untuk kegiatan tahun 2006 yang dilaksanakan melalui sumber dana APBN (DIPA 2006), sampai dengan akhir November tahun anggaran 2006, telah diserap dana sebesar Rp 2.899.403.545.862 atau sejumlah 27.55% dari total keseluruhan APBN 2006 yang berjumlah Rp 10.52 triliun

4.2. Kementerian Lembaga (K/L)

1. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias oleh Kementerian Lembaga dalam bidang pemulihan sosial budaya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel IV.9
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Kementerian Lembaga Bidang Pemulihan Sosial Budaya

No	Kementerian Lembaga	Kegiatan
1	Departemen Pendidikan Nasional (Sumber dana dari APBN sebesar Rp. 70 Milyar)	a. Pendidikan Anak Usia Dini b. Pendidikan keterampilan hidup (pendidikan Luar Sekolah) c. Pendirian sekolah tenda darurat d. Pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan sekolah yang berupa * Peralatan sekolah * Pakaian dan makanan * Peralatan Olahraga e. Ditjen Pendidikan Luar Sekolah,melaksanakan * Pelatihan di NAD peserta 5.010 orang * Pelatihan di Nias dengan peserta 290 orang * Pelatihan di Kab Bireun dengan peserta 300 orang * Pendampingan oleh BPPLSP peserta 50 orang * Pengumpulan dan analisa data di 23 lokasi f. Pemberian beasiswa untuk siswa, guru, mahasiswa, dan Dosen * Beasiswa untuk 25.000 siswa SMP dan SMA * Magang 1.786 siswa SMK Aceh ke Jawa selama 3 bulan * Program beasiswa D3 dan D4 untuk 200 nahasiswa * Pendidikan calon guru kejuruan tingkat D3 di Unsyiah * Pelatihan keterampilan bagi pejuang perdamaian (Eks-GAM) untuk 200 orang * Bantuan beasiswa BKM untuk 162.743 siswa SD/MI,SMP/MTS, dan SMA MA/SMK. * Beasiswa mahasiswa Unsyiah * Beasiswa Universitas Iskandar Muda g. Pembangunan sistem Informasi Manajemen Pembangunan Pendidikan * Pemetaan pendidikan sebelum dan sesudah bencana di NAD dan Nias * Pembentukan Jaringan Team EMIS di setiap Kabupaten/Kota di seluruh NAD dan Nias * Membangun jaringan komunikasi dan informasi Depdiknas dengan Team EMIS Kabupaten/Kota untuk penggalangan data dan informasi pendidikan di NAD dan Nias * Membangun website www.eduforaceh.org bekerjasama dengan Unicef, sebagai media komunikasi dan informasi pendidikan, yang telah dikunjungi oleh lebih dari 1.000 orang per hari dari berbagai penjuru dunia di antaranya US Commercial, Indonesia, Germany, US Educational, Malaysia, Switzerland, United Kingdom, France, Singapore, Sweden, Australia, Netherlands, Mexico, Croatia (Hrvatska), Poland, Seychelles, Thailand, Denmark, Portugal.

No	Kementerian Lembaga	Kegiatan
		h. Rehabilitasi bangunan sekolah yang terdiri dari : * SD/MIN 10 unit di NAD * SMP/MTS 7 unit di NAD
2 a. b. c. d.	Departemen Kesehatan (Sumber dana dari : APBN 2005 sebesar Rp. 35.840.293.juta PHLN 2005 sebesar Rp. 62.418.549.juta dana Bencana 62 sebesar Rp 95.juta Hibah JICS sebesar Rp. 95 juta	a. Pemulihan Sarana Kesehatan di NAD 1. Merehabilitasi 147 unit sarana kesehatan yang rusak dari total 1186 yang meliputi : * 8 unit gedung administrasi dari total 25 unit * 7 unit Rumah Sakit dari total 17 unit * 44 unit Puskesmas dari total 274 unit * 78 unit Puskesmas Pembantu dari total 830 unit * 6 unit GFK dari total 16 unit * 4 unit pendidikan tenaga Kesehatan dari total 24 unit 2. Pembangunan baru sarana kesehatan yang meliputi : * 1 unit rumah sakit * 18 unit Puskesmas * 17 unit puskesmas pembantu * 3 unit GFK 3. Pemenuhan Tenaga Kesehatan * Penempatan secara defenitif per Rumah sakit di Provinsi NAD * Rekruitmen terpadu melalui Poskeselit sebanyak 768 tenaga kesehatan dari total 818 tenaga kesehatan yang hilang akibat Tsunami * Penugasan khusus Dokter Spesialis untuk memperkuat pelayanan rujukan di Nias * Penugasan Dokter, Dokter Gigi dan tenaga kesehatan lain untuk Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Barak Pengungsi * Insentif khusus/kesehatan gabungan
3 a. b.	Badan Pengawasan obat dan Makanan (BPOM) (Sumber dana dari : APBN TA 2005 sebesar Rp 5 milyar APBN TA 2006 sebesar Rp 8 Miliar)	Tahap Rehabilitasi * Pembinaan dan pendampingan terutama dalam proses perencanaan dan penganggaran serta kepegawaian * Pengiriman instrumen/alat lab (Urgent Needed) * Rekruitmen pegawai baru * Pengiriman tenaga untuk mengikuti pelatihan –pelatihan teknis * Pengadaan kendaraan operasional * Rehabilitasi laboratorium * Pengadaan sarana prasarana pendukug kerja Tahap Rekonstruksi * Renovasi laboratorium * Pengadaan alat laboratorium secara bertahap * Revitalisasi program/kegiatan pengawasan * Rekruitmen pegawai baru

No	Kementerian Lembaga	Kegiatan
4	Departemen Sosial (Sumber dana berasal dari Bantuan langsung lembaga donor/NGO kepada masyarakat)	Tahap Rehabilitasi a. Prov NAD 1. Pemukiman Di setiap titik pengungsi disediakan tenda darurat yang sifatnya sementara sambil disiapkan barak penampungan sementara yang lebih kondusif. Pembangunan barak-barak yang dikerjakan bersana sama dengan pengungsi yang akan ditempati diberi upah sehingga mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat setempat. 2. Peningkatan SDM Peningkatan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana alam melalui pelatihan taruna siaga bencana (Tagana) dengan peserta karang taruna dari 21 kab/Kota sebanyak 100 orang 3. Pemberdayaan Memberikan bantuan untuk mendorong perekonomian nelayan di 10 Kabupaten pantai Barat dan Timur. Bantuan yang diberika berupa Kapal /Boat penangkap ikan ukuran besar dan sedang sebanyak 1.320 unit kepada 4.350 KK atau sekitar 20.000 Jiwa) b. Provinsi Sumatera Utara 1. Bantuan Rehabilitasi Pemberian bantuan stimulan bahan bangunan rumah sebanyak 5.171 KK dengan indek sebesar Rp. 5.000.000/KK dan disesuaikan dengan kebutuhan material yang diperlukan 2. Peningkatan SDM Peningkatan Sumber Daya Manusdia dalam penanggulangan bencana melalui pelatihan taruna Siaga bencana (Tagana) di Sumatera Utara perserta dari beberapa kabupaten termasuk Nias sebanyak 100 orang.
5	Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan (Sumber APBN)	Tahap Rehabilitasi * Perlindungan anak * Peningkatan ketahanan mental * Pembentukan gugus tugas penanggulangan anak korban bencana * Menyususn KIE bagi anak korban bencana * Menyusun strategi jangka panjang * Revitalisasi kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Tahap Rekonstruksi * Perlindungan anak * Pemberdayaan perempuan * Program dan kegiatan pemulihan dan peningkatan KPA dan perempuan NAD-Nias * Program penguatan kelembagaan PUG dan anak * Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dari perlindungan perempuan
6	Badan Pusat Statistik (Sumber dana berasal dari UNFPA, CIDA, AusAID, Nzaid sebagai mitra donor) sebesar Rp.20.422.634.000	Sensus penduduk NAD di NAS Sensus penduduk Nias di Nias
7	Pemuda dan Olahraga (sumber dana berasal dari APBN sebesar Rp.29.486 miliar)	* Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat * Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana

Sumber : paparan Kementerian lembaga pada rapat monitoring dan evaluasi Pokja Sosial Budaya, 21 Juni 2006 di Jakarta

Beberapa pelaksanaan kegiatan dari Departemen Pendidikan Nasional yaitu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan keterampilan hidup (pendidikan Luar Sekolah), Pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan sekolah, Pemberian beasiswa untuk siswa, guru, mahasiswa, dan Dosen, Pembangunan sistem Informasi Manajemen Pembangunan Pendidikan, Rehabilitasi bangunan sekolah.. Departemen Kesehatan melakukan pemulihan sarana dan prasarana kesehatan serta pemenuhan tenaga kesehatan.Sedangkan Departemen Sosial melakukan kegiatan di wilayah NAD yang berkaitan dengan Pemukiman, Peningkatan SDM, Pemberdayaan. Seangkan di Provinsi Sumatera Utara melakukan Bantuan Rehabilitasi dan Peningkatan SDM

Secara umum, pada pemulihan sosial budaya lebih diprioritaskan pada aspek fisik, pengadaan Sumber Daya Manusia, serta pengambangan sistem, terutama yang terkait dengan aspek pendidikan dan kesehatan. Hal ini sangat penting dan urgen dalam rangka memulihkan kehidupan masyarakat di wilayah bencana baik di NAD maupun di Kepulauan Nias.

2. Bidang Pemulihan Perekonomian

Beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan yaitu lebih mengarah pada pemberian bantuan peralatan dan kelengkapan untuk usaha secara ekonomi dan pembangunan fisik untuk tempat pelelangan ikan. Dengan demikian dapat meningkatkan denyut ekonomi dan usaha mayarakat secara luas. Departemen Pertanian mengarah pada pemberian bantuan bibit, benih, pupuk dan peralatan serta perlengkapan pertanian.

Sedangkan pada Departemen Koperasi/UKM dan Departemen Perdagangan terutama sekali melakukan pembangunan fisik seperti kios dan pasar-pasar yang dijadikan sebagai usaha masyarakat. Departemen Perindustrian mengadakan alat dan bangunan fisik untuk kepentingan laboratorium serta peralatan untuk perlatihan dan keterampilan. Departemen Tenaga Kerja mendorong untuk melakukan pengadaan tenaga kerja melalui pelatihan di balai latihan kerja. Sedangkan PERUM BULOG pada penyediaan bantuan beras bagi masyarakat.

Tabel IV. 10
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Kementerian/ Lembaga Bidang Pemulihan Perekonomian

No	Kementerian lembaga	Program	Kegiatan
1	Departemen Kelautan dan Perikanan (Sumber dana dari donor/NGO seperti JICs, GTZ dan ADB berupa dana hibah dan loan, APBN dengan total dana sejumlah Rp. 271.608.000.000,-)	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengolahan ikan skala kecil	* Rehabilitasi sarana kecil pengolahan ikan * Pengadaan mobile mini ice plant * Pembangunan tempat pengepakan ikan * Peningkatan mutu, nilai tambah hasil perikanan * Pengadaan sarana pengolahan ikan * Pembangunan sarana pengeringan ikan 5 unit
		Rehabilitasi & Bantuan Alat Penangkap ikan	* Pengadaan kapal dan peralatan penangkapan ikan * Purse Seine, Gill Net, Beach Seine, Hook Line (trolling) * Pengadaan Lampu

No	Kementerian lembaga	Program	Kegiatan
		Rehabilitasi & Bantuan Pengadaan Kapal Ikan	* Bantuan kapal penangkap ikan sebanyak 6.000 unit * Pengadaan kapal 3-5GT 138 unit * Pembangunan sarana pengisian bahan bakar nelayan (SPBN)
		Rehabilitasi tambak & Sarana Perikanan Budidaya	* Penyuluhan perikanan dan pemberian bantuan agroinput * Penanaman mangrove: pengadaan benih rumput laut, modal usaha tambak, mesin dan peralatan, pembangunan infrastruktur tambak, tempat pengumpul * Sarana budidaya tambak/pompa * Genset untuk pembenihan * Root blower untuk pembenihan * Bak induk fiber * Pembangunan sarana prasarna tambak * Bantuan agroinput tambak udang * Rehabilitasi tambak dan salurannya seluas 9.258 hektare * Rehabilitasi hatchery
		Rehabilitasi Tambak & Bantuan Agroinput	* Pengadaan bibit rumput laut * Pembangunan budidaya tambak
		Rehabilitasi dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan pantai	Rehabilitasi ekosistem pantai
		Rehabilitasi Prasarana PPP/PPI sebanyak 6 unit	* Pembangunan PPI Peudada * Rehabilitasi PPP Lampulo, Lambada, Calang * Rehabilitasi PPI Kuala Peukan Baro, Krueng Raya * Rehabilitasi dermaga perikanan Kab Simeuleu dan Nias 2 unit
		Perencanaan Tata Ruang Kawasan Permukiman	* Menyusun rencana detail tata ruang kawasan pemukiman tingkat desa * Masterplan perikanan tangkap
		Detail Design	* Rehabilitasi tambak dan salurannya * Pembangunan kembali budidaya laut
		Rehabilitasi dan pembangunan kembali fasilitas rusak RBADC di Neuheun	Pengadaan generator, fasilitas air bersih, peralatan laboratorium, excavator, fasilitas pendukung
		Pengadaan Peralatan Karantina Ikan	* Penyediaan alat dan bahan laboratorium * Identifikasi dan diagnosis media pembawa HPI
		Alokasi DAK Non-DR, Sektor Perikanan Tangkap	Disesuaikan dengan kebutuhan setempat bagi korban bencana tsunami
		Survey Kelautan dan Kedirgantaraan	Survey potensi pengembangan budidaya rumput laut
		Identifikasi Sumber Daya Ikan Pelagis dan Demersal	Mengkaji lokasi sebaran potensi sumber daya perikanan pelagis di perairan barat NAD
2.	Departemen Pertanian (Sumber dana dari hibah ADB, dana APBN, juga bantuan dana dari donor/NGO seperti ADB, FAO dengan total dana sejumlah Rp. 64.480.000.000,-)	Pemulihan usaha ekonomi masyarakat dan partisipasi swasta	* Pengadaan sarana produksi pupuk dan benih, pengadaan obat-obatan dan alat pertanian * Pengadaan sarana traktor, mesin, hand tractor bajak, pompa air, mesin pembuat pupuk, pencetakan sawah, dan pengadaan perlengkapan kantor dan kendaraan tanaman pangan dan hortikultura * Rehabilitasi kakao, dan penanaman kelapa, rehabilitasi kelapa sawit, perlindungan tanaman perkebunan. Rehabilitasi bangunan/kantor lingkup perkebunan, pengadaan kendaraan

No	Kementerian lembaga	Program	Kegiatan
			* Bantuan dari FAO melalui proyek OSRO/INS/501/BEL Emergency Provision of Essential Inputs for The Rapid Re-start of Smallscale Food Crops Production and Fisheries Activities with Tsunami Affected Communities " berupa hand traktor sebanyak 695 unit, thresher sebanyak 100 unit, 245 ton pupuk dan pelatihan penggunaan hand raktor bagi 147 petani (Besarnya bantuan US$ 1,9 juta). * Bantuan Pemerintah Jepang melalui FAO OSRO/INS/503/JPN Japan/Fao Joint Emergency Assistance to Tsunami-Affected Rural Communities in Indonesia ", berupa benih padi dan pupuk untuk 8.700 petani (Besarnya bantuan US$ 584,6 ribu). * Bantuan Uni Eropa melalui FAO dalam proyek OSRO/INS/509/EC "Emergency Assistance for the restoration of Food Security and Sustainable Livelihood Among Tsunami Affected ", berupa benih padi, tanaman palawija, tanaman tahunan, pupuk, alat dan mesin pertanian untuk 12.500 petani. Besarnya bantuan EUROS 5,5 juta atau US$ 7,1 juta. * Bantuan Pemerintah Belgia melalui FAO dalam proyek OSRO/INS/513/BEL " Support to Farmers in Tsunami Affected Areas Throught The Provision of Agricultural and Livestock Inputs", berupa input pertanian; pengadaan ternak. Besarnya bantuan US$ 1,2 juta. * Rehabilitasi areal tanaman kelapa 1.845 ha, tanaman pala 726 ha, penyediaan bibit kelapa sawit untuk 2.000 ha, bibit kelapa untuk 1.500 ha. * Bantuan dari lembaga penelitian Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC), berupa bantuan benih sayuran 12.500 paket, 40 ton pupuk dan 12.500 mata cangkul. * Bantuan dari Center for International Potato (CIP), berupa bibit ubi jalar sebanyak 48.000 cutting untuk disemaikan di lokasi percobaan Universitas Syah Kuala dan Kebun percobaan PLPP Saree, NAD * Pencetakan sawah dari dana hibah ADB melalui proyek ETESP 0002-INO * Bantuan Pemerintah Australia/AIPRD melalui kerjasama dengan lembaga penelitian ACIAR telah melakukan pelatihan dalam bidang analisis tanah dan pengelolaan lahan dan tanaman, menginisiasi proyek dalam management kesuburan lahan untuk penanaman kembali di wilayah yang terkena dampak tsunami. * ACIAR melalui proyek nomor LWR/2005/118 akan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Tanah dan Agroklimat dan BPTP propinsi NAD serta Dinas Pertanian dan NGO. * Bantuan modal untuk usaha ekonomi produktif (Bantuan Langsung masyarakat/BLM) yang mendukung peningkatan ketahanan pangan bersumber dari dana APBN Dep. Pertanian.

No	Kementerian lembaga	Program	Kegiatan
			* Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pembentukan kelompok mandiri (Self-Help Group) sebanyak 410 SHG serta bantuan modal berupa grant untuk usaha ekonomi produktif. Dananya bersumber dari realokasi loan ADB dan IFAD yang terdapat pada proyek P4K atau Rural Income Generating (RIG) 1583-INO/AD dan 458-ID/IFAD (besarnya dana dari ADB US$ 2,95 juta (ADB) dan IFAD US$ 2,4 juta) * Bantuan alat pertanian dari dana hibah ADB melalui ETESP 0002-INO * Pengadaan alat pengolahan hasil perkebunan dan peralatan perkebunan bersumber dari dana realokasi loan ADB pada proyek IPM-SECP 1469-INO. * Pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi petugas pertanian dan pemberdayaan petani serta operasionalisasi sekolah tinggi penyuluhan pertanian dari dana APBN Departemen Pertanian. * Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian dari dana hibah ADB melalui proyek ETESP 0002-INO * Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan, Monev pembangunan pertanian dari dana hibah ADB melalui proyek ETESP 0002-INO * Pengintegrasian teknis perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari dana hibah ADB melalui proyek ETESP 0002-INO
3	Departemen UKM dan Koperasi (total dana sejumlah Rp. 43.923.000.000,-)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Publik	* Bantuan Perkuatan Modal Usaha kepada Koperasi/UKM di 21 Kab/Kota * Bantuan Perkuatan Modal Usaha Jaringan Pemasaran pada Koperasi Pasar di 11 Kab/Kota * Bantuan Perkuatan Modal Usaha untuk Sarana Produksi di 14 Kab/Kota * Bantuan Perkuatan Modal Usaha untuk Pengembangan UKM di sentra-sentra di 12 Kab/Kota * Bantuan Perkuatan Modal Usaha untuk Pengembangan KSP/USP-Kop di 21 Kab/Kota * Pengadaan Komputer 25 unit dan Pelatihan KUKM di 22 Kab/Kota
4	Departemen Perdagangan (Sumber dana dari APBN 2005 sejumlah Rp. 39.220.000.000.000)	Masa Tanggap Darurat : Tenda Pasar Darurat	Pemasangan tenda pasar darurat (termasuk ongkos angkut dan pasang)
		Rehabilitasi & Rekonstruksi : Pasar Tradisional Permanen	Pembangunan kembali pasar tradisional permanen
			* Pembangunan Pasar Grosir nduk di Lambaro * Kemetrologian dan Koordinasi Posko di NAD
5	Departemen Perindustrian (anggaran sebesar Rp. 2.299.504.000.000,-)	Peningkatan kemampuan teknologi indistri	* Perawatan gedung kantor (4 paket) * Pengadaan alat laboratorium (2 paket) * Pengadaan kantor perlengkapan/sarana (8 pkt) * Pengadaan alat pendukung operasional (4 paket)
		Penyelenggaraan pendidikan masyarakat	* Pengadaan alat laboratorium * Pengadaan alat bengkel/ketrampilan * Penyelenggaraan laboratorium (2 paket) * Rehabilitasi bangunan gedung

No	Kementerian lembaga	Program	Kegiatan
			* Pemeliharaan peralatan dan mesin * Pengadaan Bahan kimia
6	PERUM BULOG (anggaran sebesar Rp. 27.485.000.000,-)	Penyediaan Bantuan Pangan Pokok (Beras)	* Penyaluran bantuan beras bagi penduduk yang terkena dampak Gempa dan Tsunami di NAD dan Nias sebanyak 7.866,35
7	Departemen Tenaga kerja (sumber dana berasal dari dana dekonsentrasi sebesar Rp. 30.739.900.000.000,-)	Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Publik	* Pengadaan sebanyak 13 mobile trainng unit (MTU) * Pengadaan peralatan pelatihan di BLK Lhok Seumawe, Meulaboh, Langsa, Sabang dan Banda Aceh * Rehabilitasi & Rekonstruksi BLK Banda Aceh
		Perluasan & Pengembangan Kesempatan Kerja	* Pemberdayaan Tenaga Kerja melalui TKMT 40 org. * Wirausaha Baru 30 org & PK/SPK 50 rg. * Penempatan TK Aksus sebanyak 20 org * Pendidikan dan pelatihan teknis 3 paket * Terapan teknologi tepat guna 170 orang * Pemberdayaan PKSPK 137 orang * Pendayagunaan TKPMP 20 orang * TKS 150 orang * Pengadaan alat pengolah data 1 Paket * Promosi perluasan kesempatan kerja sektor pertanian 20 orang Promosi potensi sumber daya daerah 20 orang Nias * Pembinaan WUB 10 orang * TTG/TPK 15 orang * Pemberdayaan AKAD/AKL 200 orang * Pemberdayaan PKSPK 87 orang * Informasi pasar kerja 1 paket * Pengadaan peralatan mesin 1 paket
		Peningkatan kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja	* Pelatihan ketrampilan / institutional dengan berbagai kejuruan 384 orang. * Pelatihan produktivitas 300 orang * Pendidikan dan pelatihan tekhnis 3 paket * Peningkatan keterampilan tenaga ekrja Indonesia 388 orang * Penyebaran Informasi tentang regulasi dibidang pelatihan dan produktivitas 8 paket * Pelaksanaan rapat koordinasi daerah dibidang pelatihan dan produktivitas 1 paket * Pengembangan kelembagaan lembaga latihan swasta secara kesisteman maupun SDM 5 paket (100 orang) * Penyediaan data pelatihan dan produktivitas 1 paket * Pengadaan sarana dan prasarana kediklatan 1 paket
		Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	a. Perlindungan & Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan * Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) PHI meliputi sosialisasi HI 40 org, Penyuluhan pada 12 prsh, diklat/seminar 40 org dan 7 kab. * Pengembangan Lembaga HI meliputi SP/SB 20 lbg, Tripartit 50 lbg. * Pemberdayaan LK Tripartit 54 orang * Sosialisasi Upah Minimum Provinsi (UMP) 40 prsh.

No	Kementerian lembaga	Program	Kegiatan
			* UMP 100 buku * Pencegahan dan penyelesaian Kasus PHI /PHK melalui sosialisasi 90 org, deteksi dini 10 prsh & pegawai pengantar 80 org. * Penyelesaian Kasus oleh P4D melalui Bimtek 40 kasus, dan LKS 40 kasus. * Penyelesaian kasus PHI/PHK 200 Kasus * Sos.UU No.2 Tahun 2004 1 Paket * Pengadaan alat pengolah data 1 unit * Pembinaan dan pengaturan satker 60 orang b. Penyelenggaraan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan * Pengawasan dan pemeriksaan norma kerja 3 prsh dan jamsostek 12 prsh. * Sosialisasi pengawasan ketenagakerjaan 20 org * Pengembangan lembaga pengawasan dan perlindungan tenaga kerja pada 100 prsh

Sumber : Laporan pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias

3. Bidang Pemulihan Kelembagaan

Berdasarkan Laporan Pemeriksaaan Atas Kinerja Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BRR NAD-Nias yang disusun oleh BPK pada tanggal 9 Juni 2006, diketahui Kementerian/Lembaga untuk bidang pemulihan kelembagaan yang memperoleh dana moratorium (hibah) TA 2005 adalah Departemen Dalam Negeri. Akan tetapi hingga saat ini belum di dapatkan data mengenai perencanaan maupuan pelaksanan kegiatan dari Kementerian/ Lembaga tersebut.

4.3 Pemerintah Daerah

1. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias oleh Pemerintah Daerah NAD dalam bidang sosial budaya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.11
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Sosial Budaya

No	Pemerintah Daerah NAD	Pelaksanaan
1	Dinas Pendidikan	* Pendidikan Anak Usia Dini * Pengembanagn kurikulum dan Pembelajaran * Penelitian dan Pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi * Pengembangan sistem pendidikan islami * Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan * Manajemen pelayanan pendidikan * wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun * Pendidikan menengah * Pendidikan Non formal * Pengembangan dayah dan balee Seumeubeut
2	Dinas Syariat Islam	* Pertemuan antar pemimpin umat beragama * Bantuan Balee Seumebeut * Penyuluhan Hukum Islam

No	Pemerintah Daerah NAD	Pelaksanaan
3	Dinas Kesehatan	* Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat korban gempa dan tsunami * Rekruitmen tenaga medis akibat korban tsunami * Pelaksanaan pengendalian penyakit menular * Peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi * Perbaikan gizi dilakukan program perbaikan gizi di beberapa kab/kota bekerja sama dengan Unicef, Who, Save the Children, Plan, Care melalui : a. Program Gizi & Anak Sekolah b. Pemberian Makanan Tambahan di beberapa Kab/Kota dengan bantuan WHO, Unicef, WFP, CARE. c. Survey kesehatan & nutrisi di 21 Kab/Kota (Unicef & CARE). d. Pelatihan Teknis dan Training Of Trainer untuk petugas kesehatan. e. Penatalaksanaan kasus Gizi Buruk di RS & Puskesmas f. Program Keswa masyarakat (WHO, UNFPA) g. Pelatihan CMHN (Community Mental Health Ners) di 11 Kab /Kota. h. Dukungan Psikososial di beberapa kab/kota i. Penyediaan obat-obatan Psikofarma bantuan UNFPA * Sanitasi dan Lingkungan a. Pelatihan dan Program pengelolaan limbah unit pelayanan medis kabupaten, Puskesmas b. Kaporisasi, WC/jamban/tempat wudhuk di beberapa kab/Kota kerjasama * System Informasi Kesehatan a. Penataan kembali system informasi kesehatan dan pengadaan perangkat/ komputer kerjasama dgn WHO. b. Sosialisasi

Sumber : Paparan diskusi Focus Group Discussion Pokja Sosial Budaya tanggal 27 November 2006, di Banda Aceh

Dari tabel di atas menunjukkan beberapa bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Nasional yaitu pengembangan sistem dan proses pendidikan termasuk sistem pendidikan yang Islami, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan pendidikan formal dan non formal. Kemudian, Dinas Syariat Islam melakukan fasilitasi pertemuan stakeholders dalam hal keagamaan, bantuan dan penyuluhan hukum Islam. Dinas ini lahir karena merupakan salah satu keistimewaan daerah Aceh. Sedangkan Dinas Kesehatan fokus kepada pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat akibat tsunami.

2. Bidang Pemulihan Perekonomian

Dinas berperan sebagai pelaksana yang mewakili pemerintah daerah yang berperan sebagai koordinator pelaksana dari para pelaku pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pasca tsunami. Bentuk pelaksanaan program pada Dinas Perikanan dan Kelautan NAD lebih menekankan pada pengadaan peralatan dan perlengkapan; Dinas Pertanian Tanaman Pangan NAD melakukan penekanan pada pemberian bantuan alat pertanian, rehabilitasi/ pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian, pendidikan dan pelatihan; sedangkan pada Dinas Koperasi dan UKM NAD menekankan pada aspek pembinaan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia serta pengembangan pada aspek permodalan usaha; Dinas Perindustrian dan Perdagangan NAD menekankan pada pembangunan pasar sebagai salah satu cara untuk

menghidupkan kembali penghidupan ekonomi masyarakat; Dinas Tenaga Kerja menekankan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja.

Tabel IV.12
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Perekonomian

No	Pemerintah Daerah NAD	Pelaksanaan
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NAD	* Penyediaan peralatan pengolahan ikan (fish Nugget) * Penyediaan alat penangkap ikan * Rehabilitasi saluran tambak * Pengadaan sarana alat pengolahan ikan * Optimalisasi tambak masyarakat pasca tsunami dan penguatan institusi pembenihan * Pengadaan alat penangkapan ikan skala kecil * Penyediaan bantuan agroinput perikanan * Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap
2	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi NAD (di 10 Kabupaten/Kota yaitu Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Nagan Raya, Aceh Jaya, Simeulue)	Realisasi Penarikan/Penyerapan Dana 2006 Hibah ADB No. 0002 – INO Juli 2006 Rp. 32.205.986.418,- atau sebesar 44,70 % (dari pagu anggaran Rp. 72.050.000.000,-) dengan sisa dana Rp. 39.84.013.582,- atau sebesar 55,30 % terdiri dari: * Administrasi Umum, Pengadaan Sarana Produksi * Pembangunan Gedung Kantor * Pembangunan Prasarana dan sarana lingkungan gedung * Pengadaan perlengkapan sarana gedung, pengadaan mebeulair Pengadaan alat pertanian, pengadaan alat pengolah data, Pengadaan kendaraan * Pencetakan sawah, rehabilitasi dan konservasi lahan * Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian * Rehabilitasi Gedung Negara * Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian * Pengintegrasian Teknis, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kerja * Sedangkan Komitmen dan Realisasi Keuangan CMU Coordination dan Monitoring Unit) Dana Hibah ADB No.0002-INO-Juli 2006 sebesar Rp. 822.297.000,- atau sebesar 100 %.
3	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NAD	* Pemantapan program pembinaan koperasi dan UKM * Penataan dan Perkuatan kelembagaan koperasi dan UKM * Monitoring dan evaluasi perkoperasian * Pengembangan sarana dan perkuatan usaha bagi koperasi unggulan * Perkuatan modal usaha sarana bagi UKI * Bimbingan teknis KSP/USP Koperasi Pola Syariah * Analisis diklat bagi Koperasi dan UKM * Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi dan UKM
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD	* Pembuatan Leaflet/Poster * Pendidikan dan Pelatihan Teknis * Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa dan Statistik * Penyusunan Program dan Rencana Teknis * Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi * Bantuan Usaha Ekonomi Produktif * Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah * Penyelenggaraan Lomba, Sayembara dan Festival * Pemberian Status Badan Hukum

No	Pemerintah Daerah NAD	Pelaksanaan
		* Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 * Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4
5	Dinas Tenaga Kerja Provinsi NAD	* Memberikan bantuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Simeulue, Aceh Singkil * Pembuatan Kebun Cabe di Sabang * Perbaikan Saluran Air, Pembuatan Saluran Irigasi di Aceh Besar * Perbaikan sarana publik, rehab jalan di Banda Aceh
6	Dinas Perkebunan Provinsi NAD	* Pemulihan tanaman padi dan bakau juga ditambah adanya pembangunan sarana kantor, pengadaan kendaraan di NAD

Khususnya pembangunan pasar pada tahun 2005 dan 2006 yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD dilaporkan sebagai berikut:

Tabel IV.13
Pembangunan dan rehabilitasi Pasar Tradisional, Induk,Grosir, penunjang di Provinsi NAD Tahun 2005 dan 2006

No	Kab/Kota	Kecamatan	Jumlah (unit)	Sumber Dana	Keterangan
1	Banda Aceh	Kuta Alam	1	CHF	Pasar Ikan Peunayong
		Baiturrahman	1	CHF	Rehab Pasar Kp. Baro
2	Aceh Besar	Seulimun	2	BRR	Pasar tradisional
		Lembah Selawah	1	BRR	Pasar tradisional
		Lhoong	1	BRR	Pasar tradisional
		Pulo Aceh	1	JICs	Pasar tradisional
		Lhoknga	1	JICs	Pasar tradisional
		Krueng Raya	1	JICs	Pasar tradisional
		Ingin Jaya	1	JICs	Pasar Induk
		Lhoong	1	CHF	Rehab. Pasar sayur
		Kuta Baro (Pekan ateuk)	1	CHF	Rehab Psr.Ikan dan sayur
		Lhoknga (Lampuuk)	1	CHF	Pasar tradisional
		Baitussalan (Kajhu)	1	CHF	Pasar tradisional
3	Pidie	Panteraja	1	BRR	Pasar tradisional
		Panteraja	1	CHF	Rehab Psr.Ikan
		Meuredu	1	CHF	Rehab Psr.Ikan
		Jangka Buya	1	CHF	Rehab Psr.Ikan
		Muara tiga	1	CHF	Rehab Psr.Ikan
		Simpang Tiga	2	APBNP	Pasar tradisional
		Glumpang Baro	1	APBNP	Pasar tradisional
		Muara Tiga	1	APBNP	Pasar tradisional
		Padang Tiji	1	APBNP	Pasar tradisional
		Batee	1	APBNP	Pasar tradisional
		Kota Sigli		JICs	Pasar Penunjang
4	Bireun	Kota Juang	1	BRR	Psr.Grosir
		Peudada	1	BRR	Pasar tradisional
		Simpang Mamplam	1	BRR	Pasar tradisional
		Peulimbang	1	BRR	Pasar tradisional
		Simpang Mamplam	1	APBNP	Pasar tradisional
		Juli	1	APBNP	Pasar tradisional
		Nibong	1	APBNP	Pasar tradisional

No	Kab/Kota	Kecamatan	Jumlah (unit)	Sumber Dana	Keterangan
5	Aceh Utara	Baktiya	1	BRR	Pasar tradisional
		Meurah Mulia	1	BRR	Pasar tradisional
		Muara Batu	1	BRR	Pasar tradisional
		Cot Girek	1	BRR	Pasar tradisional
		Syamtalira Bayu	1	APBNP	Pasar tradisional
		Seunedon	1	APBNP	Pasar tradisional
		Nibong	1	APBNP	Pasar tradisional
6	Lhokseumawe	Blang Mangat	1	BRR	Pasar tradisional
		Banda Sakti	1	BRR	Pasar tradisional
7	Aceh Timur	Banda Alam	1	BRR	Pasar tradisional
		Darul Aman	1	APBNP	Pasar tradisional
		Idi rayek	1	APBNP	Pasar tradisional
8	Aceh Tamiang	Kota Kuala Simpang	1	BRR	Pasar tradisional
		Seureuwey	2	APBNP	Pasar tradisional
9	Beuner Meriah	Pintu Rime Gayo	1	BRR	Pasar tradisional
		Permata	1	APBNP	Pasar tradisional
10	Aceh tengah	Jagong Jeget	1	BRR	Pasar tradisional
		Batu Lintang	1	APBNP	Pasar tradisional
11	Gayo Lues	Pantan Cuaca	1	BRR	Pasar tradisional
		Pantan Cuaca	1	APBNP	Pasar tradisional
12	Aceh Tenggara	Seumadam	1	BRR	Pasar tradisional
		Lawe Alas	1	APBNP	Pasar tradisional
13	Aceh Singkil	Singkil	2	BRR	Pasar tradisional
		Singkil	1	APBNP	Pasar tradisional
14	Aceh Selatan	Meukek	1	BRR	Pasar tradisional
		Kluet Tengah	1	BRR	Pasar tradisional
		Trumon Timur	1	BRR	Pasar tradisional
		Trumon Timur	1	APBNP	Pasar tradisional
		Pasi Raja	1	APBNP	Pasar tradisional
		Labuhan Haji	1	APBNP	Pasar tradisional
15	Abdya	Tangan-tangan	1	BRR	Pasar tradisional
		Manggeng	1	APBNP	Pasar tradisional
		Susoh	1	APBNP	Pasar tradisional
16	Nagan Raya	Darul Makmur	1	BRR	Pasar tradisional
		Kuala	1	APBNP	Pasar tradisional
17	Aceh Barat	Sungai Mas	1	BRR	Pasar tradisional
		Pante cermen	1	BRR	Pasar tradisional
		Woyla Barat	1	BRR	Pasar tradisional
		Woyla	1	APBNP	Pasar tradisional
		Bubon	1	APBNP	Pasar tradisional
		Arongan Lambalek	1	APBNP	Pasar tradisional
18	Aceh Jaya	Sampolnit	1	BRR	Pasar tradisional
		Krueng Sabee	3	BRR	Pasar tradisional
		Krueng Sabee	1	APBNP	Pasar tradisional
		Teunom	1	APBNP	Pasar tradisional
		Panga	1	APBNP	Pasar tradisional
		Sampolnit	1	APBNP	Pasar tradisional
		Krueng Sabee	1	CHF	Pasar tradisional
		Setia Bakti	1	CHF	Pasar tradisional
		Sampolnet	3	CHF	Pasar tradisional
		Teunom	1	CHF	Pasar tradisional
		Jaya	1	CHF	Pasar tradisional
19	Simeulue	Simeulue Timur	1	APBNP	Pasar tradisional
20	Sabang	Sabang	1	APBNP	Pasar tradisional

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD, 2006

3. Bidang Pemulihan Kelembagaan

Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah khususnya yang berkaitan dengan bidang kelembagaan dan hukum, hingga saat ini baru mendapatkan data dari Badan Kesbang dan Linmas Tahun 2005, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel IV.14
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Kelembagaan

No	Pemerintah Daerah NAD	Kegiatan
1	Badan Kesbang dan Linmas Prov NAD	1. Binbingan Teknis Pemantapan Bagi Aparatur Kesbang dan Linmas Kab / Kota 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pageu Gampong

Sumber : Badan Kesbang dan Linmas, 2005

Dari Tabel di atas diketahui bahwa kegiatan yang berkaitan dengan bidang kelembagaan pada Badan Kesbang dan Linmas yaitu berupa bimbingan teknis pemantapan bagi aparatur Kesbang dan Linmas Kab/Kota serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka Pageu Gampong.

4. Bidang Pemulihan Ketertiban, Keamanan dan ketahanan Masyarakat dan Mantan Reintegrasi GAM

Tabel IV.15
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Bidang Pemulihan Ketertiban, Keamanan dan ketahanan Masyarakat dan Mantan Reintegrasi GAM

No	Pemerintah Daerah NAD	Kegiatan
1	Badan Kesbang Linmas Prov NAD	1. Penyaluran bantuan korban konflik Pola Diyat 2. Pemantapan wawasan kebangsaan bagi aparatur Kab/Kota 3. Pembauran bangsa bagi generasi muda dan pramuka 4. Pelatihan Wanra Wilayah I 5. Pelatihan Wanra wilayah II 6. Sosialisasi wasasan kebangsaan 7. Sosialisasi pemantapan budaya politik bagi pengurus Parpol, Ormas, dan LAM 8. Penanganan maslah-masalah strategis

Sedangkan pelaksanaan Badan Kesbang dan Linmas yang terkait dengan K3M dan reintegrasi menekankan pada aspek pemberian bantuan serta pelatihan-pelatihana yang diorientasikan pada pemberian penyadaran dan penanaman nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan.

4.4 Donor / NGO

Pihak Donor dan NGO melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki masing-masing dengan

mengambil sebaran di berbagai wilayah bencana baik di NAD maupun Kepulauan Nias. Status pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini yaitu bersifat *off budget* karena merupakan anggaran yang bersumber dari dana luar APBN. Data di bawah ini didasarkan penyebaran lokasi (kabupaten/kota) baik di wilayah NAD maupun di Nias.

Tabel berikut menggambarkan persebaran lokasi kegiatan dan anggaran dari para Donor/NGO:

Table IV.16
Distribusi Lokasi Proyek yang Didanai Donor dan NGO
Hingga April 2006

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah Proyek	Total Dana (Juta USD)
1	Kota Sabang	31	16,22
2	Pidie	118	148,02
3	Bireun	80	65,67
4	Lhok Seumawe	26	18,08
5	Aceh Tengah	12	11,70
6	Aceh Utara	58	68,89
7	Aceh Timur	18	13,88
8	Kota Langsa	2	1,63
9	Aceh Tamiang	5	4,44
10	Gayo Lues	4	3,48
11	Aceh Tenggara	7	4,09
12	Aceh Singkil	17	9,80
13	Nias	82	97,22
14	Simelue	45	105,83
15	Aceh Selatan	17	15,22
16	Aceh Barat Daya	22	20,89
17	Nagan Raya	70	123,04
18	Aceh Barat	174	290,71
19	Aceh Jaya	144	317,58
20	Aceh Besar	385	394, 48
21	Banda Aceh	313	410,43

(Sumber: Paparan BRR dalam kegiatan CFAN 2, Jakarta, 9 Mei 2006)

Adapun para pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi Donor/NGO dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sbb:

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Donor/NGO yang bersumber dari *off budget* di wilayah Kepulauan Nias hingga 19 Juli 2006 yaitu:

1. Di Kabupaten Nias terdapat 92 total proyek, jumlah partner yang melaksanakan proyek sebanyak 77 mitra, total komitmen dana yang akan disalurkan sebesar USD 111.090.252, sedangkan dana yang disalurkan sebanyak USD 39.308.396. Ada beberapa Donor/NGO yang melaksanakan kegiatan di Kab. Nias yaitu JICS, ILO, French Red Cross, IOM, YEU, FAO, YTM (Yayasan Tanggul Bencana di Indonesia), PKBI, ACE, PUM, dan lain sebagainya.

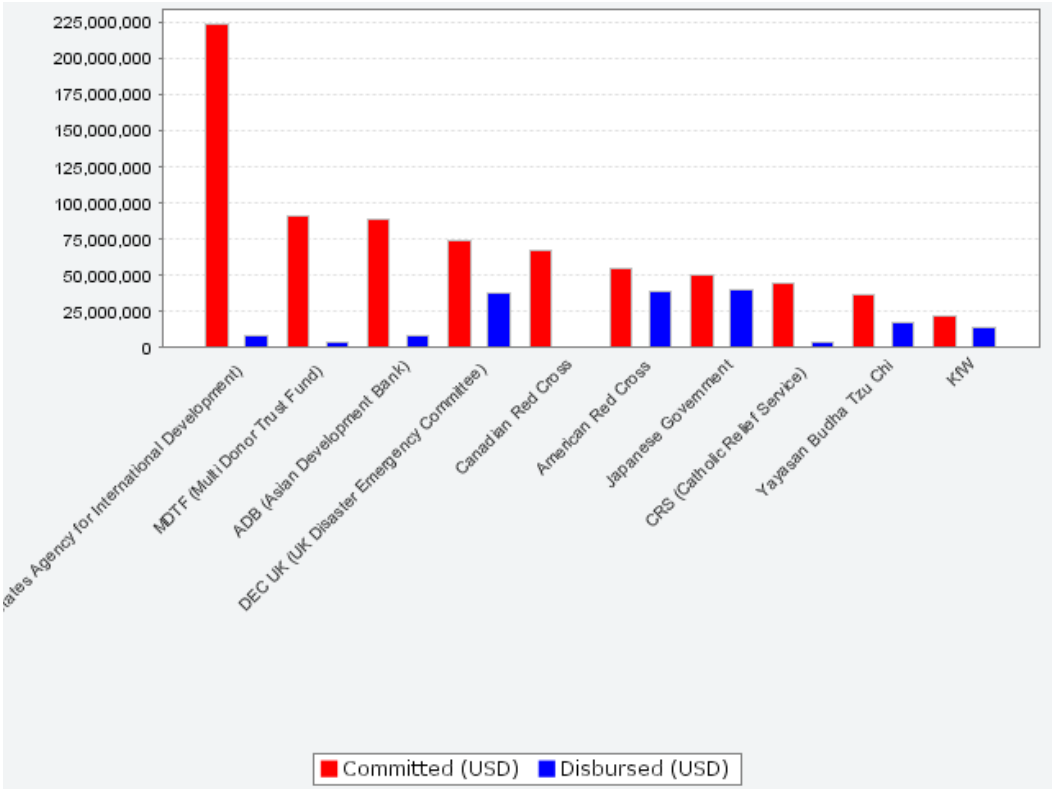
2. Di Kabupaten Nias Selatan terdapat 32 total proyek, jumlah partner yang melaksanakan kegiatan berjumlah 30 mitra, komitmen pendanaan sebanyak USD 35.459.917, sedangkan pendanaan yang disetujui sebesar USD 12.583.531. Beberapa Donor/NGO yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kab. Nias Selatan antara lain; LPAM-Nias, UN-HABITAT, SAS-SAS, World Harvest, UNHCR, WISH, ILO, ACE, UNDP dan lainnya. *(Sumber: Laporan BRR-Nias, per 19 Juli 2006)*.

Berikut dijelaskan pelaksanaan kegiatan oleh NGO/Donor berdasarkan bidang pemulihan.

1. Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias oleh NGO/Donor dalam bidang pemulihan infranstruktur Tata Ruang, Pertanahan,dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.17
Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Lembaga Donor/NGO Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup



Bar chart diatas memperlihatkan bahwa dari 10 besar donor yang telah *commited*, baru sebanyak 5 donor saja yang *disbursment* dananya mencapai 50% dari *commitment* nya. Sedangkan sisanya jauh dibawah 50%, bahkan ada yang besarnya dibawah 10%. Secara umum donor-donor tersebut adalah donor-donor yang *commited* dengan jumlah dana jauh diatas USD 50,000,000. Donor-donor yang *commited* dibawah USD 50,000,000 justru *disbursment* dananya mencapai 50% lebih. Canadian Red Cross adalah donor, diantara 10 besar, yang *disbursed* dana nya terkecil. USAID sebagai donor yang *commited*

2. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias oleh NGO/Donor dalam bidang pemulihan sosial budaya dapat dilihat pada tabel berikut :

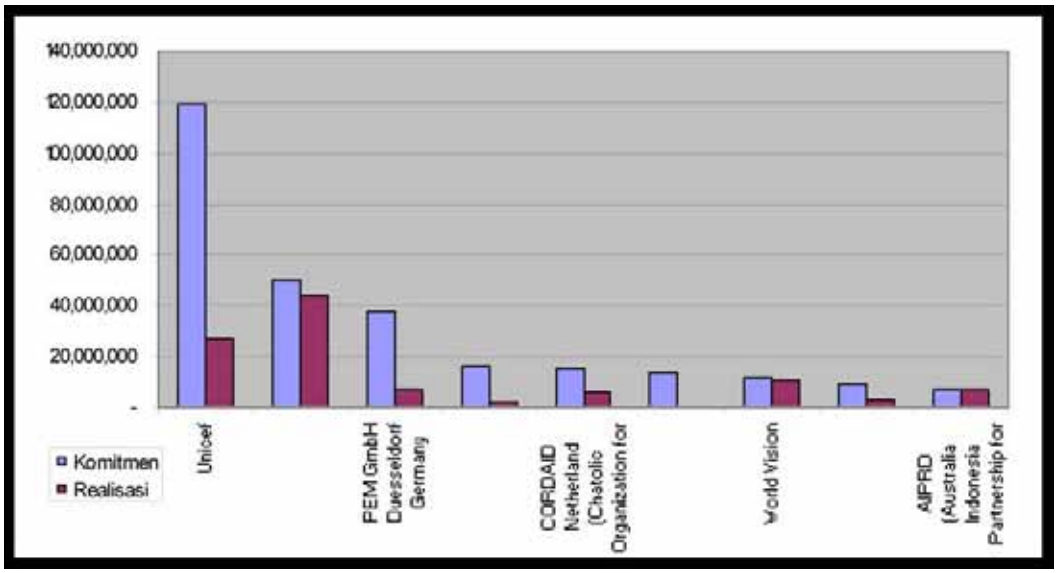
Tabel IV.18
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
oleh Lembaga Donor/NGO

NO	Donor/NGO	Program	Bidang	Komitmen Biaya (USD)	Realisasi	Lokasi/ Kecamatan	Status Program
1	UNICEF	Bantuan Darurat Pendidi kan	Pendidikan	119.206.448	27.310.761	21 Kab NAD & 2 Kab di Nias (seluruh kecamatan di NAD dan Nias)	Sedang Berjalan
2	Save the Children	Revitalisasi Masyarakat dan Sistem Pendidikan Kecama tan	Pendidi kan	50.390.970	44.390.970	Alafan, Banda Sakti, Blang Mangat, Kab Aceh Utara (22 Kec), Kab Bireun (17 Kec),Kota Sabang, Kec.Kuta Alam, Kec. Panteraja, Kec..Pulo Aceh, Kec.Salang, Kec Simeuleu Barat,	Sedang Berjalan
3	PEM GmbH Duesseldorf Germany	Rehabilitasi dan Modernisasi Teanaga kependidikan	Pendidikan	37.927.486	4.920.164	Kecamatan Banda Raya, Gunung Sitoli, Jeunib Simeuleu Timur, Teluk dalam (ab. Nias Selatan)	Sedang Berjalan
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi SMA			1.721.794	Kec. Gido, Gomo, Gunung Sitoli, Samalanga, Simeuleu	Sedang Berjalan
4	USAID	Peningkatan Teknik Kependidikan	Pendidikan	16.500.000	2.500.000	Seluruh kecamatan di ab Aceh Barat, Seluruh Kec di Kab Aceh Jaya dan Kec di Kab Lhoong Panteraja	selesai
		Training Peningkatan Tenaga Kependidikan	Pendidikan		14.500.000	-	Sedang Berjalan
5	CORDAID (Chatilic Organization for Relief & evelopment Aid	Pengembang an Masyarakat	Pendidikan	15.500.000	6.553.000	Seunudon, Simeuleu tengah, Simeuleu Timur, Teupah Selatan, Teupak Barat	Sedang Berjalan
6	EDC (Education Development Center)	Desentralisasi Dasar Pendidikan	Pendidikan	13.918.203		Lueng Bata	
7	World Vision	Perlengkapan Pendidikan	Pendidikan	750	750	Lhoong	

NO	Donor / NGO	Program	Bidang	Komitmen Biaya (USD)	Realisasi	Lokasi / Kecamatan	Status Program
		Proyek Pendidikan Meulaboh	Pendidikan	748,872	0	Bubon, Johan Pahlawan, Kaway XVI, Sama Tiga	
		Proyek Pendidikan Nias	Pendidikan	6.637.500	6.637.500	Gido, Hiliduho, Lolofitu Moi, Mandrehe	
		Pendidikan Aceh Besar		2.171.800	2.171.800	Baiturrahman, Darul Kamal, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Baro, Kutaraja, Leupung, Lhoknga, Meruxa, Montasik, Peukan Bada, Syiah Kuala, Ulee Kareng	
		Rekonstruksi Perlengkapan Pendidikan		1.058.725	1.058.725	Aceh Jaya	
8	GTZ	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tenaga Kependidikan di NAD dan Nias	Pendidikan	9.259.258	2.469.136	Banda Raya, Gunung Sitoli, Jeunib, Simeuleu Timur, Susoh, Teluk dalam, dan Kab Nias Selatan	
		Proyek Sekolah Tibang		271,605	271,605	Syiah Kuala	
9	AIPRD (Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development	Rehabilitasi Pendidikan di Aceh	Pendidikan	5.026.717	5.026.717	Arongan Lambalek, baiturrahman, Banda Raya, Bandar Baru, Bandar dua, darussalam, Glumpang Tiga, ndra jaya, Jaya, jaya Baru, Johan Pahlawan, Kaway XVI, Kreung Sabee, Kuta Alam, Kuta Malaka, Lhoknga, Lhoong, Mesjid Raya, Meureubo, Meureudu, Mutiara, Mutiara Timur, Padang Tiji, Panga, anteraja, Peukan Bada, Peukan Baro, Pidie, sakti, Sampoiniet, Seulimeum, Suka Makmur, tangse, Teunom, Ulee kareng, Ulim	

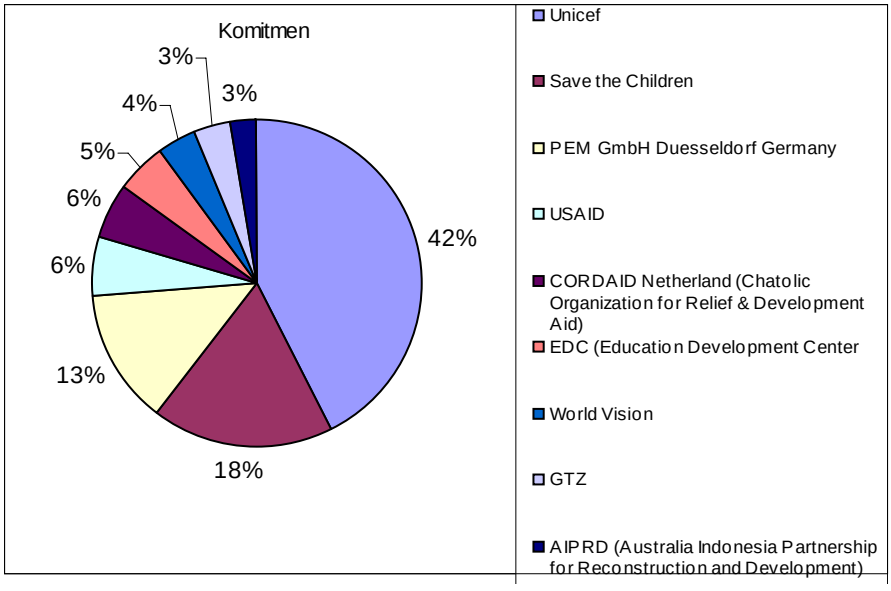
Perbandingan antara perencanaan dan pelaksanaan diperjelas lagi pada diagram berikut :

Bagan IV. 4
Perencanaan dan Pelaksanaan Beberapa Donor / NGO
Bidang Pemulihan Sosial Budaya



Persentase realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias oleh Donor/NGO seperti yang tertera pada di tabel diatas, dapat diperjelas lagi berdasarkan diagram berikut:

Bagan IV.5
Persentase Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
beberapa Donor / NGO Terbesar Bidang Pemulihan Sosial Budaya



Berdasarkan persentase diatas, dapat dilihat bahwa persentase tertinggi realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias oleh Unicef yaitu 42%.

3. Bidang Pemulihan Perekonomian

Donor/NGO juga merupakan aktor penting dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pasca tsunami. Berdasarkan data yang diperoleh dari RAN database maka diperolehlah 10 Donor terbesar dalam Pemulihan Perekonomian NAD-Nias dengan status proyek selesai dilaksanakan.. Untuk ECHO, Samaritan's Purse, Man Ferrostaal, World Vision, USAID, UNDP, GTZ anggaran di komitmen sesuai dengan realisasi anggaran. Sedangkan Belgian Red Cross, JICA, FAO seharusnya terjadi kesesuaian antara komitmen anggaran dan realisasi anggarannya, dimana realisasi anggaran lebih kecil dari komitmen anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel IV.19
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Lembaga Donor/NGO Bidang Pemulihan Perekonomian

Nama Donor	Lokasi kabupaten (beserta kecamatannya)	Proyek	Status Proyek	Komitmen (USD)	Realisasi anggaran (USD)
ECHO (European Commission Humanitarian Aid Office)	Kab. Simeulue, Nias	Immediate Emergency Relief in Nias and Simeulue Islands in Indonesia (IOM ECHO Phase 1 Emergency response)	Selesai dilaksanakan	7.118.710	7.118.710
Samaritan's Purse	Panga, Nagan Raya, Aceh barat, Aceh Jaya, Banda Aceh	- Bantuan darurat untuk merestorasi ketersediaan pangan dan penghidupan yang berkelanjutan antara para nelayan wanita korban tsunami dan kelompok yang rentan lainnya di Aceh,Indonesia. - Bantuan Darurat sebagai Penentuan dari input-input penting untuk memulai kembali dengan cepat dari produksi panen pangan skala kecil dan kegiatan perikanan dalam komunitas yang terkena tsunami - Bantuan untuk Pengolahan Ikan Skala Kecil di Aceh Besar, Bireun, Aceh Utara, Aceh Barat dan Nagan Raya - Bantuan untuk Pelatihan Pengolahan Ikan	Selesai dilaksanakan	2.617.509	2.617.509
Belgian Red Cross		- Rehabilitasi Kelautan (Konstruksi 17 perahu Labi-labiPorsine gears (1200 meters long)/CPL 68)	Selesai dilaksanakan	777,722	50,633

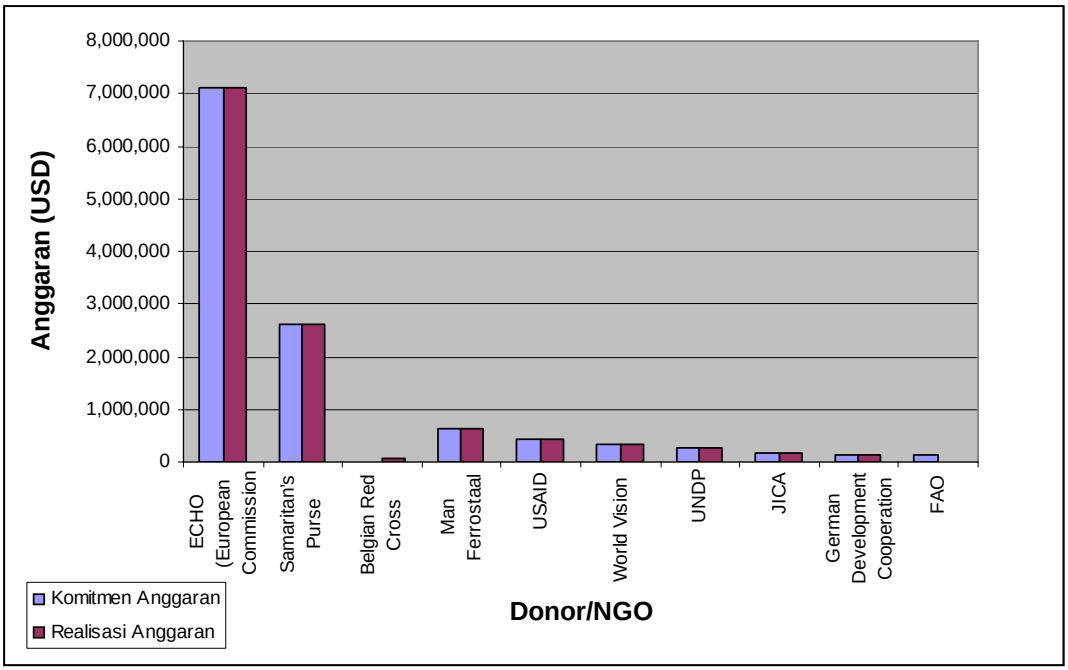
Nama Donor	Lokasi kabupaten (beserta kecamatannya)	Proyek	Status Proyek	Komitmen (USD)	Realisasi anggaran (USD)
Man Ferrostaal	Aceh Timur, Bireun	Program Pertanian INDOGERM	Selesai dilaksanakan	617,284	617,284
USAID	Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya	Pemulihan Ekonomi/Mata pencaharian	Selesai dilaksanakan	438,016	438,016
World Vision	Meulaboh dan Lhoong	Pemulihan Perekonomian/Mata pencaharian	Selesai dilaksanakan	322,5	322,5
UNDP	Pidie, NAD	- Program Intensifikasi Tenaga Kerja - Bantuan darurat kemanusiaan korban tsunami (Fase I) - Revitalisasi penghidupan (mata pencaharian dengan bekerja untuk mencari uang) untuk para keluarga korban bencana tsunami di Aceh - Penyediaan 150 unit Becak Honda Win 100 - Pembersihan Lingkungan (Upah Kerja)	Selesai dilaksanakan	266,014	266,014
JICA	Baitussalam; Kuta Alam; Leupung; Lhoknga; Mesjid Raya; Peukan Bada; Syiah Kuala	Modal kerja	Selesai dilaksanakan	167,133	153,994
German Development Cooperation through GTZ (German Technical Cooperation)	Aceh Besar	Program Rehabilitasi industri dan Pemulihan Mata Pencaharian	Selesai dilaksanakan	130,607	130,607
FAO	Aceh Besar, Bireun and Aceh Utara, Aceh Barat and Nagan Raya	- Bantuan Pengolahan Ikan Skala Kecil - Bantuan Pelatihan Pengolahan Ikan - Bantuan darurat untuk merestorasi ketersediaan pangan dan penghidupan yang berkelanjutan antara para nelayan wanita korban tsunami dan kelompok yang rentan lainnya di Aceh,Indonesia.	Selesai dilaksanakan	120,507	87,385

Nama Donor	Lokasi kabupaten (beserta kecamatannya)	Proyek	Status Proyek	Komitmen (USD)	Realisasi anggaran (USD)
		• Bantuan Darurat sebagai Penentuan dari input-input penting untuk memulai kembali dengan cepat dari produksi panen pangan skala kecil dan kegiatan perikanan dalam komunitas yang terkena tsunami			

Sumber : RAN Database, 2006

Perbandingan antara perencanaan dan pelaksanaan dapat dilihat dari digram batang dibawah ini :

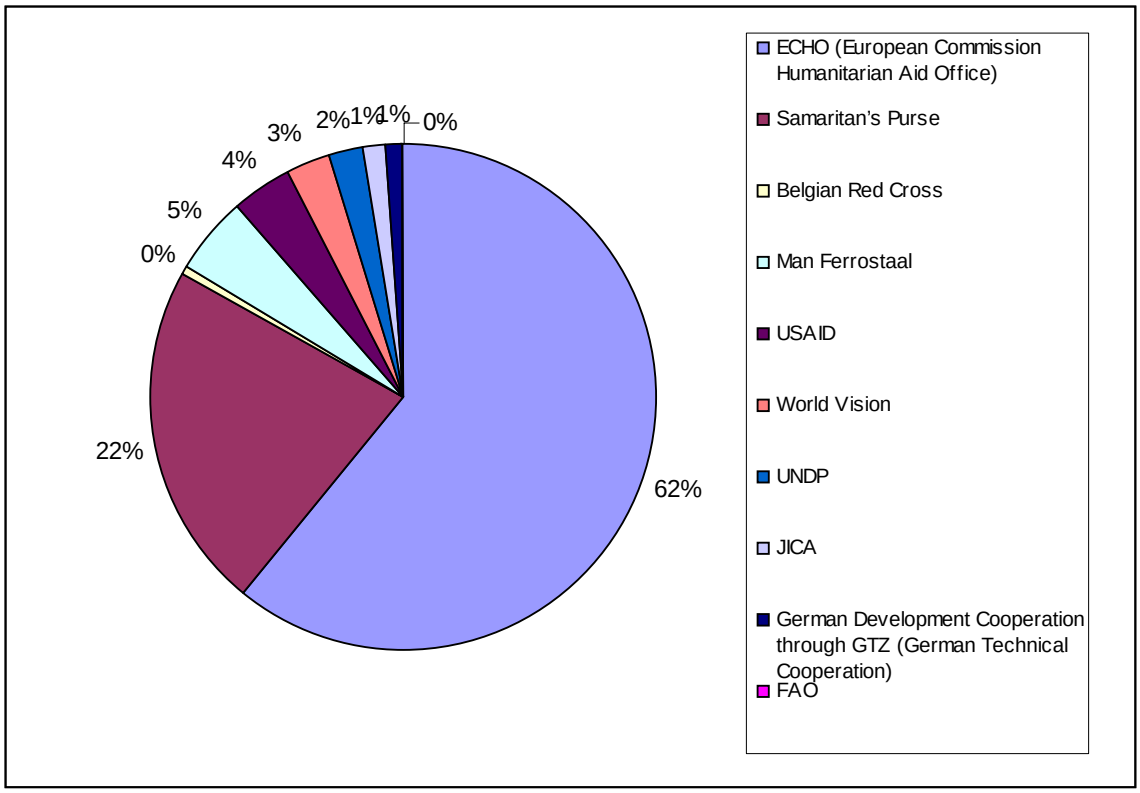
Bagan IV.6
Perencanaan dan Pelaksanaan Beberapa Donor/NGO
Bidang Pemulihan Perekonomian



Sumber: RAN database 2006

Persentase realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias oleh Donor/NGO seperti yang tertera pada di tabel diatas, dapat diperjelas lagi berdasarkan diagram berikut:

Bagan IV.7
Persentase Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi beberapa Donor/NGO Terbesar Bidang Pemulihan Perekonomian



Sumber: RAN database 2006

Berdasarkan persentase diatas, dapat dilihat bahwa persentase tertinggi realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias bidang pemulihan ekonomi yaitu ECHO sebesar 62 % dan Samaritan's Purse sebeasar 22 %. Sedangkan untuk Belgian Red Cross, Man ferrostaal, USAID, World Vision, UNDP, JICA, GTZ, FAO memiliki persentase antara 0-5 %.

4. Bidang Pemulihan Kelembagaan

Dari laporan kegiatan 1 tahun Badan Pelaksana BRR, diketahui beberapa kegiatan yang dilaksanakan Donor/LSM di bidang pemulihan kelembagaan, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.19x
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Pemulihan Kelembagaan oleh Donor

No	Donor	Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi
1	Australia (AusAid)	1. Total kantor desa yang akan dibangun sebanyak 198 kantor desa dan 20 kantor camat 2. Kantor yang sudah selesai dibangun yaitu Kantor Desa Kahju dan Kantor Camat Baitussalam, 3. 54 unit kantor desa sedang dibangun	Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Aceh Barat Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar. Aceh Barat.
2	USAID	Membangun balai musyawarah/gedung pertemuan. Total gedung musyawarah yang akan dibangun adalah 69 unit, termasuk 16 unit yang sudah selesai dibangun pada 2005.	Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Jaya

No	Donor	Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi
3	Yayasan Inovasi Pembangunan Daerah dengan bantuan dana	1. Pembangunan Kantor Camat Lhoknga 2. Kantor Camat Leupung sedang dalam tahap pembangunan (70%)	Aceh Besar
4	AIPRD	1. 1300 pemimpin komunitas di 200 desa telah ditraining, lebih dari setengahnya adalah wanita 2. Menyediakan peralatan kantor, training dan dukungan untuk pemerintah 3. Pembangunan kantor camat dalam proses kontruksi yaitu Kantor Camat Lhoong, Mesjid Raya Peukan Bada, dan Pulo Aceh	17 kecamatan Aceh Besar
5	European Union melalui Aceh Local Governance Action Programme, yang dilaksanakan GTZ, USAID, AusAid, JICA, Prancis, dan YIPD.	1. Pelatihan kepada 4.158 aparat pemerintah dari berbagai level 2. Pelatihan diberikan kepada kepala desa (*keuchik*) serta aparat kecamatan dan kota/kabupaten di berbagai bidang, terutama bidang perencanaan, penganggaran, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, dan kelembagaan.	-
6	UNDP	1. Fasilitasi rapat koordinasi di tingkat kecamatan 2. Peralatan Kantor 3. Kegiatan "hakim berjalan". Sasaran kegiatan ini agar masyarakat desa agar dapat merasakan keadilan.	Aceh Barat , Aceh Jaya, Nias
7	IDLO	Pelatihan aparatur hukum, membangun sistem perpustakaan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Syariah	
8	UNORC/IAS	1. Data management Fasilitasi rapat koordinasi di tk kecamatan	Aceh Besar Nias, Nias Selatan

Sumber : 1) Laporan Kegiatan 1 Tahun Badan Pelaksana BRR, April 2006; 2) Pencapaian AIPRD diAceh dan Nias, Desember 2006; 3) UNORC Field Office Assessment November 2006, 4) Wawancara dengan Asisten Manajer Pembentukan dan Penegakan Hukum Bapel BRR pada tanggal 5 september 2005,

Dengan adanya pelaksanaan kegiatan oleh Donor/NGO baik kegiatan fisik maupun non fisik, tentunya sangat membantu mengurangi beban pemerintah dalam menanggung kebutuhan terutama di bidang pemulihan kelembagaan. Donor membantu untuk memastikan pelayanan dasar pada level lokal berhasil dipulihkan dan dimanfaatkan sehingga pelayanan dapat didistribusikan kepada pihak yang sangat membutuhkan. Dalam bidang kelembagaan khususnya kegiatan fisik, donor lebih memfokuskan pada pembangunan kantor camat, desa, dan bale musyawarah. Berdasarkan hasil Kajian Kantor Camat oleh UNORC diketahui penilaian kantor camat sebagai berikut.

1. Poor
   * Bangunan gedung sementara, listrik menggunakan generator, tidak ada jaringan telepon
   * Camat kurang proaktif, tidak ada rapat koordinasi dengan NGO/ Donor/Pemda/masyarakat
2. Basic
   * Bangunan gedung sementara/permanen, kurangnya peralatan kantor, jaringan listrik dan telepon kurang memadai
   * Rutinnya rapat koordinasi dengan NGO/Donor/Pemda/masyarakat
   * Kurangnya partisipasi publik

3. Fully Function

* Bangunan kantor permanen, peralatan kantor sudah lengkap (komputer, mesin tik, telepon, dll)
* Rutinnya rapat koordinasi di tingkat kecamatan

Hasil penilaian oleh UNORC mengenai bangunan kantor camat untuk 12 Kabupaten/Kota di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Berdarkan tabel tersebut kantor camat yang sudah berfungsi dengan baik jumlahnya sangat sedikit yaitu di Kabupaten Aceh Barat (3 kantor camat), Aceh Besar (2 kantor camat) dan Kota Banda Aceh (2 kantor camat).

Tabel IV.20
Hasil Penilaian Kantor Camat Oleh UNORC

No	Kabupaten/ Kota	Penilaian Kantor			
		Poor	Basic	Fully Function	N/A
1	Aceh Barat	-	4 Kantor	3 Kantor	4 Kantor
2	Aceh Besar	1 Kantor	4 Kantor	2 Kantor	15 Kantor
3	Aceh Jaya	2 Kantor	4 Kantor	-	-
4	Aceh Timur	-	1 Kantor	-	-
5	Aceh Utara	-	7 Kantor		
6	Banda Aceh	-	5 Kantor	2 Kantor	2 Kantor
7	Bireuen	-	10 Kantor	-	-
8	Kota Lhokseumawe	-	3 Kantor	-	-
9	Pidie	1 Kantor	14 Kantor	-	-
10	Sabang	-	2 Kantor	-	-
10	Nagan Raya	3 Kantor	2 Kantor	-	-
11	Nias	32 Kantor	1 Kantor	-	-
12	Nias Selatan	8 Kantor	-	-	-

Sumber : UNORC Field Office Assessment November 2006

Rincian pelaksanaan kegiatan oleh semua donor yang terkait dengan bidang pemulihan kelembagaan tidak dapat dijabarkan dengan lebih rinci karena keterbatasan data. Dari RAN Database, diketahui ada 9 donor terbesar di bidang pemulihan kelembagaan, namun pada bab 4 (empat) ini hanya akan dibahas 3 donor terbesar yaitu *World Bank*, MDTF (*Multi Donor Trust Fund*), dan *German Development Cooperation through* GTZ (*German Technical Cooperation*). Rincian proyek dari ketiga donor tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.21
Perencanaan dan Pelaksanaan Beberapa Donor/NGO
Bidang Pemulihan Kelembagaan

No	Donor	ommitted (USD	Disbursed (USD)
1	World Bank	48.900.000	0
2	MDTF (Multi Donor Trust Fund)	19.803.800	13.553.390
3	German Development Cooperation through GTZ (German Technical Cooperation)	7.777.554	3.291.507
4	USAID (United States Agency for International Development)	7.473.107	3.632.900
5	American Red Cross	6.120.000	6.120.000
6	AIPRD (Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development)	5.396.662	5.396.662
7	ACT International	4.813.260	1.266.683
8	European Commission	3.810.277	2.910.277
9	UNICEF (United Nations Children's Fund)	3.178.750	0
	Total	107.273.410	36.171.419

Sumber : RAN Database, 2006

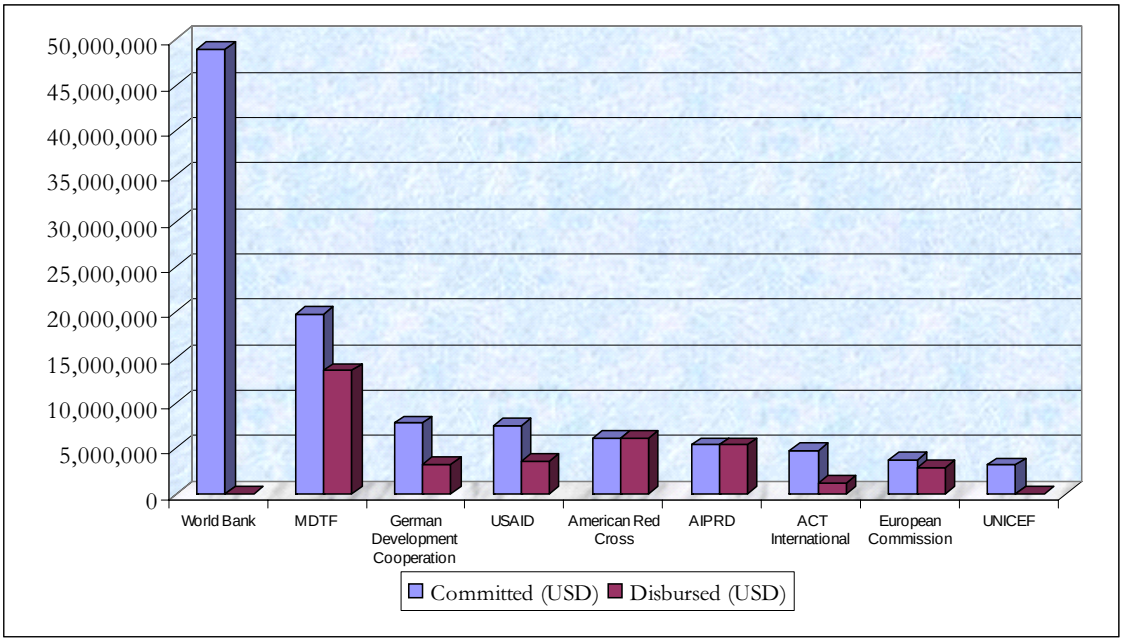
Tabel IV.22
Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Bidang Pemulihan Kelembagaan
oleh 3 Lembaga Donor/NGO Terbesar Berdasarkan RAN Database

No	Donor/NGO	Project Title	Committed (USD)	Disbursed (USD)	SubSector	Kabupaten	Project Status
1	World Bank	Bantuan Untuk Daerah Miskin dan Tertinggal di Aceh dan Nias	48.900.000	0	Organisasi Eksekutif dan legislatif, Fiskal dan Keuangan, Eksternal, Hukum, Hukum Lainnya, Ketertiban dan Kemaanan	Kab. Aceh Barat; Kab. Aceh Barat Daya; Kab. Aceh Besar; Kab. Aceh Jaya; Kab. Aceh Selatan; Kab. Aceh Singkil; Kab. Aceh Tamiang; Kab. Aceh Tengah; Kab. Aceh Tenggara; Kab. Aceh Timur; Kab. Aceh Utara; Kab. Bener Meriah; Kab. Bireuen; Kab. Gayo Lues; Kab. Nagan Raya; Kab. Nias; Kab. Pidie; Kab. Simeulue	Desain

No	Donor / NGO	Project Title	Committed (USD)	Disbursed (USD)	SubSector	Kabupaten	Project Status
2	MDTF	Bantuan Penguatan Kapasitas dan Pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemulihan Komunitas di Aceh dan Nias	5.103.800	2.553.390	Pelayanan Umum	Kab. Aceh Barat; Kab. Aceh Barat Daya; Kab. Aceh Besar; Kab. Aceh Jaya; Kab. Aceh Singkil; Kab. Aceh Tamiang; Kab. Aceh Utara; Kab. Bireuen; Kab. Nagan Raya; Kab. Nias; Kab. Nias Selatan; Kab. Pidie; Kab. Simeulue; Kota Banda Aceh; Kota Sabang	Sedang Berlangsung
		Technical Support untuk BRR	14.700.000	11.000.000	Semua Sub Sektor –Pengembangan Institusi	Kota Banda Aceh	Sedang Berlangsung
3	German Development Cooperation through GTZ (German Technical Cooperation)	Rekonstruksi dan Pengembangan dari Administrasi Penduduk di NAD (PAS NAD)	6.172.839	2.592.592	Pelayanan Pemerintah Publik Lainnya	Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Jaya, Kab. Bireuen, Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie	Sedang Berlangsung
		Bantuan Kepada Pemerintah Lokal Mengenai Rekonstruksi yang Berkelanjutan	1.570.065	664.265	Pelayanan Umum	Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kota Banda Aceh	Sedang Berlangsung
		Pasukan Perdamaian Internasional Indonesia (Proyek Yayasan Bina Perdamaian Internasional Indonesia)	34.650	34.650	Sub sektor akan ditentukan (Pengembangan institusi)	Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Kota Langsa	Sedang Berlangsung

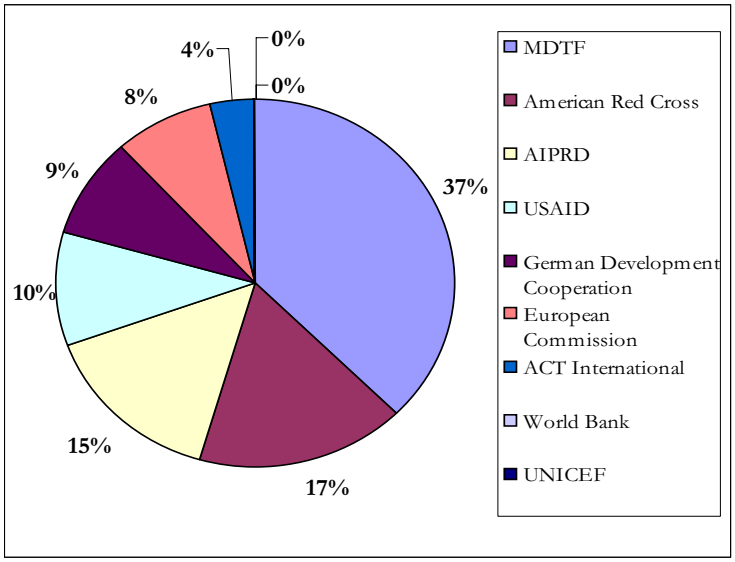
Sumber : RAN Database, 2006

Bagan IV.8
Perencanaan dan Pelaksanaan Beberapa Donor/NGO
Bidang Pemulihan Kelembagaan



Sumber : Hasil Analisis, 2006

Bagan IV.9
Persentase Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Beberapa Donor/NGO Terbesar Bidang Pemulihan Kelembagaan



Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa dari 9 donor terbesar di bidang pemulihan kelembagaan, persentasi *disbursed* terbesar dicapai oleh MDTF sebesar 37 %, American Red Cross sebesar 17%, dan AIPRD sebesar 15 %. D*isbursed* donor lainnya mencapiai 4-10 %, yaitu USAID, German Development Cooperation, Europian Commision, ACT International. Sedangkan *disbursed* World Bank, dan UNICEF sebesar 0 %.

5. Bidang Pemulihan ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) dan Reintegrasi GAM

Pada pelaksanaan pemulihan di Bidang K3M, yang dipublikasikan melalui RAN Database terdapat 2 Funding Agency yang ikut aktif dalam melaksanakan pemulihan di bidang K3M yaitu Netherland Government dan UNDP. Diantara Program yang dilaksanakan oleh 2 Funding Agency ini dalam pemulihan di bidang K3M dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel IV.23
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Lembaga Donor/NGO Bidang Pemulihan K3M

No	Donor/NGO	Judul Proyek	*Committed*	*Disbursed*	Sektor	Sub Sektor	Lokasi (Kabupate	Project Status
1	IOM, funding agency: Nedherlands Government	Seminar Tiga Hari, Pelatihan Tentang HAM dan Pengenalan Kebijakan Massa bagi Opsir Polisi di POLDA NAD	20.000	0	Institutional Development	Pelayanan Kepolisian	Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar;	Sedang Berlangsung
2	IOM, funding agency: UNDP	Penyampaian Pesan Melalui Gelombang Radio oleh UNDP terhadap Komunitas Korban Tsunami	30.972	26.022	Social	Petunjuk dan informasi sosial; Pelayanan masyarakat dari Pemerintah	Seluruh Kecamatan, Kab. Aceh Besar;	Selesai Dilaksanakan

Sedangkan untuk program reintegrasi mantan GAM ada beberapa lembaga donor yang ikut berpartisipatif dalam *"Aceh Reintegration Program".* Beberapa Lembaga Donor yang ikut berpartisipasi tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.24
Lembaga Donor yang Ikut Berpartisipasi
Dalam Program Reintegrasi Mantan GAM

Donor	Program Name (Category)	Implementing Agency	Amount of Money (US$)	Period		Coverage Area
				Start	End	
GoJ / EoJ	Programme for Peace Building and Reintegration Assistance to Amnestied GAM Prisoners Recipients, Demobilized GAM Combatants and Conflict Affected Communities throughout Aceh	IOM	8.550.000	Mar-06	Agust-07	All Aceh Province
EoJ	The Project for Supporting Rehabilitation of Irrigation Facility in Conflict-affected villages in Pidie District	Yayasan Keumang	76,329	Mar-06	Feb-07	Villages: Murong Cot, Murong Lhoek, Blang Cot, Cot Canteik, Lhok Panah, Sub-District : Sakti, Villages : Pante Kulu, Ukee, Pante Siren, Pulo Raya; Sub-District : Titeu Keumala; District : Pidie
	The Project for Supporting Voter Education of Regional Election in NAD	KIP	80,518	Des-05	Feb-06	All Aceh Province
	Cocoa Plantation Rehabilitation and Treatment for Conflict Affected Farmer Group in Pidie District, Aceh Province	Yayasan Tunas Bangsa	90,002	Okt-06	Apr-07	Villages: Paru, Sarah Panyang, Alue. Sub-District: Bandar Baru. District: Pidie
	Support for Development of Conflict Affected Area Through Improvement of Irrigation Facilities and Agricultural Training for Conflict Victims in Kec. Tangse, Pidie District, Aceh Province	Embun Pagi Foundation	90,08	Okt-06	Feb-07	Villages: Blang Dhot, Blang Bungong, Blang Teungoh, Tangse. Sub-District: Tangse. District: Pidie.
	The Project for Support for Conflict Victims Through Weir and Channel Rehabilitation in Kec. Bandar Baru, Pidie District, Aceh Province	Perak Foundation	90,081	Okt-06	Jan-07	Villages: Abah Lueng Panteue Breueh, Jiem-Jiem. Sub-District: Bandar Baru. District Pidie

Donor	Program Name (Category)	Implementing Agency	Amount of Money (US$)	Period		Coverage Area
				Start	End	
	The Project for Community Empowerment Through Usage of Rattan for Producing Furniture in Kec. Geumpang and Kec. Manee, Pidie District, Aceh Province	Al Afghani Foundation	87,331	Okt-06	Feb-07	Villages: Lutong, Blang Dalam, Jeurue Cut, Alue Reulieng, Alue landong, Manee, Bangkeh, Lupu, Pucok, Polu lhoih, Keune. Sub-districts: Geumpang and Manee. District: Pidie
GoJ / JICS	Rehabilitation of Vocational Training Facilities in Banda Aceh	JICS / Ministry of Labour	2.480.000	Jan-06		Geuceu. Sub-District: Banda Raya. Banda Aceh
JICA	Entrepreneurship Skills Development Training for Small and Medium Enterprises	JICA / Ministry of Trade	40	Sep-06	Feb-07	Trainess from Pidie
	Community Recovery Projects (CEP) for Irrigation Rehabilitation	Yayasan Citra Desa Indonesia for Indrajaya and Glumpang. Yayasan Malem Dagang for Ulim	280	Jan-06	Mar-06	All in Pidie District. In Indrajaya Sub-district; Wakeh, Blang Gapui, Mesjid Baro, Ulee Birah, Lam Reuneue, Blang Kaju, Baro Jruek, Mesjid Lam Ujong, Lamkabu, Baro Gapui, Meunasah Dijiem, Teungoh Blang Tungkop, Guci, Balee Baro, Baroh Bluek. In Glumpang Tiga Sub-district; Dayah Tanoh, Sukon Mesjid, Kayee Jatoe, Blang Drang, Ude Gampong, Mamplam, Bale, Kupula, Pulo Lueng, Teuga. In Ulim/Meurah Dua; Pantang Cot Baloi, Bidok, Balng Cari, Cot Suetuy, Menasah Mesjid Blang Rhue, Blang Rhue, Lhok Gajah
	Capacity Building Training for Sub-district Heads	Ministry of Home Affairs	140	Sep-06		All Sub-Districts
	Capacity Building for Judicial Institutions through Alternative Dispute Resolution Training	JICA	50	Mar-06	Sep-06	Trainees from throughout Aceh
	Capacity Building Training for Indpendent Election Committee (KIP)	KIP / JICA	60	Mar-06		NA

Donor	Program Name (Category)	Implementing Agency	Amount of Money (US$)	Period		Coverage Area
				Start	End	
Canada	Health	IOM, UNICEF	225,3	2006		IOM - DinSos ICRS Offices in 9 Districts
EC	Reintegration Cash Assistance	IOM	4.800.000	Sep-05	Jun-06	IOM - DinSos ICRS Offices in 9 Districts
	Community grants	IOM (EC, UNDP, USAID); USAID direct DAI; JICA, UNSYAIH, LNGOs (EoJ/JICA)	1.750.000	2006	onwards	EC (11 districts)
	Others/Still to be identified	tbd	3.600.000			
UNDP	Community grants	IOM (EC, UNDP, USAID); USAID direct DAI; JICA, UNSYAIH, LNGOs (EoJ/JICA)	1.000.000	2006	onwards	EC (11 districts), Pidie (EoJ/JICA)
	Technical Expertise to GoI (DDR, conflict transformation)	UNDP-DSF; Yayasan MiDa (JICA), DinSos (UNICEF)	235			n/a
UNDP / GoI	Strenghtening Sustainable Peace and Development in Aceh (SSPA)	IOM	900	Q4 2006	Q3 2007	to be confirmed
	Strenghtening Sustainable Peace and Development in Aceh (SSPA)	Bappenas / UNDP	1.550.000	Q1 2007	Q1 2008	5 Sub-Districts in Aceh Tengah & Bener Meriah : Bebesen, Ketol, Permata, Timang Gajah, and Pintu Rime Gayo
	Strenghtening Sustainable Peace and Development in Aceh (SSPA)	Bappenas / UNDP	330	Q1 2007		Aceh Tengah, Bener Meriah
	Strenghtening Sustainable Peace and Development in Aceh (SSPA)	Bappenas / UNDP	194	Q4 2006	Q3 2007	Province Wide
	Strenghtening Sustainable Peace and Development in Aceh (SSPA)	Bappenas / UNDP	100	Q2 2006		to be confirmed
	Strenghtening Sustainable Peace and Development in Aceh (SSPA)	Bappenas / UNDP	1.000.000	Q4 2006	Q4 2008	Provincial Office and 21 District Offices
	Joint Survey with IOM and LSI	LSI	141	Q4 2006	Q1 2007	Province Wide
UNICEF	Livelihoods / Vocational Training / Capacity Building	IOM, Ministry of Labour/JICS, Ministry of Trade/JICA	120			IOM- DinSos ICRS Offices in 9 districts (EOJ/JICA); DinSOs + child centre partners (UNICEF);
	Health	IOM, UNICEF	80	2006		IOM - DinSos ICRS Offices in 9 districts

Donor	Program Name (Category)	Implementing Agency	Amount of Money (US$)	Period		Coverage Area
				Start	End	
	Technical Expertise to GoI (DDR, conflict transformation)	UNDP-DSF; Yayasan MiDa (JICA), DinSos (UNICEF)	60			n/a
	Peace building / Peace education an training / MoU awareness	Yayasan MiDA (JICA); LNGO (UNICEF)	260	2006		
USAID (and DOS)	Community grants	IOM (EC, UNDP, USAID); USAID direct DAI; JICA, UNSYAIH, LNGOs (EoJ/JICA)	6.750.000	2006	onwards	EC (11 districts), Pidie (EoJ/JICA)
	Others/Still to be identified	tbd	700			
EoJ / JICA	Livelihoods / Vocational Training / Capacity Building	IOM, Ministry of Labour/JICS, Ministry of Trade/JICA	11.070.000			IOM- DinSos ICRS Offices in 9 districts (EOJ/JICA); DinSOs + child centre partners (UNICEF);
	Community grants	IOM (EC, UNDP, USAID); USAID direct DAI; JICA, UNSYAIH, LNGOs (EoJ/JICA)	640	2006	onwards	Pidie (EoJ/JICA)
WB	Livelihoods / Vocational Training / Capacity Building	IOM, Ministry of Labour/JICS, Ministry of Trade/JICA	50			IOM- DinSos ICRS Offices in 9 districts (EOJ/JICA); DinSOs + child centre partners (UNICEF);
	Health	IOM, UNICEF	590,237	2006		IOM - DinSos ICRS Offices in 9 districts
	Studies	WB	320			

Sumber : World Bank, November 2006

Alokasi Anggaran untuk program reintegrasi dari APBN sebesar Rp 200 miliar, yang telah direalisasikan dalam berbagai kegiatan. Untuk lebih jelasnya, penggunaan dana ini telah dirangkum dalam tabel berikut tentang Pelaksanaan Program Reintegrasi oleh BRA Provinsi NAD :

Tabel IV.25
Pelaksanaan Program Reintegrasi Tahun 2005
dari alokasi anggaran Rp 200,000,000,000 (status 1 Oktober 2006)

No	Kegiatan	Sat	Alokasi			Realisasi		
			Vol	@	Biaya	Vol	Biaya	%
1.	Administrasi Umum	Keg	1		183.147,000		120.000,000	65,5
2.	Pembuatan Juklak/ Juknis	Keg	1		172.190,000		41.690,000	24,2
3.	Pendaftaran dan Seleksi	Keg	1		553.590,000		272.620,000	49,2
4.	Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan :				197.811,122,800			
a.	Bantuan Santunan Sosial (Diyat)							
*	Geuchik/ Mukim	Org	332	3.000,000	996.000,000	332	996.000.000	100,0
*	PNS	Org	426	3.000,000	1.278.000,000	264	792.000,000	61,9
b.	Bantuan Pemberdayaan							
*	Eks GAM (TNA)	Org	1000	25.000,000	25.000.000,000	965	24.125.000,000	96,5
*	Eks GAM (Non TNA)	Org	1200		10.000.000,000	-	-	-
*	Eks GAM sudah dibina (Pra MoU)	Org	500	10.000,000	5.000.000,000	-	-	-
*	Masyarakat Korban Konflik	Org	1000	10.000,000	10.000.000,000	324	3.240.000,000	32,4
*	Relawan Pembela Tanah Air	Org	1000	10.000,000	10.000.000,000	40	4.0000.000.000	40
c.	Bantuan Pengganti Rumah Rusak	Unit	3254	35.000,000	113.890.000,000	3254	113.890.000,000	100,0
d.	Bantuan Pelayanan Kesehatan	Org	3720	75.000	279.000,000	3720	279.000,000	100,0
e.	Pendampingan	Keg	1		836.830,000	1	836.830,000	100,0
f.	Operasional PEM. RI di AMM	Keg	1		11.871.550,000	1	11.870.697,000	99,9
g.	Sewa Helikopter untuk AMM	Keg	1		6.360.450,000	1	6.359.625,000	99,9
h.	Sosialisasi MoU	Keg	1		299.292,000	1	299.292,000	100,0
4.	Rapat Kerja/ Koor/ Pokja/ Dinas	Keg	1		990.350,000	1	828.616,000	83,6
5.	Pengawasan/ Supervisi	Keg	1		289.600,000	1	21.860,000	8,0
	JUMLAH				200.000.000,000		167.973.230,917	83,99

Sumber : Presentasi BRA pada Kemenko Kesra, 16-19 Oktober 2006.

Sedangkan untuk kegiatan tahun 2006, sampai dengan 12 Oktober 2006 BRA telah berhasil merealisasikan anggarannya untuk program reintegrasi sebesar 600.000.000.000. Walaupun belum 100% dapat terealisasikan dikarenakan terlambatnya proses pencairan anggaran dan pendataan dilapangan. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.26
Realisasi Anggaran Tahun 2006 untuk
Pelaksanaan Program Reintegrasi oleh BRA
(Status 12 Oktober 2006)

	Kegiatan	Sat	Alokasi		Realisasi	
			Vol	Biaya	Biaya	%
PEMBERDAYAAN SOSIAL KORBAN BENCANA						
1	Administrasi Umum	Keg	1	13.069.876.000	2.331.169.000	17,84
2	Pembuatan Juknis/ Juklak	Keg	1	48.250.000	-	-
3	Penyusunan Program dan Rencana Kerja/ Teknis/ Program	Keg	1	134,680,000	-	-
4	Pendaftaran dan Seleksi	Keg	1	2.218.006.000	-	-
5	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi	Keg	1	570.968.000	-	-
6	Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan	Keg	1	540.493.450.000	731.660.000	0,14
7	Kesekretariatan dan Kerjasama Luar Negeri	Keg	1	21.361.157.000	13.729.118.906	64,27
8	Pengawasan/ Supervisi dan Konstruksi	Keg	1	500.820.000	-	-
	JUMLAH			578.397.207.000	16.791.947.906	2,90

Sumber : Presentasi BRA pada Kemenko Kesra, 16-19 Oktober 2006.

Dari penjelasan diatas, dibawah ini dapat kita melihat dalam bentuk tabel perbandingan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Reintegrasi Damai Aceh dalam rangka pelaksanaan program reintegrasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel IV.27
Analisa Perbandingan Program/ Kegiatan BRA
Tahun 2005 dan Tahun 2006

Program/ Kegiatan Tahun 2005	Program Kegiatan yang Telah dilakukan (Tahun
1. Sekretariat: * Menyusun dan Sosialisasi Program Serta Anggaran BRA tahun 2005-2006 * Menyusun Buku Pedoman dan kriteria korban konflik * Mengirim pendamping ke Kabupaten/ Kota * Koordinasi dengan Donor, NGO dan Instuitusi terkait * Menyusun Renstra BRA	- Merevisi dan menyepakati program dan anggaran antar sektor thn 2005 bersama Bappenas & Depsos (Rp. 200 M). - Merevisi dan menyusun kembali Program dan Anggaran Lintas Sektoral Tahun 2006 bersama Bappenas (Rp. 600 M).
2. Bidang Ekonomi * Memberi kemudahan ekonomi * Memberi kesempatan kerja * Alokasi lahan pertanian * Mendistribusikan bansos dan pemberdayaan ekonomi tahun anggaran 2005 * Membuat laporan berkala	- Menyusun Program Lintas Sektoral melalui Rapat Pleno BRA (Dinas/Badan/Lembaga Prov. NAD). - Membentuk Tim Sinkronisasi Program Kerja BRA.
3. Polhukam dan HAM * Melanjutkan sosialisasi MoU * Mendorong Penyusunan RUU PA * Mendorong Pilkada 2006 tepat waktu * Mendorong pendirian partai local * Mendorong pembentukan KKR * Mendorong pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim (KBPK) * Memberi dukungan kepada AMM * Mendorong rehabilitasi PNS yang terlibat GAM * Mendorong mantan GAM menjadi TNI/POLR * Mendorong Pemulihan Kewarganegaraan * Mendorong Pembentukan Pengadilan HAM di NAD * Mendorong Kegiatan Tradisional ke arah ishlah	- Koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak * Semua Dinas/Badan/Lembaga Pemda Prov. NAD * Petinggi GAM * Polhukam, Bappenas dan Depsos RI * Donor/NGO : AMM; World Bank; EU; UNDP; IOM; USAID; UNORC; dan Kedubes Jepang & Swiss. * Pansus DPR-RI tentang RUUPA
4. Bidang Sosial & Kesra * Memberi Jaminan Sosial yang layak * Merehab harta publik/ personal yang rusak * Memberi bantuan Pendidikan * Memberi bantuan kesehatan * Melanjutkan bantuan Jadup * Melanjutkan bantuan Diyat	- Membuat Buku Pedoman Pemberdayaan Membentuk : * Tim Pendamping Pemberdayaan Ekonomi * Tim Verifikasi Proposal Pemberdayaan Ekonomi * Tim Verifikasi Bantuan Sosial * Tim Koordinasi Pendataan dan Needs Assesment
5. Bidang Data & Monev * Mengumpul dan mengolah data * Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program reintegrasi	- Persiapan SDM, kantor dan peralatan penunjang. - Realisasi pelaksanaan program 75%.

Sumber : Analisis, 2006.

BAB V
HASIL EVALUASI REHABILITASI dan REKONSTRUKSI TA 2005 dan TA 2006

Evaluasi terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias merupakan suatu usaha untuk mengukur dan menilai secara objektif atas hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan secara sistematis dan objektif dengan menggunakan metode evaluasi yang sesuai. Aktifitas evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan pada tahapan perencanaan hingga pelaksanaan. Sedangkan fokus pemantauan dan pengendalian Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi ini yaitu pada aspek-aspek; konsistensi, koordinasi, konsultasi dan kapasitas. Keempat aspek ini akan dielaborasi satu per satu baik pada tatanan perencanaan maupun pada tatanan pelaksanaan.

Analisis evaluasi ini didasarkan kepada berbagai data dan informasi yang diperoleh oleh Tim Koordinasi P3RIRRWANS-Bappenas maupun oleh instansi-instansi lain yang melakukan pemantauan, pengendalian, penilaian, audit, investigasi dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari hasil evaluasi ini akan dapat diberikan penilaian dan penakaran terhadap proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh berbagai aktor di lapangan, baik oleh Badan Pelaksana BRR, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Donor/NGO maupun lainnya.

5.1 ASPEK KONSISTENSI

Secara definisi operasional, konsistensi yaitu proses penelaahan kesesuaian: (a) *antar dokumen perencanaan*, yaitu antara perencanaan yang tercantum dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias dengan Rencana Aksi dan Rencana Kerja yang disusun oleh para pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; (b) *antara perencanaan dan pelaksanaan*, yaitu antara Rencana Aksi dan Rencana Kerja yang disusun oleh pelaksana dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan; serta (c) *antar pelaksanaan*, yaitu kegiatan pelaksanaan dari semua pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi, terkait dengan pelaksanaan RIRRWANS.

5.1.1 Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan

Aspek evaluasi awal dalam konsistensi yaitu dengan menganalisis antar dokumen perencanaan dari berbagai lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa dokumen perencanaan yang perlu dilihat dalam evaluasi ini terutama sekali merujuk kepada Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah

dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, yang didasarkan pada Perpres No. 30 Tahun 2005. Rencana Induk ini akan dijadikan sebagai rujukan atau sandaran dalam melakukan penilaian terhadap dokumen perencaaan lainnya seperti Rencana Strategis Bapel RR, RKA Bapel, RKA K/L, SKPD, RKA Donor/NGO. Analisis temuan disesuaikan dengan bidang pemulihan masing-masing.

1. Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

a. Sub Bidang Pemulihan Perumahan

Paket kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR bidang pemulihan perumahan mempunyai semangat yang sama dengan Rencana Induk, walaupun tidak identik dengan paket kegiatan dalam Rencana Induk. Kebijakan dan strategi mengenai rumah tahan gempa yang ditetapkan dalam Rencana Induk Bidang Perumahan tidak ditetapkan dalam Rencana Strategis BRR. Kemudian perbedaan jumlah *beneficiary* antara Rencana Induk dengan Renstra BRR, yang dimungkinkan karena adanya temuan baru atau perubahan kondisi lapangan. Di lain pihak, dalam strategi pelaksanaannya, BRR di bidang perumahan mencanangkan konsep *green belt* dan *escape hill* beserta aksesnya seperti yang tercantum dalam Rencana Induk, walaupun tidak dilakukan sesuai tahapan normal sehingga perencanaan di beberapa level dilakukan secara simultan. BRR juga mengakomodasi penataan lingkungan untuk permukiman, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rencana Induk (*P3RIRRWANS di Banda Aceh, 19 Desember 2006)*.

b. Sub Bidang Pemulihan Tata Ruang

Butir-butir pemulihan bidang tata ruang tidak konsisten dengan butir-butir yang ada dalam Rencana Induk. Konsep *village planning* yang direncanakan dan tengah dilaksanakan BRR, merupakan konsep yang dikembangkan di luar Perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan dalam Rencana Induk. Kebijakan dan Strategi Rencana Induk adalah membangun Aceh yang baru dengan tata ruang yang bisa mengantisipasi bencana tsunami jika kembali terjadi. Hal tersebut tidak terlihat dalam kebijakan, strategi maupun pelaksanaan tata ruang makro BRR. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lebih makro dan menjadi landasan setiap pembangunan fisik di wilayah NAD maupun Nias yang belum tersusun, sehingga berbagai perencanaan infrastruktur berbagai bidang pemulihan menjadi kurang terpandu. Walaupun periode penyusunan RTRW diakui BRR cukup lama dan pembanguna infrastruktur tidak dapat menunggu, namun seyogyanya sudah dapat dimulai dan dapat dipercepat dalam waktu satu tahun pertama rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD dan Nias, sehingga ketidaksinkronan dalam keterkaitan antar ruang fisik tidak menimbulkan permasalahan. Salah satu kebijakan dan strategi Rencana Induk adalah membangun area permukiman yang jauh dari pesisir pantai, namun pada kenyataannya cukup banyak perumahan dibangun di area pantai.

c. Sub Bidang Pemulihan Pertanahan

Dalam perencanaannya, sub bidang pemulihan pertanahan diakomodasikan ke dalam kegiatan RALAS (*Reconstruction of Aceh Land Administration System*

Project) dan dilengkapi melalui kegiatan Village Planning. Sehingga walaupun 2 (dua) kegiatan dalam Rencana Induk tidak tercakup dalam Rencana Induk, yaitu penyusunan rencana tata guna tanah dan konsolidasi tanah, namun telah terakomodasi dalam *Village Planning*. Sehingga secara umum, pemulihan bidang pertanahan mencerminkan butir-butir yang ada dalam Rencana Induk.

d. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan Hidup dan SDA

Pada umumnya sub bidang lingkungan hidup dan SDA dilaksanakan setelah tahun 2006. Yang menjadi perhatian BRR tahun 2005 dan 2006 adalah perumahan (*laporan BPK, Juni 2006*).

e. Sub Bidang Pemulihan Infrastruktur

Menurut Rencana Induk, proyek *Banda Aceh-Meulaboh Road and Bridge Re-construction and Rehabilitation Project* membutuhkan dana sebesar Rp 53.940.000.000 untuk rehabilitasi, dan Rp. 749.260.000.000 untuk rekonstruksi (total Rp. 803.200.000.000 atau sekitar USD 80,320,000), sehingga ada kelebihan alokasi dana sebesar kurang lebih USD 114,679,982. Perlu diingat bahwa anggaran dalam Rencana Induk hanya sebatas indikasi. Sampai dengan Juli 2006 belum diketahui secara pasti berapa besar kebutuhan aktual lapangan.

Berdasarkan evaluasi terhadap beberapa sub bidang pemulihan di atas menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi dalam Rencana Induk bidang infrastruktur, tata ruang, pertanahan dan LH memiliki tingkat kerincian yang berbeda dengan Renstra BRR sehingga sulit membandingkan keduanya secara langsung. Perbedaan terminologi yang ada pada keduanya pun menjadi faktor tambahan yang menyulitkan proses sandingan antar dokumen perencanaan ini. Data tersebut memperlihatkan bahwa ada indikasi koordinasi yang kurang antara donor dengan K/L sebagai pembina pekerjaan jalan, dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum.

2. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Secara umum, dokumen perencanaan BRR yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) masih bersifat makro dan belum menggambarkan perencanaan kegiatan per bidang secara rinci seperti yang terdapat di Rencana Induk. Renstra BRR hanya memuat 3 komponen yaitu : Bidang, program, dan kegiatan. Sedangkan perencanaan dalam rencana Induk meliputi 12 komponen yaitu : 1) nama program, 2) nama kegiatan, 3) sasaran, 4) kelompok sasaran, 5) lokasi, 6) cakupan kegiatan, 7) Indikator keberhasilan, 8) Jadwal waktu, 9) Keterkaitan dengan program lain, 10) Instansi pelaksana dan penanggung jawab, 11) perkiraan biaya, 12) sumber pembiayaan.

Dari aspek ketegorisasi bidang, terdapat perbedaan antara renstra BRR dengan rencana induk. Bidang Sosial Budaya yang terdapat dalam Rencana Induk terdiri dari 8 sub bidang yaitu 1)Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Agama, 4) Pemberdayaan Perempuan, 5) Budaya, 6) Sosial, 7) Kependudukan & Keluarga Berencana, 8) Pemuda dan Olahraga. Sedangkan dalam Renstra BRR, bidang kajian sosial budaya sangat disederhanakan menjadi hanya 4 sub bidang yaitu Agama, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kesehatan.

a. Sub Bidang Agama

Program *sub bidang agama* yang terdapat dalam Renstra sebetulnya adalah penjabaran dari Rencana Induk yaitu terdapat 3 program yang secara substansi sama walau redaksional berbeda, misalnya "Peningkatan pelayanan kehidupan beragama" dalam rencana induk, dalam renstra BRR tertulis "rehabilitasi simbol-simbol agama". Program ini dilengkapi dengan jenis kegiatan yang sama yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi sarana ibadah.

b. Sub bidang sosial

Pada sub bidang sosial, terdapat perbedaan yang signifikan antara Rencana Induk dengan Renstra BRR. Bidang sosial yang termuat dalam Renstra BRR menjadi *"bidang sosial budaya*" adalah kumpulan dari 5 bidang yang ada dalam Rencana Induk yaitu : 1) Bidang sosial, 2) Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, 3) Bidang Budaya, 4) Bidang pemuda dan olahraga yang digabungkan menjadi bidang sosial yang meliputi 3 sub bidang yang terdiri dari 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2)Peningkatan kualitas kehidupan adat, tradisi dan kegiatan seni budaya serta pelestarian warisan budaya masyarakat. 3) Pemberian bantuan dan jaminan bagi masyarakat rentan, 4) Pendataan lengkap penduduk dan pemberian jaminan pelayanan keluarga sejahtera dan kesehatan reproduksi. 5)Peningkatan peran pemuda budaya olahraga. Pada bagian kegiatan sebetulnya mengacu kepada program yang terdapat dalam rencana induk.

c. Sub bidang kesehatan

Dalam renstra BRR program sub bidang kesehatan hanya 2 buah dan kemudian dilengkapi dengan beberapa kegiatan. Dari program dan kegiatan yang dijabarkan dalam renstra tersebut merupakan bagian dari program yang ada dalam rencana induk. Terdapat satu program/kegitan yang terdapat dalam rencana induk tidak ada tercantum dalam Renstra yaitu program *"Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat"*.

d. Sub bidang Pendidikan

Perencanaan program/kegiatan yang tercantum dalam renstra BRR secara umum substansi program mengacu kepada rencana induk. Program dalam renstra dijabarkan dengan 3 program besar dan kemudian dilengkapi dengan beberapa kegiatan yang semuanya itu merupakan penjabaran dari 8 program yang tercantum dalam rencana induk. Sedangkan rencana kerja dari Kementerian Lembaga,Pemerintah daerah NAD serta lembaga donor/NGO data tidak tersedia.

3. Bidang Pemulihan Perekonomian

a. Subbidang Kelautan dan Perikanan

Rencana Induk sub bidang kelautan dan perikanan terdiri dari 2 (dua) program yaitu (1) Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana dan Bantuan Privat dan (2) Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Publik, sedangkan program yang ada pada *Renstra BRR* berbeda dengan rencana induk yaitu Pemulihan Fasilitas Pelayanan Masyarakat. Kegiatan pada *Renstra BRR* hanya menaruh perhatian

pada pemulihan pangkalan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan, tetapi yang tercantum pada rencana induk hanya 1 (satu) kegiatan yaitu pemulihan pangkalan pendaratan ikan, dan kegiatan pemulihan tempat pelelangan ikan tidak ada. Pada kenyataannya, pada *rencana induk* masih terdapat 16 (enam belas) kegiatan yang tidak tercantum dalam Renstra BRR yaitu (1) Bantuan pengolahan ikan skala kecil & KUB; (2) Bantuan alat tangkap (pancing/jaring); (3) Bantuan armada tangkap; (4) Rehabilitasi tambak; bantuan, pompa air dan modal usaha; (5) Rehabilitasi tambak; bantuan KJA dan modal usaha; (6) Pelabuhan pendaratan ikan (PPI); (7) Pelabuhan perikanan; (8) Masterplan & DD pertambakan; (9) DD, rehab saluran tangkap dan pembinaan budidaya; (10) Pembinaan dan pembangunan BBIP; (11) BB Ule Lhee dan Loka Ujung Batee; (12) BPIP; (13) Pembangunan lab. uji mutu dan pengolahan ikan; (14) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong dan pengadaan kapal latih/ riset; (15) Pos karantina ikan Sultan Iskandar Muda; (16) Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

b. Pada Subbidang Pertanian

Di Rencana Induk, sub bidang pertanian terdapat 2 (dua) program yaitu (1) Perbaikan & pembangunan kembali prasarana umum dan (2) Pemulihan usaha ekonomi masyarakat dan partisipasi Swasta, sedangkan program *pada Renstra BRR* secara substansi sudah mengacu pada rencana induk yaitu Pemulihan Fasilitas Pelayanan Masyarakat. Renstra BRR menjabarkan 4 (empat) kegiatan yaitu (1) Pemulihan sarana irigasi, (2) Pemulihan pusat penjualan hasil produksi; (3) Pengembangan dan Peningkatan kualitas hasil produksi; (4) Pemulihan fasilitas pendukung pertanian dan budidaya perairan, dimana kegiatan tersebut secara substansi sudah sesuai dengan rencana induk walaupun yang tercantum dalam rencana induk yang sebenarnya terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan yaitu (1) Rehabilitasi/pembangunan saluran air & irigasi tersier & kuarter (menurut skim & tipe) dan rehabilitasi struktur lahan; (2) Rehabilitasi jalan usaha tani/ produksi; (3) Pembangunan unit pembibitan /pembenihan; (4) Pembangunan fasilitas pemasaran hasil pertanian; (5) Pembangunan pos kesehatan hewan (Poskeswan); (6) Penelitian & pengembangan teknologi tepat guna; (7) Rehabilitasi/pembangunan prasarana & sarana kerja pertanian (kantor dinas, karantina, balai penyuluhan, balai diklat pertanian dan laboratorium); (8) Bantuan sarana pertanian dalam rangka reinisiasi produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; (9) Ameliorasi tanah; (10) Pengembangan pertanian terpadu; (11) Penyediaan modal kerja untuk usaha pertanian (hulu-onfarm-hilir); (12) Bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; (13) Bantuan kios sarana produksi pertanian; dan (14) Bantuan bimbingan, pelatihan, pendampingan dan pembinaan.

c. Subbidang Pariwisata

Rencana Induk subbidang pariwisata terdapat 1 (satu) program yaitu Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana & Prasarana di Kawasan serta Objek & Daya Tarik Wisata (ODTW), yang tidak ditenui pada Renstra BRR. Sementara itu, pada Rencana Induk terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Rehabilitasi & Rekonstruksi sarana & prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana; dan (2) Pengadaan sarana angkutan wisata darat, yang tidak terdapat pada Renstra BRR *subbidang pariwisata.*

d. Subbidang Perdagangan

Di Rencana Induk terdapat 5 (lima) program yaitu (1) (Masa Tanggap Darurat: Tenda Pasar Darurat; (2) Rehabilitasi & Rekonstruksi: (3) Pasar Tradisional Permanen; (4) Pasar Grosir/Induk; (5) Pergudangan; Kemetrologian dan Koordinasi Posko, yang tidak terdapat pada Renstra BRR. Pada Rencana Induk terdapat 7 (tujuh) kegiatan yaitu (1) Pemasangan tenda pasar darurat (termasuk ongkos angkut dan pasang); (2) Pembangunan kembali pasar tradisional permanen; (3) Pembangunan pasar grosir/induk; (4) Pembangunan fasilitas pergudangan; (5) Pengadaan alat laboratorium dan peralatan kantor; (6) Metrologi dan (7) Posko koordinasi sektor perdagangan; yang secara keseluruhan tidak terdapat pada Renstra BRR S*ubbidang perdagangan*.

e. Subbidang Perindustrian

Rencana Induk subbidang perindustrian terdapat 2 (dua) program yaitu (1) Rekonstruksi Sarana Laboratorium dan Sarana Baristan; dan (2) Rekonstruksi Sarana Laboratorium dan Sarana SMTI, yang tidak terdapat pada Renstra BRR. Sementara, pada Rencana Induk terdapat 8 (delapan) kegiatan yaitu (1) Pembangunan gedung kantor, pelatihan dan laboratorium; (2) Pengadaan dan perbaikan alat laboratorium; (3) Pengadaan perlengkapan kantor; (4) Kegiatan Operasional Pendukung; (5) Pembersihan; (6) Alat laboratorium; (7) Pengadaan peralatan; dan (8) Pengadaan bahan kimia, yang tidak terdapat pada Renstra BRR S*ubbidang Perindustrian.*

f. Subbidang Tenaga Kerja

Rencana Induk subbidang tenaga kerja terdapat 5 (lima) program yaitu (1) Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Publik; (2) Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja; (3) Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja; (4) Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja; dan (5) Perluasan & Pengembangan Kesempatan Kerja*, t*etapi program pada Renstra BRR belum mengacu pada Rencana Induk dan hanya terdapat 1 (satu) program yaitu Pemulihan Pendapatan Masyarakat. Sedangkan, pada Rencana Induk *Subbidang Tenaga Kerja* terdapat 22 (dua puluh dua) kegiatan yaitu (1) Pembangunan balai latihan kerja bidang konstruksi; (2) Pembangunan kantor loka latihan kerja usaha kecil & menengah bidang wirausaha; (3) Pembangunan balai latihan kerja bidang nelayan Padat karya produktif; (4) Pengerahan TKS; (5) Mengatasi pengangguran; (6) Informasi bursa kerja; (7) Pemetaan tenaga kerja; (8) Pelatihan masyarakat untuk kejuruan; (9) Latihan ketrampilan untuk tenaga kerja; (10) Penyusunan peta permasalahan HI; (11) Bimbingan motivasi, disiplin dan etos kerja pegawai perantara & staf HI & pelaku HI; (12) Pengawasan & pemantauan dalam rangka mencegah eksploitasi anak; (13) Pemetaan objek pengawasan; (14) Penyelesaian status hubungan kerja dan hak normatif tenaga kerja pasca gempa & tsunami; (15) Penanganan tenaga kerja perempuan pasca gempa & tsunami; (16) Pelatihan calon pengawas ketenagakerjaan; (17) Pengembangan sarana & prasarana HI di 9 kab; (18) Pemeriksaan kesahatan fisik dan mental kerja; (19) Memfasilitasi pembentukan employee & employer assistance sebagai sarana konseling bagi pekerja & pengusaha; (20) Pelatihan occupational therapy bagi dokter & paramedic; (21) Pembuatan pedoman penanganan pelanggaran norma kerja perempuan dan anak; (22) Pembelian alat uji keselamatan & kesehatan kerja. Sedangkan pada Renstra BRR hanya

memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Penyediaan lapangan kerja dan (2) Pelatihan (yang sudah mengacu pada rencana induk). Untuk 20 (dua puluh) kegiatan lainnya dalam rencana induk sub bidang tenaga kerja masih belum tersentuh oleh renstra.

g. Subbidang Koperasi & Usaha Kecil

Rencana Induk Koperasi dan Usaha Kecil terdapat 1 (satu) program yaitu Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana Publik, tetapi program yang terdapat Renstra BRR *tidak mengacu* pada Rencana Induk yaitu Pemberian Bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan sarana produksinya. Adapun pada Rencana Induk terdapat 16 (enam belas) kegiatan yaitu (1) Perbaikan fasilitasi kios UKM; (2) Perbaikan gerobak dorong UKM; (3) Pendataan profil koperasi; (4) Pendataan profil UKM; (5) Renovasi 8 pasar tradisional; (6) Pembangunan kembali pasar bina usaha (pasar grosir); (7) Pembangunan kembali pasar larang sawi (pasar eceran); (8) Pembangunan kembali pasar 2 ikan; (9) Pembangunan kembali TPI; (10) Perbaikan sarana & prasarana pasar; (11) Pembangunan sarana & prasarana yang hancur/hanyut; (12) Rehabilitasi/pembangunan pasar tradisional; (13) Pembangunan sarana usaha pasar darurat; (14) Perbaikan/ renovasi sarana & prasarana pasar ikan yang dikelola koperasi; (15) Pembangunan 3 pasar; dan (16) Rehabilitasi/renovasi pasar. Sedangkan untuk renstra subbidang koperasi & usaha kecil memiliki 3 (tiga) kegiatan yang tidak mengacu pada rencana induk yaitu (1) Pemberian bantuan yg berkaitan dgn tanah yg tdk dpt digunakan sbg tempat permukiman & bantuan perumahan, sistem insentif kredit & bantuan teknis utk memperoleh akses kpd sumber daya produktif; (2) Pemberian bantuan Rp. 5 - 15 juta sbg pemulihan sarana atau utk melakukan kegiatan usaha dana pendamping (matching fund) dan (3) Pemberian hibah langsung, maksimal Rp. 2 juta.

Rencana kerja dari Kementerian Lembaga (hanya Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memberikan dokumen perencanaan), Pemerintah daerah NAD serta lembaga donor/NGO dokumen perencanaan tidak tersedia/belum dapat diperoleh. Tabel berikut di bawah ini memberikan penjelasan mengenai perencanaan pada Depnakertrans (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) terhadap rencana induk.

Berdasarkan tabel dibawah ini, telah ada kesesuaian antara program rencana induk dengan program pada rencana kerja Depnakertrans. Untuk 2 (dua) program yaitu perluasan & pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas & produktvitas tenaga kerja sudah memiliki kegiatan yang sesuai baik dalam rencana induk maupun dalam rencana kerja Depnakertrans. Sedangkan untuk program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja dimana kegiatan dalam rencana kerja secara substansi sudah mengacu pada rencana induk.

Tabel V.1
Persandingan antara Rencana Induk dengan
Renja K/L dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2006

Program (Rencana Induk)	Kegiatan (Rencana Induk)	Program (Rencana Kerja K/L)	Kegiatan (Rencana Kerja K/L)
Perluasan & Pengembangan Kesempatan Kerja	1. Padat karya produktif 2. Pengerahan TKS 3. Mengatasi pengangguran 4. Informasi bursa kerja dan pemetaan tenaga kerja.	Perluasan & Pengembangan Kesempatan Kerja Provinsi NAD	1. Pendidikan dan pelatihan teknis 3 paket 2. Terapan teknologi tepat guna 170 orang 3. Pemberdayaan PKSPK 137 orang 4. Pendayagunaan TKPMP 20 orang 5. TKS 150 orang 6. Pengadaan alat pengolah data 1 paket 7. Promosi perluasan kesempatan kerja sektor pertanian 20 orang 8. Promosi potensi sumber daya daerah 20 orang
		Perluasan & Pengembangan Kesempatan Kerja Provinsi Nias	1. Pembinaan WUB 10 orang 2. TTG/TPK 15 orang 3. Pemberdayaan AKAD/AKL 200 orang 4. Pemberdayaan PKSPK 87 orang 5. Informasi pasar kerja 1 paket 6. Pengadaan peralatan mesin 1 paket
Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelatihan masyarakat untuk kejuruan 2. Latihan ketrampilan untuk tenaga kerja	Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi NAD	1. Pendidikan dan pelatihan teknis 3 paket 2. Peningkatan keterampilan tenaga kerja indonesia 388 orang 3. Penyebaran informasi tentang regulasi dibidang pelatihan dan produktivitas 8 paket 4. Pelaksanaan rapat koordinasi daerah dibidang pelatihan dan produktivitas 1 paket 5. Pengembangan kelembagaan lembaga latihan swasta secara kesistiman maupun SDM 5 paket (100 orang) 6. Penyediaan data pelatihan dan produktivitas 1 paket 7. Pengadaan sarana dan prasarana kediklatan 1 paket
Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	1. Penyusunan peta permasalahan HI 2. Bimbingan pegawai perantara & staf HI & pelaku HI 3. Pengawasan & pemantauan dalam rangka mencegah eksploitasi anak 4. Pemetaan objek pengawasan	Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Provinsi NAD	1. Perlindungan & Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan * Penyelesaian Kasus PHI/PHK 200 Kasus * Pembinaan & Pengaturan Syaker 60 orang * Sos.UU No.2 Thn 2004 1 Paket * Pemberdayaan LK Tripartit 54 orang

Program (Rencana Induk)	Kegiatan (Rencana Induk)	Program (Rencana Kerja K/L)	Kegiatan (Rencana Kerja K/L)
	5. Penyelesaian status hubungan kerja dan hak normatif tenaga kerja 6. Penanganan tenaga kerja perempuan 7. Pelatihan calon pengawas ketenagakerjaan		* UMP 100 buku * Pengadaan alat pengolah data 1 unit
Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	1. Pengembangan sarana & prasarana HI di 9 kab 2. Pemeriksaan kesehatan fisik dan mental kerja 3. Memfasilitasi pembentukan employee & employer assistance sebagai sarana konseling bagi pekerja & pengusaha 4. Pelatihan occupational therapy bagi dokter & paramedis 5. Pembuatan pedoman penanganan pelanggaran norma kerja perempuan dan anak 6. Pembelian alat uji keselamatan & kesehatan kerja	Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Provinsi NAD	2. Penyelenggaraan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan * Penyusunan Program & Teknis 5 paket * Penyebarluasan informasi K3 500 buku * Pengawasan ketenagakerjaan 1 paket * Sos. Peran & fungsi Lmb P2K3 20 orang * Pemeriksaaan perusahaan jamsostek 100 perusahaan * Sos. Norma ketenagakerjaan 50 orang * Pengujian lingkungan kerja 25 perusahaan * Pengadaan alat pengolah data 1 unit

Sumber: Buku Rinci Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan; Depnakertrans 2006 Provinsi NAD dan Nias

Dalam pemulihan bidang ekonomi tersebut, ditinjau dari besaran rencana penganggarannya, sangat tidak konsisten antara prakiraan rencana dalam Rencana Induk dengan Rencana Kerja BRR. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor produksi tanaman pangan TA 2005 menurut Rencana Induk sebesar Rp 351.888.000.000, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan BRR dijabarkan dalam RKA-K/L sektor pertanian hanya sebesar Rp 126.500.200.000 dengan realisasi sampai dengan Februari 2006 sebesar 26.864.186.600.000 (21,22 %) dari anggaran, dan kemajuan fisik rata-rata sebesar 50 %. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pertanian pada TA 2005 berdasarkan Rencana Induk direncanakan sebesar Rp 526.003.000.000, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan Bapel yang dituangkan dalam RKA-K/L hanya sebesar Rp225.470.680.000 dengan realisasi sampai Desember 2005 sebesar Rp 10.286.780.767. (4,56 %) dari anggaran *(laporan BPK, Juni 2006*).

Ketidakkonsistensian dalam penggunaan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan sendiri, mengakibatkan ketidakkonsistensian jumlah dan besaran kegiatan dan anggaran. Pada sektor produksi tanaman pangan (pertanian), dalam RKA-K/L direncanakan kegiatan rehabilitasi sawah yang rusak akibat bencana di Kabupaten Aceh Barat seluas 2.200 ha, sedangkan data kerusakan sawah menurut Departemen Pertanian seluas 1.432 ha. (dalam Rencana Induk). Termasuk data kerusakan sawah di Kabupaten Aceh Jaya seluas 1.900 ha, sedangkan kerusakan menurut Rencana Induk (data dari Deptan) seluas 1.645

ha. Di sektor lain, dalam Rencana Induk, rencana kegiatan pokok dan kebutuhan anggaran Koperasi dan UKM sebesar Rp 16.178.000.000. Sedangkan realisasi pelaksanaan yang tercantum dalam RKA-K/L adalah sebesar Rp 65.592.000.000. Berdasarkan Rencana Induk rencana kegiatan pokok dan kebutuhan anggaran pembangunan sebesar Rp 20.624.761.250. Sedangkan pelaksanaan berdasarkan RKA-K/L sebesar Rp 13.110.437.000.

4. Bidang Pemulihan Kelembagaan

Pada umumnya, diakui oleh Pemerintah Daerah maupun BRR, bahwa Perpres No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias adalah pedoman penyusunan rencana aksi dan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kep. Nias (43,5% *responden Pemda dan BRR berdasarkan kuesioner dalam Monitoring dan Evaluasi P3RIRRWANS*). Sedangkan arahan dan strategi dalam Rencana Induk dianggap cukup efektif menjadi pedoman dalam penyusunan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (*52,2% responden*). Khusus dalam bidang pemulihan kelembagaan, rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias dalam bidang pemulihan kelembagaan dalam Rencana Strategis BRR sudah mengacu kepada Rencana Induk (*didukung juga oleh jawaban 69,6% responden*).

a. Sub Bidang Kelembagaan

Program sub bidang kelembagaan yang terdapat dalam Renstra dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program, yaitu : 1) peningkatan kapasitas aparatur daerah; 2) penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan pemerintah secara permanen, sedangkan di Rencana Induk terdiri dari 11 (sebelas) program. Walaupun Renstra hanya terdiri dari 2 (dua) program namun sebagian rincian kegiatannya sudah mengacu pada 7 (tujuh) program/kegiatan di Rencana Induk, dinilai mayoritas responden bahwa antara Rencana Induk dengan Renstra BRR bidang kelembagaan sudah cukup konsisten (34,8 %). Beberapa program/ kegiatan lainnya yang tidak tercantum pada Renstra namun tercantum pada Rencana Induk, antara lain: *Penataan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Penataan Admnistrasi Kependudukan, Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dan Pengelolaan Pertanahan.*

Pada Renstra BRR bidang kelembagaan hanya memfokuskan pada kelembagaan pemerintahan, sedangkan kelembagaan agama, adat, dan sosial lainnya tidak ternasuk ke dalam program dan kegiatan di Renstra. Padahal di dalam dokumen Rencana Induk bidang kelembagaan ini terbagi 2 (dua) yaitu : 1) kelembagaan pemerintahan, dan 2) kelembagaan agama, adat, dan sosial lainnya yang memegang peranan penting.

Output di bidang Kelembagaan – BRR (*berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Dukungan Kelembagaan Eksekutif Bapel BRR pada pelaksanaan FGD P3RIRRWANS Bidang Pemulihan Kelembagaan 25 September 2006 di Banda Aceh*) adalah :

1. Tidak semua sarana dan prasarana pemerintahan yang diusulkan oleh daerah akan dibangun. Kebutuhan dan potensi daerah tersebut akan terlebih

dahulu dikaji. Sedangkan untuk pembangunan Kantor Kepala Daerah, Kantor Setda, Kantor Bawasda dan Kantor Bappeda yang rusak pasti akan dibangun di setiap daerah, karena menjadi bangunan yang wajib ada. Di lain pihak, kegiatan bidang kelembagaan yang selama ini diusulkan oleh daerah hanya terbatas pada output pembangunan fisik, padahal bidang kelembagaan bukan hanya menyangkut pembangunan fisik saja. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah pembangunan bale mukim (bale musyawarah dan kantor mukim) yang jumlah cukup banyak dan merupakan bagian dari organisasi di Provinsi NAD*)* .

2. Pembangunan kelembagaan yang efektif, efisien, menganut *good governance*, siap terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan siap membangun pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa hal yang akan dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut adalah melakukan kajian terhadap kebutuhan kelembagaan suatu daerah. Hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana menciptakan organisasi yang ramping tetapi telah mampu melakukan fungsi dan tugas sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Organisasi ini tidak terlepas dari beberapa peraturan perundangan yang ada seperti UU Pemerintahan Aceh, PP No 8 Tahun 2003 dan revisinya, serta beberapa Qanun yang mengatur organisasi daerah seperti mukim dan gampong. Jadi bukan hanya sekedar mengacu kepada aturan formal yang ada. Kegiatan ini dilakukan oleh Pihak Konsultan. Tugas dari pihak konsultan ini mulai dari melakukan kajian organisasi yang efektif di suatu daerah, hingga penyusunan Qanun untuk daerah tersebut sesuai dengan pertimbangan yang telah disebutkan diatas.
3. Melakukan perekrutan terhadap pejabat Eselon II, termasuk melakukan *capacity building* melalui pelatihan-pelatihan. Dalam perekrutan, BRR membantu melakukan *fit and proper test* terhadap pejabat tersebut, termasuk melakukan peningkatan kapasitas pejabat eselon II. Sudah banyak rencana paket-paket pelatihan yang telah disiapkan BRR. Dalam hal ini BRR mengusahakan tidak melakukan mutasi dari daerah satu ke daerah lainnya, tetapi berusaha untuk meningkatkan kualitas pejabat Eselon II untuk dapat mengisi kekosongan posisi organisasi di suatu daerah.

Perbedaan perencanaan yang cukup signifikan antara Rencana Kerja BRR dengan Rencana Induk untuk sarana dan prasarana kantor pemerintahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.2
Persandingan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor
Pemerintahan Antara Rencana Induk Dengan BRR

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Kantor/ Dinas/ Badan		Pendopo/ Meuligo		Kantor Camat		Rumah Dinas Camat		Kantor Desa/Lurah		Bale Musyawarah/ Kantor Mukim		Total (Unit)	
		BRR	RI	BRR	RI	BRR	RI	BRR	RI	BRR	RI	BRR	RI	BRR	RI
1	NAD	11	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	18
2	Langsa	3	-	-	-	3	-	3	-	12	-	6	-	27	-
3	Banda Aceh	18	15	2	-	4	3	9	-	45	43	17	sejumlah	95	61
4	Aceh Timur	21	-	3	-	3		-	-	98	3	24	sejumlah	149	3
5	Sabang	3	-	-	-	2	1	2	-	10	2	4	sejumlah	21	3
6	Lhokseumawe	-	3	-	-	1	-	1	-	-	4	9	sejumlah	11	7
7	Aceh Besar	-	-	-	-	2	6	8		78	103	12	sejumlah	100	109
8	Pidie	5	2	1	-	4	-	5	-	84	32	128	sejumlah	227	34
9	Bireun	11	-	2		8	-	7	-	42	23	69	sejumlah	139	23
10	Gayo Lues	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2	-
11	Aceh Jaya	25	14	1	-	-	5	6		128	74	21	sejumlah	181	93
12	Aceh Barat	5	22	-	-	4	4	10	-	111	36	10	sejumlah	140	62
13	Nagan Raya	7	-	-	-	3	-	3	-	40	-	27	-	80	-
14	Aceh Selatan	11	-	-	-	10	-	10	-	81	-	18	-	130	-
15	Simeulue	28	2	3	-	-	-	8	-	93	39	11	Sejumlah	143	41
16	Aceh Singkil	8	-	2	-	15	-	15	-	93	-	27	-	160	-
17	Aceh Tenggara	-	-	-	-	5	-	5	-	10	-	79	-	99	-
18	Aceh Tamiang	7	-	-	-	-	-	-	-	66	-	27	-	100	-
19	Bener Meriah	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	6	-
20	Aceh Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	Sejumlah	-	91
21	Nias	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5
22	Nias Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		165	77	14	-	65	23	97	-	991	450	489	-	1.821	550

Sumber : Satker Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintahan NAD, 2006

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya perbedaan dalam jumlah perencanaan pembangunan antara Rencana Induk dengan rencana kerja BRR Total pembangunan yang direncanakan BRR mencapai 1.821 unit, mencapai 3 kali lipat dari rencana pembangunan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Induk yaitu sebanyak 550 unit.

Selain terdapat perbedaan jumlah pembangunan kantor, juga terdapat perbedaan cakupan lokasi. Perbedaan lokasi dan jumlah sarana yang akan dibangun tersebut dikarenakan BRR membangun kelembagaan secara *integratif* (keseluruhan), diawali dengan memprioritaskkan membangun bangunan yang hilang/rusak akibat tsunami, kemudian membangun kelembagaan pada beberapa daerah yang merupakan daerah pemekaran sehingga totalnya mencakup 1 Provinsi dan 21 Kabupaten/Kota. Sedangkan pada Rencana Induk hanya merencanakan membangun kembali/rehabilitasi bangunan yang rusak akibat bencana tsunami yaitu di 1 provinsi dan 12 kabupaten/kota.

Berbagai perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh BRR untuk pembangunan sarna dan prasarana kantor pemerintahan (*berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Satker BRR Peningkatan Sarana dan Prasana Kantor Pemerintahan NAD dan pada Diskusi Lokakarya Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Desember 2006*) yaitu :

1. Merupakan program dan kegiatan yang ditetapkan Rencana Induk
2. Prioritas pembangunan yaitu sarana dan prasarana yang hilang/rusak akibat tsunami dan gempa bumi dibandingkan akibat konflik
3. Kebutuhan real di kabupaten/kota yang jauh lebih besar,
4. Keterlibatan lembaga pengguna untuk mengusulkan perencanaan pembangunan lembaga tersebut,
5. UU Pemerintahan Aceh yang mempengaruhi struktur kelembagaan pemerintahan (Pasal 114-117 UU 11/2006), yaitu mukim dan gampong merupakan bagian dari pemerintahan Provinsi NAD. Sedangkan pada Rencana Induk belum memasukkan secara detail pembangunan kantor mukim dan balee tersebut, sehingga diperlukan pembangunan kantor mukim dan balee di Provinsi NAD.

2. Sub Bidang Hukum

Program pada Renstra bidang hukum dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program yaitu: 1) jaminan kepastian, perlindungan, penegakan hukum dan HAM, serta 2) revitalisasi fungsi dan tugas pelayanan umum, sedangkan di Rencana Induk terdiri dari 4 (empat) program. Walaupun pada Renstra hanya terdiri dari 2 (dua) program namun rincian kegiatannya sudah mengacu pada 3 (tiga) program dan kegiatan di Rencana Induk. Hal ini bertolak belakang dengan mayoritas penilaian bahwa perencanaan antara Rencana Induk dengan Renstra BRR bidang hukum dinilai tidak konsisten sebanyak (penilaian dari 34,8 % responden). Program yang tidak dimasukkan ke dalam Renstra yaitu menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, karena memang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Selain pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintahan oleh BRR yang terjadi perbedaan perencanaaan dengan Rencana Induk, hal ini juga terjadi pada pembangunan sarana dan prasarana hukum. Persandingan antara perencananaan saran dan prasarana hukum yang tercantum dalam Rencana Induk dengan BRR dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.3
Persandingan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Hukum
Antara Rencana Induk Dengan BRR

No	Daftar Gedung	Rencana Induk		BRR	
		Jumlah	Lokasi	Jumlah	Lokasi
1	Kejaksaan Agung RI				
	a. Kejati	1	NAD	1	NAD
	b. Kejari	5	Banda Aceh, Meulaboh, Calang, Sinabang, Sabang	6	Banda Aceh, Meulaboh, Calang, Sinabang, Sabang, Singkil
2	Mahkamah Agung				
	a. Pengadilan Tinggi	1	Banda Aceh	1	Banda Aceh
	b. Pengadilan Negeri	9	Banda Aceh, Meulaboh, Calang, Sigli, Bireuen, Tapak Tuan, Lhok Sukon, Lhok Seumawe, Gunung Sitoli	11	Banda Aceh, Meulaboh, Calang, Sigli, Bireuen, Tapak Tuan, Lhok Sukon, Lhok Seumawe, Gunung Sitoli Sinabang, Singkil
	c. PTUN	1	Banda Aceh	1	Banda Aceh
	d. Mahkamah Syariah	6	NAD, Banda Aceh, Calang, Meulaboh, Bener Meriah, Suka Makmur	13	NAD, Banda Aceh, Calang, Meulaboh, Bener Meriah, Suka Makmur Takegon, Singkil, Sinabang, Blangkejeren, Lhoksukon, Sigli, Kutacane
	e. Mahkamah Militer	-	-	1	-
3	Kanwil Departemen Hukum dan HAM				
	a. Lapas Klas II A/II B	2	Banda Aceh, Meulaboh	4	Banda Aceh, Meulaboh, Lhokseumawe, Gunung Sitoli
	b. Rutan/Cabang Rutan	4	Sigli, Lhoknga, Calang, Idi	8	Sigli, Lhoknga, Calang, Idi, Tapak Tuan, Banda Aceh, Sinabang, Pulau Telo
	c. Bapas Klas II	1	Banda Aceh	1	Banda Aceh
	d. Bapas	-	-	1	Banda Aceh
	e. Rupbasan Klas II	1	Banda Aceh	1	Banda Aceh
	f. Kanwil Depkumham	1	NAD	1	NAD
	g. Kanim	2	Banda Aceh, Meulaboh	2	Banda Aceh, Meulaboh
	TOTAL	33		52	

Sumber : Rencana Induk Bidang hukum dan Draft Rencana Strategis dan rencana Aksi BRR Sub Direktorat Hukum

Dari tabel di atas diketahui bahwa perencanaan oleh BRR meningkat sebanyak 1,5 kali lipat dari dokumen rencana Induk. Pada rencana induk direncanakan sebanyak 33 unit sedangkan BRR merencanakan hingga 52 unit. Perbedaan yang ditetapkan BRR didasarkan pada adanya prinsip dasar perencanaan pembangunan sarana dan prasarana hukum oleh BRR yaitu:

1. Rencana Induk Bidang Hukum (Lampiran 9)
2. Usulan aspirasi masyarakat di Kabupaten/Kota

3. Kebutuhan riil dalam dinamika perkembangan hukum di NAD dan Nias.

Sementara itu, diketahui bahwa dalam dokumen rencana induk tidak menampung daerah yang terkena dampak tsunami, seperti Pembangunan Pengadilan Tinggi di Brastagi dan Sibolga, seharusnya kegiatan tersebut dimasukkan ke dalam Rencana Induk karena terkena dampak bencana tsunami (*berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Manajer Pembentukan dan Gakum Bapel BRR*).

Pengamatan tersebut di atas, didukung oleh Laporan BPK yang terkait dengan bidang kelembagaan dan hukum yaitu :

1. Menurut Rencana Induk yang ada, seharusnya BRR bersama-sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyusun rencana aksi, namun ternyata Bapel menyusun rencana aksi sendiri dan pelaksanaan rencana aksi itu belum dapat dijadikan acuan karena rencana aksi tersebut masih berbentuk draf dan masih perlu penyesuaian dengan perkembangan di bidang hukum.
2. Di dalam Rencana Induk, Peningkatan Kelembagaan Instansi Vertikal bertujuan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan instansi vertikal yang terdiri dari kegiatan non fisik (penyediaan aparatur pd instansi vertikal, peningkatan kualitas pelayanan publik,dll). Kenyataannya, dalam RKA-KL TA 2005 dilakukan kegiatan fisik yaitu Paket Perbaikan Gedung Kantor, Sarana Penunjang dan Rumah Dinas yang dianggarkan sebesar Rp. 2.271.560.000 dengan realisasi sampai 31 Desember 2005 masih 0 %.

5. Bidang Pemulihan K3M dan Reintegrasi Mantan GAM

Beberapa program dalam rencana BRR tidak mengacu seluruhnya kepada Rencana Induk. Hal ini dapat dimengerti karena ketika menyusun Rencana Induk waktunya sedikit, data dan informasi terbatas, tidak cukup punya waktu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemda dan masyarakat NAD yang waktu itu sedang mengalami kesulitan. Dan juga perkembangan keadaan/kondisi sosial kemasyarakatan begitu dinamis pasca Tsunami, yang kemudian direspon oleh BRR dan kemudian dituangkan kedalam rencananya.

Di dalam Rencana Induk ditetapkan program/kegiatan bidang keamanan, ketertiban dan ketahanan masyarakat dari Tahun 2005 sampai 2009 sebesar Rp 2.035.006.989.000, dianataranya sebesar Rp 175.079.000.000 diperuntukkan untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa program tersebut tidak ditampung dalam rencana aksi Bapel RR, hal ini dikarenakan adanya kesepakatan damai antara GAM dengan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki (L*aporan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD dan Nias, Juni 2006)*. Untuk menyikapi perkembangan dengan adanya MoU Helsinki tersebut maka Pemerintah Pusat melakukan kebijakan khusus untuk masalah reintegrasi tersebut. Pada tingkat Pemerintah Daerah, gubernur NAD telah mengeluarkan kebijakan pembentukan BRA (Badan Reintegrasi Anggota Mantan GAM).

Pada umunya konsistensi dan ketidakkonsistensian antar dokumen perencanaan di bidang pemulihan K3m dan Reintegrasi Mantan GAM dicontohkan pada pembangunan Rumah Sakit Lapangan oleh Polri yang tidak tercantum di dalam Rencana Induk, akan tetapi Rumah Sakit Lapangan yang dibangun oleh TNI dibawah pengawasan Dephan sesuai dengan yang tertera dalam Rencana Induk. Demikian juga dengan contoh lain yaitu kegiatan yang sama antara rencana induk dengan rencana yang telah direalisasikan oleh BRR seperti pembangunan Mapolda NAD, pembangunan terhadap kantor dan rumah dinas Dilmil 101, serta rehabilitasi Lanud Maimusaleh, Satrad 233 di Sabang, dan Satrad 231 di Lhokseumawe. Untuk kegiatan ketahanan masyarakat, banyak program mengacu kepada rencana induk, seperti incentive framework, pembangunan karakter bangsa dan menanamkan rasa cinta tanah air, pemberdayaan masyarakat sipil, membangun jaringan dan sarana/prasarana komunikasi.

Pada tingkat Pemda, Rencana Kerja SKPD belum menyesuaikan dengan Rencana Induk. Lain halnya dengan lembaga donor/NGO, seperti USAID yang tidak pernah memperhatikan rencana induk ataupun rencana aksi yang disusun oleh BRR ataupun rencana pemda yang sudah disusun. Ini terlihat pada salah satu kegiatan yang dibuat untuk mencapai perdamaian di NAD adalah dengan membentuk sebuah Yayasan untuk mengelola perdamaian seperti antara lain yang terjadi di Lhokseumawe yang mengalami hambatan karena mendapatkan ancaman dari KPA (Komisi Peralihan Aceh). (Hasil *Evaluasi 4K pada diskusi Pokja GAM dalam Lokakarya P3RIRRWANS, 19 Desember 2006, Banda Aceh*).

Pada pelaksanaan program reintegrasi, tidak ditemukannya adanya konsistensi antar dokumen perencanaan, hal ini dikarenakan Rencana Induk telah terlebih dahulu dibuat sebelum peristiwa MoU Helsinki teraksana, namun dokumen program kerja yang dimiliki oleh Badan Pelaksana Reintegrasi Damai Aceh ikut mendukung dan saling terkait khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Provinsi NAD. Dokumen kegiatan dari BRA secara konsisten masih merujuk pada butir-butir dari MoU Helsinki yaitu pada butir 3.2. tentang reintegrasi ke dalam masyarakat, dengan tetap menyesuaikan pada kondisi masyarakat. Dengan rencana strategis yang dimiliki oleh Bapel BRR hanya bisa menyesuaikan pada program dukungan terhadap penciptaan perdamaian yang seutuhnya. Pada level kementerian/Lembaga seperti Depdagri, Menko Polhukam dan Menko Kesra juga memiliki konsistensi yang baik dengan berpegang pada MoU Helsinki dalam melaksanakan program reintegrasi ini.Dokumen perencanaan yang yang dimiliki oleh Bapel RR hanya menyebutkan adanya program yang disebut dengan *mobilisasi perdamaian*. Program ini didukung oleh beberapa NGO Internasional seperti IOM. Sedangkan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tetap merujuk pada butir-butir MoU Helsinki yang dirangkum dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat NAD.

5.1.2 Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan dengan Pelaksanaan

1. Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Dari hasil evaluasi ini ada beberapa kondisi yang terjadi pada aspek konsistensi antar perencanaan Rencana Aksi dan/atau Rencana Kerja yang dilakukan pada masing-masing bidang RIRRWANS dengan pelaksanaan, yaitu; berdasarkan anggaran 2005 BRR bahwa realisasi sampai dengan 31 Desember 2005 sebesar Rp 2.219.183.446 dari anggaran sebesar 168.363.000.000 (sebesar 1,32%). Estimasi realisasi APBN-P Tahun anggaran 2005 sampai dengan akhir April 2006 adalah sebesar Rp 91.554.820. dari anggaran sebesar Rp 168.363.000.000 (sebesar 54,38%). Kemudia, anggaran masing-masing bidang pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi belum bisa memenuhi Rencana Induk. Berdasarkan RKA-K/L TA 2005 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 152.342.000.000. realisasi sampai dengan 31 desember 2005 hanya sebesar Rp. 7.999.893.295 (5,25%)

a. Sub Bidang Infrastruktur & Perumahan

Sebagian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan BRR dilapangan konsisten dengan poin-poin yang tercantum dalam Rencana Induk, namun pada pelaksanaanya BRR kerap kali menemui kendala (*Berdasarkan kunjungan kerja tanggal 4 Desember 2006).* Hambatan pertama dan utama dalam pelaksanaan kegiatan rehab rekon adalah pembebasan lahan. Banyak anggaran pembangunan fasilitas umum dengan bantuan luar negri yang belum dapat diserap karena terhambat masalah pembebasan tanah. Pengadaan tanah umumnya menjadi kewajiban Pemda (sesuai Kepres No.34/2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan dinyatakan bahwa salah satu dari sembilan kewenangan kab/kota di bidang pertanahan adalah penyelengaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan) namun umumnya memiliki APBD terbatas rata-rata sekitar Rp. 1M, padahal pembebasan tanah membutuhkan lebih dari Rp. 10M. Karena keterbatasan dana sementara kebutuhan pembangunan semakin mendesak terutama sarana dan prasarana, Bepel BRR mengalokasikan dana pembebasan tanah sebagai contohnya jalan Banda Aceh – Meulaboh yang hampir seluruhnya dibebaskan oleh BRR. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembebasan tanah dihadapi masalah dalam menyepakati nilai ganti rugi dengan masyarakat. Dengan anggapan melimpahnya dana rehab rekon, masyarakat mengajukan harga tanah hampir 10x NJOP yang berlaku. Disamping itu masyarakat yang bersangkutan juga enggan membayar pajak dengan alasan adanya konflik berkepanjangan. Dari 50,000 bidang tanah yang telah diukur, baru 25,000 yang telah disertifikasi. Bapel BRR mengharapkan BPN dapat melaksanakan langkah-langkah percepatan sertifikasi. Kenyataan ini mengindikasikan adanya kelemahan dari Pemda, sebagai pihak yang berwenang dalam hal *land acquisition,* dari segi kapasitas anggaran dan koordinasi antara BRR dan BPN.

Hambatan kedua adalah tidak adanya Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang) terkait hulum dan pertanahan. Perpu akan sangat membantu dalam aspek kepastian hukum atas tanah. Perpu sudah berada di kantor

Sekretariat Negara untuk diproses penetapannya dan ditargetkan dapat diterbitkan akhir Desember 2006.

Hambatan ketiga adalah kemampuan kontraktor lokal yang sangat rendah baik dari segi *skill,* dana dan method. Kemampuan kontraktor lokal menghambat semua pekerjaan yang pada umumnya merupakan paket-paket kecil sehingga kontraktor nasional tidak bisa ikut memberikan kontribusinya. Pada masa awal tahun pertama rehabilitasi dan rekonstruksi, kebijakan BRR adalah memberikan pekerjaan kepada kontraktor lokal, karena adanya tekanan untuk memberdayakan kontraktor lokal yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Tekanan tentang tidak diijinkannya kontraktor luar bahkan dari Medan sekalipun membuat persaingan lokal menjadi lemah. Pada saat hasil tender diumumkan pun selalu ada sanggahan sehingga memperlambat proses, bahkan kadang-kadang proses tender bisa mencapai dua kali, sehingga jika masih harus diulang maka yang ketiga adalah penujukan langsung. Karena alasan-alasan itulah proses tender menjadi berlarut-larut. Keterlambatan juga diakibatkan karena ketidaksiapan Satker yang dimiliki BRR dalam mengatur besarnya volume pekerjaan yang melonjak tinggi dikarenakan keterbatasan SDM. Pada dasarnya BRR bisa merekrut orang-orang terpilih dari Jakarta, Bandung dan kota-kota besar lain, namun hal in bertentangan dengan ide pemberdayaan lokal untuk kepentingan *exit strategy*. Disamping kemampuan Satker, kemampuan konsultan dan kontraktor yang terlibat pun tergolong lemah. Pengawas kegiatan di lapangan adalah konsultan yang kebanyakan lokal atau nasional yang join dengan lokal. Hal ini ternyata tidak efektif karena konsultan nasional tidak mengetahui kondisi lapangan dan konsultan lokal tidak memiliki pengalaman mengawasi proyek sebesar kegiatan rehab rekon NAD – Nias. SDM yang dikirim ke Aceh pun dinilai bukan yang terbaik sehingga secara umum pengawasan di lapangan lemah. Kenyataan ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam aspek kapasitas kelembagaan pengawas proyek dan kapasitas SDM yang tersedia.

Hambatan keempat adalah sulitnya transport logistik ke lokasi. Wilayah seperti Aceh Jaya, Simeuleu, Nias sampai saat ini pembangunanya terhambat karena masalah logistik. Contoh kasus, Jalan Lamno – Calang tidak bisa dibuat permanen oleh BRR karena akan dibangun jalan oleh USAID, sebaliknya tidak dibuat permanenya jalan tersebut mengakibatkan hacur nya perkerasan sementara oleh air pasang atau hujan lebat. Hal tersebut diatas mengindikasikan adanya kelemahan dalam aspek koordinasi antara BRR dan USAID sebagai donor.

Hambatan kelima adalah dana. 1/3 dana berasal dari donor (mis: Aus, US, UE) offbudget sehingga BRR tidak bisa ikut campur dalam penentuan program yang keberhasilannya sangat menentukan bagi BRR. 1/3 lagi berasal dari NGO yang tidak memiliki mandat untuk melapor pada BRR. BRR juga tidak memiliki kewenangan untuk meminta NGO mempercepat pelaksanaan programnya karena NGO juga mengalami kendala dalam pelaksanaan programnya. NGO beralasan tidak bisa membangun karena alasan infrastruktur juga masalah kejelasan status tanah dan kualitas SDM. Hal ini membuktikan adanya keterbatasan BRR dalam kapasitas kewenangannya.

Hambatan keenam adalah SDM. Diperkirakan kebutuhan tenaga terampil untuk perumahan sekitar 20,000 orang namun yang tersedia sekarang tidak mencapai jumlah tersebut. Untuk menutupinya dibutuhkan tenaga dari luar Aceh. Tenaga dari luar seringkali menerima resisten dari tenaga lokal. Kondisi ini akibat dari konflik berkepanjangan. Demikian pula dengan Nias, penduduknya sangat miskin sehingga akan mengambil apa saja yang bisa mereka ambil. Kenyataan ini berakibat pada keamanan material untuk proyek. Hal tersebut diatas membuktikan adanya kekurangan dalam aspek kapasitas SDM yang tersedia.

Hambatan ketujuh adalah terlambatnya usulan DIPA. Anggaran 2005 praktis bisa diserap bulan September. SDM yang dimiliki BRR pada tahun pertaman pun tidak terbiasa dengan sistem pengajuan anggaran seperti sekarang. Anggaran 2006 harus menunggu sampai Mei – Juni karena adanya anggaran 2005 yang masih meluncur. Tahun 2007 BRR merencanakan kegiatan dimulai bulan Januari. Untuk mengatasi kendala tahun sebelumnya BRR merencanakan proram kontrak multi tahun untuk proyek.

Pada akhirnya, tidak semua hal dalam Rencana Induk bisa dilaksanakan di lapangan karena kondisi lapangan sangat dinamis. Secara umum penyerapan fisik di lapangan sudah mencapai lebih dari 40% dan bahkan rencana per 20 Desember diharapakan mencapai 50%. Selama 1 tahun kegiatan memasuki tahun ke 2 banyak kontraktor yang mengalami *over cash flow,* terutama pada sektor perumahan, sehingga tidak melakukan penagihan tiap termin melainkan menunggu hingga termin akhir. Kontrak ini pada umumnya kontrak kecil dengan jumlah rumah sebanyak 6 – 15 rumah.

Permasalahan di sektor infrastruktur khususnya adalah mempertahankan kualitas yang diduga lemah dari sejak tahap perencanaan. Dana di sektor ini juga mengalami defisit anggaran namun BRR berinisiatif dengan memunculkan usulan 2 USD untuk setiap 1 USD dari donor. Dana dari PHLN pun ternyata menyulitkan karena harus melalui prosedur normal yang memakan waktu lama. Perkiraan 120,000 rumah baru diragukan keakuratannya, karena metoda yang digunakan adalah perkiraan melalui gambar yang didapat lewat satelit. Kenyataan di lapangan ada korban yang tidak terhitung seperti para penyewa yang tetap harus diberikan bantuan. Targer baru perumahan saat ini menjadi 130,000 rumah baru dan 85,000 rehab.

Bidang perumahan diharapkan bisa diatasi dengan kebijakan baru yaitu dengan (1)Rumah baru, (2)Relokasi, (3)Prasarana rumah, (4)Rehabilitasi, dan (5)Renters. Sampai saat ini 57,000 rumah telah selesai dibangun dan 22,000 sedang dalam tahap konstruksi. Rata-rata pembangunan rumah 5000 per bulan pada 2006. Pada 2007 diharapkan bisa mencapai 7000 per bulan sehingga bisa selesai akhir 2007. Ada hambatan dari NGO misalnya palang merah yang berencana menyelesaikan pada 2010. NGO juga hanya menyelesaikan rumah tanpa PSD. BRR yang memikul tugas berat memiliki kewenangan terbatas sehingga pada akhirnya hanyalah menjadi salah satu dari sekian banyak pemain dan bukan menjadi koordinator dari seluruh kegiatan. Kendala utama pembangunan perumahan adalah bukan hanya membangun rumah tetapi juga permukiman yaitu rumah yang memiliki prasarana sarana dasar (PSD) seperti listrik, pembuangan air limbah, drainase, jalan akses, dan air bersih.

Kelengkapan fasilitas lainnya seperti tempat ibadah, pasar/tempat bekerja dan fasilitas pendidikan dan kesehatan merupakan sebagian alasan-alasan tidak ditempatinya sejumlah rumah yang telah dibangun. Dalam pelaksanaannya BRR memprioritaskan rekonstruksi rumah pada 2006 s/d pertengahan 2007. Sedangkan rehabilitasi dan PSD merpakan prioritas berikutnya sampai akhir 2007. Relokasi, pembangunan infrastruktur perumahan dan penghijauan merupakan prioritas akhir yang pada saat ini masih dalam tahap disain.

Keenam langkah perumahan yang digambarkan di Bab IV yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah perumahan masih juga menyisakan hambatan. Keenam langkah tersebut harus dapat dilalui secara bertahap sehingga hambatan yang dihadapi pada salah satu langkah diatas berakibat pada tertundanya langkah berikutnya. Kesulitan terbesar terdapat pada langkah kedua. Dari pertemuan terakhir dengan BRR terlihat masalah yang dihadapi dilapangan sbb:

1. Faktor masyarakat korban
    a. Kepala/anggota keluarga korban tidak ada di tempat ketika dilakukan pendataan
    b. Korban adalah ahli waris yang berhak tetapi masih belum cukup umur
    c. Korban menikah dengan sesama korban
    d. Orang yang tidak berhak memberikan kesaksian palsu mengaku korban
    e. Terjadi kebohongan massal/berjamah dalam memberikan kesaksian/ uji publik
    f. Korban secara sengaja meminta rumah dari dua atau lebih lembaga (NGO/BRR)
    g. Korban mengajukan nama anggota keluarga dalam pendataan
    h. Korban mengajukan permohonan dengan penulisan nama yang berbeda
2. Faktor petugas/pendata
    a. Petugas tidak terjun langsung ke lapangan tetapi hanya memberikan formulir isian ke wakil warga/kepala desa
    b. Petugas menerima apa adanya dari data yang diusulkan warga/kepala desa (tidak melakukan verifikasi melalui uji publik)
    c. Ada pihak-pihak setempat yang memaksa petugas memasukkan sebagai calaon penerima bantuan
    d. Petugas bersekongkol dengan warga dengan mendapatkan imbalan tertentu
3. Faktor lokasi dan waktu
    a. Lokasi sulit dijangkau dalam pendataan
    b. Waktu pendataan bersamaan atau setelah rumah-rumah dibangun/ direhab.

4. Faktor peralatan

    a. Volume data yang sangat besar (ratusan ribu nama disertai dengan identitas diri) menuntut adanya komputer yang canggih dalam pengolahan data

Hambatan lain dialami oleh kontraktor. Laporan BRR menjabarkan hambatan-hambatan tersebut seperti

1. Hambatan fisik lokasi

    a. Sulit dijangkau karena jalan/jembatan masih rusak/terputus (*Desa Panggung Aceh Jaya, Simeulue, dll*)

    b. Lokasi di pulau, dermaga tidak memadai untuk pendaratan material (*P. Aceh, Simeulue*)

    c. Kondisi lokasi perlu penanganan engineering khusus, karena tergenang air, lahan gambut, perlu urugan (*Tibang, Meulaboh, Gostel Barat, dll*.)

2. Hambatan non-fisik lokasi

    a. Sudah ada NGO yang meng-*claim*/menguasai lokasi

    b. Kontraktor dihambat/dipajaki untuk masuk ke lokasi oleh ‘oknum’ setempat.

    c. Masyarakat setempat menuntut dilibatkan dalam pembangunan

    d. Ada kontraktor setempat yang merasa lebih berhak

3. Hambatan calon penerima bantuan (*beneficiaries*)

    a. Beneficiaries sudah menerima rumah dari NGO

    b. Beneficiaries ternyata tidak berhak/sah

4. Hambatan internal kontraktor

    a. Kontraktor tidak punya modal/belum terima uang muka (tidak ada garansi bank)

    b. Tidak punya alat/tenaga kerja yang memadai

    c. Bersengketa diinternal perusahaan atau dengan pihak eksternal

5. Hambatan material

    a. Material sulit diperoleh atau jauh dari lokasi membutuhkan angkutan

    b. Material harus disupply dari oknum tertentu.

Adanya sejumlah pengungsi yang tidak masuk rumah yang telah dibangun juga menambah daftar panjang kendala di lapangan. Penyebab-penyebab tersebut yang teridentifikasi oleh Bepel BRR karena:

1. Kualitas rumah tidak sesuai dengan yang diharapkan

    a. Kayu kropos

    b. Material tidak memenuhi standar

c. Partisi ruangan terbuat dari triplek
d. Kamar mandi tanpa WC
e. Ada closet, tidak ada septic tank
f. Kualitas rumah di desa sebelahnya lebih bagus

2. Prasarana permukiman yang tidak memadai
   a. Tidak tersedia air bersih atau jaringan rusak
   b. Jaringan listrik rusak/tidak ada
   c. Tidak ada saluran pembuangan
   d. Tergenang saat hujan atau air pasang
3. Relokasi jauh dari lokasi asal
   a. Akan kehilangan mata pencaharian bila tinggal di tempat yang baru
   b. Hilangnya ikatan emosional di lingkungan baru
4. Aktivitas keseharian warga telah berpindah
   a. Sekolah anak sudah terlanjur pindah ke sekitar lokasi pengungsian
   b. Di lokasi rumah baru jauh dari pasar dan tempat kerja
5. Tinggal di barak lebih menguntungkan
   a. Tersedia 'Jadup' dari pemerintah
   b. Banyak bantuan dari NGO
   c. Listrik gratis.

Kondisi parahnya kualitas rumah terbangun menurut Bepel BRR disebabkan karena adanya tekanan politik untuk memberdayakan kontraktor lokal yang secara kapasitas tidak mampu memikul beban berat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa pertimbangan yang telah muncul terlihat dalam gambar berikut.



(Sumber: BRR, Kunjungan Kerja Bappenas 4 Desember 2006)

Penyerapan yang sangat rendah untuk sektor jalan disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya kendala pada penyiapan program dan disain, pengangkatan satker dan pengadaan, kemampuan konsultan dan kontraktor dan pengadaan tanah. Keempat kendala yang disebutkan diatas mengindikasikan masih lemahnya koordinasi diantara lembaga perencana. Kendala pada pengangkatan satker dan pengadaan serta kemampuan konsultan dan kontraktor mengindikasikan kelemahan dalam aspek kapasitas pelaksana di lapangan. BRR juga kerap kali berganti prioritas akibat kondisi lapangan yang sangat dinamis. Pada tahap awal BRR berorientasi kepada rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional dan provinsi namun belakangan ternyata jalan kabupaten/kota dan desa ternyata memegang peranan penting dalam transportasi logistik ke daerah terpencil sehingga terjadi perubahan prioritas.

Paket Rehabilitasi Rekonstruksi Jalan nasional dan Provinsi pada Pulau Nias yaitu paket jalan di Nias. Sebanyak 1 paket dan paket jalan di Nias Selatan. Sebanyak 1 paket yang tercantum dalam Rencana Induk dilaksanakan di lapangan oleh Satker BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi jalan Provinsi Sumut dengan perkembangan fisik 65.17%, namun perkembangan anggaran sebesar 85.75%. Hal ini mengindikasikan adanya konsistensi antara pelaksanaan di lapangan oleh BRR dengan salah satu butir Rencana Induk. Adapun ketidakcocokan antara progres fisik dan anggaran mengindikasikan adanya anomali anggaran.

USAID merupakan salah satu donor dengan *commitment* terbesar banyak mengalokasikan di sektor perumahan, infrastruktur perumahan/infrastruktur mikro untuk *watsan* dan *waste management* dan transportasi darat. Alokasi dana terbesar USAID adalah pada sektor transportasi darat yaitu sebesar USD 194,999,982 untuk proyek *Banda Aceh-Meulaboh Road and Bridge Reconstruction and Rehabilitation Project* (sekitar 83% *commitment*). Dana untuk proyek ini terdaftar dalam *list* RAN Database pada Februari 2005, namun sampai saat ini realisasi dan progres fisik atas dana tersebut masih 0%. Artinya sudah lebih dari satu setengah tahun tidak ada perkembangan atas proyek tersebut.

Total proyek yang didanai oleh USAID ada sebanyak 20 proyek. Sampai Juli 2006, berdasarkan RAN Database, baru 4 proyek saja yang berstatus *completed*. Proyek-proyek tersebut adalah:

1. *Construction of permanent housing in Meunasah Tutong village, Jaya sub-district, Aceh Jaya as part of the High Impact Revitalization of the Economy of Aceh (HIRE-Aceh)* program untuk sektor *Housing Development* dengan dana sebesar USD 672,094
2. *Construction of permanent housing in Lambaro village, Jaya sub-district, Aceh Jaya as part of the High Impact Revitalization of the Economy of Aceh (HIRE-Aceh)* program untuk sektor *Housing Development* dengan dana sebesar USD 354,460
3. *Livelihood Revitalisation (Cash-For-Work) for Disaster-Affected Families in Aceh untuk sektor Community Development; Irrigation and Flood Control/ Coastal Protection; Waste Water Management* dengan jumlah dana sebesar USD 292,011

4. *Cash for Work* (CfW) sebesar USD 150,000

b. Penataan Ruang

Kendala terbesar BRR saat ini adalah penataan ruang. Penataan ruang adalah wewenang Pemerintah Daerah. Inisiatif Pemda tidak secepat yang diharapkan. BRR hanya membantu dalam beberapa studi. Village planning sebagai terobosan BRR dianggap jalan tengah yang bisa menyelesailan masalah tata ruang yang, sesuai mandat, harus mengakomodir partisipasi masyarakat. Pada kenyataannya perpaduan antara bottom up dan top down yang tidak terdapat dalam Rencana Induk ini belum terealisasi seluruhnya karena butuh waktu yang relatif lama mengingat proses partisipasi masyarakat.

c. Pertanahan

Kebijakan pertanahan didasarkan pada Perangkat hukum dalam pertanahan yaitu: Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2005, Surat Keputusan Ka BPN nomor 114-II-VII/2005 mengenai Manual Pendaftaran Tanah Sistematik melalui CDA, Guidelines pengadaan tanah, dan Perpu penanganan masalah hukum pasca gempa.

RALAS merupakan proyek pertama yang dibiayai oleh MDF dan merupakan proyek andalan BRR dan diharapkan sebagai ujung tombak dalam penyelesaian sengketa pertanahan serta mendukung program pembangunan perumahan. dimana semua rumah yang dibangun akan diprioritaskan untuk disertifikatkan (*pertemuan monev dengan BRR tanggal 4 Desember 2006).* Konsep awal dari RALAS adalah adanya partisipasi masyarakat dan NGO membantu memfasilitasi dibantu penggunaan media yang luas. Kemudian dilakukan pembukuan tanah dijital. Dengan adanya teknologi dijital, maka semua bidang tanah tersimpan dalam 'buku tanah'. RALAS diharapkan menjembatani kendala yang dihadapi sampai saat ini, terutama batas tanah tidak jelas, pemilik tanah tidak ditempat, pewarisan kepastian tanah musnah dan terhambatnya Perpu. Hambatan tersebut diperburuk dengan situasi terakhir di lapangan. Kondisi terakhir lapangan sesuai kunjungan kerja Tim Bappenas adalah banyak NGO dengan dana dari donor, off budget, yang sudah melaksanakan community mapping (kegiatan penunjukkan batas bidang tanah kembali oleh masyarakat sendiri difasilitasi NGO dan kemudian dibuat *sketch* dilanjutkan dengan dipetakan pada citra Ikonos) dan mulai membangun rumah.

Pada akhirnya, kegiatan penunjukkan batas bidang tanah kembali banyak mengandalkan kesepakatan masyarakat karena BPN tidak mempunyai data yang lengkap mengenai kepemilikan tanah, buku tanah yang ada dan data PBB digunakan sebagai *cross reference*. RALAS melalui Community Driven Adjudication melakukan kegiatan penelitian riwayat tanah secara simultan seluruh warga desa dalam rangka pendaftaran tanah (pensertifikatan tanah) diharapkan membantu penyelesaian pertanahan.

Dengan terbitnya Perpu diharapkan adanya kesepakatan dengan masyarakat. Dengan adanya Draft Perpu penanganan masalah hukum pasca tsunami, diharapkan menjadi jembatan penyelesaian masalah, terutama masalah pertanahan. Perpu dapat memperhatikan kondisi lapangan dimana masyarakat

dibantu Donor melalui NGO-NGO sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pertanahan (community mapping dan village planning). Perpu juga diharapkan mengatur hal yang tidak normal.

Draft PERPU pada awalnya, sebenarnya belum menjawab beberapa hal, diantaranya kekuatan kesepakatan masyarakat sebagai 'alas hak' (community mapping dan penataan desa/village planning yang diintegrasikan dalam Community Driven Adjudication). Draft Perpu juga belum menjawab apakah masyarakat dapat memilih apa yang diinginkan. Kemudian definisi tanah musnah (berkaitan dengan relokasi perumahan/tanah pengganti), meniadakan dokumen pendukung, mekanisme pengadaan tanah untuk relokasi perumahan, karena masyarakat dapat memilih lokasi relokasi, tanah dibeli atas biaya APBN dan akan dihibahkan kepada masyarakat tersebut. Hasil diskusi publik yang dilakukan Unsyiah sudah ada perbaikan baik substansi maupun kalimat, terutama yang berkaitan dengan kewenangan Baitul Mal serta dalam kaitannya dengan Mahkamah Syariah. Lebih lanjut Masih perlu perbaikan istilah dan definisi tentang tanah musnah yaitu tanah yang berubah menjadi laut, dalam kurun waktu > 2 tahun tidak muncul kembali, tanah pengganti yaitu tanah untuk relokasi perumahan sebagai pengganti tanah musnah. Kedua definisi tersebut dapat berimplikasi pada muatan draft Perpu. Akhirnya, RALAS yang diharapkan mejadi ujung tombak penyelesaian masalah tanah terhambat oleh perpu yang tak kunjung terbit sehingga RALAS 2005 akan diulang pelaksanaannya.

Dari segi anggaran, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran BRR NAD-Nias sampai dengan 24 November 2006 : Untuk Satker BRR-Pembinaan Teknis Perumahan Infrastruktur dan Penatagunaan Lahan NAD-Nias, persentase Realisasi DIPA 2005 & L: 57,44%. yang sama dengan status 30 Juni 2006 menunjukan tidak adanya kemajuan. Laporan Realisasi Anggaran Bapel-BRR NAD-Nias sampai dengan 24 November 2006 : untuk Satker Bapel BRR-Pengelolaan Pertanahan NAD-Nias, persentase Realisasi DIPA 2005 & L: 88,53%. juga sama dengan status 30 juni 2006.

Aspek konsistensi dalam pelaksanaan bidang pertanahan dengan Rencana Induk seperti yang telah disebutkan diatas, tercakup dalam kegiatan RALAS kecuali penyusunan rencana tata guna tanah dan konsolidasi tanah. Kedua kegiatan tersebut telah tercakup dalam kegiatan Bapel BRR yang lain yaitu perencanaan desa atau *Village Planning* yang dalam pelaksanaanya melibatkan banyak NGO. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, pelaksanaan konsolidasi tanah baru berhasil dilaksanakan hanya pada satu desa yaitu Kampung Lambung di daerah Ulele Banda Aceh. Untuk penanganan sengketa pertanahan yang terjadi di Aceh tetap terus dilakukan upaya arbitrase oleh BPN dengan mengikutsertakan pihak yang dapat membantu seperti Mahkamah Syariah, Pengadilan, Baitul Mal dan lain lain. Hal-hal tersebut diatas selain menggambarkan konsistensi dengan Rencana Induk juga menggambarkan koordinasi dan konsultasi para pelaku rehabilitasi bidang pertanahan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh sudah mengacu kepada Rencana Induk, hanya saja dalam pelaksanaan nya masih terdapat berbagai kendala sehingga pelaksanaan RR pertanahan di Aceh tidak optimal. Salah satu hambatan terbesar adalah payung hukum proses sertifikasi tanah.

d. Lingkungan Hidup & SDA

Kegiatan lingkungan hidup dan SDA LH & SDA dalam Rencana Induk memperlihatkan kegiatan yang identik dengan poin yang terdapat dalam Renstra BRR. Sebagai contoh, kegiatan pembersihan sampah tsunami yang digalakkan di NAD merupakan salah satu butir dalam Rencana Induk. Hal ini membuktikan adanya konsistensi dalam salah satu kegiatan di lapangan, namun tidak diketahui secara pasti siapa saja pelaku dalam kegiatan tersebut.

Berbagai studi telah dilakukan dalam sektor Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, namun belu terlihat program dan kegiatan nyata di lapangan. Berbagai studi tersebut adalah Environmental Baseline Study for Coastal Area (BRR), Strategic Environmental Framework for a More Environmentally Sound Reconstruction of Aceh Province (UNEP), Mangrove for the Future: A strategy for promoting investment in coastal ecosystem conservation (UNDP- IUCN), Institutional Review – Environmentally Sound Reconstruction of Aceh Province (BRR), Environmental Aspects of Reconstruction in Nanggroe Aceh Darussalam Province (Indonesia) Two Year after the Tsunami: Brown Environmental Issues – UNEP, Environmental Issues in Aceh and Nias 2006: Ecosystem and Biodiversity (UNEP) Etc. Kegiatan-kegiatan tersebut diatas melibatkan institusi lintas sektor sehingga koordinasi dan konsultasi terjalin dalam kegiatan tersebut.

Tantangan yang perlu dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup dan SDA adalah sebagai berikut :

- Integrated Program for Environment Management
- Financing Plan for Environment Development
- Optimum Utilization of Study Report & SEF
- Optimalization of RAND System
- Program Implementation within to Regional through joint secretariat Different Approach/Terminology Used Environmental & Natural Resources Management (SENRA, SEA, EE, REA, ESA, AMDAL, UKL, UPL, IARAP, EDAM, etc.) (*diskusi kunjungan kerja tanggal 4 Desember 2006*).

2. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Antara perencanaan yang ada dalam rencana induk, secara umum pelaksanaan oleh BRR mengacu kepada rencana induk, namun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh BRR, tetapi dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga maupun lembaga donor.

a. Sub Bidang Pendidikan

Dari 9 program yang ada dalam rencana induk, terdapat 2 program/kegiatan yang belum terlaksana oleh Bapel BRR yaitu *pertama*, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. *Kedua*, penelitian dan pengembangan pendidikan.Konsistensi terlihat dengan pelaksanaan kegiatan fisik oleh BRR berupa rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), bantuan beasiswa, pemberian bantuan buku, dan trauma

conselliing kepada para korban bencana. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan yang terdapat dalam program pelaksanaan pendidikan dari tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi. Selain itu juga pelaksanaan manajerial sekolah dan pelatihan tenaga didik, merupakan konsistensi pada program manajemen pelayanan pendidik. Disamping itu juga pelaksanaan pelatihan komputer dan bahasa inggris bagi tenaga pendidik dan dinas pendidikan, juga menunjukkan konsistensi terhadap program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang tercantum dalam rencana induk.

b. Sub Bidang Kesehatan

Dari 11 program/kegiatan yang ada dalam rencana induk, terdapat 3 program yang tidak dilaksanakan oleh Bapel BRR yaitu *pertama*, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, *kedua,* lingkungan sehat. *Ketiga*, penelitian dan pengembangan kesehatan.3 kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga (Departemen Kesehatan). Konsistensi kegiatan yang dilaksanakan BRR dengan program rencana induk terlihat pada pelaksanaan rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskeslit. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan program upaya kesehatan masyarakat yang tercantum dalam rencana induk.Dan pelaksanaan rehabilitasi rumah sakit juga merupakan bagian kegiatan dalam program upaya kesehatan perorangan yang ada dalam rencana induk.Pembangunan gudang farmasi yang dilaksanakan BRR, juga merupakan bagian kegiatan yang ada dalam program obat dan perbekalan kesehatan yang dimuat dalam rencana induk.Serta rehabilitasi kantor dinas kesehatan merupakan bagian kegiatan dalam program kebijakan dan manajemen pembangunan sosial yang dimuat dalam rencana induk.

c. Sub Bidang agama

Di bidang agama, terdapat 3 program dalam rencana induk. Konsistensi kegiatan yang dilaksanakan oleh BRR terlihat pada pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan mesjid dan meunasah yang merupakan kegiatan yang terdapat dalam program peningkatan pelayanan kehidupan beragama dalam rencana induk. Disamping itu juga terdapat pelaksanaan Musyawarah Ulama Se-Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan kegiatan yang terdapat dalam program peningkatan, pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan di rencana induk. Serta pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mental spritual pengungsi di barak-barak juga merupakan bagian dari kegiatan dari program peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Terdapat 3 program dalam rencana induk sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pelaksanaan kegiatan oleh BRR mengacu kepada 3 program yang terdapat dalam rencana induk yaitu program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender konsisten dengan kegiatan penguatan kelembagaan pelaksanaan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) oleh BRR, program peningkatan kualitas hidup dengan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum dan trauma center dan WCC yang dilaksanakan oleh BRR serta program perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, konsistensi dengan kegiatan pembuatan akte kelahiran gratis oleh BRR.

f. Sub Bidang sosial

Terdapat 4 program sub bidang sosial yang ada dalam rencana induk dan pelaksanaan kegiatan oleh BRR mengacu kepada 4 kegiatan tersebut, yaitu Bantuan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

g. Sub Bidang kependudukan dan Keluarga Berencana

Terdapat 2 program dalam rencana induk sub bidang kependudukan dan KB yaitu penyempurnaan dan pengembangan statistik dan pelayanan keluarga berencana. Khusus bidang kependudukan BRR tidak melaksanakan program dan kegiatan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, karena kegiatan ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

h. Sub Bidang Budaya

Terdapat 3 program dalam rencana induk sub bidang Budaya yaitu pengembangan nilai budaya, pengelolaaan kekayaan budaya dan pengelolaan keragaman budaya. Konsistensi terhadap program rencana induk, terlihat pada kongres kebudayaan Aceh, rehabilitasi sarana dan prasarana situs/benda agar alam serta museum oleh BRR. Kegiatan ini merupakan cakupan kegiatan dari program pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya serta pengelolaan keragaman budaya dalam rencana induk.

i. Bidang Pemuda dan Olahraga

Konsistensi program rencana induk sub bidang pemuda dan olahraga dengan realisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR terlihat pada pelaksanaan kegiatan pembibitan atlet, pelaksanaan pekan olahraga daerah serta rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana olahraga.Kegiatan ini merupakan bagian dari cakupan kegiatan dari program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda, pembinaan dan permasyarakatan olahrag serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Selain itu, dari 8 bidang yang terdapat dalam rencana induk, terdapat 1 program bidang yang tidak terlaksana oleh BRR yaitu pendataan penduduk NAD dan Nias pasca tsunami.

3. Bidang Pemulihan Perekonomian

a. Sub bidang Kelautan dan Perikanan

Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lampulo sudah sesuai dengan rencana induk dalam hal pelaksanaan kegiatannya, tetapi dalam realisasi anggaran sejumlah Rp. Rp.53.469.605.616,- tidak sesuai dengan yang ada di Rencana Induk yaitu sejumlah Rp. 4,2 milyar. Pelaksanaan kegiatan satker BRR-Kelautan dan Perikanan sudah mengacu pada rencana induk, tetapi masih ada 6 kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu (1) Pembinaan dan pembangunan BBIP; (2) BB Ulee Lheu dan Loka Ujung Batee; (3) BPIP; (4) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong dan pengadaan kapal latih/riset; (5) Pos

karantina ikan Sulltan Iskandar Muda; dan (6) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

b. Sub bidang Industri Kecil dan Menengah

Untuk satker BRR-Industri Kecil dan Menengah NAD dan Satker BRR-Industri dan Pertambangan NAD, pelaksanaan program dan kegiatan serta lokasi kegiatannya belum seluruhnya mengacu pada rencana induk. Hanya kegiatan BRR berupa belanja modal gedung dan bangunan, pembangunan gedung pusat Batik Aceh dan Belanja untuk LKM saja yang sudah mengacu pada rencana induk. Untuk satker Industri dan pertambangan sebagian sudah mengacu pada rencana induk.

c. Sub Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Untuk satker BRR-Koperasi dan Usaha Kecil NAD belum mengacu pada rencana induk. Pada realisasi kegiatan yang dilakukan satker ini berupa pendidikan dan pelatihan juga berupa pemberian bantuan sarana kerja LKM dan bantuan langsung masyarakat sedangkan dalam rencana induk berupa Perbaikan Fasilitasi Kios UKM, Perbaikan Gerobag Dorong UKM, Pendataan Profil Koperasi dan Pendataan Profil UKM. Untuk satker BRR-produksi tanaman pangan, realisasi semua kegiatan sudah mengacu pada rencana induk yang menekankan pada Rehabilitasi/pembangunan saluran air dan irigasi dan rehabilitasi struktur Lahan, Pembangunan unit perbibitan/perbenihan, Pembangunan fasilitas Pemasaran hasil pertanian, Penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna, Rehabilitasi/ pembangunan prasarana dan sarana kerja pertanian.

d. Sub Bidang Perdagangan, Pariwisata dan Investasi

Untuk satker BRR-Perdagangan, Pariwisata dan Investasi hampir seluruh kegiatannya sudah mengacu pada Rencana Induk. Sedangkan untuk satker-satker lainnya (BRR-Peberdayaan Ekonomi dan Usaha, BRR-Deputi Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha, BRR-Perkebunan NAD, BRR-Kehutanan NAD, BRR-Pesisir dan Pengembangan Lingkungan Hidup NAD, BRR-Life Skill, satker BRR-Tenaga Kerja NAD, BRR-Peternakan NAD, BRR-Ketersediaan dan Distribusi Pangan NAD) belum dapat diketahui kekonsistenannya terhadap Rencana Induk karena belum diperolehnya data dari masing-masing satker terkait.

Proyek strategis BRR pada Renstra BRR sudah mengacu pada Rencana Induk yaitu Pengembangan Pelabuhan Krueng Geukuh dapat dikembangkan menjadi pelabuhan container, Pelabuhan Lhoknga (milik PT. Semen Andalas Indonesia khusus untuk pengangkutan semen, Pelabuhan Malahayati di Krueng Raya (Kab.Aceh Besar), Pelabuhan Krueng Geukuh di Lhokseumawe, dan Pelabuhan Kuala Langsa di Aceh Timur. Pembangunan Tsunami Living Museum sebagai penyedia informasi-informasi yang akurat yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem deteksi dini gelombang tsunami (*early warning system*). Selain itu, proyek pengembangan kawasan Sabang menjadi salah satu perhatian BRR karena menjadikan Kota Sabang sebagai pintu gerbang masuknya masyarakat internasional ke Provinsi NAD khususnya dan Indonesia pada umumnya bertujuan menjadikan Kota Sabang sebagai International Hub Port (Pusat Pelabuhan Internasional). Pengembangan Lhokseumawe sebagai pusat

perdagangan., kemudian Pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Nias, menjadi perhatian BRR. Selain itu, dalam kaitan dengan investasi, telah dilakukan Pembentukan Aceh Micro Finance sebagai Lembaga Keuangan Mikro untuk Penguatan Peran Koperasi dan UMKM, serta Pelatihan Peningkatan Keahlian dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Beberapa permasalahan yang dihadapi BRR dalam pembangunan aspek-aspek sub bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi adalah : (1) Pembangunan gedung kantor UPTD dari sumber Dana APBN 2005 belum selesai dikerjakan, sehingga personal operasional Pelabuhan belum dapat bekerja dengan baik; (2) Dermaga Tambat yang hancur/rusak sepanjang 141 m belum diperbaiki sehingga mengganggu kegiatan sandar dan tambat kapal. Perencanaan konstruksi batal. RAP dan RKS tidak selesai; dan (3) Pembangunan Pabrik Es dan Cold Storage belum dilaksanakan (bantuan dari Jepang-JICS). Untuk kebutuhan es masih dipasok dari Pabrik Es Lam Lagang dan Pabrik Es Lam Penerut.

Adapun hambatan dalam penyerapan realisasi fisik dan keuangan BRR Nias (*Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi kemajuan realisasi fisik dan keuangan APBN TA.2006 BRR Nias Status : 28 November 2006*) adalah:

1. Hambatan yang sudah dapat diatasi secara umum ada 2 (dua) hambatan utama yang mempengaruhi tingkat penyerapan, yaitu: a). *Pembentukan organisasi satker baru pada bulan april 2006*, masa persiapan dan pelelangan memakan waktu rata – rata 2 (dua) bulan, sehingga pelaksanaan fisik rata – rata baru dimulai pada bulan Juli 2006, b). *Proses revisi anggaran* yang membutuhkan waktu 1 bulan.
2. Hambatan yang dominan sedang terjadi saat ini, yaitu: a). Lamanya proses pengadaan lahan b). Terjadinya kelambatan dalam pelelangan/ tender ulang, c). Ketidaksiapan satker mengatur volume kegiatan yang melonjak tinggi dengan SDM yang terbatas, d). Lambatnya proses penentuan beneficery, e). data realisasi progres hanya dari penyerapan keuangan, belum termasuk penyerapan fisik, masih ada kendala dalam pelaporan realisasi fisik dan hambatan-hambatan lain seperti lamanya proses revisi anggaran yang memerlukan persetujuan pusat/diperlukan proses revisi anggaran, pembuatan rencana yang tidak akurat, kendala pengumpulan data realisasi progress fisik dari satker (data belum yang terbaru/pengiriman tidak tepat waktu), dan lamanya proses persetujuan terkait dengan hibah.

Untuk K/L (kementerian/lembaga), perencanaan yang dijadikan acuan adalah Rencana Induk. Untuk Departemen Kelautan dan Perikanan, seluruh program dan kegiatan (juga loksasi kegiatan) yang dilaksanakan telah mengacu/ konsisten terhadap rencana induk. Pada Departemen Pertanian, dari 7 program (yang terdapat dalam rencana induk) yang masing-masing terdiri dari beberapa kegiatan, hanya pelaksanaan 3 program dan kegiatan yang telah konsisten terhadap rencana induk, sedangkan 4 program dan kegiatan lainnya belum ada dalam kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Pertanian. Kemudian, Departemen Perdagangan, pelaksanaan 2 Program dan kegiatan konsisten terhadap perencanaan program dan kegiatan pada rencana induk

(baik dalam hal program, kegiatan, anggaran juga lokasi). Sedangkan pelaksanaan 4 program lainnya konsisten terhadap program dan kegiatan saja. Pelaksanaan Departemen Perindustrian, 2 program dan kegiatan konsisten terhadap perencanaan program dan kegiatan pada rencana induk (baik dalam hal program, kegiatan juga lokasi). Selanjutnya Departemen Tenaga Kerja, Pelaksanaan 3 program dan kegiatan konsisten terhadap perencanaan program dan kegiatan pada rencana induk (baik dalam hal program, kegiatan juga lokasi). Sedangkan 2 program dan kegiatan lainnya sudah mengacu pada program dari rencana induk saja. Pelaksanaannya belum menaruh perhatian pada pelaksanaan kegiatan dari rencana induk. Tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan Departemen Pariwisata di tahun 2005 sehingga pelaksanaannya tidak konsisten terhadap rencana induk (Departemen belum mendapatkan data maupun informasi dari Dinas terkait mengenai pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias).

Pada Pemerintah Daerah, perencanaan yang yang dijadikan acuan adalah Rencana Induk. Untuk Dinas Koperasi & PKM, pelaksanaan program dan kegiatan hanya menekankan pada pemberian bantuan modal usaha mikro kecil melalui lembaga keuangan mikro, Belanja langsung dan tidak langsung Koperasi & UKM, Pengembangan kewirausahan dan sistem pendukung KUKM. Sedangkan pada rencana induk, program menekankan pada rehabilitasi dan rekonstruksi sarana publik, kegiatannya menekankan pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasar, perbaikan fasilitas kios dan gerobak dorong UKM dan Pendataan profil Koperasi & UKM. Sehingga untuk dinas ini, pelaksanaan program dn kegiatannya tidak mengacu (tidak konsisten) terhadap rencana induk. Walaupun data pelaksanaan Dinas Kehutanan telah diperoleh tetapi tidak dapat dilihat konsistenannya karena tidak ada perencanaannya dalam rencana induk yang bisa menjadi acuan pelaksanaan dinas ini. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan sudah mengacu pada program dari rencana induk. Namun hanya melaksanakan 5 kegiatan dari 16 kegiatan pada rencana induk. Sehingga dinas ini dalam pelaksanaan kegiatannya belum sepenuhnya mengacu pada rencana induk. Sedangkan Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 4 program dari 5 program yang tercantum dalam rencana induk. Satu program yang belum dilaksanakan adalah program rehabilitasi dan rekonstruki prasarana publik. Tetapi pelaksanaan kegiatannya secara umum masih mengacu pada rencana induk walaupun tidak secara rinci melaksanakan kegiatan yang ada di rencana induk. Untuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan, kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias sudah mengacu pada rencana induk. Kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum sepenuhnya mengacu pada rencana induk baik di bidang perdagangan maupun perindustrian karena mayoritas kegiatannya adalah memberikan bantuan usaha ekonomi produktif. Sedangkan untuk 6 dinas lainnya yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan, Badan Ketahanan Pangan, PERUM BULOG, BKPMD dan Dinas Pertambangan tidak terdapat data pelaksanaan.

Terkait dengan Donor / NGO, konsistensinya belum teridentifikasi karena belum diperoleh data perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari para donor/NGO sehingga tidak bisa dibandingkan dengan data pelaksanaan dari donor/NGO tersebut. Belum diketahui apakah data perencanaan yang belum diperoleh mengacu pada rencana induk atau tidak. Yang dapat dilihat dari data yang

diperoleh dari RAN Database hanya konsistensi dari anggaran yang digunakan (karena status proyek telah selesai dilaksanakan maka antara komitmen anggaran dan realisasi anggaran dapat dibandingkan). Untuk ECHO, Samaritan's Purse, Man Ferrostaal, World Vision, USAID, UNDP, GTZ anggaran di komitmen sesuai dengan realisasi anggaran (sudah terjadi konsistensi dalam hal anggaran). Sedangkan Belgian Red Cross, JICA, FAO seharusnya terjadi kesesuaian antara komitmen anggaran dan realisasi anggarannya, dimana realisasi anggaran lebih kecil dari komitmen anggaran.

4. Bidang Pemulihan Kelembagaan

Konsistensi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias bidang kelembagaan dengan Rencana Induk pada 4 (empat) program yaitu 1) Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah (melalui rekrutmen dan pelatihan); 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah; 3) Penataan Admnistrasi Kependudukan; dan 4) Pengelolaan Pertanahan.

Untuk pelaksanaan kegiatan non fisik yang sudah terealisasi adalah rekrutmen PNS, percepatan pemrosesan kepegawaian, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan/workshop. Hingga Bulan Oktober 2006 untuk pembangunan yang sudah terealisasi oleh BRR, Pemda, Donor, dan seluruh stakeholder adalah Kantor Desa, Camat, Bupati, Dinas, Mukim/Bale sebanyak 330 unit, dan Rumah Dinas sebanyak 301 unit.

Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan BRR melalui satker menunjukkan belum semua kegiatan dapat direalisasikan. Pelaksanaan kegiatan di lapangan sering berubah dari rencana awal karena kondisi yang dinamis di lapangan. Berdasarkan mayoritas jawaban kuesioner diketahui bahwa perencanaan dengan pelaksanaan Bapel BRR dilapangan untuk bidang kelembagaan dinilai cukup baik sebesar 47,8%. Kendala utama yang terjadi di lapangan di bidang kelembagaan adalah:

1. Penyediaan lahan dari Pemda dan pembebasan tanah untuk pelaksanaan kegiatan fisik terkendala. Walaupun sudah terdapat pembagian peran diantara Pemda, BRR dan Donor, namun tidak berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan hingga TA 2006 terutama untuk mengatasi tanah lokasi kantor instansi vertikal
2. RDTR yang belum diterbitkan., padahal banyak program pembangunan khususnya di Calang dan Sigli. Gedung-gedung yang sudah mendapat bantuan terhambat disebabkan belum adanya dokumen RDTR.. Untuk wilayah kehancuran kecil seperti Sigli, bangunan kantor dapat digeser/ dipindahkan ke lokasi terdekat.
3. Sampai sekarang BRR belum menerima Perpu tentang Penanganan Permasalahan Hukum, walaupun koordinasi sudah dilakukan melalui pertemuan BRR dengan Menteri Bappenas dan tokoh Aceh. Dari pertemuan tersebut didapatkan solusi bahwa awal tahun depan Perpu tersebut sudah dapat disahkan.
4. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik tidak mencukupi
5. Keterbatasan SDM pada Satuan Kerja

Konsistensi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias bidang hukum dengan rencana induk pada 2 (dua) program yaitu 1) Penambahan dan peningkatan kualitas SDM aparatur hukum, dan 2) Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana hukum. Berdasarkan mayoritas jawaban kuesioner diketahui bahwa perencanaan dengan pelaksanaan Bapel BRR dilapangan untuk bidang hukum dinilai cukup baik sebesar 56,5%.

Untuk pelaksanaan kegiatan non fisik yang sudah terealisasi adalah peningkatan kapasitas SDM aparatur hukum melalui pelatihan/workshop. Hingga Bulan Oktober 2006 untuk pembangunan fisik yang sudah terealisasi oleh BRR, Pemda, Donor, dan seluruh stakeholder adalah Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan & Rumah Tahanan sebanyak 8 unit, Kantor Imigrasi sebanyak 2 unit; dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah syari'ah, Mahkamah Militer, PTUN sebanyak 17 unit, serta Rumah Dinas Hakim.

Salah satu program pada Rencana Induk bidang hukum yaitu menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, berupa kegiatan penyusunan substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang hukum. Hingga Bulan Desember 2006, setelah hampir 2 tahun pasca bencana tsunami dan 1,5 tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR, status Perpu tersbut belum disahkan oleh Presiden. Hal ini tentunya akan menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias terutama di bidang bidang pertanahan, perbankan, serta pewarisan dan perwalian. Permasalahan yang muncul diantaranya:

- Penyelesaian permasalahan warisan/ahli waris menggunakan regulasi yang lama, sehingga penyelesaiannya agak alamban.
- Bank di Aceh belum bisa memberi kebebasan terhadap ahli waris.
- Sertifikat tanah banyak yang belum diberikan oleh BPN kepada pemiliknya karena belum adanya landasan hukum.

Bappenas sudah berupaya mempercepat pengesahan Perpu tersebut melalui Dewan Pengarah BRR yang sudah mengirim surat ke Presiden, namun belum ada tanggapan positif hingga saat ini. Dari Kementerian/Lembaga terkait yaitu Departemen Hukum dan HAM akan melakukan pendekatan dengan DPR agar Perpu tersebut dapat diperkuat dengan UU ketika ditetapkan oleh pemerintah. BRR juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Bappenas dan tokoh-tokoh Aceh, dan dari pertemuan tersebut didapatkan solusi bahwa diharapkan awal tahun depan Perpu tersebut sudah dapat disahkan.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan kelembagaan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu Badan Kesbang dan Linmas Provinsi NAD. Berdasarkan rencana kerja badang kesbang dan linmas tersebut, diketahui bahwa rincian kegiatannya terbagi dua yaitu : 1) untuk Pokja Pemulihan Kelembagaan, dan 2) Pokja Reintegrasi Mantan GAM. Konsistensi di antara perencanaan Rencana Induk dengan Badan Kesbang dan Linmas, yaitu pada Program Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah, dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Dari perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh 3 donor terbesar di bidang pemulihan kelembagaan yaitu Wold Bank, MDTF (*Multi Donor Trust Fund*), dan *German Development Cooperation through* GTZ. Secara umum proyek dari ketiga lembaga donor ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah. Dari perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh donor tersebut diketahui ada donor yang konsisten dan yang kurang konsisten dalam pelaksanaan kegiatannya, yaitu :

1. Donor World Bank pada proyek Bantuan Untuk Daerah Miskin dan Tertinggal di Aceh and Nias. Dari *committed* sebesar 48,900,000 USD, hingga Bulan November 2006 belum ada realisasi anggaran (*disbursed*), dan status implementasi proyek tersebut di RAN Database berada pada tahap desain. Seharusnya proyek yang hanya berlangsung selama 1 bulan (26 April 2006 hingga 26 Mei 2006) sudah selesai dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan proyek ini belum konsisten antara perencanaan dengan pelaksanaan.
2. Donor MDTF (*Multi Donor Trust Fund*) terlibat ke dalam proyek :
    a. Bantuan Penguatan Kapasitas dan Pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemulihan Komunitas di Aceh dan Nias

       Dari *committed* sebesar 5.103.800 USD sudah terealisasi *(disbursed)* sebesar 2.553.390 USD (50 %) dengan status proyek sedang berlangsung. Durasi proyek ini selama 4 tahun, dari Januari hingga Desember 2009. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan proyek ini sudah konsisten antara perencanaan dengan pelaksanaan.

    b. *Technical Support* untuk BRR

       Dari *committed* sebesar 14.700.000 USD sudah terealisasi sebesar 11.000.000 USD (75 %) dengan status implementasi proyek sedang berlangsung, mengingat durasi proyek ini selama 23 bulan, dari 1 Agustus 2005 hingga 30 Juni 2007. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan proyek ini sudah konsisten antara perencanaan dengan pelaksanaan.
3. *Donor German Development Cooperation through* GTZ (*German Technical Cooperation*) terlibat dalam proyek yaitu :
    a. Rekonstruksi dan Pengembangan dari Administrasi Penduduk di NAD (PAS NAD)

       Dari *committed* sebesar 6,172,839 USD sudah terealisasi sebesar 2,592,592 USD (42 %). Status implementasi proyek sedang berlangsung, karena memang durasi proyek ini selama 43 bulan, dari 1 Juli 2005 hingga 1 Januari 2009. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan proyek ini sudah konsisten antara perencanaan dengan pelaksanaan.

    b. Bantuan Kepada Pemerintah Lokal Mengenai Rekonstruksi yang Berkelanjutan

       Dari *committed* sebesar 34,650 USD sudah terealisasi 100 %. Status implementasi proyek sedang berlangsung, karena memang durasi proyek ini selama 40 bulan, dari 1 September 2005 hingga 1 Januari

2009. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan proyek ini belum konsisten antara perencanaan dengan pelaksanaan, karena proyek tersebut akan berakhir pada tahun 2009 namun anggaran sudah terealisasi 100%

c. Pasukan Perdamaian Internasional Indonesia (Proyek Yayasan Bina Perdamaian Internasional Indonesia)

Dari *committed* sebesar 1,570,065 USD sudah terealisasi sebesar 664,265 USD (42 %) dengan status implementasi proyek sedang berlangsung, mengingat durasi proyek ini selama 31 bulan, dari 1 Januari 2005 hingga 31 Juli 2007, maka dapat dikatakan pada proyek ini sudah konsisten antara perencanaan dan pelaksanaan

5. Bidang Pemulihan K3M dan Reintegrasi Mantan GAM

Pada bidang pemulihan K3M bahwa antara pelaksanaan dan perencanaan yang dilakukan oleh Bapel BRR melalui satuan kerjanya telah menunjukkan pada tingkat konsistensi yang baik pada saat dilaksanakan di lapangan, seperti yang tergambar pada beberapa program/kegiatan di bidang Refungsionalisasi Kelembagaan TNI yang dilaksanakan oleh Mabes TNI, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.4
Persandingan Beberapa Contoh Kegiatan Rencana Induk dan Realisasi dari Bapel RR yang telah menunjukkan tingkat Konsistensi yang baik

Rencana Induk	Lokasi	Kegiatan Bapel RR	Lokasi	Satker Pelaksana
Rehabilitasi kantor Dilmil/ Ormil-101/ Babinkum	Banda Aceh	Pkt Kantor dan rumdis Dilmil 101	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias
Pengadaan Material Bidang Alpal TNI AU	NAD	Pengembangan Materil	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias
Rehabilitasi Lanud Maimunsaleh	Sabang	Lanud Maimunsaleh	Sabang	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias
Rehabilitasi Satrad 209 Sabang	Sabang	Satrad 233 Sabang	Sabang	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias
Rehabilitasi Lanud Iskandar Muda	Banda Aceh	Lanud SIM	Aceh Besar	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias
Rehabilitasi Satrad 204 Lhokseumawe	Lhokseumawe	Satrad 231 Paket 1	Lhokseumawe	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias

Sumber : Sandingan dari Rencana Induk dan Realisasi Bapel RR (Status: Juli 2006)

Terdapat ketidakkonsistenan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaanya di lapangan, misalnya pada program kegiatan pengembangan incentive framework yang pelaksanaannya berbeda dengan apa yang dimaksudkan di dalam rencana induk dan rencana aksi BRR. (Hasil *Evaluasi 4K pada diskusi Pokja GAM dalam Lokakarya P3RIRRWANS, 19 Desember 2006, Banda Aceh*).

Berbeda halnya pada satuan kerja yang berada dibawah kementerian/lembaga konsistensi ini hanya ditunjukkan dengan kegiatan intern kementerian/Lembaga

namun sinergi dan terdapat kesesuaian di lapangan. Hal ini tidak terlihat pada lembaga Donor/ NGO yang lebih mengambil peran masing-masing pada tingkat dokumen perencanaan dan pada pelaksanaan, mereka terlihat sangat proaktif dalam agenda-agenda kegiatan dilapangan. Sedangkan pada tingkat pemerintah daerah memiliki kesesuaian yang baik dalam hal konsistensi, karena msih merujuk pada sistem birokrasi, apa yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin dalam merealisasikannya.

Sedangkan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan reintegrasi mantan anggota GAM, tapol/napol, korban konflik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat provinsi NAD, adalah bahwa pada perencanaan dan pelaksanaan BRA telah cukup konsisten dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan dukungan dari Kesbang Linmas Pemda prov/kab/kota di seluruh NAD, dan dukungan pelaksanaan teknis dari Bank Dunia, UNDP dan beberapa Lembaga Donor yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa NGO/ Lemnaga Donor konsisten dengan program reintegrasi masyarakat NAD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya konsistensi yang cukup antara yang diprogramkan oleh BRA dengan kegiatan yang dilaksanakan Kesbang Linmas, dan Bank Dunia, dan beberapa lembaga donor lainnya, juga termasuk NGO. Seperti halnya UNDP yang ikut mendukung terselenggaranya kegiatan Pilkada agar tepat waktu. Pada tataran Kementerian/ Lembaga, Kemenko Polhukam mendorong pelaksanaan sosialisasi MoU dan UU PA ke seluruh pelosok di 21 Kabupaten/ Kota di dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan Pemda ikut mendorong pendirian partai lokal. (Hasil *Evaluasi 4K pada diskusi Pokja GAM dalam Lokakarya P3RIRRWANS, 19 Desember 2006, Banda Aceh*).

5.1.3 Konsistensi Antar Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Salah satu konsistensi antar pelaksana yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi terlihat dari diadakannya lokakarya CEPP di Banda Aceh. Pelaksanaan lokakarya ini melibatkan berbagai stakeholders yang membahas tentang aspek lingkungan hidup. Lokakarya ini bertujuan untuk mendapat masukan lebih lanjut mengenai pengembangan konsep dari kajian CEPP Project ini dari stakeholders terkait seperti Bapel BRR, Bappeda NAD, Bapedalda Kab/ Kota, serta LSM. CEPP Project ini merupakan kajian terhadap aspek-aspek lingkungan yang terancam menjadi kritis akibat dampak kegiatan pembangunan, terutama lingkungan biofisik, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Kegiatan ini dalam menemukan titik singgung dalam kegiatan kajian dan studi lingkungan.

Konsistensi juga terlihat dari upaya BRR membangun regional offices dan join secretariate (JS) untuk menggalang koordinasi dengan berbagai stakeholders. Pimpinan JS ini dimungkinkan dipegang oleh kepala regional BRR atau kepala daerah setempat. Kegiatan dalam JS adalah screening proposal, yang berasal dari berbagai stakeholders, berdasarkan evaluasi prioritas, aspek teknis dan lingkungan sehingga muncul ‘kegiatan terpilih’. Dalam pembangunan

infrastruktur dan perumahan BRR juga telah mengacu kepada Norma, Standar, Prosedur, Manual (NSPM) yang disusun K/L terkait.

2. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Terdapat 4 stakeholders yang terlibat langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias. Untuk percepatan pelaksanaan tersebut telah tercipta kerjasama antara stakelders melalui pembagian bidang sesuai bidang dan kapasitas masing-masing. Misalnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh terdapat 3 lembaga yang saling bekerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu Dinas Kesehatan NAD, GTZ, dan AusAid.

AusAid fokus programnya diarahkan pada peningkatan kapasitas (SDM) melalui kegiatan pelatihan tenaga medis dan manajemen rumah sakit. GTZ, programnya difokuskan pada rehabilitasi sarana dan prasarana (fisik). Sedangkan BRR difokuskan kepada bantuan perlengkapan alat medis. Sedangkan pemda (Dinas Kesehatan NAD) melengkapi pada proses rekruitmen tenaga medis yang meninggal akibat bencana tsunami.

Berdasarkan pembagian wilayah kerja diatas, maka masing-masing stakeholders melaksanakan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan dibidang kesehatan melalui Rumah Sakit Zainal Abidin mengacu kepada komitmen yang telah disepakati. Sebagaimana yang disepakati, untuk tahun 2006 BRR telah membantu perlengkapan medis melalui bantuan alat kedokteran bedah syaraf senilai Rp 2.5 miliar. AusAid sampai saat ini terus melaksanakan program pelatihan *Capasity Building* bagi tenaga medis dan pelatihan manajemen rumah sakit. Sedangkan pembangunan secara fisik Rumah Sakit sudah selesai dilaksanakan oleh GTZ dan aktivitas di rumah sakit saat ini sudah bisa berfungsi kembali dan masyarakat sudah bisa terlayani dengan baik. Dengan terlaksananya konsistensi antar stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan program, bisa mempercepat terwujudnya pemulihan bagi masyarakat yang menjadi korban gempa dan tsunami di NAD-Nias. *(Sumber : Monitoring dan Evaluasi Pokja Sosial Budaya, 22 November 2006)*

3. Bidang Pemulihan Perekonomian

Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi diperlukan kerjasama antara stakeholders melalui pembagian bidang sesuai bidang dan kapasitas masing-masing. Misalnya dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Ikan Penayung di Banda Aceh terdapat 5 lembaga yang saling bekerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu satker BRR-Perdagangan,Pariwisata dan Investasi, CHF, Walikota Banda Aceh, Dinas Tata Kota Banda Aceh dan Dinas Pasar Kota Banda Aceh. Juga terjadi kerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi antara BRR-Sumber Daya Kelautan dan Perikanan NAD, FAO sebagai donor/NGO dengan Dinas kelautan dan Perikanan NAD dalam pelaksanaan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perintis Kecamatan Meuraksa. Kerjasama yang baik terjadi antara Pemerintah Afrika Selatan (melalui NGO) dengan Dinas Koperasi & PKM NAD berupa pembangunan gedung asrama/ mess diklat/UPTD.

Pelaksanaan dan kegiatan, antara BRR-Industri Kecil dan Menengah dengan Departemen Perindustrian, Departemen Koperasi & UKM, Dinas Koperasi & PKM, sudah sesuai dengan aturan kerja masing–masing. Untuk donor tidak dapat dilihat konsistensinya dengan pelaksana yang lain dikarenakan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi donor/NGO tidak mengikutkan subsektor UKM.

Sedangkan konsistensi antar BRR, dengan Donor/NGO, dan Kementerian/ Lembaga untuk Subbidang Perdagangan dapat digambarkan dalam tabel berikut ini;

Tabel V.5
Konsistensi Antar BRR, Donor/NGO, K/L
Subbidang Perdagangan

Program (BRR)	Kegiatan (BRR)	Lok-asi	Kegiatan (Donor)	Lok-asi	Program (K/L)	Kegiatan (K/L)	Lok-asi	Ket.
A. Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasar Grosir/ Induk	1 Penyaluran modal untuk pedagang pasar (untuk kebutuhan pokok)	12 kab	Program pemberian modal kerja untuk komunitas yang terkena bencana tsunami	NAD	A. Masa Tanggap Darurat : Tenda Pasar Darurat	Pemasangan tenda pasar darurat (termasuk ongkos angkut dan pasang)	NAD, Sumut (Diserahkan ke Dinas Perindag Propinsi)	Program dan kegiatan pada BRR, donor/NGO dan K/L terhadap rencana induk sudah Saling Melengkapi
	2 Penyaluran modal untuk pedagang keliling	7 kab/ kota			B. Rehabilitasi & Rekonstruksi : Pasar Tradisional Permanen C. Pasar Grosir/Induk D Pergudangan E. Kemetrologian	Pemb. kembali pasar tradisional permanen	NAD & Nias Lambaro (Aceh Besar) Aceh	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh Tim Koordinasi P3RIRRWANS, 2006

4. Bidang Pemulihan Kelembagaan

Konsistensi antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan kelembagaan, yaitu antara BRR, Kementerian/Lembaga, Pemda, dan Donor telah tercipta mekanisme yang bersifat saling melengkapi. Pemda menyediakan lahan/lokasi kantor pemerintahan, sedangkan pelaksanaan yang dilakukan oleh BRR dan Donor/NGO adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintahan yaitu Kantor Mukim/Desa/ Kelurahan/Kecamatan di Kab Aceh Besar, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, dan Kab. Pidie
2. Pelatihan aparatur pemerintah daerah terutama bidang perencanaan, penganggaran, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, dan kelembagaan di Kab. Aceh Barat; Kab. Aceh Barat Daya; Kab. Aceh Besar; Kab. Aceh Jaya; Kab. Aceh Selatan; Kab. Aceh Singkil; Kab. Aceh Tamiang; Kab. Aceh Tengah; Kab. Aceh Tenggara; Kab. Aceh Timur; Kab. Aceh Utara; Kab. Bener Meriah; Kab. Bireuen; Kab. Gayo Lues; Kab. Nagan Raya; Kab. Nias; Kab. Pidie; Kab. Simeulue

Adapun Donor membantu membangun Kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa/ Mukim dan Balee di wilayah bencana, sedangkan BRR akan membangun Kantor/ Dinas/Badan, sebagian Kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa/Mukim dan Balee, sehingga dapat dikatakan dalam pembangunan kantor tersebut bersifat saling melengkapi, sehingga peristiwa tumpang tindih dapat dihindari.

5. Bidang Pemulihan K3M dan Reintegrasi Mantan GAM.

Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) pada rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias ada beberapa hasil evaluasi yang diperoleh, yaitu sebagai berikut: Pertama, dokumen kegiatan per-bidang yang disusun oleh Bapel BRR dalam Rencana Strategis untuk diaplikasikan di lapangan belum sepenuhnya merujuk pada Rencana Induk. Sehingga dapat dinilai bahwa belum sepenuhnya terjadi konsistensi untuk mendukung terlaksananya rencana, baik itu Rencana Induk maupun rencana aksi yang disusun BRR Hal ini terlihat ketika penyusunan rencana kegiatannya belum ada satupun yang mengacu pada Renstra BRR. Selain itu belum adanya keterkaitan dari dokumen dari Renja dan RKA yang disusun oleh Kementerian/Lembaga dengan Rencana Induk. Pada rencana kerja SKPD pemerintah daerah maupun yang disusun melalui dinas yang terkait belum menyesuaikan dengan yang ada pada Rencana Induk (Hasil *Evaluasi 4K pada diskusi Pokja GAM dalam Lokakarya P3RIRRWANS, 19 Desember 2006, Banda Aceh*).

Kurangnya konsistensi pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias antara penanggung jawab/pelaksana pembangunan di bidang K3M berbeda antara Bapel BRR, Kementerian/Lembaga, Pemda dan Donor/NGO. Hal ini dikarenakan fokus prioritas pembangunan dari masing-masing pelaksana ini berlainan. Bapel BRR yang fokus pada pembangunan fisik (pembangunan rumah) sebagai prioritas, karena ini menjadi kebutuhan utama masyarakat Aceh sekarang ini secara umum. Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah mengutamakan pada pengembangan sosial dan politik masyarakat dan peningkatan SDM, sedangkan donor/NGO memfokuskan pada teknis dan sistem kerja pelaksanaan pembangunan.

Antar pelaksana program reintegrasi telah menunjukkan konsistensi yang baik, sebagaimana terlihat antara Pemerintah daerah melalui Badan Kesbang Linmas yang mewakili BRA untuk setiap Kabupaten/ Kota, Kementerian/ Lembaga terkait, (Seperti Kemenko Kesra, dalam penanganan pemberian *jadup*, Kemenko Polhukam dalam rangka sosialisasi Nota Kesepahaman), UNDP, Bank Dunia, EoJ, USAID, dan lembaga donor lainnya saling mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA) terhadap program reintegrasi. Dibawah ini kita dapat melihat salah satu lembaga donor yaitu World Bank sebagai *impelementing agency* yang ikut berpartisipatif dalam mendukung pelaksanaan program reintegrasi bagi mantan TNA yang bekerjasama dengan Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) Provinsi NAD, tingkat konsistensi lembaga donor ini dapat kita lihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel V.6
Lembaga Donor World Bank yang Ikut Berpartisipasi
Dalam Program Reintegrasi Mantan GAM

No	Implementing Agencies	Program Name	Category	Target Groups	Short Description about the Program	Amount of Money (US$)	Period		Coverage Area
							Start	End	
1	World Bank	Support to Public information (emergency support)	Socialization/ public information	Whole population of Aceh	Setting up Timsos structures; initial poster runs	60	Agust-05	05-Sep	All of Aceh
2	World Bank, UNDP, various local NGOs	Support to Tim Sosialisasi Aceh Damai (Phase 2)	Socialization/ public information	Whole population of Aceh	1. Supporting Tim Sosialisasi structures; 2. Printed materials (over 300,000 posters, brochures, etc.); 3. Publication of bi-weekly Ceureumen supplement in Serambi; 4. Supporting effective media coverage (support to radio networks); 5. Support to public dialogue and forums; 6. Strengthening distribution mechanisms (through KDP, AMM, GAM and NGOs); 7. Cultural events (weapons art, community theatre); 8. Documentation and monitoring and evaluation	474,519	05-Sep	Des-06	All of Aceh
3	World Bank	Support to Post-Conflict Reconstruction	Data management support	BRA/Forbes	Support to Forbes/BRA for data management issues	25	Nop-06	Des-07	

Sumber : World Bank, (Date: 10/09/2006)

5.2 ASPEK KOORDINASI

Secara pengertian, yang dimaksud dengan koordinasi yaitu suatu interaksi dan komunikasi antar berbagai *stakeholders* dalam mendorong tercapainya kesepahaman, kebersamaan, kesepakatan, dan komitmen dalam perencanan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam aspek koordinasi ada 2 (dua) hal yang akan diulas adalah *mekanisme koordinasi dalam penyusunan perencanaan* dengan menganalisis berbagai aktor yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, antara lain; BRR, K/L, Donor/ NGO, Pemda dan pihak lainnya; dan *mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.*

a. Mekanisme koordinasi dalam penyusunan perencanaan

Tahap terpenting dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini adalah perencanaan *(planning)*. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) pada pasal 1 (ayat 1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pada proses penyusunan perencanaan ini terpenting bagaimana mekanisme koordinasi dalam penyusunan perencanaan. Sebelum terbentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias yaitu Rencaan Induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan landasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias. Upaya ini merupakan hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Bappenas dengan melibatkan Kementerian Lembaga di tingkat pusat dan Pemerintah Daerah NAD dan Pemerintah Nias. Dasar hukum dalam perencanaan ini dengan merujuk kepada Perpres No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumut.

Sesuai ketentuan dalam Perpres tersebut dalam pasal 5 disebutkan bahwa BRR bersama-sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan program dalam Rencan Induk, yang dituangkan ke dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Hingga saat ini belum ada rencana aksi yang definitif yang bisa dijadikan acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun demikian ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan Rencana Induk ke dalam rencana aksi. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan dalam Perpu No. 2 Tahun 2005 tentang BRR dalam pasal 16 disebutkan bahwa Badan Pelaksanan rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas untuk menyusun rencana rinci rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan Rencana Induk dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah pasca bencana.

Terkait dengan masalah tersebut, pada tahun 2005 pernah dilakukan rumusan rencana aksi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada level provinsi/kabupaten/kota. Namun status dokumen perencaaan tersebut tidak ada kepastian dalam implementasinya. Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Bapel RR) tidak menggunakan Rencana Aksi yang telah dibuat oleh Bappeda yang telah disusun berdasarkan kebutuhan

masyarakat. Selain itu, pada tahun 2006 ini juga sedang dilakukan penyusunan *Action Plan* BRR NAD-Nias untuk Tahun 2006-2009 yang dikoordinasikan oleh Satker BRR untuk program perencanaan. Dalam penyusunan Action Plan ini digunakan metode survey dan desk study untuk menggali informasi dari data, baik primer maupun sekunder, yang dibutuhkan sebagai dasar penyusunan Action Plan. Data dan informasi yang diperoleh akan diolah untuk kemudian dianalisis secara kuantitatif dan deskriptif.

Masih menyangkut koordinasi perencaaan ini, Bapel RR sudah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Nias 2005-2009. Dalam bagian pengantar dokumen ini disebutkan bahwa Renstra merupakan bagian dari penajaman Rencana Induk maka Bapel RR menerbitkan Renstra 2005-2009 yang ditujukan sebagai pegangan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias 2005-2009. Renstra ini berisi tentang arah kebijakan, strategi dan program prioritas bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias. Bila merujuk kepada UU SPPN dalam pasal 6 disebutkan bahwa Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Dengan demikian, Bapel RR merupakan salah satu kementerian/lembaga yang diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias.

1. Bidang Pemulihan Infrastrukstur, Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Upaya BRR membangun *regional offices* dan *join secretariate* (JS) untuk menggalang koordinasi dengan berbagai stakeholders seperti telah disebutkan di bagian konsistensi antar pelaksana menggambarkan juga aspek koordinasi. Pimpinan JS ini dimungkinkan dipegang oleh kepala regional BRR atau kepala daerah setempat. Kegiatan dalam JS adalah *screening* proposal, yang berasal dari berbagai stakeholders, berdasarkan evaluasi prioritas, aspek teknis dan lingkungan sehingga muncul 'kegiatan terpilih'. Dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan BRR juga telah mengacu kepada Norma, Standar, Prosedur, Manual (NSPM) yang disusun K/L terkait.

2. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Selain BRR, lembaga donor/NGO sebagai bagian dari stakeholders dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, juga mempunyai kontribusi yang besar dalam mewujudkan pemulihan kehidupan masyarakat Aceh dan Nias. Dalam konteks *koordinasi, perencanaan program* idealnya sebelum langsung kepada masyarakat yanga menjadi sasaran program, NGO terlebih dahulu berkoordinasi awal dengan BRR sebagai lembaga penanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias dan juga kepada pemda setempat. Dalam realisasinya terdapat NGO (Spanyol) yang melakukan koordinasi langsung kepada masyarakat tanpa melalui koordinasi dengan pemda setempat. Misalnya pembangunan sekolah SMP 3 Kaway XVI di Meulaboh merupakan hasil kesepakatan langsung antara lembaga donor dengan pihak sekolah (kepala sekolah). Akibat kurangnya koordinasi dengan Pemda setempat (Dinas

Pendidikan), sampai saat ini sekolah tersebut belum mempunyai status hukum yang jelas. *(Sumber : Monitoring dan Evaluasi Pokja Sosial Budaya, 24 November 2006).*

3. Bidang Pemulihan Perekonomian

Idealnya semua pelaku pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pasca tsunami yaitu BRR, Pemda setempat dan Donor/NGO saling berkoordinasi dalam mewujudkan pemulihan kehidupan masyarakat Aceh dan Nias. Dimana bantuan yang akan diberikan oleh Donor/NGO baik kepada Pemda yang memang sebagai koordinator pelaksana juga kepada BRR agar kegiatan yang dilakukan bisa saling dipantau dan tidak terjadi tumpang tindih atau permasalahan nantinya. Pada realisasinya terdapat NGO yaitu GTZ tidak melakukan koordinasi dengan Dinas setempat. Misalnya mengenai pembangunan pelabuhan perikanan Lampulo yang dalam perencanaan pembangunannya tidak melibatkan Dinas setempat. Sehingga setelah bangunan berdiri, sampai sekarang belum difungsikan sama sekali karena desain bangunan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan nelayan setempat. *(Sumber : Monitoring dan Evaluasi Pokja Perekonomian, 8 November 2006).* Hal ini harus diperbaiki mengingat eksistensi Pemerintah Daerah penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada sektor pertanian, Departemen Pertanian melalui CMU (Coordinating and Monitoring Unit) mengharapkan ADB untuk mendukung persiapan pelaksanaan kegiatan TA 2006 yang diawali dengan pertemuan antara BRR, ADB, Deptan/ CMU, Satker BRR-Produksi Tanaman Pangan NAD, Satker BRR-Peternakan NAD, serta Kepala Dinas terkait. Pertemuan ini perlu dilaksanakan untuk menyamakan persepsi terhadap sistem dan kegiatan TA 2006. Sedangkan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan pertanian di Nias pasca tsunami dilaksanakan oleh dana yang tersedia di BRR dan pengelolaannya dilakukan oleh BRR Nias. Namun dalam kegiatannya, BRR Nias tidak melakukan koordinasi dengan Dinas teknis terkait setempat, baik di Kabupaten Nias maupun Kabupaten Nias Selatan. Bahkan penunjukan personil dinas yang bekerja di BRR Nias dilakukan tanpa diketahui oleh Kepala Dinas dan Bupati setempat. Kegiatan koordinasi antara BRR dengan dinas teknis terkait setempat di tingkat kabupaten sangat penting artinya karena dinas teknis lebih mengetahui kondisi pertanian di wilayahnya (Sumber laporan bulanan ETESP Sub Komponen Pertanian Juli 2006 yang disusun oleh CMU Deptan). Satker BRR-Produksi Tanaman Pangan yang juga melakukan pelaporan dan monitoring pelaksanaan padat karya dari tingkat kabupaten dan wajib menyusun pelaporan untuk disampaikan ke BRR Provinsi NAD dan Nias.

4. Bidang Pemulihan Kelembagaan

Koordinasi dalam penyusunan perencanaan bidang kelembagaan dan hukum antara Badan Pelaksana BRR dengan Pemda dan Kementerian Lembaga dinilai baik (*oleh sebesar 47,8 % responden dari jawaban kuesioner dalam Monev November 2006*), dan Badan Pelaksana BRR dengan Donor/NGO, kalangan swasta, dan masyarakat rata-rata dinilai cukup baik (Donor sebesar 39,1 %, Swasta sebesar 43,5 %, dan masyarakat sebesar 47,8 %)

namun demikian, mekanisme koordinasi perencaaan rehabilitasi dan rekonstruksi (*rapat koordinasi Kelompok Kerja Bidang Pemulihan Kelembagaan P3RIRRWANS-Bappenas*) menjelaskan antara lain :

1. Kurangnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan antara Bapel RR dengan Pemerintah Daerah, karena yang terjadi selama ini Bapel RR langsung berkoordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) tanpa melalui Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berharap agar Bapel RR dapat berkoordinasi dengan semua Departemen/LPND dan SKPD.
2. Kurangnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan antara Bapel BRR dengan Satkernya, karena dalam mengintegrasikan program antara Bapel RR dengan Satker seringkali terjadi perbedaan pola, sehingga Satker harus berimprovisasi dalam melaksanakan kegiatannya.
3. Terjadi ketidakharmonisan antara Bapel RR dan KPPN. Hal ini dikarenakan KPPN mengikuti peraturan/prosedur dari Depkeu, sedangkan Bapel RR sering memutuskan secara sepihak.
4. Tidak ada konfirmasi/klarifikasi antara Bapel RR satuan anti korupsi dengan Satker, misalnya dalam pembatalan surat lelang.

Pada bidang pemulihan kelembagaan, koordinasi dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi diantara Donor/NGO dengan Pemda terjalin dengan baik. Misalnya dalam perencanaan pembangunan kantor pemerintah, awalnya donor berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota menanyakan mengenai usulan daerah mengenai sarana dan prasarana kantor yang belum terbangun serta meminta persetujuan daerah mengenai rencana pembangunannya tersebut. Kemudian Donor/NGO melaporkan kepada Bapel BRR melalui RAN Database dan menjabarkan rincian proyek yang ingin dilaksanakan. BRR mengutamakan donor untuk melakukan pembangunan di lokasi yang sudah dipilih oleh Donor/NGO tersebut kemudian kantor lainnya dibangun oleh BRR *(Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Biro Pemerintahan Setda NAD pada tanggal 27 September).*

Foruk koordinasi tingkat kecamatan yang diperlukan dalam meningkatkan koordinasi yang sudah diinisiasi dan perlu dikembangkan lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut (*Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satker BRR Peningkatan dan Penataan Kapasitas Kelembagaan diketahui butir-butir kesepakatan bersama dalam workshop forum koordinasi kecamatan pada tanggal 8-19 september 2006 di Kota Sabang*):

1. Forum koordinasi tingkat kecamatan (yang dipimpin oleh Camat) adalah dasar untuk koordinasi yang melibatkan semua pihak atau pemangku kepentingan (stake holder)
2. Forum tingkat kecamatan perlu dibentuk dan ditindak-lanjuti untuk mendukung proses pemulihan dan pembangunan di Aceh dan Nias dengan mendapat legalitas melalui SKB Pemda dan BRR dimana di dalamnya terkandung tugas dan tanggung jawab pemerintah kecamatan.
3. Dibutuhkan standarisasi manajemen data forum koordinasi kecamatan.

4. Perlu adanya buku referensi sebagai pedoman pelaksanaan forum koordinasi kecamatan dengan melihat karakteristik masing-masing daerah
5. Suatu forum koordinasi kecamatan sebaiknya menggunakan tata ruang yang ada sebagai dasar pembangunan rekonstruksi
6. Forum adalah suatu wadah bukan merupakan suatu lembaga
7. BRR mendukung program dari forum koordinasi di tingkat kecamatan baik di bidang operasional maupun secara aktif berperan serta melalui kantor BRR Regional
8. Pembentukan tim koordinasi perlu diadakan dan dibahas secara detail
9. Pemda perlu mengeluarkan surat edaran (menugaskan) instansi yang terkait untuk membina forum koordinasi kecamatan

Dengan adanya forum koordinasi tingkat kecamatan, tentu dapat meningkatkan koordinasi dalam penyusunan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias diantara stakeholder, terutama diantara BRR dengan Pemda di tingkat kecamatan.

Selain itu langkah lain yang ditempuh untuk meningkatkan koordinasi antar Pemda dengan BRR di Nias adalah didirikannya Sekretariat Bersama. Tujuan pembentukan Sekretariat Bersama ini untuk 1) Mendorong dan memperkuat peran Pemerintah Kabupaten Nias dalam pelaksanaan reabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, 2) Koordinasi dalam perencanaan, manajemen, monitoring dan evaluasi dai rahabilitasi dan rekonstruksi di Nias, 3) Mempromosikan tata pemerintahan yang baik lewat rehabilitasi dan rekonstruksi Nias. Adapun fungsi dari Sekretariat bersama ini adalah:

1. Data dan manajemen informasi (RAN Database)
2. Perencanaan kabupaten dan kecamatan. Perencanaan bersama ini adalah
    a. Merupakan mekanisme perencanaan satu atap antara Pemda dan BR
    b. Melakukan perencanaan berdasarkan kebutuhan (need-based), dengan memperhitungkan kapasitas setiap lembaga secara terstruktur
    c. Melakukan review program secara bersama
    d. Melakukan perencanaan terkait pemeliharaan aset rekonstruksi secara bersama
3. Pengendalian, monitoring dan evaluasi bersama
4. Memperkuat hubungan antar stakeholder rehabilitasi dan rekonstruksi

5. Bidang Pemulihan K3M dan Reintegrasi Mantan GAM

Pada aspek penyusunan perencanaan dalam bidang K3M mekanisme koordinasi yang berlangsung selama setahun terakhir antara Bappenas, Kementerian/ Lembaga terkait , Bapel RR, Pemda NAD dan Nias berjalan dengan cukup baik. Seperti halnya ketika Bappeda Prov. NAD pada tahun 2005 yang pernah menyusun rencana aksi pada level Provinsi dan Kab/Kota. Namun status dokumen tersebut tidak jelas implementasinya. Bahkan BRR tidak menggunakan rencana aksi yang disusun oleh Bappeda tersebut. BRR juga untuk tahun 2006 telah melaksanakan survey dan desk study untuk menggali informasi baik primer dan sekunder dari berbagai sumber . *(Hasil FGD (28 September 2006) dan Hasil Evaluasi 4K pada diskusi Pokja GAM dalam Lokakarya P3RIRRWANS, 19 Desember 2006, Banda Aceh*).

Secara internal, mekanisme koordinasi kelembagaan BRR berjalan dengan baik. Hal ini terlihat pada kegiatan yang secara kontinyu dilaksanakan melalui rapat/ koordinasi tripartite (antara Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana). Namun demikian belum ada koordinasi yang baik (terbatas) pada perencanaan di bidang K3M dalam kurun waktu 1 tahun terakhir diantara Bapel BRR, Pemda dan lembaga Donor. Seperti yang dilaksanakan oleh lembaga donor USAID dalam penyusunan rencana melakukan koordinasi yang sangat terbatas sekali terutama dengan pihak Pemda. Mereka hanya melakukan pertemuan dengan BRR, BRA (terbatas) dan donor lainnya. Sehingga muncul beberapa persoalan dalam *sustainability*-nya. Sehingga hal ini memperlihatkan banyak terdapat perbedaan program/ kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing lembaga/ instansi tersebut. Perbedaan ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Sedangkan koordinasi perencanaan untuk program reintegrasi oleh Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) yaitu dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Bappenas mengenai perencanaan program dan alokasi anggaran, disamping itu juga BRA berkoordinasi dengan Departemen Sosial dalam masalah teknis penyaluran bantuan, dengan Kemenko Polhukam berpartisipasi dalam melaksanakan Sosialisasi Nota Kesepahaman. Sedangkan dengan Kemenko Kesra berkaitan dengan pemantauan terhadap sosialisasi Nota Kesepahaman dan pemberian jaminan sosial. Antar lembaga donor mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan telah berjalan dengan baik, seperti UNDP dan Bank Dunia yang ikut terlibat dalam rapat interdep anggaran untuk BRA pada tanggal 19 mei 2006 di Bappenas.

Hasil temuan-temuan di atas juga diperkuat melalui Hasil Pemeriksaan BPK yang menyebutkan bahwa tidak ada koordinasi antar pelaksana program rehabilitasi dan rekonstruksi dalam hal perencanaan. Secara khusus, ada dua temuan dalam laporan tersebut yaitu; Pertama, Perencanaan Bapel BRR tumpang tindih dengan perencanaan pemerintah provinsi NAD. Ada beberapa kegiatan dengan objek, jenis kegiatan dan lokasi yang sama, telah dan akan dilaksanakan baik oleh Bapel maupun oleh Pemda pada tahun 2005, 2006, dan 2007. Beberapa kegiatan tersebut yaitu; rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana Bandar Udara Cut Nyak Dhien, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana dan prasarana Bandar Udara Maimun Saleh, rehabilitasi dan rekonstruksi

sarana dan prasarana Bandar udara Lasikin, serta rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan Sinabang. Kedua, Perencanaan Bapel BRR tumpang tindih dengan perencanaan Departemen Pekerjaan Umum Ini terjadi pada kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat, Kawasan Kota Meulaboh dan Kabupaten Serdang Bedagai..

Selain mekanisme koordinasi perencanaan dengan Pemda dan K/L tadi, ternyata koordinasi Bapel RR dengan Donor/NGO tidak seluruhnya berjalan sesuai mekanisme organisasi. Masih banyaknya NGO melaksanakan program langsung ke masyarakat melalui jalur informal, misalnya tokoh agama dan masyarakat, dibandingkan melalui Bapel RR. Namun pada level tertentu terjadi koordinasi pada level tertentu namun belum belum terdeteksi secara menyeluruh sejauhmana tingkat koordinasi di lapangan. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan kegiatan CEPP yang dilakaksanakan di NAD pada beberapa waktu yang lalu. Di dalamnya terdapat koordinasi antara UNDP, WALHI, WWF, Flora Fauna International, CIDA (SENRA Project), ESP/USAID, CARE Beudoh, Yayasan Leuser Indonesia, Univ. Syiah Kuala, Panglima Laot, ELSAKA, BKSDA, Dinas Kehutanan, Bappeda, Bapedalda Prop. dan Kab./Kota NAD, dan Bapel RR.

b. Mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan

Selan masalah koordinasi dalam perencanaan, tahap selanjutnya yang terpenting adalah mekanisme koordinasi dalam aspek pelaksanaan. Pentingnya adanya mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan ini untuk menghindari adanya, antara lain, tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan, termasuk tumpang tindih disini dalam hal anggaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dari hasil temuan Tim Koordinasi P3RIRRWANS dalam kunjungan ke wilayah Pantai Barat Selatan NAD pada bulan April 2006 menunjukkan bahwa antara Bapel RR dengan Pemda NAD belum berjalan dengan semestinya. Hal ini terlihat dengan tidak adanya laporan pelaksanaan Bapel BRR baik oleh Dinas maupun oleh Bappeda sebagai *leading sector*. Begitu juga dengan Kementerian/Lembaga dengan Bapel BRR juga belum terciptanya koordinasi secara organisasi. Hal ini terlihat dengan tidak terlaksananya program pendataan penduduk NAD dan Nias oleh Satker BRR karena sudah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik sebelumnya.

Selain permasalahan tidak adanya koordinasi antara Badan Pelaksana dengan Kementerian/Lembaga, terjadi juga kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Badan Pelaksana dengan Pemerintah daerah Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan, sehingga mengakibatkan tidak terakomodasinya kebutuhan daerah dalam pemulihan pasca bencana, dan dikuatirkannya keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan hasil pembangunan. Hal ini telah diusahakan dijembatani dengan dibentuknya *sekretariat bersama* yang diharapkan dapat efektif menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias dan Nias Selatan. *(Laporan Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi P3RIRRWANS-Bappenas dengan Setwanrah BRR, ke Kepulauan Nias, pada Juli 2006)*

Sedangkan koordinasi pelaksanaan antara Bapel RR dengan Donor/NGO dilaksanakan dalam bentuk penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Donor/NGO kepada Bapel RR melalui Operation Center BRR yang dipublikasikan di *Recovery NAD and Nias Database (RAND*). Recovery NAD Nias Database, merupakan aplikasi berbasis web yang menyajikan data-data pendanaan, lokasi, penanggung jawab dan informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD Nias. RAN database ini memuat berbagai data dan informasi kegiatan lembaga donor/NGO yang sifatnya *off budget* dan dana *on budget* dari BRR. Secara umum, RAND tersebut memberikan informasi tentang perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi secara fisik dan masalah anggaran dalam kegiatan tersebut. Secara teknis, untuk bisa melakukan akses terhadap database tersebut diperlukan kemampuan dalam mengoperasikan sistem tadi.

Untuk membangun koordinasi antar berbagai stakeholders dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maka Bapel RR telah membentuk CFAN atau *Coordination Forum for Aceh and Nias*. CFAN atau *Coordination Forum for Aceh and Nias*, yang merupakan koordinasi tingkat tinggi yang dihadiri Duta Besar Perwakilan Lembaga Asing, Pimpinan Lembaga Multilateral dan Pimpinan NGO. CFAN ini dirancang menjadi forum utama yang komprehensif untuk menggalang komunikasi dan koordinasi antar berbagai pihak yang berkepentingan, secara kolektif memecahkan masalah-masalah yang menghambat upaya pemulihan, serta memantau kemajuan projek-projek yang memberikan kontribusi kepada upaya ini. Forum koordinasi ini merupakan wadah pertemuan tingkat tinggi, yang dihadiri oleh duta besar dan kepala perwakilan dari para donatur utama (NGO, bilateral dan multilateral) bersama dengan Bapel RR dan perwakilan Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil. Ada tujuh tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan CFAN tersebut, yaitu :

1. Strategi yang lebih kuat dan kebijakan yang lebih baik, bukan sekedar berbagi informasi.
2. Tanggung jawab kolektif untuk upaya-upaya sistematis dalam mengidentifikasi *bottlenecks*, masalah-masalah kebijakan, kesenjangan dan duplikasi, dan mengusulkan kebijakan untuk mengatasi hambatan ini.
3. Pendekatan *problem-solving* dimana masalah diidentifikasi dan diatasi pada tingkat serendah mungkin dengan mengacu ke struktur yang lebih tinggi untuk masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan secara lokal.
4. Perencanaan dikembangkan secara holistik dan dengan melibatkan komunitas.
5. Kerjasama dalam memastikan standard yang tinggi, ekuitas, dan kepemimpinan komunitas.
6. Pengumpulan data yang lebih professional dan secara proaktif dalam membagi informasi tersebut, terutama untuk memastikan program rekonstruksi didasarkan pada realitas di lapangan dan kebutuhan masyarakat.
7. Transparansi: Arus informasi yang bertanggung jawab dan responsif bagi masyarakat yang terkena musibah. *(website: brr.go.id)*

Pada perkembangan terakhir ini, Bapel RR telah melakukan usaha peningkatan *koordinasi melalui kebijakan regionalisasi*. Secara definitif, yang dimaksud regionalisasi yaitu proses perubahan kewenangan BRR yang tersentralisasi sejak didirikan, ke masa selesai tugasnya BRR pada 2009 dengan beberapa kondisi perubahan yaitu; semua tanggungjawab BRR dilaporkan dengan benar, dan pemerintah kabupaten melaksanakan tanggungjawab secara penuh. Dalam jangka pendek kebijakan regionalisasi ini untuk pembentukan Manajemen Rekonstruksi di setiap Kabupaten, yang sejalan dengan kebijakan dan strategi BRR Secara khusus, tujuan regionalisasi adalah:

1. Menghadapi tantangan dan kebutuhan pembanguan dengan lebih baik
2. Melakukan upaya koordinasi yang efektif pada tingkat kabupaten dan kecamatan
3. Memenuhi prinsip manajemen keuangan dalam hal pelaporan dan perpindahan aset ke daerah.
4. Memenuhi janji agar lebih berbasis pada masyarakat
5. Memenuhi janji untuk pembangunan yang lebih baik, terutama terkait dengan pengurangan risiko bencana.
6. Menjamin tata kelola pemerintah regional yang efektif setelah BRR menyelesaikan tugasnya di tahun 2009.

Adapun konsekuensi regionalisasi ini yaitu adanya pembentukan Kantor BRR tingkat kabupaten dengan kewenangan yaitu memperluas kemampuan dan kewenangan yang lebih luas, dan meningkatkan kapasitas merancang dan mengelola dengan bekerjasama dengan para penyandang dana dan pemerintah daerah langsung di daerah. Sedangkan Kantor Pusat BRR mempunyai kewenangan pada; memfokuskan pada kebijakan, pengawasan jalannya kebijakan dan bantuan portofolio,.bermitra dalam hal pembangunan dengan pemerintah pusat dan daerah, mengkoordinasikan donor dalam kebijakan dan strategi Pendekatan Reorganisasi adalah pada bagaimana kantor regional BRR bisa mencapai tujuan BRR melalui penggabungan peran masyarakat, pemerintah daerah, mitra lokal, industri konstruksi, komunitas negara-negara donor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan BRR *(Hasil pertemuan CFAN-2, Jakarta, May 2006)*

Pada gambar berikut ini menunjukkan peta regionalisasi yang dibagi ke dalam enam wilayah/regional yaitu sebagai berikut;

Gambar V.1
Peta Regionalisasi BRR



Disamping kebijakan regionalisasi tadi, ada beberapa *perangkat koordinasi* yang telah dimiliki oleh Bapel RR dan hingga ini sedang berjalan, yaitu sebagai berikut;

1. Situs www.e-aceh-nias.org merupakan terminal utama untuk mengakses informasi perkembangan rehabilitrasi dan rekonstruksi di NAD-Nias. Situs resmi yang dimiliki oleh BRR ini berisi informasi yang bisa dijadikan sumber rujukan untuk melakukan koordinasi oleh berbagai pihak yang mempunyai kepentingan. Situs ini pula memuat publikasi seluruh kegiatan di Aceh-Nias yang dilaksanakan oleh beragam kalangan, seperti masyarakat, mahasiswa, LSM, lembaga donor, dan institusi pemerintah.
2. RAN Database merupakan sistem database penyampaian *concept note* dan pelaporan proyek yang berbasis web, yang dapat diakses dari mana saja dengan sistem pelayanan mandiri. Maksudnya bahwa pihak yang terlibat langsung dengan proyek secara langsung maka dapat meng-input data di RAND. Rekomendasi utamanya adalah para partner atau pelaksana proyek pada level pertama.
3. SIM Center merupakan aplikasi yang dikembangkan sejak Februari 2006 atas dukungan PBB dan bantuan dana dari pemerintah Norwegia. Fasilitas koordinasi ini menyediakan produk, antara lain; *standard political and infrastructure map, high resolution image maps, thematic maps for districs and subdustrics, data and system integration, data spatial data, training and support, advice on the use of spatial information and technology, sector data packagesm dan customized map products.*

Selain itu, upaya peningkatan koordinasi yang dilaksanakan Bapel RR seyogyanya dapat dilakukan melalui Musrenbang yang merupakan koordinasi

tingkat lokal yang dihadiri oleh Bappeda dan Instansi Pemda NAD; Rapat koordinasi yang merupakan koordinasi tingkat lokal yang dihadiri oleh Perwakilan Pimpinan Daerah; maupun mekanisme *concept notes. Concept notes* adalah suatu usulan proyek *(project proposal)* yang harus diajukan kepada Bapel RR NAD-Nias oleh Lembaga-lembaga donor, NGO/LSM dan dunia usaha dalam rangka melakukan kegiaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatera Utara. Selain itu juga berisi berbagai informasi yang terkair dengan kegiatan yang dilakukan seperti nama Lembaga-lembaga donor, NGO/LSM dan dunia usaha, tujuan dan sasaran kegiatan, lokasi yang direncanakan, besarnya dana yang disediakan, rencana waktu dan durasi pelaksanaannya. Concept notes ini diajukan kepada Bapel BRR NAD Nias dapat secara langsung atau melalui internet, selanjutnya akan diseleksi berdasarkan kelengkapannya. Apabila idak lengkap maka concept note stersebut akan dikembalikan ke Lembaga-lembaga donor, NGO/LSM dan dunia usaha. Apabila telah lengkap maka diteruskan untuk selanjutkan diberikan penilaian dan persetujuan melalui suatu workshop yang diasakan setiap 2 minggu sekali yang dihadi oleh Deuti BRR dan wakil dari setiap dektor dan tenaga ahli BRR NAD-Nias.

Namun demikian, LSM Gerak dalam laporannya menilai, bahwa masih lemahnya koordinasi dan tidak adanya ketegasan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias. Problem tentang koordinasi ini serta tidak tegasnya sikap Bapel RR sebagai pemagang mandat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi dengan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Donor dan NGO telah memunculkan persoalan yang krusial di dalam masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini begitu banyak terjadi saling klaim lokasi atau wilayah antar Donor/NGO sendiri atau antara Donor/NGO dengan Bapel. Bapel RR seakan-akan terus membiarkan hal ini terus terjadi berkelanjutan sehingga yang dirugikan adalah masyarakat korban bencana. Akibatnya adalah korban bencana menjadi terkatung-katung untuk bisa memperoleh bantuan dan pertolongan.

1. Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam

Sub bidang pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam terjadi saling koordinasi, khususnya melalui kegiatan seperti lokakarya CEPP di Banda Aceh, membuktikan adanya koordinasi dan konsultasi antara lembaga Donor/NGO dan Pemerintah Daerah dengan Bapel RR pada level tertentu, namun belum terdeteksi secara menyeluruh sejauh mana tingkat koordinasi di lapangan.

2. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Koordinasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi antara BRR, Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota berjalan lancar. Hal ini terlihat dengan terlaksananya rapat koordinasi antara antara BRR, Departemen Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi NAD, Dinas Kesehatan Kab/Kota pada tanggal 1 Juni 2006 di Medan yang menghasilkan mekanisme kerja sama. BRR fokus pada pelaksanaan revitalisasi sarana kesehatan, Depkes RI fokus pada pembinaan teknis tenaga medis, Dinkes provinsi fokus pada revitalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu), sedangkan Dinkes Kab/Kota fokus pada pelaksanaan revitalisasi Polindes (Posyandu).

Begitu juga halnya koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pendidikan antara BRR, NGO dan Bappeda berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini terlihat pada pelaksanaan pembangunan baru Sekolah MAN I Meulaboh. Terdapat kerjasama yang baik antara BRR, Cardi dan Bappeda. Cardi memberikan bantuan fisik melalui membangun baru sekolah yang hancur total akibat tsunami beserta perlengkapannya, BRR membantu melengkapi meubleir, sedangkan Bappeda menyediakan lahan sekolah sebesar 1 ha. Koordinasi yang terbangun secara baik antara stakeholders memberikan kontribusi yang besar dalam proses memperlancar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias. *(Sumber : Monitoring dan Evaluasi Pokja Sosial Budaya, 24 November 2005)*

Koordinasi laporan kegiatan oleh lembaga donor dengan BRR sebagai lembaga penanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi kurang berjalan dengan lancar. Hal ini terlihat dengan kurang maksimalnya laporan lembaga donor yang diterima oleh BRR sehingga data yang yang tersedia di RAN Datebase kurang lengkap dan kurang update.(*Sumber : Wawancara dengan kedeputian operational proyek BRR, 5 September 2006).*

Disamping itu juga, pelaksanaan dan koordinasi laporan lembaga donor/NGO yang dilaksanakan di kab/Kota dikoordinasikan kepada pemda setempat dan tidak ada laporan ke Dinas Provinsi, sehingga data pelaksanaan dikab/kota tidak bisa diupdate di tingkat provinsi. *(Sumber : Paparan Dinas Pendidikan NAD pada acara FGD Pokja Sosial Budaya, Banda Aceh, 27 November 2006)*

3. Bidang Pemulihan Perekonomian

Dari hasil temuan Tim Pokja Perekonomian P3RIRRWANS dalam kunjungan ke wilayah Banda Aceh pada bulan November 2006 menunjukkan bahwa antara Bapel RR dengan Pemda NAD belum berjalan dengan semestinya. Hal ini terlihat dengan tidak adanya laporan pelaksanaan Bapel BRR baik oleh Dinas maupun oleh Bappeda sebagai *leading sector*. Begitu juga dengan Kementerian/Lembaga dengan Bapel BRR juga belum terciptanya koordinasi secara organisasi. Hal ini terlihat dengan tidak terlaksananya program pendataan penduduk NAD dan Nias oleh Satker BRR karena sudah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik sebelumnya.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan juga kerap terjadi masalah yaitu secara kontraktual barang sudah diberikan tetapi tidak ada kecocokan dalam jenis dan tipe barang bantuan yang diberikan dikarenakan donor/NGO hanya melihat keinginan masyarakat penerima bantuan tetapi bukan kebutuhan masyarakat tersebut. Sebagai contoh pemberian kapal bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan para nelayan di Lampulo. Juga sektor kelautan dan perikanan, belum adanya koordinasi yang baik antar Dinas, pemberi bantuan yaitu donor/NGO dengan masyarakat sehubungan dengan adanya permasalahan kapal bantuan yang tidak dapat diterima oleh Pemerintah Daerah karena kondisi kapal tidak memenuhi syarat.

Laporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi terlambat diterima karena beberapa faktor yaitu sebagai contoh dengan adanya kewenangan pada BRR

untuk melaporkan kepada gubernur terlebih dahulu. Apabila ada perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan revisi oleh BRR dan apabila BRR sudah dalam tahap pelaksanaan tiba-tiba masuk ADB untuk memberi bantuan. Sehingga data yang dimiliki oleh Dinas tidak sama pencapaiannya dengan yang dimiliki oleh satker karena belum di update (bukan data terkini). Perlunya pelibatan Dinas dalam pelaksanaan tahun 2005 dan tahun 2006 rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. *(Sumber: monitoring dan evaluasi pokja pemulihan perekonomian)*

Pada sektor Pariwisata juga perlu adanya peningkatan koordinasi antara satker BRR dan Dinas dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsu-nami. Dinas seharusnya dilibatkan sebagai koordinator pelaksana oleh BRR. Dinas yang melakukan perencanaan program (memberikan kebutuhan masyarakat) namun BRR yang melakukan pelaksanaan kegiatan (Hal ini tidak dapat Dinas koreksi karena didukung oleh UU No.13 bahwa satker bisa melakukan sendiri tanpa melibakan dinas pariwisata).

Demikian juga dengan donor/NGO perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik dalam pemberian bantuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian barang bantuan. Koordinasi yang baik antara satker BRR-Perdagangan,Pariwisata dan Investasi, CHF sebagai donor/NGO dengan instansi setempat dicontohkan oleh Walikota Banda Aceh, Dinas Tata Kota Banda Aceh, Dinas Pasar Kota Banda Aceh dalam pembangunan Pasar Ikan Penayung di Banda Aceh. Pasar ini sudah berfungsi dengan baik. Koordinasi yang baik juga diperlihatkan antara BRR-Sumber Daya Kelautan dan Perikanan NAD, FAO sebagai donor/NGO dengan Dinas kelautan dan Perikanan NAD dalam pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perintis Kecamatan Meuraksa yang juga sudah berfungsi dengan baik dan perekonomian masyarakat berjalan baik. Koordinasi yang baik juga terjadi antara Pemerintah Afrika Selatan (melalui NGO) dengan Dinas Koperasi & PKM NAD berupa pembangunan gedung asrama/mess diklat/UPTD. *(Sumber : Monitoring dan Evaluasi Pokja Perekonomian, November 2006)*

4. Bidang Pemulihan Kelembagaan

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa koordinasi dalam aspek pelaksanaan bidang kelembagaan dan hukum antara Badan Pelaksana BRR dengan Pemda, Kementerian/Lembaga, Donor/NGO, kalangan swasta, dan masyarakat rata-rata dinilai baik. Mekanisme koordinasi di bidang pemulihan kelembagaan dalam pelaksanaan terjalin dengan baik yaitu terdapat pembagian peran di antara para stakeholder tersebut. Pemda menyediakan lahan untuk pembangunan kantor baru, Donor/NGO memberikan bantuan dalam pembangunan kantor yaitu Kantor kecamatan/Kelurahan/Desa serta memberikan bantuan peralatan kantor pemerintahan, sedangkan BRR membangun sisa sebagian Kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa, Kantor/Dinas/ Badan, Pendopo/ Meuligo, Rumah Dinas Camat, dan bale musyawarah/kantor mukim. Dengan adanya bantuan Donor/NGO ini tentunya akan membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi lebih cepat tercapai. *(Sumber : Monitoring dan Evaluasi Pokja Pemulihan Kelembagaan, 29 September 2006)*

urangnya koordinasi terjadi pada sistem pelaporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, khususnya pelaporan dari BRR kepada Pemerintah Daerah, dan laporan Donor/NGO kepada BRR maupun Pemerintah Daerah.

5. Bidang Pemulihan K3M dan Reintegrasi Mantan GAM

Kemudian, untuk pemulihan di bidang K3M, mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan kurang intensif yang disebabkan oleh masalah-masalah teknis khususnya pada jalur koordinasi, karena jalur koordinasi antar satker yang berada dalam bidang K3M yang letaknya berjauhan, seperti adanya satker yang berada di pusat seperti satker Sideops Polri, Sidelogs Polri dan Sidesdm Polri berada di Mabes Polri. Demikian juga Satker dari Matra Darat, Matra Laut dan Matra Udara. Sehingga pada mekanisme koordinasi pelaksanaan, Bapel RR dengan satker-satker terkait hanya bisa dilakukan melalui pemantuan pada tingkat koordinasi mengenai perkembangan rehabilitasi dan Rekonstruksi di lapangan dan penerimaan laporan yang walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan waktu penyerahan yang telah disepakati antara satker terkait dan Bapel RR. Sedangkan perangkat pemerintah daerah hanya mampu melakukan koordinasi dengan dinas-dinasnya, demikian juga dengan lembaga Donor/ NGO, sesuai dengan garis koordinasi yang telah mereka tetapkan sendiri (b*erdasarkan Hasil Movev, melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, dan FGD yang dilakukan oleh Pokja Reintegrasi mantan GAM pada 20-28 Septem-ber 2006 di Banda Aceh).* Beberapa peristiwa yang menunjukkan kurang intensifnya koordinasi ini dapat diperhatikan seperti yang terjadi di wilayah pantai Barat-Selatan yang menunjukkan bahwa antara Bapel RR dengan Pemda NAD koordinasinya belum berjaan dengan baik. Hal ini antara lain ditandai dengan tidak adanya laporan pelaksanaan oleh Bappeda maupun Dinas sebagai *leading agency*. Begitu pun BRR dengan K/L yang antara lain ditandai dengan tidak dilaksanakannya program pendataan penduduk NAD dan NIAS oleh Satker BRR karena sudah diaksanakan oleh BPS. Demikian juga yang terjadi antara Pemda dan USAID tidak melakukan koordinasi dalam pelaksanaannya. Sedangkan pihak pemda sendiri tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh USAID tersebut. Begitu pun dengan Bupati/Kota yang rakyatnya memperoleh bantuan dari USAID.

Kemudian, pada tahap pelaksanaan program BRA melakukan koordinasi dengan perangkat pemda NAD melalui Dinas Kesbang Linmas Prov/Kab/Kota di seluruh NAD serta dengan beberapa lembaga Donor seperti UNDP dan Bank Dunia dan lembaga donor lain sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya yang turut berperan dalam rangka mempersiapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyaluran bantuan program reintegrasi berdasarkan kriteria-kriteria korban konflik yang telah disebutkan sebelumnya. Dari hasil wawancara dengan koorbid dan wakoorbid data dan monev BRA Provinsi NAD, bahwa hingga saat ini BRA sendiri dengan pihak Bapel BRR belum menjalin koordinasi yang secara langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan program reintegrasi ini.

5.3 ASPEK KONSULTASI

Aspek evaluasi berikutnya yaitu konsultasi pelibatan, keikutsertaan atau partisipasi publik pada berbagai forum dalam rangka menyerap aspirasi dan pandangan, baik dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa indikator yang dilihat pada aspek konsultasi ini yaitu *tingkat partisipasi masyarakat, media partisipasi masyarakat dan ketersediaan dan kemudahan akses informasi bagi publik*.

a. Tingkat partisipasi masyarakat

Untruk mendukung pelaksanaan dan keberlangsungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias, maka sangat diperlukan partisipasi masyarakat. Melalui partisipasi ini diharapkan bisa memberikan arah dan ketepatan sasaran program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. Selain itu, langkah ini dapat mendorong proses percepatan pemulihan di wilayah pasca bencana. Tingkat partisipasi yang dilaksanakan Bapel RR pada tahap perencanaan bisa diwujudkan dalam bentuk identifikasi penilaian kebutuhan melalui kegiatan penelitian identifikasi kearifan lokal dalam membangun masyarakat kreatif, inovatif dan produktif. Masyarakat perlu dilibatkan bukan hanya pada waktu pelaksanaan kegiatan, tapi juga pada tahap evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan oleh Bapel RR.

Terkait dengan masalah di atas, berdasarkan Laporan Tim Ad-Hoc Monitoring dan Evaluasi BRR NAD-Nias, 2006, *(hal. 65.),* tentang DIPA 2005 pada sektor non fisik di wilayah Provinsi NAD. Pada salah satu bagian hasil survei tersebut terdapat mengenai partisipasi masyarakat dalam masa rehabilitasi dan rekonstrukis. Hampir sebagian besar informas menyatakan bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD. Ini terlihat dari 500 responden yang dijadikan sampel, sebanyak 464 responden (92,8%) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat harus ditingkatkan. Proses pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam program pembangunan desa secara partisipatif, pembangunan pola padat karya, dan program-program pemberdayaan masyarakat lainnya. Hal ini perlu dalam rangka untuk mempercepat BRR sesuai dengan keinginan dan kemampuan masyarakat. Karena disadari bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh benar-benar menjadi awal bagi kebangkitan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Sementara itu, LSM Gerak dalam Laporan “Jendela Refleksi Satu Tahun BRR Dalam Rekonstruksi NAD-Nias” (hal. 27), menilai bahwa dalam penyusunan DIPA selama ini telah mengabaikan sisi partisipatif. Kondisi ini tentu saja berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik secara luas, termasuk pada level internasional, dalam upaya percepatan proses pemulihan kehidupan wilayah dan masyarakat di wilayah bencana.

Ada Bapel RR yang melibatkan masyarakat seperti kebijakan program tentang pelaksanaan konsep *village planning* Disini Bapel RR juga melibatkan unsur partisipasi masyarakat. Adanya pelibatan kelompok sasaran pembangunan dengan forum-forum atau *workshop* yang dilanjutkan dengan identifikasi

terhadap kebutuhan masyarakat serta sosialisasi rencana kerja pembangunan membuktikan adanya partisipasi masyarakat.

1. Bidang Pemulihan Infrastruktur, tata Tuang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Pembangunan regional offices dan join secretariate (JS) oleh BRR selain menggambarkan konsistensi, koordinasi juga menggambarkan konsultasi dari berbagai stakeholders. Konsultasi terlihat dari kegiatan dalam JS yaitu screening proposal, yang berasal dari berbagai stakeholders, berdasarkan evaluasi prioritas, aspek teknis dan lingkungan sehingga muncul 'kegiatan terpilih'. Dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan BRR juga telah mengacu kepada Norma, Standar, Prosedur, Manual (NSPM) yang disusun K/L terkait.

Konsultasi juga tergambar dalam konsep RALAS. Adanya partisipasi masyarakat dan NGO membantu memfasilitasi dibantu penggunaan media yang luas. Walaupun terdapat beberapa hambatan namun dilapangan sudah terlaksana community mapping (kegiatan penunjukkan batas bidang tanah kembali oleh masyarakat sendiri difasilitasi NGO dan kemudian dibuat *sketch* dilanjutkan dengan dipetakan pada citra Ikonos) sehingga terlihat masyarakat ikut dilibatkan. Kegiatan penunjukkan batas bidang tanah kembali banyak mengandalkan kesepakatan masyarakat karena BPN tidak mempunyai data yang lengkap mengenai kepemilikan tanah, buku tanah yang ada dan data PBB digunakan sebagai cross reference. RALAS melalui Community Driven Adjudication melakukan kegiatan penelitian riwayat tanah secara simultan seluruh warga desa dalam rangka pendaftaran tanah (pensertifikatan tanah) diharapkan membantu penyelesaian pertanahan

Khususnya pemulihan bidang perumahan dan permukiman, pelibatan masyarakat sangat minimal dari BRR. Upaya pelibatan yang cukup maksimal malah dicontohkan oleh UN-Habitat, mulai dari sosialisasi rumah tahan gempa, pelatihan cara pembuatannya, dan pendampingan cara pembuatannya. Standar perumahan yang menjadi acuan telah diperkenalkan sejak awal, yang tidak dilakukan oleh BRR sebelumnya. Ini dapat menjadi contoh bagi BRR dalam menerapkan pola pendekatan yang sama untuk pelibatan masyarakat. *(Laporan Monev ke Kep. Nias, pada Juli 2006)*

2. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Pada aspek partisipasi/konsultasi masyarakat yang menjadi sasaran program, pada umumnya dilibatkan langsung pada saat pelaksanaan program melalui pelibatan kontaktor dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program.Pada tahap perencanaan hanya terlibat pada saat pemberian data yang dibutuhkan untuk kelancaran program *(Sumber : Monitoring dan Evaluasi Pokja Sosial Budaya, 26 November 2006)*

3. Bidang Pemulihan Perekonomian

Dalam bidang ekonomi terjadi kurangnya konsultasi antara stakeholder yang terkait sehingga terjadi permasalahan berikut ini:

1. Beberapa masyarakat penerima manfaat tidak mengembalikan pinjaman kredit yang dilakukan karena menganggap pinjaman sebagai hibah.
2. Ada image dari masyarakat bahwa dana pinjaman adalah sebagai hibah (ada sebagian masyarakat yang tidak mau mengembalikan). Padahal dana tersebut seharusnya dikembalikan agar terus bergulir ke penerima manfaat lainnya.
3. Sulit memonitor masyarakat yang mendapat dana pinjaman karena kondisi masyarakat yang masih belum menetap.

Sedangkan di bidang ekonomi, sektor kelautan dan perikanan, belum adanya konsultasi yang baik antar Dinas, pemberi bantuan yaitu donor/NGO dengan masyarakat sehubungan dengan adanya permasalahan kapal bantuan yang tidak dapat diterima oleh Pemerintah Daerah karena kondisi kapal tidak memenuhi syarat. *(Sumber : Monitoring dan Evaluasi Pokja Perekonomian, 7 November 2006)*

4. Bidang Pemulihan Kelembagaan

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk bidang kelembagaan dan hukum oleh Badan Pelaksana BRR rata-rata dinilai cukup baik. Namun dalam kondisi di lapangan partispasi masyarakat di bidang pemulihan kelembagaan sangat minim karena lebih banyak melibatkan aparatur Pemda dibandingkan masyarakat. Aspek perencanaan yang melibatkan masyarakat di bidang pemulihan kelembagaan, yaitu dalam pembangunan kantor kecamatan/desa yang melibatkan kepala desa atau ketua kampung dalam musyawarah tingkat desa.

5. Bidang Pemulihan K3M dan Reintegrasi Mantan GAM

Namun, tingkat pelibatan/partisipasi masyarakat pada proses perencanaan dan pelaksanaan. di bawah koordinasi Bapel BRR hanya pada tingkat sosialisasi dan pelibatan pada pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Karena di bidang K3M ini pengawasan dan evaluasi dilaksanakan oleh satker pelaksana proyek pembangunan. Kementerian/ Lembaga melalui dinas yang terkait dan pemerintah daerah lebih banyak melibatkan peran dan partisipasi masyarakat seperti pada program pelatihan-pelatihan dan pengembangan SDM untuk mengidentifikasi terhadap penilaian kebutuhan di lapangan, demikian juga halnya dengan lembaga Donor/NGO, seperti forum pertemuan yang dilaksanakan oleh UNDP yaitu seminar tentang penguatan personil Polri di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Republik Indonesia Seulawah dalam rangka penguatan refungsionalisasi kelembagaan Polri di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sedangkan untuk program reintegrasi, pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, hasil dari partisipasi masyarakat telah diwujudkan dalam; mengidentifikasi nilai kebutuhan pelaksanaan program, kriteria korban penerima bantuan/ sasaran program, dan pelaksanaan program di lapangan. Semua ini berada dibawah koordinasi Bapel BRA, Pemerintah Daerah, Dinas Kesbang Linmas, Dinas Sosial serta Lembaga-Lembaga Donor dan Kementerian terkait

dalam pengaturan petunjuk teknis pelaksanaan dan sosialisasi tentang butir-butir dari MoU Helsinki. Disamping partisipasi masyarakat sangat berperan dalam pengumpulan data dan informasi tentang penerima bantuan reintegrasi melalui lembaga Komite Peralihan Aceh (KPA) di tingkat Kabupaten/ Kota, Lembaga Donor IOM dan dukungan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

b. Media partisipasi masyarakat secara langsung

Di dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat diperlukan media atau sarana yang dipergunakan dalam menyampaikan berbagai aspirasi, masukan dan usulan dari seluruh lapisan masyarakat. Ada banyak bentuk media yang dapat dipergunakan dalam media partisipasi masyarakat, antara lain, forum pertemuan, pengaduan masyarakat, musyawarah, forum curah pendapat, dan bentuk media lainnya.

1. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

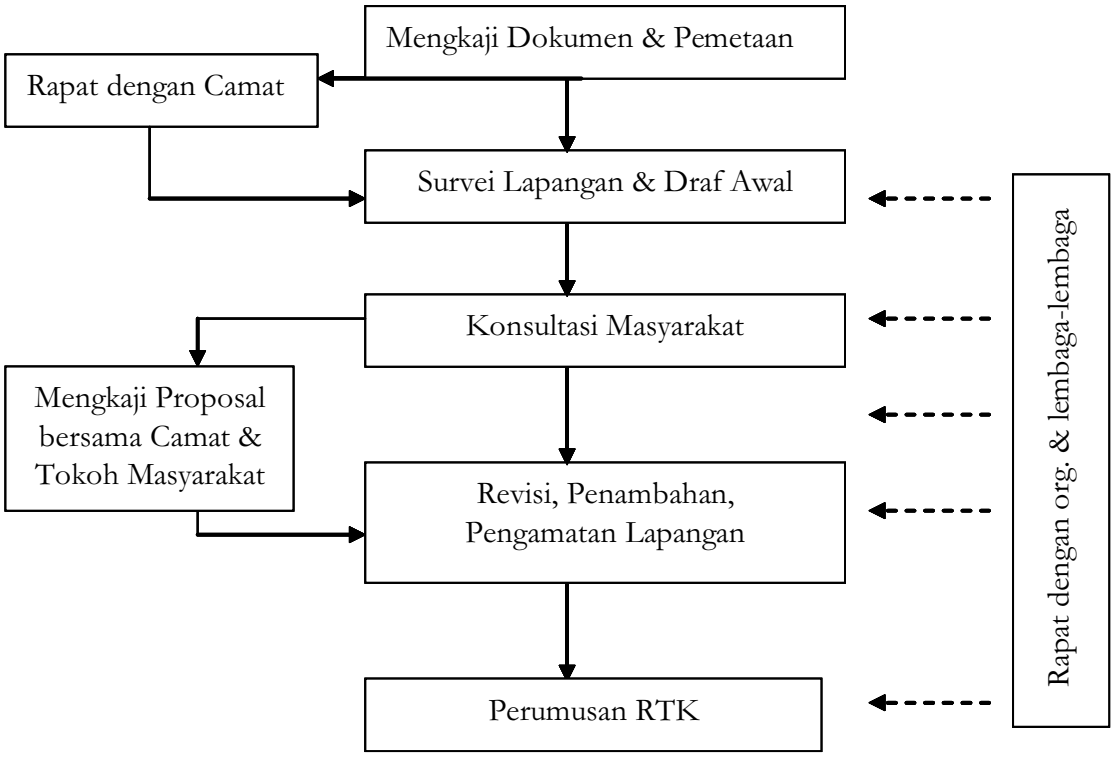
Partisipasi dalam bentuk pertemuan besar telah dilakukan dalam rangka peningkatan dinamika masyarakat pada konteks pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Bapel RR melalui kedeputian Agama, Budaya, dan Kesejahteraan sosial telah menyelenggarakan Musyawarah Ulama Aceh pada tanggal 14 -16 Maret 2006. Acara ini diikuti oleh 350 ulama dari berbagai organisasi keIslaman di Aceh. Beberapa rekomendasi dari musyawarah ini yaitu menyangkut penyuksesan RUU Pemerintah Aceh, Implementasi Syariat Islam, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, serta pengembangan pendidikan Aceh. Di bidang budaya, Bapel RR juga melaksanakan Kongres Kebudayaan Aceh pada tanggal 8 -10 April 2006. Acara ini diikuti oleh 321 peserta yang terdiri atas unsur LSM, birokrasi, akademisi, politisi, serta seniman dan budayawan Aceh. Namun demikian masih belum jelas benas kelanjutan atau tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh *(Sumber : Laporan 1 Tahun Bapel BRR per April 2006).*

2. Bidang Pemulihan Perekonomian

Partisipasi di bidang pemulihan perekonomian dilaksanakan dalam bentuk pertemuan yang dihadiri oleh Bappeda, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BRA, Forum Aksi Barak (Forak), Canadian Red Cross, Qatar Charity, UNDP dan Help Age membahas “Rencana Tindak Kecamatan (RTK) ADB”. Tujuan RTK ADB yang terkait bidang ekonomi: (1) Mengembangkan solusi-solusi livelihoods dalam sektor-sektor seperti sektor pertanian, perikanan serta barang dan jasa strategis lainnya; dan (2) Merumuskan solusi-solusi terpadu yang bisa mendukung sektor swasta dan mendukung partisipasi lembaga donor dalam memperbaiki livelihoods. Konsultasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan RTK ADB tersebut melibatkan sejumlah tokoh masyarakat seperti guecik, mukim dari daerah tersebut dan Panglima Laut serta diskusi dengan Dinas, UNORC, LSM, BRR, Bappeda dan perwakilan dari pemda. Hasil dari forum tersebut, Prioritas Program Livelihood bidang ekonomi, adalah : (1) Rehabilitasi sawah; (2) Perbaikan terhadap peternakan dan perkebunan; (3) Pengembangan UKM; (4) Perbaikan

fasilitas penangkapan ikan; (5) Pelatihan di bidang pertanian, pendanaan skala kecil bagi bisnis dan pengembangan bisnis.

Berikut adalah mekanisme forum RTK ADB:



Sistem ini akan 'menjembatani kesenjangan' yang ada dan mendukung perencanaan dari bawah ke atas dan menghubungkan aktor-aktor lokal dengan instansi-instansi pemerintah terkait.

3. Bidang Pemulihan Kelembagaan

Pelibatan partisipasi masyarakat pada bidang pemulihan kelembagaan sangat minim. Sebaiknya BRR juga melibatkan Pemda, ulama, lembaga adat dan cendekiawan, hal ini dikarenakan di Provinsi NAD selain kelembagaan pemerintahan, juga terdapat kelembagaan adat, sosial dan lainnya yang cukup berperan.

Berdasarkan Laporan Pengawas pada Bulan Juni 2006, untuk bidang pemulihan kelembagaan diketahui bahwa :

- Forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat tidak dibangun di daerah bencana. Partisipasi masyarakat lebih didorong oleh lembaga berbasiskan masyarakat, sedangkan peran lembaga agama, adat, dan sosial masih lemah.
- Program peningkatan kapasitas mukim diharapkan lebih responsif dan profesional. Selama ini kegiatan tersebut belum mendapatkan perhatian. Kegiatan yang dilakukan selama ini yang melibatkan mukim dan kepala desa masih berbentuk *single event*, reaktif dan tidak berkelanjutan

4. Bidang Pemulihan K3M dan Reintegrasi Mantan GAM

Untuk program/kegiatan reintegrasi, media partisipasi langsung bagi masyarakat, Bapel BRA menyediakan sebuah forum yang disebut dengan *Forum Bersama (Forbes)* sebagai sarana konsultasi dan partisipasi langsung masyarakat yang menjadi sasaran dari program reintegrasi. Forum ini diharapkan menjadi sarana sebagai pemecah masalah untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik untuk kelanjutan dari program reintegrasi dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Disamping itu BRA juga mengagendakan program pengiriman pendamping yang telah terlatih ke setiap kabupaten/kota dalam rangka sosialisasi tentang program reintegrasi.

Namun demikian media partisipasi masyarakat yang bersifat langsung belum tersistem dengan baik terutama pada proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam refungsionalisasi kelembagaan TNI/ POLRI. Namun dalam pelaksanaan program pengembangan informasi dan polilitik, hukum serta HAM pada tingkat *forum pertemuan* dan *fasilitasi konsultasi publik* hanya dilakukan internal dinas terkait, seperti TVRI, RRI dan program Bimbingan Teknologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbang Linmas NAD (*Berdasarkan Hasil Kuesioner terhadap Badan Kesbang Linmas*). Pada prinsipnya media partisipasi tersebut terjangkau, dipahami akan pentingnya media dan mudah untuk digunakan.

c. Ketersediaan dan kemudahan akses informasi bagi publik

Hal yang terpenting lain dalam partisiapsi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu masalah ketersediaan dan kemudahan akses informasi bagi publik. Form pengaduan dari masyarakat melalui media cetak terutama melalui penerbitan tabloid *Seumangat* dan *Ceureumen*, salah satu bentuk penyediaan dan kemudahan untuk memperoleh informasi bagi masyarakat luas yang telah disediakan oleh Bapel RR, yang menceritakan perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD dan Nias. Tabloid ini merupakan garda terdepan dalam penyampaian informasi kegiatan Bapel RR ke para pembacanya yang terdiri dari stakeholders yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias.

Selain media cetak, akses infromasi juga disediakan melalui informasi dan data yang diperoleh melalui RAN Data base melalui internet, namun hanya sedikit informasi yang bisa diperoleh.

Namun berbeda halnya dengan kemudahan dan ketersediaan akses informasi bagi publik tentang perkembangan program reintegrasi di NAD. Hingga saat ini Lembaga BRA masih menggunakan peran setiap BRA Kabupaten/ Kota sebagai sarana konsultasi dan pengaduan tentang berbagai informasi yang berkembang selama proses reintegrasi. Termasuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi hingga menjadi masukan yang akan dibahas dalam forum bersama. Alat komunikasi yang digunakan masih melalui media komunikasi telepon manual dan selular.

5.4 ASPEK KAPASITAS

Aspek terakhir dari fokus evaluasi ini yaitu aspek kapasitas yaitu kemampuan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sumber pendanaan, yang didayagunakan dalam melaksanakan berbagai upaya perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Secara garis besar pada aspek kapasitas disajikan dua indikator yaitu *kapasitas kelembagaan* dan *kapasitas Sumber Daya Manusia*.

a. Kapasitas Kelembagaan

1. Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Tuang, Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam

Salah satu hal yang mengindikasikan rendahnya kapasitas kelembagaan BRR adalah dalam hal realisasi penyerapan anggaran. Realisasi penyerapan anggaran bidang pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam, oleh BRR NAD-Nias per 24 November 2006 masih sangat rendah, yaitu :

1. Realisasi anggaran DIPA 2005 untuk:
    a. Bidang Perencanaan dan Pemrograman sebesar Rp. 31.242.000 atau 0.03% dari total anggaran Rp. 90.500.000.000
    b. Bidang Perumahan, Infrastruktur dan Koordinasi Tata Guna Lahan sebesar Rp. 160.410.642.851 atau 9,91% dari total anggaran Rp. 1.619.258.000.000
2. Realisasi anggaran DIPA-L 2006 untuk:
    a. Bidang Perencanaan dan Pemrograman sebesar Rp. 66.119.198.125 atau 73.09% dari total anggaran Rp. 90.468.758.000
    b. Bidang Perumahan, Infrastruktur dan Koordinasi Tata Guna Lahan sebesar Rp. 933.396.216.192 atau 63.98% dari total anggaran Rp. 1.458.847.350.000
3. Realisasi anggaran DIPA 2006 untuk:
    a. Bidang Perencanaan dan Pemrograman sebesar Rp. 50.928.703.874 atau 47.89% dari total anggaran Rp. 106.347.960.000
    b. Bidang Perumahan, Infrastruktur dan Koordinasi Tata Guna Lahan sebesar Rp. 1.655.491.685.288 atau 24.58% dari total anggaran Rp. 6.736.283.481.000

Dari laporan terlihat kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman dilihat dari segi pencapaian sangat minim, banyak yang tidak sesuai target yang dicanangkan BRR sendiri. Sebagian sektor hanya mampu menyerap dana DIPA 2005 & L tidak lebih dari 60 % per 30 Juni 2006, yang manandakan tingginya tingkat kesulitan yang tidak terpecahkan oleh BRR. Penyerapan dana yang minim menggambarkan adanya hambatan dalam melaksanakan kegiatan tata ruang. Masih belum terbitnya Perpu yang mengatur tentang penerbitan

kembali sertifikat tanah baru bagi menjadi tanda bahwa kapasitas kelembagaan pemulihan bidang pertanahan belum maksimal.

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah pembebasan lahan. Pengadaan tanah umumnya menjadi kewajiban Pemda (sesuai Kepres No.34/2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan dinyatakan bahwa salah satu dari sembilan kewenangan kab/kota di bidang pertanahan adalah penyelengaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan) namun umumnya memiliki APBD terbatas rata-rata sekitar Rp. 1M bahkan sebelum bencana. Padahal pembebasan tanah membutuhkan lebih dari Rp. 10M. Hal tersebut memberikan gambaran keterbatasan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah, sebagai pihak yang berwenang dalam hal *land acquisition,* dari segi kapasitas anggaran.

Kemampuan kontraktor dan konsultan lokal dari segi keahlian, dana, dan metode, tidak sebanding dengan beban pekerjaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Keterbatasan SDM dari Satker yang dimiliki BRR dalam mengatur besarnya volume pekerjaan yang melonjak tinggi juga menjadi masalah. Kenyataan ini memperlihatkan kelemahan dalam kapasitas kelembagaan pengawas dan pelaksana proyek dan kapasitas SDM yang tersedia.

Dana yang berasal dari donor *offbudget* menyebabkan BRR tidak bisa ikut campur dalam penentuan program yang keberhasilannya sangat menentukan bagi BRR. NGO tidak memiliki mandat untuk melapor pada BRR. BRR juga tidak memiliki kewenangan untuk meminta NGO mempercepat pelaksanaan programnya karena NGO juga mengalami kendala dalam pelaksanaan programnya. Hal ini membuktikan adanya keterbatasan BRR dalam kapasitas kewenangannya. Masalah tersebut juga dimungkinkan akibat tidak diaturnya mekanisme koordinasi yang jelas antara keduia lembaga tersebut.

2. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pemulihan sosial budaya perlu dipertanyakan khususnya dalam mengantisipasi adanya jumlah pelaksanaan kegiatan fisik oleh BRR dalam sub bidang kesehatan yang melebihi dari target yang ada dalam rencana induk yaitu seperti rehabilitasi rumah sakit dalam rencana induk sebanyak 6 unit, dan yang sudah dibangun sebanyak 11; rehabilitasi Puskesmas dalam rencana induk sebanyak 37 unit, dan yang sudah dibangun sampai mencapai 128 unit; dan rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Pustu) dalam rencana induk sebanyak 59 unit, dan yang sudah dibangun sampai mencapai 228 unit. *(Sumber : Paparan Deputi Pendidikan, Kesehatan dan Peranan Perempuan BRR pada acara FGD Pokja Sosial Budaya, 27 November 2006 di Banda Aceh).*

Kapasitas penyerapan anggaran oleh BRR menunjukkan kinerja yang masih minim. Pada aspek realisasi anggaran secara keseluruhan, berdasarkan realisasi anggaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias tahun 2005 dan 2006 sampai 24 November 2006 :

1. Secara keseluruhan penyerapan anggaran DIPA tahun 2005 dan DIPA-L 2006 dan DIPA 2006 di bidang sosial budaya masih sangat kecil:
   - DIPA tahun 2005 total anggaran Rp. 270.809.000.000 sampai Juni 2006 penyerapan anggaran Rp 7.534.395.183 atau 2.78%.
   - Sedangkan DIPA L 2006 total anggaran Rp. 263.274.65.000 dan penyerapannya sebesar Rp 140.007.919.112 atau 53.18%.
   - Sedangkan DIPA 2006 juga mengalami penyerapan yang masih rendah yaitu sebesar Rp 169.195.900.849 atau 49.59%
2. Dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan, secara keseluruhan penyerapan anggaran DIPA 2005 dan DIPA L-2005 serta DIPA 2006 juga masih rendah:
   - DIPA 2005 anggaran Rp.480.000.000 sampai Juni 2006 penyerapan anggaran Rp.144.520.343.000 atau 30.11%.
   - Anggaran DIPA L-2006 dengan angaran Rp 335.479.658.000 mengalami penyerapan rendah, yaitu per Juni 2006 penyerapan Rp 126.036.564.227 atau 37.57%.
   - Anggaran DIPA 2006 menunjukkan semakin menurun dari total anggaran 1.078.554.822.000 terserap Rp. 126.036.564.227 atau 22.51 %. *(Sumber : realisasi anggaran BRR per 24 November 2006)*

3. Bidang Pemulihan Perekonomian

Kapasitas kelembagaan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terlepas dari aspek peraturan perundangan yang dijadikan sandaran hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan di lapangan. Terkait dengan kapasitas satker BRR maka perlu dibuat adopsi dan penyesuaian-penyesuaian terhadap Kepres No. 80 tentang pengadaan barang dan jasa yang dianggap menghambat kegiatan pelelangan para satker BRR dalam melakukan pelelangan. Juga peningkatan kapasitas dalam pembuatan kebijakan dan tindakan yang konkrit dari Balai Latihan Kerja Provinsi NAD dalam menanggulangi pengangguran terbuka yang tinggi.

Kapasitas kelembagaan yang melibatkan berbagai pihak dalam proses revisi DIPA perlu menjadi perhatian, karena menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh satker BRR bidang ekonomi dan usaha. Demikian juga perlunya melakukan percepatan dalam setiap revisi RKAKL. Kapasitas penyerapan anggaran oleh Badan Pelaksana BRR, berdasarkan realisasi anggaran pelaksanaan rehabilitas dan rekonstruksi NAD dan Nias tahun 2005 dan 2006 sampai 24 November 2006 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan penyerapan anggran DIPA tahun 2005 dan DIPA-L 2006 dan DIPA 2006 di bidang pemberdayaan ekonomi dan usaha masih sangat kecil:

- DIPA tahun 2005 total anggaran Rp. 546.104.000.000 sampai Juni 2006 penyerapan anggaran Rp 24.630.863.899 atau 4.51 %.
- Sedangkan DIPA-L 2006 total anggaran Rp. 521.473.132.000 dan penyerapannya sebesar Rp 373.285.010..221 atau 71.58 %.

· Sedangkan DIPA 2006 juga mengalami penyerapan yang masih rendah yaitu sebesar Rp 842.757.954.000 atau 37.99 %.

Prosedur keadministrasian merupakan hal penting dalam menunjang kapasitas kelembagaan. Berdasarkan laporan awal kwartal 4 tanggal 16 Oktober 2006, diperlukan penyederhanaan administrasi yang berbelit untuk pemberian bantuan. Contoh: Pembangunan Gedung Pengepakan oleh ADB yang masih terhambat pembangunannya karena ada permasalahan pada administrasi.

Contoh kapasitas kelembagaan terkait dengan kewenangan ditunjukkan melalui adanya beberapa dinas non teknis melakukan kegiatan sektoral seperti dinas sosial dalam melakukan pendistribusian bibit tanaman dan ternak dan masalah pengelolaan air di tingkat on-farm. Ini menyebabkan peran dan kewenangan dinas pertanian menjadi terambil alih. Dinas pertanian meminta agar diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya air di Provinsi NAD-Nias mulai dari tingkat saluran kuarter sampai tingkat on-farm.

Beberapa penyebab rendahnya kapasitas kelembagaan antara lain karena banyak dinas, instansi/lembaga terkait dengan bidang perekonomian bahkan masyarakat tidak mengetahui tentang keberadaan dan isi dari Rencana Induk. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi rencana induk tersebut sehingga perlu peningkatan sosialisasi dari Rencana Induk selain oleh Bappenas juga melalui Pemerintah Daerah (Bappeda), agar keberlanjutan dengan program reguler setelah BRR selesai masa tugasnya dapat terjaga (*berdasarkan hasil FGD pokja pemulihan perekonomian, November 2006).*

4 Bidang Pemulihan Kelembagaan

Dari laporan anggaran BRR per 24 November dapat diketahui, kapasitas penyerapan anggaran untuk bidang kelembagaan dan hukum masih sangat kecil yaitu dibawah 50 %. Rincian penyerapan anggaran tersebut sebagai berikut :

1. Anggaran DIPA 2005 sebesar Rp. 347,254,286,000,- dan penyerapan anggaran mencapai Rp. 13,455,679,857,- (3,87 %)
2. Anggaran DIPA-L 2006 sebesar Rp. 333,798,605,000,- dan penyerapan anggaran mencapai Rp. 102,641,199,602,- (30,75 %)
3. Anggaran DIPA 2006 sebesar Rp. 534,928,123,000,- dan penyerapan anggaran mencapai Rp. 79,339,621,052,- (14.,83 %)

Selain masalah pembentukan Satker-satker secara kelembagaan, hal yang penting secara manajemen pada Bapel BRR yaitu belum terlaksananya sistem pelaporan kepada Pemda, Kementerian Lembaga baik pada perencanaan, pelaksanaan berdasarkan indikator yang ditetapkan. Pada tabel berikut ini akan dijabarkan beberapa produk peraturan perundangan yang masih harus ditindaklanjuti lembaga yang berwenang, yaitu sebagai berikut;

Tabel V.7
Rekapitulasi Permasalahan yang Perlu Ditindaklanjuti

Inventaris Masalah	Bentuk Regulasi	Substansi	Status
Proses penganggaran dalam penyusunan DIPA APBN yang tidak fleksibel	UU APBN	Penetapan sistem penganggaran yang fleksibel untuk penanganan pasca bencana	Sedang disusun
Pengadaan tanah untuk rumah, infrastruktur dan fasilitas publik	Perpu	Penyelesaian permasalahan Hukum dan Tanah di NAD dan Nias	Di BPN/Dephukham
Pelaksanaan PP untuk pemberian fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan bencana alam di NAD dan Nias belum dapat dilaksanakan	PP Perpajakan di NAD dan Nias	Fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan bencana di NAD dan Nias	Di Menhukam sejak akhir Juni 2006
PP No. 19 Tahun 1955 tentang pembebasan bea masuk bagi golongan pejabat/PBB dan orang asing	PP	Pencabutan PP No. 19 Tahun 1955 yang sudah tidak relevan dengan kondisi NAD dan Nias	PP No. 19 Tahun 1955 masih berlaku
Pembebanan PPh untuk pengalihan tanah di NAD dan Nias	SK Menkeu	Pembebasan PPh atas pengalihan tanah di NAD dan Nias	Di Menkeu
Pembebanan biaya keimigrasian dan tenaga kerja untuk relawan dan pekerja asing di NGO dan Donor	SK Menkeu	Permohonan pembeasan biaya DPKK, perpajakan, kepabenan, dan cukai serta keimigrasian dalam rangka hibah	Di Menkeu
Ketidakterbukaan APBD menyulitkan perencanaan sektoral BRR	Qanun APBD	Keterbukaan APBD oleh pemerintah daerah kepada BRR	Sedang diusulkan
Belum adanya tata ruang perencanaan pembangunan daerah pasca bencana	Qanun	Qanun tat ruang oleh Pemerintah Provinsi NAD	Sedang disusun

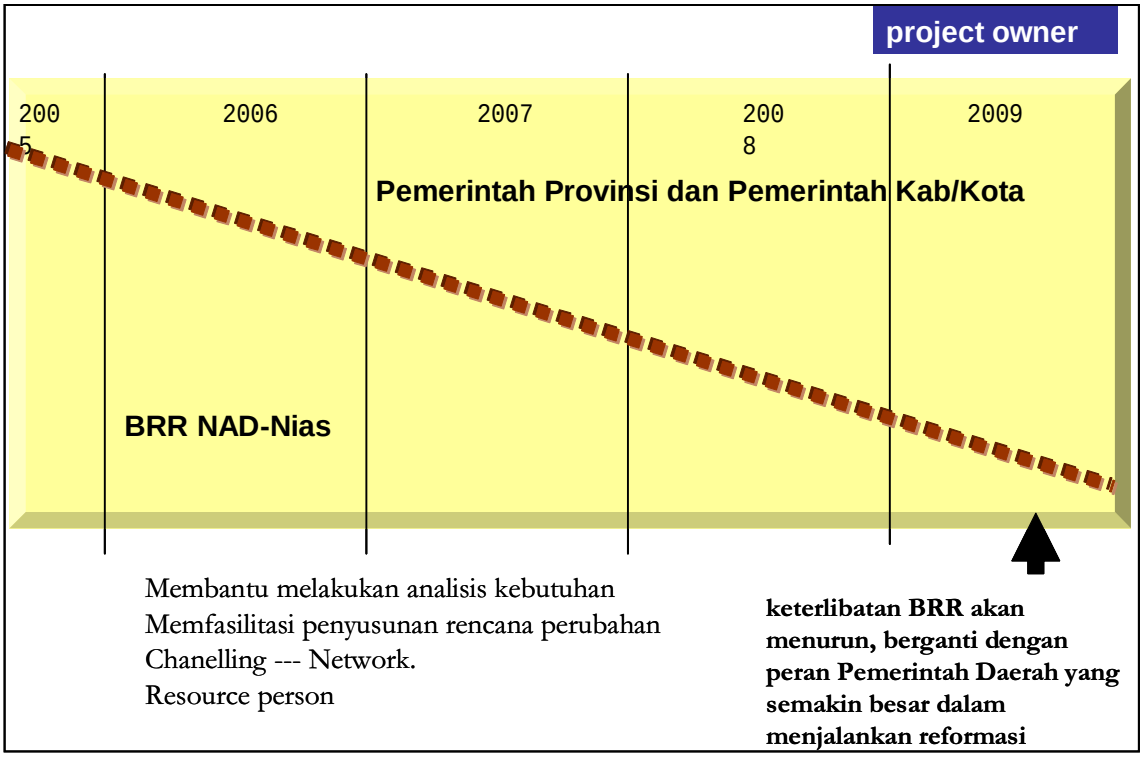
Sumber: Paparan Bapel RR dalam Forum Penyelesaian Masalah Bersama Internal BRR, Jakarta, 29 September 2006

Berdasarkan evaluasi terhadap kapasitas kelembagaan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, beberapa hal terkait mekanisme, pengawasan, dan kesiapan keberlanjutan, yang telah dilakukan BRR adalah sebagai berikut:

- *Pertama*, aturan dan mekanisme Bapel BRR dalam pelaporan perkembangan realisasi pelaksanaan pembangunan serta pelaporan realisasi pencapaian sasaran dan target keluaran dilakukan setiap sebulan sekali dalam bentuk Form OC-1.
- *Kedua*, mekanisme pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan pada Bapel BRR dilaksanakan oleh Deputi Pengawasan, dengan penugasan Deputi Pengawasan dalam menilai kinerja di semua keDeputian Bapel BRR, yang dilaksanakan melalui khususnya Satuan Pengawas Internal (SPI) BRR. Dalam setiap bulannya setiap direktorat di keDeputian Bapel BRR berkewajiban melaporkan kegiatan satker-satkernya kepada SPI tersebut.
- *Ketiga, k*esiapan *exit strategy* maupun peralihan *asset* dari BRR kepada Pemda, BRR akan mengurangi keterlibatannya dari tahun 2005 ke tahun 2009 kemudian berganti dengan peran Pemerintah Daerah yang semakin besar dalam menjalankan reformasi. Untuk itu, BRR harus selektif dalam menentukan bidang-bidang mana yang harus didahulukan untuk kepentingan kemajuan di Aceh. Sinergi antara BRR dan Pemerintah Daerah

dapat dilihat pada gambar di bawah ini (*berdasarkan paparan Deputi Bidang Kelembangan dan Pengembangan SDM Bapel BRR pada FGD P3RIRRWANS Bidang Pemulihan Kelembagaan, 28 September 2006*).

Gambar V.2
Skema Sinergi Pemda-BRR



Sumber : Paparan Deputi Bidang Kelembangan dan Pengembangan SDM Bapel BRR pada FGD P3RIRRWANS Bidang Pemulihan Kelembagaan (28 September 2006)

Sebagai salah satu exit-strategy action oleh BRR yaitu transfer asset, BRR khususnya Deputi Bidang Kelembagan dan Pengembangan SDM bekerja sama dengan Deputi Keuangan BRR yaitu pada Direktorat *asset management*. Tujuan dari *asset management* ini adalah menjamin keberadaan aset. Proses transfernya adalah Satker menyerahkan kepada BRR, kemudian dari BRR akan diserahkan kepada pengguna. Satker yang pertama kali melakukan transfer aset adalah Satker BRR - Matra Darat.

5. Bidang Pemulihan K3M dan Reintegrasi Mantan GAM

Secara khusus aturan dan mekanisme yang ada di dalam Bapel BRR khususnya pada satker-satker yang berkaitan dengan bidang K3M, bahwa pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan berjalan dengan baik. Hanya dalam ketepatan waktu pelaporan yang belum bisa disesuaikan, karena sebagian besar dari satker ini berkoordinasi langsung ke Mabes TNI dan Mabes Polri, terkadang sedikit sulit bagi staff satker yang terkait dengan bidangnya memperoleh laporan pelaksanaan (realisasi) tepat pada waktunya. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff dari deputi kelembagaan Bapel RR, satker-satker yang berada di bawah TNI/ Polri sering disebut dengan *untouchable* satker (satker yang tidak

tersentuh). Berbeda halnya dengan satker dari infokom, yang sedikit lebih mudah untuk dilakukan pemantauan oleh Bapel BRR.

Mengenai kapasitas kelembagaan BRA, seperti sistem pelaporan, struktur organisasi dan tatakerja, cukup dipermudah dengan mekanisme yang diikuti yang masih mengikuti standar birokrasi pemerintah daerah karena lembaga ini dibentuk berdasarkan SK Gubernur. Dalam hal pengendalian pengawasan, BRA ikut diawasi oleh lembaga donor serta K/L yang terkait pelaksanaan program reintegrasi.

b. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Bapel RR sejak BRR berdiri pada bulan April 2005, pada awalnya terdiri dari lebih kurang 15 orang. Namun hingga per 18 April 2006 seluruh staf Bapel berjumlah 482 orang dengan perincian formasi personalia sebagai berikut:

Tabel V.8
Pemetaan Posisi Personalia Bapel BRR

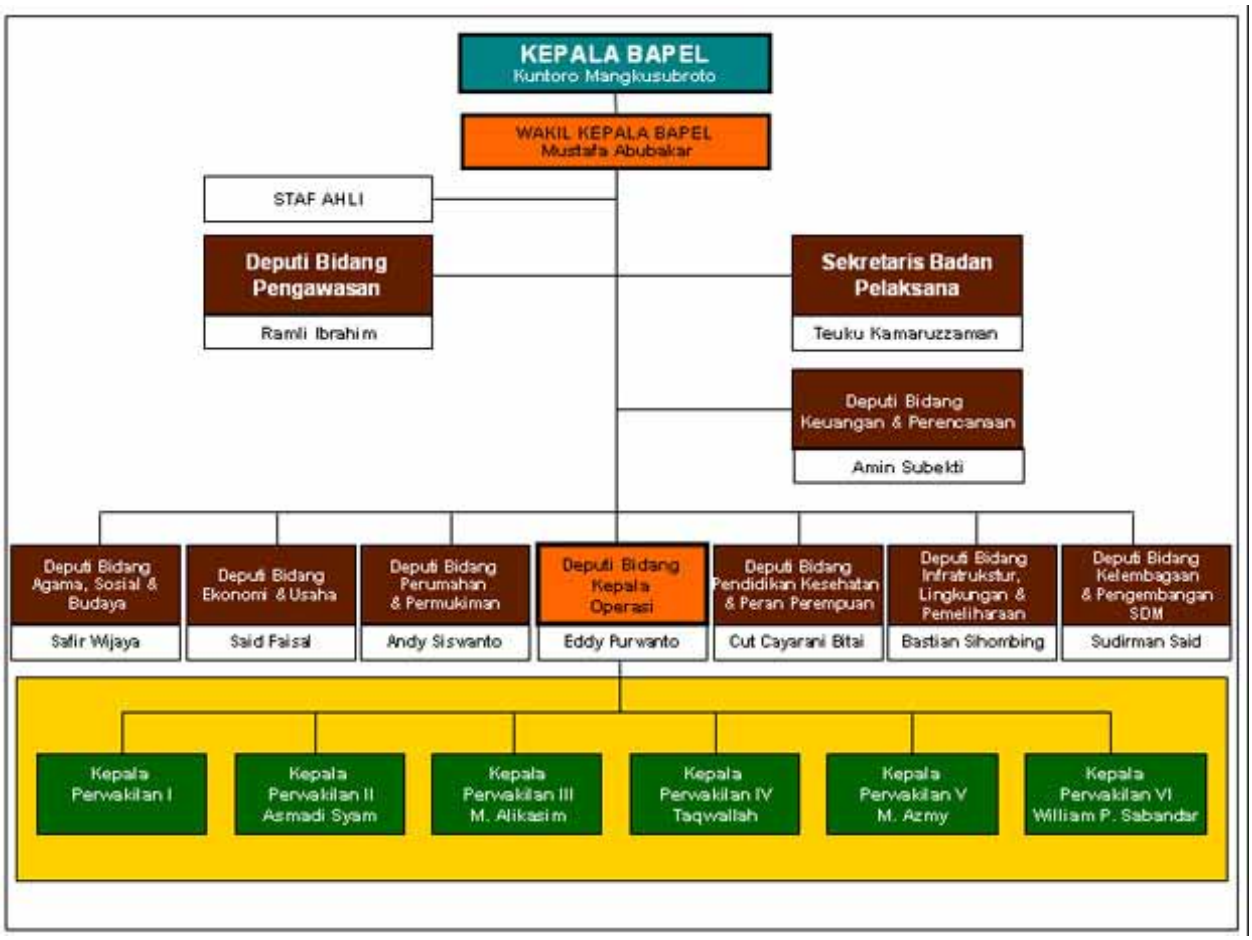
No	Posisi Jabatan	Jumlah Personel
1	Deputi	9 orang
2	Direktur	52 orang
3	Manajer	118 orang
4	Asisten Manajer	75 orang
5	Staf	226 orang

Sumber: Laporan Bapel BRR, April 2006, hal. 62-63

Dengan jumlah personel tersebut di atas yang didukung dengan struktur organisasi Badan Pelaksana didasarkan kepada Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari: Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Deputi Bidang Pengawasan, Deputi Bidang Keuangan dan Perencanaan, Deputi Bidang Operasi, Deputi Bidang Agama, Sosial, dan Budaya, Deputi Bidang Ekonomi dan Usaha, Deputi Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Peran Perempuan, Deputi Bidang Perumahan dan Permukiman, Deputi Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan, dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah dalam rangka mengantispasi kelambatan dan permasalahan di lapangan, sehingga BRR dapat menunjukkan kinerja yang lebih optimal. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut:

Berikut ini struktur organisasi Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias sebagai berikut;

Gambar V.3
Struktur Organisasi Badan Pelaksana BRR



Namun demikian, berdasarkan evaluasi terhadap kapasitas Sumber Daya Manusia Bapel RR yang dilakukan oleh LSM Gerak, menilai bahwa proses rekrutmen pegawai atau staf di Bapel RR tidak terbuka dan tidak transparan. Penempatan SDM dalam organisasi terkesan diangkat dan ditunjuk secara langsung tanpa ada transparansi sama sekali. Dengan kata lain, bahwa tidak ada uji kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)* bagi staf atau pegawai Bapel RR. Masyarakat tidak memiliki informasi mengenai faktor-faktor yang menentukan seseorang untuk menjadi staf atau pegawai pada instansi ini. Seharusnya Bapel RR bisa mempublikasikan proses rekrutmen tersebut paling tidak meliputi *track record* sebelumnya dan keahlian atau kemampuan yang dimiliki oleh personel yang bersangkutan. Diperlukan perbaikan sistem dan mekanisme rekrutmen pegawai atau staff di Bapel BRR agar lebih terbuka dan transparan sehingga kapasitas yang dimiliki oleh SDM BRR dalam hal melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. (*Sumber : Monitoring dan Evaluasi Pokja Perekonomian, 7 November 2006).* Sebagai contoh: Menurut peraturan pemerintah, mulai tahun 2008 untuk perekrutan personil satker untuk pelelangan diharapkan yang sudah memiliki sertifikasi guna menghadapi beban pekerjaan pelelangan. Sampai akhir tahun 2007 para personil pelelangan tidak diharuskan memiliki sertifikasi tersebut.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, bahwa kinerja Satker selain dilihat dari sumber daya manusianya juga tergantung dari kondisi lapangan seperti (1) adanya pengantisipasian indikasi tender yang ada unsur KKN; (2) lamanya penentuan pemetik manfaat (beneficiaries); (3) terbentur masalah peraturan dan perundangan seperti Kepres No. 80 tahun 2003; dan (4) keterlambatan pencairan DIPA dianggap menghambat kegiatan pelelangan. Kendala lainnya juga karena adanya keterbatasan jumlah pelaksana Satker untuk mendukung percepatan pelaksanaan rehabiltasi dan rekonstruksi, serta beragam latar belakang pendidikan dan lingkup kerja personil satker sipil maupun swasta yang berdampak pada perbedaan sikap dan sudut pandang masing-masing personil satker dalam menyikapi suatu masalah dan mengambil keputusan. (*Sumber : Monitoring dan Evaluasi Pokja Perekonomian, 6 November 2006 dan diskusi lokakarya, 19 Desember 2006)*

Kemampuan kontraktor dan konsultan lokal dari segi keahlian, dana, dan metode, tidak sebanding dengan beban pekerjaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Keterbatasan SDM dari Satker yang dimiliki BRR dalam mengatur besarnya volume pekerjaan yang melonjak tinggi juga menjadi masalah. Khusus dalam pemulihan bidang perumahan, sangat minimnya kualitas tenaga terampil dan minimnya jumlah tenaga terampil untuk membangun perumahan apalagi perumahan yang harus memenuhi konstruksi tahan gempa/bencana, menyebabkan rendahnya hasil perumahan yang dibangun. Hal tersebut diatas membuktikan adanya kekurangan dalam aspek kapasitas SDM yang tersedia.

Beberapa hasil evaluasi terhadap kapasitas SDM Bapel RR dalam kaitan dengan sistem pengendalian intern, adalah sebagai berikut:

1. Perubahan pada struktur organisasi Bapel RR telah membawa dampak pada ketidakjelasan pada pola koordinasi antar unit kerja, sehingga menyebabkan kebingungan bagi pelaksana pada saat terjadi perubahan.
2. Beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh pihak Bapel terkait dengan sistem pencatatan pelaporan belum disusun sebagai dasar penyusunan laporan keuangan TA 2005 baik pada tingkat Satker maupun pada Bapel. Penyusunan Laporan Keuangan BRR TA 2005 belum didasarkan pada Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang telah dibakukan oleh pihak manajemen sehingga proses penyusunan laporan keuangan mulai dari Satker hingga Bapel belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Penyusunan anggaran BRR berdasarkan usulan kegiatan dari masing-masing kedeputian yang kemudian dibahas dalam tim penyusunan anggaran yang melibatkan Deputi Anggaran dan Akuntansi untuk seterusnya diusulkan kepada pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan, baru kemudian disahkan dalam DIPA.
4. Bapel RR didukung oleh SDM dari beragam latar belakang baik dari pegawai negeri sipil maupun swasta ini sangat menggambarkan heterogenitas sehingga berdampak pada banyaknya perbedaan sikap dan sudut pandang dalam menyikapi suatu masalah. Akibatnya adalah dapat memperlambat dalam pengambilan keputusan.

5. Bapel RR belum menetapkan mekanisme pengawasan secara menyeluruh yang mencakup pengawasan kinerja maupun keuangan. *(Laporan BPK-RI, Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BRR NAD-Nias Tahun Anggaran 2005, Agustus 2006, hal. 21)*

Dari hasil pemeriksaan BPK RI, per 9 Juni 2006, tentang Kinerja Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, menemukan beberapa permasalahan tentang kapasitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, khusunya yang terkait dengan kapasitas internal Badan Pelaksanan BRR:

1. *Pertama*, kebijakan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias belum sepenuhnya tepat dan belum dikomunikasikan kepada Satker BRR. Hal ini terlihat bahwa pelimpahan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran APBN-P dan Bapel RR kepada Satker belum tepat. Kemudian, Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha dalam melakukan kegiatan TA 2005 belum dibekali Petunjuk Teknis.
2. *Kedua*, pengorganisasian pelaksana program RR NAD-Nias belum optimal. Fungsi Bapel sebagai koordinator kegiatan RR belum terlaksana dengan baik. Kinerja Bapel RR tidak sebanding dengan renumerasi yang diterima. Struktur organisasi, dokumen rencana dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan UsahaTA 2005 belum disahkan. Dan, pelaksanaan pekerjaan pada beberapa Satker tidak didukung dengan pengawasan.
3. *Ketiga*, pencapaian kemajuan pembangunan fisik dan realisasi keuangan RR NAD-Nias rendah. Gambaran tersebut terlihat dari terjadinya kendala administrasi, keterbatasan SDM, ketidaksiapan Satker dan kesulitan teknis telah menghambat penyerapan anggaran dan realisasi fisik. Pelaksanaan kegiatan RR Bidang Pendidikan dan Kesehatan TA 2005 lebih dititikberatkan pada kegiatan non fisik. Kemudian terjadi kesalahan penyusunan anggaran pada program Pengembangan Ekonomi Usaha pada Satker Industri Kecil dan Menengah NAD menghambat realisasi fisik.

Beberapa rekomendasi yang telah diberikan, adalah meninjau kembali kebijakan pelimpahan kewenangan Bapel kepada Satker, mengkomunikasikan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan Bapel, menetapkan ukuran kinerja Bapel dalam mengorganisasikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan RR NAD-Nias, dan melakukan evaluasi dan mengupayakan kebijakan *crash program* dalam rangka mengatasi kendala adminisrasi, keterbatsana SDM, ketidaksiapan Satker, dan kesulitan teknis di lapangan

Kemudian, evaluasi terhadap kapasitas Sumber Daya Manusia Bapel BRR menimbulkan beberapa implikasi yang terjadi yaitu:

1. Dengan adanya perubahan struktur organisasi Bapel BRR atau dengan kata lain dengan terjadinya reorganisasi BRR berimplikasi untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2006 dan untuk tahun-tahun yang akan datang. Selain itu untuk pembentukan Satker juga mungkin mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena payung hukum yang mengikat setiap Satker di BRR hanya bertahan selama setahun

2. Untuk melakukan reorganisasi BRR, sebaiknya diperlukan PNS yang terlibat dalam organisasi tersebut karena hal ini terkait dengan emanfaatan dana APBD. Selain itu perlunya perbaikan berkaitan dengan banyaknya konsultan asing yang dibiayai oleh dana APBN dalam bentuk dolar. Apabila yang mengisi jabatan tersebut adalah non PNS, salah satu cara penyelesaian yaitu mereka perlu ditraining terlebih dahulu.

BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara umum, kegiatan pemantauan dan pengendalian tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Kesimpulan akan ditinjau dari aspek-aspek pemantauan dan pengendalian yaitu konsistensi, koordinasi, konsultasi dan koordinasi di 5 (lima) bidang pemulihan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Hasil pemantauan dan pengendalian diharapkan dapat menjadi masukan bagi upaya-upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias-Sumut, khususnya dalam hal : (1) penyusunan kebijakan dan program, (2) penyempurnaan sistem dan mekanisme pada proses dan prosedur perencanaan dan pelaksanaan, (3) reposisi peran dan kewenangan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BRR, Donor/NGO, dan masyarakat luas, untuk percepatan pemulihan sendi-sendi kehidupan masyarakat NAD dan Nias-Sumut, (4) penyiapan bagi keberlanjutan program dan kegiatan serta asset pasca BRR, serta (5) penyempurnaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Sumut.

6.1 KESIMPULAN

Secara garis besar, dalam lingkup perencanaan sebagai dasar pelaksanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD-Nias, beberapa hal dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Rencana Induk sebagai dasar kegiatan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak seluruhnya dapat diimplementasikan di lapangan.
2. Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sampai dengan akhir bulan Juni 2006 belum mempunyai Rencana Aksi yang definitif yang merupakan penjabaran atau penguraian dari Rencana Induk seperti halnya yang tertuang dalam Perpu No. 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Prov. NAD dan Kepulauan Nias, Prov. Sumut, dimana disebutkan bahwa Badan Pelaksana mempunyai tugas menyusun rencana rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan Rencana Induk bersama-sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana.
3. Rencana Strategis BRR yang seharusnya merupakan menjadi dokumen pelengkap terhadap dokumen perencanaan Rencana Induk dan diharapkan mampu menjabarkan secara lebih rinci Rencana Induk, baru selesai disusun pada Agustus 2006, dan kurang memiliki gambaran lengkap terkait dengan program, kegiatan, anggaran, lokasi, periode pelaksanaan pembangunan, yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan RIRRWANS.
4. Fokus dalam Renstra lebih kepada pembangunan fisik dan kemudahan pelaksanaan, tidak berbasis keterpaduan program kegiatan dan

penyelesaian masalah atau pemenuhan kebutuhan masyarakat secara komprehensif. Selain itu, yang menjadi prioritas BRR tahun 2005 dan 2006 adalah infrastruktur khususnya perumahan.

5. Rencana kerja BRR sebagai wujud implementasi Rencana Induk di lapangan sering berubah, karena disesuaikan dengan skala prioritas pelaksanaan, kondisi lapangan, sangat tergantung dari kapasitas SDM pelaksana, dan tergantung dari pencairan dana.

6.1.1 Konsistensi

1. Pada dasarnya Badan Pelaksana BRR baik dalam strategi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias telah berupaya mengacu kepada Rencana Induk, namun demikian sebagian besar program dan kegiatan lebih banyak mengacu kepada penyesuaian kebutuhan di lapangan.
2. Dari berbagai program yang tercantum dalam Rencana Induk, tidak seluruhnya dilaksanakan dan dituangkan dalam RKA-KL, sehingga masih terdapat beberapa kegiatan dari Rencana Induk yang tidak dapat dilaksanakan. Penyerapan anggaran ini masih sangat kecil, disebabkan antara lain singkatnya waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, Satuan Kerja (Satker) belum bekerja optimal, pertanggungjawaban kinerja satker masih kurang memadai, Bapel RR tidak dapat melakukan kontrol langsung ke masing-masing satker yang dibentuk oleh departemen teknis
3. Beberapa rencana kegiatan dalam Rencana Induk tidak dijabarkan dalam RKA-K/L, karena disesuaikan dengan urutan prioritas, kebutuhan dan kemampuan, dan tidak termasuk dalam kategori mendesak. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan prioritas pembangunan pada pemulihan infrastruktur dan perumahan dibandingkan dengan pemulihan bidang lainnya.
4. Penyimpangan anggaran dan kegiatan atas Rencana Induk, terlihat dari jumlah anggaran yang dialokasikan dalam RKA K/L BRR pada beberapa program kegiatan tertentu melebihi jumlah yang direncanakan dalam Rencana Induk, sementara kegiatan yang dianggarkan dalam RKA K/L tidak sesuai dengan yang dicantumkan dalam Rencana Induk. Sebagai contoh, program kegiatan yang menurut Rencana Induk berupa kegiatan non fisik namun dalam RKA K/L BRR menjadi berupa kegiatan fisik pembangunan sarana dan prasarana kegiatan yang tidak tercantum dalam Rencana Induk.
5. Terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kegiatan karena ketidakmatangan perencanaan dan tidak terkoordinasikannya perencanaan antar Bapel BRR, Pemerintah Daerah, K/L, dan terutama dengan donor/NGO.
6. Rencana Strategis BRR kurang memberikan perhatian kepada persyaratan dasar tentang keberadaan Tata Ruang Wilayah dan antisipasi terhadap bencana sebagai dasar pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta status tanah, seperti telah digambarkan dalam Rencana Induk. Penyusunan Rencana Tata ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) dengan pendekatan

bottom up dimulai dengan *village planning* memerlukan waktu yang cukup panjang dan tidak dapat menjawab pesan Rencana Induk dimana rencana tata ruang menjadi dasar bagi semua pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

7. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh K / L lebih banyak mengacu dan konsisten dengan Rencana Induk, walaupun laporan pelaksanaannya masih sangat minim, seperti yang ditunjukkan di bidang pemulihan perekonomian. Sedangkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah Daerah hanya sebagian yang konsisten dengan Rencana Induk, dengan lebih terfokus pada bantuan modal non fisik.

8. Sebagian realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan Donor lebih kecil dari pada komitmen anggaran yang diberikan dalam Rencana Induk, khususnya cukup banyak komitmen Donor yang tidak terealisasi di bidang infrastruktur transportasi dan perumahan. Ketidakkonsistenan juga terjadi antara perencanaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan Donor, khususnya dalam pemulihan kelembagaan, yang terlihat dari mundurnya jadwal pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan periode waktu yang telah direncanakan, dimana komitmen terealisasi dalam proses waktu yang berjangka menengah atau panjang.

9. Ketidakkonsistenan keseluruhan program dan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah dalam Bidang Pemulihan K3M dari Rencana Induk tidak ditampung dalam rencana aksi Bapel RR karena adanya kesepakatan damai antara GAM dengan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Dokumen perencanaan kegiatan dari BRA secara konsisten merujuk pada butir-butir dari MoU Helsinki yaitu pada butir 3.2. tentang reintegrasi ke dalam masyarakat, dengan tetap menyesuaikan pada kondisi masyarakat. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan bidang reintegrasi mantan GAM antara BRA, Pemda, K/L, Donor, didorong kepatuhan pada MOU Helsinki.

10. Secara umum terdapat konsistensi antara program yang termuat dalam rencana induk dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh BRR pada bidang pemulihan sosial budaya, namun ada 1 sub bidang diantara sub 9 bidang yang tidak dilaksanakan sama sekali oleh BRR yaitu sub *"bidang pendataan penduduk "* karena kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh kementerian Lembaga yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

11. Adanya konsistensi antar pelaksana pembangunan oleh BRR, Pemda, dan Kementerian Lembaga khususnya di bidang pemulihan sosial budaya pada sub bidang Kesehatan dan Kesehatan, dimana antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya cukup banyak yang saling melengkapi.

12. Konsistensi antar pelaksana donor dan pelaksana satker BRR khususnya di bidang pemulihan kelembagaan, dijembatani oleh peran BRR dalam mendahulukan pembangunan fisik kepada donor sebelum kepada satkernya, sehingga mencegah tumpang tindih antara donor dengan pelaksana lain. Namun demikian, masih terjadi potensi tumpang tindih dalam kegiatan dan lokasi antar donor sendiri, yang menunjukkan tidak adanya peran BRR dalam koordinasi antar donor.

13. Kotidakkonsistensian data dan informasi yang terjadi mengakibatkan ketidaksesuaian penganggaran kegiatan antara K/L dengan BRR, sebagai contoh pada pemulihan perekonomian data kerusakan sektor produksi pertanian tanaman pangan.

6.1.2 Koordinasi

1. Secara umum, koordinasi antar pelaksana program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi belum terlaksana secara baik dalam mekanisme yang tertata sistematis.
2. Belum ada koordinasi yang baik dan sinergis antar berbagai instansi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah banyak dilakukan berbagai institusi, sehingga tidak terbangun keterkaitan antara hasil monitoring dan evaluasi dengan upaya percepatan dan perbaikan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Tidak terciptanya mekanisme koordinasi perencanaan antara BRR dengan Pemda dan Kementerian/Lembaga, termasuk tidak adanya proses pelaporan, sehingga Pemerintah Daerah tidak mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana, menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara kegiatan, mengakibatkan tidak terakomodasinya kebutuhan daerah dalam pemulihan pasca bencana, dan dikuatirkannya keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan hasil pembangunan pasca BRR pada tahun 2009. Namun dengan rintisan forum koordinasi yang akan dilaksanakan secara teratur dan sistematis dalam perencanaan antara Bapel RR dengan Pemerintah daerah, akan merupakan tindak yang strategis khususnya bagi Bappeda sebagai penanggung jawab dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
4. Koordinasi pelaksanaan antara Bapel RR dengan Donor/NGO dilaksanakan hanya satu arah dalam bentuk penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan penganggaran oleh Donor/NGO kepada Bapel RR melalui Operation Center BRR yang dipublikasikan di Recovery NAD and Nias Database (RAND). Donor melaksanakan kegiatan langsung kepada masyarakat.
5. Mekanisme koordinasi internal antara Bapel BRR dengan satker, tidak didukung pembinaan-pelatihan terlebih dahulu kepada satker pelaksana, dan tidak didukung dengan mekanisme koordinasi pengawasan dengan satker pelaksana. Kurangnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan antara Bapel BRR dengan Satkernya, menyebabkan sering terjadinya perbedaan pola pelaksanaan pembangunan sehingga Satker harus berimprovisasi dalam melaksanakan kegiatannya.
6. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya pada bidang perekonomian, karena belum adanya standarisasi (*key performance indicator*) mengenai koordinasi yang baik. Sedangkan koordinasi atau "*eye center*" untuk penilaian yang tidak baik muncul karena penilaian individu terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Perlu diluruskan kembali bahwa koordinasi adalah alat untuk rehabilitasi

dan rekonstruksi yang harus dinilai secara obyektif yaitu untuk membangun kembali NAD-Nias menjadi lebih baik dari saat sebelumnya

7. Lemahnya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai sektor terkait yang dilakukan secara terintegrasi, khususnya pada bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup di tingkat pusat, memerlukan koordinasi secara khusus untuk menyelesaikan hambatan/permasalahan, terutama masalah perpu penanganan permasalahan hukum pasca bencana.
8. Mekanisme koordinasi perencanaan yang lebih baik ditunjukkan antara BRR dan BRA, melalui penyesuaian program dan alokasi anggaran di sektor reintegrasi mantan GAM antara Bappenas - BRA – Pemda – donor. Sedangkan dalam mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan, BRA dengan pihak Bapel BRR *belum menjalin koordinasi secara langsung* yang berkaitan dengan pelaksanaan program reintegrasi ini
9. Terbentuknya mekanisme dan distribusi kerja yang jelas antara BRR, Pemda Provinsi dan pemda Kab/Kota dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruki NAD-Nias di bidang pemulihan sosial budaya khsusnya pada bidang pendidikan dan kesehatan melalui terlaksananya rapat koordinasi rutin antara lembaga.

6.1.3 Konsultasi

1. Partisipasi masyarakat masih sangat kurang di tingkat perencanaan, baik melalui penyusunan program, kegiatan, dan anggaran, pelaksanaan serta pengendalian kegiatan dan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Sangat sedikit kegiatan yang melibatkan lembaga adat, agama dan sosial, sampai ke tingkat mukim desa. Partisipasi masyarakat melalui pelatihan sampai kepada pelaksanaan teknis lebih banyak dilaksanakan oleh lembaga donor/ NGO, khususnya pada kegiatan-kegiatan pembangunan perumahan.
2. Tingkat pelibatan/partisipasi masyarakat pada proses perencanaan dan pelaksanaan. di bawah koordinasi Bapel BRR hanya pada tingkat sosialisasi dan pelibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Contoh partisipasi masyarakat yang baik adalah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang atau *village planning*.
3. Di lain pihak, partisipasi masyarakat pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh K/L dan Pemda dan donor/NGO justru terfokus pada pelatihan-pelatihan.
4. Media bagi keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah dengan lingkup cukup luas masih bersifat seremonial sebatas workshop, lokakarya, atau pembahasan hasil pelaksanaan, khususnya pada pemulihan bidang lingkungan hidup dan sosial budaya. Sementara media konsultasi publik melalui elektronik masih terbatas digunakan dalam pemulihan kelembagaan di tingkat internal dinas. Akses masyarakat luas dalam mendapatkan informasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah cukup baik disediakan Bapel BRR melalui tabloid dan internet

5. Upaya maksimal BRR ke depan, telah cukup baik dengan pelibatan masyarakat dan Pemerintrah Daerah melalui dibentuknya sekertariat bersama yang dirintis di wilayah Nias, dan diadakannya forum CFAN (Coordination Forum for Aceh and Nias). Sementara itu upaya perwilayahan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui Regionalisasi BRR sejak pertengahan 2006 sangat mendorong pelibatan masyarakat dalam lingkup lokal secara lebih aktif. Bersama-sama dengan adanya upaya pengembangan akses publik, kemudian *concept notes* untuk prosedur pengajuan usulan, semua upaya tersebut di atas adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi antarstakeholders, mendekatkan diri pada pembangunan berbasis lokal, serta transparansi pelaporan kepada masyarakat.
6. Tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya bidang pemulihan perekonomian yang dilaksanakan dengan basis pendekatan masyakarat, adalah identifikasi kebutuhan masyarakat melalui penggalian persepsi atau ekspektasi yang memakan waktu cukup lama, dan pada akhirnya mempengaruhi proses percepatan pembangunannya.
7. Kurangnya konsultasi antara pelaksana dan masyarakat penerima manfaat, khususnya di bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, mengakibatkan rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perlunya percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
8. Di bidang Reintegrasi, media partisipasi langsung bagi masyarakat, Bapel BRA menyediakan sebuah forum yang disebut dengan *Forum Bersama (Forbes)* sebagai sarana konsultasi dan partisipasi langsung masyarakat yang menjadi sasaran dari program reintegrasi. Forum ini diharapkan menjadi sarana sebagai pemecah masalah untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik untuk kelanjutan dari program reintegrasi dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang

6.1.4 Kapasitas

1. Kapasitas kelembagaan dalam penyerapan anggaran masih minim, terlihat dari Kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman yang menjadi prioritas kerja Bapel BRR di tahun 2005 dan 3006, prosentase pencapaiannya masih minim dan banyak yang tidak sesuai dengan target yang dicanangkan BRR sendiri. DIPA 2005 terserap 10.45%, dan DIPA L-2006 sebesar 58.49% dari pagu Rp 3.9 triliun. Sedangkan DIPA 2006 realisasi penyerapan dana sebesar 27.55% dari total pagu Rp. 10.52%. Hal ini manandakan tingginya tingkat kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan yang belum terpecahkan oleh BRR dan menggambarkan adanya hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan.
2. Laporan kegiatan dan realisasi anggaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias Sumut yang dipublikasikan oleh Bapel BRR, belum menggambarkan kegiatan secara detil yang dapat menjadi bahan konsultasi BRR kepada masyarakat luas. Bahkan Laporan kegiatan oleh Donor dan NGO melalui RAND dengan data yang mutakhir tidak dapat diketahui publik

secara luas. Hal tersebut menggambarkan penyusunan Laporan BRR belum didasarkan pada Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang telah dibakukan oleh pihak manajemen sehingga proses penyusunan laporan mulai dari Satker hingga Bapel belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Belum ada prosedur dan mekanisme pelaporan kepada stakeholders lain, khususnya Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab pembangunan di daerah yang bersangkutan.

3. Secara umum, mekanisme koordinasi antar unit dalam lingkup Bapel BRR sendiri belum jelas. Masih sangat kurangnya koordinasi dan komunikasi pengambil kebijakan dengan pelaksana, yang diwujudkan melalui pembekalan teknis dari kebijakan dan program menuju kegiatan, dan pengendalian dalam proses pembangunannya.
4. Belum ada petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan sebagai dasar bagi satker dalam melaksanakan pembangunan. Pengorganisasian pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias juga belum optimal
5. Satuan Pengawas Internal yang dibentuk untuk melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan masih kurang memberikan peran yang berarti, ditambah dengan mekanisme pengendalian tindak lanjut yang belum ada. Bapel RR belum menetapkan mekanisme pengawasan secara menyeluruh yang mencakup pengawasan kinerja maupun keuangan.
6. Keberadaan Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas sebagai pengendali dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi belum diperankan secara berarti dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Walaupun minimal, rapat-rapat koordinasi tripartit internal BRR tersebut telah diupayakan ditindaklanjuti oleh Bapel BRR, khususnya terkait dengan percepatan peraturan perUndangan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan, maksimalisasi pelibatan masyarakat, dan pelibatan Pemerintah Daerah sebagai upaya keberlanjutan pembangunan daerah pasca BRR.
7. Secara khusus aturan dan mekanisme yang ada di dalam Bapel BRR khususnya pada satker-satker yang berkaitan dengan bidang K3M, bahwa pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan berjalan dengan baik. Hanya dalam ketepatan waktu pelaporan yang belum bisa disesuaikan, karena sebagian besar dari satker ini berkoordinasi langsung ke Mabes TNI dan Mabes Polri, terkadang sedikit sulit bagi staff satker yang terkait dengan bidangnya memperoleh laporan pelaksanaan (realisasi) tepat pada waktunya. Berbeda halnya dengan satker dari infokom, yang sedikit lebih mudah untuk dilakukan pemantauan oleh Bapel BRR. Mengenai kapasitas kelembagaan BRA, seperti sistem pelaporan, struktur organisasi dan tatakerja masih mengikuti standar birokrasi pemerintah daerah karena lembaga ini dibentuk berdasarkan SK gubernur. Dalam hal pengendalian pengawasan, BRA ikut diawasi oleh lembaga donor serta K/L yang terkait pelaksanaan program reintegrasi.
8. Kapasitas kelembagaan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak terlepas dari aspek peraturan perundangan yang dijadikan sandaran hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan di lapangan. Masih banyak permasalahan peraturan perundangan yang belum terbit sehingga menghambat proses percepatan pemulihan di daerah bencana, misalnya

hingga saat ini masih belum terbit Perpu tentang kepastian hukum dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini sangat penting karena terkait dengan keberlangsungan kebijakan kegiatan dan program rehabilitasi dan rekonstruksi di masa depan.

9. Kinerja Satker, selain tergantung dari kondisi lapangan, masalah peraturan dan perundangan dan keterlambatan pencairan DIPA, sangat tergantung pula dari Sumber Daya Manusianya. Kinerja tersebut terkendala oleh adanya keterbatasan jumlah pelaksana Satker untuk mendukung percepatan pelaksanaan rehabiltasi dan rekonstruksi, serta beragam latar belakang pendidikan dan lingkup kerja satker sipil maupun swasta yang berdampak pada perbedaan sikap dan sudut pandang dalam menyikapi suatu masalah dan mengambil keputusan. Hal tersebut didukung oleh proses rekrutmen pegawai atau staff di Bapel BRA dimana ujikelayakan dan track recordnya masih belum terbuka dan transparan untuk diketahui masyarakat. Dalam hal ini diperlukan penjabaran indikator kinerja sebagai tolok ukur kerja satker.
10. Lambatnya pelaksanaan pembangunan di lapangan, khususnya pada bidang pemulihan infrastruktur, tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup, antara lain kurang dilibatkannya Pemda, dan kurang dilakukannya pendampingan Satker dan masyarakat.

6.2 REKOMENDASI

6.2.1 Penyusunan Kebijakan dan Program pada tahun anggaran 2007 khusus terkait RKA K/L

Sinkronisasi Antar Pelaku

1. Bapel RR perlu mengakomodasi kebutuhan akan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan program dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku, sehingga Rencana Strategis perlu menjabarkan secara rinci tidak hanya data mengenai anggaran maupun realisasi anggaran tiap satker saja, tetapi juga rincian baik program, kegiatan, lokasi kegiatan, biayanya serta sumber dananya, untuk masing-masing satker, sehingga dapat dengan mudah disandingkan dengan program dan kegiatan pelaku lain dalam rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka keberlanjutan pengembangan program.
2. Perlunya melakukan konsolidasi antar pelaku atau aktor rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga adanya kesepakatan sesama stakeholders tentang "Acuan Utama" kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD-Nias.
3. Perlunya sinkronisasi kebijakan dan perencanaan antara Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD dalam percepatan recovery sektor perindustrian dengan memfokuskan pada pengembangan potensi komoditi unggulan/ andalan.

4. Perlunya koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Dinas-Dinas misalnya Pemda Kabupaten Aceh Jaya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD dalam pembangunan pasar induk yang lahannya telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya seluas ± 5 Ha. Akses menuju lahan ini telah disediakan melalui jaringan jalan negara lintas barat dari Banda Aceh-Meulaboh yang pembangunannya sedang dilaksanakan oleh USAID.
5. Perlu adanya keterkaitan/kerjasama antar Dinas seperti Dinas Perkebunan dengan Dinas Perindustrian sehingga dalam mengolah hasil perkebunan seperti Kelapa Rakyat di Aceh Singkil sehingga dapat dipasarkan minimal ke daerah-daerah sekitar Provinsi NAD.
6. Masih diperlukannya peningkatan koordinasi dan penyamaan persepsi antara pemerintah pusat, daerah dan Bapel BRR tentang perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, dan pengelolaan hasil kegiatan rehab-rekon.
7. Khusus untuk penananganan pengungsi yang belum bisa terselesaikan sampai sekarang ini, perlu adanya mekanisme koordinasi antara BRR dan pemerintah daerah baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan.

Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan

1. Bapel RR perlu memperhatikan rekomendasi hasil temuan BPK dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya terkait dengan konsistensi antara perencanaan, RKA K/L, dan realisasi anggaran, baik yang mengacu kepada Rencana Induk maupun Rencana Strategis.
2. Bapel RR perlu memperhatikan rekomendasi Dewan Pengarah (Wanrah) dalam pelaksanaan rehabilituksi dan rekonstruksi NAD-Nias baik yang mengacu kepada rencana induk maupun rencana induk
3. Perlu upaya-upaya khusus yang sinkron antar pelaku dalam mempercepat penerbitan Perpu Penanganan Permasalahan Hukum Paska Bencana NAD-Nias

Rencana tindak lanjut bersama:

a. Distribusi dan kelancaran penyediaan material konstruksi perlu ditingkatkan dengan tetap mempertimbangkan secara sungguh-sungguh daya dukung lingkungan;
b. Meningkatkan integrasi pembangunan perumahan permukiman dengan pembangunan sarana dan prasarana dasar;
c. Peningkatan koordinasi di tingkat pusat untuk mempercepat terbitnya Perpu Penanganan Permasalahan Hukum Paska Bencana NAD-Nias;
d. Meningkatkan kesesuaian rencana tata ruang wilayah dengan rencana penatagunaan tanah;
e. Memperjelas dan menyepakati lebih lanjut pengaturan kewenangan dalam penyusunan rencana tata ruang di berbagai tingkatan (Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan).

f. Mempercepat mem-perda-kan / qanun RTRW sehingga dapat menjadi acuan yang lebih kuat dan pasti dalam proses rehab-rekon selanjutnya.

Evaluasi Program dan Kegiatan 2005 dan 2006

4. Evaluasi perlu dilakukan terhadap proses penyusunan perencanaan sampai dengan perencanaan di setiap bidang pemulihan, mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera dikoordinasikan, disinkronkan, ditetapkan, diputuskan, dikembangkan, untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2007. Bidang pemulihan perumahan dan permukiman yang menjadi prioritas penyelesaian tahun 2007 perlu menjadi perhatian utama, menyusul pembangunan bidang perekonomian masyarakat.
5. Perlu adanya standar pengukuran progress/kemajuan realisasi fisik (key performance indicator) untuk jenis bantuan bersifat non fisik. Progress penyerapan fisik itu sulit dinilai pada saat melakukan pemberian bantuan non fisik seperti pemberian modal kerja dengan sistem swakelola masyarakat, contohnya pada penanaman mangrove. Berbeda halnya dengan pemberian bantuan fisik seperti perumahan yang dapat dinilai progress realisasi fisiknya.
6. Perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan menjembatani kebutuhan masyarakat sektor kelautan dan perikanan dengan lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan mikro lainnya
7. Evaluasi kembali terhadap nama “Pokja Reintegrasi Mantan Anggota GAM” yang melakukan P3RIRRWANS di Bidang Pemulihan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) dan Pelaksanaan Program Reintegrasi Mantan TNA, hal ini merujuk terhadap salah satu poin masukan dari Rapat Koordinasi Anggota Pokja (*Agustus 2006, di Jakarta*), Interview dan Kuesioner pada Monev dan FGD Pokja (*September 2006, di Banda Aceh*), dan Diskusi Khusus Pokja pada Lokakarya P3RIRRWANS (*Desember 2006, di Banda Aceh*).

6.2.2 Sistem dan Mekanisme pada Proses dan Prosedur Perencanaan dan Pelaksanaan khusus untuk percepatan pelaksanaan RIRRWANS

SOP Mekanisme Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Indikator Kinerja

1. Bapel RR perlu menetapkan SOP dalam koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD dan Nias, serta petunjuk teknis spesifik yang menyertai di setiap aspek dan bidang pemulihan.
2. Bapel RR perlu menetapkan indikator kinerja dalam pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengkoordinasian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias. Bapel RR perlu mengupayakan pencapaian kinerja sesuai dengan ukuran kinerja yang ditetapkan.

3. Bapel RR perlu menetapkan SOP pelaporan yang jelas secara internal, dan pelaporan yang transparan kepada stakeholders di masing-masing bidang pemulihan, dalam rangka mempermudah koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. BRR bersama Pemda perlu melakukan koordinasi perencanaan bersama melalui Musrenbang sebagai sarana sinkronisasi dan crosscek program untuk menghindari tumpang tindih program dikemudian hari.
5. Perlunya adanya pengevaluasian yang dikoordinir Bappeda mengenai mekanisme pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari BRR yang tepat waktu dan akurat sesuai jadwal.

Mekanisme Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat

6. Hendaknya kegiatan dan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan diselenggarakan oleh berbagai pelaksana supaya dapat disosialisasikan kepada masyarakat hingga ke tingkat desa atau gampong. Di dalam pelaksanaan sosialisasi kegiatan dan program hendaknya melibatkan juga organisasi atau kelembagaan masyarakat setempat.
7. Perlu bagi semua pelaksana untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan kegiatan dan program rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan secara langsung. Pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pemantauan dan pengawasan terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan untuk dapat mencegah hal-hal yang negatif dalam proses tersebut.
8. Perlunya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias agar dapat mempercepat recovery/pemulihan ekonomi. Dan ini perlu didukung oleh special planning dari masing-masing daerah.
9. Perlu dibuat adopsi dan penyesuaian-penyesuaian mengenai Kepres No. 80 tahun 2003 yang dianggap menghambat kegiatan pelelangan subbidang produksi tanaman pangan dan kelautan dan perikanan.

Mekanisme Keterkaitan antara Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi. Dengan Tindak Lanjut

10. Bapel RR perlu memastikan agar transparansi dan akuntabilitas pemasukan dan pengeluaran semua biaya, dan menginvestigasikan lebih jauh tentang gejala-gejala atas munculnya kesalahan manajemen dan manajemen yang buruk. Bapel RR juga perlu memastikan transparansi dan pertanggungjawaban terhadap dana yang diperuntukkan bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi, dan memastikan hasil audit bisa diketahui oleh publik. Untuk itu Bapel RR perlu menetapkan mekanisme yang baik dan berkelanjutan dan keterkaitan yang baik antara hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan Dewan Pengawas dan Dewan Pengarah, atau institusi pengendalian dan pengawasan yang lain, dengan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, baik merupakan perbaikan terhadap proses yang sedang berjalan, maupun terhadap perbaikan mekanisme perencanaan.

Mekanisme Koordinasi dengan Donor/NGO

1. Bapel RR perlu menetapkan mekanisme koordinasi aktif kepada lembaga Donor dan NGO di setiap bidang pemulihan, demi mencegah adanya tumpang tindih, sinkronisasi dan penciptaan proses saling melengkapi antar pelaku, serta menjaga tercapainya target penyelesaian sesuai waktu yang ditentukan dan disepakati antar pihak dalam pembangunan bidang yang sama.
2. Mekanisme dan prosedur perencanaan dan pelaksanaan perlu ditetapkan bersama antara Bapel RR, Pemerintah Daerah, K/L, dan lembaga Donor/ NGO, sehingga terdapat acuan bersama yang dijadikan tolok ukur koordinasi dan sinergitas, termasuk sumber data dan informasi serta pelaporan.

6.2.3 Peran dan Kewenangan Pemerintah Pusat, BRR, Pemda, Donor/NGO, dan kalangan masyarakat luas, untuk percepatan pelaksanaan RIRRWANS

Pemerintah Pusat

1. Pemerintah Pusat seyogyanya berperan aktif dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan mendorong berbagai peraturan yang diperlukan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias. Penyusunan kebijakan perencanaan tidak dapat meniadakan peran K/L dalam rangka keberlanjutan dan sinkronisasi program-program pembangunan. Untuk itu maka:
   - K/L dapat membuat Rencana Tindak/Rencana Aksi sebagai turunan dari Rencana Induk disertai rincian baik program, kegiatan, lokasi kegiatan, biaya serta sumber dananya dengan menyertakan masukan-masukan dari Dinas-dinas terkait, agar terjadi koordinasi yang baik antara Kementerian Lembaga (Pusat) dan Daerah.
   - Perlu dilakukan identifikasi kegiatan antara Kementerian Lembaga dengan kegiatan Bapel BRR.
   - Perlu kejelasan dan kesepakatan kebih lanjut mengenai penjabaran kewenangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan penataan ruang di tingkat pusat
   - Perlunya peran dari Pemerintah Pusat dan perlu diciptakannya peraturan-peraturan demi percepatan pemulihan perekonomian pasca tsunami

BRR

2. BRR yang terdiri dari Badan Pelaksana, Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas, secara keseluruhan merupakan entiti yang mempunyai peran yang sama dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD dan Nias. Oleh karenanya peran yang telah dilakukan Dewan Pengawas dan Dewan Pengarah perlu lebih dikedepankan, melalui kegiatan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang intensif, di setiap

bidang pemulihan, setiap kegiatan, dan setiap wilayah regional dalam periode dan mekanisme yang teratur. Tindak lanjut yang merupakan tanggapan dan dilakukan Bapel RR pun, melalui mekanisme yang telah diciptakan dapat menjadi suatu dorongan perbaikan untuk percepatan yang dapat dilakukan segera dan bermanfaat bagi upaya penyelesaian masalah pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Bapel RR penting melakukan koordinasi di dalam pelaksanaan pembangunan baik yang dilakukan oleh satker BRR, NGO, Donor serta Dinas, dimulai dengan proses asistensi oleh satker dan dinas terkait.
4. Bapel RR perlu membangun koordinasi dan konsolidasi dengan Pemda, K/L dan Donor/NGO secara aktif dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. Baik
5. Bapel RR, bersama-sama Donor/NGO dan Pemda seyogyanya melakukan sosialisasi kegiatan/program yang berbasis komunitas, termasuk pelatihan dan pendampingannya, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Daerah

6. Pemerintah Daerah terlibat aktif dan melakukan koordinasi di dalam pelaksanaan pembangunan dengan Bapel RR dan satker BRR, NGO, Donor serta Dinas, melalui forum-forum koordinasi, sekretariat bersama, dan proses penyusunan perencanaan dan persiapan serta pelaksanaan oleh satker terkait.
7. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Bapel RR dan Donor/NGO mendorong dilakukannya sosialisasi kegiatan/program yang berbasis komunitas, termasuk pelatihan dan pendampingannya, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.
8. Pemerintah Daerah mendorong terbangunnya koordinasi dan konsolidasi dengan Bapel RR, K/L dan Donor/NGO secara aktif dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan, beserta tindak lanjutnya dalam upaya percepatan pelaksanaan kegiatan.
9. Masih diperlukannya peningkatan kapasitas Pemda dalam penataan ruang serta peraturan untuk pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Terhadap program reintegrasi mantan GAM, adanya keberlanjutan dan percepatan pelaksanaan program/ Kegiatan Reintegrasi; melanjukan program-program reintegrasi BRA yang belum terlaksana; memperkuat pelembagaan dan *capacity building* BRA Kab/kota; meningkatkan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, BRA Kab/Kota, KPA, LSM dan Lembaga Donor; menciptakan program khusus bagi korban trauma pasca bencana dan konflik; percepatan pengadaan lahan usaha bagi korban yang telah dikategorikan dalam kriteria penerima bantuan; koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh stakeholders dalam perencanaan dan pelaksanaan program; pemberdayaan peran seluruh BRA Kab/Kota dalam pelayanan bagi korban konflik .

Donor/NGO

11. Donor/NGO di setiap bidang pemulihan diharapkan membangun koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan berbagai *stakeholders*, Bapel RR, Pemerintah Daerah, dan K/L Donor/NGO hendaknya mempublikasikan secara luas kepada publik tentang aspek perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di setiap bidang pemulihan, dengan gambaran rinci tentang program, kegiatan, lokasi, anggaran, status implementasi, integrasi dan kerjasama dengan institusi lain, serta kendala-kendala pelaksanaannya. Hal ini akan merupakan publikasi transparan kepada masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan, serta kemudahan dalam koordinasi dan sinkronisasi khususnya program, kegiatan, dan lokasi antar pelaku pembangunan, serta keberlanjutan bagi pembangunan dan pemeliharaan hasil pembangunan pasca Bapel RR.

6.2.4 Keberlanjutan Program-Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke dalam program-program pembangunan Pemerintah Daerah

Dalam rangka keberlanjutan program-program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias pasca BRR tahun 2009, perlu dilakukan dan dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi perlu melaksanakan koordinasi yang lebih optimal lagi dengan Satuan Kerja (Satker) kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah sebagai pelaksana dan penanggung jawab dalam menyusun perencanaan kegiatan/program per bidang untuk setiap periode.
2. Bapel RR perlu mulai mensinkronkan perencanaan pembangunannya dengan pemerintah daerah, khususnya dengan Bappeda sebagai penanggung jawab dalam perumusan dan perancangan perencanaan pembangunan daeerah.
3. Bapel RR perlu merumuskan secara baik tentang *exit strategy* atau setelah berakhirnya tugas BRR di wilayah bencana, dan mulai dengan:
   - melibatkan secara aktif Pemerintah Daerah dan perangkat Kementerian/Lembaga dalam penyusunan perencanaan dan proses pelaksanaan di lapangan
   - mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan adn SDMnya dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan.
   - mengidentifikasi dan mempersiapkan kegiatan fisik dan non fisik dalam arti pelimpahan aset kepada Pemerintah Daerah.
   - memberikan peran aktif kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat di setiap kegiatan bidang pemulihan dalam peran dan kontribusi tertentu yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya, dalam

keseluruhan skenario integrasi dan keutuhan pelaksanaan program dan kegiatan, dan bukan sebagai pelengkap dan penyelesai masalah bila ada kendala saja.

4. Perlunya dicari solusi mengenai lembaga keuangan mikro yang dari segi aturan agak rumit karena bentuknya B3K (Bukan Bank Bukan Koperasi) agar tidak berbenturan dengan UU No.10 tentang perbankan juga dengan peraturan-peraturan perkoperasian.

6.2.5 Penyempurnaan terhadap Rencana Induk, Rencana Strategis, dan Rencana Aksi, untuk mengakomodasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias

1. Revisi terhadap Rencana Induk direkomendasikan, termasuk oleh BPK, terhadap kegiatan atau program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Aceh-Nias pada saat sekarang, termasuk dalam merumuskan besaran kegiatan dan besaran anggaran sesuai realita pelaksanaan. Hanya saja perlu dirumuskan mekanisme dan prosedur dalam proses perubahan Rencana Induk, sehingga perubahan tersebut dapat mendorong percepatan proses pemulihan di daerah bencana.
2. Bila merujuk kepada Perpres No. 30 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Prov. NAD dan Kepulauan Nias, Prov. Sumut, seharusnya Bapel RR menurunkan ke dalam Rencana Aksi. Dengan adanya Rencana Strategis yang ada masih diperlukan penyempurnaan Rencana Strategis yang dapat menjembatani antara dokumen Rencana Induk yang bersifat makro dan pelaksanaan yang sangat mikro.
3. Rencana Aksi yang disusun oleh Bappeda-Bappeda Kabupaten/Kota seluruh NAD pada tahun 2005 perlu di evaluasi bersama, dikoordinasikan dan disesuaikan dengan Rencana Induk serta Rencana Strategis BRR, sehingga dapat menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah tahun 2007. Untuk itu perlu kejelasan status legal dokumen perencanaannya.
4. Rencana Strategis dan Rencana Aksi diharapkan dapat disusun bersama antar stakieholders terkait, sehingga dapat menajdi dokumen perencanaan yang menjadi “Acuan Bersama” semua stakeholders dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rencana Aksi dapat dijabarkan oleh masing-masing stakeholders sebagai acuannya dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup kerja dan kewenangannya.
5. Perlunya fleksibilitas dalam rencana induk dengan tidak melihat batas-batas wilayah namun tetap mengutamakan pembangunan kembali daerah yang terkena bencana. Contoh: untuk Memajukan kopi di Lhokseumawe kalau sentra ekonomi di Aceh tengah tidak dikuatkan maka kegiatan ekonomi akan terganggu.

LAMPIRAN I

Sandingan Rencana Induk dan Rencana Strategis BRR

serta

Sandingan Rencana Induk dan Pelaksanaan BRR

SANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA INDUK DENGAN RENSTRA BRR

No.	Rencana Induk		Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1	Bidang Infrastruktur Sub Bidang Transportasi Sub bidang Transportasi Darat	1. Rehabilitasi jalan nasional dan provinsi lintas timur (4 paket) dan Rekonstruksi lintas timur (4 paket)) 2. Rehabilitasi Jalan nasional dan Provinsi lintas barat (6 paket) dan Rekonstruksi lintas barat (8 paket)) 3. Rehabilitasi Jalan nasional dan Provinsi lintas tengah (8 paket) dan Rekonstruksi lintas tengah (8 paket) 4. Rehabilitasi Jalan nasional dan Provinsi lintas lainnya (20 paket) dan Rekonstruksi lintas lainnya (48 paket) 5. Rehabilitasi Jalan kabupaten (23 paket) dn Rekonstruksi : 23 paket.	Pembangunan kembali sistem transportasi Penyediaan prasarana dan sarana kebutuhan dasar	Membuka entry point dan jalur jalan utama (nasional), dilanjutkan dengan pembukaan jalur transportasi yang terintegrasi untuk memperlancar distribusi logistik yang efisien dan pengembangan wilayah Memprioritaskan pelaksanaan rehabilitasi prasarana akses masuk, antara lain pelabuhan laut dan bandara udara strategis beserta jaringan jalan pendukungnya
2	Transportasi Laut dan ASDP	1. Kegiatan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi laut 2. Kegiatan rehabilitasi prasarana dan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) 3. Kegiatan rekonstruksi prasarana dan sarana ASDP		
3	Transportasi Udara	1. Kegiatan rehabilitasi prasarana dan sarana transportasi udara 2. Kegiatan rekonstruksi prasarana dan sarana transportasi udara		
4	SAR dan BMG	Rekonstruksi prasarana dan sarana SAR	-	-
5	Energi dan Listrik	1. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana energi 2. Kegiatan rehabilitasi prasarana dan sarana ketenagalistrikan 3. Kegiatan rekonstruksi prasarana dan sarana ketenagalistrikan	Rehabilitasi fasilitas distribusi energi dan kelistrikan	Memperbaiki jaringan distribusi kelistrikan Mengarahkan upaya rekonstruksi untuk mendukung diversivikasi sumber energi listrik.

No.	Rencana Induk		Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
6	Pos dan Telematika	1. Rehabilitasi bidang pos dan telematika 2. Rekonstruksi bidang pos dan telematika	Pembangunan kembali sistem komunikasi	Merehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan merekonstruksi fasilitas komunikasi baru melalui teknologi nir-kabel untuk memberikan kemudahan akses telekomunikasi baik secara lokal, SLJJ, maupun SLI.
7	Perumahan	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan di NAD dan Kepulauan Nias	Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan beserta prasarana dan sarana dasar pendukungnya	1. Membantu korban yang ingin kembali ke tempat tinggal semula dalam bentuk cash in atau in kind setara Rp. 28 juta untuk rumah dengan tingkat kerusakan berat atau hancur dan Rp. 10 juta untuk rumah dengan tingkat kerusakan ringan 2. Membantu penyediaan perumahan dan prasarana dan sarana dasar pendukungnya bagi korban bencana yang berkeinginanpindah ke tempat baru (resettlement) 3. Menyelesaikan bantuan dan penyediaan perumahan bagi korban bencana dalam jangka waktu kurang dari 2,5 tahun.
8	Air Minum dan Sanitasi	1. Rehabilitasi dan rekonstruksi pelayanan 2. Sanitasi 3. Persampahan 4. Drainase	Penyediaan prasarana dan sarana kebutuhan dasar	Menetapkan prioritas utama pada pembangunan kembali perumahan, air minum, sanitasi, dan drainase
9	Sumber Daya Air	Rehabilitasi jaringan irigasi dan Rekonstruksi jaringan irigasi	Peningkatan ketahanan pangan	1. Memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi pada wilayah dimana petani penggarapnya telah siap dan diutamakan pada wilayah-wilayah pusat kegiatan ekonomi dan permukiman

No.	Rencana Induk		Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
				2. Membantu upaya perbaikan jaringan tambak rakyat, khususnya pada jaringan primer dan sekunder.
10	Prasarana Pengendali Banjir dan Pengamanan Pantai	1. Rehabilitasi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai : Sungai dan Pengendalian Banjir 2. Rekonstruksi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	-	-
11	Sub Bidang Prasarana Lainnya	1. Rehabilitasi prasarana dan sarana 2. Rekonstruksi prasarana dan sarana	-	-
12	Tata Ruang dan Pertanahan	1. Penyediaan Peta Dasar Tata Ruang 2. Pengelolaan Pertanahan 3. Pemberdayaan masyarakat untuk pemulihan pengelolaan dan pelayanan pertanahan 4. Pembangunan fisik kadastral 5. Penyusunan rencana tata guna tanah 6. Pengadaan peralatan komputerisasi, training, pembangunan database digital 7. Pembuatan sertifikat pengganti 8. Konsolidasi tanah 9. Penanganan sengketa pertanahan 10. Penyusunan naskah perundang-undangan dan penyuluhan 11. Penyusunan Revisi RTRW Provinsi 12. Bantuan Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota (13 Kabupaten / Kota). 13. Rencana Teknis Ruang Kawasan / Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 14. Penelitian geologi 15. Penyusunan rencana tindak manajemen bencana dan sosialisasi Pencegahan Bencana 16. Penyusunan naskah peraturan perundangan bidang pertanahan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kep. Nias	-	-

No.	Rencana Induk		Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
13	Sumber Daya Alam	1. Mengamankan fungsi kawasan lindung yang ada 2. Meningkatkan sistem pengawasan kawasan lindung dan TNGL dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengawas 3. Membina kader konservasi dan generasi muda dalam kegiatan pengamanan kawasan lindung dan koservasi lainnya 4. Meningkatkan pembinaan, pengendalian pengusahaan pemanfaatan hutan produksi 5. Membangun zona penyangga, kawasan tambak serta hutan kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan karakter pantai : 6. Rehabilitasi tanaman mangrove di daerah lokasi asal tanaman mangrove 7. Rehabilitasi kawasan tambak dan ekosistem habitat kritis 8. Penghijauan dan Pembangunan Hutan Kota 9. Merehabilitasi terumbu karang 10. Penilaian dan pendataan kembali jenis dan kondisi terumbu karang 11. Pembangunan unit-unit artificial fishing ground (rumpon dan atrificial reef) 12. Menyusun mekanisme kelembagaan untuk pengelolaan terumbu karang 13. Pemulihan Kembali Kegiatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Sumber Daya Alam 14. Memulihkan Kegiatan Pertanian 15. Memulihkan Kegiatan Kelautan dan Perikanan 16. Menjamin ketersediaan dasar SDA sebagai material dasar pembangunan..	-	-

No.	Rencana Induk		Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
14	Lingkungan Hidup	1. Survey Berkala Parameter Pencemar : 2. Pengambilan sampel dan uji laboratorium kualitas air permukaan, air tanah, serta udara di seluruh wilayah yang terkena dampak tsunami. 3. Pendataan kembali kemungkinan pencemaran Bahan Berbahaya Beracun (B3) di seluruh wilayah yang terkena dampak 4. Pembersihan kota yang mencakup kegiatan : 5. Pembersihan lumpur sisa tsunami 6. Pembersihan puing dan sampah tsunami 7. Penetapan lokasi tempat pembuangan lumpur, puing, sampah tsunami 8. Penataan sistem pengumpulan sampah domestik termasuk perencanaan rehabilitasi TPA lama dan perencanaan lokasi TPA baru. 9. Mengamankan dan menginformasikan wilayah yang terkena pencemaran dan bahaya kegempaan: 10. Pengukuran gerakan tanah dan pemetaan kegempaan secara periodik di wilayah NAD, Nias dan sekitarnya 11. Pengembangan Sistem Basis Data Informasi Lingkungan, Kerentanan Bahaya Geologi 12. Penetapan status daerah rawan bencana alam 13. Sosialisasi kualitas lingkungan dan bahaya kegempaan 14. Merehabilitasi tanah untuk pertanian 15. Melakukan survai dan evaluasi tanah yang terkena dampak tsunami. 16. Mengelompokkan klasifikasi tanah dan penyebaran pencemaran dalam peta tanah; 17. Melakukan evaluasi dan rekomendasi kemampuan dan kesesuaian tanah.	-	-

No.	Rencana Induk		Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
		18. Melakukan rehabilitasi atau perbaikan kualitas tanah agar dapat ditanami kembali. 19. Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai. 20. Pengelolaan lahan melalui usaha tata guna lahan 21. Melindungi dan mengembangkan sumber-sumber air 22. Pengelolaan vegetasi melalui pengelolaan hutan yang memiliki fungsi perlindungan terhadap tanah dan tata air.		

PELAKSANAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

NO	RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			PERSON IN CHARGE IN BRR	CATATAN PELAKSANAAN
	KEBIJAKAN	STRATEGI	KEGIATAN POKOK		
1	Mewujudkan konsisi wilayah yang aman dari bencana dan penghidupan yang lebih baik Konsep dasar: Untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan lebih aman dari bencana. Perlu fasilitas perlindungan: dapat berupa bentuk alami maupun bangunan, jalur penyelamatan menuju ke tempat lebih aman, dan tempat aman untuk penyelamatan, dapat berupa bangunan, bukit, dll.	a. Memberikan perlindungan seefektif mungkin bagi masyarakat dari kejadian bencana di kemudian hari; b. Mewujudkan lingkungan hidup yang lebih berkualitas bagi masyarakat; c. Membangun kembali prasarana dan sarana sosial ekonomi sehingga masyarakat terkena bencana dapat segera	a. Pembangunan berbgai fasilitas untuk perlindungan dan penyelamatan pada skala lingkungan hingga kota b. Pembangunan system deteksi dini c. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana social ekonomi	Direktorat Tata Ruang Direktorat Prakarsa Strategis (dulu) Pusat Pengendalian Lngkungan dan Konservasi (sekarang) Direktorat Pemberdayaan Ekonomi dan Bisnis, Direktorat Fasilitas dan Bangunan Umum	Dilakukan dengan Village dan Kecamatan Planning di tingkat mikro dan Spatial Planning (Kabupaten/Kota) di tingkat makro Early Warning System sudah pernah diuji coba ketika kunjungan Presiden pada peringatan setahun Tsunami di Banda Aceh
2	Memberikan pilihan pada - warga berhak menentukan kemana akan bertempat tinggal - Pemerintah Daerah perlu memberi informasi, peraturan, dan sarana prasarana termasuk sarana perlindungan dan penyelamatan bagi waga yang ingin bertempat tinggal di zona berpotensi tidak aman.	a. Memfasilitasi Masyarakat untuk segera memulai kehidupan baru di kawasan yang lebih aman. b. Memberikan perlindungan dan sarana penyelamatan bagi masyarakat c. Menyiapkan likasi pemukiman bar untuk menampung warga yang ingin pindah	a. pemberian informasi kepada masyarakat mengenai potensi kerusakan dan tingkat ketidaklayakan huni; b. pembangunan fasilias perlindungan dan penyelamatan pada skala lingkungan hingga kota.	Direktorat tata ruang untuk aspek perencanaannya Deputi Komunikasi dan Informasi untuk sosialisasi secara umm Deputi Pembangunan Infrastruktur untuk aspek pembangunan fasumnya	Dilakukan ketika melakukan village Planning yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat setempat, juga sosialisasi leh pihak Pemda dan BRR dalam seminar dan workshp, untuk skala kota JICA sudah mendesain fasilitas perlindungan dengan skala pelayanan tertentu dalam masterplan Kota Banda Aceh (sedang disempurnakan). Untuk kota-kota lain hampir selesai dilakukan perencanaannya.

NO	RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			PERSON IN CHARGE IN BRR	CATATAN PELAKSANAAN
	KEBIJAKAN	STRATEGI	KEGIATAN POKOK		
3	Melibatkan masyarakat dan emnggunakan pranata sosial dalam menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; peran serta masyarakat lokal merupakan unsur utama dalam proses penanganan bencana alam dan maupun tahapan pembangunan	a. membangun sistem peringatan dini secara terintegrasi; b. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.	a. Penyusunan standar, operasi dan prosedur (SOP) untuk respon darurat bencana b. Pemanfaatan nilai kearifan lokal sebagai bagian yang melengkapi sistem peringatan dini; c. Pemberdayaan peran masyarakat dalam mekanisme penanganan bencana	Direktorat Prakarsa Strategis (dulu) Pusat Pengendalian Lingkungan dan Konservasi (sekarang)	Belum lama ini sudah dilakukan Internasional Workshop tentang Community Participation on Disaster Rsik Reducation di Jakartam pada tgl 23 dan 24 Feb 2005, yang merupakan wahana penaingan dan kristalisasi konsep-konsep yang akan diterapka dalam penanganan bencana berbasis masyarakat.
4	Menonjolkan karakteristik budaya dan Agama Dalam membangun kembali kta-kota dan lingkunganlingkungan pemukiman di wilayah Aceh harus ditonjolkan nilai-nilai lokal, khususnya budaya dan agama.	Membangun wujud fisik kota dan lingkungan ang sesuai nilai-nilai budaya dan agama sekaligus menyiagakan warga menghadapi bencana.	a. Penataan lansekap kota dan pembangunan kota taan waspada bencana (penghijauan kawasan pesisir, pantai , ruang terbuka hijau kota, tama memoria Tsunami, RTH kawasan mesjid, kawasan pemukiman, pusat budaya Aceh); b. Pengadaan berbagai fasilitas kegiatan budaya dan agama di berbagai pusat kegiatan dan lingkungan pemukiman.	Direktorat tata ruang	Aspek mitigasi harus sudah dipertimbangkan dalam pnyusunan rencana tata ruang dalam berbagai tingkat kedalaman. Rencana kota harus juga memepertimbangkan aspek sosial budaya dan agama disesuaikan dengan masyarakatnya, contoh : rencana yang disusun pihak JICA sudah menata fasilitas Tsunami Park dan Museum facilities di kota Banda Aceh dan menjadikan mesjid sebagai salah satu landmark kota.

NO	RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			PERSON IN CHARGE IN BRR	CATATAN PELAKSANAAN
	KEBIJAKAN	STRATEGI	KEGIATAN POKOK		
5	Pendekatan penataan ruang partisipatif - proses penataan sesuai dengan UU 24/1992 dan dilaksanakan secara partisipatif - Semakin detail encana tata ruang,semakin intensif proses partisipatf yang dilakukan; - Pemecahan masalah dimulai dari penenalan akar masala dan pengenalan terhadap kebutuhan dan keinginan manyarakat menurut masyarakat sendiri	Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk secara bersama-sama dan serentak menata kembali tata ruang lingkungan pemukiman si seluruh wilayah pedesaan dan perkotaan yang rusak akibat bencana	a. Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang secara partisipatif b. Pemetaan batas-batas kepemilikan tanah secara partisipatif c. Pelaksanaan konsolidasi tanah secara partisipatif d. Pelaksanaan pembangunan berbagai gasilitas perlindungan dan Penyelamatan secara partisipatif	Direktorat Tata Ruang dan Direktorat Pertanahan-Pembangunan lahan-Deputi Pembangunan Perumahan dan Pemukiman	Saat ini sudah dihasilkan Pedoman Pemetaan, Penataan Gampng, dan Pembangunan/Perbaikan rumah secara partisipatif (ada 4 buku) dan Pedoman Perencanaan Dese oleh BRR. Pedoman ini dapat dijadikan pegangan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat unuk dapat berpartissipasi dalam penataan ruang partisipatif. Saat ini sudah dan sedang dilakukan village planning yang partisipatif baik oleh NGO/ Donor ataupun BRR sendiri.

NO	RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			PERSON IN CHARGE IN BRR	CATATAN PELAKSANAAN
	KEBIJAKAN	STRATEGI	KEGIATAN POKOK		
6	Mengantisipasi bencana dan memitigasi kawasan - Prinsip mitigasi kawasan bencana dan mengantisispasi dampak bencana serta menjadikan tata ruang kawasan uang lebih bai dari keadaan sebelumbencana; - Znasi berdasarkan tingkat poteni kerusakan, seperti dengan zona dengan tingkat kerusakan tinggi, zona dengan potensi tingkat kerusakan sedang, zona dengan potensi tingkat kerusakan rendah dan zona aman. - Pada masing-masing zona perlu dibangun fasilitas perlindungan dan penyelamatan	Memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai kebencanaan dan upaya-upaya menghindarinya.	a. Pembangunan prasarana dan sarana sisitim peringatan dini b. Pemberdayaan peran masyarakat dalam mekanisme penanganan bencana c. Penembangan pendidikan tentang kebencanaan d. Pelatihan secara terus menerus upaya penyelamatan dari bencana	Direktorat Prakarsa Strategis(dulu) Pusat Pengendalian Lingkungan dan Konservasi (sekarang)	Belum lama ini dilakukan International Workhop tentang Community Partisipation on Disaster Risk Reducation di Jakarta pada tanggal 23 dan 24 Feb 2005 yang merupakan wahana penjaringan dan kristalisasi konsep-konsep yang akan diterapkan dalam penanganana bencana berbasis masyarakatt

NO	RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			PERSON IN CHARGE IN BRR	CATATAN PELAKSANAAN
	KEBIJAKAN	STRATEGI	KEGIATAN POKOK		
7	Proses Penataan ruang sebagai perpaduan proses pendekatan dari atas dan bawah - Penataan ruang merupaka hasil bersama dimana dalam prosesnya memadukan/mengkombinasikan dua arah, baik proses dari bawah ke atas dan juga proses dari atas ke bawah, seta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain hukum pertanahan; kontribusi dari atas kebawah adalah tersedinya struktur konseptual kota dan wilayah. Sedangan proses perencanaan dan pembangunan skala lingkungan dan skala bagian kota dibuat bersama masyarakat. Dengan demikian pertimbangan makro dan mikro dapat diakomodasi secara proporsional dalam tata ruang wilayah paska bencana.	Mempertemukan kepentingan untuk pelayanan masyarakat pada skala kta/kabupaten dengan kepentingan masyarakat pada skala lingkungan	a. Pemerintah Daerah segera menyusun/ merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing; b. Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat menyusun rencana tata ruang skala lingkungan dengan konsolidasi tanah yang partisipatif c. Perumusan qanun/perda dan peraturan pelaksanaannya (termasuk building code) secara terbuka.	Direktorat Tata Ruang	BRR membantu penyusunan Tata Ruang dengan substansi yang memadukan pendekatan dari atas dan dari bawah. Perencanaan juga dilakukan dengan melibatkan stakeholders lokal. Saat ini penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kebupaten, RUTRK kota dan kawasan pemukiman utamanya sedang dilakukan. Ditambah dengan penyusunan RDTRX dan RTBL dengan menggunakan dana APBN, serta dan Village Planning, beberapa perencanaan juga dilakukan secara off budget. JICA membantu menyusun tata ruang detail Banda Aceh, Calang, Meulaboh, untuk wilayah Village Planning. Sudah dan sedang dilakukan oleh USAID, ADB dan pihak lainnya, sedangkan untuk Kecamatan Planning sedang dilakukan oleh ADB

NO	RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			PERSON IN CHARGE IN BRR	CATATAN PELAKSANAAN
	KEBIJAKAN	STRATEGI	KEGIATAN POKOK		
8	Mengembalikan peran pemerintah daerah - Penyusunan rencana tata ruang merupakan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah - Konsep rencana tata ruang dalam master plan ini disiapkan oleh pemerintah pusat karena Pemerintah Daerah (pada waktu itu) belum berfungsi penuh - Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat menggunakan konsep rencana tata ruang ini dalam memfinalisasi proses penyusunan rencana dan meneruskan proses hukum dan legalitas dari rencana tata ruang yang definitif	Memfasilitasi pemda untuk segera merevisi wanun/perda rencana tata ruang	a. Pemberia data dan informasi yang diperlukan kepada seluruh Pemda terkait; b. Pendampingan kepada Pemda dalam menyusun revisi qanun/ perda rencana tata ruang dan peraturan pelaksanaanya.	Direktorat Penataan Ruang	Penyusunan rencana tata ruang akan diarahkan sampai menyiapkan draft materi erda. Saat ini masih dalam proses penyiapan rencana tata ruang. Pada akhirnya akan dilakukan pembahasan di tingkat daerah melalui dewan legislatif, yang menghasilkan pembuatan/ revisi perda/qanun.

NO	RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			PERSON IN CHARGE IN BRR	CATATAN PELAKSANAAN
	KEBIJAKAN	STRATEGI	KEGIATAN POKOK		
9	Perlindungan terhadap hak perdata warga - Hak perdata waga dilindungi dan dihormati dalam pembangunan kembali wilayah yang rusak akibat bencana; - Penyusunan tata ruang dalam ingkatan yang lebi rinci/ operasional harus memperhatikan hak keperdataan masyarakat atas tanah. Oleh karena itu penetapan dan pelaksanaan tata ruang perlu didahului oleh penataan fisik dan yudiris tanah; - Masyarakat harus diberi jaminan bahwa hak-hak keperdataan atas tanah mereka akan terjamin/ tidak terhapus sebagai akibat penetapan dan implementasi tata ruang.	Mengidentifikasi hak-hak warga dan merekonstruksi batas-batas fisik	a. Rekonstruksi batas tanah bidang b. Inventarisasi hak-hak warga dan legalisasinya	Direktorat Pertanahan dan Penatagunaan Lahan – Deputi Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Direkorat Penataan Ruang	Dengan penerapan Village Planning maka perencanaan tata ruang sangat memeprhatikan kepemilikan lahan ini. Village Planning sendiri ilakukan jika tahapan pemetaan kepemilikan tanah sudah selesai. Bisa dilihat dalam buku Pedoman Pemetaan dan Penataan Desa/ Gampong secara Partisipatif yang dikeluarkan BRR

NO	RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			PERSON IN CHARGE IN BRR	CATATAN PELAKSANAAN
	KEBIJAKAN	STRATEGI	KEGIATAN POKOK		
10	Mempercepat Proses Adminstrasi Pertanahan - Dalam menata kembali pembangunan tanah pasca bencana, Pemerintah akan melakkan program rekonstruksi batas fisik dan program konsolidasi tanah; - Untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut dan untuk memungkinkan pelatihan masyarakat dalam pelaksanaannya pemerintah akan membuat peraturan baru atau melakukan perubahan terhadap peraturan yang ada guna menyesuaikan perauran pertanahan yang berlaku nasional dengan kondisi di Aceh dan Nias terkait dengan bencana gempa bumi dan tsunami.	Menyusun peraturan untuk memeprcepat proses administrasi pertanahan khusus di wilayah pasca bencana	a. Identifikasi permasalahan pertanahan dan peraturan yang ada b. Perumusan Peraturan baru	Direktorat Pertanahan dan Penatagunaan Lahan – Deputi Pembangunan Perumahan dan Pemukiman	Saat ini sudah berjalan proses sertifikasi kepemilikan lahan melalui RALAS

NO	RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			PERSON IN CHARGE IN BRR	CATATAN PELAKSANAAN
	KEBIJAKAN	STRATEGI	KEGIATAN POKOK		
11	Pemberian kompensasi dan ganti rugi yang adil dan terjangkau - Penetapan rencana tata ruang tidak menghilangkan hubungan hukum orang dengan tanah. Oleh karena itu apabila terjadi kehilangan/ hapusnya hak keperdataaan seseorang terhadap tanah sebagai akibat penetapan rencana tata ruang, maka wajib dilakukan ganti rugi kepada yang bersangkutan atau dengan cara lain atas kesepakatan bersama; - Pemerintah akan memberikan kompensasi bagi warga yang hak miliknya dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti fasilitas perlindungan dan penyelamatan. Besarnya kompensasi sesuai ketentuan yang ada dan sesuai dengan kemampuan biaya pemerintah. Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara terbuka.	Menetapkan kebijakan ganti rugi yang adil dan terjangkau	a. Identifikasi subyek hukum calon penerima ganti rugi b. Penyusunan mekanisme ganti rugi c. Pemberian ganti rugi secara transparan	Direktorat Pertanahan dan Penatagunaan Lahan – Deputi Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Direktrat Penataan Ruang	Dalam Village Planning terutama aspek mitigasi bencana, terkadang masyarakat harus mengorbankan sebagian lahan miliknya untuk dijadikan fasilitas umum seperti pelebaran jalan, pembangunan escape building, atau pun untuk fasos fasum lainnya. Namun demikian hal ini terlebih dahulu mesti melalui kesepakatan warga. Terkadang tidak memerlukan kompensasi apapun dai warga yang mengorbankan tanahnya.

NO	RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			PERSON IN CHARGE IN BRR	CATATAN PELAKSANAAN
	KEBIJAKAN	STRATEGI	KEGIATAN POKOK		
	- Pemerintah juga akan memberikan bantuan bagi warga yang ttanahnya idak dapat digunakan karena tenggelam atau tidak layak huni karena tingkat keracunan yang tinggi.				
12	Melakukan revitalisasi kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam. - Dengan hancurnya berbagai kegiatan perekonomian masyarakat khususnya di bidang pertanian dan perikanan yang menjadi andalan masyarakat setempat, mengakibatkan masyarakat memerlukan pengaktifan kembali dan bantuan untuk memulihkan keadaan perekonomian setempat	a. memulihkan dan meningkatkan kegiatan pertanian dan perikanan b. Menyediakan meterial dasar pembangunan dari sumber daya alam yang tidak mengancam kelestarian llingkungan	a. Indentifikasi pertanian, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agrobisnis, peningkatan kesejahteraan petani b. Pengambalian kegiatan perikanan tangkap dan rehabilitasi lahan tambak masyarakat dan perikanan budidaya c. Penyediaan kayu dan Penyediaan bahan bangunan lainnya	Deputi Pengembangan Pertanian dan Perikanan	Dengan mengidentifikasi tiap lokasi maka dapat diketahui potensi ekonomi setempat terutama yang berhubungan erat dengan penggunaan ruang, seperti pertanian/ perkebunan dan perikanan/ tambak. Dalam perencanaan tata ruang dapat terlihat penggunaan lahan yang dialokasikan untuk pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal tersebut, tercermin dalam zonasi/ land use.

NO	RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			PERSON IN CHARGE IN BRR	CATATAN PELAKSANAAN
	KEBIJAKAN	STRATEGI	KEGIATAN POKOK		
	- Untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat maupun pembangunan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi diperlukan pula strategi khusus untk memnuhi kebuuhan bahan atau material pembangunan yang berasal dari sumber daya alam.				
13	Memulihkan kembali daya dukung lingkungan dan antisipasi ancaman bencana alam.	a. Mengamankan dan menginformasikan wilayah yang terkena pencemaran dan bahaya kegempaan b. Melakukan pembersihan wilayah bencana c. Merehabilitasi tanah dan terumbu karang d. Membangun daerah penyanga (green belt) sesuai dengan karakter pantai e. Mengamankan fungsi kawasan lindung eksistensi f. Melakukan kajian pengamanan dan pencegahan bahaya lingkungan pada tahap rekonstruksi	a. survei berkala parameter, penetapan status keamanan lingkungan dari satu wilayah dan sosialisasi kualitas lingkungan dan ancaman bahaya gempa b. Pembuangan limbah padat tsunami, penataan ulang sistem drainase perkotaan, Membangun sistem pengolahan limbah cair; c. Penelitian kualitas tanah dan uji coba tanaman yang sesuai dengan kondisi tana; d. Pendataan kembali terumbu karang dan penanaman kembali terumbu karang e. Rehabilitasi mangrove dan rehabilitasi vegetasi perintis kawasan pantai f. Pangamanan Taman Nasional Lueser dari pembangunan fungsi kawasan lindung lainnya, baik yang berada di Aceh maupun propinsi lainnya yang berdekatan dengan Aceh;	Pusat Pengendalian Lingkungan dan Konservesi Direktorat Sanitasi dan Air Bersih Direktorat Pengembangan Pertanian/ Perikanan.	

NO	RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			PERSON IN CHARGE IN BRR	CATATAN PELAKSANAAN
	KEBIJAKAN	STRATEGI	KEGIATAN POKOK		
			g. Pelaksanaan kegiatan AMDAL regional dan konsultasi dengan masyarakat		
14	Memulihkan kembali sistem kelembagaan SDA dan LH di tingkat pemerintah Prasarana dan sarana kepemerintahan yang sebagian besar hancur karena tsunami membutuhkan rehabilitasi dan pembangunan kembali agar roda pemerintahan dapat berjalan normal.	a. Melengkapi dan mengisi kembali formasi pegawai (tenaga ahli dan tenaga pendukung); b. Memulihkan sarana dan prasarana kepemerintahan bidang sumber daya alam dan lingkungan daerah	a. Pelaksanaan kajian kelembagaan terhadap bencana dan melakukan rekruiment pegawai baru; b. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi kantr dan labolatorium dan melengkapi sarana pendukung kegiatan operasional instansi.	Pusat pengendalian Lingkungan dan Konservasi	
15	Mengembalikan dan - Mengembalikan struktur dan pola tata ruang wilayah provinsi NAD yang rusak menjadi seperti semula dengan memperkuat bagian-bagian tertentu sehingga lebih tahan menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. - Sebagai bagian dari upaya penyelamatan dan pengembangan wilayah, pembukaan jalan baru lintas utara-selatan dan barat0timur diupayakan tanpa mengorbankan	Pengembangan kota-kota pesisir dengan memperhatikan aspek-aspek lokal terutama keterkaitannya dengan rawan gempa bumi dan tsunami serta kawasan konservasi dan penyangga yang berfungsi lindung	a. Rehabilitasi untuk menjaga keterkaitan antar kota-kota di pantai barat, pantai timur dan keterkaitan dua wilayah, serta mendorong perkambangan dan pemerataan wilayah b. Fasilitas pnyebrangan ke pulau-pulau kecil difngsikan kembali untuk pengembangan ekonomi wiayah c. Fungsionalisasi dan Peningkatan bandar udara dan pelabuhan laut. d. Rehabilitasi sistem jaringan listrik terinterkoneksi e. Perbaikan kawasan budidaya pertanian dan kelautan f. Rehabilitasi jaringan sumber daya air g. Pembuatan fasilitas perlindungan pantai berupa vegetasi bengunan h. Penentuan batas dan konservasi taman nasional dan kawasan lindung lain, serta suaka gajah dan margasatwa langka lain	Direktorat Penataan Ruang Direktorat Sektoral yang terkait	Semua kegiatan pokok ini dimasukan dalam perencanaan tata ruang yang saat ini masih dalam proses penyusunannya, diharapkan untuk rencana tata ruang makro selesai akhir tahun 2006 ini.

NO	RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			PERSON IN CHARGE IN BRR	CATATAN PELAKSANAAN
	KEBIJAKAN	STRATEGI	KEGIATAN POKOK		
16	Membangun kembali kota-kota yang terkena bencana dilakukan dengan merajut kembali tatanan kota lama Membangun kembali kota-kota yang rusak karena gempa bumi dan tsunami - memberdayakan secara cepat penduduk yang terkena bencana - merajut kembali tatanan fisik, tatanan sosial dan sistem ekonomi yang lama - memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak - melindungi nyawa dan harta penduduk dari bencana alam yang terjadi - membuat taraf hidup masyarakat lebih baik mampu memberi arahan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien	- Melakukan pendataan dan pemetaan warga dan tanah yang dmiliki sebelum terjadi bencana - Pengumpulan harapan masyarakat - Penataan ulang lingkungan pemukiman oleh masyarakat sendiri - Peningkatan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat	a. Pelaksanaan survey bersama masyarakat, LSM dan pemerintah di kawasan yang terkena bencana b. Pemetaan bersama masyarakat pada kawasan pra dan pasca tsunami c. Pengumulan dan identifikasi harapan masyarakat, stakeholder, tokoh masyarakat d. Perencanaan tata ruang lingkungan pemukiman oleh masyarakat, termasuk fasilitas umum dan sosial dan disain bentuk bangunan tahan gempa dan tsunami e. Peningkatan kemampuan masyarakat di kawansa terkena bencana dengan pelatihan mengenai identifikasi bencana, pelatihan evakuasi, pelatihan bertahan hidup sewaktu terjadi f. Pengawasan bersama bersama masyarakat pada tahap pelaksanaan.	Direktorat Penataan Ruang	Semuanya dilakukan dalam proses perencanaan desa (Village Planning) dengan terlibat langsung dengan masyarakat setempat. Penyusunan Rencana Desa dilakukan baik oleh BRR maupun pihak-pihak lainnya (donor/NGO)
		Merajut kembali da mepmerbaiki tatanan fisik, tatanan sosial dan sistim ekonmi yang rusak	a. revitalisasi sarana dan prasarana serta ruang kegiatan sosial-ekonomi penduduk dengan sesediki mungkin melakukan pola penggunaan lahan b. Rekonstruksi dan atau rehabilitasi kawasan yang rusak c. Perbaikan/ pendayagunaan kembali sarana dan prasarana yang masih ada d. Perbaikan dan pembanguan kembali infrastruktur yang rusak	Deputi Pembangunan Infrastruktur	

NO	RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			PERSON IN CHARGE IN BRR	CATATAN PELAKSANAAN
	KEBIJAKAN	STRATEGI	KEGIATAN POKOK		
		Menyelamatkan nyawa dan melindungi harta pnduduk eks bencana	a. Pembangunan sisitim peringatan dini/ Early Warning System b. Pembangunan fasilitas perlindungan seperti system sabuk hijau c. Pembangunan fasilitas penyelamatan berupa bukit pada kawasan pemukiman kepadatan sedang-rendah dan bangunan (mesjid, meunasah) pada kawasan pemukiman kepadatan tinggi d. Pembangunan jalur-jalur penyelamatan e. Rekonstruksi bangunan baru yang memenuhi design teknis tahan gempa, tahan gelombang, mengurangi bongkahan (debris)	Deputi Pengendalian Lingkunganan Konservasi Direktorat Penataan Ruang	Mitigasi bencana sudah tercakup dalam village planning dalam skala mikro. Dalam skala makro juga terdapat mitigasi yang berbasis pada land use planning atau zonasi lahan.
		Membuat taraf hidup masyarakat lebih baik	a. Pengunaan tenaga local dalam proses pembangunan kembali kawasan dan rumah-rumah yang terkena bencana; b. Pelatihan keterampilan-keterampilan bagi masyarakat; c. Penciptaan peluang kerja baru; d. Sosiaisasi dan pembudayaan sistim asuransi jiwa dan harta	Deputi Pengembangan Ekonomi dan Bisnis	

(Sumber: BRR, Direktorat Penataan Ruang dan Lingkungan, November 2006)

SANDINGAN RENCANA INDUK DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BRR
BIDANG PEMULIHAN SOSIAL BUDAYA

No	Rencana Induk			Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
I. PENDIDIKAN					
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD) yang mencakup taman kanak-kanak,Raudatul Athfal, Taman PAUD,dan Taman Pendidikan 1. Penyediaan pelayanan pendidikan tanggap darurat untuk anak usia dini 2. Penyediaan materi belajar mengajar termasuk buku dan peralatan PAUD 3. Pemberian beasiswa bagi siswa yang terekena bencana termasuk biaya hidup bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga lagi 4. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan 5. Penyediaan biaya operasional pendidikan 6. Penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan	1.21 Kab/kota 2.Kab Nias 3.Kab Nias Selatan	1.Pendidikan 1.Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan 2. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan	1. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk anggota masyarakat 2. Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan termasuk lembaga sayah 3. Bimbingan dan konseling bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Penyediaan beasiswa bagi peserta didik dan bantuan biaya hidup bagi korban 1. Meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan relevansinya termasuk pengembangan pendidikan bertaraf internasional 2. Mengembangkan kurikulum yang relevan disesuaikan dengan kebutuhan lokal 3. Meningkatkan jumlah, kualitas dan profesionalisme pendidik 4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum pendidik dan tenaga kependidikan
2.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun mencakup SD/MI/paket A serata SD dan SMP/MTs/Paket B setara SMP 1. Penyediaan pelayanan pendidikan tanggap darurat untuk pendidikan dasar sembilan tahun 2. Penyediaan materi belajar mengajar	1.21 Kab Provinsi NAD 2.Provinsi Sumut 3.Kab Nias 4.Kab Nias Selatan		

No	Rencana Induk			Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
		3. Pemberian beasiswa bagi siswa yang terekena bencana termasuk biaya hidup bagi anak-anak yang tidak memili 4. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan 5. Penyediaan biaya operasional pendidikan 6. Penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan		3. Meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan	1. Mengembangkan sistem pendidikan termasuk pendidikan keluar ga dan masyarakat 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha 3. Merevitalisasi dinas pendidikan dan kantor wilayah agama provinsi dan kabupaten/kota 4. Menyediakan anggaran pendidikan yang memadai dan keberlanjutan 5. Melakukan sosialisasi tentang pentingnta pendidikan sebagai hak asasi, dan aset kepada seluruh kelompok masyarakat 6. Menata dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan termasuk penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi pendidikan
3.	Pendidikan Menengah	Penyelenggaraan pendidikan yang mencakup SMA/SMK/MA 1. Penyediaan pelayanan pendidikan tanggap darurat untuk pendidikan menengah di daerah bencana 2. Penyediaan materi belajar mengajar termasuk buku dan peralatan pendidikan 3. Bantuan beasiswa kepada siswa yang terkena bencana dan anak-anak yang tidak memiliki keluarga lagi	1.21 Kab/Kota Provinsi NAD 2.Provinsi Sumut 3.Kab Nias 4.Kab Nias Selatan		

No	Rencana Induk			Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
		4. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan menengah yang rusak 5. Penyediaan biaya operasional pendidikan 6. luasi secara berkelanjutan			
4.	Pendidikan Tinggi	Penyelenggaraan pendidikan tinggi (termasuk Perguruan tinggi agama) 1. Penyediaan pelayanan tanggap darurt untuk pendidikan tinggi 2. Penyediaan materi perkuliahan mengajar termasuk buku perkuliahan & perpustakaan 3. Bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang terkena bencana dan anak-anak yang tidak memiliki keluarga lagi 4. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana & prasarana kampus yang rusak akibat bencana 5. Penyediaan biaya operasional pendidikan 6. Penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan	1.Kota Banda Aceh 2.Kota Lhokseumawe 3.Kab Aceh Barat 4.Kab Bireun		
5.	Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan pendididikan Non Formal 1. Penyediaan pelayanan tanggap darurt untuk pendidikan non formal 2. Penyediaan materi belajar mengajar termasuk buku dan peralatan pendidikan 3. Bantuan beasiswa kepada warga belajar yang terkena bencana dan anak-anak yang tidak memiliki keluarga lagi 4. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan non formal	1.21 Kab/Kota Provinsi NAD 2.Provinsi Sumut 3.Kab Nias 4.Kab Nias Selatan		

No	Rencana Induk			Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
		5. Pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional 6. Pelaksanaan pendidikan keterampilan untuk penyediaan tenaga kerja terampil untuk pembangunan kembali wilayah bencaana 7. Penyediaan biaya operasional pendidikana non formal termasuk yang diselenggarakan di pondok pesantren 8. Penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan			
6.	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan guru baru/kontrak, guru bantu sementara, serta penempatan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan 1. Pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang bersifat sementara 2. Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan 3. Penguatan lembaga pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan 4. Penilaian, monitoring dana evaluasi secara berkelanjutan	1.21 Kab/Kota Provinsi NAD 2.Provinsi Sumut 3.Kab Nias 4.Kab Nias Selatan		
7.	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat	1.21 Kab/Kota Provinsi NAD 2.Provinsi Sumut 3.Kab Nias 4.Kab Nias Selatan		
8.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Manajemen Pelayanan Pendidikan 1. Konsolidasi dan koordinasi manajemen pelayanan pendikan pada tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota	1.21 Kab/Kota Provinsi NAD 2.Provinsi Sumut 3.Kab Nias		

No	Rencana Induk			Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
		2. Peningkatan kemamapuan pengelola pendidikan di propinsi dan kabupaten/kota 3. Pemberdayaan Majelis Pendidikan Daerah di tingkat pro 4. Penyediaan biaya operasional posko-posko pendidikan di tingkat pusat, propinsi	4.Kab Nias Selatan 5.Pemerintah pusat		
9.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Penelitian dan Pengembang 1. Pengembangan sistem informasi pendidikan 2. Pengembangan kurikulum 3. Pengembangan materi bahan ajar termasuk pengembangan inovasi pendidikan dan pengembangan belajar mengajar 4. Penelitian pendidikan pasca bencana	1.Provinsi Aceh 2.Pemerintah Pusat		
2. KESEHATAN					
1.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 2. Peningkatan partisipasi masyarakat di daerah bencana	Provinsi NAD	2.Kesehatan 1.Pemulihan sistem Kesehatan	Fisik 1. Mobilisasi tenaga kesehatan dari daerah lain 2. Menempatkan tenaga kesehatan dengan sistem kontrak 3. Merekrut tenaga kesehatan dengan sistem kontrak 4. Melatih tenaga kesehatan 5. Merehabiltasi dan membangun prasarana dan sarana pelayanan kesehatan yang rusak 6. Memulihkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan
2.	Lingkungan Sehat	Peningkatan Lingkungan Sehat 1. Meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini, investigasi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) 2. Perbaikan sarana sanitasi lingkungan	Provinsi NAD		

No	Rencana Induk			Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
3.	Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar 1. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan 3. Rehabilitasi dan pembangunan kembali puskesmas dan jaringan termasuk polindes, posyandu, rumah dokter dan paramedis 4. Pembangunan pos kesehatan pengungsi 5. Pengadaan peralatan puskesmas dan pengadaan puskesmas keliling	1. Kota Banda Aceh 2. Kota Lhokseumawe 3. Kab Aceh Jaya 4. Kab Aceh Barat 5. Kab Aceh Utara 6. Kab Bireun 7. Kab Pidie 8. Kab Aceh Besar 9. Kab Aceh Timur 10.Kab Aceh Singkil 11.Kab Simeleu 12.Kab Nagan Raya 13.Kab Aceh Selatan 14.Kab Aceh Tamiang 15.Kota Sabang 16.Kab Nias 17.Sumatera Utara	2.Pencegahan kekurangan gizi	1. Memberikan bantuan makanan bagi bayi, balita dan ibu hamil 2. Memberikan paket per tolongan gizi seperti vitamin A,tablet besi, syrup besi 3. Memberikan penyuluhan gizi 4. Memperkuat survailans gizi
4.	Upaya Kesehatan Perorangan	Pelayanan Kesehatan Perorangan 1. Rehabilitasi rumah sakit yang rusak 2. Pembangunan rumah sakit yang rusak total 3. Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit yang meliputi peralatan medis dan non medis dan prasarana lainnya 4. Pengadaan tenaga kontrak kesehatan di rumah sakit 5. Penyediaan biaya operasional rumah sakit	1.Kota Banda Aceh 2.Kab Aceh Jaya 3.kab Nias 4.Kab Nias Selatan 5.Sumatera Utara		Non Fisik 1. Pelatihan tenaga kesehatan sebagai bentuk peningkatan kapasitas SDM kesehatan sebanyak 67.003 orang 2. Pemulihan kesehatan mental masyarakat sebagai bentuk pemulihan kondisi trauma akibat bencana sebanyak 32.375 orang

No	Rencana Induk			Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
		6. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit			
5.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Pencegahan dan Penanggu langan Penyakit Menular 1. Surveilens epidemiologi 2. Imunisasi, vector control disinfeksi dan purifikasi air minum 3. Perbaikan sarana sanitasi lingkungan 4. Pembangunan 2 unit Gedung KKP (Sabang dan Sabang & Banda Aceh) 5. Pengadaan obat/vaksin perlengkapan dan peralatan kesehatan	13 Kab/kota lokasi bencana dan 8 kab/kota lain di provinsi NAD, Kab Nias dan Nias Selatan di propinsi Sumut		
6.	Perbaikan Gizi Masyarakat	Memperbaiki status gizi Masyarakat 1. Pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI), tablet besi, vitamin A, syrup besi, biskuit, susu & makanan lain 2. Surveilens gizi 3. Pelatihan petugas gizi 4. Menyelenggarakan pelayanan dasar dalam rangka dan perbaikan gizi masyarakat yang bersifat rutin	13 Kab/kota daerah bencana dan 8 kab/kota lainnya		
7.	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pembangunan gedung obat 2. Rehabilitasi gudang obat 3. Penyediaan buffer stock obat untuk Kab Nias dan Nias Selatan dan Sumut	1.Kota Banda Aceh 2.Kab Aceh Jaya 3.Kab Bener Meriah 4.Kab Simeuleu 5.Kab Nias 6.Kab Nias Selatan 7.Sumut		

No	Rencana Induk			Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
8.	Sumber Daya Kesehatan	Penempatan Tenaga Kesehatan dan Revitalisasi Sarana Pendidikan Tenaga Kesehatan 1. Mobilisasi tenaga kesehatan relawan dalam negeri dan luar negeri 2. Penugasan khusus tenaga kesehatan dan Bridge Siaga Bencana (BSB) 3. Pendataan pegawai kesehatan yang meninggal dan/atau hilang 4. Penempatan Calon Pegawai Negeri sipil 5. Sewa gedung untuk proses pembelajaran 6. Pengadaan peralatan pendidikan 7. Penugasan dosen dari daerah lain untuk pembela jaran teori 8. Penerimaan mahasiswa ke Poltekkes terdekat untuk praktikum 9. Rehabilitasi gedung pendidikan termasuk sarana dan prasarana 10. Pembangunan gedung Politekkes terpadu di NAD serta pengadaan sarana dan prasarana pendukungnya pengadaan sarana dan prasarana pendukungnya	55 titik pengungsian di PD,Bireun,Aceh Jaya, Aceh Barat,Nagan raya dan Banda Aceh dan 21 Kab/kota		
9.	Pengawasan Obat dan Makanan	Revitalisasi Fungsi Penga wasan Obat dan Makanan 1. Rehabilitasi sarana dan prasarana Balai Besar POM Banda Aceh 2. Pembangunan pos POM Sabang dan Nias 3. Pengadaan peralatan laboratorium 4. Melaksanakan pemeriksaan di sarana produksi, distribusi serta pelayanan obat dan makanan	1.Kota Banda Aceh 2.Kota Sabang 3.Kab Nias		

No	Rencana Induk			Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
		5. Membina industri lokal di bidang obat dan makanan, khususnya UKM dan industri rumah tangga melalui bimbingan teknis cara produksi yang baik 6. Penanganan kasus keracunan pangan			
10.	Kebijakan dan manajemen pembangunan Kesehatan	Pengembangan Kantor Dinas Kesehatan 1. Rehabilitasi dan pembangunan kantor Dinas Kesehatan propinsi NAD dan Dinas kesehatan Kab Aceh Jaya dan Kota Banda Aceh Kab Nias dan Kab Nias Selatan	1.Kota Banda Aceh 2.Kab Aceh Jaya 3.Kab Nias 4.Kab Nias Selatan		
11.	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1. Pembangunan gedung dan penyediaan peralata	Kota Banda Aceh		
3. AGAMA					
1.	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Bearagama	Pelayanan Kehidupan Beragama 1. Pembangunan kembali tempat tempat ibadah, KUA dan asrama haji di provinsi NAD yang tersebar di kab/kota yang terkena bencana 2. Pengadaan buku nikah 3. Pengadaan buku tata cara pelaksanaan syariah bagi aparat gampong 4. Pengadaan buku metode iqra' 5. Pembangunan Gedung Observasi Hilal (Badan Hisab Rakyat)	1. Provinsi NAD 2. Kota banda Aceh 3. Lhokseumawe 4. Aceh Jaya 5. Nagan Raya 6. Aceh Utara 7. Bireun 8. Pidie 9. Aceh Besar 10.Aceh Barat 11.Aceh Timur 12.Aceh Selatan 13.Simeuleu 14.Provinsi Sumut (Nias, Nias Selatan)	1.Pemulihan ketentraman Rohani	1. Memberikan bimbingan dan konseling 2. Memberikan pengasuhan anak yatim piatu 3. Menggiatkan pengajian majlis taklim

No	Rencana Induk			Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
2.	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan,dan Pengembangan nilai-nilai keagamaan	Rehabilitasi mental dan Spritual 1. Rehabilitasi mental spritual para korban bencana di Provinsi NAD dan Sumut	1. Kota Banda Aceh 2. Aceh Jaya 3. Aceh Barat 4. Aceh Besar 5. Pidie 6. Aceh Utara 7. Simeuleu 8. Bireun 9. Lhoksemawe 10.Nias 11.Nias Selatan	2.Peningkatan tenaga pelayanan keagamaan	1. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi imam masjid,khatib,dai dan guru pengajian 2. Merekrut tenaga pegawai mulai darin tingkat gampong sampai provinsi (kantor wilayah)
3.	Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Rehabilitasi mental & spritual bagi pesertadidik 1. Pembinaan imam mesjid, khatib da'i, guru pengajian pengelola zakat dan Baitul Maal, pentasyid mayit	Kota Banda Aceh	3.Rehabilitasi simbol-simbol agama	1. Merehabilitasi dan membangun sarana dan prasarana peribadatan seperti mesjid dan meunasah 2. Merehabilitasi dan membangun sara dan prasarana pelayanan keagamaan seperti kandep Agama Kabupaten/kota kantor Dinas Syariah, Baitul Maal, dan kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
4.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				SOSIAL BUDAYA
1.	Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1. Revitalisasi kelembagaan PP di Propinsi NAD dan Nias Sumut 2. Pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) 3. Pembuatan assesment data dan kebutuhan	1.Kota Banda Aceh 2.Kab Aceh Barat 3.Kab Aceh Besar 4.Kab Aceh Selatan 5.Kab Aceh Tenggara 6.Kab Aceh Timur 7.Kab Aceh Utara	1.Peningkatan pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	1. Melakukan pendataan kebutuhan khusus perempuan dan anak 2. Mengembangkan dan menfungsikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), dan memfasilitasi women crisis center

No	Rencana Induk			Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
			8.Kab Bireun 9.Kota Langsa		3. Memfasilitasi children center dan reunifikasi keluarga, bantuan hukum, dan dukungan untuk pengasuhan anak
2.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan	1. Fasilitasi Women Crisis Center 2. Pengembangan Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), kegiatan kelompok masyarakat perempuan dan penyediaan ruang publik khusus perempuan 3. Pemberdayaan ekeonomi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) 4. Dukungan hukum untuk perempuan	10.Kota Lhoksemawe 11.Kab Nagan Raya 12.Kab Pidie 13.Kab Sabang 14.Kab Singkil 15.Kab Aceh Jaya 16.Kab Abdiya 17.Kab Nias 18.Kab Nias Selatan 19 Kab/Kota + Aceh Jaya		4. Memberdayakan perempuan khususnya kepala keluarga perempuan dalam kegiatan ekonomi
3.	Peningkatan Kesejahteraan dan perlindungan anak	1. Fasilitasi *children center* a.Fasilitasi reunifikasi keluarga b.Dukungan untuk mendapatkan akte kelahiran gratis c.Bantuan hukum d.Pengembangan pola asuh anak			
5	Sosial				
1.	Bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial	1. Bantuan tanggap darurat berupa beras, lauk pauk, sandang dan peralatan dapur keluarga 2. Jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan sektor formal 3. Pembangunan Trauma Center 4. Bantuan bahan bangunan rumah bagi korban bencana yang hancur/rusak	23 Kab/Kota	2. Pemberian bantuan dan jaminan bagi masyarakat rentan	mugar warisan budaya yang rusak 1. Memberikan bantuan dan jaminan sosial bagi masyarakat korban bencana 2. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak,lanjut usia, dan penyandang cacat korban bencana

No	Rencana Induk			Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
					3. Membangun dan menfungsikan trauma center 4. Memberdayakan keluarga, fakir miskin, dan komunikasi adat terpencil
2.	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Pelayanan sosial bagi anak, lanjut usia dan penyandang cacat korban bencana 1. Pembangunan 5 Panti Sosial Anak (PSA) di Banda Aceh, PSA di Lhokseumawe, PSA Meulaboh, Panti Sosial,Penyandang Cacat (PSPC) di Banda Aceh, dan Panti Sosial Lanjut Usia (PSLU) di Meulaboh. 2. Peningkatan kapasitas PS Meuligoh Jhroh Naguna Banda Aceh dan Rumah Singgah Sejahtera Daarus Sa'adah	1.Kota Banda Aceh 2.Kab Aceh Barat 3.Kota Lhoksemawe		
3.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Pemberdayaan keluarga, fakir miskin dan KAT 1. Bantuan dan pengembangan usaha ekonomi produktif bagi bagi fakir miskin korban bencana gempa bumi dan tsunami 2. Rehabilitasi sosial daerah kumuh bagi keluarga 3. Pendampingan sosial dan monev 4. Peningkatan kesejahteraan sosial keluarga korban bencana gempa bumi dan tsunami 5. Pemberdayaan 265 KK KAT	20 Kab/Kota		
4.	Penelitian dan pengembangan Kesejahteraan Sosial	Pelatihan,Pendampingan dan Penelitian Pelatihan aparatur pemerintah dan masyarakat	1.Provinsi NAD 2.Sumatera Utara		

No	Rencana Induk			Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
5.	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1. Rehabilitasi yayasan/orsos/panti masyarakat di NAD 2. Pembangunan/Rehab perintis kemerdekaan di NAD a.Rehabilitasi panti sosial masyarakat b.Rehabilitasi TMP,MPN dan rumah perintis kemer dekaan	11 Kab/kota		
6	Kependudukan dan Keluarga Berencana			3. Pendataan lengkap penduduk dan pemberian jaminan pelayanan kelaurga sejahtera dan kesehatan reproduksi	1. Melakukan pendataan lengkap penduduk guna menyediakan data komposisi penduduk yang lengkap 2. Merehabilitasi dan merekonstruksi akses dan sarana prasarana pelayanan keluarga berencana,kesehatan reproduksi dan pemberdayaan ketahanan keluarga 3. Menyediakan alat dan obat kontrasepsi yang dibutuhkan oleh pasangan usia subur
	1.Penyempurnaan dan pengembangan statistik	Pendataan Lengkap Penduduk NAD 1. *Workshop* instruktur nasional 2. Pelatihan instruktur daerah dan petugas pewawancara 3. *Penggandaan kuesioner* 4. Pelaksanaan pendataan penduduk 5. Pengolahan data 6. Penyusunan hasil laporan	Provinsi NAD sampai tingkat kecamatan		
	2.Pelayanan keluarga berencana	Pelayanan Keluarga Berencana 1. Penguatan institusi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi meliputi : a. Pembersihan ruangan dan lingkungan (gedung, peralatan dan sarana gedung) b. Penyediaan ruang penginapan bagi petugas posko/relawan/pegawai BKKBN provinsi,anakpengungsi	1.Prov NAD 2.Kab Nias 3.Sumut		

No	Rencana Induk			Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
		c. Penyiapan ruang dan sarana operasional pelayanan KB/kesehatan,dan ruang operasional pelayanan konseling termasuk sarananya d. Pembangunan ruang penyimpanan alkon (Pembuatan gedung sementara 2. Membangun pusat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi meliputi : a. Rehabilitasi ruang kantor pengelola program KB di Kab/kota b. Pelayanan program KB/KR terutama melalui pelayanan tim KB/KR terutama melalui pelayanan konseling c. Pembinaan keluarga balita dan remaja serta usaha pembinaan usaha ekonomi produktif keluarga d. Pelayanan KIE dan pendataan Keluarga 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi meliputi : a. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan KB/KR di klinik KB			
7	Budaya			4.Peningkatan kualitas kehidupan adat,tradisi dan kegiatan seni budaya serta pelestarian warisan budaya masyarakat	
	1.Pengembangan Nilai Budaya	Pemulihan Kembali jati diri dan aset budaya masyarakat	23 Kab/Kota		1. Melakukan pendataan dan inventarisasi terhasap kerusakan warisan budaya
	2.Pengelolaan Keragaman budaya	Rehabilitasi sarana,prasarana tinggalan purbakala, sejarah, dan potensi budaya	Nias Selatan		2. Memperkuat nilai-nilai budaya dan melestarikan warisan seni dan budaya masyarakat

No	Rencana Induk			Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
	3.Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pembangunan kembali Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA)	Kota Banda Aceh		3. Membangun/merehabilitasi sarana dan prasarana budaya
8	Pemuda dan Olahraga			5. Peningkatan peran budaya olah raga	
	1.Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Pemulihan Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi pemuda diberbagai bidang pembangunan 1. Penumbuhan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) 2. Penumbuhan Kelompok Pemuda Sebaya (KPS) 3. Penumbuhan Pertukaran Pemuda Antar Propins 4. Monitoring dan evaluasi manajemen life skills 5. Pembinaan kewirausahaan pemuda 6. Bantuan untuk lembaga Kepemudaan 7. Penempatan SP3	1.Kota Banda Aceh 2.Kab Aceh Besar 3.Kab Aceh Besar 4.Kab Aceh Utara 5.Kota Sabang 6.Kab Pidie 7.Kab Aceh Timur 8.Kota Langsa 9.Kab Aceh Jaya 10.Kab Bireun 11.Kab Aceh Tamiang		1. Menyediakan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan dan memulihkan fungsi kelembagaan 2. Mobilisasi dan pemberdayaan potensi kepemudaan dan keolahragaan
	2.Pembinaan dan Pemasyarakatan	Pemulihan kembali aktivitas olahraga di semua lapisan masyarakat 1. Peningkatan mutu SDM keolahragaan daerah 2. Inventarisasi/pendataan olahraga daerah 3. Pembinaan akademik atlet pelajar (PPLP) 4. Persiapan atlet lokal untuk mengikuti festival olah raga tradisional tingkat nasional,yang diawali dengan kegiatan seleksi antar kab/kota 5. Pembinaan klub olahraga pelajar (Kecamatan) 6. Pemberdayaan klub olah raga mahasiswa dan pelajar berbakat 7. Pemberdayaan organisasi olahraga pelajar dan organisasi olahraga masyarakat	1.Kota Banda Aceh 2.Kab Aceh Besar 3.Kab Aceh Besar 4.Kab Aceh Utara 5.Kota Sabang 6.Kab Pidie 7.Kab Aceh Timur 8.Kota Langsa 9.Kab Aceh Jaya 10.Kab Bireun 11.Kab Aceh Tamiang		

No	Rencana Induk			Renstra BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
		8. *Training camp* atlet pelajar 9. Pembinaan klub olahraga			
	3.Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga Rehabilitasi GOR KONI, asrama PPLP,GSG Tanjung Harapan,gedung PERBASI, lapangan bola kaki,lapangan bola volli,lapangan tenis,lapangan atletik,dan kolam renang termasuk perlengkapan olahraga	1.Kota Banda Aceh 2.Kab Pidie 3.Kab Aceh Barat 4.Kab Aceh Jaya		

SANDINGAN RENCANA INDUK DENGAN REALISASI PELAKSANAAN BRR TAHUN 2005/2006 POKJA PEMULIHAN SOSIAL BUDAYA

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
I.PENDIDIKAN						
	1.Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidkan anak usia Dini (PAUD) yang mencakup Taman Kanak-kanak,Raudatul Athfal,Taman PAUD,dan Taman Pendidikan Alquran 1.Penyediaan pelayanan pendidikan tanggap darurat untuk anak usia dini 2.Penyediaan materi belajar mengajar termasuk buku dan peralatan PAUD 3.Pemberian beasiswa bagi siswa yang terekena bencana termasuk biaya hidup bagi anak-anak yang tidak memili keluarga lagi 4.Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan 5.Penyediaan biaya operasional pendidikan 6.Penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan	1.Terlaksananya pelayanan pendidikan tanggap darurat untuk anak usia dini di daerah bencana 2.Terlaksananya kembali pelayanan pendidikan untuk anak usia dini yang didukung oleh tersedianya fasilitasi pelayanan PAUD dalam jumlah dan kualitas sesuai kebutuhan	1.21 Kab/kota 2.Kab Nias 3.Kab Nias Selatan		

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
	2. Wajib Belajar Pendidi kan Dasar Sembilan Tahun	Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun mencakup SD/MI/paket A serata SD dan SMP/MTs/Paket B setara SMP 1.Penyediaan pelayanan pendidikan tanggap darurat untuk pendidikan dasar sembilan tahun 2.Penyediaan materi belajar mengajar 3.Pemberian beasiswa bagi siswa yang terekena bencana termasuk biaya hidup bagi anak-anak yang tidak memilih 4.Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan 5.Penyediaan biaya operasional pendidikan 6.Penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan	1.Terlaksananya pelayanan pendidikan darurat untuk jenjang pendidikan dasar 2.Tersedianya fasilitas pelayanan pendidikan dasar dalam jumlah dan kualitas sesuai kebutuhan 3.Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan dasar 4.Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	1.21 kab di Provinsi NAD 2.Provinsi Sumut 3.Kab Nias 4.Kab Nias Selatan	Pemberian beasiswa kepada 10.704 siswa Rehabilitasi sekolah PAUD-SMP sebanyak 476 unit	
	3.Pendidikan Menengah	Penyelenggaraan pendidikan yang mencakup SMA/SMK/MA 1.Penyediaan pelayanan pendidikan tanggap darurat untuk pendidikan menengah di daerah bencana 2.Penyediaan materi belajar mengajar termasuk buku dan peralatan pendidikan	1.Terlaksananya pelayanan pendidikan darurat untuk jenjang pendidikan menengah 2.Tersedianya fasilitas pelayanan pendidikan menengah dalam jumlah dan kualitas sesuai kebutuhan 3.Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan menengah 4.Meningkatnya kualitas pendidikan menengah	1.21 Kab/Kota Provinsi NAD 2.Provinsi Sumut 3.Kab Nias 4,Kab Nias Selatan	Rehabilitasi sekolah Menengah sebanyak 208 unit Penyediaan bantuan buku teks sebanyak 141.431 unit	

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
		3.Bantuan beasiswa kepada siswa yang terkena bencana dan anak-anak yang tidak memiliki keluarga lagi 4.Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan menengah yang rusak 5.Penyediaan biaya operasional pendidikan 6.Penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan				
	4.Pendidikan Tinggi	Penyelenggaraan pendidikan tinggi (termasuk Perguruan tinggi agama) 1.Penyediaan pelayanan tanggap darurt untuk pendidikan tinggi 2.Penyediaan materi perkuliahan mengajar termasuk buku perkuliahan & perpustakaan 3.Bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang terkena bencana dan anak-anak yang tidak memiliki keluarga lagi 4.Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana & prasarana kampus yang rusak akibat bencana 5.Penyediaan biaya operasional pendidikan	1.Terlaksananya pelayanan tanggap darurat untuk pendidikan tinggi di daerah bencana 2.Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan tinggi agama (PTA) yang meliputi a.Rehabilitasi gedung pendidikan,laboratorium dan ruang administrasi yang rusak akibat bencana b.Pembangunan gedung pendidikan yang rusak total	1.Kota Banda Aceh 2.Kota Lhokseumawe 3.Kab Aceh Barat 4.Kab Bireun	Pemberian beasiswa kepada 9.417 mahasiswa di 20 PT Rehabilitasi PT 3 unit	

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
		6.Penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan	c.Terlaksananya operasionalisasi di perguruan tinggi (PTN) yaitu Universitas Syiahkuala,IAIN Ar-Raniri,Universitas Malikussaleh,politeknik Lhoksemawe, dan 24 perguruan tinggi swasta (PTS)			
	5.Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan pendididikan Non Formal 1.Penyediaan pelayanan tanggap darurt untuk pendidikan non formal 2.Penyediaan materi belajar mengajar termasuk buku dan peralatan pendidikan 3.Bantuan beasiswa kepada warga belajar yang terkena bencana dan anak-anak yang tidak memiliki keluarga lagi 4.Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan non formal 5.Pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional 6.Pelaksanaan pendidikan keterampilan untuk penyediaan tenaga kerja terampil untuk pembangunan kembali wilayah bencaana	1.Terlaksananya pelayanan pendidikan non formal termasuk dalam tahap tanggap darurat yang mencakup pelayanan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMU, keaksaraan fungsional, serta magang bagi penduduk dewasa 2.Terbentuknya sarana pelayanan pendidikan non formal sementara (posko/tenda darurat) 3.Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan non formal meliputi rehabilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), dan lembaga Kursus yang rusak akibat bencana, dan terlaksananya operasio nalisasi pendidikan non formal.	1.21 Kab/Kota Provinsi NAD 2.Provinsi Sumut 3.Kab Nias 4.Kab Nias Selatan	Rehabilitasi sekolah non formal sebanyak 3 unit	

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
		7.Penyediaan biaya operasional pendidikana non formal termasuk yang diselenggarakan di pondok pesantren 8.Penilaian, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan				
	6.Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan guru baru/kontrak guru bantu sementara serta penempatan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan 1.Pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang bersifat sementara 2.Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan 3.Penguatan lembaga pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan 4.Penilaian, monitoring dana evaluasi secara berkelanjutan	1.Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan pendidikan darurat 2.Meningkatnya ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai 3.Terdistribusinya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menurut Kab/Kota yang sesuai dengan kebutuhan	1.21 Kab/Kota Provinsi NAD 2.Provinsi Sumut 3.Kab Nias 4.Kab Nias Selatan	Pelatihan guru sebanyak 3530 orang	
	7.Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.Pengadaan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat	1.Tersedianya sarana dan prasarana 2.Meningkatnya minat baca masyarakat dan peserta didik	1.21 Kab/Kota Provinsi NAD 2.Provinsi Sumut 3.Kab Nias 4.Kab Nias Selatan		

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
	8.Manajemen Pelayanan Pendidikan	Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.Konsolidasi dan koordinasi manajemen pelayanan pendikan pada tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota 2.Peningkatan kemamapuan pengelola pendidikan di propinsi dan kabupaten/kota 3.Pemberdayaan Majelis Pendidikan Daerah di tingkat propinsi dan kabupaten/kota 4.Penyediaan biaya operasional posko-posko pendidikan di tingkat pusat, propinsi	1.Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi manajemen pelayanan pendidikan pada tingkat pusat, provinsi dan Kab/kota 2.Tersedianya biaya operasiona posko-posko pendidikan di tingkat pusat,provinsi, dan kab/kota 3.Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan di provinsi dan kab/kota 4.Meningkatnya peran Majelis Pendidikan Daerah di provinsi NAD dan Dewan Pendidikan di Nias Sumatera Utara	1.21 Kab/Kota Provinsi NAD 2.Provinsi Sumut 3.Kab Nias 4.Kab Nias Selatan 5.Pemerintah pusat	1. Memberikan kelas tambahan untuk ujian akhir nasional di 491 SMA untuk 53.711 orang 2.Training 22 Kepala Sekolah SMA 3. Pengembangan manajemen sekolah yang berbasis sekolah	
	9.Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 1.Pengembangan sistem informasi pendidikan 2.Pengembangan kurikulum 3.Pengembangan materi bahan ajar termasuk pengembangan inovasi pendidikan dan pengembangan belajar mengajar 4.Penelitian pendidikan pasca bencana	1.Tersusunnya sistem informasi pendidikan yang berkesenambungan 2.Tersusunnya kurikulum yang relevan dengan kondisis wilayah khususnya untuk provinsi NAD dikaitkan dengan pelaksanaan syariat islam 3.Tersedianya materi bahan ajar dan metode pembelajaran yang sesuai 4.Terlaksananya peneliti an pendidikan pasca bencana	1.Provinsi Aceh 2.Pemerintah Pusat		

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
2	KESEHATAN					
	1.Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat	1.Terlaksananya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di daerah bencana	Provinsi NAD	Program promosi kesehatan dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga Departemen Kesehatan	Provinsi NAD
	2.Lingkungan Sehat	Peningkatan Lingkungan 1.Meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini, investigasi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) 2.Perbaikan sarana sanitasi lingkungan	Peningkatan Lingkungan Sehat 1.Meningkatkan kemampuanan kewaspadaan dini, investigasi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) 2.Perbaikan sarana sani tasi lingkungan	Provinsi NAD	Program lingkungan sehat dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan	Provinsi NAD
	3.Upaya Kesehatan Masyarakat		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar 1.Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat 2.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan 3.Rehabilitasi dan pembangunan kembali puskesmas dan jaringan termasukpolindes, posyandu, rumah dokter dan paramedis 4.Pembangunan pos kesehatan pengungsi 5.Pengadaan peralatan puskesmas dan pengadaan puskesmas keliling	1. Kota Banda Aceh 2. Kota Lhokseumawe 3. Kab Aceh Jaya 4. Kab Aceh Barat 5. Kab Aceh Utara 6. Kab Bireun 7. Kab Pidie 8. Kab Aceh Besar 9. Kab Aceh Timur 10.Kab Aceh Singkil 11.Kab Simeleu 12.Kab Nagan Raya 13.Kab Aceh Selatan 14.Kab Aceh Tamiang 15.Kota Sabang	1.Rehabilitasi Puskesmas 128 unit 2. Rehabilitasi Pustu 228 unit 3. Rehabilitasi Poskeslit 55 unit	23 Kab/kota 23 kab/kota 23 kab/kota

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
				16.Kab Nias 17.Sumatera Utara		
	4.Upaya Kesehatan Perorangan		Pelayanan Kesehatan Perorangan 1.Rehabilitasi rumah sakit yang rusak 2.Pembangunan rumah sakit yang rusak total 3.Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit yang meliputi peralatan medis dan non medis dan prasarana lainnya 4.Pengadaan tenaga kontrak kesehatan di rumah sakit 5.Penyediaan biaya operasional rumah sakit 6.Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit	1.Kota Banda Aceh 2.Kab Aceh Jaya 3.kab Nias 4.Kab Nias Selatan 5.Sumatera Utara	Rehabilitasi rumah sakit sebanyak 11 unit	9 kab/kota
	5.Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1. Surveilens epidemiologi 2. Imunisasi, vector control disinfeksi dan purifikasi air 3. Perbaikan sarana sanitasi lingkungan 4. Pembangunan 2 unit Gedung KKP (Sabang dan Sabang & Banda Aceh)	13 Kab/kota lokasi bencana dan 8 kab/kota lain di provinsi NAD, Kab Nias dan Nias Selatan di propinsi Sumut	Penanggulangan wabah/epidemi pasca bencana	NAD dan Nias

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
			5. Pengadaan obat/vaksin perlengkapan dan peralatan kesehatan			
	6.Perbaikan Gizi Masyarakat		Memperbaiki status gizi masyarakat 1.Pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI), tablet besi, vitamin A, syrup besi, biskuit, susu & makanan lain 2. Surveilens gizi 3. Pelatihan petugas gizi 4. Menyelenggarakan pelayanan dasar dalam rangka dan perbaikan gizi masyarakat yang bersifat rutin	13 Kab/kota daerah bencana dan 8 kab/kota lainnya	1.Pelayana kesehatan untuk stabilitas masyarakat 1.Program Petugas gizi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan NAD bersama AusAid	NAD dan Nias NAD dan Nias
	7.Obat dan Perbekalan Kesehatan		Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan 1. Pembangunan gedung obat 2. Rehabilitasi gudang obat 3. Penyediaan buffer stock obat untuk Kab Nias & Nias Selatan dan Sumut	1.Kota Banda Aceh 2.Kab Aceh Jaya 3.Kab Bener Meriah 4.Kab Simeuleu 5.Kab Nias 6.Kab Nias Selatan 7.Sumut	Pembangunan gudang farmasi 6 unit	6 kab/kota
	8.Sumber Daya Kesehatan		Penempatan tenaga kesehatan dan revitalisasi sarana pendidikan tenaga tesehatan 1. Mobilisasi tenaga kesehatan relawan dalam negeri dan luar negeri	1.55 titik pengungsian di PD,Bireun,Aceh Jaya, Aceh Barat,Nagan raya dan Banda Aceh dan 21 Kab/kota	Rehablitasi Perguruan Tinggi Kesehatan 1 unit	Banda Aceh

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
			2. Penugasan khusus tenaga kesehatan dan Bridge Siaga Bencana (BSB) 3. Pendataan pegawai kesehatan yang meninggal dan/ atau hilang 4. Penempatan Calon Pegawai Negeri sipil 5. Sewa gedung untuk proses pembelajaran 6. Pengadaan peralatan pendidikan 7. Penugasan dosen dari daerah lain untuk pembelajaran teori 8. Penerimaan mahasiswa ke Poltekkes terdekat untuk praktikum 9. Rehabilitasi gedung pendidikan termasuk sarana dan prasarana 10.Pembangunan gedung Politekkes terpadu di NAD serta pengadaan sarana dan prasarana pendukungnya pengadaan sarana dan prasarana pendukungnya	2.Sarana dan prasara na pendidikan di kota Banda Aceh dan Kab Aceh Barat		
	9.Pengawasan Obat dan Makanan		Revitalisasi fungsi pengawasan obat dan makanan 1.Rehabilitasi sarana dan prasarana Balai Besar POM Banda Aceh 2. Pembangunan pos POM Sabang dan Nias	1.Kota Banda Aceh 2.Kota Sabang 3.Kab Nias	Rehabilitasi gedung BPOM 1 unit	Banda Aceh

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
			3. Pengadaan peralatan laboratorium 4. Melaksanakan pemeriksaan di sarana produksi, distribusi serta pelayanan obat dan makanan 5. Membina industri lokal dibidang obat dan makanan, khususnya UKM dan industri rumah tangga melalui bimbingan teknis cara produksi yang baik			
	10.Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan		Pengembangan kantor dinas kesehatan 1.Rehabilitasi dan pembangunan kantor Dinas Kesehatan propinsi NAD dan Dinas kesehatan Kab Aceh Jaya Nias dan Kab Nias Selatan	1.Kota Banda Aceh 2.Kab Aceh Jaya 3.Kab Nias 4.Kab Nias Selatan	Rehabillitasi kantor dinas kesehatan 3 unit	
	11.Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1.Pembangunan gedung dan penyediaan peralatan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1.Pembangunan gedung dan penyediaan peralatan	Kota Banda Aceh	Program penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksankan oleh Departemen Kesehatan bersama Dinas Kesehatan NAD	
3.AGAMA						
	1.Peningkatan Pelayanan Kehidupan Bearagama	Pelayanan Kehidupan Beragama 1.Pembangunan kembali tempat-tempat ibadah, KUA dan asrama haji di provinsi NAD yang tersebar di kab/kota yang terkena bencana 2 .Pengadaan buku nikah 3. Pengadaan buku tata cara pelaksanaan syariah bagi aparat gampong	1.Terbangunnya kembali 3.114 tempat ibadah untuk menjamin setiap warga dapat menjalankan ibadah 2. Terbangunnya kembali 58 KUA untuk pelayanan keagamaan bagi masyarakat. 3. Pengadaan 30.000 eksemplar buku nikah	1. Provinsi NAD 2. Kota banda Aceh 3. Lhokseumawe 4. Aceh Jaya 5. Nagan Raya 6. Acehj Utara 7. Bireun 8. Pidie	1.Rehabilitasi dan pembangunan mesjid dan meunasah sebanyak 339 unit 2.Pemberian bantuan untuk pembangunan kembali fasiltas ibadah sebesar Rp 40 juta	

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
		4. Pengadaan buku metode iqra' 5. Pembangunan Gedung Observasi Hilal (Badan Hisab Rakyat)		9. Aceh Besar 10.Aceh Barat 11.Aceh Timur 12.Aceh Selatan 13.Simeuleu 14.Provinsi Sumut (Nias, Nias Selatan)		
	2. Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan,dan Pengembangan nilai-nilai keagamaan	Rehabilitasi mental dan Spritual 1.Rehabilitasi mental spritual para korban bencana di Provinsi NAD dan Sumut	1.Terbinanya kembali ketenteraman batin akibat kehilangan keluarga dan kesempatan lainnya 2.Pulihnya kondisi mental spritual dengan melakukan pembinaan keluarga sakinah, pemberian bantuan buku keagamaan dan pemberian penyuluhan bagi umat beragama oleh da'I, guru mengaji,ulama, dan majelis taklim	1. Kota Banda Aceh 2. Aceh Jaya 3. Aceh Barat 4. Aceh Besar 5. Pidie 6. Aceh Utara 7. Simeuleu 8. Bireun 9. Lhoksemawe 10.Nias 11.Nias Selatan	1.Pelaksanaan ceramah agama di barak pengungsi 2, Musyawarah ulama se-Nanggro Aceh Darussalam yang melibatkan 350 ulama	Banda Aceh Banda Aceh
	3. Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Rehabilitasi mental & spritual bagi peserta didik 1. Pembinaan imam mesjid, khatib da'i, guru pengajian, pengelola zakat dan Baitul Maal, pentasyid mayit	1.Terlatihnya kader-kader imam masjid,khatib,da'I guru pengajian,pengelola zakat dan baitul maal pentasyid mayit 2.Pulihnya kondisi mental spritual	Kota Banda Aceh	Melaksanakan kegiatan rehabilitasi mentakl spritual pengungsi di barak-barak	

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
4. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	1.Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutama an Gender dan Anak 1. Revitalisasi kelembagaan PP di Propinsi NAD 2. Pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) 3. Pembuatan assesment data dan kebutuhan	1.Bantuan teknis dan sarana prasarana Biro/unitPP 2.Tersedianya tenaga pendamping dari kementerian PP 3.Terbentuknya jaringan kerja antara kementerianPP,lembaga donor, NGO,dan Biro PP di provinsi NAD dan unit PP di Nias Sumut 4.Bantuan kemanusiaan untuk NGO lokal yang terkena tsunami 5.Tersusunnya program penanganan Aceh yang memperhatikan perlindungan dan kebutuhan perempuan dan anak melalui sentisisa stakeholder di pusat, NAD dan 6.Tersedianya tenaga pakar gender untuk NAD dan Nias-Sumut 7.Terbentuknya tim advokasi gender 8.Tersusunnya pedoman, modul penanganan korban yang respon sif gender 9.Tersusunnya data terpilahhan khusus perem 10.Tersusunnya assesment data dan kebutupuan dan anak	1.Kota Banda Aceh 2.Kab Aceh Barat 3.Kab Aceh Besar 4.Kab Aceh Selatan 5.Kab Aceh Tenggara 6.Kab Aceh Timur 7.Kab Aceh Utara 8.Kab Bireun 9.Kota Langsa 10.Kota Lhoksemawe 11.Kab Nagan Raya 12.Kab Pidie 13.Kab Sabang 14.Kab Singkil 15.Kab Aceh Jaya 16.Kab Abdiya 17.Kab Nias 18.Kab Nias Selatan	2. Penelitian tentang perempuan dan anak 3. Pembinaan ulama perempuan	21 Kab/Kota NAD

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
	2.Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan	Pemberdayaan Perempuan 1.Fasilitasi Women Crisis Center 2.Pengembangan Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), kegiatan kelompok masyararakat perempuan dan publik khusus perempuan 3.Pemberdayaan ekeonoimi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) 4.Dukungan hukum untuk perempuan	1.Terfasilitasinya *Women Crisis Center dan terlatihnya relawan untuk Women Crisis Center* 2.Terselenggaranya pelatihan untuk pengelola P2TP2, terfasilitasinya sarana P2TP2 di 19 kab/kota dan terselenggara nya revitalisasi aktivitas sosial perempuan berupa pengajian,wirid dan home industri 3.Terbentuknya kelompok usaha perempuan melalui PPEP,termasuk terfasilitasinya kelompok usaha perempuan melalui bantuan modal dan penyediaan sarana dan prasarana untuk keterampilan serta tenaga pendampingan terlatihnya kepala keluarga perempuan (kelompok usaha perempuan) melalui keterampilan berusaha seperti menjahit,membuat kue, dan lain-lain 4.Tersusunnya data permasalahan hukum yang dihadapi perempuan pasca bencana di NAD dan Nias-Sumut, tersedianya tim bantuan hukum dan dukungan NGO pemerhati perempuan	1.Kota Banda Aceh 2.Kab Aceh Barat 3.Kab Aceh Besar 4.Kab Aceh Selatan 5.Kab Aceh Tenggara 6.Kab Aceh Timur 7.Kab Aceh Utara 8.Kab Bireun 9.Kab Langsa 10.Kota Lhoksemawe 11.Kab Nagan Raya 12.Kab Pidie 13.Kab Sabang 14.Kab Simeuleu 15.Kab Singkil 16.Kab Aceh Jaya 17.Kab Abdiya 18.Kab Nias 19.Kab Nias Selatan	1.Penguatan kelembagaan pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 2. Trauma Center dan WCC 3. Bantuan hukum 4. Pembentukan anti trafiking 5. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti sarana perlengkapan kesehatan(hiegene kit), sususbalita dan alat rumah tangga	21 Kab/Kota NAD

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
	3. Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Anak 1.Fasilitasi *children center* a.Fasilitasi reunifikasi keluarga b.Dukungan untuk mendapatkan akte kelahiran gratis c.Bantuan hukum d.Pengembangan pola asuh anak	1.Terfasilitasinya *Children Center* 2.Terfasilitasinya reunifikasi keluarga 3.Terbentuknya Kid Line Conselling 4.Terbentuknya gugus trafiking dan anti kekerasan terhadap anak 5.Tersusunnya pedoman pola asuh anak 6.Terlatihnya relawan untuk penanggulangan trauma bagi anak dan remaja 7.Tersususnnya perda aktekelahiran gratis	1.Kota Banda Aceh 2.Kab Aceh Barat 3.Kab Aceh Besar 4.Kab Aceh Selatan 5.Kab Aceh Tenggara 6.Kab Aceh Timur 7.Kab Aceh Utara 8.Kab Bireun 9.Kab Langsa 10.Kota Lhok semawe 11.Kab Nagan Raya 12.Kab Pidie 13.Kab Sabang 14.Kab Simeuleu 15.Kab Singkil 16.Kab Aceh Jaya 17.Kab Abdiya 18.Kab Nias 19.Kab Nias Selatan	1.Penyaluran bantuan ekonomi untuk perempuan berupa modal langsung maupun alat produksi berupa mesin jahit bagi 810 perempuan dan 60 mesin jahit 2. Pembuatan akte kelahiran gratis	
5. SOSIAL						
	1.Bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial	Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 1.Bantuan tanggap darurat berupa beras, lauk pauk, sandang dan peralatan dapur keluarga	1.Pemenuhan kebutuhan tanggap darurat berupa beras,lauk pauk, sandang dan peralatan dapur selama 6 bulan di provinsi NAD bagi 367.930 jiwa/73.58 KK dan propinsi Sumut 23.620 jiwa/4.724 KK	1.Kab Bireun 2.Kab Aceh Timur 3.Kab Aceh Utara 4.Kota Banda Aceh 5.Kota Lhoksemawe	1.Penyaluran bantuan sosial kepada 200 lansia	

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
		2.Jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan sektor formal 3.Pembangunan Trauma Center 4.Bantuan bahan bangunan rumah bagi korban bencana yang hancur/rusak	2.Identifikasi para korban gempa bumi dan tsunami yang mengalami trauma di 23 kab/kota 3.Penyelenggaraan proram jaminan sosial kepada masyarakat rentan pekerja mandiri di sektor informal dan keluarga yang tidak mampu 4.Pembangunan rumah korban bencana yang mengalami kerusakan rumah 5.Penyediaan Trauma Center bagi penanganan korban yang mengalami trauma	6.Kab Pidie 7.Kota Sabang 8.Kab Aceh Tengah 9.Kab Aceh Jaya 10.Kab Aceh Besar 11.Kab Simeuleu 12.Kab Aceh Selatan 13.Aceh Barat 14.Kab Aceh Barat Daya 15.Kab Nagan Raya 16.Kab Aceh Tenggara 17.Kab Aceh Tamiang 18.Kota Langsa 19.Kab Bener Meriah 20.Kab Nias 21.Kab Serdang Bedagai 22.Kab Madina 23.Kota Medan	2.300.000 orang telah dapat kembali ke rumah dan sekitar 75.000 orang mengungsi ke rumah saudara dan tetangga	
	2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Pelayanan Sosial Bagi Anak,lanjut Usia dan Penyandang cacat korban bencana	1.Terbangunnya panti sosial bagi anak,lanjut usia dan penyandang cacat 2.Tertampungnya anak,lanjut usia dan penyandang cacat di panti-panti sosial masyarakat dan pemda	1.Kota Banda Aceh 2.Kab Aceh Barat 3.Kota Lhoksemawe		

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
		1.Pembangunan 5 Panti Sosial Anak (PSA) di Banda Aceh, PSA di Lhokseumawe, PSA Meulaboh, Panti Sosial,Penyandang Cacat (PSPC) di Banda Aceh, dan Panti Sosial Lanjut Usia (PSLU) di 2.Peningkatan kapasitas PS Meuligoh Jhroh Naguna Banda Aceh dan Rumah Singgah Sejahtera Daarus Sa'adah	3.Peningkatan kesejahteraan anak dalam asuhan keluarga		1.Penampungan anak yatim piatu 2.Banatuan makanan anak yatim di 16 panti asuhan 3.Bantuan perlengkapan 2 panti asuhan	Banda Aceh
	3.Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Pemberdayaan keluarga, fakir miskin dan KAT 1.Bantuan dan pengembangan usaha ekonomi produktif bagi bagi fakir miskin korban bencana gempa bumi dan tsunami 2.Rehabilitasi sosial daerah kumuh bagi keluarga fakir miskin 3.Pendampingan sosial dan monev 4.Peningkatan kesejahteraan sosial keluarga korban bencana gempa bumi dan tsunami 5.Pemberdayaan 265 KK KAT	1.Usaha ekonomis produktif yang cepat menghasilkan bagi 5000 KK 2.Kebutuhan layanan sosial psikologis dan ekonomi keluarga bagi 343.580 KK 3.Kembalinya 265 KK KAT ke lokasi	1.Kab Bireun 2.Kab Aceh Timur 3.Kab Aceh Utara 4.Kota Banda Aceh 5.Kota Lhoksemawe 6.Kab Pidie 7.Kota Sabang 8.Kab Aceh Tengah 9.Kab Aceh Jaya 10.Kab Aceh Besar 11.Kab Simeuleu 12.Kab Aceh Selatan 13.Aceh Barat 14.Kab Aceh Barat Daya 15.Kab Nagan Raya 16.Kab Aceh Tenggara 17.Kab Aceh Tamiang 18.Kota Langsa 19.Kab Bener Meriah 20.Kab Nias	Bantuan usaha ekonomi kepada 62 KK sebesar @8.7 juta untuk usaha untuk usaha ekonomi	

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
	4.Penelitian dan pengembangan Kesejahteraan Sosial	Pelatihan,Pendampingan dan Penelitian Pelatihan aparatur pemerintah dan masyarakat	Memberikan pelatihan untuk membentuk tenaga-tenaga lokal sebagai calon tenaga pendampingan bagi sejumlah 900 orang yang memiliki kemampuan pendampingan kegiatan kesejahteraan sosial di NAD serta melakukan kegiatan penelitian permasalahan sosial di NAD	1.Provinsi NAD 2.Sumatera Utara	Penelitian identifiksasi kearifan lokal dlam membangun masyarakat kreatif, inovatif dan produktif	
	5.Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.Rehabilitasi yayasan/orsos/panti masyarakat di NAD 2.Pembangunan/Rehab perintis kemerdekaan di NAD a.Rehabilitasi panti sosial masyarakat b.Rehabilitasi TMP,MPN dan rumah perintis kemerdekaan	1.Rehabilitasi yayasan/orsos/panti masyarakat yang mengalami rusak sebanyak 34 buah 2.Pemugaran 5 buah TMP, 3 buah MPN,dan 9 rumah perintis kemerdekaan	1.Kab Aceh Besar 2.Kota Banda Aceh 3.Kab Pidie 4.kab Bireun 5.Kab Aceh Utara 6.Kab Aceh Tamiang 7.Kab Aceh Jaya 8.Kab Aceh Barat Daya 9.Kota Lhoksemawe 10.Kab Nias 11.Kab Nias Selatan		
6. KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA						
	1.Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik	Pendataan Lengkap Penduduk NAD 1.*Workshop* instruktur nasional 2.Pelatihan instruktur daerah dan petugas pewawancara 3.Penggandaan kuesioner 4.Pelaksanaan pendataan penduduk 5.Pengolahan data 6.Penyusunan hasil laporan	Terselenggaranya penda taan penduduk lengkap di wilayah NAD setelah bencana tsunami	Provinsi NAD sampai tingkat kecamatan	Program pendataan penduduk dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga Badan Pusat Statistik	NAD dan Nias

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
	2.Pelayanan Keluarga Berencana	Pelayanan Keluarga Berencana 1.Penguatan institusi pelayanan KB a.Pembersihan ruangan dan lingkungan (gedung,peralatan dan sarana gedung) b.Penyediaan ruang penginapan bagi petugas posko/relawan/pegawai BKKBN provinsi,anak-anak/pengungsi c.Penyiapan ruang dan sarana operasional pelayanan KB/kesehatan,dan ruang operasional pelayanan konseling termasuk sarananya d.Pembangunan ruang penyimpanan alkon (Pembuatan gedung sementara) 2.Membangun pusat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi meliputi : a.Rehabilitasi ruang kantor pengelola program KB di Kab/kota b.Pelayanan program KB/KR terutama melalui pelayanan tim KB/KR terutama melalui pelayanan konseling c.Pembinaan keluarga balita dan remaja serta usaha pembinaan usaha ekonomi produktif keluarga	1.Penguatan institusi pelayanan KB dan kesehatan meliputi : a.Terselesaikannya Pembersihan ruangan dan, lingkungan (gedung peralatan dan sarana gedung) b.Terselesaikannya penyediaan ruang penginapan bagi petugas posko/relawan/pegawai BKKBN provinsi,anak-anak/pengungsi c.Siapnya ruangan dan sarana operasional pelayanan KB/kesehatan,dan ruang operasional pelayanan konseling termasuk sarananya d.Dibangunnya ruang penyimpanan alkon (Pembuatan gedung sementara) 2.Membangun pusat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi meliputi : a.Terselenggaranya rehabilitasi ruang kantor pengelola program KB di Kab/kota b.Terselenggaranya pelayanan program KB/ KR terutama melalui pelayanan tim KB/KR terutama melalui pelayanan konseling	1.Provinsi NAD 2.Kab Nias 3.Sumut	1.Sosialisasi dan orientasi peran pembinaan kemandirian IMP 2.Pelatihan pelaksanaan peralatan KB 3.Peningkatan kapasitas tenaga pendamping/PLKB 4.Updating data keluarga 5.Workshop bagi pengelola KB mulai kecamatan sampai provinsi 5.Pengawasan operasional terpadu, monitoring dan pemutakhiran dana dan penelaahan sistem pengawasan 6.Monitoring dan evaluasi program	

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
		d.Pelayanan KIE dan pendataan Keluarga	c.Terlaksananya pembinaan keluarga balita dan remaja serta usaha pembinaan usaha ekonomi produktif keluarga d.Terlaksananya pelayanan KIE & pendataan keluarga			
		3.Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi meliputi : a.Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan KB/KR	3.Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi meliputi : a.Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan KB/KR di klinik KB			
7. BUDAYA						
	1.Pengembangan Nilai Budaya	Pemulihan Kembali Jati diri dan Aset Budaya Masyarakat Pemulihan kembali jati diri dan aset budaya masyarakat	1.Menguatnya kebanggaan dan ikatan sosial masyarakat Aceh dan Nias-Sumut 2.Terbangunnya kembali semangat dan partisipasi masyarakat Aceh dan Nias-sumut 3.Terlestarikannya aset-aset budaya aceh dan Nias-Sumut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbasis adat dan budaya lokal	23 Kab/Kota	Kongres kebudayaan Aceh yang diikuti oleh 321 peserta yang terdiri dari LSM, birokrasi, akademisi,politisi dan budayawan Aceh	Banda Aceh
	2.Pengelolaan Keragaman budaya	Rehabilitasi sarana, Prasarana,tinggalan purbakala, sejarah, dan Potensi Budaya	1.Teridentifikasinya kondisi terakhir tingalan purbakala dan sejarah (situs, bangunan, dan cagar budaya) dan museum di wilayah yang terkena bencana	Nias Selatan	1.Pembangunan kantor MA 2.Pembangunan pagar kantor BKSNT 3.Rehabilitasi gedung BKSNT	Banda Aceh

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
		Rehabilitasi sarana, prasarana tinggalan purbakala, sejarah, dan potensi budaya	2.Terpeliharanya/lestarinya peninggalan purbakala dan sejarah serta museum yang terkena bencana		4.Rehabilitasi rumah TjutNyak Dhien 5.Reovasi makam Malikul Saleh 6.Renovasi makam Ratu Nahrisyiah 7.Renovasi makam Tgk Sidi Abdullah	
	3.Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pembangunan Kembali Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA) Kegiatan pemulihan seluruh potensi industri	1.Terbangunnya gedung pusat dokumentasi dan informasi Aceh 2.Tersedianya kembali dokumen dan informasi sumber sejarah dan kebudayaan Aceh	Kota Banda Aceh	1.Pembangunan kantor PDIA 2.Rehabilitasi museum BP3	Banda Aceh
8.PEMUDA DAN OLAHRAGA						
	1.Pembinaan dan Peningkatan Partisi pasi Pemuda	Pemulihan Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi pemuda diberbagai bidang pembangunan 1.Penumbuhan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) 2.Penumbuhan Kelompok Pemuda Sebaya (KPS) 3.Penumbuhan {Pertukatan Pemuda Antar Propinsi (PPAP) 4. Monitoring dan evaluasi manajemen life skills 5.Pembinaan kewirausahaan pemuda 6.Bantuan untuk lembaga Kepemudaan 7.Penempatan SP3	1.Tumbuhnya KUPP 2.Terbentuk dan terbinanya KPS 3.Tersedianya sentra pemberdayaan pemuda 4.Terbinanya PPAP 5.Tersedianya laporan monev peserta manajemen life skill 6.Meningkatnya wirusahawan pemuda yang siap bekerja 7.Tersedianya wadah pengembangan kepemudaan 8.Percepatan pemulihan pembangunan di pedesaan	1.Kota Banda Aceh 2.Kab Aceh Besar 3.Kab Aceh Besar 4.Kab Aceh Utara 5.Kota Sabang 6.Kab Pidie 7.Kab Aceh Timur 8.Kota Langsa 9.Kab Aceh Jaya 10.Kab Bireun 11.Kab Aceh Tamiang	Pembibitan atlet SMU Plus, PPLP dan Usia Dini	Banda Aceh

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
	2.Pembinaan dan Pemasyarakatan	Pemulihan kembali aktivitas olahraga di semua lapisan masyarakat 1.Peningkatan mutu SDM keolahragaan daerah 2.Inventarisasi/pendataan olahraga daerah 3.Pembinaan akademik atlet pelajar (PPLP) 4.Persiapan atlet lokal untuk mengikuti festival olah raga tradisional tingkat nasional,yang diawali dengan kegiatan seleksi antar kab/kota 5.Pembinaan klub olahraga pelajar (Kecamatan) 6.Pemberdayaan klub olah raga mahasiswa dan pelajar berbakat 7.Pemberdayaan organisasi olahraga pelajar dan organisasi olahraga masyarakat 8.Training camp atlet pelajar 9.Pembinaan klub olahraga masyarakat 10.Pekan olaharaga pelajar cacat 11.Pekan olahraga pedesaan 12.Peringatan hari olahraga nasional	1.Terlatihnya instruktur olahraga 2.Tersedianya data kondisi atlet,pelatih,sarana prasarana,dan sumber daya olahraga 3.Terbinanya secara akademik para atlet pelajar Pusat Pendidikan & Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) 4.Terbinanya atlet lokal untuk mengikuti festival olahraga tradisional 5.Tersedanya klub olah raga pelajar 6.Terselenggaranya kompetisi antarklub olah raga pelajar 7.Terlatihnya atlet mahasiswa dan pelajar berbakat 8.Terbinanya wadah olah raga pelajar (BAPOPSI) dan masyarakat (FOMI) 9.Terbinanya klub olah raga masyarakat di kab/kota 10.Terbinanya pelajar cacat dalam persiapan mengikuti POPCANAS 11.Terselenggaranya peringatan HAORNAS di setiap kab/kota	1.Kota Banda Aceh 2.Kab Aceh Besar 3.Kab Aceh Besar 4.Kab Aceh Utara 5.Kota Sabang 6.Kab Pidie 7.Kab Aceh Timur 8.Kota Langsa 9.Kab Aceh Jaya 10.Kab Bireun 11.Kab Aceh Tamiang	Pelaksanaan pekan olah raga Daerah	Banda Aceh

N0	RENCANA INDUK				PELAKSANAAN BRR tahun 2005/2006	
	Program	Kegiatan/ Cakupan Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi
	3.Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga Rehabilitasi GOR KONI, asrama PPLP,GSG Tanjung Harapan,gedung PERBASI, lapangan bola kaki,lapangan bola volli,lapangan tenis,lapangan atletik,dan kolam renang termasuk perlengkapan olahraga	1.Terbangunnya kembali gelanggang olahraga (GOR) 2.Berfungsinya kembali asrama pusat PPLP 3.Berfungsinya kembali gedung serba guna (GSG),olahraga,bola basket,bola kaki, bola volli,tennis lapangan,atletik,dan kolam renang	1.Kota Banda Aceh 2.Kab Pidie 3.Kab Aceh Barat 4.Kab Aceh Jaya	1.Rehabilitasi kolam renar 2. Rehabilitasi stadion harapan Bangsa 3. Pembangunan lapangan tenis 4. Pembangunan lapangan bola kaki 5. Pembangunan lapangan bola volly 6.Pembangunan lapangan basket	Banda Aceh

PERSANDINGAN ANTARA RENCANA INDUK DENGAN RENSTRA BRR BIDANG PEMULIHAN EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			RENCANA BRR (RENSTRA)	
Program	Kegiatan	Lokasi/Sasaran	Program	Kegiatan
I. Kelautan dan Perikanan				
A. Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana dan Bantuan Privat	1. Bantuan pengolahan ikan skala kecil & KUB	21 kab/kota	A. Pemulihan Fasilitas Pelayanan Masyarakat	1. Pemulihan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
	2. Bantuan alat tangkap (pancing/jaring)	21 kab/kota		2. Pemulihan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
	3. Bantuan armada tangkap	21 kab/kota		
	4. Rehabilitasi tambak, bantuan pompa air dan modal usaha	Aceh Selatan Simeulue Langsa Aceh Timur Aceh Utara Sabang Aceh Tamiang Aceh Barat Aceh Besar Bireuen Pidie Banda Aceh Lhokseumawe		
	5. Rehabilitasi tambak, bantuan KJA dan modal usaha	Nias		

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			RENCANA BRR (RENSTRA)	
Program	Kegiatan	Lokasi/Sasaran	Program	Kegiatan
B. Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Publik	1. Pelabuhan pendaratan ikan (PPI)	Lampulo, Banda Aceh		
		Lambada, Aceh Besar		
	2. Pelabuhan perikanan	Kuala Tapu, Nagan Raya		
		Sigli		
		Peudada, Bireuen		
		Lhoknga, Aceh Besar		
		Ule Lhee, Banda Aceh		
		Meuredue, Pidie		
		Meulaboh, Aceh Barat		
		Lhokseumawe		
		Calang, Aceh Jaya		
		Seuriget, Langsa		
		Pulau Nias		
	3. Masterplan & DD pertambakan	NAD		
	4. DD, rehab saluran tangkap dan pembinaan budidaya	Aceh Selatan		
		Langsa		
		Aceh Timur		
		Aceh Utara		
		Sabang		
		Aceh Tamiang		
		Aceh Barat		
		Aceh Besar		
		Bireuen		
		Pidie		
		Lhokseumawe		
	5. Pembinaan dan pembangunan BBIP	Simeulue		
	6. BB Ule Lhee dan Loka Ujung Batee	Banda Aceh		

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			RENCANA BRR (RENSTRA)	
Program	Kegiatan	Lokasi/Sasaran	Program	Kegiatan
	7. BPIP	Nias		
	8. Pembangunan lab. uji mutu dan pengolahan ikan	Lampulo, Banda Aceh		
	9. Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong dan pengadaan kapal latih/riset	Banda Aceh		
	10. Pos karantina ikan Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh		
	11. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	NAD dan SUMUT		
II. Pertanian				
A. Perbaikan & pembangunan kembali prasarana umum	1. Rehabilitasi/pembangunan saluran air & irigasi tersier & kuarter (menurut skim & tipe) dan rehabilitasi struktur lahan	13 Kab/kota (Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Simeulue dan Nias)	A. Pemulihan Fasilitas Pelayanan Masyarakat	3. Pemulihan sarana irigasi
	2. Rehabilitasi jalan usaha tani/ produksi			4. Pemulihan pusat penjualan hasil produksi
	3. Pembangunan unit pembibitan			5. Pengembangan dan Peningkatan kualitas
	4. Pembangunan fasilitas pemasaran hasil pertanian			hasil produksi
	5. Pembangunan pos kesehatan hewan (Poskeswan)			6. Pemulihan fasilitas pendukung pertanian dan budidaya perairan
	6. Penelitian & pengembangan teknologi tepat guna			
	7. Rehabilitasi/pembangunan prasarana & sarana kerja pertanian (kantor dinas, karantina, balai penyuluhan, balai diklat pertanian dan laboratorium)			

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			RENCANA BRR (RENSTRA)	
Program	Kegiatan	Lokasi/Sasaran	Program	Kegiatan
B. Pemulihan usaha ekonomi masyarakat dan partisipasi swasta	1. Bantuan sarana pertanian dalam rangka reinisiasi produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan 2. Ameliorasi tanah 3. Pengembangan pertanian terpadu 4. Penyediaan modal kerja untuk usaha pertanian (hulu-onfarm-hilir) 5. Bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 6. Bantuan kios sarana produksi pertanian 7. Bantuan bimbingan, pelatihan, pendampingan dan pembinaan	13 Kab/kota (Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Utara dan Simeulue)		
III. Pariwisata				
A. Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana & Prasarana di Kawasan serta Objek & Daya Tarik Wisata (ODTW)	1. Rehabilitasi & rekonstruksi sarana & prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana 2. Pengadaan sarana angkutan wisata darat	Sabang Banda Aceh Aceh Besar Aceh Tenggara Singkil Sinabang Aceh B.Daya G.Sitoli - Nias Nias Selatan Banda Aceh		

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			RENCANA BRR (RENSTRA)	
Program	Kegiatan	Lokasi/Sasaran	Program	Kegiatan
IV. Perdagangan				
A. Masa Tanggap Darurat : Tenda Pasar Darurat	Pemasangan tenda pasar darurat (termasuk ongkos angkut dan pasang)	Banda Aceh, Pidie, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Jaya, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Barat, Nagan Raya, Sinabang, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Tengah, Bener Meriah, Sabang, Nias		
B. Rehabilitasi & Rekonstruksi : Pasar Tradisional Permanen	Pembangunan kembali pasar tradisional permanen	Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Simeulue, Aceh Tamiang, Sabang, Nias		
C. Pasar Grosir/Induk	Pembangunan pasar grosir/induk	NAD dan SUMUT		
D. Pergudangan	Pembangunan fasilitas pergudangan	NAD dan SUMUT		
E. Kemetrologian	1. Pengadaan alat laboratorium dan peralatan kantor 2. Metrologi	NAD dan SUMUT		
F. Koordinasi Posko	Posko koordinasi sektor perdagangan	Pusat NAD		

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			RENCANA BRR (RENSTRA)	
Program	Kegiatan	Lokasi/Sasaran	Program	Kegiatan
V. Perindustrian				
A. Rekonstruksi Sarana Laboratorium dan Sarana Baristan	1. Pembangunan gedung kantor, pelatihan dan laboratorium 2. Pengadaan dan perbaikan alat laboratorium 3. Pengadaan perlengkapan kantor 4. Kegiatan Operasional Pendukung	Banda Aceh		
B. Rekonstruksi Sarana Laboratorium dan Sarana SMTI	1. Pembersihan 2. Alat laboratorium 3. Pengadaan peralatan 4. Pengadaan bahan kimia	Banda Aceh		
VI. Tenaga Kerja				
A. Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Publik	1. Pembangunan balai latihan kerja bidang konstruksi 2. Pembangunan kantor loka latihan kerja usaha kecil & menengah bidang wirausaha 3. Pembangunan balai latihan kerja bidang nelayan	Lhokseumawe Banda Aceh Meulaboh Langsa Sabang	B. Pemulihan Pendapatan Masyarakat	1. Penyediaan lapangan kerja 2. Pelatihan
B. Perluasan & Pengembangan Kesempatan Kerja	1. Padat karya produktif 2. Pengerahan TKS 3. Mengatasi pengangguran 4. Informasi bursa kerja 5. Pemetaan tenaga kerja	NAD		
C. Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelatihan masyarakat untuk kejuruan 2. Latihan ketrampilan untuk tenaga kerja			

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			RENCANA BRR (RENSTRA)	
Program	Kegiatan	Lokasi/Sasaran	Program	Kegiatan
D. Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	1. Penyusunan peta permasalahan HI 2. Bimbingan motivasi, disiplin dan etos kerja pegawai perantara & staf HI & pelaku HI 3. Pengawasan & pemantauan dalam rangka mencegah eksploitasi anak 4. Pemetaan objek pengawasan 5. Penyelesaian status hubungan kerja dan hak normatif tenaga kerja pasca gempa & 6. Penanganan tenaga kerja perempuan pasca gempa & tsunami 7. Pelatihan calon pengawas ketenagakerjaan			
E. Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	1. Pengembangan sarana & prasarana HI di 9 kab 2. Pemeriksaan kesahatan fisik dan mental kerja 3. Memfasilitasi pembentukan employee & employer assistance sebagai sarana konseling bagi pekerja & pengusaha 4. Pelatihan occupational therapy bagi dokter & paramedis 5. Pembuatan pedoman penanganan pelang-garan norma kerja perempuan dan anak 6. Pembelian alat uji keselamatan & kesehatan kerja			
VII. Koperasi & UKM				
A. Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana Publik	1. Perbaikan fasilitasi kios UKM 2. Perbaikan gerobak dorong UKM 3. Pendataan profil koperasi 4. Pendataan profil UKM 5. Renovasi 8 pasar tradisional	Banda Aceh Aceh Besar	C. Pemberian Bantuan kepada Masyarakat untuk Memulihkan untuk Memulihkan Sarana Produksi	1. Pemberian bantuan yg berkaitan dgn tanah yg tdk dpt digunakan sbg tempat permukiman & bantuan perumahan, sistem insentif kredit & bantuan teknis utk memperoleh akses kpd sumber daya produktif

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			RENCANA BRR (RENSTRA)	
Program	Kegiatan	Lokasi/Sasaran	Program	Kegiatan
	6. Pembangunan kembali pasar bina usaha (pasar grosir)	Aceh Barat		
	7. Pembangunan kembali pasar larang sawi (pasar eceran)			
	8. Pembangunan kembali pasar 2 ikan			2. Pemberian bantuan Rp. 5 - 15 juta sbg pemulihan sarana atau utk melakukan kegiatan usaha dana pendamping (matching fund)
	9. Pembangunan kembali TPI			
	10. Perbaikan sarana & prasarana pasar	Aceh Jaya		
		Simeulue		
		Pidie		
		Bireuen		
		Aceh Timur		3. Pemberian hibah langsung, maksimal Rp. 2 juta
		Aceh Tamiang		
	11. Pembangunan sarana & prasarana yang hancur/hanyut	Aceh Utara		
	12. Rehabilitasi/pembangunan pasar tradisional	Nagan Raya		
		Sabang, Langsa, Bener Meriah		
	13. Pembangunan sarana usaha pasar darurat	Aceh Selatan		
		Aceh Tengah		
	14. Perbaikan/renovasi sarana & prasarana pasar ikan yang dikelola koperasi	Aceh Barat Daya		
	15. Pembangunan 3 pasar	Aceh Singkil		
	16. Rehabilitasi/renovasi pasar	Nias		

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD 2005/2006 BIDANG PEMULIHAN EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BRR		
Program	Kegiatan	Lokasi/ Sasaran	Program	Kegiatan	Lokasi
I. Kelautan dan Perikanan			Satker BRR-Kelautan dan Perikanan Provinsi NAD		
A. Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana dan Bantuan Privat	1. Bantuan pengolahan ikan skala kecil & KUB	21 kab/kota	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	1. Administrasi, Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan/PPK ADB, Pengadaan Kendaraan Roda-2	Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simelue, Aceh Singkil, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa
	2. Bantuan alat tangkap (pancing/jaring)	21 kab/kota			
	3. Bantuan armada tangkap	21 kab/kota		2 Pengembangan Mutu Perikanan Usaha Kecil	
	4. Rehabilitasi tambak, bantuan pompa air dan modal usaha	Aceh Selatan Simeulue Langsa Aceh Timur Aceh Utara Sabang Aceh Tamiang Aceh Barat Aceh Besar Bireuen Pidie Banda Aceh Lhokseumawe		3. Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (Sarana Penangkapan berupa alat tangkap dan armada tangkap, Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Pengadaan Kendaraan Roda	Provinsi NAD Banda Aceh, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simelue, Aceh Singkil, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa
	5. Rehabilitasi tambak, bantuan KJA dan modal usaha	Nias			

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BRR		
Program	Kegiatan	Lokasi/ Sasaran	Program	Kegiatan	Lokasi
B. Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Publik	1. Pelabuhan pendaratan ikan (PPI)	Lampulo, Banda Aceh			
		Lambada, Aceh Besar		4. Pengembangan Sarana Perikanan Budidaya (Rehab Tambak dan Agro input)	Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya,
	2. Pelabuhan perikanan	Kuala Tapu, Nagan Raya			
		Sigli			
		Peudada, Bireuen			
		Lhoknga, Aceh Besar		5. Pengembangan Prasarana Perikanan (Pembangunan/rehabilitasi PPI, DED	Aceh Utara, Lhokseumawe dan Aceh Selatan
		Ule Lhee, Banda Aceh			
		Meuredue, Pidie			
		Meulaboh, Aceh Barat			
		Lhokseumawe		6. Penyusunan Rencana Teknis (belanja jasa konsultan/tenaga ahli)	Banda Aceh, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Singkil, Sabang, Lhokseumawe
		Calang, Aceh Jaya			
		Seuriget, Langsa			
		Pulau Nias			
	3. Masterplan & DD pertambakan	NAD			
	4. DD, rehab saluran tangkap dan	Aceh Selatan			
		Langsa			
		Aceh Timur			
		Aceh Utara			
		Sabang			

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BRR		
Program	Kegiatan	Lokasi/ Sasaran	Program	Kegiatan	Lokasi
		Aceh Tamiang Aceh Barat Aceh Besar Bireuen Pidie Lhokseumawe			
	5. Pembinaan dan pembangunan BBIP	Simeulue			
	6. BB Ule Lhee dan Loka Ujung Batee	Banda Aceh			
	7. BPIP	Nias			
	8. Pembangunan lab. uji mutu dan pengolahan ikan	Lampulo, Banda Aceh			
	9. Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong dan pengadaan kapal latih/riset	Banda Aceh			
	10. Pos karantina ikan Sultan Iskandar Muda	Banda Aceh			
	11. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	NAD dan SUMUT			

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BRR		
Program	Kegiatan	Lokasi/ Sasaran	Program	Kegiatan	Lokasi
II. Pertanian			Satker BRR-Produksi Tanaman Pangan Provinsi NAD		
A. Perbaikan & pembangunan kembali prasarana umum	1. Rehabilitasi/pembangunan saluran air & irigasi tersier & kuarter (menurut skim & tipe) dan rehabilitasi struktur lahan	13 Kab/kota (Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh	Tahun 2006	1. Pemulihan lahan sawah 5.000 Ha	Aceh Besar, Pidie
				2. Optimalisasi lahan tegalan untuk palawija seluas 1.200 Ha	Bireun, Aceh Utara, Aceh timur
	2. Rehabilitasi jalan usaha tani/ produksi	Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya,		3. Bantuan bibit tanaman buah2an untuk rumah bangun baru akibat tsunami sebanyak 13.000 KK	Aceh barat,Simeulue, Aceh Jaya, Nagan Raya
	3. Pembangunan unit pembibitan /pembenihan	Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh		4. Cetak sawah 1.850 Ha	Abdya, Aceh Selatan
	4. Pembangunan fasilitas pemasaran hasil pertanian	Timur, Simeulue dan Nias)			
	5. Pembangunan pos kesehatan hewan (Poskeswan)			5. Bantuan Saprodi (benih, pupuk dan obat-obatan) untuk Cabe, kedele, jagung &bawang merah seluas 5.700 Ha	Aceh Singkil, Banda Aceh
	6. Penelitian & pengembangan teknologi tepat guna				
	7. Rehabilitasi/pembangunan prasarana & sarana kerja pertanian (kantor dinas, karantina, balai penyuluhan, balai diklat pertanian dan laboratorium)			6. Bantuan Alat dan mesin pertanian (traktor besar, hand traktor, perontok padi, jagung, kacang tanah, dan kedele,dan alsintan lainnya) sebanyak 33 unit	

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BRR		
Program	Kegiatan	Lokasi/Sasaran	Program	Kegiatan	Lokasi
B. Pemulihan usaha ekonomi masyarakat dan partisipasi swasta	1. Bantuan sarana pertanian dalam rangka reinisiasi produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	13 Kab/kota (Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh	Tahun 2005	1. Rehab Lahan Sawah seluas 6.887,18 Ha	Aceh Besar, Pidie
	2. Ameliorasi tanah	Jaya, Nagan Raya,		2. tersalurnya modal usahatani pola BLM ke rek. kelompoktani dgn spesimen bersama (ketua kelompok dan Kadistan kelompok dan Kadistan Kab/Kota) sebesar 'Rp. 10.885.217.085	Bireun, Aceh Utara
	3. Pengembangan pertanian terpadu	Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Barat			
	4. Penyediaan modal kerja untuk usaha pertanian (hulu-onfarm-hilir)	Daya, Aceh Utara dan Simeulue)			
	5. Bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian			3. Terlaksananya penenaman padi dilahan rusak akibat tsunami yg telah direhab seluas 6.560 Ha.	Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat
	6. Bantuan kios sarana produksi pertanian				
	7. Bantuan bimbingan, pelatihan, pendampingan dan pembinaan			4. Terwujudnya pemanenan Padi dilahan tersebut seluas 2.842 Ha dgn kisaran produksi wilayah timur 4 s/d 10,4 ton GKP	
				5. Terwujudnya pemanenan Padi dilahan tersebut seluas 2.432 Ha dgn kisaran produksi wilayah Barat 2 s/d 8 ton GKP	
				6. Pengembangan lahan kebun/Tegalan untuk pengungsi dan korban tsunami seluas 1.000 Ha dengan jumlah dana modal sebesar Rp. 8.179.610.000,-	

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BRR		
Program	Kegiatan	Lokasi/ Sasaran	Program	Kegiatan	Lokasi
				7. Terlaksananya kegiatan percepatan dari dana revisi DIPA-L untuk daerah dampak tsunami seluas 7.630,38 Ha yang meliputi jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau dan padi dengan jumlah modal usaha tani Rp. 13.805.774.400,-	
				8. Tertampung tenaga kerja petani 33.619 KK	
				9. Tertampung tenaga kerja pelaksanaan rehab/rekon dalam bentuk upah kerja sebanyak 312.981 HOK dengan Upah kerja 50.000/hari	
				10. Tertanggulanginya sebagian kebutuhan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi	
			Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan	1. Administrasi Umum	
				2. Pelatihan Penyuluh Pendamping (37 orang x 3 Ha) dan Petugas Hama Penyakit juga Magang Petugas BBI Padi dan hortikultura ke sumber tehnologi	
				3. Pemulihan sawah dampak tsunami : 5000 Ha	
				4. Pengadaan Peralatan Laboratorium Lapangan	10 Kabupaten
				5. Pengawasan dan Pembangunan Fisik seperti Gudang RMU, Rumah Pompa, Balai Pertemuan Petani	Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh barat, Simeulue, Bireun, Aceh barat daya, Aceh Jaya, Nagan Raya

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BRR		
Program	Kegiatan	Lokasi/ Sasaran	Program	Kegiatan	Lokasi
				6. Bantuan Modal sarana produksi dan alsintan pola BLM, material jaringan air, material jalan usaha tani dan upah kerja pola padat karya seluas 5000 Ha	Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh barat, Simeulue, Bireun, Aceh barat daya, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Singkil, Kota Banda Aceh
				7. Optimalisasi lahan tegalan untuk palawija dan hortikultura seluas 1.200 Ha	Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh barat, Simeulue, Bireun, Aceh barat daya, Aceh Jaya, Nagan Raya
				8. Bantuan modal sarana produksi dan alsintan pola BLM, material jaringan air, material pagar keliling, material jalan usaha tani dan upah kerja pola padat karya seluas 1.200 Ha	Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh barat, Simeulue, Bireun, Aceh barat daya, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Singkil, Kota Banda Aceh
				9. Penghijauan tanaman buah-buahan untuk pekarangan dampak tsunami : 26.000 KK	Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh barat, Simeulue, Bireun, Aceh barat daya, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Singkil, Kota Banda Aceh
				10. Pembangunan Kantor Dinas Pertanian Simeulue seluas 350 M^2	Simeulue
				11. Pembangunan Kantor Karantina Tumbuhan seluas 400 M^2	
				12. Rehabilitasi Gedung Lab.Hama Penyakit TPH Pulo IE Nagan Raya seluas 250^2	Nagan Raya
				13. Pembangunan Gedung Alsintan NAD seluas 400 M^2, pagar keliling 1.000 M^2, Saluran drainase 300 M	

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BRR		
Program	Kegiatan	Lokasi/ Sasaran	Program	Kegiatan	Lokasi
				14. Lining Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh barat, Simeulue, Bireun, Aceh barat daya, Aceh Jaya, Nagan Raya
				15. Penanggulangan Hama/Penyakit Tanaman, Pengadaan Mebeulair, Pengadaan Alat Pertanian	Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh barat, Simeulue, Bireun, Aceh barat daya, Aceh Jaya, Nagan Raya
				16. Pengadaan Perlengkapan sarana gedung berupa peralatan dan mesin, mebeulair, filing cabinet	Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh barat, Simeulue, Bireun, Aceh barat daya, Aceh Jaya, Nagan Raya
				17. Pengadaan Alat Pengolah Data, Pengadaan Kendaraan, Pencetakan Sawah, Perbanyakan Bibit/Benih	Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh barat, Simeulue, Bireun, Aceh barat daya, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Singkil, Kota Banda Aceh
				18. Pengembangan Sarana Usaha Pertanian pada Balai Benih Induk (BBI Padi Keumala, BBI Hortikultura Saree, UPT Balai Pembenihan, BPTP (Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian) baik Pembangunan Gedung/Rehab, Kelengkapan dan Mobiler Kantor	
				19. Rehabilitasi sawah seluas 1.000 Ha	
				19. Pengadaan sarana produksi pertanian baik benih, pupuk KCl, pupuk SP 36, Pupuk Urea, Pestisida :	kacang, kedelai (Pidie), jagung (Aceh Utara, Aceh Timur), cabe (Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie), bawang merah (Pidie, Aceh Barat daya)

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BRR		
Program	Kegiatan	Lokasi/ Sasaran	Program	Kegiatan	Lokasi
				20. Manajemen Teknis : Belanja Uang Honor Tidak tetap	
III. Pariwisata			Satker BRR-Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Provinsi NAD		
A. Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana & Prasarana di Kawasan serta Objek & Daya Tarik Wisata (ODTW)	1. Rehabilitasi & rekonstruksi sarana & prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana	Sabang Banda Aceh Aceh Besar Aceh Tenggara Singkil Sinabang Aceh B.Daya G.Sitoli - Nias Nias Selatan	Pendidikan dan pelatihan teknis	1. Pelatihan bagi pemandu wisata, Pelatihan Pemandu Wisata Selam, Pelatihan Aparatur wisata sebanyak 1 paket	Banda Aceh
			Promosi Wisata	1. Pertunjukan dan eksibisi seni budaya dalam negeri	Jakarta
				2. ASEAN Diving Festival	Kota Sabang
				3. Pembentukan Family Tourism	Kota Sabang
			Pengembangan sarana pariwisata dan perbaikan site plan wisata	1. Pembukaan jalur wisata alam Sabang-Puket-Langkawi sebanyak 1 paket	Banda Aceh
	2. Pengadaan sarana angkutan wisata darat	Banda Aceh		2. Perbaikan Site Plan sebanyak 3 paket, Pembukaan jalur wisata sungai sebanyak 1 paket	Banda Aceh
			Promosi wisata berbasis advertisement	1. Jurnalis dan travel writers	Sabang dan Aceh Besar
			Pemugaran Kawasan Wisata Pulau Sinabang	1. Boat wisata, compressor diving, pengadaan peralatan diving, diving shop, pengadaan dan pembuatan Taman Wisata Lasikin	Sinabang
			Pemugaran Kawasan Wisata Pulau Banyak	1. Pengadaan peralatan selam, pengadaan compressor selam, pondok wisata, restorasi wisata, musholla, MCK	Aceh Singkil
			Pemugaran Kawasan Wisata Ujung Batee	1. Restorasi dan Taman Wisata, musholla, MCK, pengadaan air	Aceh Besar
			Pemugaran Kawasan wisata Alami Lampuuk	1. Restorasi dan Taman Wisata, musholla, MCK, pengadaan air bersih	Aceh Besar

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BRR		
Program	Kegiatan	Lokasi/ Sasaran	Program	Kegiatan	Lokasi
			Peningkatan sarana/prasarana objek wisata	1. Jalan setapak, pembangunan terminal wisata, survey dan identifikasi potensi wisata taman laut Sabang, Pembuatan film CD pariwisata Kota Sabang, pengadaan air bersih di kawasan wisata Iboih/Gapang, Pembuatan dermaga kayu tempat wisata mancing masing-masing sebanyak 1 paket Pembuatan dan Pelaksanaan Outlet Wisata Bahari sebanyak 1 paket	Kota Sabang Aceh Besar
IV. Perdagangan			Satker BRR-Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Provinsi NAD		
A. Masa Tanggap Darurat : Tenda Pasar Darurat	Pemasangan tenda pasar darurat (termasuk ongkos angkut dan pasang)	Banda Aceh, Pidie, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Jaya, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Barat, Nagan Raya, Sinabang, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Tengah, Bener Meriah, Sabang, Nias	Pemberian bantuan modal bergulir bagi usaha kecil/pedagang pasar	1. Pemberian bantuan modal bergulir bagi usaha kecil/pedagang pasar masing-masing sebanyak 30 unit di Aceh Utara dan Lhokseumawe 2. Pemberian bantuan modal bergulir dan investasi pedagang pasar sebanyak 11 unit di Pidie, 6 unit di Aceh Utara , 6 unit di Bireun dan 6 unit di Lhokseumawe	

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BRR		
Program	Kegiatan	Lokasi/ Sasaran	Program	Kegiatan	Lokasi
B. Rehabilitasi & Rekonstruksi : Pasar Tradisional Permanen	Pembangunan kembali pasar tradisional permanen	Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Simeulue, Aceh Tamiang, Sabang, Nias	Pembangunan Pasar Tradisional di Provinsi NAD	1. Pembangunan pasar tradisional	4 unit di Aceh Besar, 1 unit di Pidie, 3 unit di Bireun, 4 unit di Aceh Utara, 2 unit di Lhokseumawe, 1 unit di Aceh Timur, 1 unit di Aceh tamiang, 1 unit di Bener Meriah, 1 unit di Aceh tengah, 1 unit di gayo Lues, 4 unit di Aceh Jaya, 3 unti di Aceh barat, 1 unit di Nagan, 1 unit di ABDYA, 3 unit di Aceh selatan, 2 unit di Aceh Singkil, 1 unit di Aceh Tenggara (total 34 unit)
C. Pasar Grosir/Induk	Pembangunan pasar grosir/induk	NAD dan SUMUT	Pembangunan Pasar Grosir	1. Pembangunan 1 unit pasar grosir	Bireun
D. Pergudangan	Pembangunan fasilitas pergudangan	NAD dan SUMUT			
E. Kemetrologian	1. Pengadaan alat laboratorium dan peralatan kantor 2. Metrologi	NAD dan SUMUT			
F. Koordinasi Posko	Posko koordinasi sektor perdagangan	Pusat NAD	Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan	1. Administrasi Umum (Belanja Uang Honor Tidak Tetap, belanja inventaris kantor, belanja barang operasional lainnya, belanja inventaris kantor, belanja bahan, belanja sewa, belanja jasa lainnya, belanja perjalanan biasa, belanja modal peralatan dan mesin	Banda Aceh

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BRR		
Program	Kegiatan	Lokasi/ Sasaran	Program	Kegiatan	Lokasi
			Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	1. Belanja Barang Operasional Lainnya	21 Kab/Kota
				2. Bantuan Modal Bergulir Bagi Usaha Kecil/Pedagang Pasar	21 Kab/Kota
			Bantuan Ekonomi Produktif	1. Bantuan Modal Bergulir dan Investasi Pedagang Pasar	6 unit di Aceh Besar, 11 unit di Pidie, 6 unit di Aceh Utara, 6 unit di Aceh Timur, 3 unit di Aceh Selatan, 9 unit di Aceh Barat, 3 unit di Aceh tengah, 3 unit di Aceh tenggara, 6 unit di Simeulue, 3 unit di Aceh Singkil, 6 unit di Bireuen, 3 unit di Aceh Barat Daya, 3 unit di Gayo Lues, 9 unit di Aceh jaya, 3 unit di Nagan Raya, 3 unit di Aceh Tamiang , 3 unit di Bener Meriah, 10 unit di banda Aceh, 3 unit di Sabang, 3 unit di Langsa, 6 unit di Lhokseumawe
				2. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk operasional kemetrologian (2 unit)	21 Kab/Kota
			Peningkatan dan Pengembangan kemetrologian	1. Penyempurnaan pelayanan operasional kemetrologian	21 Kab/Kota

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BRR		
Program	Kegiatan	Lokasi/ Sasaran	Program	Kegiatan	Lokasi
V. Perindustrian			Satker BRR-Industri dan Pertambangan Provinsi NAD		
A. Rekonstruksi Sarana Laboratorium dan Sarana Baristan	1. Pembangunan gedung kantor, pelatihan dan laboratorium 2. Pengadaan dan perbaikan alat laboratorium 3. Pengadaan perlengkapan kantor 4. Kegiatan Operasional Pendukung	Banda Aceh	A. Pengembangan Usaha Ekonomi (Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah)	1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2. Pembangunan Gedung Pusat Batik Aceh 3. Belanja Lembaga Sosial lainnya Pemberian bantuan kepada para kelompok kerja berupa modal kerja, pondok kerja, peralatan kerja pada industri batu bata, kusen, bengkel las, garam, kapal nelayan, tahu tempe, kerajinan bordir, konveksi, pangan, kerajinan gerabah, kerajinan rumah tangga	13 Kab/Kota 5 LKM di Banda Aceh, 1 LKM Sabang, 2 LKM di Aceh Besar, 2 LKM di Pidie, 3 LKM di Bireun, 2 LKM di Aceh Utara, 2 LKM di Aceh Timur, 1 LKM di Lhokseumawe, 3 LKM di Aceh Barat, 3 LKM di Nagan Raya, 2 LKM di Aceh Singkil, 3 LKM di Aceh Jaya, 2 LKM di Simeulue
B. Rekonstruksi Sarana Laboratorium dan Sarana SMTI	1. Pembersihan 2. Alat laboratorium 3. Pengadaan peralatan 4. Pengadaan bahan kimia	Banda Aceh	(Penelitian dan Pengembangan Bahan Galian)	1. Pemberian bantuan untuk penambangan batu gunung 2. Pemberian bantuan untuk penambangan pasir 3. Bantuan untuk Pilot Project Pembinaan Penambangan Skala Kecil 4. bantuan untuk penambangan emas 5. Biaya operasional tenaga tim pelaksana lapangan	Aceh Besar Aceh Besar Aceh Selatan, Aceh Barat dan Nagan Raya Nagan Raya 4 Kab.

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BRR		
Program	Kegiatan	Lokasi/ Sasaran	Program	Kegiatan	Lokasi
VI. Tenaga Kerja			Satker BRR-Tenaga Kerja Provinsi NAD		
A. Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Publik	1. Pembangunan balai latihan kerja bidang konstruksi 2. Pembangunan kantor loka latihan kerja usaha kecil & menengah bidang wirausaha 3. Pembangunan balai latihan kerja bidang nelayan	Lhokseumawe Banda Aceh Meulaboh Langsa Sabang		1. Pelatihan Tenaga Kerja 11 angkatan, peralatan bengkel las 10 unit, bantuan pembuatan batu bata 24 unit, pembuatan kapal nelayan 2 unit, pembuatan tahu tempe 6 unit 2. Penyelenggaraan & Pelatihan Produktivitas ketenagakerjaan 5 angkatan, bantuan peralatan & modal kerja penambang rakyat 21 kelompok & pelatihan tenaga kerja, peralatan 3. Pemberian bantuan modal bergulir 4. Pembangunan 1 unit BLK 5. Rehabilitasi kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi NAD	Nias Lhokseumawe, Banda Aceh Banda Aceh
B. Perluasan & Pengembangan Kesempatan Kerja	1. Padat karya produktif 2. Pengerahan TKS 3. Mengatasi pengangguran 4. Informasi bursa kerja 5. Pemetaan tenaga kerja	NAD			
C. Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelatihan masyarakat untuk kejuruan 2. Latihan ketrampilan untuk tenaga kerja				
D. Perlindungan & Pengembang-an Lembaga Tenaga Kerja	1. Penyusunan peta permasalahan HI 2. Bimbingan motivasi, disiplin dan etos kerja pegawai perantara & staf HI & pelaku HI 3. Pengawasan & pemantauan dalam rangka mencegah eksploitasi anak 4. Pemetaan objek pengawasan				

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BRR		
Program	Kegiatan	Lokasi/ Sasaran	Program	Kegiatan	Lokasi
	5. Penyelesaian status hubungan kerja dan hak normatif tenaga kerja pasca gempa & [illegible] 6. Penanganan tenaga kerja perempuan pasca gempa & tsunami 7. Pelatihan calon pengawas ketenagakerjaan				
E. Perlindungan & Pengembang-an Lembaga Tenaga Kerja	1. Pengembangan sarana & prasarana HI di 9 kab 2. Pemeriksaan kesahatan fisik dan mental kerja 3. Memfasilitasi pembentukan employee & employer assistance sebagai sarana konseling bagi pekerja & pengusaha 4. Pelatihan occupational therapy bagi dokter & paramedis 5. Pembuatan pedoman penanganan pelang-garan norma kerja perempuan dan anak 6. Pembelian alat uji keselamatan & kesehatan kerja				

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BRR		
Program	Kegiatan	Lokasi/ Sasaran	Program	Kegiatan	Lokasi
VII. Koperasi & UKM				Satker BRR-Koperasi & UKM Provinsi NAD	
A. Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana Publik	1. Perbaikan fasilitasi kios UKM	Banda Aceh	Penyelenggaraan Bimbingan Perkoperasian dan Usaha Kecil	1. Administrasi Umum	
	2. Perbaikan gerobak dorong UKM			2 Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	11 Kab/Kota
	3. Pendataan profil koperasi			(Pelatihan Pengurus BKM, Pelatihan/Penyipan	
	4. Pendataan profil UKM			Masyarakat Pengguna LKM, Bantuan Pengada	
	5. Renovasi 8 pasar tradisional	Aceh Besar		an Peralatan Kelembagaan LKM, Konsolidasi	Lhokseumawe
	6. Pembangunan kembali pasar bina usaha (pasar grosir)	Aceh Barat		BKM	
	7. Pembangunan kembali pasar larang sawi (pasar eceran)				
	8. Pembangunan kembali pasar 2 ikan			3. Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil (bantuan sarana kerja LKM, BLM untuk Pemilihan Aset Produktif, bantuan modal usaha ritel, bantuan modal LKM)	11 Kab/Kota
	9. Pembangunan kembali TPI			4. Penyusunan Rencana Teknis	
	10. Perbaikan sarana & prasarana pasar	Aceh Jaya		Pelatihan Keterampilan Teknis penanaman modal (pelatihan kewirausahaan),	
		Simeulue			
		Pidie		5. Pendidikan dan training of trainer penanaman modal sebanyak 1 paket	Bireuen
		Bireuen			
		Aceh Timur		6. Pelayanan Perizinan Penanaman modal dan Pengembangan Iklim Promosi & Investasi sebanyak 1	Banda Aceh
		Aceh Tamiang			

RENCANA INDUK (BLUE PRINT)			PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BRR		
Program	Kegiatan	Lokasi/ Sasaran	Program	Kegiatan	Lokasi
	11. Pembangunan sarana & prasarana yang hancur/hanyut	Aceh Utara			
	12. Rehabilitasi/pembangunan pasar tradisional	Nagan Raya Sabang, Langsa, Bener			
	13. Pembangunan sarana usaha pasar darurat	Aceh Selatan Aceh Tengah			
	14. Perbaikan/renovasi sarana & prasarana pasar ikan yang dikelola koperasi	Aceh Barat Daya			
	15. Pembangunan 3 pasar	Aceh Singkil			
	16. Rehabilitasi/renovasi pasar	Nias			

PERSANDINGAN PERENCANAAN KEGIATAN ANTARA RENCANA INDUK DENGAN RENSTRA BRR BIDANG PEMULIHAN KELEMBAGAAN

No	RENCANA INDUK				RENSTRA BRR	
	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program	Kegiatan
BIDANG KELEMBAGAAN						
1	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	1 Pemberdayaan dan fasilitasi aparat untuk menjalankan fungsi pemerintahan (proses penyusunan rencana daerah, pengelolaan keuangan daerah) dan pelayanan umum serta mempersiapkan kapasitas untuk operasionalisasi dan implementasi rencana	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat.	Lintas Daerah	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda dan anggota legislatif dalam proses penyusunan rencana daerah dan pengelolaan keuangan daerah
		2 Penyiapan rencana perbaikan sistim dan prosedur pasca bencana alam dan bencana buatan bagi PNS dan keluarganya dalam rangka mengatasi trauma bagi PNS.	Tersusunnya perbaikan sistem dan prosedur paska bencana alam dan bencana buatan bagi PNS dan keluarganya. (sistem dan prosedur tunjangan bagi PNS dan keluarganya)	Lintas Daerah		
		3 Penanganan masalah administrasi kepegawaian (gaji, tunjangan, asuransi, dsb) dan dukungan trauma bagi PNS dan keluarganya	Terselesaikannya masalah administrasi kepegawaian (gaji, tunjangan, asuransi, dsb)	Lintas Daerah	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah	Memperbaiki sistem administrasi pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang tidak terduga (bencana alam dan bencana buatan)
		4 Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana.	Meningkatnya kapasitas dalam usaha penyiapan rencana mitigasi bencana (SAR, evakuasi, P3K, Dapur Umum)	Lintas Daerah	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menghadapi bencana alam dan buatan, melalui pelatihan-pelatihan teknis manajerial dan pengembangan sistem deteksi dini
		5 (i) Penyediaan tenaga-tenaga kontrak/suplemen, (ii) penyelesaian rekrutmen CPNS yang telah dilaksanakan,	Tersedianya aparat pemerintah daerah melalui rekruitmen pegawai baru atau mutasi antar daerah sesuai dengan kebutuhan penduduk yang dilayani	Lintas Daerah		

No	RENCANA INDUK				RENSTRA BRR	
	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program	Kegiatan
		(iii) penataan dan penyediaan (melalui rekrutmen dan mutasi) aparatur pemerintah daerah sesuai dengan perubahan jumlah penduduk yang dilayani dan rencana pengelolaannya		Lintas Daerah	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah	Melakukan penataan dan penyediaan aparatur pemerintah daerah, legislatif, pimpinan daerah dan aparatur pusat
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.	1 Penataan kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan perubahan jumlah penduduk dan pembangunan daerah.	Tertatanya kelembagaan pemerintahan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk yang dilayani	Lintas Daerah		
		2 Bantuan operasionalisasi penyelenggaraan dan peningkatan pemerintah tingkat kecamatan/mukim/ gampong	Terlaksananya proses partisipasi masyarakat/Lembaga agama, adat dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll) dalam proses penyusunan rencana dan penganggaran pada tingkat kecamatan/desa/ gampong dan	Lintas Daerah		
		3 Penyusunan rencana perbaikan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah daerah dan sosialisasinya serta pelaksanaaan sistem dan prosedur	Tersedianya rencana perbaikan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah daerah sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien dan sosialisasinya serta pelaksanaaan sistem dan prosedur.	Lintas Daerah	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah	Memperbaiki dan menata struktur kelembagaan yang proporsional dan prosedur kerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, untuk memenuhi standar pelayanan minimum (SPM)

No	RENCANA INDUK				RENSTRA BRR	
	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program	Kegiatan
		4 a. Pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintahan daerah yang permanen berdasarkan masterplan dan rencana teknis, serta menyediakan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana. • Kantor gubernur 1 unit, • Kantor Walikota 1 unit, • Kantor Bupati 3 unit, • Kantor dinas/badan provinsi 17 unit, • Kantor DPRD 1 unit, • Kantor dinas/badan kota 53 unit, • Kantor kecamatan 23 unit, • Kantor kelurahan 262 unit • Kantor desa 188 unit	Tersedianya sarana pemerintahan, kantor pemerintah dan rencana perbaikan kantor	• Prov NAD • Kota Banda Aceh • Kab. Aceh besar • Kab. Aceh Barat • Kab. Aceh Jaya • Kab. Bireun • Kab. Pidie • Kab. Aceh Utara • Kab. Aceh timur • Kab. Simeleu • Kota Sabang • Kota Lhoksumawe • Kab. Nias	Penyediaan sarana dan prasarana lembaga pemerintahan secara permanen	Merehabilitasi prasarana pemerintah daerah yang permanen berdasarkan masterplan dan rencana teknis *(Detail Engineering Design)* Menyediakan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik
		b. Penyediaan sarana dan kantor sistem informasi pelayanan masyarakat	Tersedianya sarana dan kantor sistem informasi pelayanan masyarakat (Media Center)	• Prov NAD • Kota Banda Aceh • Kab. Aceh besar • Kab. Aceh Barat • Kab. Aceh Jaya • Kab. Bireun • Kab. Pidie • Kab. Aceh Utara • Kab. Aceh timur • Kab. Simeleu • Kota Sabang • Kota Lhoksumawe • Kab. Nias		Memfasilitasi dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana trauma centre, sistem kehumasan Pemda, dan forum komunikasi

No	RENCANA INDUK				RENSTRA BRR	
	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program	Kegiatan
3	Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.	1 Peningkatan kapasitas legislatif daerah dalam penyusunan rencana dan monitoring pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kapasitas legislatif daerah dalam penyusunan rencana dan monitoring pengelolaan keuangan daerah	Lintas Daerah	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda dan anggota legislatif dalam proses penyusunan rencana daerah dan pengelolaan keuangan daerah
		2 Penataan keuangan daerah dan pengelolaannya (monitoring dan evaluasi)	Tertatanya keuangan daerah serta terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	Lintas Daerah		
4	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	1 Optimalisasi jaringan kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota dan antar provinsi (dalam bentuk forum kerjasama)	Terciptanya forum kerjasama dan tersedianya sarana utk kerjasama antar daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dlm tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.	Lintas Daerah	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah	Menciptakan dan meningkatkan koordinasi serta kerja sama antar tingkat pemerintahan
		2 Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang dapat berjalan secara berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah	Lintas Daerah		
5	Penataan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1 Harmonisasi peraturan perundang-undangan yg terdapat di Aceh	Tertatanya perundang-undangan yang berlaku di Aceh secara selaras dan harmonis	Lintas Daerah		
6	Penataan Admnistrasi Kependudukan	1 Pendataan penduduk	Terdatanya penduduk yang meninggal dunia, hilang maupun selamat serta terdatanya struktur kependudukan	Lintas Daerah		
7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 Dukungan terhadap trauma center yang ada	Terlaksananya recovery trauma sosial masyarakat	Lintas Daerah	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah	Memfasilitasi dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana trauma centre, sistem kehumasan Pemda, dan forum komunikasi

No	RENCANA INDUK				RENSTRA BRR	
	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program	Kegiatan
8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1 Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana (pelatihan evacuation, SAR, P3K, dll)	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam merehabilitasi dan merekonstruksi pembangunan di Aceh	Lintas Daerah		
		2 Penguatan dan faslitasi lembaga agama,adat dan sosial lainnya pada tingkat mukim/gampong yang ada	• Terlaksananya pemberdayaan/partisipasi lembaga agama, adat, dan sosial lainnya dalam partisipasi proses perencanaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan di Aceh • Terbentuknya forum komunikasi masyarakat	Lintas Daerah		
		3 Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat / lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll)	Tersedianya sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat / lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll)	• Prov NAD • Kota Banda Aceh • Kab. Aceh besar • Kab. Aceh Barat • Kab. Aceh Jaya • Kab. Bireun • Kab. Pidie • Kab. Aceh Utara • Kab. Aceh timur • Kab. Simeleu • Kota Sabang • Kota Lhoksumawe • Kab. Nias		
9	Pengelolaan Pertanahan	1 Penataan batas-batas administrasi wilayah Aceh yang telah berubah akibat bencana	Tertatanya batas-batas administrasi wilayah provinsi/kecamatan/kelurahan yang baru	Lintas Daerah		
10	Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	1 Dukungan terhadap penataan/penyiapan pimpinan daerah dan legislatif daerah (termasuk tata cara penyusunan pengelolaan keuangan	Tersedianya dan terpilihnya pimpinan daerah dan legislatif baru untuk menggantikan yang meninggal dan habis masa jabatannya	Lintas Daerah	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda dan anggota legislatif dalam proses penyusunan rencana daerah dan pengelolaan keuangan daerah

No	RENCANA INDUK				RENSTRA BRR	
	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program	Kegiatan
11	Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur	1 Fasilitasi penyediaan aparat pemerintah pusat untuk instansi vertikal di Aceh dan proses mutasinya	Tersedianya aparatur pada instansi vertikal di Aceh.	Lintas Daerah	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah	Melakukan penataan dan penyediaan aparatur pemerintah daerah, legislatif, pimpinan daerah dan aparatur pusat
BIDANG HUKUM						
1	Mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dan HAM	1 Pemulihkan dan pemberikan hak-hak keperdataan serta penerbitan kembali alat bukti haknya a. Menetapkan mengenai status hukum ahli waris dan obiek warisan b. Menetapkan status harta benda yang tidak ada lagi pemiliknya c. Menetapkan status kepemilikan hak atas tanah baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar d. Menetapkan hak perwalian dan pengasuhan anak e. Menetapkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	 Adanya kejelasan status hukum ahli waris dan objek warisan Adanya status kejelasan status harta benda yang tidak ada lagi pemiliknya Adanya kejelasan status kepemilikan hak atas tanah baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar Adanya kejelasan hak perwalian dan pengasuhan anak Adanya kepastian Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Seluruh Kab/Kota/kecamatan/Desa dalam Provinsi NAD dan Kep-Nias-Sumut	Jaminan kepastian, perlindungan, penegakan hukum dan HAM	Memulihkan dan memberikan hak-hak keperdataan serta penerbitan kembali alat bukti haknya
		2 Pemulihkan hak-hak yang berkaitan dengan hukum publik	Adanya pemulihan hak-hak yang berkaitan dengan hukum publik			Memulihkan hak-hak yang berkaitan dengan hukum publik
		3 Pemberian kembali dokumen identitas a. Menetapkan kepastian hilang/meniggalnya seseorang b. Menetapkan status kelahiran c. Menetapkan status perkawinan/perceraian	 Adanya kepastian atas hilang/ meniggalnya seseorang Adanya kejelasan status kelahiran Adanya kejelasan status perkawinan/perceraian			Memberikan kembali dokumen identitas
		4 Pemberian status hukum Baital Maal sebagai subjek hukum khusus bagi Provinsi NAD	Baital Maal yang lebih akuntabel dengan status hukumnya			Memberikan status hukum Baital Maal sebagai subjek hukum Provinsi NAD

No	RENCANA INDUK				RENSTRA BRR	
	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program	Kegiatan
		5 Memberdayakan lembaga adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan	Meningkatnya kapasitas lembaga adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan			Memberdayakan lembaga adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan
2	Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana hukum	1 Pembentukan posko penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum terpadu	Peningkatan kesadaran hukum	Seluruh Kab/Kota/kecamatan/Desa dalam Provinsi NAD dan Kep-Nias-Sumut		
		2 Melakukan inventarisasi jumlah sarana dan prasarana hukum yang dibangun kembali dan pembangunan gedung baru • Kejati 1 unit • Kejari 5 unit • Lapas Klas II A 1 unit • Lapas Klas II B 1 unit • Rutan 4 unit • Bapas Klas II • Rubasa Klas II • Kanwil Depkumham • Kanim 2 unit • Pengadilan tinggi 1 unit • Pengadilan negeri 9 unit • PTUN 1 unit • Mahkamah Syariah 6 unit	Teridentifikasinya sarana dan prasarana hukum yang dibangun kembali dan pembangunan gedung baru	Seluruh Kab/Kota/kecamatan/Desa dalam Provinsi NAD dan Kep-Nias-Sumut	Revitalisasi fungsi dan tugas pelayanan hukum	Merehabilitasi dan membangun kembali sarana dan prasarana pengadilan dan kejaksaan serta sarana pendukung lainnya

No	RENCANA INDUK				RENSTRA BRR	
	Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Program	Kegiatan
3	Penambahan dan peningkatan kualitas SDM aparatur hukum	1 Penataan dan penyediaan (melalui rekrutmen dan mutasi) aparatur hukum	Tersedianya aparat SDM aparatur hukum (hakim, jaksa, tebaga fungsional, dan tenaga teknis/administratif) melalui rekruitmen atau mutasi antar daerah sesuai dengan kebutuhan	Seluruh Kab/Kota/kecamatan/Desa dalam Provinsi NAD dan Kep-Nias-Sumut	Revitalisasi fungsi dan tugas pelayanan hukum	Mobilisasi tenaga hakim dan tenaga peradilan lainnya serta jaksa dari daerah lain
		2 Peningkatan kualitas SDM aparatur hukum melalui pelatihan.	Meningkatnya kualitas SDM aparatur hukum (hakim, jaksa, tebaga fungsional, dan tenaga teknis/administratif)	Seluruh Kab/Kota/kecamatan/Desa dalam Provinsi NAD dan Kep-Nias-Sumut		
4	Menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	1 Menyusun substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang a. Tata Ruang dan Pertanahan b. Ekonomi dan Ketenagakerjaan c. Hukum	Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan target/rencana, dan lebih terkoordiinir untuk setiap bidangnya.	Seluruh Kab/Kota/kecamatan/Desa dalam Provinsi NAD dan Kep-Nias-Sumut		

Sumber : Rencana Induk bidang Kelembagaan Daerah, Bidang Hukum, dan Renstra BRR

PERSANDINGAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANTARA RENCANA INDUK DENGAN BRR BIDANG PEMULIHAN KELEMBAGAAN

No	RENCANA INDUK			PELAKSANAAN BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Kegiatan	Lokasi
BIDANG KELEMBAGAAN					
1	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah	1 Pemberdayaan dan fasilitasi aparat untuk menjalankan fungsi pemerintahan (proses penyusunan rencana daerah, pengelolaan keuangan daerah) dan pelayanan umum serta mempersiapkan kapasitas untuk operasionalisasi dan implementasi rencana	Lintas Daerah	Peningkatan kapasitas aparatur melalui • Pelatihan administrasi kepemerintahan kepada camat, mukim, dan keuchik di kab/kota, secara bertahap mencakup 6 kab/kot. • Pelatihan fasilitasi forum komunikasi kecamatan di kab/kot. • Pendidikan/Pelatihan Aparat 1.222 orang • Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa 800 orang • Penerbitan Buku/Arsip/Modul Panduan sebanyak 81 Dokumen	
		2 Penyiapan rencana perbaikan sistim dan prosedur pasca bencana alam dan bencana buatan bagi PNS dan keluarganya dalam rangka mengatasi trauma bagi PNS.	Lintas Daerah		
		3 Penanganan masalah administrasi kepegawaian (gaji, tunjangan, asuransi, dsb) dan dukungan trauma bagi PNS dan keluarganya	Lintas Daerah	Percepatan pemrosesan kepegawaian (pengurusan administrasi, pemberian NIP, dan lain sebagainya). Pelatihan emotional spiritual quotient (ESQ) yang diperuntukkan bagi aparatur di Provinsi NAD sebanyak 2500 orang *Trauma healing* dan *trauma counseling* yang diperuntukkan bagi warga dan aparatur sebanyak 680 orang	Provinsi NAD di Banda Aceh dan Lhokseumawe, Aceh Utara Nias
		4 Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana.	Lintas Daerah		
		5 (i) Penyediaan tenaga-tenaga kontrak/suplemen, (ii) penyelesaian rekrutmen CPNS yang telah dilaksanakan,	Lintas Daerah		

No	RENCANA INDUK			PELAKSANAAN BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Kegiatan	Lokasi
BIDANG KELEMBAGAAN					
		(iii) penataan dan penyediaan (melalui rekrutmen dan mutasi) aparatur pemerintah daerah sesuai dengan perubahan jumlah penduduk yang dilayani dan rencana pengelolaannya	Lintas Daerah	Penyediaan SDM aparatur: • Rekrutmen PNS. Berdasarkan data BKN rekrutmen mencapai 9.191 orang dari total kebutuhan di Provinsi NAD sebanyak 17.307 orang • Pelatihan Prajabatan calon PNS 1434 orang • Program Gelar (S2) 52 orang • Diklat Penjenjangan Karir 130 orang	
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.	1 Penataan kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan perubahan jumlah penduduk dan pembangunan daerah.	Lintas Daerah		
		2 Bantuan operasionalisasi penyelenggaraan dan peningkatan pemerintah tingkat kecamatan/mukim/ gampong	Lintas Daerah		
		3 Penyusunan rencana perbaikan sistem dan prosedur kerja lembaga pemerintah daerah dan sosialisasinya serta pelaksanaaan sistem dan prosedur	Lintas Daerah		
		4 a. Pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintahan daerah yang permanen berdasarkan masterplan dan rencana teknis, serta menyediakan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana. • Kantor gubernur 1 unit, • Kantor Walikota 1 unit, • Kantor Bupati 3 unit, • Kantor dinas/badan provinsi 17 unit, • Kantor DPRD 1 unit, • Kantor dinas/badan kota 53 unit, • Kantor kecamatan 23 unit, • Kantor kelurahan 262 unit	• Prov NAD • Kota Banda Aceh • Kab. Aceh besar • Kab. Aceh Barat • Kab. Aceh Jaya • Kab. Bireun • Kab. Pidie • Kab. Aceh Utara • Kab. Aceh timur • Kab. Simeleu • Kota Sabang • Kota Lhoksumawe • Kab. Nias	Pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintahan • Perencanaan dan desain kantor desa/kelurahan (991 unit), balai musyawarah (489 unit), dan camat (65 unit) • Perencanaan dan desain gedung kantor yang lebih besar di tingkat kota/kabupaten dan provinsi (166 unit) • Pembangunan Kantor Desa 217 unit di 10 Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan 1 unit di Kepulauan Nias	Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Besar, Pidie, Bireun, Nagan Raya, Aceh Jaya, Banda Aceh, Nias

No	RENCANA INDUK			PELAKSANAAN BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Kegiatan	Lokasi
				• Pembangunan Kantor camat 18 unit di 6 Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan 3 unit di Kepulauan Nias	Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Timur, Bireun, Nagan Raya, Banda Aceh, Nias, Nias Selatan
				• Pembangunan Kantor Bupati 2 unit di Kepualauan	Nias, Nias Selatan
				• Pembangunan Kantor Dinas 3 unit untuk Provinsi NAD, 4 unit di 2 Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan 7 unit di Kepulauan Nias	Prov. NAD, Aceh Singkil, Banda Aceh, Nias, Nias Selatan
		b. Penyediaan sarana dan kantor sistem informasi pelayanan masyarakat		• Pembangunan Meuligo 2 unit di Kota Banda Aceh Provinsi NAD	Banda Aceh
				• Pembangunan Kantor Mukim/Bale 73 unit di 12 Kabupaten/Kota Provinsi NAD	Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireun, Nagan Raya, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang
				• Pembangunan Rumah Dinas 17 unit untuk Provinsi NAD, 239 unit di 12 Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan 45 unit di Kepulauan Nias, namun tidak dirinci menurut instansi terkait (Rumah Dinas TNI/Polri/PNS/Hakim)	Prov NAD, Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Nias, Nias Selatan

No	RENCANA INDUK			PELAKSANAAN BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Kegiatan	Lokasi
3	Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.	1 Peningkatan kapasitas legislatif daerah dalam penyusunan rencana dan monitoring pengelolaan keuangan daerah	Lintas Daerah		
		2 Penataan keuangan daerah dan pengelolaannya (monitoring dan evaluasi)	Lintas Daerah		
4	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	1 Optimalisasi jaringan kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota dan antar provinsi (dalam bentuk forum kerjasama)	Lintas Daerah		
		2 Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah	Lintas Daerah		
5	Penataan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1 Harmonisasi peraturan perundang-undangan yg terdapat di Aceh	Lintas Daerah		
6	Penataan Admnistrasi Kependudukan	1 Pendataan penduduk	Lintas Daerah	Dukungan pengadaan KTP sebanyak 1.360.000 Buah	
7	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1 Dukungan terhadap trauma center yang ada	Lintas Daerah		
8	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1 Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana (pelatihan evacuation, SAR, P3K, dll)	Lintas Daerah		
		2 Penguatan dan faslitasi lembaga agama,adat dan sosial lainnya pada tingkat mukim/gampong yang ada	Lintas Daerah		

No	RENCANA INDUK			PELAKSANAAN BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Kegiatan	Lokasi
		3 Penyediaan sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat / lembaga agama, adat, dan sosial lainnya (a.l. Tuha Peut, dll)	• Prov NAD • Kota Banda Aceh • Kab. Aceh besar • Kab. Aceh Barat • Kab. Aceh Jaya • Kab. Bireun • Kab. Pidie • Kab. Aceh Utara • Kab. Aceh timur • Kab. Simeleu • Kota Sabang • Kota Lhoksumawe • Kab. Nias		
9	Pengelolaan Pertanahan	1 Penataan batas-batas administrasi wilayah Aceh yang telah berubah akibat bencana	Lintas Daerah	Penentuan pilar batas daerah 303 unit	
10	Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	1 Dukungan terhadap penataan/penyiapan pimpinan daerah dan legislatif daerah (termasuk tata cara penyusunan pengelolaan keuangan daerah).	Lintas Daerah		
11	Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur	1 Fasilitasi penyediaan aparat pemerintah pusat untuk instansi vertikal di Aceh dan proses mutasinya	Lintas Daerah		

No	RENCANA INDUK			PELAKSANAAN BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Kegiatan	Lokasi
BIDANG HUKUM					
1	Mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dan HAM	1 Pemulihkan dan pemberikan hak-hak keperdataan serta penerbitan kembali alat bukti haknya a. Menetapkan mengenai status hukum ahli waris dan objek warisan b. Menetapkan status harta benda yang tidak ada lagi pemiliknya c. Menetapkan status kepemilikan hak atas tanah baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar d. Menetapkan hak perwalian dan pengasuhan anak e. Menetapkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Seluruh Kab/Kota/kec./Desa dalam Provinsi NAD dan Kep-Nias-Sumut		
		2 Pemulihkan hak-hak yang berkaitan dengan hukum publik	Seluruh Kab/Kota/kec./Desa dalam Provinsi NAD dan Kep-Nias-Sumut		
		3 Pemberian kembali dokumen identitas a. Menetapkan kepastian hilang/meniggalnya seseorang b. Menetapkan status kelahiran c. Menetapkan status perkawinan/perceraian	Seluruh Kab/Kota/kec./Desa dalam Provinsi NAD dan Kep-Nias-Sumut		
		4 Pemberian status hukum Baital Maal sebagai subjek hukum khusus bagi Provinsi NAD	Seluruh Kab/Kota/kec./ Desa dalam Provinsi NAD		
		5 Memberdayakan lembaga adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan	Seluruh Kab/Kota/kec./ Desa dalam Provinsi NAD		

No	RENCANA INDUK			PELAKSANAAN BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Kegiatan	Lokasi
2	Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana hukum	1 Pembentukan posko penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum terpadu	Seluruh Kab/Kota/kecamatan/Desa dalam Provinsi NAD dan Kep-Nias-Sumut		
		2 Melakukan inventarisasi jumlah sarana dan prasarana hukum yang dibangun kembali dan pembangunan gedung baru • Kejati 1 unit • Kejari 5 unit • Lapas Klas II A 1 unit • Lapas Klas II B 1 unit • Rutan 4 unit • Bapas Klas II • Rubasa Klas II • Kanwil Depkumham • Kanim 2 unit • Pengadilan tinggi 1 unit • Pengadilan negeri 9 unit • PTUN 1 unit • Mahkamah Syariah 6 unit	Seluruh Kab/Kota/kecamatan/Desa dalam Provinsi NAD dan Kep-Nias-Sumut	Pembangunan sarana dan prasarana hukum • Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan & Rumah Tahanan sebanyak 8 unit di 6 Kabupaten/Kota Provinsi NAD • Kantor Imigrasi sebanyak 2 unit di 2 Kabupaten/Kota Provinsi NAD • Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah syari'ah, Mahkamah Militer, PTUN sebanyak 3 unit untuk Provinsi NAD, 14 unit di 11 Kabupaten/Kota Provinsi NAD	Simeulue, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Banda Aceh Aceh Barat, Banda Aceh Prov NAD, Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe
3	Penambahan dan peningkatan kualitas SDM aparatur hukum	1 Penataan dan penyediaan (melalui rekrutmen dan mutasi) aparatur hukum	Seluruh Kab/Kota/kecamatan/ Desa dalam Provinsi NAD dan Kep-Nias-Sumut		
		2 Peningkatan kualitas SDM aparatur hukum melalui pelatihan.	Seluruh Kab/Kota/kecamatan/Desa dalam Provinsi NAD dan Kep-Nias-Sumut	Pelatihan hakim dan aparat pengadilan untuk 380 orang, termasuk pelatihan Hakim Syari'ah sebanyak 40 orang • Pelatihan Manajemen Peradilan Bagi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Se-Provinsi NAD • Pelatihan Penyusunan Renstra dan LAKIP bagi pejabat Kesekretariatan Mahkamah Syariah se-Provinsi NAD • Workshop Sengketa Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Pembentukan Good Governance	Prov NAD

No	RENCANA INDUK			PELAKSANAAN BRR	
	Program	Kegiatan	Lokasi	Kegiatan	Lokasi
				• Sosialisasi Draf Perpu tentang Penanganan Permasalahan Hukum Pasca-Tsunami bagi Hakim Mahkamah Syariah di Wilayah Provinsi NAD • Seminar Peranan dan Fungsi Mahkamah Syariah Pasca-Pelaksanaan MOU Helsinki bagi Hakim Mahkamah Syariah se-Provinsi NAD • Pelatihan terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana Islam bagi Para Hakim Mahkamah Syariyah se-Provinsi NAD • Workshop Kritisasi Rancangan Qanun tentang Hukum Acara Jinayat, • Pelatihan 14 Hakim Mahkamah Syariah di Mahkamah Syariah Pulo Penang dan Kelantan, Kuala Lumpur (Malaysia), • Pelatihan Pembinaan Adat bagi Tokoh Adat Gampong dan Mukim dalam Wilayah Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar • Seminar Dalam Rangka Pemberdayaan Baitul Mal di Provinsi NAD. • Pelatihan Pengelolaan Keuangan Negara (Kaur Umum dan Kaur Keuangan Mahkamah Syar'iyah se- Prov. NAD) Tahun 2005 • Pelatihan Administrasi Umum dan Peradilan Bagi Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Se - Prov. NAD • Study Comperatif Pelaksanaan Syariat Islam di Paskitan (Hakim Mahkamah Syar'iyah se- Prov. NAD) • Need assessment manajemen informasi teknologi dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Syariah Provinsi serta Mahkamah Syariah Banda Aceh dan Aceh Besar (pilot project)	
4	Menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	1 Menyusun substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang a. Tata Ruang dan Pertanahan b. Ekonomi dan Ketenagakerjaan c. Hukum	Seluruh Kab/Kota/kecamatan/ Desa dalam Provinsi NAD dan Kep-Nias-Sumut		

Sandingan Kegiatan di Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias dari Rencana Induk (Blue Print) dan Rencana Strategis Bapel BRR

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Rencana Strategis Bapel BRR	
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
Program Operasional Bhakti TNI. Pemberian bantuan kepada pemerintah sipil berdasarkan permintaan dan rasa terpanggil oleh adanya situasi khusus: 1. Melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi dampak bencana alam; 2. Memberikan bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan; 3. Membantu program pemerintah di bidang pendidikan, seperti bantuan melaksanakan pengajaran. Program Pengembangan Pertahanan Integratif Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: 1. Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/ renovasi fasilitas pendukung operasi, lembaga pendidikan, serta sarana dan prasarana pendukung seperti mess, asrama dan rumah dinas.	Refungsionalisasi Kelembagaan TNI	1	Pengadaan Material Bekum Mabes TNI	NAD, Simeulue, Nias	Penciptaan Rasa Aman dan Tertib Masyarakat Aceh	Melaksanakan refungsionalisasi lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban; Melaksanakan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah pengungsian; Memantapkan keamanan dengan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah yang kondisi keamanan dan ketertibannya relatif kondusif; Melaksanakan pengamanan proses pembangunan terutama rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana serta aktivitas sosial ekonomi; dan Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah-daerah yang rawan
		2	Pengadaan Material Alpal Mabes TNI	NAD, Simeulue, Nias		
		3	Rehabilitasi kantor Dilmil/ Ormil-101/ Babinkum	Banda Aceh		
		4	Rehabilitasi Gedung Denkomlekstrada	Banda Aceh		
		5	Rehabilitasi Gedung Subdenkomlekstrada	Meulaboh		
		6	Rehabilitasi Gedung Subdenkomlekstrada	Lhokseumawe		
		7	Rehabilitasi Mako Satgas Muara	Lhokseumawe		
		8	Rehabilitasi Mako Satgas Muara, Yon 2 Mar	Lhokseumawe		
		9	Rehabilitasi Mako Satgas Muara, Yon 3 Mar	Lhokseumawe		
		10	Rehabilitasi Mako Satgas 12	Meulaboh		
		11	Rehabilitasi Mako Yonif 100/ Raider	Meulaboh		
		12	Rehabilitasi Mako Yonzipur 9 Kostrad	Meulaboh		

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Rencana Strategis Bapel BRR	
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
		13	Rehabilitasi Mako Yonif 521	Meulaboh		
		14	Rehabilitasi Mako Yonif 623	Meulaboh		
		15	Rehabilitasi Gudang Satgas Banmin	Meulaboh		
		16	Rehabilitasi Kout -3 Satgaspur	Pidie		
		17	Rehabilitasi RS.TK IV Meulaboh	Meulaboh		
Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:		18	Rehabilitasi RS.TK III Banda Aceh	Banda Aceh		
		19	Rehabilitasi Polban Sigli	Sigli		
1. Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/ renovasi fasilitas dukungan operasi, pembangunan/ renovasi koramil daerah rawan dan pos-pos perbatasan, serta pembangunan/ renovasi sarana dan prasarana fasilitas lainnya yang meliputi gudang munisi, senjata dan perbekalan.		20	Rehabilitasi RS.TK IV Lhokseumawe	Lhokseumawe		
		21	Rehabilitasi Satgas Komlek Opslihkam	NAD		
		22	Pengadaan Alpal TNI AD	NAD		
		23	Pembelian Tanah untuk Asrama di KODIM 0101	Aceh Besar		
		24	Pembelian Tanah untuk Asrama di KODIM 0105	Aceh Barat		
		25	Pembelian Tanah untuk Asrama Benteng	Pidie		
		26	Rehabilitasi Bangfas Milik Mabes TNI	NAD		
		27	Rehabilitasi Prasarana Milik Mabes TNI	NAD, Simeulue, Nias		
Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:		28	Rehabilitasi Alkoms Milik Mabes TNI	NAD, Simeulue, Nias		
1. Pengembangan fasilitas yang meliputi pembangunan/ renovasi faswatpers (fasilitas perawatan personel), fasbinlan (fasilitas pembinaan dan latihan), faslabuh (fasilitas pelabuhan), fasbek (fasilitas perbekalan), peningkatan Lanal (pangkalan AL) menjadi Lantamal (pangkalan utama AL).		29	Pengadaan Material Bekum Lanal Sabang	Sabang		
		30	Pengadaan Material Bekum Fasharkan Sabang	Sabang		
		31	Pengadaan Material Alpal TNI AL	NAD		

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Rencana Strategis Bapel BRR	
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
		32	Rehabilitasi Lanal Sabang	Sabang		
		33	Rehabilitasi Fasharkan Sabang	Sabang		
		34	Rehabilitasi Lanal Lhokseumawe	Lhokseumawe		
Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara		35	Rehabilitasi Material Bidang Alkom TNI AL	NAD		
1. Pengembangan fasilitas TNI AU, berupa pembangunan/ renovasi fasilitas dukungan operasi, perumahan prajurit meliputi	Refungsionalisasi Kelembagaan	36	Pengadaan Material Bidang Alpal TNI AU	NAD		
		37	Rehabilitasi Lanud Maimunsaleh	Sabang		
		38	Rehabilitasi Satrad 209 Sabang	Sabang		
		39	Rehabilitasi Lanud Iskandar Muda	Banda Aceh		
		40	Rehabilitasi Satrad 204 Lhokseumawe	Lhokseumawe		
		41	Rehabilitasi Taxiway Light & Apron Light	Banda Aceh		
		42	Rehabilitasi Lanud Cut Nyak Dien	Meulaboh		
		43	Rehabilitasi Bangmat Alsatri TNI AU	NAD		
	Dukungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	44	Pembukaan Daerah Terisolasi	NAD		Melakukan Pengelolaan Dampak Bencana berupa kegiatan kemanusiaan, peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, refungsionalisasi pemerintahan, termasuk lembaga keamanan, dukungan rehabilitasi dan dukungan rekonstruksi dengan pendekatan sosio-kultural;
		45	Pembersihan Desa/ Kota dari Puing	NAD		
		46	Pengadaan Rumah Sakit Lapangan	NAD, Simeulue, Nias		

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Rencana Strategis Bapel BRR	
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
		47	Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	NAD, Simeulue, Nias		Melaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang pembangunan di Aceh;
		48	Operasi Bhakti TNI	NAD, Simeulue, Nias		
STRATEGI PEMERINTAHAN: Program Strategi Keamanan dan Ketertiban	Pemeliharaan Keamanan dan	49	Dukungan Pelayanan Kesehatan	NAD		
1. Pemantapan sistem keamanan	Ketertiban Daerah	50	Mobilisasi Pasukan TNI	NAD, Simeulue, Nias		
		51	Mobilisasi Pasukan POLRI	NAD		
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian	Refungsionalisasi Kelembagaan POLRI	52	Relokasi Personel Polda NAD	NAD		
		53	Pembuatan Renskep/ Skep Pergantian Personel	NAD		
1. Pembangunan materiil dan fasilitas Polri melalui pembangunan fasilitas yang mendukung tugas operasional.		54	Penyiapan/ Pergantian Personel	NAD		
		55	Penggantian Perlengkapan Perorangan	NAD		
		56	Pembangunan Penampungan Sementara	NAD		
2. Peningkatan fungsi prasarana dan sarana Polri untuk mendukung tugas–tugas kepolisian.		57	Rehabilitasi Mapolda	Banda Aceh		
		58	Rehabilitasi Markas Brimobda	Banda Aceh		
		59	Rehabilitasi Markas Dit.POLAIR	Banda Aceh		
		60	Pembangunan Kembali Asrama Ditpol Air	Banda Aceh		
		61	Rehabilitasi Polres Aceh Besar	Aceh Besar		
		62	Rehabilitasi Polres Aceh Barat	Aceh Barat		

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Rencana Strategis Bapel BRR	
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
		64	Rehabilitasi Polres Simeulue	Simeulue		
		65	Pembangunan Kembali Rumah Jabatan Polda	NAD		
		66	Pembangunan Kembali Asrama Polisi	Lamteumen I		
		67	Pembangunan Kembali Asrama Polisi	Lamteumen II		
		68	Pembangunan Kembali Asrama Brimob Lingke	Lingke		
		69	Pembangunan Kembali Asrama Polisi Ulhe Lheu	Ulhe Lheu		
		70	Pembangunan Kembali Asrama Polresta Banda Aceh di Ulhe Lheu	Ulhe Lheu		
		71	Rehabilitasi Polresta Banda Aceh	Banda Aceh		
		72	Pembangunan Kembali Asrama Polisi Lamjame	Lamjame		
		73	Pembangunan Kembali Asrama Polisi Punge	Punge		
		74	Pembangunan Kembali Asrama Polresta Banda Aceh di Kebun Kelapa	Kebun Kelapa		
		75	Pembangunan Kembali Asrama Polisi Kebun Kelapa	Kebun Kelapa		
		76	Pembangunan Kembali Aspolsek Kuta Alam	Kuta Alam		
		77	Pembangunan Kembali Aspolsek Darussalam	Darussalam		
		78	Pembangunan Kembali Aspolsek Krueng Raya	Krueng Raya		

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Rencana Strategis Bapel BRR	
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
	Refungsionalisasi Kelembagaan LSN	96	Pengadaan Kamar Sandi Dan Peralatan Sandi	NAD		
	Refungsionalisasi Kelembagaan POLHUKAM	97	Rehabilitasi Prasarana Bangunan Kantor Polhukam	NAD		Mengembangkan insentive framework yang menyeluruh untuk para dalam rangka mencapai perdamaian yang abadi dan tuntas.
STRATEGI KEMASYARAKATAN Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan	Pengembangan Ketahanan Masyarakat	98	Perumusan Kebijakan "Insentive Framework"	NAD		
1. Fasilitasi berbagai forum kemasyarakatan dalam mengembangkan wacana-wacana sosial politik untuk meningkatkan pemahaman persatuan bangsa		99	Desk Aceh	NAD	Penciptaan kematangan dan kedewasaan sosial politik masyarakat Aceh	Menfasilitasi peran masyarakat sipil dalam membantu peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaiakan persoalan sosial kemasyarakatan;
		100	Pengembangan Diplomasi Kebencanaan dan Kemanusiaan	NAD		
		101	Pengembangan EWS	NAD		Membangun karakter dan kebangsaan (nation and character building) yang mandiri dan berkualitas agar masyarakat memiliki kesadaran dan saling percaya dalam membangun kembali Aceh dan membela negara dan bangsa;
		102	Pemantapan Semangat Bela Negara	NAD dan Nias		
		103	Peningkatan Kualitas Informasi Publik	NAD dan Nias		
		104	Bimbingan Teknis dan Replikasi Cinta Tanah Air dan Bhakti Pertiwi	NAD dan Nias		Memantapkan otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sehingga masyarakat Aceh mampu melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan melanjutkan upaya-upaya pemantapan rasa cinta tanah air; dan
		105	Revitalisasi Wawasan Kebangsaan	NAD dan Nias		
		106	Konsolidasi Dan Penguatan Kelembagaan	NAD dan Nias		
		107	Sosialisasi Bidang Polkam	NAD dan Nias		
		108	Pemantauan Situasi Perkembangan Politik Masyarakat	NAD dan Nias		

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Rencana Strategis Bapel BRR	
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Program	Kegiatan
Program Pemeliharaan Kamtibmas:		109	Fasilitasi Pelembagaan Forum Kemasyarakatan	NAD dan Nias		
1. Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat.		110	Pendataan Ulang Kependudukan/ Single Identity Number	NAD		
2. Pemulihan keamanan melalui pemulihan darurat polisionil, penyelenggaraan operasi kepolisian serta pemulihan daerah konflik vertikal maupun horizontal.		111	Pengkajian Kondisi Masyarakat Aceh	NAD		Melakukan restrukturisasi dan reorientasi lembaga masyarakat, lembaga ekonomi, dan pemerintahan, serta memantapkan sistem komunikasi massa dan informasi;
3. Pengamanan daerah perbatasan Indonesia dengan mengupayakan keamanan lintas batas di wilayah perbatasan negara, dan mengupayakan keamanan di wilayah pulau-pulau terluar perbatasan negara.		112	Operasionalisasi EWS	NAD		
4. Penyelenggaraan kerjasama bantuan TNI ke Polri.	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Daerah	113	Pengembangan Potensi Keamanan	NAD		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik:		114	Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	NAD		
1. Pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi yang lebih luas secara cepat dan akurat.	Refungsionalisasi Kelembagaan KOMINFO	115	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana	NAD		

Sandingan Kegiatan di Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias dari Rencana Induk (Blue Print) dan Bapel BRR

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Kegiatan Bapel BRR			
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Sesuai	Prioritas	Lokasi	Satker BRR
Program Operasional Bhakti TNI. Pemberian bantuan kepada pemerintah sipil berdasarkan permintaan dan rasa terpanggil oleh adanya situasi khusus:	Refungsionalisasi Kelembagaan TNI	1	Pengadaan Material Bekum Mabes TNI	NAD, Simeulue, Nias	Pkt Alat Penanggulangan Bencana		Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias
1. Melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi dampak bencana alam;		2	Pengadaan Material Alpal Mabes TNI	NAD, Simeulue, Nias	Pkt Alat Utama Militer		Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias
2. Memberikan bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan;		3	Rehabilitasi kantor Dilmil/ Ormil-101/ Babinkum	Banda Aceh	Pkt Kantor & rumdis Dilmil1-01		Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias
3. Membantu program pemerintah di bidang pendidikan, seperti bantuan melaksanakan pengajaran.		4	Rehabilitasi Gedung Denkomlekstrada	Banda Aceh	Pkt ktr Denkomlekstrada B Aceh		Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias
		5	Rehabilitasi Gedung Subdenkomlekstrada	Meulaboh	Pkt Pembangunan Rumah Negara		Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
Program Pengembangan Pertahanan Integratif Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:		6	Rehabilitasi Gedung Subdenkomlekstrada	Lhokseumawe	Konstruksi di Lhokseumawe		Lhokseumawe	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
1. Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/ renovasi fasilitas pendukung operasi, lembaga pendidikan, serta sarana dan prasarana pendukung seperti mess, asrama dan rumah dinas.		7	Rehabilitasi Mako Satgas Muara	Lhokseumawe		Peralatan Bengkel dan Mesin	Sabang	Pengembangan Pertahanan Matra Laut NAD-Nias
		8	Rehabilitasi Mako Satgas Muara, Yon 2 Mar	Lhokseumawe		Pengadaan Alpasus	Jakarta	Pengembangan Pertahanan Matra Laut NAD-Nias
		9	Rehabilitasi Mako Satgas Muara, Yon 3 Mar	Lhokseumawe		Pengadaan Senjata dan Amunisi	Jakarta	Pengembangan Pertahanan Matra Laut NAD-Nias

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Kegiatan Bapel BRR			
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Sesuai	Prioritas	Lokasi	Satker BRR
		10	Rehabilitasi Mako Satgas 12	Meulaboh		Pkt Helm & Rompi Anti Peluru	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias
		11	Rehabilitasi Mako Yonif 100/ Raider	Meulaboh		Pkt Swim fest	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias
		12	Rehabilitasi Mako Yonzipur 9 Kostrad	Meulaboh		Pkt Kaporlap TNI	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias
		13	Rehabilitasi Mako Yonif 521	Meulaboh		Pkt Alat Angkut Air	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias
		14	Rehabilitasi Mako Yonif 623	Meulaboh		Pkt Alat Berat/ Alat Bantu	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias
		15	Rehabilitasi Gudang Satgas Banmin	Meulaboh		Administrasi Umum	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias
		16	Rehabilitasi Kout -3 Satgaspur	Pidie		Pkt Kantor Pekas TNI B. Aceh	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias
		17	Rehabilitasi RS.TK IV Meulaboh	Meulaboh		Rendalwas	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Kegiatan Bapel BRR			
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Sesuai	Prioritas	Lokasi	Satker BRR
Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: 1. Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/ renovasi fasilitas dukungan operasi, pembangunan/ renovasi koramil daerah rawan dan pos-pos perbatasan, serta pembangunan/ renovasi sarana dan prasarana fasilitas lainnya yang meliputi gudang munisi, senjata dan perbekalan.		18	Rehabilitasi RS.TK III Banda Aceh	Banda Aceh		Pkt Alat Bantu P Bencana dan kerusuhan	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias
		19	Rehabilitasi Polban Sigli	Sigli	Konstruksi di Pidie		Pidie	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		20	Rehabilitasi RS.TK IV Lhokseumawe	Lhokseumawe		Pkt Jembatan Bailley	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias
		21	Rehabilitasi Satgas Komlek Opslihkam	NAD		Pengadaan Kendaraan Khusus	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		22	Pengadaan Alpal TNI AD	NAD	Pengadaan Matl Alpal Darat		Jakarta	Pengembangan Pertahanan Matra Laut NAD-Nias
		23	Pembelian Tanah untuk Asrama di KODIM 0101	Aceh Besar		Pengadaan Alat Angkutan Air	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		24	Pembelian Tanah untuk Asrama di KODIM 0105	Aceh Barat	Pkt Pembangunan Gedung Kantor		Meulaboh	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		25	Pembelian Tanah untuk Asrama Benteng	Pidie		Pengadaan Alat Utama Militer	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		26	Rehabilitasi Bangfas Milik Mabes TNI	NAD	Pkt Pembangunan & Renovasi Gd.kantor		Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		27	Rehabilitasi Prasarana Milik Mabes TNI	NAD, Simeulue, Nias		Pengadaan Alat Berat Zeni	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Kegiatan Bapel BRR			
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Sesuai	Prioritas	Lokasi	Satker BRR
Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: 1. Pengembangan fasilitas yang meliputi pembangunan/ renovasi faswatpers (fasilitas perawatan personel), fasbinlan (fasilitas pembinaan dan latihan), faslabuh (fasilitas pelabuhan), fasbek (fasilitas perbekalan), peningkatan Lanal (pangkalan AL) menjadi Lantamal (pangkalan utama AL).		28	Rehabilitasi Alkoms Milik Mabes TNI	NAD, Simeulue, Nias	Pengadaan alat Studio & Komunikasi		Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		29	Pengadaan Material Bekum Lanal Sabang	Sabang	Pengadaan BMP & Bekum		Sabang	Pengembangan Pertahanan Matra Laut NAD-Nias
		30	Pengadaan Material Bekum Fasharkan Sabang	Sabang	Renovasi Dermaga		Sabang	Pengembangan Pertahanan Matra Laut NAD-Nias
		31	Pengadaan Material Alpal TNI AL	NAD	Pengadaan Material Alpal Laut		Jakarta	Pengembangan Pertahanan Matra Laut NAD-Nias
		32	Rehabilitasi Lanal Sabang	Sabang	Gedung Kantor Lanal Sabang		Sabang	Pengembangan Pertahanan Matra Laut NAD-Nias
		33	Rehabilitasi Fasharkan Sabang	Sabang	Pembangunan Sarana& Pras		Sabang	Pengembangan Pertahanan Matra Laut NAD-Nias
		34	Rehabilitasi Lanal Lhokseumawe	Lhokseumawe		Pengadaan Alpasus Zeni	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		35	Rehabilitasi Material Bidang Alkom TNI AL	NAD	Perawatan Alpal Laut		Sabang	Pengembangan Pertahanan Matra Laut NAD-Nias

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Kegiatan Bapel BRR			
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Sesuai	Prioritas	Lokasi	Satker BRR
Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara 1. Pengembangan fasilitas TNI AU, berupa pembangunan/ renovasi fasilitas dukungan operasi, perumahan prajurit meliputi rumdis/ rumjab, mess, barak dan asrama, serta pembangunan/ renovasi sarana prasarana dan fasilitas lainnya	Refungsionalisasi Kelembagaan	36	Pengadaan Material Bidang Alpal TNI AU	NAD	Pengembangan Materil		Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias
		37	Rehabilitasi Lanud Maimunsaleh	Sabang	Lanud Maimunsaleh		Sabang	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias
		38	Rehabilitasi Satrad 209 Sabang	Sabang	Satrad 233 Sabang		Sabang	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias
		39	Rehabilitasi Lanud Iskandar Muda	Banda Aceh	Lanud SIM		Aceh Besar	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias
		40	Rehabilitasi Satrad 204 Lhokseumawe	Lhokseumawe	Satrad 231 Paket 1		Lhokseumawe	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias
		41			Satrad 231 Paket 2		Lhokseumawe	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias
		42	Rehabilitasi Taxiway Light & Apron Light	Banda Aceh	Rendalwas		Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias
		43	Rehabilitasi Lanud Cut Nyak Dien	Meulaboh	Detasemen Meulaboh Paket 1		Nagan Raya	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias
		44	Rehabilitasi Bangmat Alsatri TNI AU	NAD	Detasemen Meulaboh Paket 2		Nagan Raya	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias
		45			Detasemen Meulaboh Paket 3		Nagan Raya	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Kegiatan Bapel BRR			
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Sesuai	Prioritas	Lokasi	Satker BRR
	Dukungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	46	Pembukaan Daerah Terisolasi	NAD		Pengadaan Genset dan Alat Bengkel	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		47	Pembersihan Desa/ Kota dari Puing	NAD		Pengadaan Alsatri dan Alsintor	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		48	Pengadaan Rumah Sakit Lapangan	NAD, Simeulue, Nias		Konsultan Perencana	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		49	Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	NAD, Simeulue, Nias		Konsultan Pengawas	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		50	Operasi Bhakti TNI	NAD, Simeulue, Nias		Pkt Asrama Lamprit	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		51	Dukungan Pelayanan Kesehatan	NAD		Pkt Asrama Blang Padang dan Kantor	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
STRATEGI PEMERINTAHAN: Program Strategi Keamanan dan Ketertiban :	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Daerah	52	Mobilisasi Pasukan TNI	NAD, Simeulue, Nias		Pkt Asrama Jln. Imam Bonjol	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
1. Pemantapan sistem keamanan		53				Pkt Pembangunan Sekolah	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		54				Konstruksi di Aceh Besar	Aceh Besar	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		55				Konstruksi di Singkil	Singkil	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		56				Konstruksi di Blangpidie	Blangpidie	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		57				Pkt Pembangunan Rumdis Kodim	Simeulue	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Kegiatan Bapel BRR			
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Sesuai	Prioritas	Lokasi	Satker BRR
		58				Pkt Pembangunan Rumdis Koramil	Simeulue	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		59				Pkt Pembangunan Kodim	Simeulue	Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		60				Administrasi Umum		Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD-Nias
		61	Mobilisasi Pasukan POLRI	NAD		Duk Opslog Polda NAD	Banda Aceh	Sdeops Polri NAD-Nias
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian	Refungsionalisasi Kelembagaan POLRI	62	Relokasi Personel Polda NAD	NAD		Pengadaan Bekal Kapor Polri	Banda Aceh	Sdelog Polri NAD-Nias
1. Pembangunan materiil dan fasilitas Polri melalui pembangunan fasilitas yang mendukung tugas operasional.		63	Pembuatan Renskep/ Skep Pergantian Personel	NAD		Perencanaan Mapolda, Flat Siaga	Banda Aceh	Sdelog Polri NAD-Nias
2. Peningkatan fungsi prasarana dan sarana Polri untuk mendukung tugas–tugas kepolisian.		64	Penyiapan/ Pergantian Personel	NAD		Pengawasan Mapolsek dan Rolog Polda	Banda Aceh	Sdelog Polri NAD-Nias
		65	Penggantian Perlengkapan Perorangan	NAD		Renovasi Mako Rolog Polda NAD	Banda Aceh	Sdelog Polri NAD-Nias
		66	Pembangunan Penampungan Sementara	NAD		Pengadaan Meubelair	Banda Aceh	Sdelog Polri NAD-Nias
		67	Rehabilitasi Mapolda	Banda Aceh	Pembangunan Mapolda NAD		Banda Aceh	Sdelog Polri NAD-Nias
		68	Rehabilitasi Markas Brimobda	Banda Aceh	Mako Satbrimobda NAD		Aceh Besar	Sdelog Polri NAD-Nias
		69			Perencanaan Mako Satbrimobda		Banda Aceh	Sdelog Polri NAD-Nias
		70	Rehabilitasi Markas Dit.POLAIR	Banda Aceh	Makopolair dan Dermaga		Banda Aceh	Sdelog Polri NAD-Nias

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Kegiatan Bapel BRR			
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Sesuai	Prioritas	Lokasi	Satker BRR
		71	Pembangunan Kembali Asrama Ditpol Air	Banda Aceh	Perencanaan Mako Polair dan Dermaga		Banda Aceh	Sdelog Polri NAD-Nias
		72			Pengawasan Mako Polair dan Dermaga		Banda Aceh	Sdelog Polri NAD-Nias
		73	Rehabilitasi Polres Aceh Besar	Aceh Besar		SERPAS Polda NAD	Banda Aceh	Sdeops Polri NAD-Nias
		74	Rehabilitasi Polres Aceh Barat	Aceh Barat		Dukungan Satgas Polda NAD	Banda Aceh	Sdeops Polri NAD-Nias
		75	Rehabilitasi Polres Pidie	Pidie		Dukungan BBM Polda NAD	Banda Aceh	Sdeops Polri NAD-Nias
		76	Rehabilitasi Polres Simeulue	Simeulue		KODAL KACPSDA Polda NAD	Banda Aceh	Sdeops Polri NAD-Nias
		77	Pembangunan Kembali Rumah Jabatan Polda	NAD		Monops Kapolda NAD	Banda Aceh	Sdeops Polri NAD-Nias
		78	Pembangunan Kembali Asrama Polisi	Lamteumen I		Duks Ops Log Polda Sumut	Nias	Sdeops Polri NAD-Nias
		79	Pembangunan Kembali Asrama Polisi	Lamteumen II		SERPAS Polda Sumut	Nias	Sdeops Polri NAD-Nias
		80	Pembangunan Kembali Asrama Brimob Lingke	Lingke		Dukungan Satgas Polda Sumut	Nias	Sdeops Polri NAD-Nias
		81	Pembangunan Kembali Asrama Polisi Ulhe Lheu	Ulhe Lheu	Mapolsek dan Rumdin Polsek Ulhe Lheu		Banda Aceh	Sdelog Polri NAD-Nias
		82	Pembangunan Kembali Asrama Polresta Banda Aceh di Ulhe Lheu	Ulhe Lheu		Dukungan BBM Polda Sumut	Nias	Sdeops Polri NAD-Nias
		83	Rehabilitasi Polresta Banda Aceh	Banda Aceh		KODAL KACPSDA Polda Sumut	Nias	Sdeops Polri NAD-Nias

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Kegiatan Bapel BRR			
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Sesuai	Prioritas	Lokasi	Satker BRR
		84	Pembangunan Kembali Asrama Polisi Lamjame	Lamjame	Rumdin dan Barak Siaga Lamjame		Banda Aceh	Sdelog Polri NAD-Nias
		85			Pengawasan Rumdin Punge dan Lamjame		Banda Aceh	Sdelog Polri NAD-Nias
		86	Pembangunan Kembali Asrama Polisi Punge	Punge	Rumdin Aspol Punge Banda Aceh		Banda Aceh	Sdelog Polri NAD-Nias
		87	Pembangunan Kembali Asrama Polresta Banda Aceh di Kebun Kelapa	Kebun Kelapa		Minops Kapolda Sumut	Nias	Sdeops Polri NAD-Nias
		88	Pembangunan Kembali Asrama Polisi Kebun Kelapa	Kebun Kelapa		Duk Ops Log SDEOPS	Jakarta	Sdeops Polri NAD-Nias
		89	Pembangunan Kembali Aspolsek Kuta Alam	Kuta Alam	Mapolsek Kuta Alam		Banda Aceh	Sdelog Polri NAD-Nias
		90	Pembangunan Kembali Aspolsek Darussalam	Darussalam	Rumdin Polsek Darussalam Aceh Besar		Aceh Besar	Sdelog Polri NAD-Nias
		91	Pembangunan Kembali Aspolsek Krueng Raya	Krueng Raya	Mapolsek dan Rumdin Krueng Raya		Aceh Besar	Sdelog Polri NAD-Nias
		92	Pembangunan Kembali Aspolsek Peukan Bada	Peukan Bada	Mapolsek Peukan Bada		Aceh Besar	Sdelog Polri NAD-Nias
		93			Rumdin polsek Peukan Bada		Aceh Besar	Sdelog Polri NAD-Nias
		94	Pembangunan Kembali Aspolres Pidie	Pidie		Duk Kodal SDEOPS	Jakarta	Sdeops Polri NAD-Nias
		95	Pembangunan Kembali Aspolres Aceh Barat	Aceh Barat		Duk Minops SDEOPS	Jakarta	Sdeops Polri NAD-Nias
		96	Pembangunan Kembali Aspolsek Johan	Johan Pahlawan	Mapolsek Johan Pahlawan dan Samatiga		Aceh Barat	Sdelog Polri NAD-Nias

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Kegiatan Bapel BRR			
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Sesuai	Prioritas	Lokasi	Satker BRR
		97	Pembangunan Kembali Aspolsek Sama Tiga	Sama Tiga		Duk Rendalops SDEOPS	Jakarta	Sdeops Polri NAD-Nias
		98	Pembangunan Kembali Aspolsek Setia Bakti	Setia Bakti		DUK Supervisi ke NAD	Banda Aceh	Sdeops Polri NAD-Nias
		99	Pembangunan Kembali Aspolsek Sampoinet	Sampoinet		Pemeliharaan Personel Polri	Banda Aceh	Sdesdm Polri NAD-Nias
		100	Pembangunan Kembali Aspolsek Teunom	Teunom		Werving untuk Polda NAD	Banda Aceh	Sdesdm Polri NAD-Nias
		101	Pembangunan Kembali Aspolsek Krueng Sabe	Krueng Sabe		Werving untuk SDE SDM	Banda Aceh	Sdesdm Polri NAD-Nias
		102	Pembangunan Kembali Aspolsek Lhoknga	Lhoknga		Honor untuk Pusdik Brimob	Banda Aceh	Sdesdm Polri NAD-Nias
		103	Pembangunan Kembali Aspolsek Leupung	Leupung		Honor untuk Sepolwan	Banda Aceh	Sdesdm Polri NAD-Nias
		104	Pembangunan Kembali Aspolsek Simeulue	Simeulue		Honor Biro Pers Polda NAD	Banda Aceh	Sdesdm Polri NAD-Nias
		105	Pembangunan Kembali Aspolsek Nias	Nias	Rehab dan Rekons Tahap I Nias		Nias	Sdelog Polri NAD-Nias
		106	Pengadaan Material Dasar POLRI	Nias	Rehab dan Rekons Tahap II Nias		Nias	Sdelog Polri NAD-Nias
		107	Pengadaan Peralatan Humas Polda NAD	NAD		Bahan Makan untuk Pusdik Brimob: ULP Pendidikan	Banda Aceh	Sdesdm Polri NAD-Nias
		108	Operasionalisasi Alat Transportasi	NAD		Bahan Makan untuk Pusdik Brimob: Ex. Fooding Siswa	Banda Aceh	Sdesdm Polri NAD-Nias
		109	Pengadaan Alat/Alsus Serse Polda NAD	NAD		Bahan Makan untuk Sepolwan	Banda Aceh	Sdesdm Polri NAD-Nias

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Kegiatan Bapel BRR			
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Sesuai	Prioritas	Lokasi	Satker BRR
		110				Bahan Makan untuk di Polda NAD	Banda Aceh	Sdesdm Polri NAD-Nias
		111				Operasional Pusdik Brimob	Banda Aceh	Sdesdm Polri NAD-Nias
		112				Operasional Sepolwan	Banda Aceh	Sdesdm Polri NAD-Nias
		113				Operasional Biro Pers Polda NAD	Banda Aceh	Sdesdm Polri NAD-Nias
		114				Operasional SDE SDM Polri	Banda Aceh	Sdesdm Polri NAD-Nias
		115				Operasional Lemdiklat Polri	Banda Aceh	Sdesdm Polri NAD-Nias
	Refungsionalisasi Kelembagaan LSN	116	Pengadaan Kamar Sandi Dan Peralatan Sandi	NAD	Operasi Intelijen dan Intelijen Strategis		Banda Aceh	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional NAD-Nias
		117			Pembinaan Persandian		Banda Aceh	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional NAD-Nias
	Refungsionalisasi Kelembagaan POLHUKAM	118	Rehabilitasi Prasarana Bangunan Kantor Polhukam	NAD		Administrasi Umum	Banda Aceh	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Kegiatan Bapel BRR			
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Sesuai	Prioritas	Lokasi	Satker BRR
STRATEGI KEMASYARAKATAN Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan	Pengembangan Ketahanan Masyarakat	119	Perumusan Kebijakan "Insentive Framework"	NAD		Pembuatan Buku Juknis/ Juklak	Banda Aceh	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias
1. Fasilitasi berbagai forum kemasyarakatan dalam mengembangkan wacana-wacana sosial politik untuk meningkatkan pemahaman persatuan bangsa		120	Desk Aceh	NAD	Operasional Lemdiklat Polri		Banda Aceh	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional NAD-Nias
		121	Pengembangan Diplomasi Kebencanaan dan Kemanusiaan	NAD	Penyelenggaraan Hubungan Dipl. Ekonomi dan Kerjasama Luar Negeri		Banda Aceh	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional NAD-Nias
		122			Penyelenggaraan Hubungan Dipl. Sosbud dan Penerangan Luar Negeri		Banda Aceh	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional NAD-Nias
		123			Penyelenggaraan koordinasi Kerjasama ASEAN		Banda Aceh	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional NAD-Nias
		124			Pembinaan Kerjasama Internasional		Banda Aceh	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional NAD-Nias
		125	Pengembangan EWS	NAD		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (BRR)	Banda Aceh	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan NAD-Nias
		126	Pemantapan Semangat Bela Negara	NAD dan Nias		Penerbitan Majalah/ Jurnal	Banda Aceh	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Kegiatan Bapel BRR			
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Sesuai	Prioritas	Lokasi	Satker BRR
		127	Peningkatan Kualitas Informasi Publik	NAD dan Nias	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi		Banda Aceh	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional NAD-Nias
		128			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Banda Aceh	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional NAD-Nias
		129			Administrasi Seminar/ Workshop dan Penelitian		Banda Aceh	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional NAD-Nias
		130	Bimbingan Teknis dan Replikasi Cinta Tanah Air dan Bhakti Pertiwi	NAD dan Nias		Pembuatan Leaflet/ Poster/ Kampanye	Banda Aceh	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias
		131	Revitalisasi Wawasan Kebangsaan	NAD dan Nias	Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)		Seluruh NAD	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan NAD-Nias
		132	Konsolidasi Dan Penguatan Kelembagaan	NAD dan Nias	Penelitian Pengembangan (Litbang)		8 Kab.	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan NAD-Nias
		133	Sosialisasi Bidang Polkam	NAD dan Nias	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi		Banda Aceh	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias
		134	Pemantauan Situasi Perkembangan Politik Masyarakat	NAD dan Nias	Pemberdayaan Sosial		Banda Aceh	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional NAD-Nias

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Kegiatan Bapel BRR			
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Sesuai	Prioritas	Lokasi	Satker BRR
Program Pemeliharaan Kamtibmas: 1. Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat.		135	Fasilitasi Pelembagaan Forum Kemasyarakatan	NAD dan Nias	Penyelenggaraan Ceramah/ Diskusi/ Seminar/ Sarasehan		Banda Aceh	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias
2. Pemulihan keamanan melalui pemulihan darurat polisionil, penyelenggaraan operasi kepolisian serta pemulihan daerah konflik vertikal maupun horizontal.		136	Pendataan Ulang Kependudukan/ Single Identity Number	NAD	Administrasi Kependudukan		Seluruh NAD	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan NAD-Nias
		137	Pengkajian Kondisi Masyarakat Aceh	NAD	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)		Seluruh NAD	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan NAD-Nias
3. Pengamanan daerah perbatasan Indonesia dengan mengupayakan keamanan lintas batas di wilayah perbatasan negara, dan mengupayakan keamanan di wilayah pulau-pulau terluar perbatasan negara.	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Daerah	138	Operasionalisasi EWS	NAD		Monitoring dan Evaluasi	Banda Aceh	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias
		139	Pengembangan Potensi Keamanan	NAD		Meubelair Kantor Dinas Infokom	Banda Aceh	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias
4. Penyelenggaraan kerjasama bantuan TNI ke Polri.		140	Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	NAD		Pkt Peralatan Stasiun RRI Banda Aceh	Banda Aceh	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik:	Refungsionalisasi Kelembagaan KOMINFO	141	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana	NAD	Pkt Rehabilitasi Gedung Kantor Infokom		Banda Aceh	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias
1. Pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi yang lebih luas secara cepat dan akurat.		142				Pkt Rehabilitasi RRI Stasiun Banda Aceh	Banda Aceh	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias
		143				Pkt Rehabilitasi RRI ex Pemancar Lamteumen	Banda Aceh	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias

Rencana Induk (BLUE PRINT)					Kegiatan Bapel BRR			
Program		No	Kegiatan	Lokasi	Sesuai	Prioritas	Lokasi	Satker BRR
		144				Pkt Rehabilitasi RRI ex Pemancar Indrapuri	Aceh Besar	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias
		145				Pkt Rehabilitasi Stasiun Transmisi TVRI Meulaboh	Meulaboh	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias
		146				Pkt Rehabilitasi Stasiun Transmisi	Meureudu	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias
		147				Pkt Rehabilitasi Stasiun Transmisi TVRI Geumpang	Geumpang	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias
		148				Pkt Peralatan TVRI Meulaboh	Meulaboh	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias
		149				Pkt Peralatan TVRI Meureudu	Meureudu	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias
		150				Pkt Peralatan TVRI Geumpang	Geumpang	Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias

LAMPIRAN II

Instrumen Monev P3RIRRWANS

per-Bidang Pemulihan

PEDOMAN OBSERVASI LAPANGAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS

(Catatan: ruang lingkup observasi lapangan ini diprioritaskan pada sector Sosial dan Budaya)

1. Bidang Pendidikan

a. Fisik (Pembangunan/rehabilitasi Sekolah)

NO.	URAIAN	SATUAN
1.	Jumlah sekolah yang dibangun	Unit,lokasi, Pelaksana
2.	Tingkat dan jenis sekolah yang dibangun	SD, SMP, SLTA, luas, jumlah
3	Luas bangunan (yang meliputi ruang kelas, ruang guru,toilet, lapangan olahraga)	unit
4	Kawasan pembangunan/rehabilitasi sekolah	pemukiman, lokasi baru
5	Jumlah ruangan yang sudah ditempati	ruang
6	Lama pelaksanaan pembangunan	Bulan,tahun
7	Status tanah pembangunan sekolah	Milik negara, ulayat atau sengketa
8	Ketersediaan kelancaran proses belajar (meliputi kursi murid,meja guru, papan tulis, almari	unit
9	Ketersediaan air bersih	
10	Ketersediaan penerangan	PLN, disel
11	Prasarana jalan ke sekolah	Aspal, tanah
12	Ketersediaan pembuangan sampah	Lobang,tong sampah
13	Ketersediaan sarana komunikasi	Telkom
14	Jumlah murid	orang
15	Jumlah guru	orang

b Non Fisik

NO.	URAIAN	SATUAN
A	Pelayanan pendidikan TK-PT	
1	Jenis pelayanan sekolah	unit
2	Peserta didik	orang
3	Waktu pelaksanaan	Bulan, tahun
4	Prospek kedepan	
B	Trauma Coselling	
1	Sistem pelaksanaan	
1	Bentuk kegiatan	
2	Lama pelaksanaan	Bulan,tahun
3	Peserta	orang
4	Pelaksana	Pemda, BRR, NGO/LSM
C	Pemberian Beasiswa	
1	Jumlah bantuan	peranak
2	Penerima bantuan	orang
3	Lama bantuan	Bulan, tahun
4	Pemberi bantuan	Bapel BRR, K/LPemda, dan NGO/LSM

2. Bidang Kesehatan

a. Fisik (Pembangunan/rehabilitasi Puskesmas, Posyandu, dan Polindes)

NO.	URAIAN	SATUAN
1.	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas,Posyandu,Rumah dinas tenaga medis, dan polindes) yang dibangun dan atau direhabilitasi	unit
3	Luas bangunan (yang meliputi ruang tenaga medis,pasien, ruang tunggu)	unit
4	Kawasan pembangunan/rehabilitasisarana kesehatan	pemukiman, lokasi baru
5	Jumlah sarana yang sudah ditempati	ruang
6	Lama pelaksanaan pembangunan	Bulan,tahun
7	Status tanah pembangunan sarana kesehatan	Milik negara, ulayat atau sengketa
8	Ketersediaan kelancaran pengobatan (meliputi laboratorium,ruang periksa , apotik, dsbnya)	unit
9	Ketersediaan air bersih	
10	Ketersediaan penerangan	PLN, disel
11	Prasarana jalan ke saraana kesehatan	Aspal, tanah
12	Ketersediaan pembuangan sampah	Lobang,tong sampah
13	Ketersediaan sarana komunikasi	Telkom
14	Jumlah pasien yang tertampung	orang

b. Non Fisik

NO.	URAIAN	SATUAN
A	Surveilens Epidemiologi	
1	Latar Belakang Pendidikan	SMA, Akademi, S1
2	Jumlah tenaga	orang
3	Pelaksana	Bulan, tahun
B	Pengadaan Tenaga Medis	
1	Sistem perekrutan	PNS, kontrak
2	Lama praktek	Bulan,tahun
3	Lokasi penempatan	Pemukiman,barak
4	Pembiayaan	Pemda, BRR, NGO/LSM
C	Pendataan Pegawai Kesehatan	
1	Sistem Pendataan	
2	Cakupan pendataan	Desa, Keleurahan,provinsi
3	Lama pelaksanaan	Bulan, tahun
4	Pelaksana	Bapel BRR, K/L,Pemda, dan NGO/LSM

3. Bidang Agama

a. Fisik (Pembangunan/rehabilitasi Puskesmas, Posyandu, dan polindes,rumah dinas tenaga medis)

NO.	URAIAN	SATUAN
1.	Jumlah sarana dan prasarana Ibadah (Mesjid,Meunasah,Gereja, dan Kantor KUA) yang dibangun dan atau direhabilitasi	unit
3	Luas bangunan	unit
4	Kawasan pembangunan/rehabilitasi sarana ibadah	pemukiman, lokasi baru
5	Jumlah sarana yang sudah ditempati	ruang
6	Lama pelaksanaan pembangunan	Bulan,tahun
7	Status tanah pembangunan sarana ibadah	Milik negara, ulayat atau sengketa
8	Ketersediaan kelancaran ibadah (meliputi, tempat beruduk, WC, mukenah,dsbnya	unit
9	Ketersediaan air bersih	
10	Ketersediaan penerangan	PLN, disel
11	Prasarana jalan ke sarana ibadah	Aspal, tanah
12	Ketersediaan pembuangan sampah	Lobang,tong sampah
13	Ketersediaan sarana komunikasi	Telkom
14	Jumlah jamaah yang tertampung	orang

b. Non Fisik

NO.	URAIAN	SATUAN
A	Rehabilitasi mental spritual	
1	Jumlah kegiatan rehabilitasi mental spritual	jenis
2	Peserta	orang
3	Waktu pelaksanaan	Bulan, tahun

4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Fisik (Rehabilitasi Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan)

NO.	URAIAN	SATUAN
1.	Jumlah sarana dan prasarana kelembagaan Pemberdayaan dan perlindungan anak	unit
2	Luas bangunan (yang meliputi ruang tamu, ruang pertemuan, ruang keterampilan, ruang tidur, medis,pasien, ruang tunggu)	unit
4	Kawasan rehabilitasi sarana kesehatan	pemukiman, lokasi baru
5	Jumlah sarana yang sudah brrfungsi	ruang
6	Lama pelaksanaan rehabilitasi	Bulan,tahun
7	Status tanah pembangunan sarana kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Milik negara, ulayat atau sengketa
8	Ketersediaan kelancaran aktivitas (meliputi ruang pelatihan, buku panduan, guru dsbnya)	unit
9	Ketersediaan air bersih	
10	Ketersediaan penerangan	PLN, disel
11	Prasarana jalan ke saraana kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Aspal, tanah
12	Ketersediaan pembuangan sampah	Lobang,tong sampah
13	Ketersediaan sarana komunikasi	Telkom
14	Jumlah perempuan dan anak yang tertampung	orang

b. *Non Fisik*

NO.	URAIAN	SATUAN
A	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	
1	Bentuk pemberdayaan	jenis
2	Peserta	orang
3	Waktu pelaksanaan	Bulan, tahun
4	Jumlah pengadaan akte gratis	buah

5. Sosial

a. *Fisik (Pembangunan Panti Sosial)*

NO.	URAIAN	SATUAN
1.	Jumlah pembangunan panti sosial yang dibangun dan atau direhabilitasi	unit
3	Luas bangunan (yang meliputi ruang tidur anak asuh,ruang guru asuh, ruang relajar,ruang bermain dsbnya)	unit
4	Kawasan pembangunan/rehabilitasi panti sosial	pemukiman, lokasi baru
5	Jumlah sarana yang sudahbisa ditempati	ruang
6	Lama pelaksanaan rehabilitasi	Bulan,tahun
7	Status tanah pembangunan panti sosial	Milik negara, ulayat atau sengketa
8	Ketersediaan air bersih	
9	Ketersediaan penerangan	PLN, disel
10	Prasarana jalan ke saraana kesehatan	Aspal, tanah
11	Ketersediaan pembuangan sampah	Lobang,tong sampah
12	Ketersediaan sarana komunikasi	Telkom
13	Jumlah pasien yang tertampung	orang

b. *Non Fisik*

No	URAIAN	SATUAN
A	Bantuan usaha ekonomi	
1	Syarat mendapat bantuan	Langsung,seleksi administrasi
2	Jumlah bantuan	Rupiah
3	Waktu pelaksanaan	Bulan, tahun
4	Bentuk usaha	Warung,sulam,jahit dsbnya
B	Penampungan anak yatim	
1	Sistem penampungan	
2	Lama penampungan	Bulan,tahun
3	Lokasi penampungan	Pemukiman,barak
4	Pembiayaan	Pemda, K/L,BRR, NGO/LSM
5	Pelaksana	Pemda, K/L,BRR, NGO/LSM
C	Bantuan Lansia, anak cacat	
1	Bentuk bantuan	Uang, barang
2	Lama pelaksanaan	Bulan, tahun
3	Pelaksana	Bapel BRR, K/L,Pemda, dan NGO/LSM

6. Bidang Budaya

a. Fisik (Rehabilitasi Prasarana Budaya meliputi Rumah Adat, Sanggar Kesenian,Pusat Dokumentasi dan Pusat Informasi Aceh)

NO.	URAIAN	SATUAN
1.	Jumlah prasarana budaya yang direhabilitasi	unit
3	Luas bangunan (yang meliputi ruang museum,latihan, penonton, arsip dsbnya)	unit
4	Kawasan rehabilitasi prasarana budaya	pemukiman, lokasi baru
5	Jumlah sarana yang sudah bisa ditempati	ruang
6	Lama pelaksanaan rehabilitasi	Bulan,tahun
7	Status tanah pembangunan	Milik negara, ulayat atau sengketa
8	Ketersediaan air bersih	
9	Ketersediaan penerangan	PLN, disel
10	Prasarana jalan ke sarana kesehatan	Aspal, tanah
11	Ketersediaan pembuangan sampah	Lobang,tong sampah
12	Ketersediaan sarana komunikasi	Telkom
13	Jumlah penonton,arsip, yang tertampung	unit

b. Non Fisik

NO.	URAIAN	SATUAN
A	Pemulihan kembali jati diri budaya masyarakat Aceh	
1	Bentuk kegiatan	Pertemuan
2	Volume pelaksanaan	Bulanan, triwulanan
3	Waktu pelaksanaan	Bulan, tahun
4	pelaksana	Warung,sulam,jahit dsbnya

7. Kependudukan dan Keluarga Berencana

a. Pendataan Penduduk NAD dan Nias

NO.	URAIAN	SATUAN
1.	Sistem pendataan	Random,sampling
2	Cakupan pendataan	Desa, Kelurahan,provinsi
4		pemukiman, lokasi baru
5	Jumlah sarana yang sudah bisa ditempati	ruang
6	Lama pelaksanaan rehabilitasi	Bulan,tahun
7	Hasil pendataan	buku

8. Pemuda dan Olah Raga

a Fisik (Rehabilitasi Sarana Olahraga)

NO.	URAIAN	SATUAN
1.	Jumlah prasarana olahraga yang direhabilitasi	unit
3	Luas lapangan)	unit
4	Kawasan rehabilitasi prasarana olahraga	pemukiman, lokasi baru
5	Kondisi sarana yang direhabilitasi	Proses pelaksanaan,selesai
6	Lama pelaksanaan rehabilitasi	Bulan,tahun
7	Status tanah pembangunan	Milik negara, ulayat atau sengketa
8	Ketersediaan perlengkapan sarana olahraga (meliputi bola, sarana latihan, peralatan lanilla)	

b. Non Fisik

NO.	URAIAN	SATUAN
A	Pemulihan kembali potensi olahraga	
1	Bentuk kegiatan	Pertemuan,workshop
2	Volume pelaksanaan	Bulanan, triwulanan
3	Waktu pelaksanaan	Bulan, tahun

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS

1. Bidang Pendidikan

a. Aspek Konsistensi

1. Apakah rencana program bidang pendidikan merupakan penjabaran dari Rencana Induk? Ya,tidak Kenapa dan bagaimana penjabarannya
2. Seberapa porsentase Rencana Aksi menjadi program
3. Berapa target program fisik *(pembangunan dan rehabilitasi sekolah*) tahun 2005 di NAD dan Nias? Target secara keseluruhan? Apa kendala yang dihadapi dan tindak lanjut yang diambil? Siapa pelaksananya?
4. Bagaimana pelaksanaan kegiatan non fisik dilaksanakan(*Pelayanan pendidikandari tingkat TK-PT, trauma conselling* , *pemberian beasiswa* dilaksanakan? Siapa pesertanya dan pelaksananya
5. Apa saja permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan ?
6. Bagaimana tindak lanjut dalam merespon terhadap permasalahan dan tantangan tersebut ?

b. Aspek Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program fisik(*pembangunan dan rehabilitasi sekolah*) serta program non fisik (*Pelayanan pendidikandari tingkat TK-PT, trauma conselling* , *pemberian beasiswa)* antara
   - Bapel BRR dengan Pemda ?
   - Bapel BRR dengan Donor/NGO?
   - Bapel BRR dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran ?
2. Apa saja permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan tersebut ?
3. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara :
   - Bapel BRR dengan 7 Satuan Kerja (Satker) dalam bidang pendidikan
   - Bapel BRR dengan Pemda (Diknas)
   - Bapel BRR dengan Donor/NGO ?

- Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran ?

4. Bagaimana sistem kerja Satuan Kerja (Satker) yang berada di bawah bidang pendidikan?
5. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Satker ?
6. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Satker ?

c. *Aspek Konsultasi (Partisipasi)*

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program fisik (*pembangunan dan rehabilitasi sekolah*) dan non fisik (*Pelayanan pendidikan dari tingkat TK-PT, trauma conselling* , *pemberian beasiswa)*
2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program
3. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses pelaksanaan program?
4. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik di Badan Pelaksana BRR dan Pemda?
5. Bagaimana ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap program yang dilaksanakan?

d. *Aspek Kapasitas*

1. Bagaimana realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang pendidikan?
2. Bagaiamana mekanisem dan tata kerja yang ada di satker pendidikan dan dinas penidikan
3. Sejauh ini apa saja permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut ?
4. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah ?
5. Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah ?
6. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah?
7. Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut ?
8. Bagaiamana *exit strategy* bagi kelembagaan pemerintahan daerah ?
9. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga ?

2. Bidang Kesehatan

a. Aspek Konsistensi

1. Apakah Rencana program bidang kesehatan tingkat lapangan merupakan penjabaran dari Rencana Induk? Ya,tidak, kenapa dan bagaimana penjabarannya?
2. Seberapa porsentase Rencana Aksi menjadi program
3. Berapa target program fisik pada tahun 2005 dan secara keseluruhan dan siapa pelaksananya. Program fisik meliputi
   a. Rumah sakit
   b. Posyandu
   c. Polindes
   d. Rumah dinas Tenaga Medis

   dan program non fisik yang meliputi :
   a. Surveilens epidemiologi
   b. Pengadaan tenaga medis
   c. Pendataan pegawai kesehatan yang meninggal/masih hidup
   d. Pengadaan peralatan laboratorium
4. Bagaimana pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik (Siapa pesertanya, pelaksananya dan lokasinya)
5. Apa saja permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan ?
6. Bagaimana tindak lanjut dalam merespon terhadap permasalahan dan tantangan tersebut ?

b. Aspek Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program fisik dan non fisik bidang kesehatan antara
   - Bapel BRR dengan Pemda ?
   - Bapel BRR dengan Donor/NGO?
   - Bapel BRR dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran ?
2. Apa saja permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan tersebut ?
3. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara :
   - Bapel BRR dengan 2 Satuan Kerja (Satker) dalam bidang Kesehatan
   - Bapel BRR dengan Pemda
   - Bapel BRR dengan Donor/NGO ?
   - Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran ?

4. Bagaimana sistem kerja Satuan Kerja (Satker) yang berada di bawah bidang kesehatann?
5. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Satker ?
6. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Satker ?

c. Aspek Konsultasi

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Program fisik dan non fisik di bidang kesehatan
2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program
3. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses pelaksanaan program?
4. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik di Badan Pelaksana BRR dan Pemda?
5. Bagaimana ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap program yang dilaksanakan?...
6. Bagaimana ketersediaan akses untuk berpartisipasi ?
7. Bagaimana ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik ?
8. Bagaimana ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan ?
9. Bagaimana ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran)?

d. Aspek Kapasitas

1. Bagaimana realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang pendidikan?
2. Bagaiamana mekanisem dan tata kerja yang ada di satker pendidikan dan dinas penidikan
3. Sejauh ini apa saja permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut ?
4. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah ?
5. Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah ?
6. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah?
7. Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut ?
8. Bagaiamana *exit strategy* bagi kelembagaan pemerintahan daerah

?

9. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga ?

3. Bidang Agama

a. Aspek Konsistensi

1. Apakah Rencana program bidang agama merupakan penjabaran dari RencanInduk? Ya,tidak, kenapa dan bagaimana penjabarannya?
2. Seberapa porsentase Rencana Aksi menjadi program
3. Berapa target program fisik pada tahun 2005 dan secara keseluruhan dan siapa pelaksananya. Program fisik (sarana Ibadan)meliputi
   a. Mesjid
   b. Meunasah
   c. Kantor KUA
   d. Gereja

   dan program non fisik (rehabilitasi mental spritual) yang meliputi :
   a. Pembinaan imam masjed
   b. Pembinaan guru ngaji
   c. Baitul Mal
4. Bagaimana pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik (Siapa pesertanya, pelaksananya dan lokasinya)
5. Apa saja permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan ?
6. Bagaimana tindak lanjut dalam merespon terhadap permasalahan dan tantangan tersebut ?

b. Aspek Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program fisik dan non fisik bidang agama antara
   a. Bapel BRR dengan Pemda ?
   b. Bapel BRR dengan Donor/NGO?
   c. Bapel BRR dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran ?
2. Apa saja permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan tersebut?
3. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara :
   a. Bapel BRR dengan Satuan Kerja (Satker) dalam bidang agama
   b. Bapel BRR dengan Pemda (Dinas Syariat Islam)
   c. Bapel BRR dengan Donor/NGO ?

d. Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran ?

4. Bagaimana sistem kerja Satuan Kerja (Satker) yang berada di bawah bidang Agama?
5. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Satker ?
6. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Satker ?

c. Aspek Konsultasi

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Program fisik dan non fisik di bidang Agama
2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program
3. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses pelaksanaan program?
4. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik di Badan Pelaksana BRR dan Pemda?
5. Bagaimana ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap program yang dilaksanakan?
6. Bagaimana ketersediaan akses untuk berpartisipasi ?
7. Bagaimana ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik ?
8. Bagaimana ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan ?
9. Bagaimana ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran)?

d. Aspek Kapasitas

1. Bagaimana realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang agama?
2. Bagaiamana mekanisem dan tata kerja yang ada di satker pendidikan dan ....
3. Sejauh ini apa saja permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut ?
4. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah ?
5. Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah ?
6. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah?
7. Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut ?

8. Bagaiamana *exit strategy* bagi kelembagaan pemerintahan daerah ?
9. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga ?

4. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Aspek Konsistensi

1. Apakah Rencana program bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan penjabaran dari Rencana Induk? Ya,tidak, kenapa dan bagaimana penjabarannya?
2. Seberapa porsentase Rencana Aksi menjadi program
3. Berapa target program fisik pada tahun 2005 dan secara keseluruhan dan siapa pelaksananya. Kegiatan program fisik meliputi *(rehabilitasi) kelembagaan PP* dan program non fisik yang meliputi :
    a. Pemberdayaan perempuan melalui :
        1. Pemenuhan kebutuhan dasar ibu dan anak
        2. Fasilitasi *women crisis center*
        3. pengembangan Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
        4. Pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha
    b. Perlindungan anak
        1. Fasilitasi *Children Center*
        2. Pengadaan akte kelahiran gratis
4. Bagaimana pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik (Siapa pesertanya, pelaksananya dan lokasinya)
5. Apa saja permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan ?
6. Bagaimana tindak lanjut dalam merespon terhadap permasalahan dan tantangan tersebut ?

b. Aspek Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program fisik dan non fisik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara
    a. Bapel BRR dengan Pemda ?
    b. Bapel BRR dengan Donor/NGO?
    c. Bapel BRR dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran ?
2. Apa saja permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan tersebut ?

3. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara :
    a. Bapel BRR dengan Satuan Kerja (Satker) dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
    b. Bapel BRR dengan Pemda
    c. Bapel BRR dengan Donor/NGO ?
    d. Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran ?
4. Bagaimana sistem kerja Satuan Kerja (Satker) yang berada di bawah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?
5. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Satker ?
6. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Satker ?

c. Aspek Konsultasi

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Program fisik dan non fisik di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program
3. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses pelaksanaan program?
4. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik di Badan Pelaksana BRR dan Pemda?
5. Bagaimana ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap program yang dilaksanakan?...
6. Bagaimana ketersediaan akses untuk berpartisipasi ?
7. Bagaimana ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik ?
8. Bagaimana ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan ?
9. Bagaimana ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran)?

d. Aspek Kapasitas

1. Bagaimana realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?
2. Bagaiamana mekanisem dan tata kerja yang ada di satker pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Sejauh ini apa saja permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut ?
4. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah ?

5. Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah ?
6. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah?
7. Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut ?
8. Bagaiamana *exit strategy* bagi kelembagaan pemerintahan daerah ?
9. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga ?

5. Sosial

a. Aspek Koordinasi

1. Apakah Rencana program bidang sosial merupakan penjabaran dari Rencana Induk? Ya,tidak, kenapa dan bagaimana penjabarannya?
2. Seberapa porsentase Rencana Aksi menjadi program
3. Berapa target program fisik pada tahun 2005 dan secara keseluruhan dan siapa pelaksananya.
    a. Kegiatan program fisik meliputi (*Pembangunan panti sosial*)
    b. Kegiatan program non fisik yang meliputi :
        1. Bantuan dan jaminan sosial (bantuaan usaha ekonomi)
        2. Penampungan anak yatim
        3. Bantuan lansia, anak cacat
4. Bagaimana pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik (Siapa pesertanya, pelaksananya dan lokasinya)
5. Apa saja permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan ?
6. Bagaimana tindak lanjut dalam merespon terhadap permasalahan dan tantangan tersebut ?

b. Aspek Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program fisik dan non fisik bidang sosial
    a. Bapel BRR dengan Pemda ?
    b. Bapel BRR dengan Donor/NGO?
    fc Bapel BRR dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran ?
2. Apa saja permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan tersebut ?

3. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara :
    a. Bapel BRR dengan 2 Satuan Kerja (Satker) dalam bidang sosial
    b. Bapel BRR dengan Pemda
    c. Bapel BRR dengan Donor/NGO ?
    d. Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran ?
4. Bagaimana sistem kerja Satuan Kerja (Satker) yang berada di bawah bidang sosial?
5. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Satker ?
6. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Satker ?

c. Aspek Konsultasi

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Program fisik dan non fisik di bidang sosial
2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program
2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses pelaksanaan program?
3. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik di Badan Pelaksana BRR dan Pemda?
4. Bagaimana ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap program yang dilaksanakan?
5. Bagaimana ketersediaan akses untuk berpartisipasi ?
6. Bagaimana ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik ?
7. Bagaimana ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan ?
8. Bagaimana ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran)?
9. Bagaimana mekanisme Pendataan dan kelengkapan kriteria serta petugas di lapangan?

d. Aspek Kapasitas

1. Bagaimana realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang sosial?
2. Bagaiamana mekanisem dan tata kerja yang ada di satker bidang sosial?
3. Sejauh ini apa saja permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut ?

4. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah ?
5. Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah ?
6. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah?
7. Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut ?
8. Bagaiamana *exit strategy* bagi kelembagaan pemerintahan daerah ?
9. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga ?

6. Budaya

a. Aspek Konsistensi

1. Apakah Rencana program bidang Budaya merupakan penjabaran dari Rencana Induk?Ya,tidak, kenapa dan bagaimana penjabarannya?
2. Seberapa porsentase Rencana Aksi menjadi program
3. Berapa target program fisik pada tahun 2005 dan secara keseluruhan dan siapa

   pelaksananya. Program fisik meliputi

   a. Rehabilitasi prasarana budaya (rumah adat, sanggar kesenian, Pusat dokumentasi dan Informasi Aceh)

   dan program non fisik yang meliputi :

   a. Pemulihan kembali jati diri budaya masyarakat Aceh meliputi (Pelaksanaan kongres kesenian
4. Bagaimana pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik (Siapa pesertanya, pelaksananya dan lokasinya)
5. Apa saja permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan ?
6. Bagaimana tindak lanjut dalam merespon terhadap permasalahan dan tantangan tersebut ?

b. Aspek Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program fisik dan non fisik bidang budaya antara
   a. Bapel BRR dengan Pemda ?
   b. Bapel BRR dengan Donor/NGO?
   c. Bapel BRR dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran ?
2. Apa saja permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan tersebut ?

3. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara :
    a. Bapel BRR dengan 2 Satuan Kerja (Satker) dalam bidang budaya
    b. Bapel BRR dengan Pemda
    c. Bapel BRR dengan Donor/NGO ?
    d. Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran ?
4. Bagaimana sistem kerja Satuan Kerja (Satker) yang berada di bawah bidang budaya?
5. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Satker ?
6. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Satker ?

c Aspek Konsultasi

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

   Program fisik dan non fisik di bidang budaya
2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program
3. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses pelaksanaan

   program?
4. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik di Badan Pelaksana BRR dan Pemda?
5. Bagaimana ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap program yang dilaksanakan?
6. Bagaimana ketersediaan akses untuk berpartisipasi ?
7. Bagaimana ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik ?
8. Bagaimana ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan ?
9. Bagaimana ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran)?

d. Aspek Kapasitas

1. Bagaimana realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang budaya?
2. Bagaiamana mekanisem dan tata kerja yang ada di satker bidang budaya?
3. Sejauh ini apa saja permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut ?

4. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah ?
5. Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah ?
6. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah?
7. Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut ?
8. Bagaiamana *exit strategy* bagi kelembagaan pemerintahan daerah ?
9. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga ?

7. Kependudukan dan Keluarga Berencana

a. Aspek Konsistensi

1. Apakah Rencana program bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan penjabaran dari Rencana Induk?Ya,tidak, kenapa dan bagaimana penjabarannya?
2. Seberapa porsentase Rencana Aksi menjadi program
3. Berapa target kegiatan program pada tahun 2005 dan secara keseluruhan dan siapa

   pelaksananya. Program yang meliputi :

   a. Pendataan penduduk NAD dan Nias

   b. Pelayanan keluarga berencana
4. Bagaimana pelaksanaan kegiatan program diatas?
5. Apa saja permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan ?
6. Bagaimana tindak lanjut dalam merespon terhadap permasalahan dan tantangan tersebut ?

b. Aspek Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program kependudukan

   dan keluarga berencana antara

   a. Bapel BRR dengan Pemda ?

   b. Bapel BRR dengan Donor/NGO?

   c. Bapel BRR dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran ?
2. Apa saja permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan tersebut ?

3. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara :
    a. Bapel BRR dengan 3 Satuan Kerja (Satker) dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana?
    b. Bapel BRR dengan Pemda
    c. Bapel BRR dengan Donor/NGO ?
    d. Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran ?
4. Bagaimana sistem kerja Satuan Kerja (Satker) yang berada di bawah bidang kependudukan dan keluarga berencana?
5. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Satker ?
6. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Satker ?

c. Aspek Konsultasi

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Program dan kegiatan bidang kependudukan dan keluarga berencana?
2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program
3. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses pelaksanaan program?
4. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik di Badan Pelaksana BRR dan Pemda?
5. Bagaimana ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap program yang dilaksanakan?
6. Bagaimana ketersediaan akses untuk berpartisipasi ?
7. Bagaimana ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik ?
8. Bagaimana ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan ?
9. Bagaimana ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran)?

d. Aspek Kapasitas

1. Bagaimana realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang sosial?
2. Bagaiamana mekanisem dan tata kerja yang ada di satker keluarga berencana?
3. Sejauh ini apa saja permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut ?
4. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah ?

5. Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah ?
6. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah?
7. Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut ?
8. Bagaiamana *exit strategy* bagi kelembagaan pemerintahan daerah ?
9. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga ?

8. Pemuda dan Olah Raga

a. Aspek Konsistensi

1. Apakah Rencana program bidang Pemuda dan olahraga merupakan penjabaran dari Rencana Induk?Ya,tidak, kenapa dan bagaimana penjabarannya?
2. Seberapa porsentase Rencana Aksi menjadi program
3. Berapa target program fisik pada tahun 2005 dan secara keseluruhan dan siapa pelaksananya. Program fisik meliput
   a. Rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga dan program non fisik yang meliputi Pemulihan kembali potensi kepemudaan
4. Bagaimana pelaksanaan kegiatan program diatas?
5. Apa saja permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan ?
6. Bagaimana tindak lanjut dalam merespon terhadap permasalahan dan tantangan tersebut ?

b. Aspek Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan pemuda dan olahraga antara
   a. Bapel BRR dengan Pemda ?
   b. Bapel BRR dengan Donor/NGO?
   c. Bapel BRR dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran ?
2. Apa saja permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan tersebut ?
3. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara :
   a. Bapel BRR dengan 1 Satuan Kerja (Satker) dalam bidang prmuda dan olahraga
   b. Bapel BRR dengan Pemda (Dispora, Koni, dan dinas lain)
   c. Bapel BRR dengan Donor/NGO ?

d. Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran ?

4. Bagaimana sistem kerja Satuan Kerja (Satker) yang berada di bawah bidang pemuda dan olahraga?
5. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Satker ?
6. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Satker ?

c. Aspek Konsultasi

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Program dan kegiatan bidang pemuda dan olahraga?
2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program
3. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses pelaksanaan program?
4. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik di Badan Pelaksana BRR dan Pemda?
5. Bagaimana ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap program yang dilaksanakan?
6. Bagaimana ketersediaan akses untuk berpartisipasi ?
7. Bagaimana ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik ?
8. Bagaimana ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan ?
9. Bagaimana ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran)?

d. Aspek Kapasitas

1. Bagaimana realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang sosial?
2. Bagaiamana mekanisem dan tata kerja yang ada di satker keluarga berencana?
3. Sejauh ini apa saja permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut ?
4. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah ?
5. Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah ?

15. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah?
16. Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut ?

17. Bagaiamana *exit strategy* bagi kelembagaan pemerintahan daerah ?
18. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pengawasan dalam lembaga ?

PEDOMAN OBSERVASI LAPANGAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS

(Catatan: ruang lingkup observasi lapangan ini diprioritaskan pada sektor perekonomian dan tenaga kerja)

I. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Pembangunan Sarana

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Luas wilayah rehabilitasi tambak dan pembangunan pelabuhan pendaratan ikan (PPI), pelabuhan perikanan	
2.	Luas daerah rehabilitasi tambak dan pembangunan pelabuhan pendaratan ikan (PPI), pelabuhan perikanan yang terbangun	
3.	Jumlah, jenis unit target yang terbangun	
4.	Jumlah, jenis unit target yang telah dioperasikan	
5.	Jumlah, jenis bangunan/unit pelayanan	
6.	Jenis Detail Design ataupun Master Plan yang dilaksanakan	
7.	Pola & jaringan distribusi hasil kelautan dan perikanan	

2. Kualitas Pembangunan Sarana

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Spesifikasi teknis tambak, pelabuhan pendaratan ikan (PPI) serta pelabuhan perikanan	
2.	Kondisi fisik pada bangunan tambak, pelabuhan pendaratan ikan (PPI), pelabuhan perikanan	
3.	Akses keluar masuk lokasi	

3. *Kelengkapan Sarana*

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Fasilitas bangunan BBIP	
2.	Fasilitas Lab. Uji mutu dan pengolahan ikan, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan Pos karantina	
3.	Fasilitas Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)	
4.	Fasilitas Pos karantina	
5.	Fasilitas Pembinaan BBIP dan Pembinaaan budidaya	
6.	Fasilitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan	
7.	Jenis bantuan yang diberikan dalam menunjang rehabilitasi sarana-prasarana privat dan publik (baik dalam bentuk pendanaan/modal usaha berupa hibah langsung, penyediaan sistem insentif kredit ataupun pengadaan barang/bantuan teknis baik perlengkapan maupun peralatan)	

II. Sub Bidang Pertanian

1. *Pembangunan Sarana*

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Luas wilayah Rehabilitasi struktur lahan pertanian dan jalan usaha tani /produksi, Pembangunan saluran air, irigasi dan unit pembibitan dan pembenihan	
2.	Luas daerah Rehabilitasi struktur lahan pertanian dan jalan usaha tani /produksi, Pembangunan saluran air, irigasi dan unit pembibitan dan pembenihan yang terbangun	
3.	Jumlah, jenis unit target yang terbangun	
4.	Jumlah, jenis unit target yang telah dioperasikan	
5.	Jumlah, jenis bangunan/unit pelayanan	
6.	Jenis Detail Design ataupun Master Plan yang dilaksanakan	
7.	Pola & jaringan distribusi hasil pertanian	

2. Kualitas Pembangunan Sarana

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Spesifikasi teknis struktur lahan pertanian, saluran air dan irigasi, jalan usaha tani/produksi, serta unit pembibitan dan pembenihan	
2.	Kondisi fisik pada struktur lahan pertanian, saluran air dan irigasi, jalan usaha tani/produksi, serta unit pembibitan dan pembenihan	
3.	Akses keluar masuk lokasi	

3. Kelengkapan Sarana

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	
2.	Fasilitas Pos Kesehatan Hewan	
3.	Fasilitas Penelitian & Pengembangan Teknologi Tepat Guna	
4.	Fasilitas prasarana & sarana kerja (kantor dinas, karantina, balai penyuluhan, balai diklat pertanian dan laboratorium)	
5.	Fasilitas dan jenis bantuan bimbingan, pelatihan, pendampingan dan pembinaan	
6.	Jenis bantuan yang diberikan dalam menunjang rehabilitasi sarana-prasarana privat dan publik (baik dalam bentuk pendanaan/modal usaha berupa hibah langsung, penyediaan sistem insentif kredit ataupun pengadaan barang/bantuan teknis baik perlengkapan maupun peralatan)	

III. Sub Bidang Perindustrian

1. Pembangunan Sarana

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Luas wilayah pembangunan gedung kantor, balai pelatihan dan laboratorium	
2.	Luas daerah gedung kantor, balai pelatihan dan laboratorium yang terbangun	
3.	Jumlah, jenis unit target yang terbangun	
4.	Jumlah, jenis unit target yang telah dioperasikan	
5.	Jumlah, jenis bangunan/unit pelayanan	
6.	Jenis Detail Design ataupun Master Plan yang dilaksanakan	
7.	Pola & jaringan distribusi hasil industri	

2. *Kualitas Pembangunan Sarana*

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Spesifikasi teknis gedung kantor, balai pelatihan dan laboratorium	
2.	Kondisi fisik pada gedung kantor, balai pelatihan dan laboratorium	
3.	Akses keluar masuk lokasi	

3. *Kelengkapan Sarana*

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Fasilitas gedung kantor, balai pelatihan dan laboratorium	
2.	Jenis bantuan yang diberikan dalam menunjang rehabilitasi sarana-prasarana privat dan publik (baik dalam bentuk pendanaan/modal usaha berupa hibah langsung, penyediaan sistem insentif kredit ataupun pengadaan barang/bantuan teknis baik perlengkapan maupun peralatan)	

IV. Sub Bidang Perdagangan

1. *Pembangunan Sarana*

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Luas wilayah pemasangan tenda untuk pasar darurat pasa masa Tanggap Darurat pembangunan pasar tradisional, pasar grosir/induk serta pergudangan	
2.	Luas daerah pemasangan tenda untuk pasar darurat pasa masa Tanggap Darurat pembangunan pasar tradisional, pasar grosir/induk serta pergudangan yang terbangun	
3.	Jumlah, jenis unit target yang terbangun	
4.	Jumlah, jenis unit target yang telah dioperasikan	
5.	Jumlah, jenis bangunan/unit pelayanan	
6.	Jenis Detail Design ataupun Master Plan yang dilaksanakan	
7.	Pola & jaringan distribus hasil perdagangan	

2. *Kualitas Pembangunan Sarana*

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Spesifikasi teknis dari pasar darurat pasa masa Tanggap Darurat, pasar tradisional, pasar grosir/induk, pergudangan, Metrologi serta Posko koordinasi sektor perdagangan.	
2.	Kondisi fisik pada pasar darurat pasa masa Tanggap Darurat, pasar tradisional, pasar grosir/induk, pergudangan, Metrologi serta Posko koordinasi sektor perdagangan.	
3.	Akses keluar masuk lokasi	

3. *Kelengkapan Sarana*

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Fasilitas pasar darurat pada masa Tanggap Darurat	
2.	Fasilitas pasar tradisional modern	
3.	Fasilitas pasar grosir/induk	
4.	Fasilitas pergudangan, metrologi serta posko koordinasi sektor perdagangan	
5.	Jenis bantuan yang diberikan dalam menunjang rehabilitasi sarana-prasarana privat dan publik (baik dalam bentuk pendanaan/modal usaha berupa hibah langsung, penyediaan sistem insentif kredit ataupun pengadaan barang/bantuan teknis baik perlengkapan maupun peralatan)	

V. Sub Bidang Pariwisata

1. *Pembangunan Sarana*

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Lokasi dan Luas wilayah daerah pariwisata yang rusak	
2.	Jumlah dan jenis rehabilitasi sarana-prasarana pariwisata yang rusak	
3.	Jumlah, jenis unit target yang terbangun	
4.	Jumlah, jenis unit target yang telah dioperasikan	
5.	Jumlah, jenis bangunan/unit pelayanan	
6.	Jenis Detail Design ataupun Master Plan yang dilaksanakan	

2. *Kualitas Pembangunan Sarana*

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Spesifikasi teknis rehabilitasi sarana-prasarana pariwisata yang rusak	
2.	Kondisi pada bangunan sarana-prasarana pariwisata yang telah diperbaiki	
3.	Akses keluar masuk lokasi	

3. *Kelengkapan Sarana*

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Fasilitas pengadaan sarana angkutan dilihat dari jenis dan jumlah	
2.	Jenis bantuan yang diberikan dalam menunjang rehabilitasi sarana-prasarana privat dan publik (baik dalam bentuk pendanaan/modal usaha berupa hibah langsung, penyediaan sistem insentif kredit ataupun pengadaan barang/bantuan teknis baik perlengkapan maupun peralatan)	

VI. Sub Bidang Tenaga Kerja

1. *Pembangunan Sarana*

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Jumlah dan jenis balai latihan kerja dan kantor loka latihan kerja yang terbangun	
2.	Jumlah dan jenis balai latihan kerja dan kantor loka latihan kerja yang telah dioperasikan	
3.	Jumlah, jenis bangunan/unit pelayanan	
4.	Jenis Detail Design ataupun Master Plan yang dilaksanakan	
5.	Pola dan jaringan penyerapan kerja	

2. *Kualitas Pembangunan Sarana*

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Spesifikasi Teknis Pembangunan balai latihan kerja dan kantor loka latihan kerja	
2.	Kondisi fisik pada bangunan balai latihan kerja dan kantor loka latihan kerja	
3.	Akses keluar masuk lokasi	

3. *Kelengkapan Sarana*

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Fasilitas pada balai latihan kerja dan kantor loka latihan kerja	
2.	Jenis bantuan yang diberikan dalam menunjang rehabilitasi sarana-prasarana privat dan publik (baik dalam bentuk pendanaan/modal usaha berupa hibah langsung, penyediaan sistem insentif kredit ataupun pengadaan barang/bantuan teknis baik perlengkapan maupun peralatan)	

VII.Sub Bidang Koperasi

1. *Pembangunan Sarana*

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Luas wilayah Pembangunan/Renovasi pasar darurat, pasar grosir, pasar eceran, pasar ikan, pasar tradisional, TPI	
2.	Luas daerah Pembangunan/Renovasi pasar darurat, pasar grosir, pasar eceran, pasar ikan, pasar tradisional, TPI yang terbangun	
3.	Jumlah, jenis unit target yang terbangun	
4.	Jumlah, jenis unit target yang telah dioperasikan	
5.	Jumlah, jenis unit kios dan gerobak dorong UKM yang diperbaiki dan yang dioperasikan	
6.	Jumlah, jenis bangunan/unit pelayanan	
7.	Jenis Detail Design ataupun Master Plan yang dilaksanakan	
8.	Pola & jaringan koperasi	

2. *Kualitas Pembangunan Sarana*

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Spesifikasi Teknis Pembangunan/Renovasi pasar darurat, pasar grosir, pasar eceran, pasar ikan, pasar tradisional, TPI	
2.	Kondisi fisik pada bangunan pasar darurat, pasar grosir, pasar eceran, pasar ikan, pasar tradisional, TPI	
3.	Akses keluar masuk lokasi	

3. *Kelengkapan Sarana*

NO.	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Fasilitas pasar darurat, pasar grosir, pasar eceran, pasar ikan, pasar tradisional, TPI	
2.	Jenis bantuan yang diberikan dalam menunjang rehabilitasi sarana-prasarana privat dan publik (baik dalam bentuk pendanaan/modal usaha berupa hibah langsung, penyediaan sistem insentif kredit ataupun pengadaan barang/bantuan teknis baik perlengkapan maupun peralatan)	

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS

I. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

a. Aspek Konsistensi

1. Apakah Rencana Program bidang kelautan dan perikanan merupakan penjabaran dari Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias? Jika sudah, bagaimana penjabarannya?
2. Berapa jumlah pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan yang telah dibangun atau direncanakan akan dibangun dan darimana sumber pembiayaannya yang sudah terbangun? Apakah terdapat kendala dalam pembangunannya?
3. Apakah program rehabilitasi fisik perikanan (tambak, pelabuhan pendaratan ikan (PPI), pelabuhan perikanan, saluran tangkap dan prasarana publik lain) telah dilakukan? Berapa target pencapaiannya?
4. Apakah ada bantuan pendanaan untuk modal kerja, perlengkapan/ peralatan serta pelatihan/pembinaan mengenai kelautan dan perikanan? Siapa sasaran targetnya? Sumbernya dari mana saja? Apakah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat di lokasi pantai? Hingga saat ini sudah terpenuhi berapa persen? Apakah bantuan tersebut tersalurkan secara tepat?
5. Adakah perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di lokasi pantai setelah terlaksananya rehabilitasi/pembangunan kembali dan pemberian bantuan? Apa indikasi yang menjelaskan hal tersebut?
6. Apa saja permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan ? Bagaimana tindak lanjut dalam merespon terhadap permasalahan dan tantangan tersebut?
7. Bagaimana proses dan mekanisme penyusunan Rencana Aksi tersebut? Siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan tersebut?
8. Bagaimana sistem perencanaan yang terdapat dalam lembaga BRR dan Pemda?
9. Sejauhmana kesesuaian antara perencanaan yang telah disusun dengan pelaksanaan di lapangan?

10. Bagaimana kesesuaian aspek perencanaan program/kegiatan antara :
    - Bapel BRR dengan K/L terkait dengan bidang kelautan dan perikanan?
    - Bapel BRR dengan Pemda?
    - Bapel BRR dengan Donor/NGO?

b. Aspek Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program fisik kelautan & perikanan (tambak, pelabuhan pendaratan ikan (PPI), pelabuhan perikanan, saluran tangkap dan prasarana publik lain) dan bantuan pendanaan, perlengkapan/peralatan perikanan dan pelatihan/pembinaan antara :
    - Bapel BRR dengan K/L terkait?
    - Bapel BRR dengan Pemda?
    - Bapel BRR dengan Donor/NGO?
    - Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran (masyarakat)?
2. Apa masalah yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan tersebut?
3. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara :
    - Bapel BRR dengan Satuan Kerja (Satker) terkait dengan bidang kelautan dan perikanan?
    - Bapel BRR dengan K/L terkait?
    - Bapel BRR dengan Pemda?
    - Bapel BRR dengan SKPD?
    - Bapel BRR dengan Donor/NGO?
    - Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran(masyarakat)?
4. Bagaimana sistem kerja dan koordinasi Satuan Kerja (Satker) Bapel BRR yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan?
5. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Satker?
6. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Satker?

c. Aspek Konsultasi

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program fisik rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelautan dan perikanan (perlengkapan/peralatan berupa tambak, pelabuhan pendaratan ikan (PPI), pelabuhan perikanan, saluran tangkap dan prasarana publik lain) dan non fisik (bantuan pendanaan, pelatihan/pembinaan) ?

2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi?
3. Apakah proses partisipasi masyarakat/lembaga agama, adat dan sosial lainnya dalam program pembangunan ekonomi daerah (proses penyusunan rencana dan penganggaran) pada tingkat kecamatan/ desa/gampong dan mukim sudah terlaksana?
4. Apakah pemberdayaan/partisipasi lembaga agama, adat dan sosial lainnya dalam partisipasi proses perencanaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan ekonomi di Aceh sudah terlaksana? Apakah forum komunikasi masyarakat sudah terbentuk?
5. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik di Badan Pelaksana BRR dan Pemda?
6. Bagaimana ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap program yang dilaksanakan? Bagaimana ketersediaan akses untuk berpartisipasi ?
7. Bagaimana ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik dan untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan ?

d. Aspek Kapasitas

1. Bagaimana kapasitas kelembagaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan bidang kelautan dan perikanan?
2. Bagaiamana mekanisme dan tata kerja yang dimiliki lembaga? khususnya di satker bidang kelautan dan perikanan? Sejauh ini apa saja permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut?
3. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemda? Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemda?
4. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemda?
5. Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut?
6. Bagaiamana *exit strategy* bagi kelembagaan pemerintahan daerah?
7. Bagaimana mekanisne pelaporan dan pengawasan dalam lembaga?

II. Sub Bidang Koperasi

a. Aspek Konsistensi

1. Apakah Rencana Program bidang koperasi merupakan penjabaran dari Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias? Jika sudah, bagaimana penjabarannya?
2. Berapa jumlah pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana di bidang koperasi yang telah dibangun atau direncanakan akan

dibangun dan darimana sumber pembiayaannya yang sudah terbangun? Apakah terdapat kendala dalam pembangunannya?

3. Apakah program rehabilitasi fisik koperasi (fasilitas kios, dan gerobak dorong UKM, pasar) telah dilakukan? Berapa target pencapaiannya? Siapa sasaran targetnya?
4. Apakah ada bantuan pendanaan untuk modal kerja, perlengkapan/ peralatan serta pelatihan/pembinaan mengenai koperasi? Siapa sasaran targetnya? Sumbernya dari mana saja? Apakah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat? Hingga saat ini sudah terpenuhi berapa persen? Apakah bantuan tersebut tersalurkan secara tepat?
5. Adakah perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat setelah terlaksananya rehabilitasi/pembangunan kembali/renovasi ? Apa indikasi yang menjelaskan hal tersebut?
6. Apa saja permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan ? Bagaimana tindak lanjut dalam merespon terhadap permasalahan dan tantangan tersebut?
7. Bagaimana proses dan mekanisme penyusunan Rencana Aksi tersebut? Siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan tersebut?
8. Bagaimana sistem perencanaan yang terdapat dalam lembaga BRR dan Pemda?
9. Sejauhmana kesesuaian antara perencanaan yang telah disusun dengan pelaksanaan di lapangan?
10. Bagaimana kesesuaian aspek perencanaan program/kegiatan antara :
    - Bapel BRR dengan K/L terkait dengan bidang koperasi?
    - Bapel BRR dengan Pemda?
    - Bapel BRR dengan Donor/NGO?

b. Aspek Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program fisik koperasi (fasilitas kios, dan gerobak dorong UKM, pasar) antara :
    - Bapel BRR dengan K/L terkait?
    - Bapel BRR dengan Pemda?
    - Bapel BRR dengan Donor/NGO?
    - Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran (masyarakat)?
2. Apa masalah yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan tersebut?
3. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan antara :
    - Bapel BRR dengan Satuan Kerja (Satker) terkait bidang koperasi?
    - Bapel BRR dengan K/L terkait?

- Bapel BRR dengan Pemda?
- Bapel BRR dengan SKPD?
- Bapel BRR dengan Donor/NGO?
- Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran(masyarakat)?

4. Bagaimana sistem kerja dan koordinasi Satuan Kerja (Satker) Bapel BRR yang terkait dengan bidang koperasi?
5. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Satker?
6. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Satker?

c. Aspek Konsultasi

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program fisik rehabilitasi dan rekonstruksi bidang koperasi (fasilitas kios, dan gerobak dorong UKM, pasar) dan non fisik (bantuan pendanaan, pelatihan/pembinaan) ?
2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi?
3. Apakah proses partisipasi masyarakat/lembaga agama, adat dan sosial lainnya dalam program pembangunan ekonomi daerah (proses penyusunan rencana dan penganggaran) pada tingkat kecamatan/ desa/gampong dan mukim sudah terlaksana?
4. Apakah pemberdayaan/partisipasi lembaga agama, adat dan sosial lainnya dalam partisipasi proses perencanaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan ekonomi di Aceh sudah terlaksana? Apakah forum komunikasi masyarakat sudah terbentuk?
5. Bagaimana ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap program yang dilaksanakan? Bagaimana ketersediaan akses untuk berpartisipasi ?
6. Bagaimana ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik dan untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan ?
7. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik di Bapel BRR dan Pemda?

d. Aspek Kapasitas

1. Bagaimana kapasitas kelembagaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan bidang koperasi?
2. Bagaiamana mekanisme dan tata kerja yang dimiliki lembaga? khususnya di satker bidang koperasi ? Sejauh ini apa saja permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut?
3. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemda? Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemda?

4. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemda?
5. Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut?
6. Bagaiamana *exit strategy* bagi kelembagaan pemerintahan daerah?
7. Bagaimana mekanisne pelaporan dan pengawasan dalam lembaga?

III. Sub Bidang Pariwisata

a. *Aspek Konsistensi*

1. Apakah Rencana Program bidang pariwisata sudah merujuk kepada Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Nias? Jika sudah, bagaimana penjabarannya?
2. Berapa jumlah pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan yang telah dibangun atau direncanakan akan dibangun dan darimana sumber pembiayaannya yang sudah terbangun? Apakah terdapat kendala dalam pembangunannya?
3. Bagaimana proses dan mekanisme penyusunan Rencana Aksi tersebut? Siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan tersebut?
4. Bagaimana sistem perencanaan yang terdapat dalam lembaga BRR dan Pemda?
5. Apakah program rehabilitasi fisik pariwisata (sarana dan prasarana) telah dilakukan? Berapa target pencapaiannya?
6. Apakah ada bantuan pengadaan sarana angkutan wisata? Siapa sasaran targetnya? Sumbernya dari mana saja? Hingga saat ini sudah terpenuhi berapa persen ?
7. Adakah perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat setelah terlaksananya rehabilitasi/pembangunan kembali dan pemberian bantuan? Apa indikasi yang menjelaskan hal tersebut?
8. Apa saja permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan? Bagaimana tindak lanjut dalam merespon permasalahan dan tantangan tersebut?
9. Sejauhmana kesesuaian antara perencanaan yang telah disusun dengan pelaksanaan di lapangan?
10. Bagaimana kesesuaian aspek perencanaan program/kegiatan antara :
    - Bapel BRR dengan K/L terkait dengan bidang pariwisata?
    - Bapel BRR dengan Pemda?
    - Bapel BRR dengan Donor/NGO?

b. Aspek Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program fisik pariwisata (sarana dan prasarana) dan bantuan pengadaan sarana angkutan wisata antara :
   - Bapel BRR dengan K/L terkait?
   - Bapel BRR dengan Pemda?
   - Bapel BRR dengan Donor/NGO?
   - Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran (masyarakat)?
2. Apa masalah yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan tersebut?
3. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan antara :
   - Bapel BRR dengan Satuan Kerja (Satker) terkait bidang pariwisata?
   - Bapel BRR dengan K/L terkait?
   - Bapel BRR dengan Pemda?
   - Bapel BRR dengan SKPD?
   - Bapel BRR dengan Donor/NGO?
   - Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran(masyarakat)?
4. Bagaimana sistem kerja dan koordinasi Satuan Kerja (Satker) Bapel BRR yang terkait dengan bidang pariwisata?
5. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Satker?
6. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Satker?

c. Aspek Konsultasi

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program fisik rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pariwisata (sarana dan prasarana) dan bantuan pengadaan sarana angkutan wisata?
2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi?
3. Apakah proses partisipasi masyarakat/lembaga agama, adat dan sosial lainnya dalam program pembangunan ekonomi daerah (proses penyusunan rencana dan penganggaran) pada tingkat kecamatan/ desa/gampong dan mukim sudah terlaksana?
4. Apakah pemberdayaan/partisipasi lembaga agama, adat dan sosial lainnya dalam partisipasi proses perencanaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan ekonomi di Aceh sudah terlaksana? Apakah forum komunikasi masyarakat sudah terbentuk?
5. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik di Bapel BRR dan Pemda?
6. Bagaimana ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi

terhadap program yang dilaksanakan? Bagaimana ketersediaan akses untuk berpartisipasi ?

7. Bagaimana ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik dan untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan ?

d. Aspek Kapasitas

1. Bagaimana kapasitas kelembagaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan bidang pariwisata?
2. Bagaiamana mekanisme dan tata kerja yang dimiliki lembaga? Khususnya di satker bidang pariwisata ? Sejauh ini apa saja permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut?
3. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemda? Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemda?
4. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemda?
5. Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut?
6. Bagaiamana *exit strategy* bagi kelembagaan pemerintahan daerah?
7. Bagaimana mekanisne pelaporan dan pengawasan dalam lembaga?

IV. Sub Bidang Perdagangan

a. Aspek Konsistensi

1. Apakah Rencana Program bidang perdagangan sudah merujuk kepada Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Nias? Jika sudah, bagaimana penjabarannya?
2. Bagaimana proses dan mekanisme penyusunan Rencana Aksi tersebut? Siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan tersebut?
3. Bagaimana sistem perencanaan yang terdapat dalam lembaga BRR dan Pemda?
4. Berapa jumlah pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana di bidang perdagangan yang telah dibangun atau direncanakan akan dibangun dan darimana sumber pembiayaannya yang sudah terbangun? Apakah terdapat kendala dalam pembangunannya?
5. Apakah program rehabilitasi fisik perdagangan (pemasangan tenda pasar darurat, pembangunan pasar dan pergudangan) telah dilakukan? Berapa target pencapaiannya?
6. Apakah ada bantuan pendanaan untuk modal kerja, perlengkapan/ peralatan serta pelatihan/pembinaan mengenai perdagangan? Siapa sasaran targetnya? Sumbernya dari mana saja? Apakah sudah

memenuhi kebutuhan masyarakat di lokasi pantai? Hingga saat ini sudah terpenuhi berapa persen? Apakah bantuan tersebut tersalurkan secara tepat?

7. Adakah perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat setelah terlaksananya rehabilitasi/pembangunan kembali dan pemberian bantuan? Apa indikasi yang menjelaskan hal tersebut?
8. Apakah ada bantuan perlengkapan/peralatan laboratorium? Siapa sasaran targetnya?
9. Apa saja permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan? Bagaimana tindak lanjut dalam merespon permasalahan dan tantangan tersebut?
10. Sejauhmana kesesuaian antara perencanaan yang telah disusun dengan pelaksanaan di lapangan?
11. Bagaimana kesesuaian aspek perencanaan program/kegiatan antara :
    - Bapel BRR dengan K/L terkait dengan bidang perdagangan?
    - Bapel BRR dengan Pemda?
    - Bapel BRR dengan Donor/NGO?

b. Aspek Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program fisik perdagangan (pemasangan tenda pasar darurat, pembangunan pasar dan pergudangan) dan bantuan perlengkapan/ peralatan laboratorium antara :
    - Bapel BRR dengan K/L terkait?
    - Bapel BRR dengan Pemda?
    - Bapel BRR dengan Donor/NGO?
    - Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran (masyarakat)?
2. Apa masalah yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan tersebut?
3. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan antara :
    - Bapel BRR dengan Satuan Kerja (Satker) terkait bidang perdagangan?
    - Bapel BRR dengan K/L terkait?
    - Bapel BRR dengan Pemda?
    - Bapel BRR dengan SKPD?
    - Bapel BRR dengan Donor/NGO?
    - Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran(masyarakat)?
4. Bagaimana sistem kerja dan koordinasi Satuan Kerja (Satker) Bapel BRR yang terkait dengan bidang perdagangan?

5. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Satker?
6. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Satker?

c. Aspek Konsultasi

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program fisik perdagangan (pemasangan tenda pasar darurat, pembangunan pasar, posko koordinasi sektor perdagangan dan pergudangan) dan bantuan perlengkapan/peralatan laboratorium ?
2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi?
3. Apakah proses partisipasi masyarakat/lembaga agama, adat dan sosial lainnya dalam program pembangunan ekonomi daerah (proses penyusunan rencana dan penganggaran) pada tingkat kecamatan/ desa/gampong dan mukim sudah terlaksana?
4. Apakah pemberdayaan/partisipasi lembaga agama, adat dan sosial lainnya dalam partisipasi proses perencanaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan ekonomi di Aceh sudah terlaksana? Apakah forum komunikasi masyarakat sudah terbentuk?
5. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik di Bapel BRR dan Pemda?
6. Bagaimana ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap program yang dilaksanakan? Bagaimana ketersediaan akses untuk berpartisipasi ?
7. Bagaimana ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik dan untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan ?

d. Aspek Kapasitas

1. Bagaimana kapasitas kelembagaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan bidang perdagangan?
2. Bagaiamana mekanisme dan tata kerja yang dimiliki lembaga? khususnya di satker bidang perdagangan? Sejauh ini apa saja permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut?
3. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemda? Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemda?
4. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemda?
5. Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut?
6. Bagaiamana *exit strategy* bagi kelembagaan pemerintahan daerah?
7. Bagaimana mekanisne pelaporan dan pengawasan dalam lembaga?

V. Sub Bidang Perindustrian

a. Aspek Konsistensi

1. Apakah Rencana Program bidang perindustrian merupakan penjabaran dari Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias? Jika sudah, bagaimana penjabarannya?
2. Berapa jumlah pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana di bidang perindustrian yang telah dibangun atau direncanakan akan dibangun dan darimana sumber pembiayaannya yang sudah terbangun? Apakah terdapat kendala dalam pembangunannya?
3. Apakah program rekonstruksi fisik perikanan (gedung kantor dan laboratorium) telah dilakukan? Berapa target pencapaiannya?
4. Apakah ada bantuan pendanaan untuk modal kerja, perlengkapan/ peralatan serta pelatihan/pembinaan mengenai perindustrian? Siapa sasaran targetnya? Sumbernya dari mana saja? Apakah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat? Hingga saat ini sudah terpenuhi berapa persen? Apakah bantuan tersebut tersalurkan secara tepat?
5. Adakah perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat setelah terlaksananya rehabilitasi/pembangunan kembali dan pemberian bantuan? Apa indikasi yang menjelaskan hal tersebut?
6. Apa saja permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan ? Bagaimana tindak lanjut dalam merespon terhadap permasalahan dan tantangan tersebut?
7. Bagaimana proses dan mekanisme penyusunan Rencana Aksi tersebut? Siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan tersebut?
8. Bagaimana sistem perencanaan yang terdapat dalam lembaga BRR dan Pemda?
9. Sejauhmana kesesuaian antara perencanaan yang telah disusun dengan pelaksanaan di lapangan?
10. Bagaimana kesesuaian aspek perencanaan program/kegiatan antara :
    - Bapel BRR dengan K/L terkait dengan bidang perindustrian?
    - Bapel BRR dengan Pemda?
    - Bapel BRR dengan Donor/NGO?

b. Aspek Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program fisik perindustrian (gedung kantor, perlengkapan/peralatan kantor dan laboratorium) antara :
    - Bapel BRR dengan K/L terkait?
    - Bapel BRR dengan Pemda?

- Bapel BRR dengan Donor/NGO?
- Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran (masyarakat)?

2. Apa masalah yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan tersebut?
3. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan antara :
   - Bapel BRR dengan Satuan Kerja (Satker) terkait bidang perindustrian?
   - Bapel BRR dengan K/L terkait?
   - Bapel BRR dengan Pemda?
   - Bapel BRR dengan SKPD?
   - Bapel BRR dengan Donor/NGO?
   - Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran(masyarakat)?
4. Bagaimana sistem kerja dan koordinasi Satuan Kerja (Satker) Bapel BRR yang terkait dengan bidang perindustrian?
5. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Satker?
6. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Satker?

c. *Aspek KOnsultasi*

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program fisik rekonstruksi bidang perindustrian (gedung kantor, perelengkapan/peralatan kantor dan laboratorium berupa bahan & alat-alat ?
2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi?
3. Apakah proses partisipasi masyarakat/lembaga agama, adat dan sosial lainnya dalam program pembangunan ekonomi daerah (proses penyusunan rencana dan penganggaran) pada tingkat kecamatan/ desa/gampong dan mukim sudah terlaksana?
4. Apakah pemberdayaan/partisipasi lembaga agama, adat dan sosial lainnya dalam partisipasi proses perencanaan dalam rekonstruksi pembangunan ekonomi di Aceh sudah terlaksana? Apakah forum komunikasi masyarakat sudah terbentuk?
5. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik di Bapel BRR dan Pemda?
6. Bagaimana ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi rehabilitasi dan rekonstruksi? Bagaimana ketersediaan akses untuk berpartisipasi
7. Bagaimana ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik dan untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan ?

d. Aspek Kapasitas

1. Bagaimana kapasitas kelembagaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan bidang perindustrian?
2. Bagaiamana mekanisme dan tata kerja yang dimiliki lembaga? khususnya di satker bidang perindustrian? Sejauh ini apa saja permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut?
3. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemda? Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemda?
4. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemda?
5. Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut?
6. Bagaiamana *exit strategy* bagi kelembagaan pemerintahan daerah?
7. Bagaimana mekanisne pelaporan dan pengawasan dalam lembaga?

VI. Sub Bidang Pertanian

a. Aspek Konsistensi

1. Apakah Rencana Program bidang pertanian merupakan penjabaran dari Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias? Jika sudah, bagaimana penjabarannya?
2. Berapa jumlah pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana di bidang pertanian yang telah dibangun atau direncanakan akan dibangun dan darimana sumber pembiayaannya yang sudah terbangun? Apakah terdapat kendala dalam pembangunannya?
3. Apakah program rehabilitasi fisik pertanian (saluran air, irigasi, jalan usaha tani, unit pembibitan/pembenihan, pos kesehatan hewan, fasilitas pengolahan, produksi dan pemasaran hasil pertanian, dan prasarana umum lain) telah dilakukan? Berapa target pencapaiannya?
4. Apakah ada bantuan pendanaan untuk modal kerja, perlengkapan/ peralatan serta pelatihan/pembinaan mengenai pertanian? Siapa sasaran targetnya? Sumbernya dari mana saja? Apakah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat? Hingga saat ini sudah terpenuhi berapa persen? Apakah bantuan tersebut tersalurkan secara tepat?
5. Adakah perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat setelah terlaksananya rehabilitasi/pembangunan kembali dan pemberian bantuan? Apa indikasi yang menjelaskan hal tersebut?
6. Apa saja permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan ? Bagaimana tindak lanjut dalam merespon terhadap permasalahan dan tantangan tersebut?
7. Bagaimana proses dan mekanisme penyusunan Rencana Aksi tersebut? Siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan tersebut?

8. Bagaimana sistem perencanaan yang terdapat dalam lembaga BRR dan Pemda?
9. Sejauhmana kesesuaian antara perencanaan yang telah disusun dengan pelaksanaan di lapangan?
10. Bagaimana kesesuaian aspek perencanaan program/kegiatan antara :
    - Bapel BRR dengan K/L terkait dengan bidang pertanian?
    - Bapel BRR dengan Pemda?
    - Bapel BRR dengan Donor/NGO?

b. Aspek Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program fisik pertanian (saluran air, irigasi, jalan usaha tani, unit pembibitan/pembenihan, pos kesehatan hewan, fasilitas pengolahan, produksi dan pemasaran hasil pertanian, dan prasarana umum lain) dan bantuan pendanaan, perlengkapan/peralatan pertanian dan pelatihan/ pembinaan antara :
    - Bapel BRR dengan K/L terkait?
    - Bapel BRR dengan Pemda?
    - Bapel BRR dengan Donor/NGO?
    - Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran (masyarakat)?
2. Apa masalah yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan tersebut?
3. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan antara :
    - Bapel BRR dengan Satuan Kerja (Satker) terkait bidang pertanian?
    - Bapel BRR dengan K/L terkait?
    - Bapel BRR dengan Pemda?
    - Bapel BRR dengan SKPD?
    - Bapel BRR dengan Donor/NGO?
    - Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran(masyarakat)?
4. Bagaimana sistem kerja dan koordinasi Satuan Kerja (Satker) Bapel BRR yang terkait dengan bidang pertanian?
5. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Satker?
6. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Satker?

c. Aspek Konsultasi

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program fisik rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pertanian (saluran air, irigasi, jalan usaha tani, unit pembibitan/

pembenihan, pos kesehatan hewan, fasilitas pengolahan, produksi dan pemasaran hasil pertanian, dan prasarana umum lain) dan non fisik (bantuan pendanaan, pelatihan/pembinaan) ?

2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi?
3. Apakah proses partisipasi masyarakat/lembaga agama, adat dan sosial lainnya dalam program pembangunan ekonomi daerah pertanian (proses penyusunan rencana dan penganggaran) pada tingkat kecamatan/desa/gampong dan mukim sudah terlaksana?
4. Apakah pemberdayaan/partisipasi lembaga agama, adat dan sosial lainnya dalam partisipasi proses perencanaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan ekonomi daerah pertanian di Aceh sudah terlaksana? Apakah forum komunikasi masyarakat sudah terbentuk?
5. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik di Bapel BRR dan Pemda?
6. Bagaimana ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap program yang dilaksanakan? Bagaimana ketersediaan akses untuk berpartisipasi ?
7. Bagaimana ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik dan untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan ?

d. Aspek Kapasitas

1. Bagaimana kapasitas kelembagaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan bidang pertanian?
2. Bagaiamana mekanisme dan tata kerja yang dimiliki lembaga? khususnya di satker bidang pertanian? Sejauh ini apa saja permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut?
3. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemda? Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemda?
4. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemda?
5. Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut?
6. Bagaiamana *exit strategy* bagi kelembagaan pemerintahan daerah?
7. Bagaimana mekanisne pelaporan dan pengawasan dalam lembaga?

VII. Sub Bidang Tenaga Kerja

a. Aspek Konsistensi

1. Apakah Rencana Program bidang tenaga kerja sudah merujuk kepada Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Nias? Jika sudah, bagaimana penjabarannya?

2. Bagaimana proses dan mekanisme penyusunan Rencana Aksi tersebut?
3. Bagaimana proses dan mekanisme penyusunan Rencana Aksi tersebut? Siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan tersebut?
4. Bagaimana sistem perencanaan yang terdapat dalam lembaga BRR dan Pemda?
5. Sejauhmana antara perencanaan yang telah disusun dengan pelaksanaan di lapangan?
6. Apakah program rehabilitasi fisik tenaga kerja (balai latihan dan kantor) telah dilakukan? Berapa target pencapaiannya? darimana sumber pembiayaannya yang sudah terbangun? Apakah terdapat kendala dalam pembangunannya?
7. Apakah ada bantuan pendanaan untuk modal kerja dan pelatihan/ pembinaan tenaga kerja? Siapa sasaran targetnya? Sumbernya dari mana saja? Apakah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat? Hingga saat ini sudah terpenuhi berapa persen? Apakah bantuan tersebut tersalurkan secara tepat?
8. Adakah perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat setelah terlaksananya rehabilitasi/pembangunan kembali dan pemberian bantuan? Apa indikasi yang menjelaskan hal tersebut?
9. Apa saja permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan ? Bagaimana tindak lanjut dalam merespon terhadap permasalahan dan tantangan tersebut?
10. Bagaimana kesesuaian aspek perencanaan program/kegiatan antara :
    - Bapel BRR dengan K/L terkait dengan bidang tenaga kerja?
    - Bapel BRR dengan Pemda?
    - Bapel BRR dengan Donor/NGO?

b. Aspek Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program fisik tenaga kerja (balai latihan dan kantor) dan pelatihan/ pembinaan tenaga kerja antara :
    - Bapel BRR dengan K/L terkait?
    - Bapel BRR dengan Pemda?
    - Bapel BRR dengan Donor/NGO?
    - Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran (masyarakat)?
2. Apa masalah yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan tersebut?

3. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan antara :
   - Bapel BRR dengan Satuan Kerja (Satker) terkait bidang tenaga kerja?
   - Bapel BRR dengan K/L terkait?
   - Bapel BRR dengan Pemda?
   - Bapel BRR dengan SKPD?
   - Bapel BRR dengan Donor/NGO?
   - Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran(masyarakat)?
4. Bagaimana sistem kerja dan koordinasi Satuan Kerja (Satker) Bapel BRR yang terkait dengan bidang tenaga kerja?
5. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Satker?
6. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Satker?

c. Aspek Konsultasi

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program fisik rehabilitasi dan rekonstruksi bidang tenaga kerja (balai latihan dan kantor) dan pelatihan/pembinaan tenaga kerja?
2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi?
3. Apakah proses partisipasi masyarakat/lembaga agama, adat dan sosial lainnya dalam program pembangunan ekonomi daerah (proses penyusunan rencana dan penganggaran) pada tingkat kecamatan/ desa/gampong dan mukim sudah terlaksana?
4. Apakah pemberdayaan/partisipasi lembaga agama, adat dan sosial lainnya dalam partisipasi proses perencanaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan ekonomi di Aceh sudah terlaksana? Apakah forum komunikasi masyarakat sudah terbentuk?
5. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik di Bapel BRR dan Pemda?
6. Bagaimana ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap program yang dilaksanakan? Bagaimana ketersediaan akses untuk berpartisipasi ?
7. Bagaimana ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik dan untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan ?

d. Aspek Kapasitas

1. Bagaimana kapasitas kelembagaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan bidang tenaga kerja?
2. Bagaiamana mekanisme dan tata kerja yang dimiliki lembaga? Khususnya di satker tenaga kerja? Sejauh ini apa saja permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut?

3. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemda? Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemda?
4. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemda?
5. Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut?
6. Bagaiamana *exit strategy* bagi kelembagaan pemerintahan daerah?
7. Bagaimana mekanisne pelaporan dan pengawasan dalam lembaga?

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS, SUMATERA UTARA (P3RIRRWANS) TAHUN 2006	 BAPPENAS
KUESIONER BIDANG PEMULIHAN KELEMBAGAAN DAN HUKUM ASPEK KONSISTENSI, KOORDINASI, KONSULTASI DAN KAPASITAS	2

Pengantar

Kuisioner ini dibuat oleh Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, Sumatera Utara (P3RIRRWANS) dalam rangka pemantauan dan evaluasi rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, khususnya bidang kelembagaan dan hukum. Melalui pengisian kuisioner ini diharapkan akan mendapatkan masukan terhadap rencana induk, nantinya dapat meningkatkan mutu proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, kami mohon dengan hormat partisipasi dan kesediaan Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner guna perbaikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini dan masa yang akan datang. Atas perhatian dan partisipasi saudara, kami ucapkan banyak terima kasih.

Tim P3RIRRWANS
Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Hukum
Bappenas

IDENTITAS RESPONDEN	
Nama	:
Instansi	:
Jabatan	:
Alamat	:
Telp	:

Pilihlah salah satu jawaban yang telah disediakan di bawah berikut ini. Jawaban Anda tidak ada yang salah atau benar.

a. Aspek Konsistensi

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Perpres No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias adalah pedoman penyusunan rencana aksi dan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kep. Nias	1. Sangat Baik 2. Baik 3. Cukup 4. Buruk 5. Sangat Buruk 6. Tidak tahu
2.	Arahan dan Strategi dalam Rencana Induk cukup efektif menjadi pedoman dalam penyusunan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	1. Sangat Baik 2. Baik 3. Cukup 4. Buruk 5. Sangat Buruk 6. Tidak tahu
3.	Keterkaitan antara Rencana Induk dengan Rencana Strategis Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1. Sangat Baik 2. Baik 3. Cukup 4. Buruk 5. Sangat Buruk 6. Tidak tahu
4.	Keterkaitan antara Rencana Induk dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	1. Sangat Baik 2. Baik 3. Cukup 4. Buruk 5. Sangat Buruk 6. Tidak tahu
5.	Keterkaitan antara Rencana Induk dengan Rencana Kerja SKPD Pemerintah Daerah	1. Sangat Baik 2. Baik 3. Cukup 4. Buruk 5. Sangat Buruk 6. Tidak tahu
6.	Keterkaitan antara Rencana Induk dengan Program Kerja Donor/NGO	1. Sangat Baik 2. Baik 3. Cukup 4. Buruk 5. Sangat Buruk 6. Tidak tahu
7.	Apakah konsisten dalam aspek perencanaan antara Rencana Induk dengan program/kegiatan Badan Pelaksana BRR untuk	1. Sangat konsisten 2. Konsisten 3. Cukup konsisten 4. Tidak konsisten 5. Sangat tidak konsisten
	1) Bidang Sistem Kelembagaan Daerah	1 2 3 4 5
	2) Bidang Hukum	1 2 3 4 5

b. *Aspek Koordinasi*

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
10.	Bagaimana koordinasi dalam penyusunan perencanaan bidang sistem kelembagaan daerah dan hukum antara Badan Pelaksana BRR dengan pihak-pihak berikut:	1. Sangat Baik				
		2. Baik				
		3. Cukup				
		4. Buruk				
		5. Sangat Buruk				
		6. Tidak tahu				
	1) Pemerintah Daerah	1	2	3	4	5
	2) Kementerian/Lembaga	1	2	3	4	5
	3) Donor/NGO	1	2	3	4	5
	4) Kalangan swasta	1	2	3	4	5
	5) Masyarakat	1	2	3	4	5
11.	Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan bidang sistem kelembagaan daerah dan hukum antara Badan Pelaksana BRR dengan pihak-pihak berikut:	1. Sangat Baik				
		2. Baik				
		3. Cukup				
		4. Buruk				
		5. Sangat Buruk				
	1) Pemerintah daerah	1	2	3	4	5
	2) Kementerian/Lembaga	1	2	3	4	5
	3) Donor/NGO	1	2	3	4	5
	4) Kalangan swasta	1	2	3	4	5
	5) Satuan Kerja (Satker)	1	2	3	4	5
	6) Masyarakat	1	2	3	4	5

c. *Aspek Konsultasi*

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
12.	Bagaimana peran lembaga pada tingkat konsultasi publik terhadap aspek perencanaan bidang sistem kelembagaan daerah dan hukum	1. Sangat Baik				
		2. Baik				
		3. Cukup				
		4. Buruk				
		5. Sangat Buruk				
	1) Badan Pelaksana BRR	1	2	3	4	5
	2) Pemerintah daerah	1	2	3	4	5
	3) Kementerian/Lembaga	1	2	3	4	5
	4) Donor/NGO	1	2	3	4	5
	5) Kalangan swasta	1	2	3	4	5
	6) Satuan Kerja (Satker)	1	2	3	4	5
13.	Bagaimana peran lembaga pada tingkat konsultasi publik terhadap aspek pelaksanaan bidang sistem kelembagaan daerah dan hukum	1. Sangat Baik				
		2. Baik				
		3. Cukup				
		4. Buruk				
		5. Sangat Buruk				
	1) Badan Pelaksana BRR	1	2	3	4	5
	2) Pemerintah daerah	1	2	3	4	5
	3) Kementerian/Lembaga	1	2	3	4	5
	4) Donor/NGO	1	2	3	4	5
	5) Kalangan swasta	1	2	3	4	5
	6) Satuan Kerja (Satker)	1	2	3	4	5
14.	Bagaimana frekuensi forum pertemuan pada bidang sistem kelembagaan daerah dan hukum yang dipergunakan untuk memfasilitasi konsultasi publik dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi	1. Sangat sering				
		2. Sering				
		3. Jarang				
		4. Jarang sekali				
		5. Tidak pernah				
	1) Badan Pelaksana BRR	1	2	3	4	5
	2) Pemerintah daerah	1	2	3	4	5
	3) Kementerian/Lembaga	1	2	3	4	5
	4) Donor/NGO	1	2	3	4	5
	5) Kalangan swasta	1	2	3	4	5
	6) Satuan Kerja (Satker)	1	2	3	4	5
15.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk bidang sistem kelembagaan daerah dan hukum oleh Badan Pelaksana BRR berdasarkan bentuk-bentuk berikut :	1. Sangat Baik				
		2. Baik				
		3. Cukup				
		4. Buruk				
		5. Sangat Buruk				
	1) Identifikasi penilaian kebutuhan	1	2	3	4	5
	2) Sosialisasi rencana program/kerja rehabilitasi dan rekonstruksi	1	2	3	4	5
	3) Pelibatan kelompok sasaran dalam proses perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	1	2	3	4	5
	4) Legitimasi komitmen perencanaan	1	2	3	4	5

d. Aspek Kapasitas

NO	PERTANYAAN	JAWABAN				
20.	Bagaimana aturan dan mekanisme kelembagaan yang dimiliki oleh pihak Badan Pelaksana BRR	1. Sangat Baik				
		2. Baik				
		3. Cukup				
		4. Buruk				
		5. Sangat Buruk				
	1) Pelaporan perkembangan realisasi pelaksanaan pembangunan	1	2	3	4	5
	2) Pelaporan realisasi pencapaian sasaran dan target keluaran	1	2	3	4	5
	3) Pelaporan kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan	1	2	3	4	5
	4) Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan	1	2	3	4	5
	5) Tindak lanjut dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian permasalahan	1	2	3	4	5
	6) Pelaporan perkembangan realisasi pelaksanaan pembangunan	1	2	3	4	5
21.	Bagaimana sistem untuk aspek Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pihak Badan Pelaksana BRR	1. Sangat Baik				
		2. Baik				
		3. Cukup				
		4. Buruk				
		5. Sangat Buruk				
	1) Regulasi atau aturan tentang kebijakan SDM	1	2	3	4	5
	2) Pola dan mekanisme rekrutmen staf	1	2	3	4	5
	3) Pelatihan peningkatan kapasitas bagi pelaksana kegiatan	1	2	3	4	5
	4) Mekanisme kerja Satuan Kerja (Satker) dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	1	2	3	4	5

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS, SUMATERA UTARA (P3RIRRWANS) TAHUN 2006	BAPPENAS
WAWANCARA MENDALAM ASPEK KONSISTENSI, KOORDINASI, KONSULTASI DAN KAPASITAS Sub Bidang Kelembagaan	B 1

a. Aspek Konsistensi

1. Apakah rencana program bidang sistem kelembagaan daerah merupakan penjabaran dari Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias? Jika iya, bagaimana penjabarannya?
2. Berapa jumlah pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintahan daerah yang telah dibangun atau direncanakan akan dibangun dan darimana sumber pembiayaannya yang sudah terbangun? Apakah terdapat kendala dalam pembangunannya?
3. Apakah sarana dan prasarana berupa bale sebagai tempat musyawarah bagi masyarakat/lembaga agama, adat, dan sosial lainnya sudah tersedia?
4. Bagaimana kualitas dan kuantitas rekruitmen CPNS dan tenaga kontrak, serta mutasi PNS? Hingga saat ini sudah terpenuhi berapa persen? Pelatihan apa saja yang sudah dilaksanakan untuk PNS tersebut?
5. Apakah permasalahan administrasi kepegawaian (gaji, tunjangan, asuransi, dsb) sudah teratasi pasca bencana?
6. Apa saja permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan ? Bagaimana tindak lanjut dalam merespon terhadap permasalahan dan tantangan tersebut?

B. ASPEK KOORDINASI

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan bidang kelembagaan, yaitu untuk program fisik (pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintahan daerah) dan non fisik (pelatihan dan penyediaan aparatur Pemda dan aparatur hukum) ? antara :
   - Bapel BRR dengan Pemda (Bappeda/Sekretariat daerah/Badan Diklat/BKD/Badan Pengawasan Daerah/Badan Pemberdayaan Masyarakat/Badan Pertanahan Daerah/Dinas Mobilitas Penduduk/Dinas Perkotaan dan Permukiman/nstansi terkait lainnya)?

- Bapel BRR dengan Donor/NGO (USAID/UNDP)?
- Bapel BRR dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran ?

2. Apa saja permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan tersebut ?
3. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara :
   - Bapel BRR dengan Satuan Kerja (Satker) bidang kelembagaan, baik Satker yang terbentuk pada tahun 2005 maupun 2006?
   - Bapel BRR dengan Pemda (Bappeda/Sekretariat daerah/Badan Diklat/BKD/Badan Pengawasan Daerah/Badan Pemberdayaan Masyarakat/Badan Pertanahan Daerah/Dinas Mobilitas Penduduk/Dinas Perkotaan dan Permukiman/nstansi terkait lainnya)?
   - Bapel BRR dengan Donor/NGO (USAID/UNDP)?
   - Bapel BRR dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran ?
4. Bagaimana sistem kerja Satuan Kerja (Satker) yang berkaitan dengan bidang kelembagaan?
5. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Satker ?
6. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Satker ?

c. Aspek Konsultasi

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan, yaitu untuk program fisik (pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintahan daerah) dan non fisik (pelatihan dan penyediaan aparatur Pemda dan aparatur hukum) ?
2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan rehabilitasi dan rekonstruksi?
3. Apakah proses partisipasi masyarakat/lembaga agama, adat dan sosial lainnya dalam program pembangunan daerah (proses penyusunan rencana dan penganggaran) pada tingkat kecamatan/ desa/gampong dan mukim sudah terlaksana?
4. Apakah pemberdayaan/partisipasi lembaga agama, adat dan sosial lainnya dalam partisipasi proses perencanaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan di Aceh sudah terlaksana? Apakah forum komunikasi masyarakat sudah terbentuk?
5. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik di Badan Pelaksana BRR dan Pemda?
6. Bagaimana ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi terhadap program yang dilaksanakan? Bagaimana ketersediaan akses untuk berpartisipasi ?

7. Bagaimana ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik dan untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan ?
8. Bagaimana ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran)?

d. Aspek Kapasitas

1. Bagaimana kapasitas kelembagaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ?
2. Bagaiamana mekanisme dan tata kerja yang dimiliki lembaga, khususnya di satker bidang kelembagaan daerah ? Sejauh ini apa saja permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut ?
3. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah ? Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset tersebut ?
4. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah?
5. Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut ?
6. Bagaiamana *exit strategy* bagi kelembagaan pemerintahan daerah ?
7. Bagaimana mekanisne pelaporan dan pengawasan dalam lembaga ?

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS, SUMATERA UTARA (P3RIRRWANS) TAHUN 2006	BAPPENAS
WAWANCARA MENDALAM ASPEK KONSISTENSI, KOORDINASI, KONSULTASI DAN KAPASITAS Sub Bidang Hukum	**B 2**

a. *Aspek Konsistensi*

1. Apakah rencana program bidang hukum merupakan penjabaran dari Rencana Induk? Jika iya, bagaimana penjabarannya ?
2. Apakah rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana hukum sudah dilaksanakan? Apakah target pembangunan tersebut merujuk pada rencana induk? Mencapai berapa persen target pembangunannya? Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya? Siapa pelaksananya?
3. Apakah penataan dan penyediaan aparatur hukum (melalui rekruitmen dan mutasi) sudah dilakukan secara optimal? Pelatihan apa saja yang sudah dilaksanakan untuk aparatur hukum (hakim, jaksa, tenaga fungsional, dan tenaga teknis/administratif)?
4. Bagaimana mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan dan penegakan hukum dan HAM (status ahli waris, objek warisan, status harta benda, status kepemilikan tanah, hak perwalian/pengasuhan anak, surat kepemilikan HAKI yang hilang, hak-hak narapidana, status identitas seseorang) untuk masyarakat? Apakah terdapat hambatan?
5. Bagaimana dengan pemberian status hukum Baital Maal? Apakah Baital Maal tersebut sudah berfungsi? Apakah lembaga adat sudah diberdayakan, sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan?
6. Bagaimana tindak lanjut dalam merespon terhadap permasalahan dan tantangan tersebut?

b. *Aspek Koordinasi*

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan program fisik (pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasaran hukum) serta program non fisik (penyediaan dan peningkatan aparatur hukum) antara :
   - Bapel BRR dengan Majelis Permusyawaratan Ulama/Majelis Adat Aceh / Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Tinggi/Kanwil Hukum dan HAM/Mahkamah Syariah?

- Bapel BRR dengan Donor/NGO ?
- Bapel BRR dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran ?

2. Apa saja permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan tersebut ?
3. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan program antara :
   - Bapel BRR dengan Satuan Kerja (Satker) bidang hukum, baik yang terbentuk ketika tahun 2005 maupun 2006?
   - Bapel BRR dengan Majelis Permusyawaratan Ulama/Majelis Adat Aceh / Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Tinggi/Kanwil Hukum dan HAM/Mahkamah Syariah?
   - Bapel BRR dengan Donor/NGO ?
   - Bapel BRR dengan Kelompok Sasaran ?
4. Bagaimana sistem kerja Satuan Kerja (Satker) yang berada di bawah Bapel BRR bidang hukum?
5. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Satker ?
6. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Satker ?

c. Aspek Konsultasi

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya pada program fisik (pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasaran hukum) serta program non fisik (penyediaan dan peningkatan aparatur hukum)?
2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program ?
3. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi?
4. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik di Badan Pelaksana BRR dan Majelis Permusyawaratan Ulama/Majelis Adat Aceh / Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Tinggi/Kanwil Hukum dan HAM/ Mahkamah Syariah?
5. Bagaimana ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi rehabilitasi dan rekonstruksi ? Bagaimana ketersediaan akses untuk berpartisipasi ?

d. Aspek Kapasitas

1. Bagaimana kapasitas kelembagaan antara perencanaan dan pelaksanaan program bidang hukum?
2. Bagaiamana mekanisme dan tata kerja yang dimiliki Satker, maupun Majelis Permusyawaratan Ulama/Majelis Adat Aceh / Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Tinggi/Kanwil Hukum dan HAM/Mahkamah Syariah?

3. Sejauh ini apa saja permasalahan dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut ?
4. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah ?
5. Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset dari BRR kepada Pemerintah Daerah? Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan? Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut ?
6. Bagaiamana *exit strategy* bagi kelembagaan pemerintahan daerah ?
7. Bagaimana mekanisne pelaporan dan pengawasan dalam lembaga ?

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS, SUMATERA UTARA (P3RIRRWANS) TAHUN 2006	BAPPENAS
OBSERVASI LAPANGAN SARANA DAN PRASARANA INSTANSI VERTIKAL	C1

a. *Informasi Sarana dan Prasarana Instansi Vertikal*

No	Uraian	Penjelasan
1	Nama Instansi Vertikal	
2	Lokasi	
3	Status Kepemilikan Gedung Kantor	Milik sendiri/Sewa/Numpang/Lain-lain
4	Jumlah unit gedung yang terbangun	
5	Jumlah unit gedung yang telah berfungsi	

b. *Kondisi Umum Peralatan Instansi Vertikal*

Aspek	Penilaian	Sarana kantor				Peralatan Mitigasi Bencana	Kendaraan Dinas
		Meja	Kursi	Lemari	Komputer & Printer *)		
Jumlah	Kurang						
	Cukup						
	Lebih						
Kualitas	Rusak						
	Cukup Baik						
	Sangat Baik						

*) peralatan pemadam kebakaran, ambulan dan peralatan manajemen bencana

c. *Kondisi Umum Jaringan di Instansi Vertikal*

Aspek	Penilaian	Jaringan listrik	Jaringan telepon	Jaringan internet
Ketersediaan	Ada			
	Tidak Ada			
Kualitas	Buruk			
	Cukup Baik			
	Sangat Baik			

c. Apa yang menjadi masalah pokok pada pengadaan peralatan kantor di instansi vertikal?

Saran	Tindak lanjut

d.. Apa yang dapat disarankan kepada pihak terkait dengan sarana dan prasarana kantor di instansi vertikal dan apa yang telah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti?

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS, SUMATERA UTARA (P3RIRRWANS) TAHUN 2006	BAPPENAS
OBSERVASI LAPANGAN SARANA DAN PRASARANA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH	C2

a. *Informasi Sarana dan Prasarana Instansi Pemerintah Daerah*

No	Uraian	Penjelasan
1	Nama Instansi Pemerintah Daerah	
2	Lokasi	
3	Status Kepemilikan Gedung Kantor	Milik sendiri/Sewa/Numpang/Lain-lain
4	Jumlah unit gedung yang terbangun	
5	Jumlah unit gedung yang telah berfungsi	

b. *Kondisi Umum Peralatan Instansi Pemerintah Daerah*

Aspek	Penilaian	Sarana kantor				Peralatan Mitigasi Bencana *)	Kendaraan Dinas
		Meja	Kursi	Lemari	Komputer & Printer		
Jumlah	Kurang						
	Cukup						
	Lebih						
Kualitas	Rusak						
	Cukup Baik						
	Sangat Baik						

*) peralatan pemadam kebakaran, ambulan dan peralatan manajemen bencana

c.. *Kondisi Umum Jaringan di Instansi Pemerintah Daerah*

Aspek	Penilaian	Jaringan listrik	Jaringan telepon	Jaringan internet
Ketersediaan	Ada			
	Tidak Ada			
Kualitas	Buruk			
	Cukup Baik			
	Sangat Baik			

4. *Apa yang menjadi masalah pokok pada pengadaan peralatan kantor Pemerintah Daerah?*

Saran	Tindak lanjut

5. *Apa yang dapat disarankan kepada pihak terkait dengan sarana dan prasarana kantor Pemerintah Daerah dan apa yang telah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti?*

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS TAHUN 2006	BAPPENAS
KUESIONER ASPEK KONSISTENSI, KOORDINASI, KONSULTASI DAN KAPASITAS	LAMPIRAN 2
BIDANG KETERTIBAN, KEAMANAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT (K3M)	POKJA REINTEGRASI MANTAN GAM
POLDA, KODAM, BRR, DINAS KESBANG LINMAS, DINAS INFOKOM, BAPPEDA, SETDA, DONOR/NGO *)	

PENGANTAR

Bapak/ Ibu/ Sdr yang berbahagia, dalam rangka pemantauan dan pengendalian rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Prov. NAD dan Kepulauan Nias, Prov. Sumut, kami bermaksud untuk melaksanakan survei penilaian terhadap rencana induk tersebut. Sehingga diharapkan mendapatkan masukan terhadap rencana induk yang nantinya dapat meningkatkan mutu proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, kami mohon dengan hormat partisipasi dan kesediaan Bapak/ Ibu/ Sdr untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner guna perbaikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di masa yang akan datang.

Identitas Responden

Nama : _____

Jenis Kelamin : _____

Instansi/ Lembaga : _____

Jabatan : _____

Alamat kantor : _____

Pilihlah salah satu jawaban yang telah disediakan di bawah ini. Jawaban Anda tidak ada yang salah atau benar.

a. Aspek Konsistensi

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Perpres No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias adalah pedoman penyusunan rencana aksi dan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kep. Nias, Di dalamnya mencakup bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)	1. Sangat setuju 2. Setuju 3. Tidak menjawab 4. Sangat tidak setuju 5. Tidak setuju 6. Tidak tahu
Alasan/ Data Pendukung :		

2.	Arahan dan Strategi dalam Rencana Induk cukup efektif menjadi pedoman dalam penyusunan program/kegiatan di bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi	1. Sangat efektif 2. Efektif 3. Cukup 4. Sangat tidak efektif 5. Tidak efektif 6. Tidak tahu
Alasan/ Data Pendukung :		

3.	Keterkaitan antara Rencana Induk dengan Rencana Strategis Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi, khususnya dalam bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)	1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup 4.Buruk 5.Sangat Buruk 6.Tidak tahu
Alasan/ Data Pendukung :		

4.	Keterkaitan antara Rencana Induk dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga pelaksana program/ kegiatan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)	1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup 4.Buruk 5.Sangat Buruk 6.Tidak tahu
Alasan/ Data Pendukung :		

5.	Keterkaitan antara Rencana Induk dengan Rencana Kerja SKPD Pemerintah Daerah tentang kegiatan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)	1. Sangat Baik 2. Baik 3. Cukup 4. Buruk 5. Sangat Buruk 6. Tidak tahu
Alasan/ Data Pendukung :		

6.	Keterkaitan antara Rencana Induk dengan Program Kerja Donor/NGO yang ikut melaksanakan kegiatan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)	1. Sangat Baik 2. Baik 3. Cukup 4. Buruk 5. Sangat Buruk 6. Tidak tahu
Alasan/ Data Pendukung :		

7.	Apakah terjadi konsistensi antara Rencana Induk dengan Rencana Strategis BRR di lapangan, khususnya dalam bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M): 1) Sangat konsisten 2) Konsisten 3) Cukup konsisten 4) Tidak konsisten 1) Sangat tidak konsisten
Alasan/ Data Pendukung :	

8.	Apakah konsisten dalam aspek perencanaan antara Rencana Induk dengan program/kegiatan Badan Pelaksana BRR untuk Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) 1)Sangat konsisten 2)Konsisten 3)Cukup konsisten 4)Tidak konsisten 5)Sangat tidak konsisten
Alasan/ Data Pendukung :	

9.	Bagaimana penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan/ program oleh Badan Pelaksana BRR di lapangan, terutama dalam bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M): 1) Sangat Baik 2) Baik 3) Cukup 4) Buruk 5) Sangat Buruk
Alasan/ Data Pendukung :	

b. Aspek Koordinasi

10	Bagaimana koordinasi dalam penyusunan rencana pada bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) antara Badan Pelaksana BRR dengan pihak-pihak berikut: 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk					
	1) Pemerintah Daerah	1	2	3	4	5
	2) POLDA	1	2	3	4	5
	3) KODAM	1	2	3	4	5
	4) DINAS KESBANG LINMAS	1	2	3	4	5
	5) DINAS INFOKOM	1	2	3	4	5
	6) BAPPEDA	1	2	3	4	5
	7) Donor/NGO	1	2	3	4	5
	8) Kalangan swasta	1	2	3	4	5
	9) Masyarakat	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

11.	Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan kegiatan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) antara Badan Pelaksana BRR dengan pihak-pihak berikut: 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk					
	1) Pemerintah daerah	1	2	3	4	5
	2) POLDA	1	2	3	4	5
	3) KODAM	1	2	3	4	5
	4) DINAS KESBANG LINMAS	1	2	3	4	5
	5) DINAS INFOKOM	1	2	3	4	5
	6) BAPPEDA	1	2	3	4	5
	7) Donor/NGO	1	2	3	4	5
	8) Kalangan swasta	1	2	3	4	5
	9) Masyarakat	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

c. Aspek Konsultasi

12.	Bagaimana peran BAPEL BRR pada tingkat konsultasi publik terhadap aspek perencanaan untuk bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) : 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk					
	1) Pemerintah daerah	1	2	3	4	5
	2) POLDA	1	2	3	4	5
	3) KODAM	1	2	3	4	5
	4) DINAS KESBANG LINMAS	1	2	3	4	5
	5) DINAS INFOKOM	1	2	3	4	5
	6) BAPPEDA	1	2	3	4	5
	7) Donor/NGO	1	2	3	4	5
	8) Kalangan swasta	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

13.	Bagaimana peran BAPEL BRR pada tingkat konsultasi publik terhadap aspek Pelaksanaan untuk bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) : 1) Sangat Baik 2) Baik 3) Cukup 4) Buruk 5) Sangat Buruk					
	1) Pemerintah daerah	1	2	3	4	5
	2) POLDA	1	2	3	4	5
	3) KODAM	1	2	3	4	5
	4) DINAS KESBANG LINMAS	1	2	3	4	5
	5) DINAS INFOKOM	1	2	3	4	5
	6) BAPPEDA	1	2	3	4	5
	7) Donor/NGO	1	2	3	4	5
	8) Kalangan swasta	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

14.	Bagaimana frekuensi forum pertemuan oleh BAPEL BRR yang dipergunakan untuk memfasilitasi konsultasi publik yang terkait dengan bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi 1)Sangat sering 2)Sering 3)Jarang 4)Jarang sekali 5)Tidak pernah					
	1) Pemerintah daerah	1	2	3	4	5
	2) POLDA	1	2	3	4	5
	3) KODAM	1	2	3	4	5
	4) DINAS KESBANG LINMAS	1	2	3	4	5
	5) DINAS INFOKOM	1	2	3	4	5
	6) BAPPEDA	1	2	3	4	5
	7) Donor/NGO	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

15.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *)berdasarkan bentuk-bentuk berikut : 1) Sangat Baik 2) Baik 3) Cukup 4) Buruk 5) Sangat Buruk					
	1) Identifikasi penilaian kebutuhan	1	2	3	4	5
	2) Sosialisasi rencana program/kerja rehabilitasi dan rekonstruksi	1	2	3	4	5
	3) Pelibatan kelompok sasaran dalam proses perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	1	2	3	4	5
	4) Legitimasi komitmen perencanaan	1	2	3	4	5
	5) Pelibatan kelompok sasaran dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	1	2	3	4	5
	6) Pelibatan dalam pengawasan dan evaluasi	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

16.	Bagaimana bentuk-bentuk media komunikasi dan informasi seputar kegiatan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) yang tersedia untuk program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai berikut : 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk					
	1) Website	1	2	3	4	5
	2) Email	1	2	3	4	5
	3) Kotak pos pengaduan	1	2	3	4	5
	4) Telephon bebas pulsa	1	2	3	4	5
	5) Pengaduan ke kantor langsung	1	2	3	4	5
	6) Majalah	1	2	3	4	5
	7) Newsletter	1	2	3	4	5
	8) Surat	1	2	3	4	5
	9) Radio komunitas	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

17.	Bagaimana peran masyarakat (kelompok sasaran) dalam aspek perencanaan yang terkait dengan kegiatan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) : 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk					
	1) Tokoh masyarakat	1	2	3	4	5
	2) Tokoh agama	1	2	3	4	5
	3) Perguruan Tinggi	1	2	3	4	5
	4) Kelompok perempuan	1	2	3	4	5
	5) Pemuda	1	2	3	4	5
	6) Donor/NGO	1	2	3	4	5
	7) LSM	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

18.	Bagaimana peran masyarakat (kelompok sasaran) dalam aspek pelaksanaan kegiatan dalam bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) : 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk					
	1) Tokoh masyarakat	1	2	3	4	5
	2) Tokoh agama	1	2	3	4	5
	3) Perguruan Tinggi	1	2	3	4	5
	4) Kelompok perempuan	1	2	3	4	5
	5) Pemuda	1	2	3	4	5
	6) Donor/ NGO	1	2	3	4	5
	7) LSM	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

19.	Bagaimana pencapaian program/ kegiatan dalam bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) terhadap kelompok sasaran 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk					
	1) Kodam	1	2	3	4	5
	2) Sekretariat daerah	1	2	3	4	5
	3) Dinas Infokom	1	2	3	4	5
	4) Dinas Kesbang Linmas	1	2	3	4	5
	5) Donor/NGO	1	2	3	4	5
	6) Bappeda	1	2	3	4	5
	7) Polda	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

d. Aspek Kapasitas

20.	Bagaimana aturan dan mekanisme kelembagaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) yang dimiliki oleh pihak POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) : 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk					
	1) Pelaporan perkembangan realisasi pelaksanaan pembangunan tahun aggaran 2005	1	2	3	4	5
	2) Pelaporan realisasi pencapaian sasaran dan target keluaran selama tahun anggaran 2005	1	2	3	4	5
	3) Pelaporan kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan	1	2	3	4	5
	4) Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan	1	2	3	4	5
	5) Tindak lanjut dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian permasalahan	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

21	Bagaimana sistem untuk aspek Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pihak POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk					
	1) Regulasi atau aturan tentang kebijakan SDM	1	2	3	4	5
	2) Pola dan mekanisme rekrutmen staf	1	2	3	4	5
	3) Pelatihan peningkatan kapasitas bagi pelaksana kegiatan	1	2	3	4	5
	4) Mekanisme kerja Satuan Kerja (Satker) dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PELAKSANAAN REINTEGRASI MANTAN ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2005/2006	BAPPENAS
KUESIONER ASPEK KONSISTENSI, KOORDINASI, KONSULTASI DAN KAPASITAS	LAMPIRAN 2
BIDANG PELAKSANAAN REINTEGRASI MANTAN ANGGOTA GAM	POKJA REINTEGRASI MANTAN GAM
BADAN REINTEGRASI DAMAI ACEH (BRA)	

PENGANTAR

Bapak/ Ibu/ Sdr yang berbahagia, dalam rangka pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan reintegrasi mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam, kami bermaksud untuk melaksanakan survei penilaian terhadap pelaksanaan tersebut. Sehingga diharapkan mendapatkan masukan yang nantinya dapat meningkatkan mutu proses pelaksanaan reintegrasi mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, kami mohon dengan hormat partisipasi dan kesediaan Bapak/ Ibu/ Sdr untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner guna perbaikan kegiatan reintegrasi mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam di masa yang akan datang.

Identitas Responden

Nama : _____

Jenis Kelamin : _____

Instansi/ Lembaga : _____

Jabatan : _____

Alamat kantor : _____

Pilihlah salah satu jawaban yang telah disediakan di bawah ini. Jawaban Anda tidak ada yang salah atau benar.

a. Aspek Konsistensi

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Pada Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI-GAM, sebagaimana tercantum dalam MoU diantaranya dari butir 3.2 adalah tentang Reintegrasi ke dalam Masyarakat	1. Sangat setuju 2. Setuju 3. Tidak menjawab 4. Sangat tidak setuju 5. Tidak setuju 6. Tidak tahu
Alasan/ Data Pendukung :		

2.	Arahan dan Strategi dalam Renstra BRA cukup efektif menjadi pedoman dalam penyusunan program/kegiatan reintegrasi mantan GAM	1. Sangat efektif 2. Efektif 3. Cukup 4. Sangat tidak efektif 5. Tidak efektif 6. Tidak tahu
Alasan/ Data Pendukung :		

3.	Keterkaitan antara Rencana Induk Bappenas dengan Rencana Strategis BRA, khususnya dalam pelaksanaan reintegrasi mantan GAM	1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup 4.Buruk 5.Sangat Buruk 6.Tidak tahu
Alasan/ Data Pendukung :		

4.	Keterkaitan antara Rencana Induk BRA dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga pelaksana program/ kegiatan reintegrasi mantan GAM	1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup 4.Buruk 5.Sangat Buruk 6.Tidak tahu
Alasan/ Data Pendukung :		

5.	Keterkaitan antara Rencana Induk BRA dengan Rencana Kerja SKPD Pemerintah Daerah tentang pelaksanaan kegiatan/program reintegrasi mantan GAM	1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup 4.Buruk 5.Sangat Buruk 6.Tidak tahu
Alasan/ Data Pendukung :		

6.	Keterkaitan antara Rencana Induk BRA dengan Program Kerja Donor/NGO yang ikut melaksanakan kegiatan/program reintegrasi mantan GAM	1.Sangat Baik 2.Baik 3.Cukup 4.Buruk 5.Sangat Buruk 6.Tidak tahu
Alasan/ Data Pendukung :		

7.	Apakah terjadi konsistensi antara Rencana Induk BRA dengan Butir-Butir MoU Helsinki di lapangan, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan/program reintegrasi mantan GAM: 1)Sangat konsisten 2)Konsisten 3)Cukup konsisten 4)Tidak konsisten 5)Sangat tidak konsisten
Alasan/ Data Pendukung :	

8.	Apakah konsisten dalam aspek perencanaan antara Rencana Induk BRA dengan Butir-Butir MoU Helsinki dalam pelaksanaan kegiatan/program reintegrasi mantan GAM : 1)Sangat konsisten 2)Konsisten 3)Cukup konsisten 4)Tidak konsisten 5)Sangat tidak konsisten
Alasan/ Data Pendukung :	

9.	Bagaimana penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan/ program oleh BRA di lapangan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan/program reintegrasi mantan GAM : 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk
Alasan/ Data Pendukung :	

b. Aspek Koordinasi

10.	Bagaimana koordinasi dalam penyusunan rencana pada bidang kegiatan/program reintegrasi mantan GAM antara BRA dengan pihak Pemerintah Daerah: 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk
Alasan/ Data Pendukung :	

11.	Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan kegiatan/program reintegrasi mantan GAM antara BRA dengan Pemerintah Daerah : 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk
Alasan/ Data Pendukung :	

c. Aspek Konsultasi

12.	Bagaimana peran BRA pada tingkat konsultasi publik terhadap aspek perencanaan untuk bidang kegiatan/program reintegrasi mantan GAM : 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk
Alasan/ Data Pendukung :	

13.	Bagaimana peran BRA pada tingkat konsultasi publik terhadap aspek pelaksanaan untuk kegiatan/program reintegrasi mantan GAM : 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk
Alasan/ Data Pendukung :	

14.	Bagaimana frekuensi forum pertemuan oleh BRA yang dipergunakan untuk memfasilitasi konsultasi publik yang terkait dengan bidang pelaksanaan kegiatan/program reintegrasi mantan GAM : 1)Sangat sering 2)Sering 3)Jarang 4)Jarang sekali 5)Tidak pernah
Alasan/ Data Pendukung :	

15.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan/program reintegrasi mantan GAM oleh BRAberdasarkan bentuk-bentuk berikut : 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk					
	1) Identifikasi penilaian kebutuhan	1	2	3	4	5
	2) Sosialisasi rencana program/kerja	1	2	3	4	5
	3) Pelibatan kelompok sasaran dalam proses perencanaan	1	2	3	4	5
	4) Legitimasi komitmen perencanaan	1	2	3	4	5
	5) Pelibatan kelompok sasaran dalam proses pelaksanaan	1	2	3	4	5
	6) Pelibatan dalam pengawasan dan evaluasi	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

16.	Bagaimana bentuk-bentuk media komunikasi dan informasi seputar kegiatan/program reintegrasi mantan GAM yang tersedia untuk program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai berikut : 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk					
	1) Website	1	2	3	4	5
	2) Email	1	2	3	4	5
	3) Kotak pos pengaduan	1	2	3	4	5
	4) Telephon bebas pulsa	1	2	3	4	5
	5) Pengaduan ke kantor langsung	1	2	3	4	5
	6) Majalah	1	2	3	4	5
	7) Newsletter	1	2	3	4	5
	8) Surat	1	2	3	4	5
	9) Radio komunitas	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

17.	Bagaimana peran masyarakat (kelompok sasaran) dalam aspek perencanaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan/program reintegrasi mantan GAM : 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk					
	1) Tokoh masyarakat	1	2	3	4	5
	2) Tokoh agama	1	2	3	4	5
	3) Perguruan Tinggi	1	2	3	4	5
	4) Kelompok perempuan	1	2	3	4	5
	5) Pemuda	1	2	3	4	5
	6) Donor/NGO	1	2	3	4	5
	7) LSM	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

18.	Bagaimana peran masyarakat (kelompok sasaran) dalam aspek pelaksanaan kegiatan/program reintegrasi mantan GAM : 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk					
	1) Tokoh masyarakat	1	2	3	4	5
	2) Tokoh agama	1	2	3	4	5
	3) Perguruan Tinggi	1	2	3	4	5
	4) Kelompok perempuan	1	2	3	4	5
	5) Pemuda	1	2	3	4	5
	6) Donor/ NGO	1	2	3	4	5
	7) LSM	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

19.	Bagaimana pencapaian program/ kegiatan reintegrasi mantan GAM terhadap kelompok sasaran : 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk					
	1) Sekretariat daerah	1	2	3	4	5
	2) Dinas Infokom	1	2	3	4	5
	3) Dinas Kesbang Linmas	1	2	3	4	5
	4) Donor/NGO	1	2	3	4	5
	5) Bappeda	1	2	3	4	5
	6) Polda	1	2	3	4	5
	7) Kodam	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

d. Aspek Kapasitas

20.	Bagaimana aturan dan mekanisme kelembagaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan/program reintegrasi mantan GAM yang dimiliki oleh pihak BRA : 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk					
	1) Pelaporan perkembangan realisasi pelaksanaan tahun aggaran 2005	1	2	3	4	5
	2) Pelaporan realisasi pencapaian sasaran dan target keluaran selama tahun anggaran 2005	1	2	3	4	5
	3) Pelaporan kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan	1	2	3	4	5
	4) Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan	1	2	3	4	5
	5) Tindak lanjut dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian permasalahan	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

21.	Bagaimana sistem untuk aspek Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pihak BRA 1)Sangat Baik 2)Baik 3)Cukup 4)Buruk 5)Sangat Buruk					
	1) Regulasi atau aturan tentang kebijakan SDM	1	2	3	4	5
	2) Pola dan mekanisme rekrutmen staf	1	2	3	4	5
	3) Pelatihan peningkatan kapasitas bagi pelaksana kegiatan	1	2	3	4	5
	4) Mekanisme kerja Satuan Kerja (Satker) dalam kegiatan reintegrasi mantan GAM	1	2	3	4	5
Alasan/ Data Pendukung :						

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS TAHUN 2006	BAPPENAS
PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM ASPEK KONSISTENSI, KOORDINASI, KONSULTASI DAN KAPASITAS	LAMPIRAN 3
BIDANG KETERTIBAN, KEAMANAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT (K3M)	POKJA REINTEGRASI MANTAN GAM
POLDA, KODAM, BRR, DINAS KESBANG LINMAS, DINAS INFOKOM, BAPPEDA, SETDA, DONOR/NGO *)	

PENGANTAR

Bapak/ Ibu/ Sdr yang berbahagia, dalam rangka pemantauan dan pengendalian rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Prov. NAD dan Kepulauan Nias, Prov. Sumut, kami bermaksud untuk melaksanakan survei penilaian terhadap rencana induk tersebut. Sehingga diharapkan mendapatkan masukan terhadap rencana induk yang nantinya dapat meningkatkan mutu proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, kami mohon dengan hormat partisipasi dan kesediaan Bapak/ Ibu/ Sdr untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner guna perbaikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di masa yang akan datang.

Identitas Responden

Nama : _____

Jenis Kelamin : _____

Instansi/ Lembaga : _____

Jabatan : _____

Alamat kantor : _____

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

a. Aspek Konsistensi

1. Apakah Renstra dan Rencana Aksi POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/ NGO *) dalam melaksanakan kegiatan di bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M), telah merujuk kepada Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Nias ?
2. Apakah POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) mempunyai Rencana Aksi yang dijabarkan dari Rencana Induk ? Bagaimana penjabarannya ?
3. Bagaimana proses dan mekanisme penyusunan Rencana Aksi tersebut ?
4. Berapa persentase dari Rencana Aksi yang telah menjadi program?
5. Sejauhmana pelaksanaan Refungsionalisasi Kelembagaan TNI, POLRI, LSN dan POLHUKAM di NAD dan Nias?
   - Berapa jumlah target kegiatan yang dilaksanakan? dan siapa pelaksananya?
   - Apa kendala yang dihadapi dan solusi yang digunakan?
6. Sejauhmana pelaksanaan Pengembangan Ketahanan Masyarakat, Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Daerah di NAD dan Nias?
   - Berapa jumlah target kegiatan yang dilaksanakan? dan siapa pelaksananya?
   - Apa kendala yang dihadapi dan solusi yang digunakan?
7. Bagaimana pelaksanaan program pendukung dalam bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) dalam rehabilitasi dan rekonstruksi ?
8. Bagaimana sistem perencanaan yang terdapat di POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) yang terkait dengan kegiatan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) ?
9. Sejauhmana sinkronisasi antara perencanaan yang telah disusun oleh POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) dengan pelaksanaan di lapangan?
10. Apa saja permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan ?
11. Bagaimana tindak lanjut dalam merespon terhadap permasalahan dan tantangan tersebut ?
12. Bagaimana kesesuaian aspek perencanaan program/kegiatan antara :

- POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) dengan Instansi (Dinas) terkait ?
- POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) dengan K/L lainnya ?
- POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) dengan Pemda ?
- POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) dengan Donor/ NGO ?

b. Aspek Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan untuk program Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) antara :
   - POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) dengan Satuah Kerja (Satker) ?
   - POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) dengan Bappenas ?
   - POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) dengan K/L lainnya ?
   - POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) dengan Pemda ?
   - POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) dengan Donor/ NGO?
   - POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) dengan Kelompok Sasaran ?
2. Apa saja permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan untuk program Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) tersebut ?
3. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan kegiatan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) antara :
   - POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) dengan Satuan Kerja (Satker) ?
   - POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) dengan K/L lainnya ?

- POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) dengan Pemda ?
- POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) dengan SKPD ?
- POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) dengan Donor/ NGO ?
- POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) dengan Kelompok Sasaran ?

4. Apa saja permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan kegiatan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) tersebut ?
5. Bagaimana sistem kerja Satuan Kerja (Satker) yang melaksanakan kegiatan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) yang berada di bawah POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *)?
6. Bagaimana sistem koordinasi antar Satker yang berada di bawah koordinasi POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *)?
7. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Satker ?
8. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Satker ?

c. Aspek Konsultasi

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) ?
2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) ?
3. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)?
4. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik yang ada di POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *)?
5. Bagaimana ketersediaan akses terhadap informasi dan komunikasi rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) ?
6. Bagaimana ketersediaan akses untuk ikut berpartisipasi pada pelaksanaan program Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) ?

7. Bagaimana ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik tentang kegiatan di bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) ?
8. Bagaimana ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan ?
9. Bagaimana ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran)?

d. Aspek Kapasitas

1. Bagaimana realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) ?
2. Bagaimana kapasitas kelembagaan POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/ NGO *) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) ?
3. Bagaiamana mekanisme dan tata kerja yang dimiliki oleh POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) ?
4. Sejauh ini, apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut ?
5. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRR kepada POLDA KODAM/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) ?
6. Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset dari BRR kepada POLDA KODAM/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) ?
7. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari BRR kepada POLDA KODAM/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *)?
8. Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut ?
9. Bagaimana *exit strategy* bagi POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *)?
10. Bagaimana mekanisne pelaporan dan pengawasan yang dilakukan oleh POLDA KODAM/ BRR/ DINAS KESBANG LINMAS/ DINAS INFOKOM/ BAPPEDA/ SETDA/ DONOR/NGO *) ?

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PELAKSANAAN REINTEGRASI MANTAN ANGGOTA GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2005/2006	BAPPENAS
PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM ASPEK KONSISTENSI, KOORDINASI, KONSULTASI DAN KAPASITAS	LAMPIRAN 3
BIDANG PELAKSANAAN REINTEGRASI MANTAN ANGGOTA GAM	POKJA REINTEGRASI MANTAN GAM
BADAN REINTEGRASI DAMAI ACEH (BRA)	

PENGANTAR

Bapak/ Ibu/ Sdr yang berbahagia, dalam rangka pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan reintegrasi mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam, kami bermaksud untuk melaksanakan survei penilaian terhadap pelaksanaan tersebut. Sehingga diharapkan mendapatkan masukan yang nantinya dapat meningkatkan mutu proses pelaksanaan reintegrasi mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, kami mohon dengan hormat partisipasi dan kesediaan Bapak/ Ibu/ Sdr untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner guna perbaikan kegiatan reintegrasi mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam di masa yang akan datang.

Identitas Responden

Nama : _____

Jenis Kelamin : _____

Instansi/ Lembaga : _____

Jabatan : _____

Alamat kantor : _____

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

a. Aspek Konsistensi

1. Apakah Rencana Kegiatan BRA telah merujuk kepada poin-poin dari MOU Helsinski terhadap pemberdayaan mantan GAM dan Masyarakat NAD ? Mengapa dan Bagaimana penjabarannya ?
2. Bagaimana proses penyusunan Rencana Kegiatan tersebut ?
3. Apakah Rencana Kegiatan BRA telah sesuai dengan Program Pemberdayaan ekonomi yang disusun oleh Pemda NAD ?
4. Berapa persentase dari Rencana Kegiatan BRA yang telah menjadi program?
5. Sejauhmana pelaksanaan Reintegrasi Mantan GAM tahun 2005 di NAD ?
   - Berapa jumlah target kegiatan yang telah dilaksanakan? dan siapa pelaksananya?
   - Apa kendala yang dihadapi dan solusi yang digunakan?
6. Sejauhmana antara sinkronisasi dari perencanaan yang telah disusun dengan realisasi di lapangan?
   - Apa saja permasalahan dan tantangan yang muncul di lapangan ?
7. Bagaimana pelaksanaan program kegiatan BRA tahun 2005 di NAD?
8. Bagaimana sistem perencanaan yang terdapat dalam lembaga BRA, Pemda, K/L ?
9. Bagaimana kesesuaian aspek perencanaan program/kegiatan antara :
   - BRA dengan Instansi (Dinas) terkait ?
   - BRA dengan K/L lainnya ?
   - BRA dengan Pemda ?
   - BRA dengan Donor/NGO ?

b. Aspek Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi dalam aspek penyusunan perencanaan Program Reintegrasi mantan GAM (pemberdayaan ekonomi masyarakat NAD) antara :
   - BRA dengan Pemda ?
   - BRA dengan K/L?
   - BRA dengan Kelompok Sasaran ?
1. Apa saja permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan perencanaan tersebut ?

2. Bagaimana koordinasi dalam aspek pelaksanaan antara :
   - BRA dengan Pemda ?
   - BRA dengan K/L terkait?
   - BRA dengan Kelompok Sasaran ?
3. Apa saja permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan pelaksanaan tersebut ?
4. Bagaimana sistem kerja Koordinator Bidang (Korbid) yang melaksanakan program reintegrasi?
5. Bagaimana sistem koordinasi antar Korbid yang berada di bawah koordinasi BRA ?
6. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Korbid ?
7. Bagaimana penyelesaian masalah dan tindak lanjut dalam pengelolaan Korbid ?

c. Aspek Konsultasi

1. Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat NAD dalam kegiaran reintegrasi ?
2. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaan program ?
3. Bagaimana peran dan partisipasi publik dalam pengawasan proses pelaksanaan program?
4. Bagaimana ketersediaan akses informasi dan komunikasi terhadap program yang dilaksanakan ?
5. Bagaimana ketersediaan akses untuk berpartisipasi ?
6. Bagaimana ketersediaan akses untuk menyampaikan pengaduan publik ?
7. Bagaimana ketersediaan akses untuk memperoleh informasi tindak lanjut pengaduan ?
8. Bagaimana ketersediaan akses untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hak-hak publik (kelompok sasaran)?
9. Bagaimana sistem fasilitasi partisipasi publik di BRA dan Pemda?

d. Aspek Kapasitas

1. Bagaimana realisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program reintegrasi mantan GAM?
2. Bagaimana mekanisme dan aturan yang ada di Korbid BRA dan dinas yang terkait dengan program reintegrasi
3. Sejauh ini, Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan mekanisme dan tata kerja tersebut?

4. Bagaimana kesiapan peralihan asset dari BRA kepada Pemerintah Daerah ?
5. Hambatan apa yang dihadapi dalam peralihan asset dari BRA kepada Pemerintah Daerah ?
6. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam peralihan asset dari BRA kepada Pemerintah Daerah?
7. Bagaimana sistem dan mekanisme tentang peralihan asset tersebut ?
8. Bagaiamana *exit strategy* bagi kelembagaan BRA ?
9. Bagaimana mekanisne pelaporan dan pengawasan dalam lembaga ?
10. Bagaimana kebijakan dan sistem yang digunakan BRA dalam perekrutan SDM yang akan berperan dalam pelaksanaan program reintegrasi ?
11. Bagaimana tatakerja yang ada di BRA dan dinas yang terkait dengan program reintegrasi

LAMPIRAN III

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi oleh Bapel BRR tahun 2005/2006

per 24 November 2006

REALISASI ANGGARAN
Bagian Anggaran 94 BRR NAD-Nias
sampai dengan 24 Nopember 2006

6														
No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSENTASE REALISASI					TOTAL REALISASI
			DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA-L 2006	DIPA 2005 (Rp)	DIPA-L (Rp)	DIPA 2006 (Rp)	DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	DIPA 2005&L	DIPA 2006&L	
1	464929	BRR- Tata Ruang. Lingkungan. Pemantauan Dan Evaluasi Manfaat	33,458,150,000	33,426,908,000	34,719,000,000	31,242,000	22,272,757,975	18,092,342,083	0.09%	66.63%	52.11%	66.66%	59.23%	40,396,342,058
2	464935	BRR - Perencanaan Umum. Perencanaan Teknis Dan Manajemen Rantai Pengadaan	57,041,850,000	57,041,850,000	71,628,960,000	0	43,846,440,150	32,836,361,791	0.00%	76.87%	59.60%	76.87%	59.60%	76,682,801,941
		Jumlah per Bidang	90,500,000,000	90,468,758,000	106,347,960,000	31,242,000	66,119,198,125	50,928,703,874	0.03%	73.09%	47.89%	73.09%	59.47%	117,079,143,999

BIDANG KELEMBAGAAN														
No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSENTASE REALISASI					TOTAL REALISASI
			DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA-L 2006	DIPA 2005 (Rp)	DIPA-L (Rp)	DIPA 2006 (Rp)	DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	DIPA 2005&L	DIPA 2006&L	
1	445676	BRR- Bawasda NAD			2,818,580,000			0			0.00%		0.00%	0
2	445682	BRR- Bapedalda			483,500,000			0			0.00%		0.00%	0
3	459212	BRR- Peningkatan Dan Penataan Kapasitas Kelembagaan NAD-Nias	32,800,000,000	32,483,530,000	55,695,820,000	316,470,652	3,489,749,910	8,150,748,842	0.96%	20.96%	14.63%	11.60%	13.20%	11,956,969,404
4	459220	BRR - Pengembangan Otonomi Daerah NAD-Nias	28,650,000,000	28,325,575,000	20,479,783,000	324,424,953	1,865,647,890	6,513,471,956	1.13%	6.59%	31.80%	7.64%	17.17%	8,703,544,799
5	459234	BRR - Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor Pemerintah NAD	74,100,000,000	74,100,000,000	144,654,247,000	0	18,738,546,850	10,390,030,300	0.00%	25.29%	7.18%	25.29%	13.32%	29,128,577,150
6	459240	BRR - Penataan Dan Pengelolaan Sdm Aparatur NAD-Nias	28,000,000,000	27,074,251,000	28,404,850,000	925,748,269	3,200,122,178	4,659,526,380	3.31%	11.82%	16.40%	14.74%	14.17%	8,785,396,827
7	459280	BRR - Peningkatan Kelembagaan Instansi Vertikal NAD-Nias	4,813,000,000	4,025,534,000		787,466,000	3,376,145,050		86.51%	86.51%		86.51%	83.87%	4,163,611,050

BIDANG KELEMBAGAAN														
No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSENTASE REALISASI					TOTAL REALISASI
			DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA-L 2006	DIPA 2005 (Rp)	DIPA-L (Rp)	DIPA 2006 (Rp)	DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	DIPA 2005&L	DIPA 2006&L	
9	459322	BRR - Pengembangan Sarpras Pengadilan Tinggi Agama Sumut	7,334,510,000	6,131,240,000		1,203,270,000	4,328,235,906		75.42%7	75.42%7		75.42%	70.59%	5,531,505,906
10	459331	BRR - Pengembangan Sarpras Mahkamah Agung	33,697,292,000	28,566,768,000	44,680,450,000	5,130,524,280	14,472,188,080	12,435,976,495	15.23%	50.66%	27.83%	58.17%	36.74%	32,038,688,855
11	459347	BRR - Pengembangan Sarpras Kejaksaan Agung	18,500,000,000	18,221,899,000	19,822,300,000	278,101,015	7,739,935,652	4,794,062,190	1.50%	43.34%	24.19%	43.34%	32.95%	12,812,098,857
12	459410	BRR - Pengembangan Sarpras Kanwil Hukum Dan HAM	70,522,000,000	69,999,549,000	59,164,916,000	164,916,000	17,848,381,365	4,106,511,650	0.74%	25.50%	6.94%	26.05%	17.00%	22,477,344,015
13	462196	BRR - Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor Kepemerintahan Nias			42,278,030,000			9,032,995,278			21.37%		21.37%	9,032,995,278
14	462200	BRR- Peningkatan Sarana Dan Prasarana Gedung Keuangan Negara			16,537,000,000			3,382,098,900			20.45%		20.45%	3,382,098,900
15	462222	BRR - Dukungan Bantuan Pemerintah Daerah - Spada			60,790,177,000			840,420,000			1.38%		1.38%	840,420,000
16	464290	BRR - Sdeops Polri NAD-Nias	25,475,800,000	25,463,977,000	21,000,000,000	11,822,800	18,349,592,575	22,095,712,600	0.05%	72.06%	105.22%	7.05%	87.05%	40,457,127,975
17	464332	BRR - Penguatan Kelembagaan Komunikasi Dan Informasi NAD-Nias	41,418,000,000	39,488,430,000	27,713,500,000	1,929,570,409	14,235,875,622	9,965,517,881	4.66%	36.05%	35.96%	39.03%	36.01%	26,130,963,912
18	464341	BRR - Peningkatan Komitmen Persatuan Dan Kesatuan Nasional NAD-Nias	29,579,098,000	23,834,892,000	22,829,500,000	5,744,205,980	20,449,076,071	14,388,250,410	19.42%	85.79%	63.02%	88.55%	74.66%	40,581,532,461
19	464394	BRR - Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan NAD-Nias	26,549,286,000	23,447,608,000	39,118,470,000	3,101,676,688	16,738,801,721	15,874,199,061	11.68%	71.39%	40.58%	52.13%	52.13%	35,714,677,470
20	464740	BRR - Sdesdm Polri NAD-Nias	10,083,830,000	7,134,939,000	8,504,500,000	2,948,891,000	6,105,692,000	6,208,844,800	29.24%	85.57%	73.01%	89.79%	78.74%	15,263,427,800
21	464966	BRR - Pengembangan Pertahanan Matra Darat NAD	122,019,727,000	121,700,028,000	139,999,117,000	319,698,200	71,218,327,810	56,090,666,787	0.26%	58.52%	40.07%	58.63%	48.65%	127,628,692,797
22	464972	BRR - Pengembangan Pertahanan Matra Laut NAD-Nias	11,530,495,000	11,530,495,000	19,872,257,000	0	5,018,153,000	7,278,619,854	0.00%	43.52%	36.63%	43.52%	39.16%	12,296,772,854
23	464981	BRR - Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias	21,386,122,000	21,386,122,000	39,798,500,000	0	4,998,205,000	17,837,805,124	0.00%	23.37%	44.82%	23.37%	37.32%	22,836,010,124
24	464997	BRR - Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias	74,365,272,000	73,971,566,000	33,899,615,000	393,706,000	58,781,711,350	12,102,342,900	0.53%	79.47%	35.70%	7%35.70%	65.71%	71,277,760,250
25	465001	BRR - Sdelog Polri NAD-Nias	86,640,370,000	83,368,945,000	178,991,482,000	3,271,425,369	28,110,433,140	72,342,390,750	3.78%	33.72%	38.29%	36.22%	38.29%	103,724,249,259
	Jumlah per Bidang		*769,753,000,000*	*741,677,999,000*	*1,027,536,594,000*	*28,074,999,615*	*329,908,266,170*	*298,490,192,158*	3.65%	44.48%	29.05%	46.51%	35.52%	656,473,457,943

BIDANG PERUMAHAN. INFRASTRUKTUR DAN KOORDINASI TATA GUNA LAHAN														
No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSENTASE REALISASI					TOTAL REALISASI
			DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA-L 2006	DIPA 2005 (Rp)	DIPA-L (Rp)	DIPA 2006 (Rp)	DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	DIPA 2005&L	DIPA 2006&L	
1	437262	BRR-Pengembangan Perumahan dan Pemukiman NAD			381,751,200,000			132,153,984,822			34.62%		34.62%	132,153,984,822
2	437313	BRR-Pengembangan Perumahan dan Pemukiman NAD Wilayah IV			197,446,800,000			41,217,700,470			20.88%		20.88%	41,217,700,470
3	440759	BRR - Pemeliharaan. Rehab. Peningkatan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Transportasi Nias			45,053,532,000	143,717,600	16,786,611,900	21,938,695,200			48.69%		85.95%	38,869,024,700
4	440765	BRR - Pemeliharaan. Rehabilitasi. Peningkatan Dan Pembangunan Transportasi Udara NAD			72,402,250,000			30,571,763,749			42.22%		42.22%	30,571,763,749
5	445481	BRR - Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan NAD-NIAS (GRANT-KFW)			125,000,000,000			0			0.00%		0.00%	0
6	445608	BRR - Pengembangan Kawasan Percontohan NAD			106,088,000,000			1,292,922,730			1.22%		1.22%	1,292,922,730
7	445614	BRR - Deputi Perumahan dan Permukiman NAD - NIAS			126,613,500,000			0			0.00%		0.00%	0
8	445620	BRR - Bantuan Perbaikan Rumah NAD			60,185,230,000			728,328,000			1.21%		1.21%	728,328,000
9	445639	BRR - Bantuan Perumahan dan Permukiman Kembali NAD			236,875,030,000			2,356,087,024			0.99%		0.99%	2,356,087,024
10	445651	BRR - Infrastruktur Kawasan dan Permukiman NAD			133,268,945,000			548,866,935			0.41%		0.41%	548,866,935

BIDANG PERUMAHAN. INFRASTRUKTUR DAN KOORDINASI TATA GUNA LAHAN														
No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSENTASE REALISASI					TOTAL REALISASI
			DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA-L 2006	DIPA 2005 (Rp)	DIPA-L (Rp)	DIPA 2006 (Rp)	DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	DIPA 2005&L	DIPA 2006&L	
11	446129	BRR - Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Infrastruktur			39,425,000,000			0			0.00%		0.00%	0
12	459011	BRR - Pembinaan Teknis Perumahan Infrastruktur Dan Penatagunaan Lahan NAD-Nias	8,503,580,000	5,012,894,000		173,644,500	2,805,411,989		7.44%	55.96%		55.96%	55.96%	2,979,056,489
13	459027	BRR - Pembinaan Perencanaan Jalan NAD	22,849,090,000	128,185,449,000	111,824,160,000	192,849,700	34,862,223,799	70,656,439,745	0.84%	27.20%	63.19%	63.19%	43.96%	105,711,513,244
14	459033	BRR - Pembinaan Perencanaan Jalan Sumut	6,183,230,000	4,981,595,000	66,995,800,000	1,201,634,973	2,600,091,604	12,208,885,015	19.43%	20.57%	18.22%	61.48%	20.57%	16,010,611,592
15	459042	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD	82,188,558,000	59,081,592,000	132,418,479,000	3,176,658,873	46,925,146,714	61,669,812,811	3.87%	79.42%	46.57%	80.47%	56.71%	111,771,618,398
16	459058	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Provinsi NAD	35,003,140,000	21,481,089,000	68,892,238,000	3,250,241,199	11,453,882,241	18,412,782,241	9.29%	53.32%	26.73%	59.46%	33.05%	33,116,905,681
17	459064	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Provinsi Sumut	44,100,576,000	35,892,673,000	109,490,160,000	8,207,902,963	29,610,182,251	62,626,492,413	18.61%	82.50%	57.20%	85.75%	63.44%	100,444,577,627
18	459070	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kota Banda Aceh	15,293,961,000	9,840,326,000	96,717,618,000	276,870,000	5,772,823,351	33,419,947,808	1.81%	58.66%	34.55%	59.80%	36.78%	39,469,641,159
19	459089	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kota Sabang	4,230,291,000	2,303,357,000	13,583,200,000	968,045,774	2,126,579,585	3,084,564,758	22.88%	92.33%	22.71%	94.60%	32.80%	6,179,190,117
20	459095	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Aceh Besar	9,250,066,000	2,685,303,000	29,155,850,000	302,701,950	2,440,198,843	9,065,187,9	3.27%	90.87%	31.09%	91.80%	36.13%	11,808,088,772
21	459109	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Aceh Jaya	14,803,665,000	9,133,390,000	23,905,082,000	201,763,716	8,346,363,200	6,562,129,048	1.36%	91.38%	27.45%	91.57%	45.12%	15,110,255,964
22	459115	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Pidie	11,565,965,000	6,206,678,000	38,711,850,000	2,217,129,793	4,335,729,290	13,320,486,526	19.17%	69.86%	34.41%	77.79%	39.31%	19,873,345,609

BIDANG PERUMAHAN. INFRASTRUKTUR DAN KOORDINASI TATA GUNA LAHAN														
No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSENTASE REALISASI					TOTAL REALISASI
			DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA-L 2006	DIPA 2005 (Rp)	DIPA-L (Rp)	DIPA 2006 (Rp)	DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	DIPA 2005&L	DIPA 2006&L	
23	459121	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Bireun	9,752,066,000	1,818,783,000	22,837,413,000	1,706,727,277	429,232,677	9,786,855,235	17.50%	23.60%	42.85%	60.59%	41.43%	11,922,815,189
24	459130	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Aceh Utara	14,583,165,000	3,139,930,000	17,280,558,000	267,000,000	232,547,200	2,985,292,800	1.83%	7.41%	17.28%	14.66%	15.76%	3,484,840,000
25	459146	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kota Lhokseumawe	9,018,251,000	5,832,517,000	9,626,877,000	333,472,100	2,692,712,728	4,217,986,851	3.70%	46.17%	43.81%	49.08%	44.70%	7,244,171,679
26	459152	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Aceh Barat	15,080,551,000	3,195,257,000	28,384,423,000	316,285,032	2,642,353,944	11,145,052,509	2.10%	82.70%	39.26%	84.25%	43.66%	14,103,691,485
27	459161	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Nagan Raya	13,232,051,000	2,839,127,000	11,090,400,000	300,215,000	2,391,672,074	7,953,864,768	2.27%	84.24%	71.72%	85.75%	74.27%	10,645,751,842
28	459177	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Simeulue	7,305,851,000	4,824,716,000	16,894,588,000	1,511,624,130	3,162,033,948	7,286,618,130	20.69%	65.54%	43.13%	73.76%	48.11%	11,960,276,208
29	459183	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jln Kabupaten Aceh Barat Daya	11,758,051,000	1,184,156,000	11,699,972,000	2,458,507,700	144,575,300	2,320,986,671	20.91%	12.21%	19.84%	71.46%	19.14%	4,924,069,671
30	459192	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Nias	15,363,391,000	15,063,893,000	24,855,000,000	299,497,850	7,364,171,610	12,962,237,145	1.95%	48.89%	52.15%	49.88%	50.92%	20,625,906,605
31	459203	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Nias Selatan	14,324,501,000	14,055,221,000	24,410,900,000	269,280,480	1,924,333,040	5,461,443,542	1.88%	13.69%	22.37%	15.31%	19.20%	7,655,057,062
32	462021	BRR-Pengembangan Perumahan dan Pemukiman NAD Wilayah I	288,410,980,000	234,108,066,000	631,562,831,000	54,302,914,043	219,639,241,896	172,275,499,157	18.83%	93.82%	27.28%	94.98%	45.27%	446,217,655,096
33	462030	BRR - Pengembangan Perumahan Dan Pemukiman Nias	61,589,020,000	61,378,700,000	536,548,500,000	210,320,00	35,871,623,570	159,453,681,937	0.34%	58.44%	29.72%	58.59%	32.67%	195,535,625,507

BIDANG PERUMAHAN. INFRASTRUKTUR DAN KOORDINASI TATA GUNA LAHAN														
No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSENTASE REALISASI					TOTAL REALISASI
			DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA-L 2006	DIPA 2005 (Rp)	DIPA-L (Rp)	DIPA 2006 (Rp)	DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	DIPA 2005&L	DIPA 2006&L	
34	462046	BRR - Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah NAD	27,545,206,000	23,457,010,000	70,253,789,000	4,088,196,054	12,152,554,621	12,618,264,121	26.43%	51.81%	17.96%	58.96%	26.43%	28,859,014,796
35	462052	BRR - Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air	23,653,254,000	23,621,279,000	34,044,552,000	31,975,000	5,824,815,221	6,705,785,238	0.14%	24.66%	19.70%	24.76%	21.73%	12,562,575,459
36	462061	BRR - Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Dan Drainase NAD	13,851,540,000	12,711,040,000	30,573,320,000	1,140,498,640	8,196,358,048	9,796,007,381	8.23%	41.57%	32.04%	67.41%	41.57%	19,132,864,069
37	463961	BRR - Pembinaan Dan Perencanaan Irigasi Nias	3,440,850,000	3,254,144,000		186,705,098	2,996,036,349		5.43%	92.07%		92.07%	92.07%	3,182,741,447
38	463970	BRR - Pembinaan Dan Perencanaan Irigasi NAD	9,637,310,000	7,870,902,000	121,227,807,000	1,791,112,282	6,625,521,099	31,687,183,648	18.59%	84.18%	26.14%	87.11%	29.68%	40,103,817,029
39	464119	BRR - Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai NAD	93,348,168,000	83,966,463,000		12,589,387,771	69,078,209,206		13.49%	82.27%		84.58%	82.27%	81,667,596,977
40	464125	BRR - Pembinaan Dan Perencanaan Pbpp NAD	31,458,212,000	20,816,614,000	145,113,725,000	3,719,930,200	19,199,507,453	45,911,996,203	39.24%	92.23%	31.64%	93.41%	39.24%	68,831,433,856
41	464131	BRR - Pembinaan Dan Perencanaan Pbpp Nias	10,574,100,000	8,652,539,000		1,921,561,100	7,070,092,865		17.1%	81.71%		85.03%	81.71%	8,991,65
42	464140	BRR - Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai Langsa	25,346,343,000	24,529,308,000		3,248,562,800	17,395,715,923		12.82%	70.92%		74.32%	70.92%	20,644,278,723
43	464156	BRR - Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai Aceh Barat	19,446,291,000	15,649,375,000		3,506,918,350	13,934,378,801		18.03%	89.04%		9.04%	89.04%	17,441,297,151
44	464162	BRR - Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai Nias	65,209,100,000	63,111,416,000	35,831,700,000	2,097,683,280	22,216,395,492	21,550,219,093	3.22%	35.20%	60.14%	37.29%	44.23%	45,864,297,865
45	464171	BRR - Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai Lhokseumawe	40,248,880,000	34,435,645,000		7,385,689,900	25,933,994,715		18.35%	75.31%		79.67%	75.31%	33,319,684,615

BIDANG PERUMAHAN. INFRASTRUKTUR DAN KOORDINASI TATA GUNA LAHAN														
No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSENTASE REALISASI					TOTAL REALISASI
			DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA-L 2006	DIPA 2005 (Rp)	DIPA-L (Rp)	DIPA 2006 (Rp)	DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	DIPA 2005&L	DIPA 2006&L	
46	464175	BRR - Pengembangan Daerah Rawa Dan Pengamanan Pantai Wilayah Nias (Baru)			23,674,000,000			2,792,087,910			11.79%		11.79%	2,792,087,910
47	464187	BRR - Irigasi Wilayah Bireuen	13,524,401,000	12,252,003,000		2,434,563,600	11,996,915,399		18.00%	97.92%		98.26%	97.92%	14,431,478,999
48	464193	BRR - Irigasi Wilayah Simeuleu	15,835,850,000	12,951,768,000	11,229,370,000	2,884,081,913	6,449,078,342	4,487,254,078	18.21%	49.79%	39.96%	58.94%	45.23%	13,820,414,333
49	464207	BRR - Irigasi Wilayah Aceh Barat	14,149,943,000	12,600,667,000		2,507,563,800	12,392,019,700		17.72%	98.34%		98.62%	98.34%	14,899,583,500
50	464213	BRR - Irigasi Wilayah Aceh Timur	16,274,555,000	14,177,687,000		2,328,150,500	13,516,498,652		95.34%	95.34%		95.99%	95.34%	15,844,649,152
51	464222	BRR - Irigasi Wilayah Aceh Utara	12,191,535,000	7,498,513,000		3,748,533,260	7,299,224,650		30.75%	97.34%		97.34%	97.34%	11,047,757,910
52	464238	BRR - Irigasi Wilayah Pidie	18,227,458,000	12,405,954,000		3,694,932,545	9,834,294,679		79.27%	79.27%		84.03%	79.27%	13,529,227,224
53	464244	BRR - Irigasi Wilayah Aceh Besar	12,606,304,000	11,730,721,000		1,570,201,065	10,680,638,715		1.05%	91.05%		92.11%	91.05%	12,250,839,780
54	464250	BRR - Irigasi Wilayah Nias	15,280,700,000	15,068,839,000	24,264,754,000	211,860,700	10,543,776,788	8,947,498,407	1.39%	6.87%	36.87%	70.39%	49.55%	19,703,135,895
55	464564	BRR - Pengelolaan Pertanahan NAD-Nias	25,000,000,000	15,145,580,000	603,943,132,000	9,854,420,462	12,277,594,104	94,695,204,931	39.42%	81.06%	15.68%	88.53%	17.28%	116,827,219,497
56	464570	BRR - Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana Dan Prasarana Energi NAD-Nias	4,051,800,000	3,557,041,000	40,834,574,000	494,759,808	1,998,692,721	9,620,364,406	%26.17%	26.17%	26.17%	61.54%	26.17%	12,113,816,935
57	464589	BRR - Peningkatan Kualitas Jasa Ketenagalistrikan NAD	84,316,200,000	84,316,200,000	232,578,662,000	0	81,875,982,400	17,633,346,800	0.00%	97.11%	7.58%	97.11%	31.40%	99,509,329,200
58	464595	BRR - Peningkatan Kualitas Jasa Ketenagalistrikan Nias	11,632,000,000	11,632,000,000	21,485,222,000	0	11,027,076,114	6,216,480,143	0.00%	94.80%	28.93%	94.80%	52.07%	17,243,556,257
59	464765	BRR-Pencarian dan Penyelamatan NAD	70,480,034,000	70,336,316,000		143,717,600	16,786,611,900		0.20%	23.87%		24.02%	23.87%	16,930,329,500
60	464771	BRR - Fasilitas Pos. Telekomunikasi. Meteo Dan Geofisika NAD	12,686,000,000	12,495,832,000	61,595,600,000	190,167,900	6,434,840,750	10,193,295,615	1.50%	51.50%	16.55%	52.22%	22.44%	16,818,304,265

BIDANG PERUMAHAN. INFRASTRUKTUR DAN KOORDINASI TATA GUNA LAHAN														
No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSENTASE REALISASI					TOTAL REALISASI
			DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA-L 2006	DIPA 2005 (Rp)	DIPA-L (Rp)	DIPA 2006 (Rp)	DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	DIPA 2005&L	DIPA 2006&L	
61	464780	BRR - Pemeliharaan. Rehabilitasi. Peningkatan Dan Pembangunan Transportasi Laut NAD	50,314,100,000	50,055,812,000	77,802,770,000	258,287,270	29,537,154,354	6,718,065,604	0.51%	59.01%	8.63%	59.22%	28.36%	36,513,507,228
62	464796	BRR - Pemeliharaan. Rehabilitasi. Peningkatan Dan Pembangunan Transportasi Laut Nias	39,824,331,000	39,436,453,000		387,877,000	7,368,577,551		0.97%	18.68%		18.68%	18.68%	7,756,454,551
63	464800	BRR - Pemeliharaan. Rehabilitasi. Peningkatan Dan Pembangunan Transportasi NAD	15,820,925,000	15,624,478,000	86,645,404,000	196,447,000	10,240,077,031	29,739,143,827	1.24%	65.54%	34.32%	65.97%	39.09%	40,175,667,858
64	464816	BRR - Pemeliharaan. Rehabilitasi. Peningkatan Dan Pembangunan Transportasi Udara Nias	9,399,100,000	9,088,872,000		310,228,000	4,502,473,100		1.20%	49.54%		51.20%	49.54%	4,812,701,100
65	464822	BRR - Pemeliharaan. Rehabilitasi. Peningkatan Dan Pembangunan Transportasi Udara Bandara Lasikin	27,108,416,000	22,564,549,000		4,543,867,400	13,817,420,831		1.24%	61.24%		61.24%	61.24%	18,361,288,231
66	464831	BRR - Pemeliharaan. Rehabilitasi. Peningkatan Dan Pembangunan Transportasi Udara Bandara Rembele	15,361,550,000	15,132,527,000		229,022,500	2,287,722,200		1.49%	15.12%		15.12%	15.12%	2,516,744,700

BIDANG PERUMAHAN. INFRASTRUKTUR DAN KOORDINASI TATA GUNA LAHAN														
No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSENTASE REALISASI					TOTAL REALISASI
			DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA-L 2006	DIPA 2005 (Rp)	DIPA-L (Rp)	DIPA 2006 (Rp)	DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	DIPA 2005&L	DIPA 2006&L	
67	464847	BRR - Pemeliharaan. Rehabilitasi. Peningkatan Dan Pembangunan Transportasi Udara Bandara Maimun Saleh	13,593,980,000	13,392,480,000		201,500,000	2,803,874,300		1.48%	20.94%		22.11%	20.94%	2,803,874,300
68	464853	BRR - Pemeliharaan. Rehabilitasi. Peningkatan Dan Pembangunan Transportasi Udara Bandara Cut Nyak Dhien	43,429,564,000	43,062,611,000		366,953,000	11,328,961,264		0.84%	26.31%		26.31%	26.31%	11,695,914
69	477017	BRR - Pengembangan Kecamatan (PPK)			9,539,100,000			0			0.00%		0.00%	0
70	477023	BRR - Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan			179,231,000,000			79,712,247,793			44.47%		44.47%	79,712,247,793
71	477032	BRR- Pengembangan Perumahan dan Pemukiman NAD Wilayah II			270,649,900,000			63,997,715,398			23.65%		23.65%	63,997,715,398
72	477048	BRR - Pengembangan Perumahan Dan Permukiman (MDTF)			827,480,000,000			199,259,597,465			24.08%		24.08%	199,259,597,465
73	489234	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Aceh Tengah			11,692,300,000			3,550,205,894			30.36%		30.36%	3,550,205,894
74	489240	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Aceh Timur			10,442,300,000			2,136,043,088			20.46%		20.46%	2,136,043,088
75	489280	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kota Langsa			8,442,300,000			1,940,447,943			22.98%		22.98%	1,940,447,943
76	489300	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Aceh Tamiang			8,442,300,000			2,840,676,865			33.65%		33.65%	2,840,676,865

BIDANG PERUMAHAN. INFRASTRUKTUR DAN KOORDINASI TATA GUNA LAHAN														
No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSENTASE REALISASI					TOTAL REALISASI
			DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA-L 2006	DIPA 2005 (Rp)	DIPA-L (Rp)	DIPA 2006 (Rp)	DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	DIPA 2005&L	DIPA 2006&L	
77	489322	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Aceh Tenggara			8,460,300,000			4,349,695,954			51.41%		51.41%	4,349,695,954
78	489331	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Gayo Lues			8,456,700,000			3,142,263,149			37.16%		37.16%	3,142,263,149
79	489347	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Aceh Selatan			11,291,960,000			1,886,100,814			16.70%		16.70%	1,886,100,814
80	489410	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Aceh Singkil			24,818,948,000			8,333,609,356			33.58%		33.58%	8,333,609,356
81	489435	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Bener Meriah			8,442,300,000			1,583,216,114			18.75%		18.75%	1,583,216,114
82	494119	BRR - Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Strategis Nasional Dan Provinsi			58,278,600,000			1,036,088,187			1.78%		1.78%	1,036,088,187
83	494966	BRR - Pembinaan Dan Perencanaan PDRPP - NAD			118,521,706,000			44,726,983,844			37.74%		37.74%	44,726,983,844
		Jumlah per Bidang	*1619,258,000,000*	*1458,847,350,000*	*6,736,283,481000*	*160,410,642,851*	*933,396,216,192*	*1655,491685,288*	9.91%	63.98%	24.58%	67.55%	31.59%	2,749,298,544,331

BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN USAHA														
No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSENTASE REALISASI					TOTAL REALISASI
			DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA-L 2006	DIPA 2005 (Rp)	DIPA-L (Rp)	DIPA 2006 (Rp)	DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	DIPA 2005&L	DIPA 2006&L	
1	459435	BRR - Pemberdayaan Ekonomi Dan Usaha Nias	29,660,385,000	29,072,995,000	36,355,490,000	587,389,500	16,397,960,641	5,905,172,939	1.98%	34.09%	16.24%	57.27%	34.09%	22,890,523,080
2	462077	BRR - Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dan Usaha			7,373,342,000			1,922,864,725			26.08%		26.08%	1,922,864,725
3	462128	BRR - Peternakan NAD			48,721,500,000			25,079,485,968			51.48%		51.48%	25,079,485,968
4	462134	BRR -Perkebunan NAD			68,648,000,000			37,546,209,820			54.69%		54.69%	37,546,209,820
5	462140	BRR - Kehutanan NAD			36,265,443,000			16,361,124,380			45.11%		45.11%	16,361,124,380
6	462159	BRR - Pesisir Dan Pengembangan Lingkungan Hidup NAD			43,231,358,000			28,381,461,200			65.65%		65.65%	28,381,461,200
7	462165	BRR Perdagangan.Pariwisata Dan Investasi			37,256,800,000			12,411,643,373			33.31%		33.31%	12,411,643,373
8	462171	BRR - Industri Dan Pertambangan			40,534,000,000			23,715,209,233			58.51%		58.51%	23,715,209,233
9	462180	BRR - Life Skill			14,000,000,000			11,044,679,501			78.89%		78.89%	11,044,679,501
10	464615	BRR - Industri Kecil Dan Menengah NAD	13,385,500,000	13,110,437,000		275,062,000	9,650,217,053		4.15%	73.61%		74.15%	73.61%	9,925,279,053
11	464621	BRR - Koperasi Dan Usaha Kecil NAD	85,592,000,000	83,830,536,000	71,753,000,000	1,761,464,242	80,334,890,430	38,514,947,551	2.06%	76.39%	53.68%	95.92%	76.39%	120,611,302,223
12	464630	BRR - Tenaga Kerja NAD	34,510,235,000	32,786,692,000	28,044,520,000	1,723,542,925	10,672,782,430	15,424,355,047	4.99%	32.55%	55.00%	42.90%	42.90%	27,820,680,402
13	464646	BRR - Ketersediaan Dan Distribusi Pangan NAD	30,985,000,000	30,613,668,000		371,331,047	10,513,842,802		1.20%	34.34%		34.34%	34.34%	10,885,173,849
14	464652	BRR - Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan NAD	225,470,680,000	215,183,899,000	285,133,001,000	10,286,780,767	171,612,882,051	56,603,139,641	4.56%	79.75%	19.85%	80.68%	45.61%	238,502,802,459
15	464661	BRR- Produksi Tanaman Pangan NAD	126,500,200,000	116,874,905,000	125,441,500,000	9,625,293,418	74,102,434,814	47,252,863,910	7.61%	50.08%	37.67%	66.19%	50.08%	130,980,592,142
			546,104,000,000	*521,473,132,000*	*842,757,954,000*	*24,630,863,899*	*373,285,010,221*	*320,163,157,288*	4.51%	71.58%	37.99%	72.86%	50.83%	718,079,031,408

BIDANG AGAMA. SOSIAL DAN KEBUDAYAAN														
No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSENTASE REALISASI					OTAL REALISAS
			DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA-L 2006	DIPA 2005 (Rp)	DIPA-L (Rp)	DIPA 2006 (Rp)	DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	DIPA 2005&L	DIPA 2006&L	
1	462262	BRR - Agama. Sosial Dan Budaya Nias			39,114,726,000			21,527,619,102			55.04%		55.04%	21,527,619,102
2	464414	BRR - Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial NAD	45,603,700,000	45,357,990,000	86,759,660,000	245,709,600	34,478,466,275	52,096,934,343	0.54%	76.01%	60.05%	76.14%	65.53%	86,821,110,218
3	464420	BRR - Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Nias	5,454,300,000	5,109,060,000		345,239,884	4,391,850,852		6.33%	85.96%		86.85%	85.96%	4,737,090,736
4	464439	BRR - Revitalisasi Dan Pengembangan Kebudayaan NAD	40,891,350,000	40,256,496,000	43,657,700,000	634,854,435	15,253,400,058	12,257,756,497	1.55%	37.89%	28.08%	38.85%	32.78%	28,146,010,990
5	464445	BRR - Revitalisasi Dan Pengembangan Kebudayaan Nias	5,153,650,000	4,840,670,000		312,980,000	4,441,130,689		6.07%	91.75%		92.25%	91.75%	4,754,110,689
6	464451	BRR - Pemulihan Dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Dan Perempuan NAD-Nias	32,600,000,000	32,144,527,000	42,157,850,000	455,472,199	4,841,501,822	10,452,605,720	**16.25%**	15.06%	20.58%	20.58%	20.58%	15,749,579,741
7	464460	BRR - Pembinaan Keluarga Berencana NAD Dan Nias	25,000,000,000	22,958,274,000	22,216,024,000	2,041,726,500	19,485,066,868	14,515,364,074	8.17%	84.87%	65.34%	86.11%	75.26%	36,042,157,442
8	464476	BRR - Pembinaan Pemuda Dan Olah Raga Dan Pengembangan Badan Pusat Statistik NAD	14,040,000,000	13,597,981,000	19,589,421,000	442,019,425	8,202,407,563	10,856,904,959	**1.57%**	57.43%	57.43%	61.57%	57.43%	19,501,331,947
9	464482	BRR - Pendataan Kependudukan NAD	10,499,999,000	10,499,999,000		0	0		0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0
10	464491	BRR - Pendataan Kependudukan Nias	3,500,001,000	3,500,001,000		0	0		0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0
11	464692	BRR - Pemulihan Dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan NAD	88,066,000,000	85,009,607,000	87,700,000,000	3,056,393,140	48,914,094,985	47,488,716,154	3.47%	543.47%	55.82%	59.01%	55.82%	99,459,204,279
		Jumlah per Bidang	*270,809,000,000*	*263,274,605,000*	*341,195,381,000*	*7,534,395,183*	*140,007,919,112*	*169,195,900,849*	2.78%	53.18%	49.59%	54.48%	51.15%	316,738,215,144

BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN														
No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSENTASE REALISASI					TOTAL REALISASI
			DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA-L 2006	DIPA 2005 (Rp)	DIPA-L (Rp)	DIPA 2006 (Rp)	DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	DIPA 2005&L	DIPA 2006&L	
1	437323	BRR-Dinas Kesehatan NAD-ETESP			19,657,190,000			953,087,190			4.85%		4.85%	953,087,190
2	437880	BRR-Dinas Kesehatan SUMUT-ETESP			7,986,480,000			283,950,000			3.56%		3.56%	283,950,000
3	439598	BRR - Program Pendidikan Dan Pengembangan Keterampilan ADB			87,119,977,000			6,254,982,193			7.18%		7.18%	6,254,982,193
4	446490	BRR - Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan NAD-Nias (Grant-KFW)			70,000,000,000			0			0.00%		0.00%	0
5	445594	BRR - Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan NAD-Nias (Grant-KFW)			91,500,000,000			0			0.00%		0.00%	0
6	462083	BRR -Perguruan Tinggi NAD			38,314,501,000			18,254,020,231			47.64%		47.64%	18,254,020,231
7	462092	BRR - Wajib Belajar NAD			90,073,377,000			31,557,865,382			35.04%		35.04%	31,557,865,382
8	462103	BRR - Pendidikan Menengah NAD			137,326,137,000			40,862,460,071			29.76%		29.76%	40,862,460,071
9	462112	BRR - Pendidikan Di Depag NAD			102,525,442,000			27,546,583,901			26.87%		26.87%	27,546,583,901
10	462247	BRR - Pendidikan Dan Kesehatan Nias			85,710,330,000			31,464,702,192			36.71%		36.71%	31,464,702,192
11	462253	BRR - Pendidikan Kesehatan Nias Selatan			24,565,965,000			5,472,420,125			22.28%		22.28%	5,472,420,125
12	464275	BRR - Peningkatan Pelayanan Kesehatan NAD	326,235,500,000	189,174,786,000	323,775,423,000	137,060,714,400	92,072,525,229	80,081,983,106	42.01%	48.67%	24.73%	70.24%	33.56%	309,215,222,735
13	464281	BRR - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Nias	23,764,500,000	23,047,216,000		717,284,000	12,540,626,658		3.02%	54.41%		55.79%	54.41%	13,257,910,658
14	464542	BRR - Pelayanan Pendidikan NAD	110,000,000,000	103,516,156,000		6,483,844,600	11,211,775,240		5.89%	10.83%		10.83%	10.83%	17,695,619,840
15	464558	BRR - Pelayanan Pendidikan Nias	20,000,000,000	19,741,500,000		258,500,000	10,211,637,100		1.29%	51.73%		51.73%	51.73%	10,470,137,100
		Jumlah per Bidang	*480,000,000,000*	*335,479,658,000*	*1,078,554,822,000*	*144,520,343,000*	*126,036,564,227*	*242,732,054,391*	30.11%	37.57%	22.51%	56.37%	26.08%	513,288,961,618

SEKRETARIAT. PERWAKILAN NIAS. KEUANGAN. KOMINFO														
No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSENTASE REALISASI					TOTAL REALISASI
			DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA-L 2006	DIPA 2005 (Rp)	DIPA-L (Rp)	DIPA 2006 (Rp)	DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	DIPA 2005&L	DIPA 2006&L	
1	464862	BRR - Sekretariat. Keuangan. Komunikasi Dan Informasi	185,528,500,000	137,757,475,000	373,187,438,000	47,771,023,588	106,635,443,791	157,374,536,248	25.75%	77.41%	42.17%	83.23%	51.67%	311,781,003,627
2	464878	BRR - Perwakilan Nias	5,000,000,000	3,310,747,000	17,114,600,000	1,689,252,461	2,319,911,620	5,027,315,766	33.79%	80.18%	29.37%	80.18%	35.97%	9,036,479,847
		Jumlah per Bidang	*190,528,500,000*	*141,068,222,000*	*390,302,038,000*	*49,460,276,049*	*108,955,355,411*	*162,401,852,014*	25.96%	77.24%	41.61%	83.15%	51.07%	320,817,483,474

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSENTASE REALISASI					TOTAL REALISASI
			DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA-L 2006	DIPA 2005 (Rp)	DIPA-L (Rp)	DIPA 2006 (Rp)	DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	DIPA 2005&L	DIPA 2006&L	
		Jumlah Keseluruhan	3,966,952,500,000	3,552,289,724,000	10,522,978,230,000	414,662,762,597	2,077,708,529,458	2,899,403,545,862	10.45%	58.49%	27.50%	62.83%	35.36%	5,391,774,837,917

No	KODE SATKER	NAMA SATKER	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			PERSENTASE REALISASI					TOTAL REALISASI
			DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	DIPA 2005 (Rp)	DIPA-L (Rp)	DIPA 2006 (Rp)	DIPA 2005	DIPA-L 2006	DIPA 2006	DIPA 2005&L	DIPA 2006&L	
		Jumlah Keseluruhan	3,966,952,500,000	3,552,289,724,000	10,522,978,230,000	414,662,762,597	2,077,708,529,458	2,899,403,545,862	10.45%	58.49%	27.55%	62.83%	35.36%	5,391,774,837,917

PAGU DIPA-L 2006 + DIPA 2006	14,075,267,954,000	
Realisasi DIPA 2005 + Realisasi DIPA-L 2006	2,492,371,292,055	62.83%
Realisasi DIPA-L 2006 + Realisasi DIPA 2006	4,977,112,075,320	35.36%

Keterangan:

Realisasi DIPA 2005	/ Pagu DIPA 2005
Realisasi DIPA-L 2006	/ Pagu DIPA-L 2006
Realisasi DIPA 2006	/ Pagu DIPA 2006
Realisasi DIPA2005 + Realisasi DIPA-L 2006	/ Pagu DIPA-L 2006 + Realisasi DIPA2005
Realisasi DIPA2006 + Realisasi DIPA-L 2006	/ Pagu DIPA 2006+ Pagu DIPA-L
Realisasi DIPA2005 + Realisasi DIPA-L 2006 + Realisasi DIPA 2006	

RESUME JUMLAH SATKER TAHUN ANGGARAN 2006	
SATKER DIPA 2005 & DIPA LUNCURAN	101
SATKER BARU	54
SATKER BERHENTI	2
SATKER KESELURUHAN DI T.A. 2006	153
SATKER DIPA 2006	121

% Realisasi DIPA 2006
per 24 Nopember 2006

= 27,55%

dari pagru 10,52 Trilyun

LAMPIRAN IV

Laporan Prosiding Lokakarya Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias : Membangun Sinergi Menuju Pemulihan Berkelanjutan

PROSIDING

LOKAKARYA

PERKEMBANGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS: MEMBANGUN SINERGI MENUJU PEMULIHAN BERKELANJUTAN

TIM KOORDINASI
PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN NIAS PROPINSI SUMATERA UTARA
(P3RIRRWANS)

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2006

KATA PENGANTAR

Mengkaji perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang telah berjalan hampir dua tahun, yang tentunya tidak luput dari berbagai permasalahan, baik yang bersifat administratif maupun substantif. Untuk itu para pemangku-kepentingan *(stakeholders)* telah memberikan berbagai masukan dan saran terhadap upaya percepatan pelaksanaan kegiatan BRR.

Sesuai Perpu No. 2 Tahun 2005 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 2005, BRR diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan pemulihan di wilayah pasca bencana tsunami tersebut pada berbagai sektor kehidupan. BRR dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, juga diamanatkan untuk melakukan koordinasi dengan para *stakeholder* lainnya, seperti kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, lembaga/negara donor, LSM, korporasi dan masyarakat.

Sedangkan Bappenas sesuai Perpres No. 30 tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias, ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk dalam bidang-bidang pemulihan infrastruktur, tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup; pemulihan sosial budaya; pemulihan perekonomian; dan pemulihan kelembagaan; serta pemulihan keamanan dan ketertiban (reintegrasi mantan anggota GAM).

Bappenas juga telah mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi tentang rencana induk kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk BRR. Upaya tersebut juga disampaikan melalui konsultasi publik dalam rangka penjabaran rencana induk ke dalam rencana-rencana aksi yang lebih operasional dan mendesak untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tahun anggaran 2005 dan 2006, sekaligus dalam perencanaan tahun anggaran 2007.

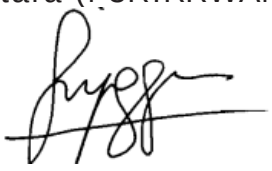
Dalam rangka mengawal proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, serta mendorong percepatan pemulihan yang telah ditargetkan dalam rencana induk, Bappenas telah menyusun perangkat pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk yang antara lain ditujukan untuk: pertama, memperoleh umpan balik dalam rangka memberikan dukungan bagi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; kedua, memastikan bahwa pokok-pokok kebijakan strategis telah dilaksanakan secara konsisten; dan ketiga, untuk memudahkan BAPPENAS dan BRR dalam menilai dan mengkoreksi dampak program rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pemulihan kehidupan masyarakat NAD dan Nias Sumatera Utara secara bertahap.

Selanjutnya, kegiatan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias tersebut, oleh Bappenas dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk NAD dan Nias Sumatera Utara (P3RIRRWANS), dengan memfokuskan pada 4 (empat) aspek utama, seperti: (1) konsistensi, dengan memperbandingkan antar dokumen perencanaan pembangunan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi; (2) koordinasi, dalam upaya membangun komunikasi dan hubungan antar berbagai lembaga pelaksana pembangunan; (3) konsultasi, sebagai proses partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, dan (4) kapasitas, kemampuan kelembagaan maupun SDM dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kegiatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan P3RIRRWANS pada tahun 2005-2006 tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang telah dipaparkan dan dikonsultasikan kepada seluruh *stakeholders* pemerintah daerah kabupaten/kota, BRR dan lembaga/negara donor yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui kegiatan "Lokakarya Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – Nias: Membangun Sinergi Menuju Pemulihan Berkelanjutan" yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2006 di Banda Aceh. Proses dan hasil lokakarya tersebut dirangkum dalam prosiding ini dengan harapan dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk lokakarya berikut pada tingkat kementerian/lembaga yang direncanakan pada medio Januari 2007.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada para pembicara, pembahas dan peserta "Lokakarya Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – Nias: Membangun Sinergi Menuju Pemulihan Berkelanjutan"atas peranserta dan sumbang saran pemikiran.

Jakarta, 03 Januari 2007
Direktur Kewilayahan II
selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi
Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk
NAD dan Nias Sumatera Utara (P3RIRRWANS)



DR. Suprayoga Hadi, MSP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

BAB II KERANGKA ACUAN II-1
2.1 LATAR BELAKANG II-1
2.2 TUJUAN II-3
2.3 MANFAAT II-3
2.4 PESERTA II-3
2.5 WAKTU DAN TEMPAT II-8
2.6 SUSUNAN ACARA LOKAKARYA II-9
2.7 PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN II-11
2.8 PEMBIAYAAN II-11

BAB III RINGKASAN HASIL PELAKSANAAN III-1
3.1 RESUME PEMBICARA DAN PEMBAHAS, SERTA HASIL DISKUSI PANEL III-1
3.2 RESUME PEMBICARA DAN PEMBAHAS, SERTA HASIL DISKUSI KELOMPOK BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP III-14
3.3 RESUME PEMBICARA DAN PEMBAHAS, SERTA HASIL DISKUSI KELOMPOK BIDANG PEMULIHAN SOSIAL BUDAYA III-27
3.4 RESUME PEMBICARA DAN PEMBAHAS, SERTA HASIL DISKUSI KELOMPOK BIDANG PEMULIHAN PEREKONOMIAN III-32
3.5 RESUME PEMBICARA DAN PEMBAHAS, SERTA HASIL DISKUSI KELOMPOK BIDANG PEMULIHAN KELEMBAGAAN DAN REINTEGRASI MANTAN GAM III-43
3.6 RUMUSAN KESEPAKATAN LOKAKARYA III-57

PENUTUP iv

I PENDAHULUAN

Lokakarya Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias: *Membangun Sinergi Menuju Pemulihan Berkelanjutan* yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2006 di Banda Aceh, merupakan bagian dari kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (P3RIRRWANS) yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi P3RIRRWANS, Bappenas.

Lokakarya ini dimaksudkan sebagai tinjauan dan evaluasi secara umum terhadap proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk peningkatan koordinasi dan kerjasama antar *stakeholders* dalam mendorong percepatan proses pemulihan di wilayah pasca bencana NAD dan Kepulauan Nias. Hal yang ingin dicapai dari pelaksanaan lokakarya ini adalah tercapainya kesepakatan bersama yang bisa didayagunakan oleh berbagai pelaku kepentingan terkait, dalam mengupayakan percepatan proses pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Lokakarya diawali dengan paparan oleh pembicara kunci yaitu Direktur Kewilayahan II Bappenas, selaku Ketua Tim Pelaksana Tim Koordinasi P3RIRRWANS. Direktur Kewilayahan II Bappenas memaparkan hasil analisa dan evaluasi fokus pada 4 (empat) aspek utama yang dijadikan instrumen pemantauan dan pengendalian, yaitu aspek – aspek: (i) konsistensi, (ii) koordinasi, (iii) konsultasi dan (iv) kapasitas pada tiap bidang pemulihan Rencana Induk yang terdiri dari: (1) Infrastruktur, tata ruang dan pertanahan, lingkungan hidup; (2) Sosial budaya; (3) Perekonomian; (4) Kelembagaan; dan (5) Reintegrasi mantan GAM.

Setelah pemaparan oleh pembicara kunci, diskusi dilanjutkan dengan paparan dari Kedeputian Kelembagaan dan Pengembangan SDM oleh Bapak Iqbal Farabi, Direktur Dukungan Kelembagaan Yudikatif Badan Pelaksana BRR. Dalam paparan tersebut disampaikan mengenai kinerja pengembangan kelembagaan untuk TA 2005-2006. Setelah itu, dilanjutkan paparan oleh Bapak Syaifudin Ishaq, Ketua Pelaksana Harian Sekretariat Dewan Pengarah BRR Perwakilan Banda Aceh yang menanggapi paparan Laporan Hasil Pemantauan dan Pengendalian Rencana Induk NAD-Nias. Diskusi yang dipandu oleh Marsda TNI (Purn) Suyitno selaku Ketua Pelaksana Harian Sekretariat Dewan Pengarah BRR ini diharapkan dapat menghasilkan masukan bagi penyempurnaan penyusunan Laporan P3RIRRWANS TA 2005-2006.

Agar tiap bidang pemulihan dalam Rencana Induk tercakup dalam diskusi ini, maka diskusi terbatas selanjutnya dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok, yakni: (1) Infrastruktur, Tata ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup yang dipandu oleh Bapak Nugroho Tri Utomo, selaku Kasubdit Air Bersih, Dit. Permukiman

dan Perumahan, Bappenas; (2) Sosial Budaya yang dipandu oleh Dr. Ir. Subandi, Direktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah raga; (3) Perekonomian yang dipandu oleh Dra. Rahma Iryanti, MT, Direktur Ketenagakerjaan dan Pengembangan Kesempatan Kerja; dan (4) Kelembagaan dan Reintegrasi Mantan GAM yang dipandu oleh Ir. Deddy Koespramoedyo, MSc, Direktur Otonomi Daerah dan Rd. Siliwanti, MPIA, Direktur Politik dan Komunikasi. Dikarenakan ruang diskusi yang terbatas, maka bidang pemulihan kelembagaan digabung dengan reintegrasi mantan GAM.

Di setiap diskusi bidang pemulihan diadakan forum tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta diskusi. Ringkasan hasil pelaksanaan diskusi terfokus beserta rumusan kesepakatannya dapat dilihat pada Bab 3.

II KERANGKA ACUAN

2.1 LATAR BELAKANG

Sudah hampir dua tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias. Akibat bencana tersebut telah meluluhlantakkan berbagai sendi kehidupan masyarakat dan wilayah bencana tersebut. Skala kerusakan dan kerugian yang dialami sangat besar dan luas yang menyebabkan rusaknya berbagai infrastruktur, lumpuhnya kehidupan sosial, terganggunya roda perekonomian masyarakat dan tidak berfungsinya rantai pemerintahan. Dalam rangka pemulihan pasca bencana tersebut, Pemerintah telah mengambil berbagai langkah tindak lanjut dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditujukan untuk wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan oleh beragam pelaksana baik oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Donor, LSM , korporasi dan masyarakat luas.

Namun demikian, berbagai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi di dalam pelaksanaannya, baik yang bersifat administratif maupun substantif. Dalam rangka mengawal proses pelaksanaaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, serta mendorong percepatan pemulihan yang telah ditargetkan, berbagai stakeholders memberikan berbagai masukan dan saran terhadap upaya percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui mekanisme pemantuan dan pengendalian pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sesuai Perpu No. 2 Tahun 2005 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 2005, BRR melalui Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara telah diberi mandat dan wewenang untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Institusi ini dibentuk dan didirikan dalam rangka melakukan pemulihan di wilayah bencana dari berbagai sektor kehidupan di wilayah bencana tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Badan Pelaksana selain melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan mandatnya, juga melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi lainnya, seperti kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, donor/LSM, korporasi dan masyarakat.

Di lain pihak, Bappenas sesuai amanat Perpres No. 30 tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias,

ditugaskan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk dimaksud, yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang-bidang: pemulihan infrastruktur, tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup; pemulihan sosial budaya; pemulihan perekonomian; dan pemulihan kelembagaan; serta pemulihan keamanan dan ketertiban (reintegrasi mantan GAM). Selain itu, peran Bappenas tersebut juga sesuai dengan amanah UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana Bappenas ditugaskan untuk menyusun evaluasi rencana pembangunan yang dilaksanakan baik oleh BRR, Pemerintah Daerah, kementerian/lembaga dan donor/LSM, yang selanjutnya akan dijadikan bahan referensi utama bagi penyusunan rencana bagi periode berikutnya.

Dalam rangka itu, telah dilakukan berbagai upaya untuk menyebarluaskan informasi tentang rencana induk kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta komunitas lembaga dan negara donor, agar semua pihak dapat memahami dan menindaklanjuti berbagai upaya yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias sejalan dengan rencana induk yang telah disepakati. Upaya sosialisasi rencana induk tersebut telah dibarengi juga dengan konsultasi publik dalam rangka penjabaran rencana induk tersebut ke dalam rencana-rencana aksi yang lebih operasional dan mendesak untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tahun anggaran 2005 dan 2006, sekaligus dalam perencanaan tahun anggaran 2007.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengendalian yang telah diamanatkan Perpres 30/2005 kepada Kementerian PPN/Bappenas, telah dihasilkan perangkat pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk yang antara lain ditujukan untuk: (a) memperoleh umpan balik dalam rangka memberikan dukungan bagi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; (b) memastikan bahwa pokok-pokok kebijakan strategis telah dilaksanakan secara konsisten; dan (c) memudahkan BAPPENAS dan BRR dalam menilai dan mengoreksi dampak program rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap pemulihan kehidupan masyarakat NAD dan Nias Sumatera Utara secara bertahap.

Dalam melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias tersebut, Bappenas melalui Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk NAD dan Nias Sumatera Utara (P3RIRRWANS) telah memfokuskan pada 4 (empat) aspek utama yang dijadikan instrumen pemantauan dan pengendalian, yaitu aspek-aspek: (i) konsistensi, (ii) koordinasi, (iii) konsultasi, dan (iv) kapasitas, yang digunakan untuk memotret perbandingan antar dokumen perencanaan pembangunan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, upaya membangun komunikasi dan hubungan antar berbagai lembaga pelaksana pembangunan, proses partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, serta kemampuan baik kelembagaan maupun SDM dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hasil-hasil laporan kegiatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada tahun 2005-2006 tersebut akan dipaparkan dan dikonsultasikan lebih lanjut kepada seluruh stakeholders yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui kegiatan "Lokakarya Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD –Nias: Membangun Sinergi Menuju Pemulihan Berkelanjutan". Hasil dari kegiatan lokakarya ini diharapkan akan dapat dicapai kesepakatan bersama yang bisa didayagunakan oleh berbagai pelaku kepentingan terkait, dalam mengupayakan percepatan proses pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

2.2 TUJUAN

Melakukan tinjauan dan evaluasi secara umum terhadap proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk peningkatan koordinasi dan kerjasama antar stakeholders dalam mendorong percepatan proses pemulihan di wilayah bencana NAD dan Kepulauan Nias.

2.3 MANFAAT

1. Untuk pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya Badan Pelaksana BRR, komunitas donor, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah, dalam mendorong percepatan pemulihan wilayah bencana melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Bagi Pemerintah Daerah, keikutsertaan secara aktif Pemerintah Daerah dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka untuk mendukung keberlanjutan pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat di daerah pasca bencana.
3. Bagi masyarakat, untuk meningkatkan keterlibatan, keikutsertaan, dan kepemilikan terhadap hasil–hasil pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Bagi Pemerintah Pusat, untuk meningkatkan koordinasi tahapan pembangunan secara menyeluruh dan bekelanjutan, termasuk sinkronisasi kebijakan serta Rencana Tindak Lanjutnya.

2.4 PESERTA

Bappenas :

1. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Ketua Tim Pengarah P3RIRRWANS
2. Staf Ahli MPPN Bidang Regional dan SDA, Wakil Ketua Tim Pengarah P3RIRRWANS

3. Direktur Kewilayahan II, Ketua Tim Pelaksana P3RIRRWANS
4. Direktur Permukiman dan Perumahan, Ketua Pokja Pemulihan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
5. Direktur Kesehatan Gizi dan Masyarakat, Ketua Pokja Pemulihan Bidang Sosial Budaya
6. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Ketua Pokja Pemulihan Bidang Ekonomi
7. Direktur Otonomi Daerah, Ketua Pokja Pemulihan Bidang Kelembagaan
8. Direktur Politik dan Komunikasi, Ketua Pokja Pemulihan Bidang Reintegrasi Masyarakat Aceh

Sekretariat P3RIRRWANS :

9. Ketua Sekretariat P3RIRRWANS
10. Wakil Ketua II Sekretariat P3RIRRWANS
11. Sekretaris Sekretariat P3RIRRWANS
12. Wakil Sekretaris Sekretariat P3RIRRWANS
13. Ketua Bidang Basis Data dan Informasi P3RIRRWANS
14. Ketua Bidang Pemantauan dan Pengendalian Pendanaan P3RIRRWANS
15. Ketua Bidang Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan P3RIRRWANS
16. Ketua Bidang Reintegrasi Mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) P3RIRRWANS
17. Ketua Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat P3RIRRWANS
18. Tim Teknis Sekretariat P3RIRRWANS
19. Tim Teknis Pokja P3RIRRWANS

Bappeda Provinsi :

20. Kepala Bappeda Provinsi NAD
21. Kepala Bappeda Provinsi Sumut

Bappeda Kabupaten/Kota :

22. Kepala Bappeda Kota Banda Aceh
23. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Besar
24. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat
25. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Jaya
26. Kepala Bappeda Kabupaten Nagan Raya
27. Kepala Bappeda Kabupaten Bireun
28. Kepala Bappeda Kabupaten Pidie

29. Kepala Bappeda Kabupaten Lhokseumawe
30. Kepala Bappeda Kabupaten Sabang
31. Kepala Bappeda Kabupaten Simeuleu
32. Kepala Bappeda Kabupaten Singkil
33. Kepala Bappeda Kabupaten Gayo Luwes
34. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Selatan
35. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara
36. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang
37. Kepala Bappeda Kota Langsa
38. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Timur
39. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Utara
40. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya
41. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah
42. Kepala Bappeda Kabupaten Bener Meriah
43. Kepala Bappeda Kabupaten Nias
44. Kepala Bappeda Kabupaten Nias Selatan
45. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

Dinas :

46. Kepala Dinas Kesehatan NAD
47. Kepala Dinas Pariwisata NAD
48. Kepala Dinas Sumber Daya Air NAD
49. Kepala Dinas Prasarana Wilayah NAD
50. Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman NAD
51. Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah NAD
52. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi NAD
53. Kepala Dinas Pendidikan NAD
54. Kepala Dinas Kehutanan NAD
55. Kepala Dinas Pertambangan NAD
56. Kepala Dinas Peternakan NAD
57. Kepala Dinas Perkebunan NAD
58. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura NAD
59. Kepala Dinas Perindustrian NAD
60. Kepala Dinas Perdagangan NAD
61. Kepala Dinas Perhubungan NAD

62. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga NAD
63. Kepala Dinas Tenaga Kerja NAD
64. Kepala Dinas Syariat Islam NAD
65. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NAD
66. Kepala Dinas Tata Ruang NAD
67. Kepala Dinas Sosial NAD
68. Kepala Dinas Mobilitas Penduduk

BRR NAD –Nias :

1. Dewan Pengarah
    69. Sekretariat Dewan Pengarah BRR NAD –Nias

2. Dewan Pengawas
    70. Tenaga Ahli Sekretariat Dewan Pengawas BRR NAD –Nias

3. Badan Pelaksana
    71. Sekretaris Badan Pelaksana BRR NAD –Nias
    72. Deputi Bidang Pengawasan BRR NAD –Nias
    73. Deputi Bidang Keuangan dan Perencanaan BRR NAD –Nias
    74. Deputi Bidang Agama, Sosial & Budaya
    75. Deputi Bidang Ekonomi dan Usaha BRR NAD –Nias
    76. Deputi Bidang Perumahan dan Permukiman BRR NAD –Nias
    77. Deputi Bidang Pendidikan, Kesehatan & Peran Perempuan BRR NAD –Nias
    78. Deputi Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD –Nias
    79. Deputi Kelembagaan dan Pengembangan SDM BRR NAD –Nias
    80. Deputi Bidang Kepala Operasi
    81. Kepala Perwakilan BRR Regional I
    82. Kepala Perwakilan BRR Regional II
    83. Kepala Perwakilan BRR Regional III
    84. Kepala Perwakilan BRR Regional IV
    85. Kepala Perwakilan BRR Regional V
    86. Kepala Perwakilan BRR Regional VI

Perwakilan Donor :

87. World Bank
88. USAID
89. AusAid
90. UNDP
91. JBIC
92. ADB
93. JICA

Perwakilan NGO :

94. UN Habitat
95. Save the Children
96. Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah
97. Oxfam
98. Turky Red Cresent
99. PMI

Perwakilan Perguruan Tinggi :

100. Rektor Unsyiah
101. Rektor IAIN Ar-Raniry

Tokoh Masyarakat :

102. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama

Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) :

103. Kepala Harian Badan Pelaksana Badan Reintegrasi Damai Aceh

2.5 WAKTU DAN TEMPAT

Workshop akan diselenggarakan di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa / 19 Desember 2006
Waktu	:	09.00 – 16.00 WIB
Tempat	:	Aceh Community Center
Agenda	:	1. Paparan, Pembahasan dan Diskusi serta Pembahasan Umum 2. Diskusi Kelompok 5 Bidang Pemulihan (Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan & LH; Sosial Budaya; Perekonomian; Kelembagaan dan Reintegrasi Mantan GAM) 3. Perumusan dan Rekomendasi Lokakarya

2.6 SUSUNAN ACARA LOKAKARYA

No	Waktu	Materi	Pembicara/ Pembahas	Moderator	Notulen	Penanggung jawab	Tempat
1.	09.00 – 09.30	Registrasi Peserta				Protokoler	Lobby
PANEL PEMBUKAAN LOKAKARYA							
2.	09.30 – 10.00	Opening Ceremony			Dea Paramita	Protokoler	Conference Room
		Pembukaan	MC				
		Pembacaan ayat suci Al Qur'an	Qori & saritilawah				
		Sambutan Bappenas	Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas, selaku Ketua Tim Pengarah P3RIRRWANS				
		Sambutan Bapel BRR NAD –Nias	Kepala Bapel BRR NAD –Nias				
		Sambutan dan Pembukaan oleh PEMDA Prov. NAD	Gubernur Provinsi NAD				
PANEL DISKUSI PEMBAHASAN LAPORAN P3RIRRWANS							
3.	10.00 – 10.30	Presentasi Laporan Hasil Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD –Nias, dalam rangka Membangun Sinergi Menuju Pemulihan Berkelanjutan	Direktur Kewilayahan II Bappenas	Kepala Pelaksana Harian Sekretariat Dewan Pengarah BRR NAD-Nias	Khairullah & Yuliawati	Hayu Parasati dan Hermani Wahab	Conference Room
4.	10.30 – 12.00	Pembahasan Laporan Hasil Pemantauan dan Pengendalian Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD –Nias	Badan Pelaksana BRR Bappeda Prov. NAD Setwanrah Banda Aceh	-sda-	Khairullah & Yuliawati	Hayu Parasati dan Hermani Wahab	Conference Room
5.	12.00 – 13.00	Istirahat, Makan Siang				Protokoler	

No	Waktu	Materi	Pembicara/ Pembahas	Moderator	Notulen	Penanggung jawab	Tempat
DISKUSI KELOMPOK/PEMBAHASAN PER BIDANG PEMULIHAN P3RIRRWANS							
6	13.00 – 15.20	Diskusi & Pembahasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan & LH	Ketua Pokja Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan & LH	Bappeda Prov Bappeda Kab/Kota Deputi Infrastruktur Lingkungan dan Pemeliharaan Bapel BRR Deputi Perumahan dan Permukiman Bapel BRR NAD –Nias Deputi Bidang Operasi Bapel BRR NAD -Nias	Sani SSP	Uke M. Hussein	Conference Room
7		Diskusi& Pembahasan Bidang Sosial Budaya	Ketua Pokja Bidang Pemulihan Sosial Budaya	Bappeda Prov Bappeda Kab/Kota Deputi Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan Bapel BRR Deputi Agama Sosial dan Budaya Bapel BRR NAD -Nias	Isnadiati	Mumtaz Soraya	
8		Diskusi & Pembahasan Bidang Perekonomian	Ketua Pokja Bidang Pemulihan Perekonomian	Bappeda Prov Bappeda Kab/Kota Deputi Ekonomi dan Usaha Bapel BRR	Citra SMS	Hemani Wahab	
9		Diskusi & Pembahasan Bidang Kelembagaan	Ketua Pokja Bidang Pemulihan Kelembagaan	Bappeda Prov Bappeda Kab/Kota Deputi Kelembagaan dan SDM Bapel BRR	Amanda Petty S	Antonius Tarigan	
10		Diskusi& Pembahasan Bidang Reintegrasi Mantan GAM	Ketua Pokja Bidang Reintegrasi Mantan GAM	Kepala Bapel BRA Bappeda Prov NAD Deputi Kelembagaan dan SDM Bapel BRR	M. Syathiri	Otho H. Hadi	
11	15.20 – 15.40	Coffe Break, Sholat Ashar				Protokoler	Meeting Room
PANEL PENUTUPAN LOKAKARYA							
12	15.40 – 16.00	Penyampaian Hasil Kesepakatan dan Tindak Lanjut, serta Penutupan Lokakarya	Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas, selaku Ketua			Protokoler	Conference Room

2.7 PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Penanggungjawab	:	Suprayoga Hadi, selaku Ketua Tim Pelaksana Tim Koordinasi P3RIRRWANS
Koordinator Team	:	Hayu Parasati
Wakil Koordinator Team	:	Hermani Wahab
Koordinator Sekretariat Pelaksanaan	:	Rinela Tambunan
Koordinator Bid. Pemulihan Kelembagaan	:	Antonius Tarigan
Koordinator Bid. Pemulihan Perekonomian	:	Hermani Wahab
Koordinator Bid. Pemulihan Reintegrasi	:	Otho H. Hadi
Koordinator Bid. Pemulihan Infrastruktur	:	Uke M. Husein
Koordinator Bid. Pemulihan Sosial Budaya	:	Mumtaz Soraya
Anggota Sekretariat	:	Sylvia Krisnawati
		Vonny Yuliati
		Eka Maya Saphira
		Khairul M
		M. Khaidir
Protokoler	:	Vonny Yuliati
		Khairul Musrizal
MC	:	Dea Paramita K.S
Dokumentasi	:	M. Khaidir
Konsumsi	:	Eka Maya Saphira
Transportasi	:	Khairul Musrizal
Penanggungjawab Materi	:	Khairullah
		Dharmawan
Penggandaan Materi Lokakarya (Jakarta)	:	M Tohir
		Taufik Hidayat
(Banda Aceh)	:	M. Fauzi
		Sonoaji
Penanggungjawab Logistik	:	Iswanto
Penanggungjawab Ruangan	:	Khairul Musrizal
Penanggungjawab Desain Spanduk	:	Somantha Prakosa
Teknisi	:	M. Soleh
Team Perumus	:	Khairullah (Koordinator)
		Dharmawan
		Dea Paramita K.S
		Yuliawati
		Sani SSP
		Isnadiati
		Citra Sawita
		Amanda Petty Soraya
		M. Syathiri
Team Notulen	:	Khairullah
		Sani SSP
		Isnadiati
		Citra Sawita
		Amanda Petty Soraya
		M. Syathiri
		Yuliawati
Pembantu Umum	:	M. Fauzi
		Sonoaji

2.8 PEMBIAYAAN

Seluruh kegiatan lokakarya akan didanai melalui sumber anggaran DIPA Bappenas TA 2006 .

III RINGKASAN HASIL PELAKSANAAN

3.1 RESUME PEMBICARA DAN PEMBAHAS, SERTA HASIL DISKUSI PANEL

A. Paparan Perkembangan Rehabilitasi dan Rekontruksi NAD-Nias: *Membangun Sinergi Menuju Pemulihan Berkelanjutan oleh*
Suprayoga Hadi, Direktur Kewilayahan II Bappenas, selaku Ketua Tim Pelaksana Tim Koordinasi P3RIRRWANS

Bencana gempa dan tsunami pada akhir tahun 2004 yang terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, telah menghancurkan berbagai sendi kehidupan masyarakat baik secara sosial, infrastruktur, ekonomi, budaya, dan berbagai sektor kehidupan lainnya.

P3RIRRWANS dibentuk untuk merespons bencana nasional tersebut diatas.

TUJUAN P3RIRRWANS

1. Menilai sejauh mana Rencana Induk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana aksi atau rencana kerja yang dilaksanakan oleh pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, serta masukan untuk penyempurnaan rencana induk.
2. Memperoleh informasi mengenai :
   a. Implementasi Rencana Induk melalui pelaksanaan Rencana Aksi/ Rencana Kerja pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias.
   b. Kesesuaian kegiatan terhadap:
      - keluaran yang dihasilkan,
      - proses yang dilalui dalam rangka pelaksanaannya,
      - dampak atau pemanfaatan hasil keluaran
3. Masukan bagi perumusan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi dan penyesuaian program, dalam siklus perencanaan tahun berikutnya, termasuk dalam mendorong dan mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias.

SASARAN P3RIRRWANS

1. KONSISTENSI:
   a. Teridentifikasikannya konsistensi *Rencana Induk* Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias sesuai Perpres 30/2005 kedalam Rencana Aksi dan Rencana Kerja Bapel BRR, Pemda NAD-Nias,
   b. Sinkronisasi Rencana Aksi, Renja Bapel BRR, Renja K/L, Renja SKPD, dan program donor/LSM/Swasta; dan
   c. Teridentifikasikannya *kesesuaian* antara Rencana Aksi Pemda Kab/ Kota, Renja Bapel BRR dan K/L *dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilapangan.*
2. KOORDINASI: Terlaksananya *koordinasi* antar stakeholder pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat Pusat dan daerah.
3. KONSULTASI*: dilibatkannya masyarakat* dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta dimanfaatkannya hasil-hasil pembangunan oleh masyarakat kelompok sasaran pembangunan. Media konsultasi masyarakat secara langsung : sistem atau mekanisme yang dibangun, forum pertemuan yang diadakan, pola fasilitasi pendampingan yang dilakukan.
4. KAPASITAS: terberdayakannya *kapasitas pelaku pembangunan,* termasuk Pemda dalam mengkoordinasikan perencanaan masing-masing SKPD sesuai UU 25/2004, serta mengkoordinasikan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Sumut sebagai masukan bagi penyusunan Renja dan Renstra.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI : ANALISA FOKUS 4-K (Konsistensi, Koordinasi, Konsultasi, dan Kapasitas)

ASPEK KONSISTENSI

- *BRR dalam strategi dan pelaksanaan* rehabilitasi dan rekonstruksi telah berupaya mengacu kepada Rencana Induk, namun demikian sebagian program/kegiatan yang dilaksanakan banyak yang disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat lapangan.
- *RENSTRA yang disusun oleh Bapel BRR* seharusnya dapat menjadi dokumen pelengkap terhadap Rencana Induk dan diharapkan mampu menjabarkan secara lebih rinci Rencana Induk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di tingkat lapangan, namun saat ini dokumen RENSTRA masih bersifat makro dan belum menggambarkan perencanaan kegiatan per bidang secara rinci, serta masih kurang memberikan perhatian kepada persyaratan dasar rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya dengan belum mengacu pada RTRW, belum memperhatikan pengurangan resiko bencana dan penyelesaian masalah tanah.
- Dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang pada tahun 2005 juga dilakukan oleh *K/L*, pada umumnya mengacu dan konsisten dengan Rencana

Induk, khususnya di bidang pemulihan perekonomian, walaupun laporan pelaksanaannya masih sangat minim. Sedangkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh *Pemda,* hanya sebagian yang konsisten dengan Rencana Induk, khususnya di bidang perekonomian lebih terfokus pada bantuan modal non fisik.

- *Perbedaan antara rencana kebutuhan pendanaan dan realisasi* alokasi anggaran pada tahun 2005 dan 2006, alokasi pendanaan yang dituangkan dalam RKA Bapel BRR menunjukkan jumlah anggaran pada beberapa program kegiatan tertentu melebihi jumlah kebutuhan dalam Rencana Induk, serta belum diakomodasikannya kebutuhan rehabilitasi di 6 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang ada dalam Rencana Induk
- *Sebagian besar realisasi anggaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Donor* lebih kecil dibandingkan komitmen awal, khususnya komitmen donor di bidang infrastruktur, transportasi dan perumahan yang masih relatif rendah.

ASPEK KONSISTENSI

1. *Bidang pemulihan infrastruktur* : Konsistensi antar pelaksana donor dan satker BRR, belum dapat dijembatani. BRR lebih mendahulukan pembangunan fisik kepada donor sebelum kepada satker terkait, untuk mencegah tumpang tindih antara donor dengan pelaksana lainnya, walaupun masih terjadi potensi tumpang tindih kegiatan dan lokasi diantara donor sendiri.
2. *Bidang pemulihan sosial budaya* : Di sektor Kesehatan, terdapat kegiatan yang saling melengkapi antar pelaksanaan rehabilitasi sarana kesehatan di Banda Aceh, yaitu antara pelaksana Bapel BRR yang membantu perlengkapan laboratorium, Donor/NGO (GTZ dan AusAid) yang membiayai rehabiliasti gedung dan peningkatan SDM, serta Pemda yang melakukan rekruitmen SDM.
3. *Bidang pemulihan perekonomian* : Kegiatan antar pelaksana, yaitu Bapel BRR, Donor/NGO dan K/L, saling melengkapi di sektor perdagangan. BRR dan Donor di satu sisi memfokuskan bantuan pada pemberian modal, sementara K/L memfokuskan pada pembangunan fisik pasar dan sarana prasarananya.
4. *Bidang pemulihan reintegrasi mantan GAM* : Pelaksana pembangunan di bidang K3M antara Bapel BRR, K/L, Pemda dan Donor/NGO mempunyai fokus prioritas pembangunan masing-masing pelaksana yang berbeda, namun dapat saling melengkapi. Bapel BRR fokus pada pembangunan fisik, K/L dan pemda fokus pada pengembangan sosial dan politik, sedangkan Donor/NGO fokus pada bantuan teknis sistem pelaksanaan pembangunan.
5. *Bidang pemulihan kelembagaan* : Konsistensi antar pelaksana saling melengkapi, terutama di sektor peningkatan sarana dan prasarana kantor pemerintahan. Pemda menyediakan lokasi kantor, Donor /NGO memfokuskan pada pembangunan kantor kecamatan/ kelurahan/desa, sedangkan BRR membangun sebagian kantor kecamatan/kelurahan/desa, kantor/dinas/badan, pendopo, rumah dinas, dan lain sebagainya.

ASPEK KOORDINASI

- Koordinasi yang tertata dan sistematis antar pelaku kegiatan belum terlaksana baik, seperti belum terciptanya mekanisme koordinasi perencanaan antara BRR dengan Pemda dan Kementerian/ Lembaga, sehingga kerap menyebabkan tumpang tindih antar kegiatan, kurang terakomodasinya kebutuhan lokal, dan kekuatiran terhadap keberlanjutan pembangunan pasca BRR.
- Mekanisme koordinasi internal antara Bapel BRR dengan satker belum didukung dengan pembinaan kepada satker pelaksana, dan belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme koordinasi pengawasan secara internal oleh masing-masing satker pelaksana.
- Koordinasi Bapel BRR dengan Donor/NGO, masih relatif dilaksanakan searah melalui laporan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran oleh Donor/ NGO kepada Bapel BRR melalui Operation Center BRR dan dipublikasikan di RAN Database, sehingga belum memadai dalam mendukung perencanaan kegiatan maupun lokasi.
- Koordinasi dalam pemulihan bidang K3M antara Bapel BRR, K/L, Pemda, sudah berjalan dengan baik dengan dukungan proses komunikasi intensif serta keterlibatan satker di Pusat.
- Kurangnya koordinasi dalam arti tindak lanjut hasil klarifikasi temuan antara Dewan Pengarah/Dewan Pengawas BRR, termasuk antara satuan anti korupsi dengan Satker Pelaksana.
- Rintisan forum koordinasi perencanaan reguler dan sistematis antara Bapel BRR dengan Pemerintah Daerah, diharapkan dapat merupakan tahap awal strategi peralihan (exit strategy) khususnya bagi Bappeda, selaku penanggung jawab koordinasi perencanaan pemulihan pasca BRR dalam konteks pembangunan daerah secara berkelanjutan.

ASPEK KONSULTASI

A. Tingkat Partisipasi

1. *Perencanaan partisipatif* dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat desa (*village planning*), kurang optimal untuk bidang pemulihan lainnya, baik melalui penyusunan program, kegiatan dan anggaran, pelaksanaan serta pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. *Partisipasi masyarakat* lebih didorong oleh lembaga NGO berbasiskan masyarakat dengan fokus kepada pelatihan-pelatihan, khususnya di bidang perumahan.
3. *Peran lembaga agama, adat, dan sosial* masih relatif lemah dan belum mendapat perhatian. Kegiatan yang meliibatkan mukim dan kepala desa lebih dalam bentuk single event, bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.

B. Media Partisipasi

1. *Media partisipasi masyarakat baru dilakukan pada beberapa sektor tertentu* dan belum tertata dalam suatu sistem. Musyawarah di sektor

agama, pendidikan dan kebudayaan, Forum Bersama (FORBES) reintegrasi GAM sebagai media partisipasi masyarakat yang terkena dampak konflik, serta forum CEPP untuk lingkungan hidup.

2. Upaya Bapel BRR dalam pelibatan pelaku terkait dan Pemerintah Daerah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi melalui *Sekretariat Bersama (Sekber*) yang dirintis di wilayah Nias, dan terus dikembangkannya *forum CFAN (Coordination Forum for Aceh and Nias)* oleh donor dan LSM, serta Regionalisasi BRR sejak pertengahan 2006 sangat positif untuk dapat mendorong pelibatan masyarakat lokal lebih aktif.

C. Akses terhadap Informasi

Akses informasi tidak langsung yang disediakan BRR dan Donor untuk masyarakat melalui Internet dan Tabloid Seumangat, belum didukung dengan kualitas informasi yang disediakan secara reguler.

ASPEK KAPASITAS

BRR sendiri menggambarkan kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, yang tergantung dari kondisi lapangan, mekanisme dan prosedur, masalah peraturan perundangan, dan SDM aparatur pelaksana.

Mekanisme dan Prosedur

- Bapel BRR belum melaksanakan *sistem pelaporan* reguler dan tersistem, khususnya yang diketahui Pemda dan kementerian/ lembaga, baik pada perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- Laporan kegiatan dan realisasi anggaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dipublikasikan Bapel BRR, belum menggambarkan kegiatan rinci yang transparan sesuai kebutuhan masyarakat sebagai sasaran kegiatan, secara luas, termasuk laporan Donor/NGO yang dikelola dalam RAN Database.
- *Mekanisme koordinasi* antar unit dalam lingkup Bapel BRR sendiri belum tegas, terutama diakibatkan dengan restrukturisasi kelembagaan Bapel yang terjadi belakangan ini. Masih sangat kurangnya koordinasi dan komunikasi pengambil kebijakan antara pelaksana, yang diwujudkan melalui pembekalan teknis dari kebijakan dan program menuju kegiatan dan pengendalian dalam proses pelaksanaannya.
- *Mekanisme Bapel BRR pada satker terkait K3M*, yaitu pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan sudah berjalan lebih baik, dengan koordinasi langsung satker dengan Mabes TNI dan Mabes Polri. *Kapasitas kelembagaan BRA yang terkait Reintegrasi GAM* mudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah karena mekanisme kelembagaan seperti pelaporan, struktur organisasi, dan tata kerja, masih mengikuti standar birokrasi pemerintah daerah.

Sistem Pengawasan

· *Peran Satuan Pengawas Internal* telah dibentuk untuk melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan belum signifikan, ditambah belum adanya mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan secara berkesinambungan yang mencakup pengawasan kinerja maupun keuangan.

· *Keberadaan Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas BRR* belum diperankan dan ditindaklanjuti secara utuh. Rapat-rapat koordinasi tripartit internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti, khususnya terkait dengan (a) percepatan penyelesaian perundangan, (b) pengendalian dan pengawasan pelaksanaan, (c) maksimalisasi pelibatan masyarakat, dan (d) pelibatan Pemda untuk keberlanjutan pembangunan daerah.

· Belum adanya *sistem pengawasan langsung dari masyarakat* yang berkepentingan atau terpengaruh dampak langsung rehabilitasi dan rekonstruksi.

Regulasi dan Peraturan

- *Banyak permasalahan peraturan perundangan* yang belum terbit, dan kurang efektifnya koordinasi internal BRR serta Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatannya, menghambat proses percepatan pemulihan.
- *Kebijakan dan peraturan teknis pelaksanaan program* rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias belum sepenuhnya sesuai dan kurang dikomunikasikan secara intensif kepada satker BRR.

Sumber Daya Manusia

- *Kinerja Satker* terkendala oleh keterbatasan jumlah pegawai Satker, serta kualitas ragam latar belakang dan lingkup kerja satker sipil maupun swasta, yang tidak disertai indikator kinerja pelaksana untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
- *Proses rekrutmen* pegawai atau staf di Bapel BRR belum sepenuhnya terbuka dan transparan.

REKOMENDASI (1),

Terkait dengan penyusunan kebijakan dan program pada tahun anggaran 2007, khususnya terkait RKA BRR, antara lain adalah: a) meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan program melalui sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku; b) konsolidasi antar pelaku untuk memperoleh kesepakatan “Dokumen Acuan Utama” kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; c) memperhatikan rekomendasi hasil temuan BPK dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya yang terkait dengan konsistensi antara perencanaan, RKA K/L, dan realisasi anggaran, yang mengacu kepada Rencana Induk maupun Rencana Strategis; d) evaluasi perlu dilakukan terhadap proses penyusunan perencanaan sampai dengan perencanaan setiap bidang pemulihan, mengidentifikasi hal yang perlu dikoordinasikan, disinkronkan, ditetapkan, diputuskan dan dikembangkan, untuk dilaksanakan pada TA 2007 hingga 2009.

REKOMENDASI (2)

Terkait dengan sistem dan mekanisme proses dan prosedur perencanaan dan pelaksanaan untuk percepatan pelaksanaan RIRRWANS: a) Perlu penetapan SOP koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, dan petunjuk teknis spesifik tiap aspek dan bidang pemulihan; b) Menetapkan indikator kinerja dalam pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengkoordinasian kegiatan dan pencapaian kinerjanya; c) Segera ditetapkan SOP pelaporan yang jelas secara internal, dengan hasil pelaporan yang transparan dan dipublikasikan kepada stakeholders; d) Kegiatan/program rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan diselenggarakan berbagai pelaku agar disosialisasikan kepada masyarakat; e) Pelaksana perlu mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan kegiatan dan program rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan secara langsung; f) Transparansi dan akuntabilitas dalam pemasukan dan pengeluaran semua biaya, dan investigasi tentang gejala atas munculnya kesalahan manajemen atau manajemen yang buruk; g) Penetapan mekanisme koordinasi aktif kepada lembaga Donor dan NGO tiap bidang pemulihan, demi mencegah adanya tumpang tindih, sinkronisasi dan penciptaan proses saling melengkapi antar pelaku, serta menjaga tercapainya target penyelesaian; h) Penetapan mekanisme dan prosedur perencanaan dan pelaksanaan bersama antara Bapel BRR, Pemda, K/L, dan lembaga donor/NGO, sehingga terdapat acuan yang dapat dijadikan tolok ukur koordinasi dan sinergitas, termasuk sumber data dan informasi serta pelaporan.

REKOMENDASI (3),

Terkait dengan peran dan kewenangan Pemerintah Pusat, BRR, Pemda, Donor/NGO untuk percepatan pelaksanaaan RIRRWANS: a) Pemerintah Pusat aktif dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan mendorong berbagai peraturan yang diperlukan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi; b) Kementerian/Lembaga membuat Rencana Aksi sebagai turunan dari Rencana Induk disertai rincian program, kegiatan, lokasi, dan sumber dana; c) Peran Dewan Pengawas dan Dewan Pengarah BRR perlu lebih dikedepankan, melalui kegiatan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi, yang berkelanjutan dan tersistem dengan upaya penyempurnaan rehabilitasi dan rekonstruksi; d) Bapel BRR perlu melakukan koordinasi di dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, baik yang dilakukan oleh satker BRR, NGO, Donor serta Dinas, koordinasi dan konsolidasi dengan Pemda, K/L dan Donor/NGO secara aktif dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pengendalian, bersama-sama Donor/NGO dan Pemda melakukan sosialisasi kegiatan/program yang berbasis komunitas; e) Pemda secara aktif perlu berkoordinasi dengan Bapel BRR dan satker BRR, NGO dan Donor, melalui forum-forum koordinasi, sekretariat bersama, dan proses penyusunan perencanaan, dengan Bapel BRR dan Donor/NGO perlu mendorong sosialisasi kegiatan yang berbasis komunitas, mendorong terbangunnya koordinasi dengan Bapel BRR, K/L dan Donor/NGO dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian; f) Donor/NGO diharapkan membangun koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan berbagai *stakeholders,* mempublikasikan secara luas kepada publik tentang aspek perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

REKOMENDASI (4),

Terkait dengan keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam program-program pembangunan Pemerintah Daerah: a) Peningkatan koordinasi optimal antara Bapel BRR dengan Satker, K/L terkait, dan Pemda dalam menyusun perencanaan kegiatan/program per bidang pemulihan; b) Sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pemerintah daerah, bersama-sama dengan Bappeda; c) Bapel BRR perlu merumuskan tentang *exit strategy* atau setelah berakhirnya tugas BRR di wilayah bencana dan mulai dengan pelibatan aktif dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan; d) Mendorong Pemda untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan; e) Mengidentifikasi dan mempersiapkan kegiatan fisik dan non-fisik dalam mengantisipasi pelimpahan aset kepada Pemda dan K/L; f) Memberikan peran lebih besar kepada Pemda dan masyarakat di setiap kegiatan bidang pemulihan, dalam keseluruhan skenario integrasi dan keutuhan pelaksanaan program dan kegiatan.

REKOMENDASI (5),

Terkait dengan penyempurnaan Rencana Induk, Rencana Strategis dan Rencana Aksi, khususnya untuk mengakomodasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD-Nias

- Rencana Strategis dan Rencana Aksi (dalam bentuk rencana kerja tahunan) diharapkan disusun secara terkoordinasi, sehingga dapat menjadi dokumen perencanaan yang menjadi “Acuan Bersama” semua stakeholders dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Rencana Aksi yang pernah disusun oleh Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota seluruh NAD pada tahun 2005 perlu dievaluasi bersama, sebagai masukan dalam penyempurnaan Rencana Induk serta Rencana Strategis Bapel BRR, untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangan masing-masing mulai tahun 2007.
- Terbuka peluang untuk penyempurnaan Rencana Strategis yang dapat menjembatani antara dokumen Rencana Induk yang bersifat makro dan pelaksanaan yang mikro.
- Revisi terhadap Rencana Induk sangat dimungkinkan terhadap program dan kegiatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Aceh-Nias pada saat sekarang. Diperlukan mekanisme dan prosedur dalam proses perubahan Rencana Induk.

B. Paparan Kedeputian Kelembagaan dan Pengembangan SDM: *Landasan Kerja, Kinerja 2005-2006, dan Rencana Kelembagaan Ke Depan oleh* Iqbal Farabi, Direktur Dukungan Kelembagaan Yudikatif Badan Pelaksana BRR

Akibat dampak bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada 26 Desember 2004 lalu, menyebabkan turunnya kapasitas kelembagaan pemerintah di NAD, yang meliputi sumber daya dan aparatur, sarana dan prasarana, administrasi kependudukan, dan perihal batas administrasi. Menurut Rencana Induk, rekapitulasi kerusakan di bidang kelembagaan adalah sebagai berikut.

Tabel 1
Dampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Bidang Kelembagaan

	Hilang	Meninggal
PNS	2.274	2.992
Polri	952	170
TNI	302	63
Kejaksaan Agung		105
BPN		40
Kantor Kejaksaaan	6 gedung	
Kantor Departemen Hukum dan HAM	6 gedung	
Kantor Lembaga komunikasi	8 gedung	
Kantor Polri	34 gedung	
Banda Aceh	hilang	meninggal
Asal 4.204.904 orang	126.6	93.638
Nias		154

Perubahan luas wilayah 67 % dari luas awal.

Sumber: Rencana Induk, Perpres No. 30 Tahun 2005

Sesuai dengan amanat yang tercantum pada Rencana Induk NAD-Nias, khususnya bidang kelembagaan Pemerintah Daerah, maka sasaran yang hendak dicapai dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi bidang ini yakni:

- Tersedianya aparatur pendukung untuk menjalankan kebutuhan masyarakat
- Tersusunnya rencana dan perbaikan sistem dan prosedur
- Tertatanya keuangan daerah dan terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel dan profesional.
- Meningkatnya kapasitas legislatif daerah dalam penyusunan rencana serta monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
- Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang Otonomi Khusus Provinsi NAD, mahkamah NAD, serta kebijakan darurat sipil NAD.
- Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah yang terlaksana dalam forum kerjasama antar daerah;
- Tertatanya batas-batas administratif wilayah provinsi/ kecamatan/ kelurahan yang baru

Berdasarkan landasan kerja inilah Badan Pelaksana BRR melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya untuk bidang pemulihan kelembagaan. Kinerja yang dicapai pada tahun 2005-2006 meliputi:

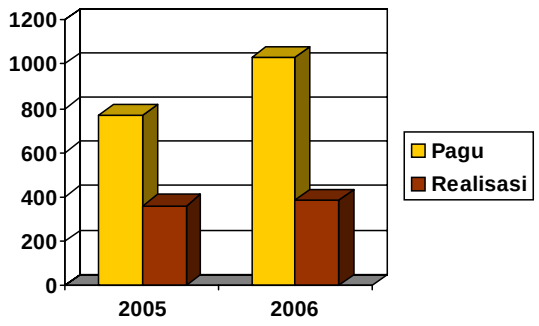
Tabel 2.
Kelembagaan Dalam Angka 2005-2006

No.	Kegiatan	Unit
1	Pendidikan/Pelatihan Aparat	*1.222 orang*
2	*Pelatihan ESQ*	*2.500 orang*
3	*Pelatihan Prajabatan calon PNS*	*1434 orang*
4	*Diklat Penjenjangan Karir*	*130 orang*
5	*Program Gelar (S2)*	*52 orang*
6	*Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa*	*800 orang*
7	*Pendidikan Calon Bintara Polisi*	*1000 orang*
8	*Pelatihan Hakim Syari'ah*	*40 orang*
9	*Bku/Arsip/Modul Panduan*	*81 Dokumen*
10	*Pilar Batas Daerah*	*303 unit*
11	*Baju Dinas dan Perlengkapan*	*11.936 orang*
12	*Kendaraan Roda 4 (empat)*	*69 unit*
13	*Antena Radio Komunikasi*	*28 unit*
14	*Alat Komunikasi Radio*	*245 unit*
15	*Support Pengadaan KTP*	*1.360.000 Buah*
16	*Kantor Desa,Camat,Bupati,Dinas, Mukim/Bale*	*294 unit*
17	*Bangunan/Fasilitas/Rumah Dinas TNI (AD/AL/AU)*	*24 unit*
18	*Bangunan/Fasilitas/Rumah Dinas POLRI*	*23 unit*
19	*Asrama/Barak/Mess (TNI/POLRI)*	*13 unit*
20	*Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan & Rumah Tahanan*	*8 unit*
21	*Kantor Imigrasi*	*2 unit*
22	*Pengadilan Negeri,Pengadilan Tinggi,Mahkamah syari'ah,Mahmil,*	*17 unit*
23	*Kantor Informasi, PWI,RRI,TVRI*	*17 unit*
24	*Bangunan Pendukung*	*16 unit*
25	*Rumah Dinas*	*301 unit*
26	*Sarana dan Prasarana lainnya*	*40 unit*

Data per November 2006, hasil kolaborasi BRR, Pemda, Donor, dan seluruh stakeholders

Kemudian, untuk realisasi pelaksanaan anggaran Deputi Kelembagaan Badan Pelaksana BRR 2005-2006 per 18 Desember 2006, realisasi tahun 2005 sebesar 50,40 %, dan realisasi tahun 2006 sebesar 37,51 %.

Gambar 1.
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Deputi Kelembagan 2005-2006



Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan tidak luput dari kendala dalam pelaksanaannya, di antaranya mengenai: (1) Masalah pertanahan (sertifikat, pembebasan, kepemilikan), (2) Keterlambatan mobilisasi kontraktor, (3) Suplai material yang terlambat, (4) Keterbatasan tenaga kerja, dan (5) Kondisi cuaca.

Untuk pengembangan rencana kerja kelembagaan ke depan, akan terbagi ke dalam 2 fase pengembangan, yakni jangka pendek dan jangka menengah-panjang. Pada fase jangka pendek, pengembagan ditujukan untuk dukungan penyelesaian administrasi kependudukan, dukungan terhadap pelaksanaan pilkada, cetak biru Aceh pasca UU PA, dan studi potensi keuangan daerah. Sementara pada fase jangka panjang, pengembangan ditujukan untuk reformasi birokrasi, harmonisasi Qanun, penyiapan kelembagaan amanat UU, penugasan belajar bagi 1000 putra/i terbaik, talent scouting calon pemimpin di bidang pemerintahan, pendirian pusat pendidikan dan pelatihan PNS, serta pilot project/ role models dan center of excellence.

Dalam hal sinergi antara BRR dan Pemda, dalam jangka waktu 2005-2009 akan mengalami perubahan. Jika pada fase awal rehabilitasi dan rekonstruksi BRR memiliki peran besar dalam fasilitasi analisa kebutuhan, penyusunan rencana kebutuhan, chaneling-network, dan sumber daya manusia, maka menjelang fase akhir rehabilitasi dan rekonstruksi keterlibatan BRR akan menurun, berganti dengan peran Pemerintah Daerah yang semakin besar dalam menjalankan reformasi.

C. Tanggapan Sekretariat Dewan Pengarah Perwakilan Banda Aceh oleh Syaifudin Ishak, Kepala Pelaksana Harian Sekretariat Dewan Pengarah BRR

1. Syariat Islam

Setelah fase tanggap darurat yang dinyatakan berakhir pada 26 Maret 2005, Pemerintah selanjutnya menugasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengoordinasi penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias. Bappenas bersama dengan pemerintah daerah, lembaga donor, LSM, pihak swasta dan masyarakat menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) no. 30 tahun 2005. ketika itu Pemerintah NAD dan Universitas Syah Kuala telah mengusulkan pemberlakuan syariat Islam dalam Blue Print proyek-proyek rehabilitasi dan rekonstruksi.. Sebagai contoh pembangunan *airport* dan gedung-gedung diharapkan dapat bernuansa islami. Namun dalam implementasinya saat ini tidak dilakukan. Hal inilah yang masih menjadi ganjalan dari Bpk.Saifudin (setwanrah Bd. Aceh).

2. Sosialisasi

Perkembangan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilakukan

Bapel BRR dirasa masih belum disosialisasikan dengan cukup luas kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat mengetahui target rehabilitasi dan rekonstruksi serta kendala dan juga hambatan-hambatan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut sehingga masyarakat dapat lebih memahami apa yang telah dikerjakan Bapel BRR selama ini.

3. Workshop bidang ekonomi

Dewan Pengarah Banda Aceh baru saja mengadakan workshop di bidang ekonomi yang melibatkan banyak pihak dengan proyeksi pembahasan jangka panjang hingga tahun 2027. Diharapkan rumusan atau draft dari workshop ini dapat menjadi masukan *exit strategi* bagi Bapel RR. Diharapkan pula gubernur dan para bupati yang baru terpilih dapat mendapat masukan.

4. Sinergitas per bidang pemulihan

Bapel BRR dalam melakukan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi seringkali menemukan hambatan-hambatan yang perlu dicarikan solusi bersama dengan Dewan pengarah dan Dewan Pengawas. Sejauh ini dirasakan solusi yang dikeluarkan belum optimal. Diharapkan Bapel RR, Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas dapat melakukan sinergi per bidang pemulihan agar dapat mengatasi masalah dengan lebih focus.

D. Pembahasan Diskusi Panel Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD- Nias: Membangun Sinergi Menuju Pemulihan Berkelanjutan

Amin Subekti, Deputi Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapel BRR:

- Hal yang penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi adalah konsistensi dalam perencanaan mulai Rencana Induk, Renstra, dan Renja.
- Pada tahun 2005, Badan Pelaksana BRR diberikan waktu yang singkat untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- BRR pada tahun 2007 sudah mulai melakukan transfer. Seluruh kegiatan Bapel sudah harus selesai pada 2008, sehingga pada tahun 2009 Bapel hanya melakukan transfer.
- Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, ada sumber-sumber pendanaan lainnya yaitu donor/NGO yang mempunyai dana untuk melaksanakan kegiatan.
- Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan sektor yang menarik banyak perhatian bagi para donor dan NGO untuk memberikan bantuan.
- Proses sekuensial perencanaan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dicarikan jalan keluar sehingga langkah apa yang sudah diambil tidak dianggap salah.

Bapak Zanua, Kepala Bappeda Nias:

- Rencana Induk belum menampung apa yang menjadi aspirasi masyarakat Nias pasca bencana 26 Desember 2004 dan 28 Maret 2005.
- Terlalu banyak pemantauan dan pengendalian yang dilakukan di Nias, tetapi hasilnya masih sama saja atau belum memuaskan.
- Perkembangan kemajuan program pembangunan di Nias belum memuaskan.
- Kami sepakat dengan hasil pemantauan dan pengendalian yang dilakukan oleh Tim Koordinasi P3RIRRWANS.
- Tambahan untuk rekomendasi yaitu perlunya penguatan kapasitas BRR perwakilan Nias beserta SDM.
- Di Nias sudah membentuk Sekretariat Bersama, tetapi BRR Nias belum berani mengambil keputusan dan harus meminta persetujuan Bapel BRR di Banda Aceh. Untuk aspek perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias, dapat diputuskan sesuai dengan hasil pertemuan antara Bappeda dengan BRR Nias. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan, hendaknya perencanaan tetap berada di Nias termasuk proses pengambilan keputusan.

Bapak Bustari, Ketua Palang Merah Indonesia Prov. NAD:

- Red Cross dan Red Cresent Internasional turut membantu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bagaimana mempermudah perpanjangan visa untuk mereka dan mengapa mereka harus bayar visa? Mohon dapat menjadi masukan ke Pemerintah Pusat.
- Untuk memudahkan koordinasi maka perlu kumpul bersama antara BRR, Pemda, Donor, NGO sehingga dapat diketahui kelemahan, kesusahan dan kendala.

Bapak Dr. Suprayoga Hadi, Direktur Kewilayah II Bappenas selaku Ketua Tim Pelaksana Tim Koordinasi P3RIRRWANS:

- Kami sangat mengharapkan mengenai pembagian peran antara Pemda, BRR, Donor, NGO dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias dapat terlaksana.
- Bisa dipahami bila ada istilah “berjalan sambil berlayar” dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Dana 4,4 Trilyun untuk kementerian/lembaga pada 2005 tidak direkam oleh Bapel. Bappenas pernah melakukan identifikasi dana hibah 4,4 T kepada kementerian/lembaga terkait, namun menghadapi berbagai kendala dan kesulitan.
- Untuk ke depan, perlu dilakukan kerja sama dalam penyusunan Renstra, karena rencana induk perlu mendapat perhatian.
- Rencana penyusunan Rencana Induk Nias sudah perlu diusulkan tapi belum dilaksanakan.

- Pada awal penyusunan rencana induk, tidak terlepas dari berbagai permasalahan dalam proses penyusunan perencanaannya, di antaranya mengenai keterbatasan waktu.
- Pasca perjanjian perdamaian Helsinki, dilaksanakan kegiatan reintegrasi mantan GAM dengan alokasi dana pada tahun 2005 sebesar 200 miliyar, tahun 2006 sebesar 600 milyar, dan tahun 2007 sebesar 250 miliyar.
- Sudah ada regulasi tentang penangangan orang asing yang melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias dan hal ini sudah diberlakukan dan dikoordinasikan dengan pihak Bapel.
- Perlu koordinasi bulanan antara berbagai stakeholders.

3.2 RESUME PEMBICARA DAN PEMBAHAS, SERTA HASIL DISKUSI KELOMPOK BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Paparan Ketua Pokja Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Nugroho Tri Utomo, selaku Kasubdit Air Bersih, Dit. Permukiman dan Perumahan, Bappenas

* Isu dan permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan

  Infrastruktur dan Perumahan:

  - Pencapaian pemenuhan kebutuhan infrastruktur
  - Pembangunan perumahan yang memperhatikan sensitifitas kebutuhan lokal

  Tata Ruang dan Pertanahan:

  - Penataan ruang yang mengantisipasi kemungkinan bencana
  - Perpu Penanganan Permasalahan Hukum Pasca Bencana

  Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam:

  - Daya dukung LH & SDA terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya sub bidang perumahan dan jalan

* Tinjauan Evaluasi & Analisis 4-K (Konsistensi, Koordinasi, Konsultasi, Kapasitas)

  - Koordinasi antara penyusunan RTRW Kab./Kota dan village planning memang perlu diupayakan, agar dapat diwujudkan pembangunan yang terintegrasi.
  - Belum selesainya RTRW Kabupaten/Kota menyebabkan belum dapat dilihat konsistensinya dengan *Blue Print*, namun secara prinsip dasar nampaknya masih sejalan.
  - Partisipasi masyarakat dalam bidang penataan ruang sudah berlangsung dalam penyusunan *village planning*.

* Kesimpulan dan Rekomendasi
  - Masih diperlukannya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan Bapel BRR.
  - Masih diperlukannya peningkatan kapasitas pemda dalam penataan ruang serta peraturan- peraturan untuk pengendalian pemanfaatan ruang.
  - Perlu usaha mendorong akselerasi penerbitan Perpu.
* Rencana Kerja dan Tindak Lanjut
  - Melakukan tinjau ulang terhadap rencana 2005-2006 untuk perbaikan dan percepatan penyelesaian masalah Aceh.
  - Menyusun rencana aksi yang merepresentasikan kebutuhan lapangan
  - Memperkuat koordinasi antar lembaga monev di tiap stakeholders terkait
  - Bentuk peningkatan kerjasama:

  a. Bidang monev (kesamaan persepsi bidang-bidang prioritas)
  b. Pokja bidang infrastruktur, tata ruang, pertanahan dan LH
  c. Pendanaan bidang transportasi, lingkungan, pengendalian banjir dan irigasi serta energi
  d. Pelatihan untuk ketrampilan tenaga kerja lokal bidang perumahan
  e. Koordinasi dengan badan legislatif dan eksekutif (Setkab untuk isu PERPU)

B. Paparan Kedeputian Bidang Perumahan dan Permukiman Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias oleh Andy Siswanto

Infrastruktur Perumahan

* Infrastruktur Regional

  Penyediaan Infrastruktur Regional bertujuan untuk:
  - Menunjang Bertumbuhnya Ekonomi Regional.
  - Melancarkan arus Barang & Jasa antar Kawasan.
  - Mendorong Pengembangan Wilayah & Pemanfaatan SDA.

* Infrastruktur Kawasan & Permukiman

  Pembangunan Perumahan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias bagi para Korban bencana alam dan tsunami tidak cukup hanya dengan membangun Rumah sebanyak 128.000 unit di ± 1200 Desa/Kawasan, tetapi perlu dilengkapi dengan Infrastruktur Permukiman yang memadai agar:

- Rumah yang dibangun menjadi Hunian yang nyaman
- Masyarakat dapat hidup dilingkungan yang Sehat.
- Masyarakat dapat dengan mudah melakukan aktivitasnya.
- Kegiatan Ekonomi lokal dapat berkembang.
- Kehidupan Sosial Masyarakat dapat berjalan dengan baik.

* Infrastruktur

- Jalan

  Jalan Poros, akses yang menghubungkan antar Kawasan Permukiman.

  Jalan Lingkungan, akses yang menghubungkan antar Lingkungan
- Air Minum

  Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dapat hidup sehat.
- Drainase

  Untuk mencegah terjadinya banjir di Kawasan Permukiman
- Sanitasi

  Agar masyarakat dapat hidup dilingkungan yang sehat dan bersih.
- Penghijauan dan Pertamanan

* Pembangunan Infrastruktur Kawasan & Permukiman 2006-2007

- Penyusunan Detail Engineering Design Infrastruktur.

  110 Desa/Kawasan telah selesai dan 200 Desa/Kawasan sedang dilaksanakan.
- Penyusunan Rencana Induk System (RIS).

  Sedang dilaksanakan untuk 400 Desa/Kawasan (belum ada DED) yang mengalami Rusak Sedang.
- Pembangunan Prasarana–Sarana Dasar/Infrastruktur Kawasan & Permukiman, di 15 Desa/Kawasan Percontohan dan 38 Desa/Kawasan Siap Huni.
- Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase di 150 Lokasi Perumahan.

Perumahan dan Permukiman

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Perumahan dan Permukiman

Perangkat Penunjang

* Kebijakan Ka-Bapel yang telah dikeluarkan:

- Kebijakan tentang Rekonstruksi (BPRB)

- Kebijakan tentang Rehabilitasi (BPR)
- Kebijakan tentang Relokasi (BPPK)
- Kebijakan tentang Bantuan bagi Mereka yang tidak memiliki tanah dan rumah (BSBT)
- Standar Kelayakan Bangunan
- Harga Satuan Rumah Baru per wilayah

* Kelembagaan:
  - 19 Asperkim di tingkat kabupaten/kota
  - 190 fasilitator kecamatan
  - 450 KP4D di tingkat desa
  - 16 unit PPK tersebar di setiap kabupaten/kota dan direkrut atas usulan Bupati/Walikota

Beberapa faktor mengapa data calon penerima bantuan banyak menyimpan masalah

1. Faktor masyarakat korban
   1. Kepala/anggota keluarga korban tidak ada di tempat ketika dilakukan pendataan
   2. Korban : ahli waris yang berhak tetapi masih belum cukup umur
   3. Korban menikah dengan sesama korban
   4. Orang yang tidak berhak memberikan kesaksian palsu mengaku korban
   5. Terjadi kebohongan massal atau berjamah dalam memberikan kesaksian/uji publik
   6. Korban secara sengaja meminta rumah dari dua atau lebih lembaga (NGO/BRR)
   7. Korban mengajukan nama anggota keluarga dalam pendataan
   8. Korban mengajukan permohonan dengan penulisan nama yang berbeda
2. Faktor petugas/pendata
   1. Petugas tidak terjun langsung ke lapangan tetapi hanya memberikan formulir isian ke wakil warga/kepala desa
   2. Petugas menerima apa adanya dari data yang diusulkan warga/kepala desa (tidak melakukan verifikasi melalui uji publik)
   3. Ada pihak-pihak setempat yang memaksa petugas memasukkan sebagai calaon penerima bantuan

4. Petugas ‘kongkalikong’ dengan warga dengan mendapatkan imbalan tertentu

3. Faktor lokasi dan waktu
    1. Lokasi sulit dijangkau dalam pendataan
    2. Waktu pendataan bersamaan atau setelah rumah-rumah dibangun/ direhab.
4. Faktor peralatan

Volume data yang sangat besar (ratusan ribu nama disertai dengan identitas diri) menuntut adanya komputer yang canggih dalam pengolahan data

Beberapa penyebab mengapa kontraktor tidak segera mulai melakukan pekerjaan

1. Hambatan fisik lokasi
    - Sulit dijangkau karena jalan/jembatan masih rusak/terputus (*Desa Panggung Aceh Jaya, Simeulue, dll*)
    - Lokasi di pulau, dermaga tidak memadai untuk pendaratan material (*P. Aceh, Simeulue*)
    - Kondisi lokasi perlu penanganan engineering khusus, karena tergenang air, lahan gambut, perlu urugan (*Tibang, Meulaboh, Gostel Barat, dll*.)
2. Hambatan non-fisik lokasi
    - Sudah ada NGO yang meng-*claim*/menguasai lokasi
    - Kontraktor dihambat/dipajaki untuk masuk ke lokasi oleh ‘oknum’ setempat.
    - Masyarakat setempat menuntut dilibatkan dalam pembangunan
    - Ada kontraktor setempat yang merasa lebih berhak
3. Hambatan calon penerima bantuan (*beneficiaries*)
    - Beneficiaries sudah menerima rumah dari NGO
    - Beneficiaries ternyata tidak berhak/sah
4. Hambatan internal kontraktor
    - Kontraktor tidak punya modal/belum terima uang muka (tidak ada garansi bank)
    - Tidak punya alat/tenaga kerja yang memadai
    - Bersengketa diinternal perusahaan atau dengan pihak eksternal
5. Hambatan material
    - Material sulit diperoleh atau jauh dari lokasi membutuhkan angkutan
    - Material harus disupply dari oknum tertentu.

Beberapa alasan mengapa pengungsi tidak segera kembali ke rumah baru yang telah selesai

1. Kualitas rumah tidak sesuai dengan yang diharapkan
   - Kayu kropos
   - Material tidak memenuhi standar
   - Partisi ruangan terbuat dari triplek
   - Kamar mandi tanpa WC
   - Ada closet, tidak ada septic tank
   - Kualitas rumah di desa sebelahnya lebih bagus
2. Prasarana permukiman yang tidak memadai
   - Tidak tersedia air bersih atau jaringan rusak
   - Jaringan listrik rusak/tidak ada
   - Tidak ada saluran pembuangan
   - Tergenang saat hujan atau air pasang
3. Relokasi jauh dari lokasi asal
   - Akan kehilangan mata pencaharian bila tinggal di tempat yang baru
   - Hilangnya ikatan emosional di lingkungan baru
4. Aktivitas keseharian warga telah berpindah
   - Sekolah anak sudah terlanjur pindah ke sekitar lokasi pengungsian
   - Di lokasi rumah baru jauh dari pasar dan tempat kerja
5. Tinggal di barak lebih menguntungkan
   - Tersedia ‘Jadup’ dari pemerintah
   - Banyak bantuan dari NGO
   - Listrik gratis.

Substansi Rencana Induk (*Blue Print*) Bidang Perumahan dan Permukiman

Rencana Induk: Kebijakan Bidang Perumahan

1. Membantu korban *inkind* atau *incash* setara dengan Rp 28,8 juta untuk rumah hancur/rusak berat atau Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan.
2. Membantu penyediaan perumahan dan prasarana-sarana dasar bagi korban yang harus dipindahkan (*resettlement)*
3. Menyelesaikan bantuan dan penyediaan perumahan dalam jangka waktu tidak lebih dari 2,5 tahun.
4. Harus didasarkan pada kebutuhan lokal, memberdayakan masyarakat setempat, sejauh mungkin menggunakan material lokal serta memenuhi persyaratan building code setempat.

5. Koordinasi dengan lembaga donor bilateral/multilateral/NGO bekerjasama dengan pemerintah kota/kabupaten
6. Rumah bantuan adalah rumah inti T-36.

Strategi Bidang Perumahan

1. Proses pengambilan keputusan secara partisipatif dan berkeadilan;
2. Menetapkan status kepemilikan lahan dan peruntukannya secara partisipatif dan bila diperlukan dapat melakukan *land-readjustment;*
3. Membantu korban bencana dalam perbaikan dan pembangunan rumah dengan keahlian teknis, material, dan fasilitasi pembangunan;
4. Meningkatkan integrasi multi-sektor (perumahan dengan prasarana-sarana dasar, perekonomian, dsb);
5. Meningkatkan kapasitas lokal, penyederhanaan dan desentralisasi pengelolaan program;
6. Monitoring dan evaluasi yang konsisten

Pertanahan

Rencana Induk Pertanahan

- Program pensertifikatan tanah;

  melalui Program RALAS (Rehabilitation of Aceh Land Administration Systems) -> Biaya dibantu MDF
- Kegiatan Rencana tata guna tanah melalui kegiatan pemetaan tematik (data lebih lengkap) sudah tersedia di anggaran 2005-2006
- Kegiatan Konsolidasi Tanah ;

  Kegiatan Penataan Kembali suatu desa, dilakukan melalui 2 tahap pensertifikatan, sebelum konsolidasi tanah dan sesudah konsolidasi tanah,

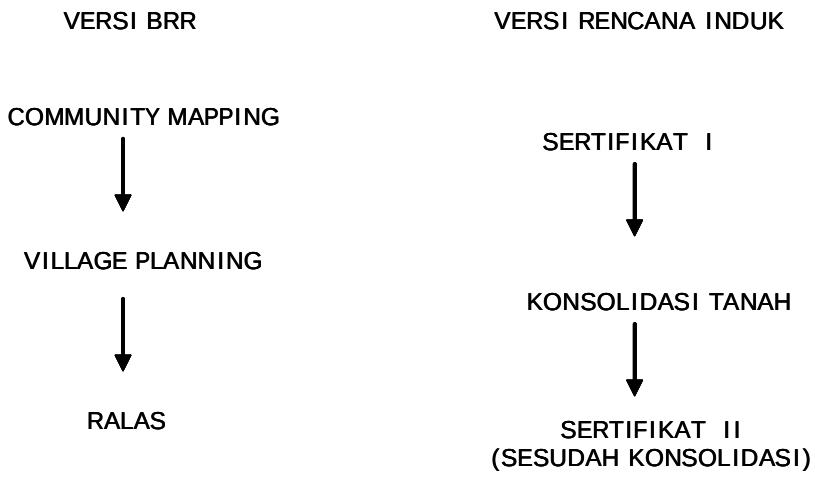
Di BRR dilakukan melalui village planning, dilakukan sebelum RALAS.

Untuk kegiatan konsolidasi tanah khusus, maka harus menunggu sampai ada hasil RALAS -> masyarakat setuju konsolidasi -> Pensertifikatan.

Rencana uji coba : TA 2008

- Sengketa Pertanahan-à sudah di akomodasi di RALAS

Konsolidasi Tanah



Tata Ruang

Mengapa Village Planning (VP) ?

- Rencana Induk: salah satu Kebijakan dan Strategi penataan ruang adalah memberikan pilihan kepada warga untuk bermukim di tempat semula
- VP dapat memfasilitasi R/R dengan segera, sekaligus memudahkan masuknya aspek mitigasi bencana

VP sebagai Penafsiran Kebijakan Tata Ruang Makro, Ambiguitas Arahan Penataan Ruang dalam Rencana Induk.

- Lampiran I Buku Utama - bagian Penataan Ruang, Kebijakan dan Strategi: memberikan pilihan kepada warga untuk bermukim di tempat semula.
- Lampiran II: dalam jarak tertentu dari garis pantai harus menjadi zona penyangga (buffer zone) dan sabuk hijau (green belt) karena tidak aman, terutama dilihat dari bencana tsunami yang lalu.

VP adalah Terobosan Terhadap Ambiguitas Arahan Tata Ruang.

C. Paparan Deputi Infrastruktur Bapel BRR oleh Bastian Sihombing

Sekretariat Bersama dan Regionalisasi

Latar Belakang Regionalisasi

- Meyakinkan peningkatan efektivitas Pemda setelah BRR menyelesaikan mandat tahun 2009
- Menjalankan secara penuh “community-based approach”
- Menangani tantangan dan kebutuhan rekonstruksi dengan lebih baik
- Meningkatkan koordinasi yang efektif para pelaku rekonstruksi di tiap wilayah
- Mempersiapkan transfer asset dan knowledge kepada Pemerintah Daerah

Kantor Pusat

- Visi, Strategi dan Kebijakan
- Fund raising
- Program/ Output Setting
- Portfolio integration
- Hubungan internasional
- Political risk management
- Project Manajemen lintas sektor
- Hubungan Kelembagaan
- Capacity building
- Organisational wide performance
- Integritas

Kantor Wilayah

- Project delivery
- Pertanggungjawaban keuangan
- Koordinasi tingkat regional
- Problem solving
- Role modelling utk pemda

Fungsi Sekretariat Bersama

- Melakukan koordinasi satu atap dalam perencanaan, pemrograman dan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

- Melakukan pengelolaan data dan informasi yang mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
- Memperkuat hubungan antar stakeholder rehabilitasi dan rekonstruksi lewat strategi komunikasi yang jelas
- Mempromosikan tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi di semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Tujuan Sekretariat Bersama

- Perencanaan, Pemrograman, Prioritizing, Monitoring dan Evaluasi
- Pengelolaan Data dan Informasi
- Hubungan antar Stakeholder

Implementasi Blue Print

- Konsistensi
  - Secara kebijakan BRR pada dasarnya tetap konsisten terhadap “Blue Print”, secara program terjadi penyesuaian terhadap dinamika kondisi di lapangan
  - Prinsip pendekatan partisipasi membawa pengembangan wilayah kembali kearah yang diinginkan oleh masyarakat
  - Meskipun tidak ditekankan dalam Blue Print, BRR menempatkan proses identifikasi dan verifikasi terhadap korban atau penerima manfaat (*beneficiaries*) sebagai tahap yang sangat penting dalam manajemen pasca-bencana.
  - Beberapa aspek lain yang perlu ditekankan adalah seperti kebijakan untuk penyewa/renters, pembelian tanah, pemeliharaan infrastruktur, reformasi kebudayaan, pendidikan.

- Koordinasi
  - Pembentukan regional office dan Joint Sekretariat adalah bentuk penguatan koordinasi antara BRR, Pemda dan stake holder lainnya
  - Penggunaan tenaga Pemda (menjadi staf struktural, satker, atau panitia) adalah bentuk koordinasi yang sekaligus merupakan program penguatan kapasitas
  - K/L adalah pemilik standar, norma, prosedur, teknik dan keahlian. BRR menggunakan dokumen K/L tersebut
  - Kordinasi dengan K/L dan Pemda dilakukan dalam rangka menghindarkan overlapping dan menyesuaikan kepada kebutuhan
  - Exit Strategi akan disusun pada TA 2007 dalam rangka persiapan pengalihan RR kepada Pemda sebelum berakhirnya BRR

· Konsultasi

  – Program R/R sejauh mungkin diupayakan memperhatikan aspirasi masyarakat lokal sebagai pihak yang paling berkepentingan.
  – Program ditentukan dari hasil konsultasi dengan stake holder dan dari proposal masyarakat
  – Ketersediaan informasi diperkuat sampai ke tingkat kabupaten dengan menyediakan akses data untuk tiap kabupaten
  – Untuk memungkinkan terjadinya konsultasi publik yang efektif, untuk sektor perumahan telah dibentuk KP4D (di tingkat desa), Fascam (kecamatan), Asperkim (kabupaten), Fas Huntara, Konsultasi dengan MPU, Majelis Pendidikan, Majelis Budaya dll

· Kapasitas

  – Merupakan isu penting dalam peningkaan kapasitas adalah dalam hal implementasi (penyerapan)
  – Pelaksanaan R/R sangat ditentukan oleh:
    • Kapasitas Jasa Konstruksi Lokal
    • Kapasitas pelaksana proses tender/procurement dan aquisisi
    • Kapasitas Management Konstruksi (Satker, Supervisi dan Comissioning)
  – Bersamaan dengan BRR, kegiatan konstruksi juga dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemda (I/II), NGO/Donor dan Swasta
  – Pemberdayaan Jasa Konstruksi dan Industri Konstruksi (Jasa Konstruksi Kecil dan Industri Bahan Konstruksi)
  – Dalam hal kegiatan SDM, pemanfaatan SDM Pemda adalah bentuk OJT dan Capacity Building yang optimal dalam meningkatkan kapasitas
  – Kapasitas organisasi, akan diperkuat dalam hal kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian terutama terhadap pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik yang dibangun oleh berbagai pihak.

Beberapa Concern yang Perlu Diperhatikan

· Prosedur P/L bagi perumahan perlu dilanjutkan dalam rangka percepatan
· Bagi sektor lain (non perumahan) prosedur penambahan biaya agar dibuka sehingga memungkinkan terhadap *repeat order* atau addendum lebih dari 10%.
· Masa tugas BRR hanya sampai April 2009, namun proses RR seharusnya sampai selesai, perlu dukungan penuh Pemda dalam hal pembebasan tanah, SDM, dan persiapan *Exit Strategy*
· *Flexibility* dalam hal prosedur akan sangat membantu percepatan RR.

D. Diskusi Kelompok Bidang Pemulihan Infratruktur, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup

1. Perwakilan Pokja Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup BAPPENAS, Bapak Nugroho Tri Utomo

   - Setelah hampir dua tahun kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah cukup banyak yang berhasil dicapai, namun masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan atau ditingkatkan lagi.
   - Perbaikan den peningkatan tersebut tentunya memerlukan penguatan kerjasama dalam rangka menciptakan sinergi yang lebih baik dalam penyelesaian masalah NAD-Nias pasca bencana.
   - Salah satu sektor yang mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah penataan ruang. Penataan ruang di NAD-Nias sejak awal direncanakan untuk dapat mengantisipasi bencana. Walaupun demikian, disadari bahwa pada implementasinya perlu menyesuaikan dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di lapangan.
   - Salah satunya adalah penerapan Village Planning (VP) oleh BRR pada tingkatan kelurahan/desa sebagai bagian dari penyusunan tata ruang. Walaupun menyadari bahwa hal ini telah dapat menjembatani kebutuhan akan suatu rencana yang terstruktur dengan kebutuhan untuk segera membangun rumah dan infrastruktur pendukung lainnya, Bappenas berkepentingan melihat perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi dari kaca mata Rencana Induk (RI).
   - Perbandingan antara realitas pencapaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan dengan RI yang ada akan sangat bermanfaat bagi Bappenas, BRR, dan pihak-pihak yang terkait lainnya dalam memanfaatkan sebaik-baiknya sisa waktu yang ada serta mulai merencanakan suatu exit strategi yang tepat, efektif, dan dapat dipahami oleh Pemda maupun masyarakat Aceh sendiri.

2. Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR

   - Dalam RI, area rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk wilayah non bencana sehingga ada wilayah yang bukan kewenangan BRR. Dengan demikian stakeholder rehabilitasi dan rekonstruksi dalam RI pun bukan hanya BRR.
   - Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR secara umum mengacu pada RI pada level kebijakan. Pada level program, pada banyak kasus sulit untuk mengikuti RI karena harus menyesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan yang cenderung menuntut pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secepat-cepatnya.
   - BRR membangun regional offices dan join secretariate (JS) sebagai salah satu upaya dalam menggalang koordinasi dengan berbagai stakeholders. Pimpinan JS ini dimungkinkan dipegang oleh kepala

regional BRR atau kepala daerah setempat. Kegiatan dalam JS adalah screening proposal, yang berasal dari berbagai stakeholders, berdasarkan evaluasi prioritas, aspek teknis dan lingkungan sehingga muncul 'kegiatan terpilih'.

- Dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan BRR telah mengacu kepada Norma, Standar, Prosedur, Manual (NSPM) yang disusun K/L terkait.
- Pembangunan infrastruktur terutama terkendala oleh pembebasan tanah yang berlarut larut. Walaupun BRR dapat membiayai pembebasan tanah, masyarakat cenderung mematok harga tanah yang sangat tinggi begitu mereka tahu bahwa BRR akan melakukan pembebasan tanah. Karena itu BRR mengharapkan peran Pemda yang lebih dominan dalam mengatasi permasalahan pembebasan tanah, terutama dalam ikut serta mengendalikan harga penawaran tanah oleh masyarakat secara wajar.
- Tiap kabupaten juga disediakan akses data yang lebih baik agar dapat terjalin proses konsultasi seperti yang diharapkan.
- Upaya penguatan kapasitas Pemda saat ini dan ke depan terutama diarahkan untuk operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun agar dapat berfungsi optimal sesuai dengan periode perencanaannya.

3. Deputi Perumahan dan Permukiman BRR

- Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mungkin mengikuti tahapan normal sehingga perencanaan di beberapa level dilakukan secara simultan
- Perencanaan yang dilakukan walaupun tidak identik dengan RI namun membawa semangat yang sama
- BRR dalam perencanaannya juga mencanangkan green belt dan escape hill seperti dalam RI namun ada beberapa perubahan disesuaikan kondisi lapangan
- Dalam pembangunan perumahan dan permukiman BRR juga berusaha mengakomodasi penataan lingkungan permukiman sehingga tidak hanya sekedar membangun kembali saja melainkan rebuilt better

4. Bappeda Aceh Besar

- Pelaksanaan VP dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Besar sudah berjalan.
- VP di Desa Neuheun dilaksanakan dengan bantuan GTZ. Pelatihan dalam VP dilaksanakan oleh aparat Pemda.
- Perlu adanya kejelasan tentang status rumah yang dibangun BRR TA 2005 sehingga dapat diketahui jumlah yang layak huni maupun yang masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

- Bappeda mengharapkan BRR meningkatkan koordinasi dengan Pemda. (Namun tidak dijelaskan bagaimana bentuk peningkatan koordinasi yang diharapkan).

3.3 RESUME PEMBICARA DAN PEMBAHAS, SERTA HASIL DISKUSI KELOMPOK BIDANG PEMULIHAN SOSIAL BUDAYA

A. Paparan Anggota Pokja Bidang Pemulihan Sosial Budaya oleh Subandi

* Isu dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian:

- *Belum terbangunnya koordinasi yang lancar antara* stakeholders *rehabilitasi dan rekonstruksi NAD –Nias yaitu BRR, K/L, Pemda dan lembaga donor.*
- Terbatasnya ketersediaan data pembiayaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh lembaga donor/NGO.
- Pelaksanaan kordinasi langsung kepada masyarakat oleh lembaga donor/NGO dan tidak melalui pemda setempat.
- Pemda Provinsi tidak memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias yang dilaksanakan di Kab/Kota oleh BRR dan NGO.

* Tinjauan Evaluasi & Analisis 4 K (Konsistensi, Koordinasi, Konsultasi, Kapasitas)

Aspek Konsistensi

a. *Bidang Pendidikan,* dari 9 program yang ada dalam rencana induk, terdapat 2 program/kegiatan yang belum terlaksana oleh Bapel BRR yaitu *pertama*, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. *Kedua*, penelitian dan pengembangan pendidikan.

b. *Bidang Kesehatan,* dari 11 program/kegiatan yang ada dalam rencaan induk, terdapat 3 program yang belum dilaksanakan oleh Bapel BRR yaitu *pertama*, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, *kedua,* lingkungan sehat. *Ketiga*, penelitian dan pengembangan kesehatan. Bidang ini dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga

c. *Bidang Agama*, terdapat 3 program dalam rencana induk dan kegiaatn yang dilaksnakan BRR mengacu kepada 3 kegiatan yang terdapat dalam rencana induk tersebut.

d. *Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak,* terdapat 3 program dalam rencana induk. Pelaksanaan kegiatan oleh BRR mengacu kepada 3 program yang terdapat dalam rencana induk

e. *Bidang sosial,* terdapat 4 program yang ada dalam rencana induk dan pelaksanaan kegiatan oleh BRR mengacu kepada 4 kegiatan tersebut.

f. *Bidang Budaya,* terdapat 3 program dalam rencana induk dan terdapat 1 program yang belum terlaksana oleh BRR yaitu *pengelolaan kekayaan budaya*. Hal ini disebabkan karena perioritas BRR pada tahun 2005 dan 2006 masih difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi sarana fisik.

g. *Bidang Pemuda dan Olahraga,* terdapat 3 program dalam rencana induk dan pelaksanaan kegiatan oleh BRR mengacu kepada program yang ada dalam rencana induk tersebut.

Dari 9 bidang yang terdapat dalam rencana induk, terdapat 1 program bidang yang tidak terlaksana oleh BRR yaitu pendataan penduduk NAD dan Nias pasca tsunami dan Pelayanan Keluarga Berencana hal ini karena sudah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI dan BKKBN

Aspek Koordinasi

Dalam konteks *koordinasi, perencanaan program* idealnya sebelum langsung kepada masyarakat yang menjadi sasaran program, NGO terlebih dahulu berkoordinasi awal dengan BRR sebagai lembaga penanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias dan juga kepada pemda setempat. Dalam realisasinya terdapat NGO (Spanyol) yang melakukan koordinasi langsung kepada masyarakat tanpa melalui koordinasi dengan pemda setempat. Misalnya pembangunan sekolah SMP 3 Kaway XVI di Meulaboh merupakan hasil kesepakatan langsung antara lembaga donor dengan pihak sekolah (kepala sekolah). Akibat kurangnya koordinasi dengan Pemda setempat (Dinas Pendidikan), sampai saat ini sekolah tersebut belum mempunyai status hukum yang jelas.

Aspek Konsultasi

Pada aspek partisipasi/konsultasi masyarakat yang menjadi sasaran program, pada umumnya dilibatkan hanya pada saat persiapan program melalui pendataan untuk keberlangsungan program dan tidak berpartisipasi pada saat pelaksanaan dan evaluasi program

Aspek Kapasitas

- Secara keseluruhan penyerapan anggran DIPA tahun 2005 dan DIPA L 2006 dan DIPA 2006 di bidang sosial budaya masih sangat kecil. DIPA tahun 2005 total anggran Rp. 270.809.000.000 sampai Juni 2006 penyerapan anggaran Rp 7.534.395.183 atau 2.78%. Sedangkan DIPA L 2006 total anggaran Rp. 263.274.65.000 dan penyerapannya sebesar Rp 140.007.919.112 atau 53.18%. Sedangkan DIPA 2006 juga mengalami penyerapan yang masih rendah sebesar Rp 169.195.900.849 atau 49.59%
- Dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan, secara keseluruhan penyerapan anggaran DIPA 2005 dan DIPA L-2005 serta DIPA 2006 juga masih rendah. DIPA 2005 anggaran Rp.480.000.000 sampai Juni 2006 penyerapan anggaran Rp.144.520.343.000 atau 30.11%. Anggaran DIPA L-2006 dengan angaran Rp 335.479.658.000 mengalami penyerapan rendah, per Juni 2006 penyerapan Rp 126.036.564.227 atau 37.57%. Anggaran DIPA

2006 menunjukkan semakin menurun dari total anggaran Rp. 1.078.554.822.000 terserap Rp. 126.036.564.227 atau 22.51 %.

* Kesimpulan

  - Secara umum program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemulihan sosial budaya yang dilaksanakan Bapel BRR mengacu kepada Rencana Induk.
  - Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh lembaga donor/NGO tidak bisa dipantau karena keterbatasan ketersediaan data baik dari aspek pembiayaan maupun pelaksanaan
  - Koordinasi antara stakeholders rehabilitasi dan rekonstruksi belum berjalan dengan baik.
  - Masih rendahnya penyerapan dana dalam bidang pemulihan sosial budaya yaitu bidang Pendidikan dan Kesehatan sebesar 22.51% dan bidang agama, sosial dan kebudayaan 49.50%

* Rekomendasi

  - BRR, NGO, K/L, dan Pemda membuat rencana strategis secara bersama, sehingga program rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dilaksanakan secara simultan.
  - Donor/NGO perlu mempublikasikan secara luas kepada publik tentang aspek perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
  - Donor/NGO perlu melakukan koordinasi awal kepada BRR dan Pemda setempat sebelum pelaksanaan program di lapangan

* Tindak Lanjut

  Sinkronisasi rencana dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi antara stakeholders yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias yang terdiri dari BRR, K/L, Pemda NAD dan Donor/NGO.

B. Paparan Deputi Agama, Sosial, dan Budaya oleh T. Syafir Iskandar Wijaya

Memaparkan mengenai kebijakan dan strategi bidang agama, sosial, dan budaya (selengkapnya pada lampiran).

TAHAP REHABILITASI

Ditujukan untuk melakukan pemulihan berbagai fasilitas dan revitalisasi pelayanan dasar baik di lingkup Agama, Budaya maupun Kesejahteraan Sosial serta peletakan dasar-dasar bagi pembentukan masyarakat belajar (learning society)

TAHAP REKONSTRUKSI

Diharapkan berbagai pemulihan sarana dan prasana pendukung bagi terpulihkannya kehidupan masyarakat dalam aspek Agama, Budaya dan Kesejahteraan Sosial telah dilakukan sehingga langkah-langkah yang dilakukan lebih dititik beratkan pada aspek pemberdayaan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas (Capacity Building) masyarakat.

C. Paparan Deputi Pendidikan, Kesehatan, dan Peran Perempuan oleh Cut Cayarani Bitai

* Kerangka Kerja BRR:
  - BRR menjadikan blue print menjadi acuan awal dalam penyusunan rencana kerja
  - Sesuai amanat di dalamnya, blue print adalah "a living document" yang harus terus diperbaharui sesuai dengan kondisi lapangan
  - BRR menggunakan pendekatan perencanaan berbasis komunitas untuk menetapkan prioritas kegiatan

* Koordinasi:

Membangun komunikasi berkesinambungan dengan pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi dan stakeholders dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program untuk mewujudkan target program secara tepat, terarah dan sistematik

* Konsistensi:

Menjalankan program sesuai dengan kerangka acuan "Blue print" dan Need Assesment sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat melalui strategi prioritas dan keterpaduan lintas sektoral sesuai dengan tujuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

* Konsultasi:

Pelibatan lembaga/instansi dan narasumber dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sebagai patner guna mempercepat dan memantapkan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

* Kapasitas:

Pemberdayaan SDM pelaku yang memiliki kapasitas, kinerja dan integritas yang tinggi dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui kerangka dan aturan mewujudkan good governance dan anti korupsi.

D. Diskusi Kelompok Bidang Pemulihan Sosial Budaya

1. BP3 Aceh-Sumut (Bapak Insa Ansari)

Realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi museum BP3 Aceh (Badan Pelestarian dan Pengkajian Purbakala) tidak dilaporkan BRR pada tahun 2006. Rehabilitasi museum tersebut sebetulnya dilaksanakan oleh Satker BRR tetapi pembangunan tersebut tidak selesai dan terbengkalai sampai sekarang ini.Hal ini tidak ada klarifikasi ataupun penjelasan dari pihak BRR baik kepada Pemda maupun ke masyarakat.

2. BKSNT Aceh - Sumatera Utara (Bapak Shabri A)

BRR perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang terbengkalainya pembangunan museum BP3 Aceh. Apakah penyebabnya satker yang tidak bertanggung jawab, kontraktornya, karena keuangan BRR, atau pembangunan tersebut bisa dilanjutkan pada tahun 2007.

3. Dinas Mobilitas Penduduk NAD (Bapak Asrin)

Perlunya BRR berkoordinasi dengan pemda supaya pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi bisa sinkron dan tidak tumpang tindih dengan program yang juga dilaksanakan oleh Pemda.

4. Direktorat Budaya BRR (Bapak Khatoni)

Pelaksanaan rehabilitasi museum BP3 yang belum terselesaikan pada tahun 2006 disebabkan karena adanya perubahan sistem anggaran BRR, sehingga penyelesaiannya akan dilanjutkan pada tahun 2007.

5. Deputi Agama, Sosial dan Budaya BRR (T. Syafir Iskandar Wijaya)

- Informasi lain yang didapatkan tentang terbengkalainya pembangunan museum BP3 oleh satker Kebudayaan dan Peningkatan SDM adalah kontraktor yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan tersebut tidak siap secara SDM.
- BRR telah melaksanakan koordinasi dengan stakeholders yang ada dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias. Disamping itu juga dalam perencanaan program juga melibatkana masyarakat. Bahkan BRR juga ikut hadir dalam Musrenbang.Koordinasi dan sinkronisasi program seperti apa yang diharapkan oleh Pemda
- Antara Pemda dan BRR perlu duduk bersama dalam melaksanakan program mulai dari perencanaan dana pelaksanaan sehingga pembangunan kembali Aceh dan Nias bisa berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Tidak ada lagi sikap saling menyalahkan, tetapi bersama-sama membangun Aceh.

6. Bappenas (Bapak Dadang Rizki)

Pembagian tugas dan wewenang antara BRR dan Pemda yang sudah dilaksankan oleh bidang kedeputian Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan BRR bisa dijadikan contoh oleh bidang lain di internal BRR dalam proses pelaksanaan rehabilitasi danrekonstruksi NAD-Nias.

7. Deputi Pendidikan, Kesehatan, dan Peran Perempuan BRR (Ibu Cut Cayarani Bitai)

- Koordinasi dan sinkronisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR dan Pemda, barangkali bisa mengikuti sistem kerja yang sudah dilaksanakan oleh Deputi Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan antara BRR dan Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota tentang pembagian tugas dan wewenang kerja oleh masing-masing stakeholders tersebut. Pembagian tugas ini terlaksana berdasarkan rapat koordinasi yang dilaksanakan secara kontiniu antara BRR dan Pemda.Dengan berjalannya koordinasi antara stakeholders, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dibawah kedeputian pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan dapat berjalan sesuai dengan Rencana Induk dan tidak tumpang tindih dengan program yang dilaksanakan oleh Pemda maupun Kementerian Lembaga.
- Ada beberapa langkah koordinasi yang dilaksanakan oleh Kedeputian Pendidikan, Kesehatan dan peran Perempuan BRR dengan stakeholders yaitu :
  1. Ikut hadir dalam Musrenbangda dalam rangka sosialisasi awal program yang akan dilaksanakan
  2. Melaksanakan sosialisasi lanjutan terhadap program yang sudah ditentukan
  3. Melaksanakan workshop dengan melibatkan semua stakeholders yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias sebagai sarana koordinasi dan sinkronisasi program antar stakeholders.

3.4 RESUME PEMBICARA DAN PEMBAHAS, SERTA HASIL DISKUSI KELOMPOK BIDANG PEMULIHAN PEREKONOMIAN

A. Paparan Ketua Pokja Perekonomian oleh Rahma Iryanti

* Isu dan Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Lambatnya proses penentuan beneficery sehingga memerlukan perbaikan penentuan dan ketepatan beneficiaries melalui penyempurnaan buku panduan

b. Lamanya proses pengadaan lahan

c. Terjadinya kelambatan dalam pelelangan/tender ulang

d. Ketidaksiapan satker mengatur volume kegiatan yang melonjak tinggi dengan SDM yang terbatas

e. Data realisasi progres hanya dari penyerapan keuangan, belum termasuk penyerapan fisik, masih ada kendala dalam pelaporan realisasi fisik

f. Lamanya proses revisi anggaran yang memerlukan persetujuan pusat/diperlukan proses revisi anggaran

g. Pembuatan rencana yang tidak akurat

h. Kendala pengumpulan data realisasi progress fisik dari satker (data belum yang terbaru/pengiriman tidak tepat waktu), dan lamanya proses persetujuan terkait dengan hibah sehingga perlunya percepatan dan awareness terhadap prosedur Donor

* Tinjauan Evaluasi dan Analisis 4-K

Konsistensi :

i. Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan

- Renstra BRR untuk sektor perdagangan, perindustrian, koperasi & UKM, tenaga kerja, pariwisata masih belum mengacu pada Rencana Induk. Sedangkan untuk sektor kelautan & perikanan dan pertanian secara substansi sudah mengacu pada Rencana Induk walaupun tidak seluruhnya dapat dilaksanakan
- Pada dasarnya Badan Pelaksana BRR baik dalam strategi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias telah berupaya mengacu kepada Rencana Induk, namun demikian sebagian besar program dan kegiatan lebih banyak mengacu kepada penyesuaian kebutuhan di lapangan

ii. Konsistensi Antar Perencanaan dengan Pelaksanaan

- Belum menunjukkan semua kegiatan dapat direalisasikan. Pelaksanaan kegiatan di lapangan sering berubah dari rencana awal (seperti yang terjadi pada satker kelautan & perikanan dan satker produksi tanaman pangan yang terkendala oleh Kepres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa)
- Untuk sektor koperasi dan UKM, pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Induk (menekankan pada rehabilitasi non fisik yaitu bantuan perkuatan modal) sedangkan dalam perencanaan menekankan pada rehabilitasi fisik

iii. Konsistensi Antar Pelaksana

- Pada kegiatan pendidikan dan pelatihan pada sektor tenaga kerja terjadi konsistensi kegiatan antara dinas yang menyediakan ruangan pelatihan; BRR yang melakukan renovasi seperti pemasangan lantai keramik untuk kelas diklat; pemberian bantuan MTU/mobil training unit sebanyak 13 unit, kerjasama pelatihan oleh ILO (International Labour Organization) kepada Dinas Tenaga Kerja.

Koordinasi :

- Kurangnya koordinasi dengan Kementerian Lembaga (Pusat) dan Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan informasi dan data yang dibutuhkan masing-masing pihak terhambat
- Terbangunnya koordinasi yang baik dalam perencanaan antara Bapel RR dengan Pemerintah daerah, khususnya dengan Bappeda sebagai penanggung jawab dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan
- Tidak terbangunnya koordinasi dalam pelaksanaan termasuk tidak adanya proses pelaporan kegiatan/program antara Bapel dengan Pemda, sehingga Pemda tidak mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekosntruksi di wilayah bencana
- Koordinasi pelaksanaan antara Bapel RR dengan Donor/NGO dilaksanakan hanya satu arah dalam bentuk penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan penganggaran oleh Donor/NGO kepada Bapel RR melalui Operation Center BRR yang dipublikasikan di Recovery NAD and Nias Database (RAND). Donor melaksanakan kegiatan langsung kepada masyarakat

Konsultasi :

- Masih lemahnya konsultasi dengan kalangan masyarakat secara luas dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dan program rehabilitasi dan rekonstruksi (seperti yang terjadi pada belum tepatnya pemberian bantuan kapal kepada para nelayan di Lampulo)
- Partisipasi masyarakat masih sangat kurang di tingkat perencanaan, baik melalui penyusunan program, kegiatan, dan anggaran, pelaksanaan serta pengendalian kegiatan dan program rehabilitasi dan rekonstruksi
- Partisipasi masyarakat pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh K/L dan Pemda dan donor/NGO melalui pelatihan sampai kepada pelaksanaan teknis lebih banyak dilaksanakan (sebagai contoh pelatihan bagi para usia kerja yang masih menganggur)
- Tingkat pelibatan/partisipasi masyarakat pada proses perencanaan dan pelaksanaan di bawah koordinasi Bapel BRR hanya pada tingkat sosialisasi dan pelibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

Kapasitas :

- Perlunya melakukan penyesuaian antara jumlah pegawai, kapasitas pegawai dan latar belakang pendidikan harus disesuaikan dengan jumlah beban/pekerjaan yang harus BBR emban (seperti yang terjadi pada satker kelautan dan perikanan)
- Pelaporan di BRR dilakukan setiap sebulan sekali, namun lambat pelaporan perkembangan terbaru pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pembangunan di daerah yang bersangkutan (seperti yang terjadi Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata)

- Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi ini yang tidak terlepas dari aspek peraturan perundangan yang dijadikan sandaran hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan di lapangan
- Perlunya penyederhanaan dalam administrasi pemberian bantuan agar prosedur administrasi tidak berbelit-belit (sebagai contoh Terhambatnya Pembangunan Gedung Pengepakan oleh ADB)

* Kesimpulan

- Rencana Induk sebagai dasar kegiatan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak seluruhnya dapat diimplementasikan di lapangan karena disesuaikan dengan skala prioritas pelaksanaan, kondisi lapangan, sangat tergantung dari kapasitas SDM pelaksana, dan tergantung dari pencairan dana
- Rencana Strategis BRR kurang definitif serta kurang memiliki gambaran lengkap terkait dengan program, kegiatan, anggaran, lokasi, periode pelaksanaan pembangunan
- Fokus dalam Renstra lebih kepada pembangunan fisik dan kemudahan pelaksanaan, tidak berbasis keterpaduan program kegiatan dan penyelesaian masalah atau pemenuhan kebutuhan masyarakat secara komprehensif
- Secara umum, koordinasi antar pelaksana program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi belum terlaksana secara baik dalam mekanisme yang tertata sistematis, khususnya antara BRR dengan Pemerintah Daerah
- Masih lemahnya konsultasi dengan kalangan masyarakat secara luas dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dan program rehabilitasi dan rekonstruksi terutama pada bidang pemulihan perekonomian
- Rencana Induk sebagai dasar kegiatan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak seluruhnya dapat diimplementasikan di lapangan karena disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan, kondisi lapangan, kapasitas dan kemapuan SDM pelaksana, serta ketersediaan sumber dana.
- Rencana Strategis BRR kurang definitif dan kurang memiliki gambaran lengkap terkait dengan program, kegiatan, anggaran, lokasi, periode pelaksanaan pembangunan.
- Rencana Strategis lebih didominasi pembangunan fisik dibandingkan kegiatan non fisik. Disamping itu, Rencana Strategis belum berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara komprehensif.
- Koordinasi dan mekanisme kerja antar pelaksana program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi belum terlaksana secara baik (khususnya antara BRR dengan Pemerintah Daerah).
- Konsultasi publik belum dilakukan secara intensif baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dan program

rehabilitasi dan rekonstruksi terutama pada bidang pemulihan perekonomian.

- Keterlambatan pekerjaan di lapangan disebabkan tindakan kehati-hatian dalam mencegah terjadinya peluang KKN.

* Rekomendasi

- Revisi terhadap Rencana Induk direkomendasikan. Perlu dirumuskan mekanisme dan prosedur dalam proses perubahan Rencana Induk yang dapat mendorong percepatan proses pemulihan di daerah bencana
- Perlunya melakukan konsolidasi antar pelaku atau aktor rehabilitasi dan rekonstruksi baik dalam *perencanaan* maupun *pelaksanaan* sehingga adanya kesepakatan sesama stakeholders tentang “Acuan Utama” kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD-Nias
- Evaluasi perlu dilakukan terhadap proses penyusunan perencanaan sampai dengan perencanaan di setiap bidang pemulihan, mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera dikoordinasikan, disinkronkan, ditetapkan, diputuskan, dikembangkan, untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2007
- Perlunya Sosialisasi Blue Print melalui Pemerintah Daerah (Bappeda) baik kepada Dinas dan masyarakat juga, agar keberlanjutan dengan program reguler setelah BRR selesai masa tugasnya dapat dijaga
- Diperlukan penyempurnaan Rencana Strategis dan Rencana Aksi yang dapat menjembatani antara dokumen Rencana Induk yang bersifat makro dan pelaksanaan yang sangat mikro
- Revisi terhadap Rencana Induk perlu dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas daerah. Recana Induk harus menjiwai Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
- Perlu dirumuskan mekanisme dan prosedur dalam proses perubahan Rencana Induk yang dapat mendorong percepatan proses pemulihan di daerah bencana. Disamping itu perlu disusun *time-frame* yang jelas
- Perlunya melakukan konsolidasi antar pelaku atau aktor rehabilitasi dan rekonstruksi baik dalam *perencanaan* maupun *pelaksanaan* sehingga adanya kesepakatan sesama stakeholders tentang “Acuan Utama” kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD-Nias.
- Evaluasi perlu dilakukan terhadap proses penyusunan perencanaan sampai dengan perencanaan di setiap bidang pemulihan, mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera dikoordinasikan, disinkronkan, ditetapkan, diputuskan, dikembangkan, untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2007
- Perlunya Sosialisasi Blue Print melalui Pemerintah Daerah (Bappeda) baik kepada Dinas dan masyarakat juga, agar keberlanjutan dengan program reguler setelah BRR selesai masa tugasnya dapat dijaga.

- Diperlukan penyempurnaan Rencana Strategis dan Rencana Aksi yang dapat menjembatani antara dokumen Rencana Induk yang bersifat makro dan pelaksanaan yang sangat mikro.
- Perlunya pemberdayaan wanita dalam meningkatkan ekonomi produktif.
- Perlu adopsi dan penyesuain terhadap Keppres Nomor 80.
- Perlu juga membahas containt laporan secara mendalam selain context (untuk P3 RIRRWANS)

* Rencana Tindak Lanjut Bersama

- Penyusunan kebijakan dan program oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BRR, Donor/NGO, dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas, untuk percepatan pemulihan sendi-sendi kehidupan masyarakat NAD dan Nias-Sumut
- Penyempurnaan sistem dan mekanisme pada proses dan prosedur perencanaan dan pelaksanaan Keberlanjutan
- Reposisi peran dan kewenangan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BRR, Donor/NGO, dan masyarakat luas, untuk percepatan pemulihan sendi-sendi kehidupan masyarakat NAD dan Nias-Sumut
- Penyiapan bagi keberlanjutan program dan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta asset pasca BRR ke dalam program-program pembangunan Pemerintah Daerah.
- Penyempurnaan terhadap Rencana Induk, Rencana Strategis, dan Rencana Aksi, untuk mengakomodasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias
- Peningkatan koordinasi diantara stakeholder (BRR, K/L, Pemda dan Donor/NGO) yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, terutama koordinasi antara BRR dan Pemda
- Konsultasi secara intensif dan pelibatan masyarakat secara luas dalam penyusunan kebijakan dan program oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BRR, Donor/NGO, yang dituangkan dalam kerangka regulasi dan kerangka pembiayaan (investasi).
- Penyempurnaan sistem, mekanisme dan prosedur perencanaan dan pelaksanaan untuk menjamin keberlanjutan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- Reposisi peran dan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BRR, Donor/NGO, dan masyarakat luas, untuk percepatan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- Inventarisasi dan transformasi asset Pasca BRR ke dalam program-program pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk menjamin keberlanjutan program.
- Penyempurnaan terhadap Rencana Induk, Rencana Strategis, dan Rencana Aksi, untuk mengakomodasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias.

- Peningkatan koordinasi diantara stakeholder (BRR, K/L, Pemda dan Donor/NGO) yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, terutama koordinasi antara BRR dan Pemda
- Mensupport *special planning* (green belt) yang kepemilikan tanahnya tidak jelas.

B. Diskusi Kelompok Bidang Pemuilihan Perekonomian

1. Bapak Sofyan, Dinas Kehutanan Provinsi NAD
   - Kehutanan termasuk komponen dalam pertanian. Tetapi dalam Realisasi 2006 tidak menyentuh bidang kehutanan. *Paradigma baru kehutanan sekarang adalah pemanfaatan kehutanan pada masyarakat atau hutan kemasyarakatan*. Pada tahun 2006 ada kegiatan penghijauan terkait dengan pembagian 5 batang kepada tiap kepala keluarga yang terdiri dari tanaman buah-buahan, bunga-bungaan dan tanaman kehutanan seperti jati, dll. Juga penanaman mangrove yang krisis dan rusak parah terkena tsunami. Contoh ada pembibitan mangrove di Lhong dan mulai nampak di sepanjang Ulee Lheu, Lhong Raya, Keudah, Syiah Kuala juga Meulaboh yang ke arah Aceh Jaya. Pada tahun 2007, difokuskan pada penanaman mangrove ini. Karena menurut blue print juga menyebutkan adanya 2 zona yaitu zona aman dan juga zona pemukiman.
   - Rekomendasi : Mengenai evaluasi yang dikoordinir Bappeda agar dilengkapi jadwalnya waktu dan kapan laporan tiap bulan disampaikan agar tidak terlalu makro. Perlu diatur juga mekanisme pelaporan dari BRR yang tepat waktu dan akurat sesuai jadwal.
2. Bapak Yusriadi, Dinas Pariwisata Provinsi NAD
   - Pengelolaan masih kurang karena alokasi dana masih difokuskan pada Pariwisata di Sabang daripada daerah lain yang terkena bencana baik Aceh Jaya (tidak ada alokasi dana), Aceh Besar dan Simeulue (ada alokasi dana).
   - Dalam pelaksanaan kegiatan secara kelembagaan kurang dilibatkan. Mengenai laporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi didapat bukan pada Dinas melainkan pada satker BRR Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Provinsi NAD.
3. Ibu Nur Aini, Dinas Perkebunan Provinsi NAD
   - Kemajuan kegiatan Dinas ini selain pemulihan tanaman padi dan bakau juga ditambah adanya pembangunan sarana kantor, pengadaan kendaraan.
   - Harapan kedepan bahwa dalam membangun masyarakat harus ada keterkaitan/kerjasama antara Dinas Perkebunan dengan Dinas Perindustrian sehingga dalam mengolah hasil perkebunan seperti Kelapa Rakyat di Aceh Singkil sehingga dapat dipasarkan minimal ke daerah-daerah sekitar Provinsi NAD.

4. Ibu Rahma Iryanti, Ketua Pokja Pemulihan Perekonomian

   - Kehutanan dalam blue print masuk ke bidang SDA bukan ekonomi, sehingga hal ini akan dilihat dan di cek kembali.
   - Untuk masukan Dinas Perkebunan akan diperhatikan baik oleh BRR juga akan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.

5. Bapak Yusya Abubakar, BRR bidang pertanian

   - Perlu adanya revisi atau penyempurnaan pada rencana induk agar kedepannya dapat mencakup kegiatan yang dibutuhkan di lapangan dengan mengkoordinasikan pada lembaga terkait seperti Pemda, Donor dan masyarakat agar sesuai dengan permintaan kebutuhan di lapangan. Rencana Induk sebagai dasar kegiatan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak seluruhnya dapat diimplementasikan di lapangan karena disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan, kondisi lapangan, kapasitas dan kemampuan SDM pelaksana, serta ketersediaan sumber dana.

6. Bapak Ali, BRR-Perencanaan Ekonomi

   - Menanggapi kurangnya koordinasi dengan Pemda. Hal ini perlu mendapat suatu perbaikan karena semua program-program yang diusulkan yang dijalankan oleh Kedeputian Ekonomi berdasarkan Rapat Koordinasi Daerah Lintas Dinas terkait dan linta Kabupaten. Dalam rapat koordinasi yang dimunculkan bukan yang ada dalam rencana induk tetapi kondisi riil di lapangan.
   - Perlunya dilakukan revisi rencana induk. Di rencana induk contohnya di bidang Koperasi dan UKM yang menekankan pada pembangunan fisik, ternyata juga diusulkan di perdagangan sebagai contoh pembangunan pasar. Dalam kedeputian, pasar ditangani oleh perdagangan, sedangkan koperasi menekankan pada pemberian modal melalui lembaga keuangan mikronya. Begitu juga dalam bidang perindustrian, rencana induk hanya menekankan dalam pembangunan lab dan sarana baristan tetapi pada di lapangan menekankan pada pengembangan sentra-sentra produksi. Kemudian sesuai koordinasi perlunya pengembangan sentra-sentra produksi.

7. Pak Zulkifli, Bappeda Sabang

   - Pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dari daerah maupun BRR ke pusat sudah tepat waktu sehingga realisasi fisik dan keuangan (berikut kendala/permasalahan dapat diketahui) dapat dinilai kesesuaiannya dengan yang diharapkan.
   - Perlu pensinergian antara Bapel RR, satkernya, BAPPEDA dan Pemda atau instansi setempat lainnya. Perlu memfokuskan pada keberlanjutan program-program dari BRR (baik pengadaan sarana maupun prasarana) kepada daerah terkena bencana yang memerlukan bantuan.
   - Perlu adanya sistem dan mekanisme pemeliharaan tanaman penghijauan demi keberlangsungan penghijauan tersebut baik penanaman mangrove juga tanaman lainnya.

- Perlu adanya kestabilan ekonomi demi mencegah munculnya konflik-konflik di masyarakat yang mengancam reintegrasi.
- Perlunya pemberian informasi program rehabilitasi dan rekonstruksi di 2007 ke seluruh Dinas dan instansi terkait dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan sampai dengan desa.

8. Pak Eka Chandra Buana, BAPPENAS

- Perlunya masukan lebih lanjut mengenai revisi rencana induk agar sesuai dengan kebutuhandi lapangan atau perlu diadakannya sinkronisasi antara rencana induk dengan renstra BRR.

9. Ibu Rahma Iryanti, Ketua Pokja Pemulihan Perekonomian BAPPENAS

- Perlu konfirmasi lebih lanjut mengenai program dan kegiatan yang ada dalam rencana induk baik antara kementerian lembaga/ departemen terkait dengan pemerintah daerah dikomunikasikan dengan bappenas.

10. Bpk. Said Faisal, Deputi Ekonomi dan Usaha BRR

- Lamban dalam tender ulang bukan dari segi kapasitas tapi penyebab utamanya yaitu BRR anti dengan KKN. Apabila ada indikasi tender yang ada unsur KKN, langsung di cut sehingga terjadi kelambatan dalam tender.
- Lamanya proses penentuan beneficiary, bila berbicara mengenai lembaga keuangan mikro, memang harus dilihat dulu apa kebutuhan beneficiaries tersebut. Ditambah mencari 40.000 beneficiary bukan hal cepat dan mudah.
- Perlu adanya standar pengukuran progress/kemajuan realisasi fisik (key performance indicator) untuk jenis bantuan bersifat non fisik. Progress penyerapan fisik itu sulit dinilai pada saat melakukan pemberian bantuan non fisik seperti pemberian modal kerja dengan sistem swakelola masyarakat contohnya penanaman mangrove. Berbeda halnya dengan pemberian bantuan fisik seperti perumahan yang dapat dinilai progress realisasi fisiknya.
- Pembuatan rencana tidak akurat dan berubah-ubah karena BRR memiliki pendekatan berbasis masyarakat (memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat).
- Kurangnya koordinasi timbul karena sebenarnya belum ada suatu standarisasi (key performance indicator) mengenai koordinasi yang baik itu seperti apa. Sedangkan koordinasi dengan kata lainnya “eye center”, penilaian koordinasi tidak baik muncul karena penilaian individu terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Perlu diluruskan kembali bahwa koordinasi adalah alat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus dinilai secara obyektif yaitu untuk membangun kembali NAD-Nias menjadi lebih baik dari saat sebelumnya.
- Berkaitan dengan konsultasi, tantangannya adalah persepsi atau ekspektasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memakan waktu cukup lama.

- Perlunya melihat dan mensinergikan kembali apakah rencana induk sudah menjiwai UUPA. Agar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk merevisi atau tidaknya rencana induk.
- Perlunya fleksibiltas dalam rencana induk dengan tidak melihat batas-batas wilayah namun tetap mengutamakan pembangunan kembali daerah yang terkena bencana. Contoh: untuk Memajukan kopi di Lhokseumawe kalau sentra ekonomi di Aceh tengah tidak dikuatkan maka kegiatan ekonomi akan terganggu.
- Perlunya peran aktif Departemen-departemen terkait dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah-daerah yang tidak terkena tsunami, ketika BRR sendiri fokus kepada daerah terkena tsunami.
- Perlunya penyederhanaan dalam administrasi pemberian bantuan. Contoh: bantuan ADB yang terhambat karena masuk mekanisme on budget (masuk kedalam dana APBN) ditambah juga policy ADB sendiri.

11. Bapak Mulyadi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NAD
    - Adanya pembangunan tempat pendaratan ikan (TPI) Sabang, pelabuhan pendaratan ikan yang terkena tsunami seperti di Aceh Jaya, Pidie, Bireun, Sabang, Aceh Besar ada 2 yaitu Lampulo dan Lambada.
    - Perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan menjembatani kebutuhan masyarakat sektor kelautan dan perikanan dengan lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan mikro lainnya.
12. Ibu Rahma Iryanti, BAPPENAS
    - Menanggapi Bapak Mulyadi bahwa tahun 2008 program pemberdayaan masyarakat akan dijadikan program nasional pemberdayaan masyarakat.
13. Bapak Moh. Yamin, BRR Regional II-LS
    - Perlunya program pemberdayaan wanita dalam meningkatkan ekonomi produktif baik dengan pemberian modal usaha melalui LKM
    - Perlunya dibuat suatu unit usaha koperasi untuk mendukung kegiatan ekonomi salah satunya dalam hal penyediaan pupuk .
14. Bapak Djoko Wasono, BRR Pengembangan Usaha
    - Pemberian bantuan modal bergulir
    - Pembangunan 1 unit BLK di Lhokseumawe dan 1 unit di Banda Aceh
    - Rehabilitasi kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi NAD
    - Tahun 2007 akan dilakukan regionalisasi di BRR (menjadi 6 region)
    - Perlunya perbaikan sistem dan mekanisme perekrutan personil satker, sebagai contoh untuk personil untuk pelelangan diharapkan yang sudah memiliki sertifikasi guna menhadapi beban pekerjaan pelelangan.

- Perlu dibuat terobosan-terobosan mengenai Kepres No. 80 tahun 2003 yang dianggap menghambat kegiatan pelelangan.

15. Bapak Agus Halim, BRR Perikanan

- Perlu adanya percepatan pembebasan lahan seluas 52 Ha untuk pelabuhan perikanan.
- Perlunya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias agar dapat mempercepat recovery/pemulihan ekonomi. Dan ini perlu didukung oleh special planning dari masing-masing daerah.
- Perlunya peran dari Pusat dan perlu diciptakannya peraturan-peraturan demi percepatan pemulihan perekonomian.

16. Bapak Jeliteng Pribadi, Setwanrah BRR

- Perlunya adanya pelibatan para stakeholder seperti donor/NGO dalam diskusi guna mendapat masukan-masukan mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias.
- Perlunya perencanaan BRR mnjadi pondasi pembangunan ekonomi jangka panjang sebagai fundamental pola pikir yang dapat digunakan sebagai pijakan daerah-daerah lain.

17. Ibu Rahma Iryanti, BAPPENAS

- Perlunya perbaikan dan pemberian kemudahan bagi iklim investasi terutama dalam hal kepabeanan dan perijinan.

18. Bapak Eka Chandra Buana, BAPPENAS

- Menurut peraturan pemerintah, tidak diharuskannya sertifikasi bagi para personil pelelangan sampai akhir 2006. Mulai tahun 2008 baru diharuskan adanya sertifikasi tersebut.
- Perlunya dicari solusi mengenai lembaga keuangan mikro yang dari segi aturan agak rumit karena bentuknya B3K (Bukan Bank Bukan Koperasi) yang berbenturan dengan UU No.10 tentang perbankan juga dengan koperasi.

19. Bapak Said Faisal, Deputi Ekonomi dan Usaha BRR

- Ada dua hal yang menjadi pijakan dalam rekomendasi. Yang pertama, masuknya rehabilitasi dan rekonstruksi kedalam fase pembangunan berkelanjutan yang menjadi suatu titik pengambilan keputusan penting. Tahun 2007 masuk pada pemantapan peletakan pondasi-pondasi ekonomi dan pendekatan-pendekatannya pada kualitas dan sustainabilitas baik program dan kegiatan.
- Perlunya adaptasi antara pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan UUPA (undang-undang pemerintahan Aceh) agar tidak terjadi benturan-benturan di kemudian hari.

3.5 RESUME PEMBICARA DAN PEMBAHAS, SERTA HASIL DISKUSI KELOMPOK BIDANG PEMULIHAN KELEMBAGAAN DAN REINTEGRASI MANTAN GAM

A. Paparan Ketua Pokja Kelembagaan oleh Deddy Koespramoedyo

* Isu dan Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan :

1. Saat ini beberapa gedung pemerintahan masih menggunakan gedung sementara, karena 1) Menunggu penempatan lokasi kantor berdasarkan RDTR; 2) Pembebasan tanah yang belum ada kepastian; 3) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik tidak mencukupi
2. Rekruitmen SDM aparatur yang sudah dilaksanakan belum mencukupi dari segi jumlah dan kompetensi
3. Landasan hukum (Perpu) tentang Penanganan Permasalahan Hukum belum disahkan hingga Desember 2006.
4. Tinjauan Evaluasi & Analisis 4K (Konsistensi, Koordinasi, Konsultasi, Kapasitas)

* Tinjauan Evaluasi & Analisis 4 K (Konsistensi, Koordinasi, Konsultasi, Kapasitas)

KONSISTENSI

1. Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan

Renstra BRR bidang kelembagaan dan hukum sebagian besar sudah mengacu kepada Rencana Induk (namun tidak seluruhnya). Contoh pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintahan terjadi perbedaan perencanaan yaitu total pembangunan yang direncanakan BRR mencapai 1.821 unit, yaitu 3 kali lipat dari rencana pembangunan yang telah ditetapkan Rencana Induk sebanyak 549 unit, dan Lokasi pembangunan oleh BRR mencakup 1 Provinsi dan 21 Kabupaten/Kota. Sedangkan pada Rencana Induk mencakup 1 Provinsi dan 12 kabupaten/kota.

2. Konsistensi Antar Perencanaan dengan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan di lapangan sering berubah dari rencana awal karena kondisi yang dinamis di lapangan, terutama pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintahan dan instansi vertikal (hukum)

3. Konsistensi Antar Pelaksana

Pelaksanaan yang dilakukan oleh BRR dan Donor/NGO bersifat saling melengkapi yaitu pada pembangunan/rehabilitasi Kantor Desa/Kelurahan/Kecamatan serta pelatihan aparatur pemerintah daerah terutama bidang perencanaan, penganggaran, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, dan kelembagaan

KOORDINASI

Koordinasi antar pelaksana program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi belum terlaksana secara baik dalam mekanisme yang tertata sistematis, baik antar BRR dengan Satkernya, maupun BRR dengan Pemerintah Daerah

Dalam contoh pembangunan sarana dan prasarana terdapat pembagian peran di antara para stakeholder tersebut.

* Pemda menyediakan lahan untuk pembangunan kantor baru,
* Donor/NGO memberikan bantuan dalam pembangunan kantor yaitu Kantor kecamatan/Kelurahan/Desa serta memberikan bantuan peralatan kantor pemerintahan,
* BRR membangun sebagian Kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa, Kantor/ Dinas/Badan, Pendopo/Meuligo, Rumah Dinas Camat, dan bale musyawarah/kantor mukim. Dengan adanya bantuan Donor/NGO ini tentunya akan membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi lebih cepat tercapai.

KONSULTASI

* Partispasi masyarakat sangat minim karena bidang kelembagaan dan hukum lebih banyak melibatkan aparatur Pemda dibandingkan masyarakat.
* Aspek perencanaan yang melibatkan masyarakat di bidang kelembagaan, misalnya dalam pembangunan kantor kecamatan/desa yang melibatkan kepala desa/ketua kampung dalam musyawarah tingkat desa.
* Berdasarkan Laporan Pengawas pada bulan Juni 2006, diketahui bahwa:
    - Forum komunikasi antara Pemda dan masyarakat tidak dibangun di daerah bencana. Partisipasi masyarakat lebih didorong oleh lembaga berbasiskan masyarakat, sedangkan peran lembaga agama, adat, dan sosial masih lemah
    - Program peningkatan kapasitas mukim agar lebih responsif dan profesional belum mendapat perhatian yang semestinya. Kegiatan yang melibatkan mukim dan kepala desa lebih dalam bentuk single event, bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan

KAPASITAS

* Pelaporan di BRR dilakukan setiap sebulan sekali, namun tidak ada pelaporan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pembangunan di daerah yang bersangkutan
* Keterlambatan pencairan DIPA, dan SDM yang terbatas à menyebabkan kinerja Satker terhambat
* Sinergi antari BRR kepada Pemda à keterlibatan BRR akan menurun, berganti dengan peran Pemda yang semakin besar dalam menjalankan reformasi

* Pelaksanaan capacity building bagi aparatur Pemda merupakan salah satu cara dalam *Exit Strategy* apabila BRR telah habis masa tugasnya pada tahun 2009

* Kesimpulan

  - Rencana kerja BRR di lapangan sering berubah, karena disesuaikan dengan skala prioritas pelaksanaan, kondisi lapangan, tergantung dari kapasitas SDM pelaksana, dan pencairan dana.
  - Adanya konsistensi antar pelaksana pembangunan satker, pemda, dan donor, dimana antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya cukup banyak yang saling melengkapi, walaupun antara pelaksanaan dan perencanaan tidak konsisten.
  - Koordinasi antar pelaksana program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi belum terlaksana secara baik dalam mekanisme yang tertata sistematis
  - Masih lemahnya konsultasi dengan kalangan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dan program rehabilitasi dan rekonstruksi
  - Kinerja Satker, selain tergantung dari kondisi lapangan, masalah peraturan dan perundangan dan keterlambatan pencairan DIPA, sangat tergantung pula dari Sumber Daya Manusianya

* Rekomendasi

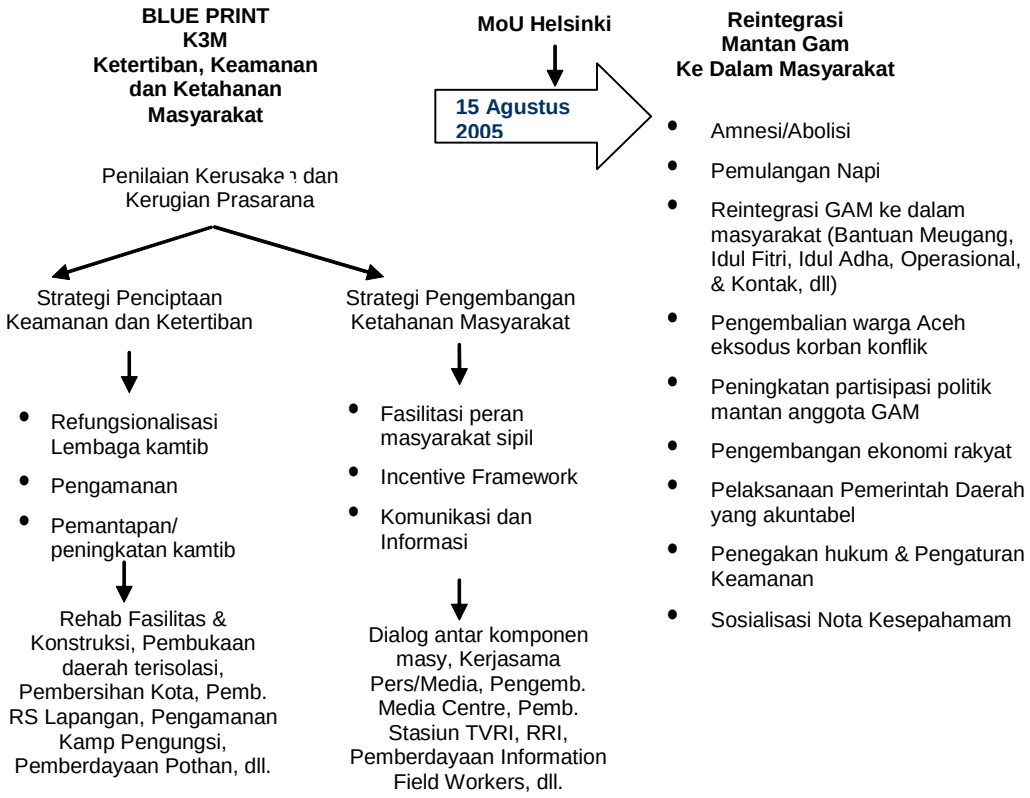
  - Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan di antara para stakeholder rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias
  - Penentuan prioritas kegiatan dari Rencana Induk yang juga sesuai dengan Renstra BRR (yang tidak bermasalah)

* Rencana Kerja Tindak Lanjut Bersama

  Penyiapan keberlanjutan program dan peningkatan koordinasi, melalui:

  - Inventarisasi aset bidang kelembagaan
  - Identifikasi kompetensi SDM dari segi kemampuan teknologi, kebutuhan dalam pelayanan, pendidikan, dll
  - Identifikasi permasalahan pembangunan sarana berdasarkan
    a. Tanah yang bermasalah,
    b. Daerah yang belum ada RDTR nya,
    c. Tanah/Lokasibelum tersedia
  - Peningkatan frekuensi dialog musrenbang tingkat mukim, kecamatan, dan kab/kota.

B. Paparan Ketua Pokja Reintegrasi Mantan GAM oleh Rd. Siliwanti



Tabel 3.
Pemetaan Program/Kegiatan

* Pemetaan Program/ Kegiatan [1]

K3M	REINTEGRASI MANTAN GAM
- Pembangunan Mapolda, Mapolsek, Rumah Dinas dan Asrama Polri di NAD-Nias	- Pengawasan Supervisi dan konstruksi
- Dukungan Operasi, BBM, Satgas, Rendalops, Minops dan Supervisi untuk Polda NAD dan Sumut	- Pengiriman Pendampingan ke setiap Kab/Kota
- Pemeliharaan Personel, Werving, Diklat, Biro Pers Polda NAD-Sumut.	- Mendorong Mantan TNA menjadi TNI/Polri
Pelaksana : Satker Sdelog, Satker Sdeops, Satker Sdesdm Polri NAD-Nias	- Pembentukan Forum Bersama *Pelaksana: Korbid Polhukam BRA, Polda NAD, Kemenko Polhukam*
- Pemberdayaan Sosial	- Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan dalam Bentuk Bantuan Sosial (Diyat)
- Pembinaan Kerjasama Luar Negeri/ Internasional·	- Bantuan Pemberdayaan Ekonomi bagi Korban Konflik, Mantan TNA, Pemantauan terhadap pemberian Jaminan Sosial bagi korban konflik
- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	- Kesekretariatan dan Kerjasama Luar Negeri
- Operasi intelijen strategis dan pembinaan persandian *Pelaksana :* Satker Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Nasionalal NAD-Nias	*Pelaksana:* Korbid Ekonomi, Sosbud BRA, Kemenko Kesra

* Pemetaan Program/ Kegiatan [2]

K3M	REINTEGRASI MANTAN GAM
- Pembuatan Buku Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan - Menyelenggarakan, Sarasehan, Seminar, Penyuluhan, dan Kampanye Damai - Pembangunan Kantor Dinas Infokom, TVRI dan RRI - Rehabilitasi Pemancar RRI di Banda Aceh, Lamteumen dan Indrapuri - Rehabilitasi Stasiun TVRI Transmisi Banda Aceh, Meureudu, Geumpang, Meulaboh. *Pelaksana :* Satker Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan Informasi NAD-Nias - Pengadaan alat-alat pendukung khusus, kenderaan berat, alpasus zeni, pembangunan mako, rumah dinas, asrama, - Pengembangan Materil, Rendalwas, Pembangunan Lanud, Satrad dan Detasemen. - Pengadaan dan Perawatan Alpal laut, Senjata dan Amunisi, dan Renovasi Dermaga, Lanal, dan Sarpras. *Pelaksana :* Satker Pengembangan Pertahanan Matra Darat, Matra Udara, dan Matra Laut. - Pkt Alat Penanggulangan Bencana, Kaporlap TNI. - Pkt Alat Angkut Utama, Alat Berat, Alat Bantu Bencana dan Kerusuhan *Pelaksana :* Satker Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias	- Penyusunan Buku Petujuk Teknis dan Pelaksanaan - Penyusunan Pedoman dan Kriteria Korban Konflik - Sosialisasi Nota Kesepahaman RI-GAM - Workshop Sosialisasi Program Reintegrasi bagi Mantan GAM *Pelaksana :* Korbid Sekretariat BRA, Kemenko Kesra, Depsos - Mendorong Mantan TNA menjadi TNI/Polri - Pembentukan Forum Bersama *Pelaksana:* Korbid Polhukam BRA, Kodam Iskandar Muda

* Isu dan Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Keterlambatan administrasi
2. Satker sangat berhati-hati dalam pengadaan barang dan jasa (mengakibatkan keterlambatan)
3. Komunikasi dan koordinasi di lapangan di antara para stakeholder
4. Masih terbatasnya pelibatan partisipasi masyarakat secara langsung.
5. Mantan TNA belum mengenali sistem birokrasi yang ada
6. Keterlambatan pendataan dan penyusunan kriteria korban konflik
7. Keterlambatan penyaluran bantuan bagi korban konflik dan mantan TNA (masalah pencairan)
8. Pembangunan struktur BRA di Kab/Kota
9. Kapasitas BRA yang belum memadai untuk memverifikasi proposal kegiataan yang diusulkan.

* Tinjauan Evaluasi & Analisis 4 K (Konsistensi, Koordinasi, Konsultasi, Kapasitas)

Konsistensi

1. Antar Dokumen Perencanaan

Beberapa program dalam rencana BRR tidak mengacu seluruhnya kepada Rencana Induk. Hal ini dapat dimengerti karena ketika menyusun Rencana Induk waktunya sedikit, data dan informasi terbatas, tidak cukup punya waktu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemda dan masyarakat NAD yang waktu itu sedang mengalami kesulitan. Dan juga perkembangan keadaan/kondisi sosial kemasyarakatan begitu dinamis pasca Tsunami, yang kemudian direspon oleh BRR dan kemudian dituangkan kedalam rencananya.

- Kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah sebesar Rp 175.079.000.000 tidak ditampung dalam rencana aksi Bapel RR, hal ini dikarenakan adanya kesepakatan damai antara GAM dengan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Hal ini sebagaimana tercantum dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD-Nias.
- Pembangunan Rumah Sakit Lapangan Polri tidak tercantum di dalam Rencana Induk. Tetapi Rumah Sakit Lapangan TNI/Dephan sesuai rencana induk.
- Salah satu contoh kegiatan yang sama antara rencana induk dengan rencana BRR seperti pembangunan Mapolda NAD, pembangunan kantor dan rumah dinas Dilmil 101, rehabilitasi Lanud Maimusaleh, Satrad 233 Sabang, Satrad 231 Lhokseumawe.

Untuk kegiatan ketahanan masyarakat, banyak program mengacu kepada rencana induk, seperti incentive framework, pembangunan karakter bangsa dan menanamkan rasa cinta tanah air, pemberdayaan masyarakat sipil, membangun jaringan dan sarana/prasarana komunikasi.

Rencana Kerja SKPD belum menyesuaikan dengan Rencana Induk. Pada pelaksanaan program reintegrasi, tidak ditemukannya adanya konsistensi hal ini dikarenakan Rencana Induk telah terlebih dahulu dibuat sebelum peristiwa MoU Helsinki terlaksana.

Donor USAID tidak pernah memperhatikan rencana induk ataupun rencana aksi BRR ataupun rencana pemda yang sudah disusun. Salah satu kegiatan untuk mencapai perdamaian di NAD adalah dengan membentuk Yayasan seperti antara lain di Lhokseumawe yang mengalami hambatan karena mendapatkan ancaman dari KPA.

Kantor Menko Polhukam mendasarkan kegiatannya pada rencana BRR dan juga BRA dan MoU Helsinki terutama untuk sosialisasi dan monev.

2. Dokumen Rencana dengan Pelaksanaan

K3M

- Beberapa kegiatan menunjukkan konsistensi yang cukup baik, seperti pembangunan kantor dan rumah dinas Dilmil. Demikian juga dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat sipil benar-benar dapat dilaksanakan walaupun pelaksanaannya mengalami berbagai kendala, misalnya identifikasi ormas yang sangat jauh dari lokasi dimana masyarakatnya diberdayakan.
- Terdapat juga ketidakkonsistenan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaanya di lapangan, misalnya pengembangan incentive framework yang pelaksanaannya berbeda dengan apa yang dimaksudkan di dalam rencana induk dan rencana aksi BRR.

Reintegrasi Mantan GAM

- Adanya Konsistensi yang cukup antara yang diprogramkan oleh BRA dengan kegiatan Kesbang Linmas - Bank Dunia, dan beberapa lembaga donor lainnya, termasuk juga NGO.
- Misalnya UNDP mendukung kegiatan Pilkada agar tepat waktu.
- Kemenko Polhukam mendorong sosialisasi MoU dan UU PA.
- Pemda mendorong pendirian partai lokal

3. Antara Pelaksana

K3M

Belum sepenuhnya terjadi konsistensi untuk mendukung terlaksananya rencana, baik itu Rencana Induk maupun rencana aksi yang disusun BRR karena memang masing-masing stakeholder memiliki fokus dan orientasi yang berbeda. Hal ini terlihat ketika menyusun rencananya masing-masing. Mungkin terkait dengan belum adanya Renstra BRR yang dapat diacu.

Reintegrasi Mantan GAM

Terdapat konsistensi yang baik di antara para stakeholder dalam mendukung pelaksanaan rencana antara Pemda, K/L terkait, Donor dan NGO.

Koordinasi

1. Dalam Penyusunan Rencana

K3M

- Antara Bappenas, K/L, Bapel RR, Pemda dan donor/NGO berlangsung dengan cukup baik.
- Secara internal, BRR secara kontinyu melakukan rapat Tripartite (Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana).
- Bappeda pada tahun 2005 pernah menyusun rencana aksi pada level Provinsi dan Kab/Kota. Namun status dokumen tersebut tidak jelas implementasinya. BRR tidak menggunakan rencana aksi yang disusun oleh Bappeda tersebut.

- BRR untuk tahun 2006 melaksanakan survey dan desk study untuk menggali informasi baik primer dan sekunder.
- Untuk Donor USAID dalam penyusunan rencana melakukan koordinasi yang sangat terbatas sekali terutama dengan pihak Pemda. Mereka hanya melakukan pertemuan dengan BRR, BRA (terbatas) dan donor lainnya. Sehingga terdapat persoalan dalam sustainabilitynya.

Reintegrasi Mantan GAM

Kordinasi dilakukan secara intensif antara BRA dengan:

- Bappenas tentang anggaran.
- Depsos dalam teknik penyaluran bantuan
- Kemneko POlhukam terkait dengan pelaksanaan sosialisasi Nota Kesepahaman
- Kemenko Kesra Kesra terkait dengan pemantauan dan pemberian jaminan sosial
- Lembaga donor World Bank dan UNDP ikut terlibat dalam rapat interdep anggaran BRA di Jakarta.

2. Dalam Pelaksanaan

K3M

- Kurang intensif karena letak sebagian satker tidak berada di Provinsi NAD.
- Di wilayah pantai Barat Selatan menunjukkan bahwa antara Bapel RR dengan Pemda NAD koordinasinya belum berjaan dengan baik. Hal ini antara lain ditandai dengan tidak adanya laporan pelaksanaan oleh Bappeda maupun Dinas sebagai leading agency.
- Begitu pun BRR dengan K/L yang antara lain ditandai dengan tidak dilaksanakannya program pendataan penduduk NAD dan NIAS oleh Satker BRR karena sudah diaksanakan oleh BPS.
- Antara Pemda dan USAID tidak melakukan koordinasi dalam pelaksanaannya. Pihak pemda tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh USAID. Begitu pun dengan Bupati/Kota yang rakyatnya memperoleh bantuan USAID.

Reintegrasi Mantan GAM

- Berjalan dengan baik melalui koordinasi dengan Pemda Kab/Kota untuk pendataan, demikian juga dengan donor/NGO.
- BRA dan BRR belum ada Koordinasi yang baik secara langsung berkaitan dengan program reintegrasi tersebut.

Konsultasi

1. Tingkat Partisipasi Dengan Masyarakat

- Pelibatan masyarakat apda tingkat sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan rehab dan rekons.

- K/L melibatkan peran dan partisipasi masyarakat pada program pelatihan dan pengembangan SDM untuk mengidentifikasi terhadap penilaian kebutuhan di lapangan.
- UNDP melibatkan masyarakat pada seminar penguatan personil Polri di Sekolah Kepolisian Negara Seulawah dalam rangka penguatan refungsionalisasi kelembagaan Polri
- USAID melibatkan masyarakat pada penyusunan rencana yang merupakan hasil identifkasi kebutuhan masyaraka oleh anggota masyarakat itu sendiri.
- Sedangkan untuk reintegrasi mantan GAM, konsultasi dilakukan pada penyusunan rencana dan pelaksanaannya. Hal ini diwujudkan dlm mengidentifikasi nilai kebutuhan pelaksanaan program, kriteria korban dan pelaksanaan program di lapangan.
- Mendapat dukungan dari KPA, IOM dan PPK.

2. Media Partisipasi Masyarakat Secara Langsung

- Untuk reintegrasi disediakan Forum Bersama dan pengiriman pendamping yang telah terlatih ke setiap kabupaten/kota dalam rangka sosialisasi program reintegrasi (untuk menyerap aspirasi dan sosialiasi).
- Untuk K3M media partisipasi masyarakat langusng belum tersistem dengan baik antara lain melalui Forum Pertemuan dan Forum Konsultasi Publik melalui TVRI, RRI dan program Bimbingan TEkonologi dan Pengembangan Wasbang.
- Prinsipnya terjangkau, dipahami pentingnya media dan mudah.

3. Ketersediaan Dan Kemudahan Akses Informasi Bagi Publik

- BRR memiliki tabloid Seumangat
- RAN Data Base sedikit sekali informasi tentang Bidang K3M.
- Ada Form Pengaduan dari masyarakat melalui media cetak dan elektronik dan tabloid Seumangat dan Ceureumen.
- BRA masih menggunakan akses BRA KAb/Kota sebagai sarana konsultasi dan pengaduan tentang informasi yang berkembang selama proses integrasi.

Kapasitas

1. Kelembagaan
    - Satker-satker melakukan pengendalian, pegawasan dan pelaksanaan dengan cukup baik.
    - Pelaporan untuk beberapa satker tidak tepat waktu, misalnya untuk satker TNI dan Polri harus berkoordinasi dengan pusat. Untouchable satker.
    - Infokom lebih mudah untuk dipantau oleh BRR.

- Kelembagaan BRA terkait sistem pelaporan, struktur dan tatakerja masih mengikuti SK Gubernur.
- BRA diawasi oleh K/L dan lembaga donor. Hal ini mendorong kapasitas kelembagaan yang meningkat.

2. Sumber Daya Manusia

- LSM Gerak menyampaikan bahwa proses rekrutmen tidak terbuka dan transparan. Tidak ada fit dan proper test. Masyarakat tidak memperoleh informasi mengenai kriteria menjadi anggota/staf BRR.
- Satker di bidang K3M sulit dilakukan kontrol kinerjanya.
- Untuk BRA, perekrutan dilakukan dengan penempatan pegawai dari dinas kesbang linmas kab/kota. Dinas tersebut melaksanakan program reintegrasi tersebut.

* Kesimpulan

K3M	REINTEGRASI MANTAN GAM
- Belum sepenuhnya kegiatan di bidang K3M yang terdapat di Rencana Induk terimplementasi dalam proses Rehabilitasi dan Rekontruksi NAD-Nias - Secara umum koordinasi belum berjalan dengan cukup intensif. - Terbatasnya partisipasi masyarakat (di tingkat konsultasi) mulai dari Perencanaan hingga Pelaksanaan Program/ Kegiatan di bidang K3M - Terbatasnya media partisipasi masyarakat. Namun media yang ada saat ini sudah cukup baik - Belum adanya mekanisme dan sistem kinerja Kelembagaan (perekrutan, sistem kerja) yang transparan dalam penempatan dan pemanfaatan SDM dalam mendukung program/kegiatan.	- Program yang dengan baik sesuai butir-butir Pelaksanaan Reintegrasi mantan GAM ke dalam Masyarakat berdasarkan amanat dari MoU Helsinki - Belum adanya koordinasi secara langsung dengan baik antara BRA dengan BRR. - Partisipasi masyarakat telah berlang-sung dengan baik pada tingkat Pelak-sanaan dan tingkat Perencanaan. - Belum Terbuka dalam Sistem dan Mekanisme kelembagaan di BRA (perekrutan, penempatan SDM) secara khusus masih menggunakan sistem birokrasi Pemda.

* Rekomendasi

K3M	REINTEGRASI MANTAN GAM
- Perlu adanya penyesuaian rencana program/kegiatan dengan kebutuhan di lapangan - Re-Evaluasi terhadap sistem koordinasi mulai dari pemegang kebijakan tertinggi hingga satker pelaksana dilapangan dan melaksanakan komitmen penyelenggaraan koordinasi - Peningkatan peran aktif dan pasrtisipasi masyarakat penerima manfaat dalam setiap tahapan Rekonstruksi dan Rehabilitasi di bidang K3M - Transparansi dalam mekanisme dan sistem kerja. Sehingga tidak adal agi muncul istilah *Untouchable Satker.*	- Berkonsentrasi dengan seluruh program yang telah disusun agar tetap sesuai dengan amanat dari MoU Helsinki - Agar meningkatkan koordinasi secara lebih intensif dengan seluruh stake-holders yang turut serta dalam pembangunan Provinsi NAD - Maksimalisasi terhadap peran *Forum Bersama* untuk mendapatkan solusi dalam rangka penyelesaian masalah yang muncul - Mendorong peran aktif setiap BRA Kab/Kota dalam sosialisasi, pendam-pingan dan percepatan pelaksanaan program dan anggaran.

* Tindak Lanjut

K3M	REINTEGRASI MANTAN GAM
- Perlu adanya revisi lebih lanjut terhadap Rencana Induk khususnya di bidang K3M - Merehab sistem koordinasi antar seluruh stakeholder pelaksana kegiatan di bidang K3M dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias - Menciptakan sebuah mekanisme/sistem kerja khusus, dalam rangka peningkatan profesionalisme kerja pelaksana Reha-bilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias khususnya Program/Kegiatan di bidang K3M dengan mengikutsertakan peran aktif seluruh elemen masyarakat.	- Keberlanjutan dan percepatan pelak-sanaan program/Kegiatan Reintegrasi - Adanya program khusus bagi korban trauma pasca bencana dan konflik - Percepatan pengadaan lahan usaha bagi korban yang telah dikategorikan dalam kriteria penerima bantuan - Koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh stakeholders dalam perenca-naan dan pelaksanaan program - Pemberdayaan peran seluruh BRA Kab/Kota dalam pelayanan bagi korban konflik .

C. Paparan Ketua BRA, Bapak Yusny Saby

Rencana ke depan Koordinator Bidang Eknomi

- Penyusunan jadwal kunjungan lapangan untuk seluruh bisnis mantan TNA
- Mapping (siapa melakukan apa dan dimana) dengan bantuan Forbes
- Pelibatan pimpinan BRA untuk sosialisasi dengan program PPK
- Pertemuan dengan pimpinan GAM (untuk memastikan distribusi tahap kedua
- Pengajuan usulan agar masa berakhir anggaran 2006 dari bulan Desember diperpanjang s/d maret atau mei 2007
- Pengajuan dana 7 milyard untuk pendampingan bisa menjadi dana operasional PPK
- Telah tentang bantuan untuk cacat korban konflik sejumlah 2000 orang yang masing-masing memperoleh 10 juta agar tidak tumpang tindih dengan bantuan pemberdayaan ekonomi

D. Diskusi Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Reintegrasi Mantan GAM

1. Bapak Iqbal, BRR
   - Data pada paparan Bappenas terkait dengan jumlah bangunan fisik yang dibangun dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yang perlu di

update. Perbedaan perencanaan antara Rencana Induk dengan BRR dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

1. Kebutuhan real di daerah yang jauh lebih besar,
2. Keterlibatan lembaga pengguna untuk mengusulkan perencanaan pembangunan lembaga tersebut,
3. Situasi sosial politik dipengaruhi oleh UU Pemerintahan Aceh mempengaruhi pembangunan sarana prasarana kantor pemerintahan (mukim dan gampong), sehingga bergeser dari rencana induk.

- Mengenai koordinasi antara BRR dengan Pemda dalam laporan bulanan BRR diserahkan ke Pemerintah daerah, belum diketahui mekanismenya. Belum tau pastinya, tp dalam waktu 2 tahun ini sedang diperbaiki koordinasinya, misalnya merancang suatu perencanaan kerjasama dengan Bappeda.; 2) Regionalisasi BRR merupakan suatu konsep organisasi dan distrik untuk meningkatkan koordinasi BRR ke lapangan (kabupaten/kota) dan meningkatkan koordinasi dengan Pemda.
- Kendala utama yang terjadi di lapangan di bidang kelembagaan

1. Terkait dengan pembebasan tanah. Walaupun sudah terdapat pembagian peran diantara Pemda, BRR dan Donor, namun tidak berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan hingga TA 2006 terutama untuk mengatasi tanah lokasi kantor insansi vertikal, dalam hal ini Pemda juga lepas tangan, hal ini kemudian diurus oleh BRR
2. RDTR yang belum diterbitkan., padahal banyak program pembangunan di Calang dan Sigli. Gedung-gedung yang sudah mendapat bantuan memang terhambat gara-gara belum mendapatkan dokumen RDTR. Sebagai contoh Kabupaten Aceh Timur Raya sudah ada RDTR nya. Untuk wilayah kehancuran seperti Sigli, bangunan kantor dapat digeser sedikit lokasi bangunannya.
3. Sampai sekarang BRR belum menerima Perpu tentang Penanganan Permasalahan Hukum, walaupun koordinasi sudah dilakukan melalui pertemuan BRR dengan Menteri Bappenas dan tokoh Aceh, dan didapatkan solusi bahwa diharapkan awal tahun depan Perpu tersebut sudah dapat disahkan.

2. Bapak Syaiful Sahman, BRR

- Koordinasi memang belum terlaksana dengan baik, dan ini memang harus segera ditingkatkan.
- Pelaporan kepada Pemerintah daerah, kami bekerja sama dengan Dians terkait. Semua yang terkait dengan pelaporan kami koordinasikan dengan Dinas. Mungkin yang menjadi masalah adalah format laporan.
- Keterlambatan pencairan DIPA memang merupakan salah satu

penyebab lambatnya kinerja lambat BRR, dan diharapkan hal ini tidak akan terjadi lagi

- *Exit strategy* sudah dipikirkan oleh BRR yaitu peranan BRR semakin lama akan berkurang. BRR harus selektif dalam menentukan bidang-bidang mana yang harus didahulukan untuk kepentingan kemajuan di Aceh. Dari Action Strategy salah satunya melalui transfer asset, kami bekerja sama dengan Deputi Keuangan BRR pada Direktorat *asset management*. Tujuan dari asset management ini adalah untuk menjamin keberadaan aset, proses transfernya adalah Satker menyerahkan kepada BRR, kemudian dari BRR akan diserahkan kepada pengguna. Sebagai informasi satker yang pertama kali melakukan transfer aset adalah Satker Matra Darat.
- Kerjasama antara BRR dengan Satker TNI dan Polri sudah terjalin dengan sangat baik sekali, dari sisi pelaporan mereka mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh BRR, dan tidak ada istilah perlakuan khusus untuk mereka. Semuanya telah terbuka.
- Kapasitas SDM yang belum transparan, hal ini sepertinya tergantung darimana melihatnya. Permasalahan yang dihadapi adalah kebutuhan SDM yang mendesak, sehingga kami banyak yang merekrut PNS yang sudah berpengalaman. Apabila diiklankan melalui media tidak terlalu banyak membantu.

3. Bapak Abniran, BRR

- Untuk BRR Regional 3 kami selalu memberikan pelaporan ke Bappeda, sebagai contoh di Kabupaten Aceh tengah sudah dilakukan pertemuan sebanyak 21 kali, di Bener Meriah sebanyak 17 kali, dan di Gayo Lues sebanyak 14 kali. Tujuan pertemuan ini untuk meningkatkan koordinasi antara BRR dan Pemda setempat.
- Bagaimana peran pemda (program yang telah dilaksanakan) terhadap penanganan korban paska bencana dan konflik. Wadah seperti apa yang telah dipersiapkan oleh Pemda dalam penyelesaian masalah seperti ini.
- Mempersoalkan tentang nama dari "*Reintegrasi Mantan GAM*", bila benar-benar ini adalah inisiatif dari pemerintah pusat atau pemda untuk memperbaiki citra dari mantan GAM, hendaknya nama tersebut tidak dipergunakan lagi.
- Percepatan dan kejelasan dari program reintegrasi ini , hendaknya dilaksanakan secara transparan. Seperti bantuan untuk bantuan dana, program penyediaan lahan kerja, dan pembangunan rumah kembali bagi korban konflik.

4. Bapak Sufirmansyah, Bappeda NAD

- Untuk dana diyat (dana santunan sosial) untuk masyarakat Provinsi NAD sudah ada alokasi dari APBD yaitu Tahun 2002, bantuan untuk korban konflik sebanyak 25,5 M, Tahun 2003 sebanyak 18,7 M, Tahun 2004 sebanyak 34,9 M, dan tahun 2005 sebanyak 19,5 M.

- Demikian juga dengan pembangunan rumah pengganti bagi korban konflik, diprogramkan untuk tahun 2006 dapat selesai terbangun sebanyak 2000 unit rumah.
- Koordinasi dengan BRR yaitu telah dibentuknya Sekretariat Bersama khusus bidang perencanaan, kami buat satu atap di Bappeda.
- Mengenai sinkronisasi kegiatan di antara BRR, BRA, dan Pemda belum terjalin dengan baik.

5. Bapak Ahmad Ridwan, Bappeda NAD

Koordinasi memang belum transparan. Dalam pembuatan rencana induk melibatkan Pemda dari awal hingga akhir, namun sekarang dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kurang melibatkan Pemda.

6. Bapak Deddy, Bappenas

Kinerja BRR yang lambat mungkin dikarenakan waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang begitu singkat. Internasional juga ingin terlibat dan diperlukan adanya kesepakatan antar kabupaten/kota dan juga tingkat pusat.

7. Bapak Ari, YIPD

- Evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi ini akan dijadikan bahan rekomendasi. Mohon diperhatikan BRR sudah ada komitmen untuk memberikan perannya kepada Pemda. Apabila melihat ke depan agenda apa yang akan kita lakukan, harus melihat pembagian peran diantara BRR, Pemda maupun donor/internasional. Jadi yang kegiatan yang belum terlaksana dapat diagendakan menurut lokasi (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa). Fokuskan pada berbagi peran, sehingga semua orang dapat mengetahuinya dan tidak terjadi tumpang tindih.
- Bappenas perlu semacam satu unit khusus di bidang perencanaan pembangunan, dikhawatirkan sistem SPPN tidak sesuai dengan di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memudahkan Aceh, kami dari NGO di bidang kelembagaan mengharapkan adanya kerjasama dengan Pemda.

8. Bapak Deddy, Bappenas

Bappenas telah memberi pelatihan kepada daerah, namun tidak ke dalam unit khusus. Dengan adanya UU SPPN, kami berupaya meningkatkan kapasitas perencanan berupa pelatihan ke daerah, namun bukan dalam unit khusus.

9. Bapak Yusny Saby, BRA

- Mempertegas kembali bahwa realisasi anggaran untuk tahun 2006 sebesar 593 Miliar telah mencapai tahap akhir dari realisasi.
- Mengharapkan adanya anggaran khusus dari BRR untuk program reintegrasi

- Tahun 2008 direncanakan merupakan akhir dari masa pelaksanaan program Reintegrasi sebagaimana yang diamanatkan dalam MoU Helsinki dan selesainya tugas dari Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA). Diharapkan perjalanan dari pelaksanaan program ini dapat mencapai target/kelompok-kelompok sasaran, serta program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana semua.
- Untuk keberlanjutannya, nantinya akan diserahkan dibawah wewenang Pemerintah Daerah.

10. Bapak Syaiful, BRR

Sebagai tambahan, kami di bidang kelembagaan sebenarnya sudah sepakat untuk mulai meningkatkan koordinasi yaitu antara Satker BRR bidang kelembagaan dengan Pemda-Pemda di masing-masing kabupaten/kota

11. Bapak Ari, YIPD

Laporan dari kecamatan/desa mengenai kondisi masing-masing wilayah sebaiknya harus terus berjalan. Peningkatan koordinasi tersebut tercipta melalui adanya forum kecamatan. Kami sendiri di lapangan sudah membantu camat untuk dapat memberikan laporan masing-masing daerah kepada Asisten I Sekda mengenai apa saja yang terjadi di daerahnya. Diharapkan data dari BRR dan daerah akan bertemu di Sekretariat Bersama dan akan terjadi sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.

3.6 RUMUSAN KESEPAKATAN LOKAKARYA

A. Diskusi Panel Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias: *Membangun Sinergi Menuju Pemulihan Berkelanjutan*

HASIL MONITORING DAN EVALUASI: ANALISA FOKUS 4-K (Konsistensi, Koordinasi, Konsultasi, dan Kapasitas)

ASPEK KONSISTENSI

- *BRR dalam strategi dan pelaksanaan* rehabilitasi dan rekonstruksi telah berupaya mengacu kepada Rencana Induk, namun demikian sebagian program/kegiatan yang dilaksanakan banyak yang disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat lapangan.
- *RENSTRA yang disusun oleh Bapel BRR* seharusnya dapat menjadi dokumen pelengkap terhadap Rencana Induk, dan diharapkan mampu menjabarkan secara lebih rinci Rencana Induk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di tingkat lapangan, namun saat ini dokumen RENSTRA masih bersifat makro dan belum menggambarkan perencanaan kegiatan per bidang secara rinci, serta masih kurang memberikan perhatian kepada persyaratan dasar rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya dengan

belum diacunya RTRW, belum diperhatikannya pengurangan resiko bencana, dan belum diperhatikannya penyelesaian masalah tanah

- Dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang pada tahun 2005 juga dilakukan oleh *K/L*, pada umumnya mengacu dan konsisten dengan Rencana Induk, khususnya di bidang pemulihan perekonomian, walaupun laporan pelaksanaannya masih sangat minim. Sedangkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh *Pemda,* hanya sebagian yang konsisten dengan Rencana Induk, yang khususnya di bidang perekonomian, lebih terfokus pada bantuan modal non fisik.
- *Perbedaan antara rencana kebutuhan pendanaan dan realisasi* alokasi anggaran pada tahun 2005 dan 2006, alokasi pendanaan yang dituangkan dalam RKA Bapel BRR menunjukkan jumlah anggaran yang pada beberapa program kegiatan tertentu melebihi jumlah kebutuhan dalam Rencana Induk, serta belum diakomodasikannya kebutuhan rehabilitasi di 6 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang ada di dalam Rencana Induk
- *Sebagian besar realisasi anggaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Donor* lebih kecil dibandingkan komitmen awalnya, khususnya komitmen donor di bidang infrastruktur transportasi dan perumahan yang masih relatif rendah.

ASPEK KOORDINASI (Koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan)

- Koordinasi yang tertata dan sistematis antar pelaku kegiatan belum terlaksana baik, seperti belum terciptanya mekanisme koordinasi perencanaan antara BRR dengan Pemda dan Kementerian/Lembaga, sehingga kerap menyebabkan tumpang tindih antarkegiatan, kurang terakomodasinya kebutuhan lokal, dan kekuatiran terhadap keberlanjutan pembangunan pasca BRR.
- Mekanisme koordinasi internal antara Bapel BRR dengan satker belum didukung dengan pembinaan kepada satker pelaksana, dan belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme koordinasi pengawasan secara internal oleh masing-masing satker pelaksana.
- Koordinasi Bapel BRR dengan Donor/NGO, masih relatif dilaksanakan satu arah melalui laporan pelaksanaan kegiatan dan penganggaran oleh donor/ NGO kepada Bapel BRR melalui Operation Center BRR dan dipublikasikan di RAND, sehingga belum memadai dalam mendukung perencanaan kegiatan maupun lokasi.
- Koordinasi dalam pemulihan bidang K3M antara Bapel BRR, K/L, Pemda, sudah berjalan dengan baik dengan dukungan proses komunikasi intensif serta keterlibatan satker di Pusat.
- Kurangnya koordinasi dalam arti tindak lanjut hasil klarifikasi temuan antara Dewan Pengarah/Dewan Pengawas BRR, termasuk antara satuan anti korupsi dengan Satker Pelaksana.
- Rintisan forum koordinasi perencanaan reguler dan sistematis antara Bapel BRR dengan Pemerintah Daerah, diharapkan dapat merupakan tahap awal strategi peralihan (exit strategy) khususnya bagi Bappeda, selaku

penanggung jawab koordinasi perencanaan pemulihan pasca BRR dalam konteks pembangunan daerah secara berkelanjutan.

ASPEK KONSULTASI

Tingkat Partisipasi

1. *Perencanaan partisipatif* dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat desa (*village planning*), kurang optimal untuk bidang pemulihan lainnya, baik melalui penyusunan program, kegiatan, dan anggaran, pelaksanaan serta pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. *Partisipasi masyarakat* lebih didorong oleh lembaga NGO berbasiskan masyarakat dengan fokus kepada pelatihan-pelatihan. Khususnya di bidang perumahan.
3. *Peran lembaga agama, adat, dan sosial* masih relatif lemah dan belum mendapat perhatian. Kegiatan yang meliibatkan mukim dan kepala desa lebih dalam bentuk single event, bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan.

Media Patisipasi

1. *Media partisipasi masyarakat baru dilakukan pada beberapa sektor tertentu* dan belum tertata dalam suatu sistem: Musyawarah di sektor agama, pendidikan, dan kebudayaan, forum bersama (FORBES) reintegrasi GAM sebagai media partisipasi masyarakat yang terkena dampak konflik, serta forum CEPP untuk lingkungan hidup.
2. Upaya Bapel BRR dalam pelibatan pelaku terkait dan Pemerintah Daerah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi melalui *Sekretariat Bersama (Sekber*) yang dirintis di wilayah Nias, dan terus dikembangkannya *forum CFAN (Coordination Forum for Aceh and Nias) oleh donor dan LSM*, serta *Regionalisasi BRR* sejak pertengahan 2006 sangat positif untuk dapat mendorong pelibatan masyarakat lokal lebih aktif.

Akses terhadap Informasi

Akses informasi tidak langsung yang disediakan BRR dan Donor untuk masyarakat melalui Internet dan Tabloid Seumangat, belum didukung dengan kualitas informasi yang disediakansecara reguler.

ASPEK KAPASITAS

BRR sendiri menggambarkan kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, yang tergantung dari kondisi lapangan, mekanisme dan prosedur, masalah peraturan perundangan, dan SDM aparatur pelaksana.

Mekanisme dan Prosedur

- Bapel BRR belum melaksanakan *sistem pelaporan* reguler dan tersistem, khususnya yang diketahui Pemda dan kementerian/

lembaga, baik pada perencanaan, pelaksanaan berdasarkan indikator yang ditetapkan.

- Laporan kegiatan dan realisasi anggaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dipublikasikan Bapel BRR, belum menggambarkan kegiatan rinci yang transparan sesuai kebutuhan masyarakat sasaran kegiatan, secara luas, termasuk laporan Donor/NGO yang dikelola dalam RAN Dbase.
- *Mekanisme koordinasi* antarunit dalam lingkup Bapel BRR sendiri belum tegas, yang terutama diakibatkan dengan restruktisdasi kelembagaan Bapel yang terjadi belakangan ini. Masih sangat kurangnya koordinasi dan komunikasi pengambil kebijakan antara pelaksana, yang diwujudkan melalui pembekalan teknis dari kebijakan dan program menuju kegiatan, dan pengendalian dalam proses pelaksanaannya
- *Mekanisme Bapel BRR pada satker terkait K3M*, yaitu pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan sudah berjalan lebih baik, dengan koordinasi langsung satker dengan Mabes TNI dan Mabes Polri. *Kapasitas kelembagaan BRA yang terkait Reintegrasi GAM* mudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah karena mekanisme kelembagaan seperti pelaporan, struktur organisasi, dan tatakerja, masih mengikuti standar birokrasi pemerintah daerah

Sistem Pengawasan

- *Peran Satuan Pengawas Internal* telah dibentuk untuk melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan belum signifikan, ditambah belum adanya mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan secara berkesinambungan yang mencakup pengawasan kinerja maupun keuangan.
- *Keberadaan Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas BRR* belum diperankan dan ditindaklanjuti secara utuh. Rapat-rapat koordinasi tripartit internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti, khususnya terkait dengan (a)percepatan penyelesaian perundangan, (b)pengendalian dan pengawasan pelaksanaan, (c)maksimalisasi pelibatan masyarakat, dan (d)pelibatan Pemda untuk keberlanjutan pembangunan daerah
- Belum adanya *sistem pengawasan langsung dari masyarakat* yang berkepentingan atau terpengaruh dampak langsung rehabilitasi dan rekonstruksi.

Regulasi dan Peraturan

- *Banyak permasalahan peraturan perundangan* yang belum terbit, dan kurang efektifnya koordinasi internal BRR serta Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatannya, menghambat proses percepatan pemulihan

- *Kebijakan dan peraturan teknis pelaksanaan program* rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias belum sepenuhnya sesuai dan kurang dikomunikasikan secara intensif kepada satker BRR

Sumber Daya Manusia

- *Kinerja Satker* terkendala oleh keterbatasan jumlah pegawai Satker, serta kualitas ragam latar belakang dan lingkup kerja satker sipil maupun swasta, yang tidak disertai indikator kinerja pelaksana untuk pelaksanaan program dan kegiatan
- *Proses rekrutmen* pegawai atau staf di Bapel RR belum sepenuhnya terbuka dan transparan.

REKOMENDASI (1)

Penyusunan kebijakan dan program pada tahun anggaran 2007, khususnya terkait RKA BRR

- Perlu terus ditingkatkan upaya koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan program melalui sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku.
- Perlunya konsolidasi antar pelaku, sehingga diperoleh kesepakatan tentang "Dokumen Acuan Utama" kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Evaluasi perlu dilakukan terhadap proses penyusunan perencanaan sampai dengan perencanaan di setiap bidang pemulihan, mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera dikoordinasikan, disinkronkan, ditetapkan, diputuskan, dikembangkan, untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2007 dan seterusnya hingga 2009.

REKOMENDASI (2)

Sistem dan mekanisme proses dan prosedur perencanaan dan pelaksanaan untuk percepatan pelaksanaan RIRRWANS

* Disepakati perlunya mekanisme yang membangun sinergitas antar pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD dan Nias:

- Perlu peningkatan koordinasi yang sinergis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, di setiap aspek dan bidang pemulihan, demi mencegah adanya tumpang tindih, sinkronisasi dan penciptaan proses saling melengkapi antar pelaku, serta menjaga tercapainya target penyelesaian.
- Diperlukan pengoptimalan peran forum-forum koordinasi antarstakholders oleh BRR, seperti Sekertariat Bersama di Nias, sebagai forum koordinasi perencanaan sampai pelaksanaan, dengan didukung dengan kemandirian kewenangan melalui regionalisasi Satker BRR.
- Perlu ditetapkan mekanisme koordinasi aktif internal antara Badan Pelaksana BRR, Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana yang

dapat segera menindaklanjuti berbagai permasalahan dengan tindak lanjut yang cepat dan memadai.

- Walaupun dalam struktur organisasi BRR telah melibatkan pemerintahan, namun tetap perlu dikembangkan mekanisme koordinasi dengan struktur pemerintahan.
- Adanya kendala-kendala dan kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta berbagai peraturan dan perundangan yang diperlukan perlu dikoordinasikan oleh Bapel RR secara reguler antara berbagai stakeholders Bapel, Pemda, Donor/ NGO,

* Perlu dikembangkan mekanisme transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat terkait hasil-hasil pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD dan Nas.
* Mekanisme dan prosedur perencanaan dan pelaksanaan perlu ditetapkan bersama antara Bapel BRR, Pemda, K/L, dan lembaga donor/ NGO, pem terdapat acuan bersama yang dijadikan tolok ukur koordinasi dan sinergitas, termasuk sumber data dan informasi serta pelaporan.

REKOMENDASI (3)

Peran dan kewenangan Pemerintah Pusat, BRR, Pemda, Donor/ NGO untuk percepatan pelaksanaaan RIRRWANS

* Pemerintah Pusat aktif dalam penyusunan kebijakan_perencanaan dan mendorong berbagai peraturan yang diperlukan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk percepatan PERPU PErtanahan dan masalah orang asing.
* Peran Dewan Pengawas dan Dewan Pengarah BRR perlu lebih dikedepankan dalam tripartit dengan Bapel RR, melalui kegiatan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi, yang berkelanjutan dan tersistem dengan upaya penyempurnaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
* Bapel BRR perlu melakukan :
  - koordinasi dan konsolidasi dengan Pemda, K/L dan Donor/NGO secara aktif dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pelaksanaan pemantauan dan pengendalian
  - penguatan kapasitas SDM termasuk satker BRR di wilayah NAD dan Nias dalam kerangka regionalisasi BRR
* Pemda secara aktif perlu:
  - Mengoptimalkan upaya dan hasil koordinasi dengan Bapel BRR dan satker BRR, NGO dan Donor, melalui forum-forum koordinasi, sekretariat bersama, dan proses penyusunan perencanaan
* Donor/NGO diharapkan :
  - membangun koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan berbagai *stakeholders*

- mempublikasikan secara luas kepada masyarakat tentang aspek perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan

REKOMENDASI (4)

Keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam program-program pembangunan Pemerintah Daerah

* Bapel BRR telah menyusun dan memulai *exit strategy* atau setelah berakhirnya tugas BRR di wilayah bencana, yang dapat dimulai dengan pelibatan aktif Pemda dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan melalui:
  - Fasilitasi analisa kebutuhan perencanaan dan penyusunan rencana perubahan, termasuk mengidentifikasi dan mempersiapkan kegiatan fisik dan non-fisik dalam mengantisipasi pelimpahan aset kepada Pemda dan K/L;
  - Fasilitasi membangun jarungan kerjasama dengan berbagai stakeholders terkait bidang pemulihan
  - Pembinaan dan pelatihan melalui tenaga-tenaga ahli di berbagai bidang pemulihan

REKOMENDASI (5)

Penyempurnaan Rencana Induk, Rencana Strategis, dan Rencana Aksi, khususnya untuk mengakomodasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias

* Hal yang terpenting dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD dan Nias adalah adanya konsistensi antara Rencana Induk, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Tahunan.
* Perlu alternatif penyusunan kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan semua stakeholders rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah NAD dan Nias:
  – peluang untuk penyempurnaan Rencana Strategis yang dapat menjembatani antara dokumen Rencana Induk yang bersifat makro dan pelaksanaan yang mikro.
  – evaluasi bersama Rencana Aksi sebagai menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangan masing-masing mulai tahun 2007.
  – Rencana Strategis dan Rencana Aksi (dalam bentuk rencana kerja tahunan) diharapkan disusun secara terkoordinasi, sehingga dapat menjadi dokumen perencanaan yang menjadi "Acuan Bersama" semua stakeholders dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

B. Bidang Pemulihan Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup

Kesimpulan dan Rekomendasi

No	Topik	Isu/ Permasalahan	Pemecahan/ Penyelesaian	Rencana Tindak Lanjut
1	Perencanaan pemulihan	Infrastruktur - Pembebasan tanah yang berlarut larut karena sulit mencapai kesepakatan ganti rugi tanah	Infrastruktur - Forum multi stakeholders dalam menyepakati mekanisme dan prosedur ganti rugi yang dipimpin langsung oleh Pemda terkait	Infrastruktur Pelibatan dan peningkatan kesadaran masyarakat, cenderung menganggap dana rehab rekon berlimpah, tentang mekanisme dan prosedur
		Perumahan - Integrasi perencanaan pembangunan perumahan dengan prasarana sarana dasar pendukung	Perumahan - Standar perencanaan permukiman yang terintegrasi	Perumahan - Penyusunan standar perencanaan permukiman yang terintegrasi
		- Kelayakan perencanaan lokasi perumahan	- Penyesuaian rencana lokasi perumahan dengan alokasi peruntukan lahan pada rencana tata ruang wilayah	
		- Kualitas perumahan yang dibangun	- Perbaikan proses pemilihan dan pengawasan kontraktor-kontraktor kecil	
		Penataan Ruang - Konsistensi antara RTRW Kab/Kota dan g Village Planning	Penataan Ruang - Penyusunan RTRW kab/kota dengan pendekatan kecamatan	Penataan Ruang - Studi penyusunan RTRW kecamatan
		- Konsistensi penyusunan RTRW kedalam tingkat yang lebih detail	- Penjabaran RTRW prov. Kedalam RTRW kab/kota dan RTBL beberapa kawasan tertentu	- Penyusunan RTRW kab/kota dan RTBL
		- Pengesahan RTR dalam bentuk peraturan perundangan (qanun)	- Penyusunan draft Perda	- Proses legislasi
		- Peningkatan kapasitas Pemda dalam penataan ruang	- Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas	- Penyusunan prosedur dan mekanisme pengendalian pemanfaatan
		- Belum jelas wewenang dalam penataan ruang di berbagai tingkatan	Pelu penjelasan pembagian wewenang penataan ruang	- Koordinasi dan kesepakatan wewenang penataan ruang
		Pertanahan - Potensi konflik hukum dalam penerbitan sertifikat pengganti pasca bencana akan meningkat krn keterlambatan penerbitan Perpu Penanganan Permasalahan Hukum Pasca Bencana	Pertanahan - Akselerasi penerbitan peraturan perundangan penanganan permasalahan hukum pasca bencana	Pertanahan - Perlu upaya khusus di tingkat pusat untuk mempercepat penerbitan Perpu penanganan permasalahan hukum pasca bencana

No	Topik	Isu/ Permasalahan	Pemecahan/ Penyelesaian	Rencana Tindak Lanjut
2	Pencapaian realisasi	Infrastruktur - Keterbatasan APBD - Eksploitasi SDA material konstruksi terpusat pada wilayah tertentu yang sempit - Kesulitan berkoordinasi dengan sebagian donor dan LSM yang ada.	Infrastruktur - Alternatif pendanaan dan peningkatan partisipasi masyarakat - Perlu identifikasi sumber-sumber lain - Bappenas perlu mengambil langkah untuk lebih menjamin koordinasi antara BRR, Pemda, Donor/LSM, dan masyarakat	Infrastruktur - Mobilisasi dana bantuan dalam skim APBN (PHLN dan partisipasi masyarakat) - Administrasi bantuan masyarakat dalam rangka good gov. terutama akuntabilitas - Pertemuan koordinasi dengan Pemda, Donor/LSM
3	Tinjauan evaluasi dan analisis 4K	Konsistensi Secara prinsip langkah-langkah yang dilakukan dalam mengantisipasi isu dan permaslahan yang ada telah diupayakan konsisten dengan RI Koordinasi Perlu percepatan penguatan koordinasi sehingga perencanan dan pelaksanaan berbagai sektor terkait dilakukan secara terintegrasi. Di tingkat pusat perlu koordinasi untuk secara khusus menyelesaikan hambatan/permasalahan perpu penanganan permasalahan hukum pasca bencana Kosultasi Perlu peningkatan konsultasi terutama dalam upaya membangun pemahaman kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengakselerasi upaya rehab rekon Kapasitas Diperlukan upaya penguatan kapasitas terutama bagi Pemda dan masyarakat melalui pendampingan.		

Dilihat dari keempat aspek diatas yang perlu mendapat perhatian lebih adalah aspek Koordinasi, Konsultasi, dan Kapasitas:

- Masih diperlukannya peningkatan koordinasi dan penyamaan persepsi antara pemerintah pusat, daerah dan Bapel BRR tentang perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, dan pengelolaan hasil kegiatan rehab-rekon.
- Masih diperlukannya peningkatan kapasitas Pemda dalam penataan ruang serta peraturan untuk pengendalian pemanfaatan ruang.
- Perlu kejelasan dan kesepakatan kebih lanjut mengenai penjabaran kewenangan dalam penataan ruang di tingkat pusat
- Perlu upaya-upaya khusus dalam mempercepat penerbitan Perpu Penanganan Permaslahan Hukum Paska Bencana NAD-Nias

Rencana tindak lanjut bersama:

- Distribusi dan kelancaran penyediaan material konstruksi perlu ditingkatkan dengan tetap mempertimbangkan secara sungguh-sungguh daya dukung lingkungan;

- Meningkatkan integrasi pembangunan perumahan permukiman dengan pembangunan sarana dan prasarana dasar;
- Peningkatan koordinasi di tingkat pusat untuk mempercepat terbitnya Perpu Penanganan Permasalahan Hukum Paska Bencana NAD-Nias;
- Meningkatkan kesesuaian rencana tata ruang wilayah dengan rencana penatagunaan tanah;
- Memperjelas dan menyepakati lebih lanjut pengaturan kewenangan dalam penyusunan rencana tata ruang di berbagai tingkatan (Propinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan).
- Mempercepat mem-perda-kan / qanun RTRW sehingga dapat menjadi acuan yang lebih kuat dan pasti dalam proses rehab-rekon selanjutnya.

C. Bidang Pemulihan Sosial Budaya

Rumusan rekomendasi yang diperoleh dari hasil diskusi:

1. Pembagian peran dan fungsi masing-masing *stakeholders* secara jelas dan proporsional
2. Transparansi perencanaan dan pelaksanaan program dari Pemda dan BRR NAD – Nias
3. Meningkatkan koordinasi antara Pemda NAD dan BRR melalui :
    - Mengikuti MUSRENBANGDA
    - Melaksanakan sosialisasi program
    - Memperjelas program yang sudah ditentukan melalui workshop sekaligus untuk croschek kemungkinan tumpang tindih program antara *stakeholders*
4. Dewan Pengarah BRR NAD – Nias perlu lebih memperjelas arahan dalam menjalankan fungsinya.

D. Bidang Pemulihan Perekonomian

Rumusan yang diperoleh dari hasil diskusi Pokja Perekonomian:

1. Rencana Induk sebagai dasar kegiatan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak seluruhnya dapat diimplementasikan di lapangan karena disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan, kondisi lapangan, kapasitas dan kemampuan SDM pelaksana, serta ketersediaan sumber dana.
2. Koordinasi dan mekanisme kerja antar pelaksana program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sudah terlaksana secara baik (khususnya antara BRR dengan Pemerintah Daerah).
3. Keterlambatan pekerjaan di lapangan disebabkan tindakan kehati-hatian dalam mencegah terjadinya peluang KKN.

4. Pengelolaan kepariwisataan masih kurang karena alokasi dana masih difokuskan pada Pariwisata di Sabang daripada daerah lain yang terkena bencana baik Aceh Jaya (tidak ada alokasi dana), Aceh Besar dan Simeulue (ada alokasi dana).
5. Dalam pelaksanaan kegiatan secara kelembagaan dalam hal ini Dinas kurang dilibatkan. Mengenai laporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi didapat bukan pada Dinas melainkan pada satker BRR Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Provinsi NAD.
6. Kemajuan kegiatan Dinas Perkebunan ini selain pemulihan tanaman padi dan bakau juga ditambah adanya pembangunan sarana kantor dan pengadaan kendaraan operasional
7. Menanggapi kurangnya koordinasi dengan Pemda. Hal ini perlu mendapat suatu perbaikan karena semua program-program yang diusulkan yang dijalankan oleh Kedeputian Ekonomi berdasarkan Rapat Koordinasi Daerah Lintas Dinas terkait dan lintas Kabupaten. Dalam rapat koordinasi yang dimunculkan bukan yang ada dalam rencana induk tetapi kondisi riil di lapangan
8. Pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dari daerah maupun BRR ke pusat sudah tepat waktu sehingga realisasi fisik dan keuangan (berikut kendala/permasalahan dapat diketahui) dapat dinilai kesesuaiannya dengan yang diharapkan
9. Lamban dalam tender ulang bukan dari segi kapasitas tapi penyebab utamanya yaitu BRR anti dengan KKN. Apabila ada indikasi tender yang ada unsur KKN, langsung di cut sehingga terjadi kelambatan dalam tender.
10. Lamanya proses penentuan beneficiary, bila berbicara mengenai lembaga keuangan mikro, memang harus dilihat dulu apa kebutuhan beneficiaries tersebut. Ditambah mencari 40.000 beneficiary bukan hal cepat dan mudah.
11. Pembuatan rencana tidak akurat dan berubah-ubah karena BRR memiliki pendekatan berbasis masyarakat (memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat).
12. Kurangnya koordinasi timbul karena sebenarnya belum ada suatu standarisasi (key performance indicator) mengenai koordinasi yang baik itu seperti apa. Sedangkan koordinasi dengan kata lainnya “eye center”, penilaian koordinasi tidak baik muncul karena penilaian individu terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Perlu diluruskan kembali bahwa koordinasi adalah alat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus dinilai secara obyektif yaitu untuk membangun kembali NAD-Nias menjadi lebih baik dari saat sebelumnya.
13. Berkaitan dengan konsultasi, tantangannya adalah penggalian persepsi atau ekspektasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memakan waktu cukup lama.
14. Adanya Paradigma baru kehutanan sekarang adalah pemanfaatan kehutanan pada masyarakat atau hutan kemasyarakatan. Pada tahun 2006 ada kegiatan penghijauan terkait dengan pembagian 5 batang kepada tiap kepala keluarga yang terdiri dari tanaman buah-buahan, bunga-bungaan dan tanaman kehutanan seperti jati, dll. Juga penanaman

mangrove yang krisis dan rusak parah terkena tsunami. Contoh ada pembibitan mangrove di Lhong dan mulai nampak di sepanjang Ulee Lheu, Lhong Raya, Keudah, Syiah Kuala juga Meulaboh yang ke arah Aceh Jaya. Untuk Dinas Kehutanan pada tahun 2007, difokuskan pada penanaman mangrove ini.

Rekomendasi dari Pokja Perekonomian:

1. Revisi terhadap Rencana Induk perlu dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas daerah. Rencana Induk harus menjiwai Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
2. Perlu dirumuskan mekanisme dan prosedur dalam proses perubahan Rencana Induk yang dapat mendorong percepatan proses pemulihan di daerah bencana. Disamping itu perlu disusun *time-frame* yang jelas
3. Perlunya melakukan konsolidasi antar pelaku atau aktor rehabilitasi dan rekonstruksi baik dalam *perencanaan* maupun *pelaksanaan* sehingga adanya kesepakatan sesama stakeholders tentang “Acuan Utama” kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD-Nias.
4. Perlunya evaluasi yang dikoordinir Bappeda mengenai mekanisme pelaporan dari BRR yang tepat waktu dan akurat sesuai jadwal
5. Perlu adanya revisi atau penyempurnaan pada rencana induk agar kedepannya dapat mencakup kegiatan yang dibutuhkan di lapangan dengan mengkoordinasikan pada lembaga terkait seperti Pemda, Donor dan masyarakat agar sesuai dengan permintaan kebutuhan di lapangan. Rencana Induk sebagai dasar kegiatan program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak seluruhnya dapat diimplementasikan di lapangan karena disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan, kondisi lapangan, kapasitas dan kemampuan SDM pelaksana, serta ketersediaan sumber dana
6. Perlu pensinergian antara Bapel RR, satkernya, BAPPEDA dan Pemda atau instansi setempat lainnya. Perlu memfokuskan pada keberlanjutan program-program dari BRR (baik pengadaan sarana maupun prasarana) kepada daerah terkena bencana yang memerlukan bantuan.
7. Perlu adanya sistem dan mekanisme pemeliharaan tanaman penghijauan demi keberlangsungan penghijauan tersebut baik penanaman mangrove juga tanaman lainnya.
8. Perlu adanya kestabilan ekonomi demi mencegah munculnya konflik-konflik di masyarakat yang mengancam reintegrasi.
9. Perlunya pemberian informasi program rehabilitasi dan rekonstruksi di 2007 ke seluruh Dinas dan instansi terkait dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan sampai dengan desa.
10. Perlunya masukan lebih lanjut mengenai revisi rencana induk agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan atau perlu diadakannya sinkronisasi antara rencana induk dengan renstra BRR
11. Perlu konfirmasi lebih lanjut mengenai program dan kegiatan yang ada dalam rencana induk baik antara kementerian lembaga/departemen terkait dengan pemerintah daerah dikomunikasikan dengan bappenas

12. Perlunya melihat dan mensinergikan kembali apakah rencana induk sudah menjiwai UUPA. Agar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk merevisi atau tidaknya rencana induk.
13. Perlunya fleksibilitas dalam rencana induk dengan tidak melihat batas-batas wilayah namun tetap mengutamakan pembangunan kembali daerah yang terkena bencana. Contoh: untuk Memajukan kopi di Lhokseumawe kalau sentra ekonomi di Aceh tengah tidak dikuatkan maka kegiatan ekonomi akan terganggu.
14. Perlunya peran aktif Departemen-departemen terkait dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah-daerah yang tidak terkena tsunami, ketika BRR sendiri fokus kepada daerah terkena tsunami.
15. Perlunya penyederhanaan dalam administrasi pemberian bantuan. Contoh: bantuan ADB yang terhambat karena masuk mekanisme on budget (masuk kedalam dana APBN) ditambah juga policy ADB sendiri
16. Perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan menjembatani kebutuhan masyarakat sektor kelautan dan perikanan dengan lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan mikro lainnya
17. Perlunya program pemberdayaan wanita dalam meningkatkan ekonomi produktif baik dengan pemberian modal usaha melalui LKM
18. Perlunya dibuat suatu unit usaha koperasi untuk mendukung kegiatan ekonomi salah satunya dalam hal penyediaan pupuk.
19. Perlu adanya keterkaitan/kerjasama antara Dinas Perkebunan dengan Dinas Perindustrian sehingga dalam mengolah hasil perkebunan seperti Kelapa Rakyat di Aceh Singkil sehingga dapat dipasarkan minimal ke daerah-daerah sekitar Provinsi NAD
20. Perlunya perbaikan sistem dan mekanisme perekrutan personil satker
21. Perlu dibuat adopsi dan penyesuaian-penyesuaian mengenai Kepres No. 80 tahun 2003 yang dianggap menghambat kegiatan pelelangan
22. Perlunya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias agar dapat mempercepat recovery/pemulihan ekonomi. Dan ini perlu didukung oleh special planning dari masing-masing daerah.
23. Perlunya peran dari Pusat dan perlu diciptakannya peraturan-peraturan demi percepatan pemulihan perekonomian
24. Perlunya adanya pelibatan para stakeholder seperti donor/NGO dalam diskusi guna mendapat masukan-masukan mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias.
25. Perlunya perencanaan BRR dijadikan pondasi pembangunan ekonomi jangka panjang sebagai fundamental pola pikir yang dapat digunakan sebagai pijakan daerah-daerah lain dalam membangun.
26. Perlunya perbaikan dan pemberian kemudahan bagi iklim investasi terutama dalam hal kepabeanan dan perijinan

27. Perlunya dicari solusi mengenai lembaga keuangan mikro yang dari segi aturan agak rumit karena bentuknya B3K (Bukan Bank Bukan Koperasi) agar tidak berbenturan dengan UU No.10 tentang perbankan juga dengan peraturan-peraturan perkoperasian
28. Perlunya adaptasi antara pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan UUPA (undang-undang pemerintahan Aceh) agar tidak terjadi benturan-benturan di kemudian hari
29. Perlu adanya standar pengukuran progress/kemajuan realisasi fisik (key performance indicator) untuk jenis bantuan bersifat non fisik. Progress penyerapan fisik itu sulit dinilai pada saat melakukan pemberian bantuan non fisik seperti pemberian modal kerja dengan sistem swakelola masyarakat contohnya penanaman mangrove. Berbeda halnya dengan pemberian bantuan fisik seperti perumahan yang dapat dinilai progress realisasi fisiknya.

Rencana Tindak Lanjut Bersama dari Pokja Perekonomian:

1. Penyusunan kebijakan dan program oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BRR, Donor/NGO, dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas, untuk percepatan pemulihan sendi-sendi kehidupan masyarakat NAD dan Nias-Sumut
2. Konsultasi secara intensif dan pelibatan masyarakat secara luas dalam penyusunan kebijakan dan program oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BRR, Donor/NGO, yang dituangkan dalam kerangka regulasi dan kerangka pembiayaan (investasi).
3. Penyempurnaan sistem, mekanisme dan prosedur perencanaan dan pelaksanaan untuk menjamin keberlanjutan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
4. Reposisi peran dan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BRR, Donor/NGO, dan masyarakat luas, untuk percepatan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
5. Inventarisasi dan transformasi asset Pasca BRR ke dalam program-program pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk menjamin keberlanjutan program.
6. Penyempurnaan terhadap Rencana Induk, Rencana Strategis, dan Rencana Aksi, untuk mengakomodasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias.
7. Peningkatan koordinasi diantara stakeholder (BRR, K/L, Pemda dan Donor/NGO) yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, terutama koordinasi antara BRR dan Pemda
8. Perlu dilakukan pemantapan peletakan pondasi-pondasi ekonomi dan pendekatan-pendekatannya pada kualitas dan sustainabilitas baik program dan kegiatan pembangunan NAD-Nias.

E. Bidang Pemulihan Kelembagaan dan Reintegrasi Mantan GAM

Rumusan yang diperoleh dari Pokja Kelembagaan:

- Rencana kerja BRR di lapangan sering berubah, karena disesuaikan dengan kebutuhan real di lapangan dan perubahan politik pada UU PA mengenai struktur kelembagaan
- Adanya konsistensi antar pelaksana pembangunan satker, pemda, dan donor, dimana antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya cukup banyak yang saling melengkapi, walaupun antara pelaksanaan dan perencanaan tidak konsisten.
- Koordinasi antar pelaksana program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi belum terlaksana secara baik dalam mekanisme yang tertata sistematis
- Masih lemahnya konsultasi dengan kalangan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dan program rehabilitasi dan rekonstruksi
- Kinerja Satker, selain tergantung dari kondisi lapangan, masalah peraturan dan perundangan dan keterlambatan pencairan DIPA, sangat tergantung pula dari Sumber Daya Manusianya

Rekomendasi dari Pokja Kelembagaan

- Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan di antara para stakeholder rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias
- Penentuan prioritas kegiatan dari Rencana Induk yang juga sesuai dengan Renstra BRR (yang tidak bermasalah)

Rencana Tindak Lanjut Bersama dari Pokja Kelembagaan

- Penyiapan keberlanjutan program dan peningkatan koordinasi, melalui :
- Inventarisasi aset bidang kelembagaan dan hukum, dilakukan pendataan dibagian aset management Deputi Keuangan BRR, kemudian pada akhirnya akan diserahkan kepada pengguna (user)
- Penyelesaian permasalahan pembangunan sarana berdasarkan 1) Tanah yang bermasalah, Perpu harus segera disahkan; serta 2) Daerah yang belum ada RDTR nya, agar segera diselesaikan oleh Pemda/BRR
- Sudah terjadi dialog tingkat bawah melalui koordinator regional yang baru dibentuk. Kedepan frekuensi dialog yang sudah ada perlu terus untuk ditingkatkan menjadi bagian dari musrenbang tingkat mukim, kecamatan, dan kab/kota sehingga perumusan rencana aksi (RKA-K/L) bersama antara BRR dan Pemda
- Peningkatan kapasitas perencana Bappeda sebagai tindak lanjut dari exit strategy

Rumusan yang diperoleh dari Pokja Reintegrasi Mantan GAM:

K3M

- Belum sepenuhnya kegiatan di bidang K3M yang terdapat di Rencana Induk terimplementasi dalam proses Rehabilitasi dan Rekontruksi NAD-Nias.
- Secara Umum, koordinasi belum berjalan dengan cukup intensif.
- Terbatasnya partisipasi masyarakat (di tingkat konsultasi) mulai dari Perencanaan hingga Pelaksanaan Program/Kegiatan di bidang K3M
- Terbatasnya media partisipasi masyarakat. Namun media yang ada saat ini sudah cukup baik
- Partisipasi masyarakat telah berlangsung dengan baik pada tingkat Pelaksanaan dan tingkat Perencanaan.

REINTEGRASI MANTAN GAM

Belum Terbuka dalam Sistem dan Mekanisme kelembagaan di BRA (perekrutan, penempatan SDM) secara khusus masih menggunakan sistem birokrasi Pemda.

Rekomendasi dari Pokja Reintegrasi Mantan GAM

K3M

- Perlu adanya penyesuaian rencana program/kegiatan dengan kebutuhan di lapangan
- Re-Evaluasi terhadap sistem koordinasi mulai dari pemegang kebijakan tertinggi hingga satker pelaksana dilapangan dan melaksanakan komitmen penyelenggaraan koordinasi
- Peningkatan peran aktif dan pasrtisipasi masyarakat penerima manfaat dalam setiap tahapan Rekonstruksi dan Rehabilitasi di bidang K3M

REINTEGRASI MANTAN GAM

- Berkonsentrasi dengan seluruh program yang telah disusun agar tetap sesuai dengan amanat dari MoU Helsinki
- Agar meningkatkan koordinasi secara lebih intensif dengan seluruh stakeholders yang turut serta dalam pembangunan Provinsi NAD
- Maksimalisasi terhadap peran *Forum Bersama* untuk mendapatkan solusi dalam rangka penyelesaian masalah yang muncul
- Mendorong peran aktif setiap BRA Kab/Kota dalam sosialisasi, pendampingan dan percepatan pelaksanaan program dan anggaran.

Rencana Tindak Lanjut Bersama dari Pokja Reintegrasi Mantan GAM

K3M

- Perlu adanya revisi lebih lanjut terhadap Rencana Induk khususnya di bidang K3M
- Memperbaiki sistem koordinasi antarseluruh stakeholder pelaksana kegiatan bidang K3M dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
- Menciptakan sebuah mekanisme /sistem kerja khusus, dalam rangka profesionalisme kerja pelaksana Rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias khususnya program/kegiatan K3M dengan mengikutsertakan peran aktif seluruh elemen masyarakat, terutama masyarakat sipil
- Perlu dirumuskan exit strategy (termasuk transfer of assets) terkait bila masa kerja BRR berakhir dan perlu dibangun *joint secretariat* untuk mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan.
- Perlu sinkronsiasi perencanaan antara BRR dan Pemda

REINTEGRASI MANTAN GAM

- Keberlanjutan dan percepatan pelaksanaan program/Kegiatan Reintegrasi
- Meneruskan program reintegrasi BRA yang belum selesai
- Memperkuat pelembagaan dan capacity building BRA Kab/kota
- Meningkatkan Koordinasi dengan dinas-dinas terkait, BRA Kab/Kota, KPA, LSM dan Lembaga Donor
- Adanya program khusus bagi korban trauma pasca bencana dan konflik
- Percepatan pengadaan lahan usaha bagi korban yang telah dikategorikan dalam kriteria penerima bantuan
- Koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh stakeholders dalam perencanaan dan pelaksanaan program
- Pemberdayaan peran seluruh BRA Kab/Kota dalam pelayanan bagi korban konflik.

PENUTUP

Akhir kata semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi seluruh *stakeholders* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan lembaga/negara donor yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui kegiatan "Lokakarya Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias: Membangun Sinergi Menuju Pemulihan Berkelanjutan" yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember di Banda Aceh.

Selain itu semoga Lokakarya yang telah diselenggarakan dapat mengoptimalkan koordinasi berbagai pihak terkait.